BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, diperlukan arah dan pedoman yang jelas melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bersama dan ketahanan daerah terhadap dinamika perubahan global dan nasional;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 dimulai pada 1 Januari 2027 dan berakhir pada 31 Desember 2027.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027; dan
c. pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I berisi pendahuluan;
b. bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
c. bab III berisi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. bab IV berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. bab VI berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g. bab VII berisi penutup.

Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Juli 2026

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

ABDUL HARIS WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya sistemik menuju perubahan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, yang dilakukan secara bertahap, gradual, fokus dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam merespon permasalahan pembangunan daerah yang diwujudkan dengan langkah-langkah masa depan dalam prinsip sinergi, kolaborasi dan harmoni. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen rencana pembangunan periode tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam sistem perencanan pembangunan nasional.

Berakhirnya RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016–2021 dan berlanjutnya kepemimpinan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 menandai dimulainya periode pembangunan jangka menengah baru di Kabupaten Sukoharjo. Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang baru melalui proses demokrasi telah diikuti dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 yang mengakomodir visi, misi, serta program unggulan kepala daerah terpilih. Tahun 2027 merupakan tahun dua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024. Selain itu, RKPD Tahun 2027 juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029. RKPD ini mendukung pula pencapaian tujuan pembangunan nasional, termasuk Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), melalui penjabaran program prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan kebutuhan lokal.

RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 juga merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RKPD ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.15-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dasar hukum utama yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, digunakan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur secara komprehensif tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyusunan dan perubahan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam prosesnya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga mengacu pada sejumlah regulasi pelengkap lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan turunannya. Ketentuan teknis perencanaan dan pelaporan juga merujuk pada beberapa peraturan menteri, di antaranya Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Dengan berpedoman pada seluruh ketentuan tersebut, RKPD Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang kredibel, akuntabel, dan dapat menjadi instrumen penggerak pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 dilandasi oleh hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, perkembangan isu-isu strategis, serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Proses perumusan dokumen ini turut mempertimbangkan program prioritas nasional, amanat pembangunan global, nasional, dan regional, regulasi yang berlaku, serta dinamika agenda pembangunan yang terus berkembang. Selain itu, perencanaan tahun 2027 juga mengacu pada proyeksi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027. Penyusunan RKPD 2027 mengedepankan sinergi antar sektor dan antar wilayah, serta dilaksanakan secara partisipatif melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang diperoleh dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten, termasuk pula penyerapan pokok-pokok pikiran DPRD. Dengan demikian, RKPD ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara holistik, integratif, dan berorientasi pada hasil.

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029, maka RKPD Tahun 2027 diarahkan dalam

rangka **"Pengembangan Perekonomian Daerah Termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan Serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah",** dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi: (1) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan; (2) penguatan promosi pariwisata berbasis digital.; (3) peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi,wisata; (4) penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital; (5) peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah termasuk antar destinasi wisata; (6) penguatan integrasi antar destinasi wisata; (7) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata; (8) penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata; (9) city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata; (10) pengembangan kepariwisataan danekosistem ekonomi kreatif yang holistik; (11) penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) syariah; dan (12) Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 dilaksanakan dengan menggunakan berbagai pendekatan, antara lain pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, serta gabungan pendekatan dari atas ke bawah *(top-down)* dan dari bawah ke atas *(bottom-up)*. Pendekatan ini dilakukan dengan berorientasi tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) guna memastikan seluruh dimensi pembangunan dapat diakomodasi secara menyeluruh dan saling mendukung. Proses penyusunan juga dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta keterukuran. Selain itu, dokumen ini disusun secara inovatif dan kreatif, dengan fokus pada pencapaian hasil *(outcome)* melalui pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, perencanaan berbasis risiko *(risk-based planning)*, serta berbasis pada hasil riset *(research-based planning)*. Keseluruhan proses ini dilakukan secara terpadu antar sektor dan lintas pemangku kepentingan, dengan menjunjung prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sukoharjo secara adil dan merata.

Dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi tersebut antara lain:

a. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi pelaksanaan, proyeksi pendanaan (perkiraan maju), serta perangkat daerah penanggung jawab yang wajib melaksanakannya dalam satu tahun anggaran;

b. Secara normatif, RKPD menjadi landasan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Bupati kepada DPRD untuk disepakati bersama sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sukoharjo;
c. Secara operasional, RKPD memberikan arahan bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah, baik dalam aspek pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi pedoman kerja bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) masing-masing yang berorientasi pada pencapaian program prioritas daerah;
d. Secara faktual, RKPD menjadi alat ukur utama dalam menilai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam merealisasikan program dan kegiatan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sukoharjo.

Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Persiapan, yang meliputi penyampaian surat edaran Bupati Sukoharjo tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, serta penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2027;
b. Konsultasi publik, sebagai sarana penyampaian informasi awal dan penghimpunan aspirasi pemangku kepentingan sekaligus pembukaan secara resmi rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
c. Forum perangkat daerah, yang mempertemukan seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas berdasarkan urusan pemerintahan;
d. Musrenbang wilayah (musrenbangcam) dan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah (rakortekrenbangda) untuk menyinergikan perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor;
e. Musrenbang Kabupaten, yang menjadi forum utama dalam perumusan kesepakatan prioritas pembangunan daerah;
f. Fasilitasi RKPD oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten;
g. Pembahasan rancangan akhir RKPD bersama DPRD Kabupaten Sukoharjo, melalui dialog interaktif antara eksekutif dan legislatif;
h. Penetapan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 melalui Peraturan Kepala Daerah.

1.2. Dasar Hukum

RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 disusun berdasarkan ketententuan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2027;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

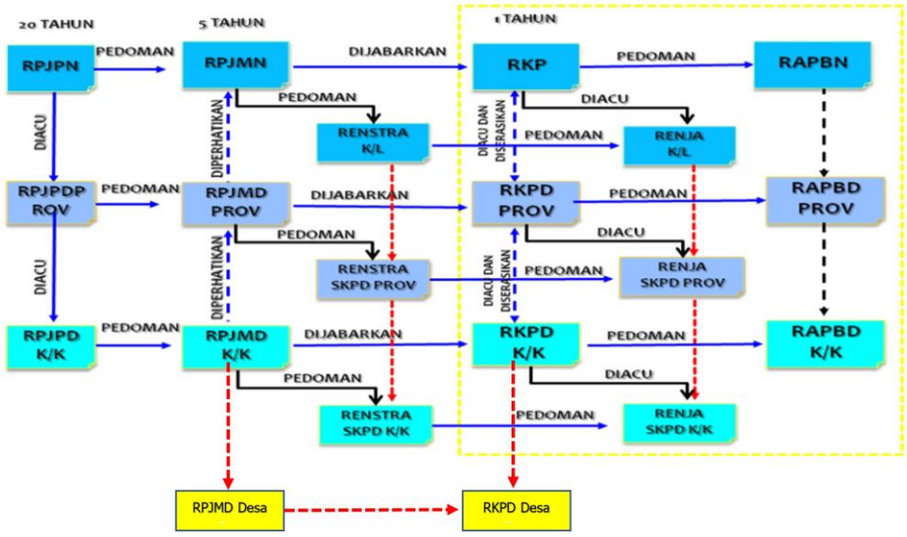
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan, dan RTRW Kabupaten Sukoharjo.

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan. Sehingga dokumen RKPD memiliki fungsi dan peran sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Dan pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambaran keterkaitan RKPD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Penjelasan masing-masing Dokumen Perencanaan terkait diuraikan sebagai berikut:

1. **Hubungan RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2027 dengan RKP 2027**
   Isu strategis dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2027 menjadi acuan penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo 2027. Tema dari RKP 2027 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"**. Sementara tema RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2027 adalah **"Pengembangan Perekonomian Daerah termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan, serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah"**. Jadi Kabupaten Sukoharjo mendukung pencapaian nasional pada aspek penguatan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melalui penguatan kemampuan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendukung kesinambungan program pembangunan nasional Kabupaten Sukoharjo melalui usulan lewat sistem aplikasi Krisna SELARAS dan Krisna DAK.
2. **Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.**
   RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 menjadi acuan dalam menyusun RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027. Isu strategis dan prioritas Provinsi Jawa Tengah yang terkait di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN. Secara khusus di tahun 2027 terkait isu penguatan UMKM, peningkatan produksi pangan, dan penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.
3. **Hubungan RKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.**
   RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun ketiga yang dilakukan dengan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah mencapai visi **"SUKOHARJO LEBIH MAJU, ADIL DAN BERMARTABAT"**
4. **Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah.**
   Prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2027, juga berasal dari identifikasi permasalahan-permasalahan

pembangunan sektoral tahun rencana yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 yang disinkronkan dengan proses *bottom up* melalui musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan diselaraskan juga dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Penyelarasan dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kemudian disampaikan kepada Bapperida untuk diverifikasi dan dikompilasi menjadi Rancangan RKPD Tahun 2027. Setelah disepakati melalui proses musrenbang RKPD Kabupaten, RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027.

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD, Dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 3) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 4) *Grand Design* Reformasi Birokrasi, 5) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo, 6) RAD Pengurangan Resiko Bencana, 7) Pedoman Pelaksanaan PUG di Kabupaten Sukoharjo, 8) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan 9) Aksi Penanganan Konflik Sosial. Dan dalam proses penyusunan RKPD ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2027 adalah untuk menjabarkan program pembangunan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029, menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 dan mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2027 adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang tertuang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2027;

1.5. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 dilaksanakan melalui pendekatan:

1. *Top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada

tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
2. *Bottom-up,* yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan;
3. *Teknokratik,* yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan.
4. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukan diakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo.
5. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
6. Holistik-tematik yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
7. Integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
8. Spasial mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *Pentahelix – ABCGM (Academic, Business, Community, Government, and Media)*
2. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Masyarakat/umat, dan *CSR*;
3. Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan awal RKPD Tahun 2027 dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
2. Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Konsultasi Publik, Musrenbang Kecamatan, Rapat Koordinasi

Pembangunan Daerah dan pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah. Selanjutnya draft rancangan RKPD dibahas secara intensif melalui rangkaian Rapat Koordinasi Pembangunan, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD serta Musrenbang Kabupaten;

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027, melalui tahapan pembahasan Prioritas Pembangunan sampai dengan program dan kegiatan oleh Bapperida Kabupaten Sukoharjo, Perangkat Daerah *(desk trilateral meeting)* pada rangkaian Musrenbang Kabupaten, dan memperhatikan pokok pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Sukoharjo serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas;
4. Penetapan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 yang berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027, hasil Pra Musrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional, Pra Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Provinsi, Musrenbang Kabupaten serta verifikasi akhir program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027.

Guna meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 didukung oleh sistem dan skema proses melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Adapun alur penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Musrenbang desa/kelurahan
2. Konsultasi Publik
3. Musrenbang Kecamatan
4. Forum Perangkat Daerah
5. Musrenbang Kabupaten
6. Penetapan RKPD

1.6. Sistematika Penyusunan

RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027, disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2025, permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik lokasi dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi dengan pemerintah kota/kabupaten sekitar. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah berdasarkan potensinya dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Administrasi

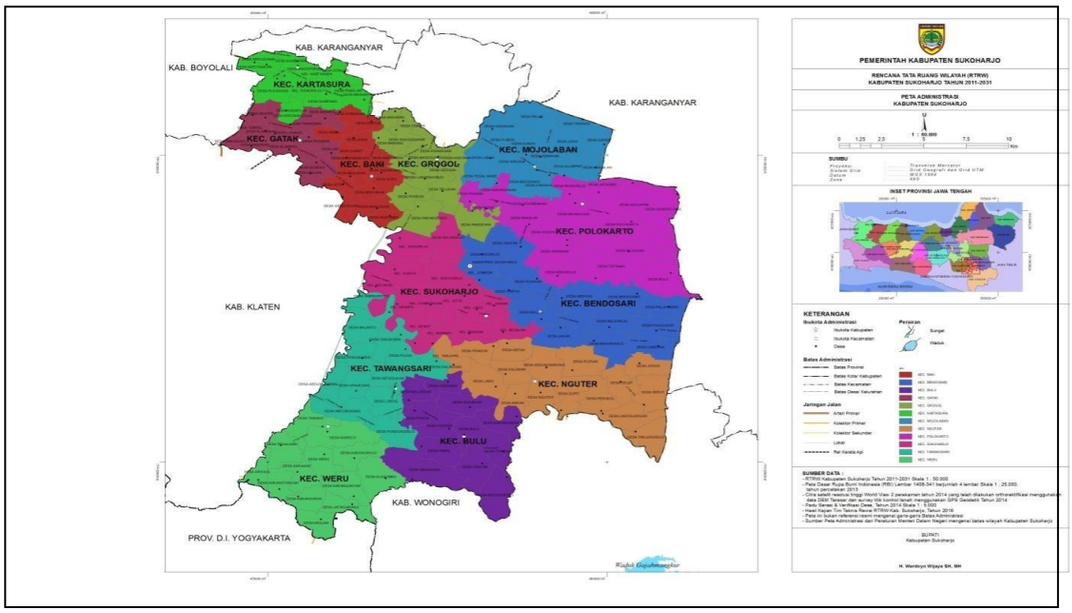
Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, maka luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah seluas 49.323 hektar.

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 17 kelurahan dan 150 desa. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada:

1. Permendagri 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY). Dimana batas wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak di Kabupaten Sukoharjo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kabupaten Gunung Kidul.
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Wonogiri.
3. Permendagri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta.
4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar.
5. Permendagri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali.
6. Permendagri Nomor 63 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa

Tengah, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Perda No.1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

2. Letak Kondisi Geografis

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara 110° 57' 33,70" BT – 110° 42' 6,79" BT, dan antara 7° 32' 17,00" LS – 7° 39' 42,00" LS.

Batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
Sebelah Timur	:	Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
Sebelah Barat	:	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

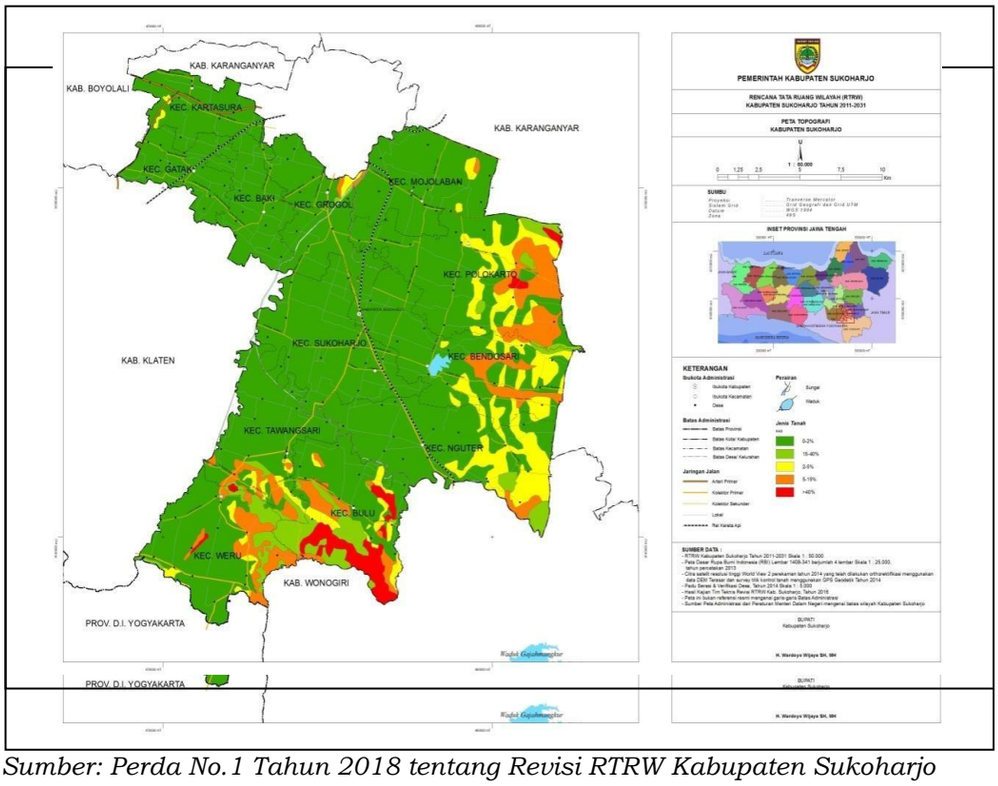
3. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa dataran (meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban) serta kawasan berbukit-bukit (meliputi wilayah Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Nguter, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Weru). Ketinggian wilayahnya berkisar antara 80-125 mdpl, wilayah terendah berada di Kecamatan Grogol dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Polokarto.

Jika diperhatikan Gambar 2.2. berikut, Kabupaten Sukoharjo memiliki dua kelompok besar kelerengan yaitu kelerengan landai dan kelerengan curam. Kelerengan landai memiliki kisaran kelerengan (0-8%) yang terdapat Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian

Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura. Kelerengan agak landai (8-15%) terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru, dan Kecamatan Tawangsari. Sedangkan sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru, dan Kecamatan Tawangsari memiliki kelerengan yang beragam karena terdiri dari kelerengan landai dan curam.

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Perda No.1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

4. Geologi

Ditinjau dari segi geologi terdapat empat jenis batuan yang menyusun wilayah Kabupaten Sukoharjo yaitu Alluvium, Batuan Gunung Api Merapi, Batuan Gunung Api Lawu dan Formasi Mandalika. Berdasarkan peta persebaran geologi di Kabupaten Sukoharjo terlihat bahwa:

a. Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bendosari dan sebagian Kecamatan Polokarto merupakan tanah Alluvium. Tanah Alluvium merupakan tanah hasil erosi yang diendapkan di dataran rendah. Ciri-ciri Tanah Alluvium adalah berwarna kelabu dan subur. Tanah ini cocok untuk tanaman padi, palawija, tebu, kelapa, tembakau, dan buah-buahan.

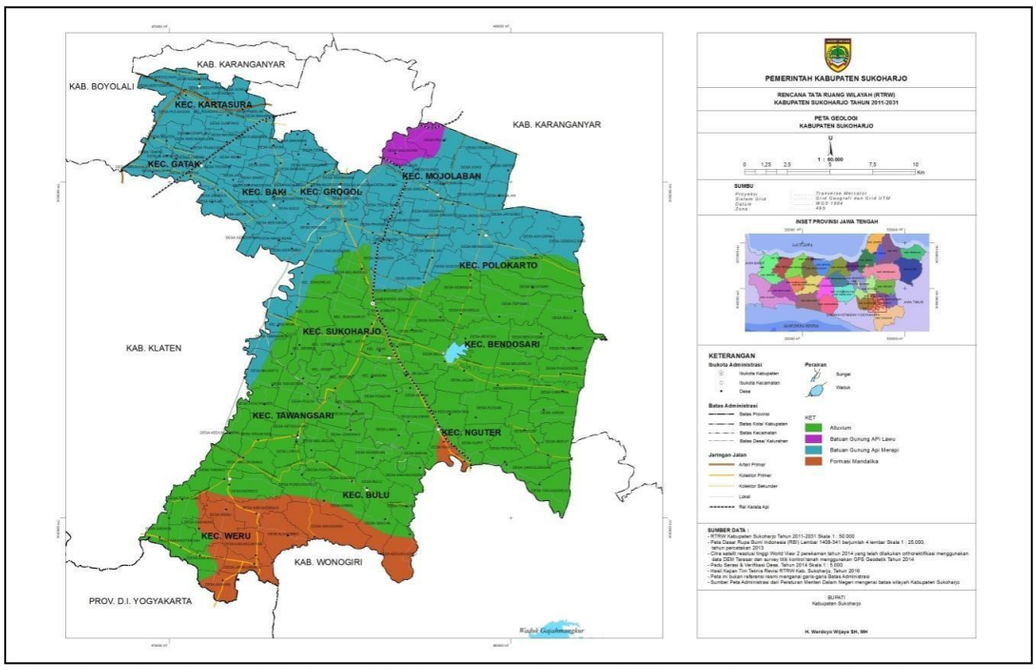
b. Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, serta sebagian kecil Kecamatan Polokarto merupakan

tanah hasil dari Gunung Api Merapi menyebabkan tanah pada kawasan tersebut merupakan tanah yang subur.

c. Kecamatan Weru serta sebagian Kecil Kecamatan Nguter merupakan tanah Formasi Mandalika. Tanah Formasi Mandalika merupakan salah satu formasi geologi di Pegunungan selatan Jawa Bagian Timur. Formasi ini tersusun atas breksi gunung api, lava dan tuff, sisipan batu pasir dan batu lanau.

d. Tanah dengan jenis batuan Gunung Api Lawu terdapat pada sebagian kecil Kecamatan Mojolaban.

Gambar 2. 3 Peta Geologi Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Perda No.1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

5. Hidrologi

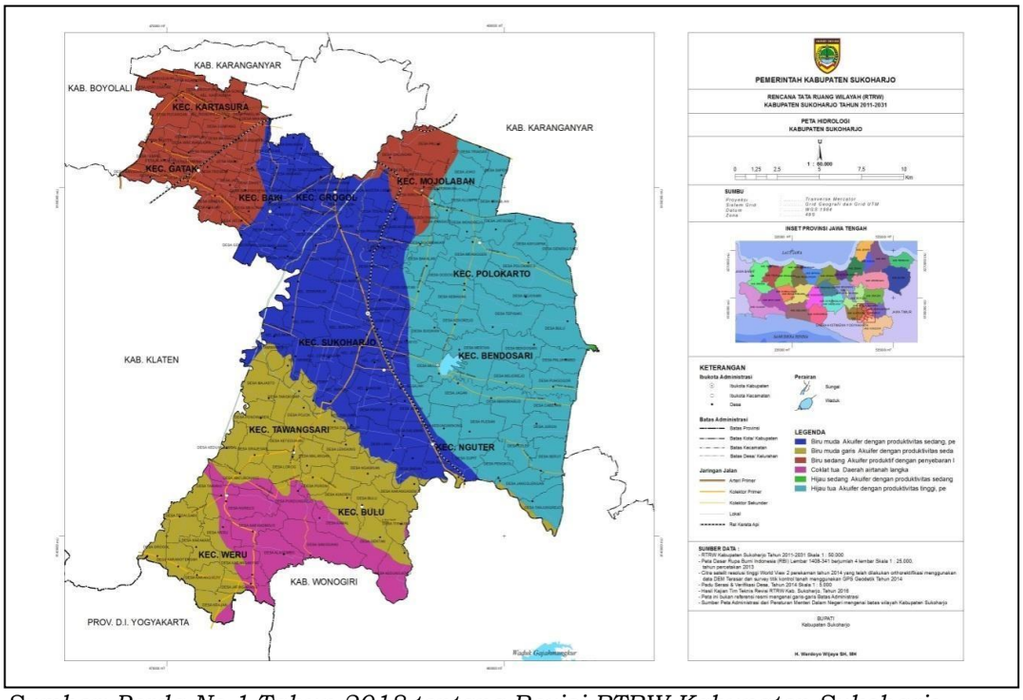
Kondisi hidrologi di Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan oleh keberadaan sumber daya air yang ada di Kabupaten Sukoharjo, meliputi sungai, mata air, waduk, dan embung. Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hulu, dengan anak-anak sungai sekitar 25 yaitu Sungai Walikan, Padas, Ambil-ambil, Pacinan, Jlantah, Songgorunggi, Buntung, Atasaji, Gunting, Karanganyar, Siluwur, Pakelan, Brambang, Tempel, Samin, Langsur, Ranjing, Buret, Umet, Dumpul, Larangan, Gede, Krecekan, Cabak dan Palur.

Mata air yang ada di Kabupaten Sukoharjo tersebar di 5 Kecamatan yaitu di Kecamatan Bulu (mata air Pecinan, mata air Baseng, mata air Kamal dan mata air Sirahan), di Kecamatan Baki mata air Kluyon, di Kecamatan Weru (mata air Banyubiru, mata air Kedungdowo, mata air Kedunggandong dan mata air Beji Jatingarang), di Kecamatan Tawangsari mata air Pundungrejo dan di Kecamatan kartasura (mata air Desa Wirogunan dan mata air Gayam Pitu).

Waduk yang ada di Kabupaten Sukoharjo, yakni Waduk Mulur, yang mampu menampung air sejumlah kurang lebih 3.435.000 m^3 dan mengairi sawah seluas 4.787 Ha. Disamping itu juga terdapat Dam Colo yang mengairi lahan seluas kurang lebih 10.577 hektar.

Sedangkan embung-embung terdapat di Kecamatan Bulu (Embung Pacinan dan Embung Njo'o), Embung Ponowaren di Kecamatan Tawangsari, Embung Majasto di Kecamatan Bendosari, Embung Serut di Kecamatan Nguter, di Kecamatan Sukoharjo (embung Kriwen dan Embung Kenep) dan di Kecamatan Weru (Embung Weru dan Embung Grogol).

Gambar 2. 4 Peta Hidrologi Kabupaten Sukoharjo



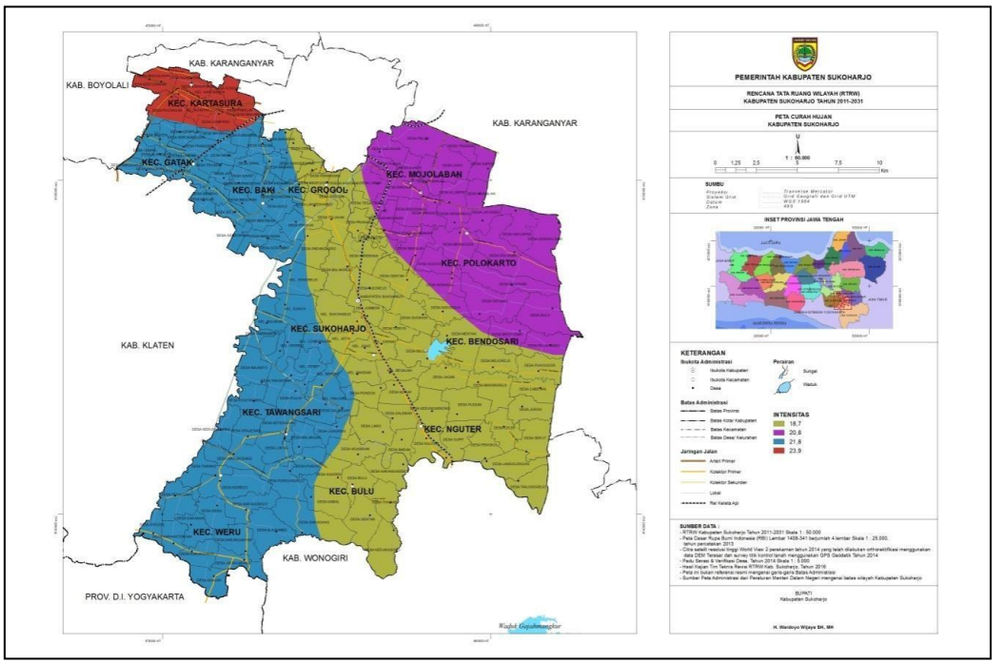
Sumber: Perda No.1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

6. Klimatologi

Kondisi klimatologi Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi iklim tropis dengan 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan penghujan serta temperatur sedang. Suhu udara di Kabupaten Sukoharjo berkisar antara 23ºC sampai dengan 34ºC sedangkan kelembapan udara bervariasi antara 75% sampai dengan 92%.

Curah hujan rata-rata pada Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data yang tersedia tercatat berkisar 1.000–2.500 mm. Kabupaten Sukoharjo terbagi pada 3 kategori intensitas curah hujan, antara 1.000–1.500 mm, 1.500–2.000 mm dan 2.000–2.500 mm. Wilayah dengan intensitas curah hujan terbesar di Kabupaten Sukoharjo terdapat pada Kecamatan Kartasura, sedangkan wilayah dengan intensitas curah hujan sedang terdapat pada Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Weru, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto serta sebagian Kecamatan Sukoharjo, wilayah dengan intensitas curah hujan terendah terdapat pada Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bulu dan sebagian Kecamatan Bendosari.

Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Perda No.1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

7. Penggunaan Lahan

Menurut RTRW, luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 49.323,30 hektar atau sekitar 1,5% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menurut fungsinya, penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan lindung memiliki fungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Data peruntukan lahan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Peruntukan Lahan Kabupaten Sukoharjo

No	Peruntukan Lahan	Luas (ha)
1	Hutan Lindung	297,00
2	Hutan Produksi	70,00
3	Hutan Rakyat	3.500,00
4	Pertanian Lahan Basah	23.502,00
5	Pertanian Lahan Kering	3.362,00
6	Perkebunan	708,00
7	Peternakan	138,00
8	Pertambangan	166,00
9	Industri	2.352,00
10	Pariwisata	9,00
11	Permukiman	15.092,00
12	Lainnya	127,00
Jumlah		49.323,00

Sumber: Perda No.1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RTRW Provinsi jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo masuk dalam WP Subosukawonosarten, yaitu Wilayah Pengembangan yang meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Arahan pengembangan WP Subosukawonosraten meliputi:

1. Menyelaraskan pengembangan Kota Surakarta dan kabupaten di sekitarnya;
2. Mendorong koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam hal:
   - pengembangan sektor ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
   - koordinasi dan pengelolaan pengembangan kawasan permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;
   - penyediaan prasarana dan sarana di bidang; transportasi, air minum, persampahan, drainase, pengelolaan limbah;
   - penyediaan ruang terbuka hijau Kota Surakarta dengan Kabupaten lain yang berbatasan;
   - Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
   - penanganan bencana.
3. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
4. menerpadukan pembangunan wilayah Perbatasan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Timur;
5. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan
6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

Untuk menyelaraskan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten sekitarnya dan untuk merealisasikan arahan pengembangan WP Subosukawonosraten, Kabupaten Sukoharjo telah melakukan review terhadap Perda RTRW pada tahun 2024.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari 4 (empat) komponen utama yang meliputi:

1. pengembangan Kabupaten sebagai penumpu pangan;
2. pengembangan Kabupaten sebagai Kawasan Permukiman kompak yang didukung sektor industri, perdagangan dan pariwisata;
3. pengembangan Kabupaten dengan infrastruktur yang memadai; dan
4. pengembangan Kabupaten secara berkelanjutan dan berketahanan.

1. Kawasan Budidaya

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031 rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan peruntukan hutan produksi,

kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Penjabarannya sebagai berikut:

a. Kawasan hutan lindung
   Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 297 hektar berada di Kecamatan Bulu.
b. Kawasan peruntukan hutan produksi
   Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 70 hektar. Kawasan ini berada di Kecamatan Bulu dan Tawangsari.
c. Kawasan hutan rakyat
   Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 3.500 hektar. Kawasan ini tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Weru, Tawangsari, Bulu, Nguter, Bendosari dan Polokarto.
d. Kawasan peruntukan pertanian
   Kawasan pertanian Kabupaten Sukoharjo secara garis besar terbagi atas 4 peruntukan yaitu pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 26.864 hektar di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari pertanian lahan basah dan lahan kering. Untuk pertanian lahan basah memiliki luas 23.502 hektare dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo sedangkan untuk pertanian lahan kering seluas 3.362 hektar hanya tersebar di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, Nguter, Polokarto, Weru, Bulu dan Tawangsari. Kawasan peruntukan holtikultura tersebar pada lingkungan permukiman seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 708 hektar hanya terletak di Kecamatan Polokarto. Kawasan peruntukan peternakan seluas 138 hektar tersebar di Kecamatan Nguter, Polokarto, Bendosari, Weru dan Tawangsari.
e. Kawasan peruntukan perikanan
   Kawasan ini terbagi atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya air tawar. Untuk kawasan perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah kabupaten sedangkan kawasan perikanan budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan yang berada pada kawasan permukiman.
f. Kawasan peruntukan pertambangan
   Kawasan peruntukan pertambangan Kabupaten Sukoharjo terbagi atas 2 jenis yaitu penambangan bahan mineral bukan logam. Lokasi penambangan bahan mineral bukan logam seluas 166 hektar tersebar di Kecamatan Bendosari, Nguter, Weru dan Polokarto.
g. Kawasan peruntukan industri
   Kawasan peruntukan industri Kabupaten Sukoharjo dialokasikan seluas 2.352 hektar. Kawasan ini tersebar di seluruh wilayah

kecuali Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru, Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Baki. Pengembangan industri ini diarahkan di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari. Untuk industri rumah tangga tersebar di lingkungan sekitar permukiman seluruh kecamatan.

h. Kawasan peruntukan pariwisata
Kawasan ini terdiri atas kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Kawasan wisata alam di Kabupaten Sukoharjo terletak di Gunung Taruwangsa di Kecamatan Tawangsari dan Batu Seribu di Kecamatan Bulu. Kawasan wisata budaya di Kabupaten Sukoharjo meliputi wisata situs bersejarah yang terletak di Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol, dan Wisata religi/ziarah yang terletak di Kecamatan Weru, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Tawangsari dan Kecamatan Kartasura. Wisata benda cagar budaya berada di Veteran Bangun Nusantara Kecamatan Bendosari. Untuk kawasan wisata buatan secara garis besar memiliki bentuk berupa pariwisata kreatif dan wisata air. Pariwisata kreatif berupa desa dan kelurahan binaan yang memiliki potensi produk kreatif tersebar di Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo, Desa Ngrombo dan Mancasan Kecamatan Baki, Desa Wirun dan Bekonang Kecamatan Mojolaban, Desa Banaran Kecamatan Grogol serta Desa Trangsan Kecamatan Gatak sedangkan wisata air yang terletak di Bendosari berupa daya tarik wisata Waduk Mulur, Water world Pandawa di Kecamatan Grogol dan Royal WaterBoom di Kecamatan Grogol.

i. Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan permukiman di Kabupaten Sukoharjo terbagi atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Untuk kawasan permukiman perkotaan tersebar di desa/kelurahan di kawasan perkotaan seluruh kecamatan. Kawasan permukiman perdesaan tersebar di seluruh kawasan perdesaan Kabupaten Sukoharjo.

j. Kawasan peruntukan lainnya
Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Sukoharjo berupa kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan ini memiliki luas 127 hektar meliputi Grup 2 Kopassus di Kecamatan Kartasura, Brigif 6/Kostrad dan Batalyon Infanteri 413/Bremoro di Kecamatan Mojolaban.

2. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:

a. Kerawanan Bencana Banjir
Banjir termasuk bencana paling sering terjadi di wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Sukoharjo. Banjir dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia. Berdasarkan faktor alam, banjir dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi yang dapat mengakibatkan debit air meningkat dan menurunkan permukaan tanah. Keberadaan sungai-sungai di wilayah Kabupaten Sukoharjo

di satu sisi memberikan keuntungan ketersediaan air di Kabupaten Sukoharjo, namun beberapa tahun terakhir terjadi perubahan musim yang tidak menentu dan dapat dapat memicu hujan ekstrem yang memberikan ancaman banjir pada wilayah yang datar dan tidak memiliki kawasan resapan. Kemudian faktor manusia, banjir dapat disebabkan oleh perilaku seperti membuang sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar, pembangunan di tepi aliran sungai, sistem drainase yang terganggu dan lain sebagainnya. Berikut ini adalah risiko bencana banjir di Kabupaten Sukoharjo.

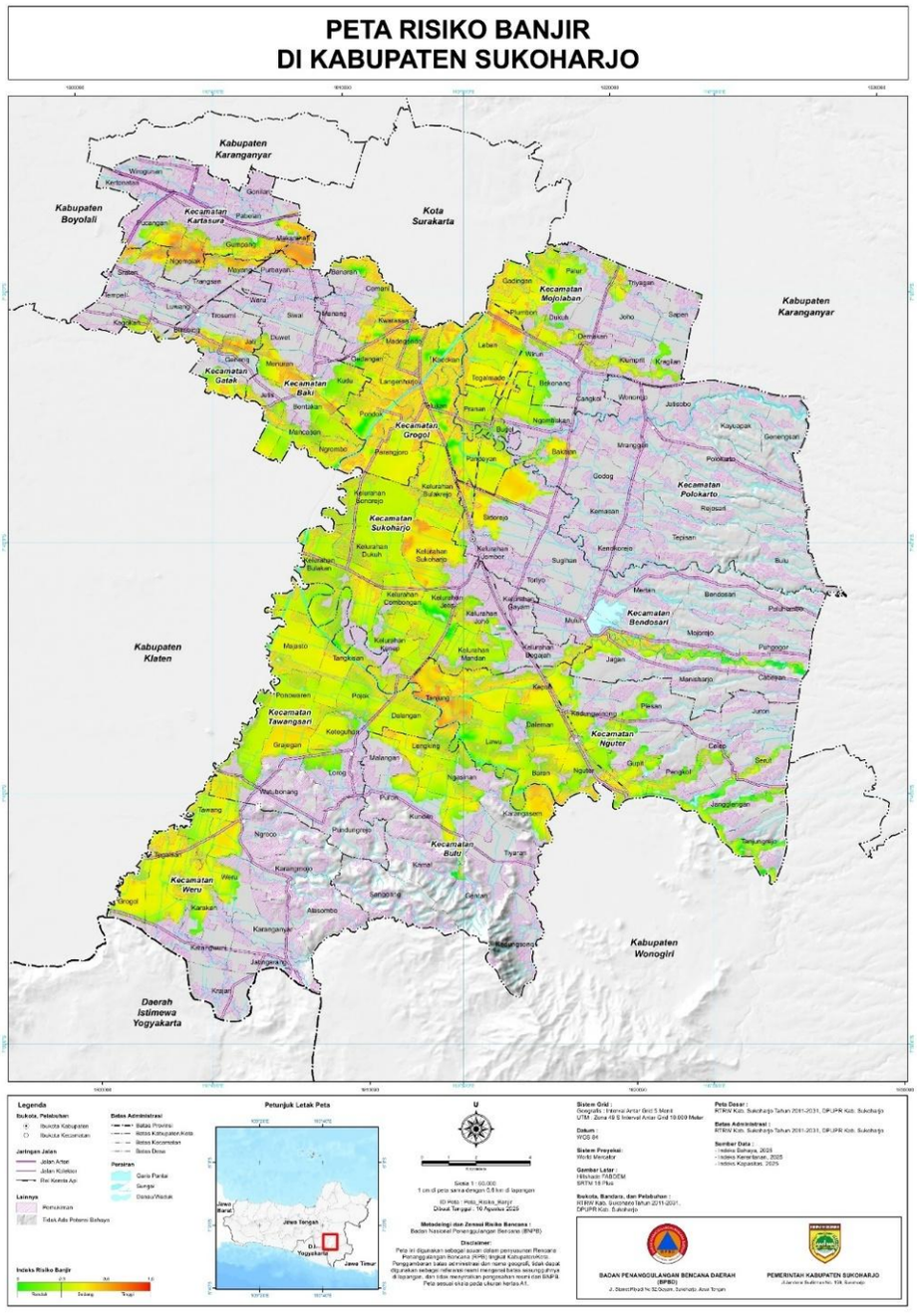
Tabel 2. 2 Risiko Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Baki	293,76	766,50	5,49	1.065,75	Sedang
2	Bendosari	185,13	553,95	0,54	739,62	Sedang
3	Bulu	252,45	751,23	0,00	1.003,68	Sedang
4	Gatak	102,06	390,87	31,77	524,70	Sedang
5	Grogol	378,59	2.292,18	0,00	2.670,77	Sedang
6	Kartasura	88,51	423,68	85,59	597,78	Sedang
7	Mojolaban	339,39	1.376,11	13,41	1.728,91	Sedang
8	Nguter	1.130,49	1.882,62	32,22	3.045,33	Sedang
9	Polokarto	173,34	424,80	0,00	598,14	Sedang
10	Sukoharjo	782,21	2.875,90	7,20	3.665,31	Sedang
11	Tawangsari	535,41	2.064,51	0,54	2.600,46	Sedang
12	Weru	200,25	1.237,05	0,00	1.437,30	Sedang
Kabupaten Sukoharjo		**4.461,59**	**15.039,40**	**176,76**	**19.677,75**	**Sedang**

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa potensi risiko banjir di Kabupaten Sukoharjo didominasi pada kelas rendah. Adapun lokasi yang memiliki risiko banjir terluas berada pada daerah tengah Kabupaten Sukoharjo yang bertopografi datar dan ditambah dengan curah hujan ekstrem yang cenderung lama sehingga debit air sungai meluap. Hal ini juga diperparah dengan minimnya tindakan mitigasi banjir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai untuk membersihkan saluran air

Gambar 2. 6 Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

b. Kerawanan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sukoharjo kerap terjadi di perbukitan rawan longsor dan cenderung merupakan longsoran translasi (pergerakan massa tanah pada bidang gelincir rata/landai) dan rotasi, yang dipicu oleh hujan deras. Faktor pendorong penyebab bencana tanah longsor adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material tanah atau batuan antara lain; tingginya intensitas hujan, kemiringan lereng, dan alih fungsi lahan. Sedangkan, faktor pemicu yang merupakan penyebab bergeraknya material di Kabupaten Sukoharjo antara lain; potensi gempabumi, getaran akibat kendaraan dan beban bangunan.

Berikut ini adalah sebaran risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Sukoharjo.

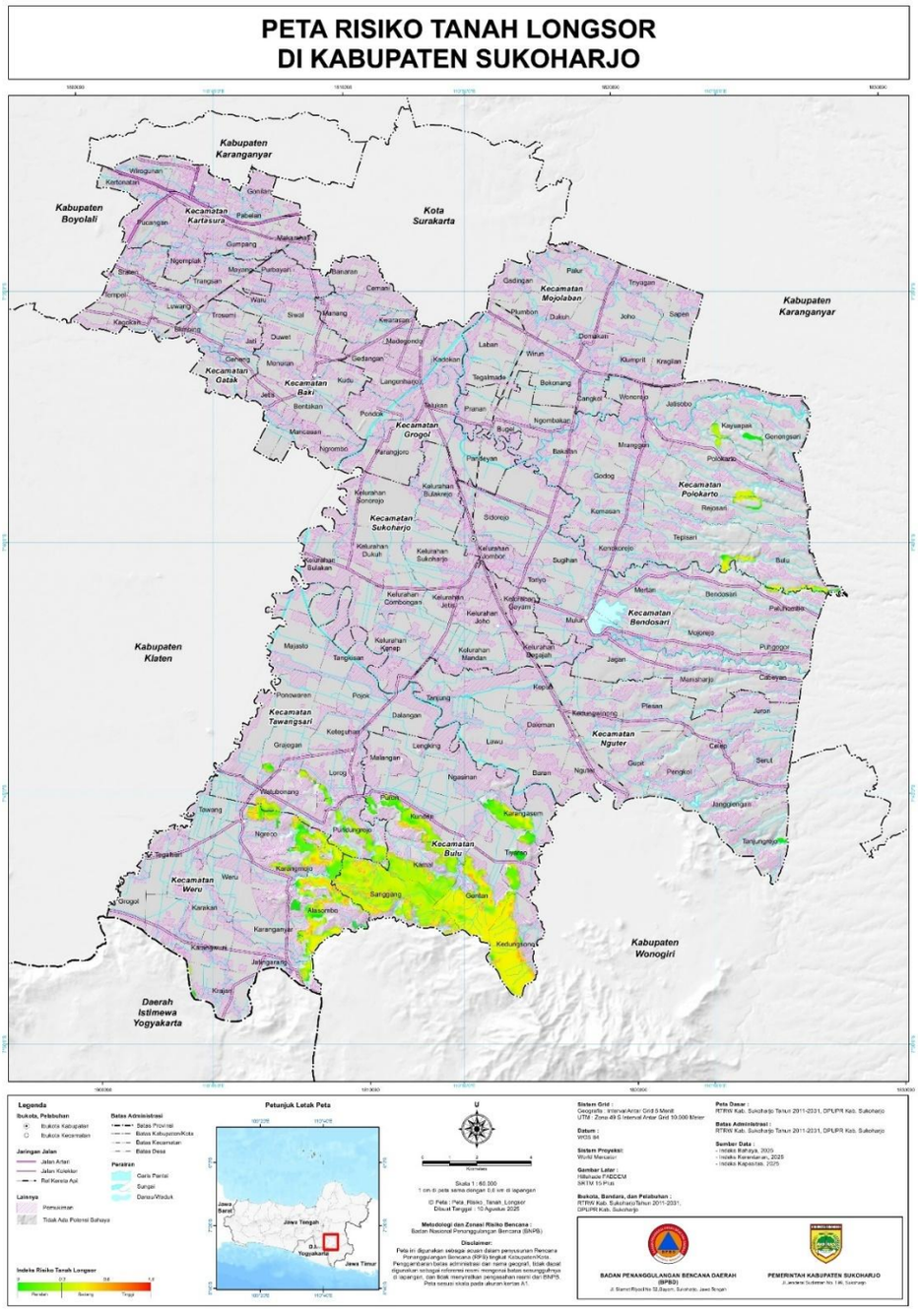
Tabel 2. 3 Risiko Tanah Longsor Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Baki	-	-	-	-	-
2	Bendosari	5,13	6,21	0,00	11,34	Sedang
3	Bulu	541,71	1.253,07	2,43	1.797,21	Sedang
4	Gatak	-	-	-	-	-
5	Grogol	-	-	-	-	-
6	Kartasura	-	-	-	-	-
7	Mojolaban	-	-	-	-	-
8	Nguter	5,31	0,00	0,00	5,31	Rendah
9	Polokarto	50,91	74,46	0,00	125,37	Sedang
10	Sukoharjo	-	-	-	-	-
11	Tawangsari	100,08	84,60	0,00	184,68	Sedang
12	Weru	226,44	319,05	0,18	545,67	Sedang
Kabupaten Sukoharjo		**929,58**	**1.737,39**	**2,61**	**2.669,58**	**Sedang**

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

Terdapat 6 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki terhadap bencana tanah longsor dengan tingkat sedang. Sebaran terluas risiko tanah longsor terletak pada daerah selatan Kabupaten Sukoharjo yang merupakan daerah perbukitan dan tersusun dari formasi geologi batuan gunungapi, dicirikan dengan adanya batuan besar dengan tekstur mudah lepas apabila terkena air atau goncangan. Untuk identifikasi longsor, penting untuk menentukan tipe dan penyebabnya, sehingga tindakan perbaikan atau pencegahan dapat dilakukan. Seringkali, tanda-tanda awal dari gerakan tanah yang berdekatan dengan jalan raya dapat dilihat dari adanya permukaan *scrap* (kadang-kadang tidak jelas, karena tertutup tumbuh-tumbuhan). Dibandingkan dengan erosi, kejadian longsor sering memberikan dampak yang bersifat langsung dalam waktu yang singkat dan menjadi bencana. Hal ini dikarenakan proses pelepasan, pengangkutan dan pergerakannya berlangsung dalam waktu yang cepat dengan material yang jauh lebih besar atau lebih banyak jika dibandingkan dengan kejadian erosi. Saat ini sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana tanah longsor dalam pelestarian dan perlindungan wilayah masih terbatas. Oleh karena itu pengetahuan, pengenalan dan identifikasi area-area yang berpotensi longsor menjadi sangat penting.

Gambar 2. 7 Peta Risiko Tanah Longsor Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

c. Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrim

Wilayah Kabupaten Sukoharjo seluruhnya masuk ke dalam area rawan bencana cuaca ekstrim, hal ini dilihat dari kondisi topografi datar dan tutupan lahan. Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Bencana cuaca ekstrim, biasanya terjadi di musim pancaroba atau pergantian musim dari penghujan ke musim kemarau, atau sebaliknya. Angin Kencang sering terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten

Sukoharjo. Di mana intensitas meningkat setiap tahun. Dampak dari bencana ini sampai menyebabkan robohnya atap rumah warga dan robohnya pepohonan di kanan kiri jalan menyebabkan terganggunya akses jalan.

Berikut ini adalah risiko bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Sukoharjo berikut.

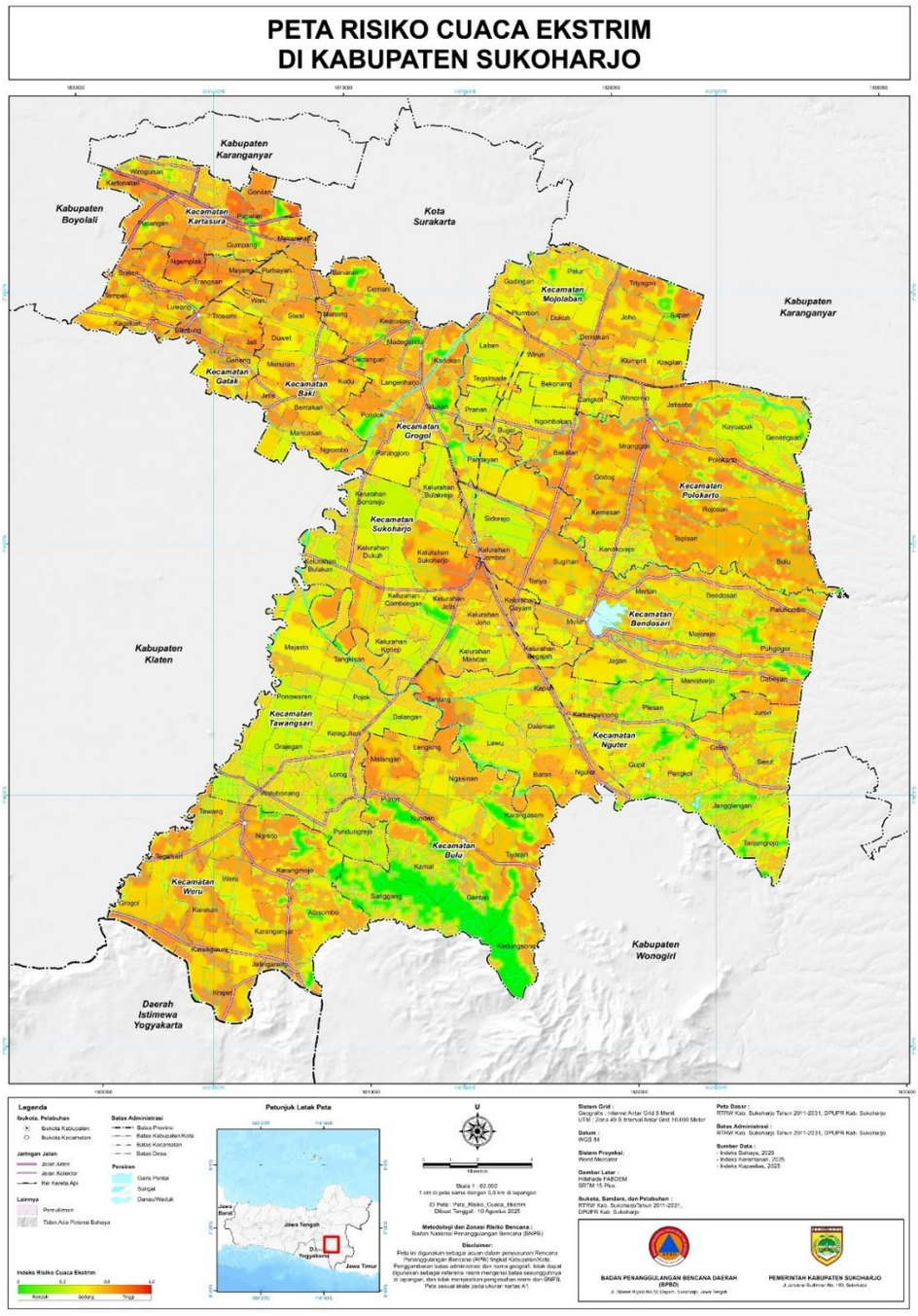
Tabel 2. 4 Risiko Cuaca Ekstrim Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko(ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Baki	23,67	2.052,99	209,79	2.286,45	Sedang
2	Bendosari	269,79	4.973,49	335,99	5.579,27	Sedang
3	Bulu	1.398,16	2.799,71	404,16	4.602,03	Tinggi
4	Gatak	30,27	1.204,29	792,21	2.026,77	Tinggi
5	Grogol	276,14	2.448,07	422,84	3.147,04	Tinggi
6	Kartasura	104,15	1.411,05	650,04	2.165,24	Tinggi
7	Mojolaban	119,30	3.464,08	198,58	3.781,96	Tinggi
8	Nguter	478,25	5.137,35	175,83	5.791,43	Tinggi
9	Polokarto	173,17	4.851,84	1.724,43	6.749,43	Tinggi
10	Sukoharjo	126,04	4.210,10	343,06	4.679,20	Sedang
11	Tawangsari	132,51	3.848,26	0,00	3.980,78	Sedang
12	Weru	220,58	3.269,64	1.034,14	4.524,37	Sedang
Kabupaten Sukoharjo		**3.352,03**	**39.670,89**	**6.291,06**	**49.313,98**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

Terdapat 7 kecamatan yang mempunyai risiko tinggi dari 12 kecamatan yang berpotensi terjadi bencana cuaca ekstrim dengan jumlah luasan 49.313,98 Ha dengan kelas risiko tinggi maka perlu melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap bencana cuaca ekstrim. Risiko bencana cuaca ekstrem termasuk pada kelas tinggi. Pada saat curah hujan tinggi, angin kencang di kawasan ini berpotensi tinggi untuk terjadi.

Gambar 2. 8 Peta Risiko Cuaca Ekstrim Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

d. Kerawanan Bencana Gempa Bumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan. Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan. Berikut ini adalah risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Sukoharjo.

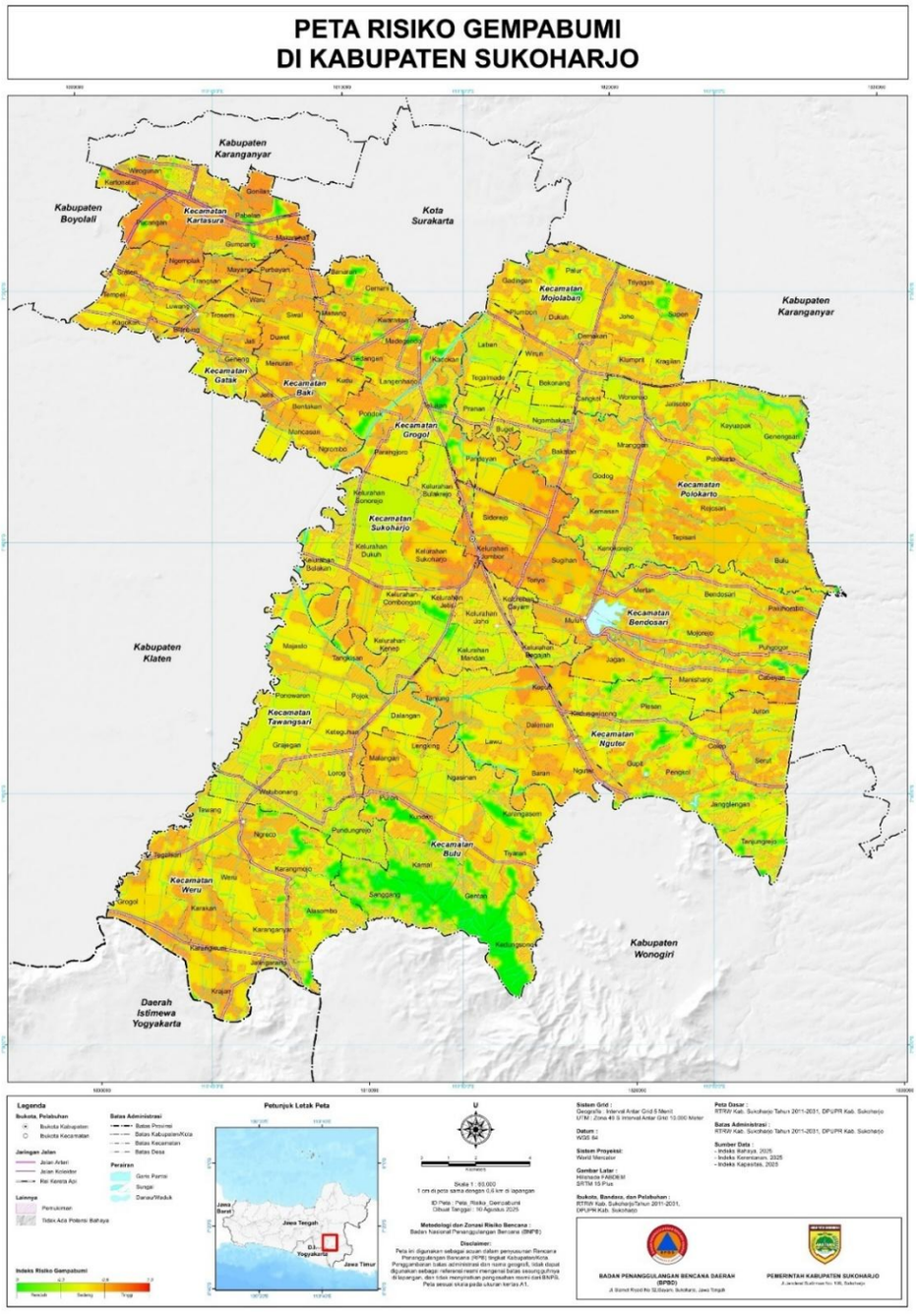
Tabel 2. 5 Risiko Gempa Bumi Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Baki	24,03	2.221,63	40,79	2.286,45	Sedang
2	Bendosari	248,63	4.639,71	690,93	5.579,27	Tinggi
3	Bulu	1.383,32	3.217,54	1,17	4.602,03	Sedang
4	Gatak	34,13	1.966,70	25,95	2.026,77	Sedang
5	Grogol	299,26	2.846,52	1,26	3.147,04	Sedang
6	Kartasura	114,88	1.217,45	832,92	2.165,24	Tinggi
7	Mojolaban	130,27	3.651,69	0,00	3.781,96	Sedang
8	Nguter	417,89	5.239,75	133,80	5.791,43	Sedang
9	Polokarto	242,56	6.434,59	72,29	6.749,43	Sedang
10	Sukoharjo	134,67	4.407,15	137,39	4.679,20	Sedang
11	Tawangsari	118,72	3.862,05	0,00	3.980,78	Sedang
12	Weru	248,66	4.266,54	9,17	4.524,37	Sedang
Kabupaten Sukoharjo		**3.397,02**	**43.971,31**	**1.945,65**	**49.313,98**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

Wilayah di Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat bahaya Tinggi terhadap bencana Gempabumi, Kondisi wilayah Kabupaten Sukoharjo yang terdapat 3 sesar aktif yang mempengaruhi potensi gempabumi di Kabupaten Sukoharjo di pengaruhi oleh adanya sesar Merapi-Merbabu, Sesar Baribis Kendeng Segmen Demak dan Subduksi lempeng di selatan Pulau Jawa. Kecamatan dengan luas risiko tertinggi adalah Kecamatan Polokarto dengan total luas 6.749,43 atau 13,69 % dari total luas risiko gempabumi tinggi.

Gambar 2. 9 Peta Risiko Gempa Bumi Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

e. Kerawanan Bencana Likuefaksi

Likuefaksi adalah fenomena hilangnya kekuatan pada lapisan tanah utamanya yang berperan sebagai lapisan tanah pondasi menyebabkan menurunnya daya dukung pondasi secara cepat sehingga menimbulkan kegagalan pondasi atau kerusakan infrastruktur yang berada di atasnya. Disamping itu, fenomena likuefaksi dapat pula memicu pergerakan tanah dalam mekanisme yang komplek sehingga tingkat ancaman bencana menjadi lebih tinggi terhadap keberadaan masyarakat dan infrastruktur. Likuefaksi merupakan salah satu bahaya ikutan gempabumi, dengan demikian potensi likuefaksi dipengaruhi oleh adanya potensi bencana gempabumi yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Berikut ini adalah risiko bencana likuefaksi di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan parameter diatas.

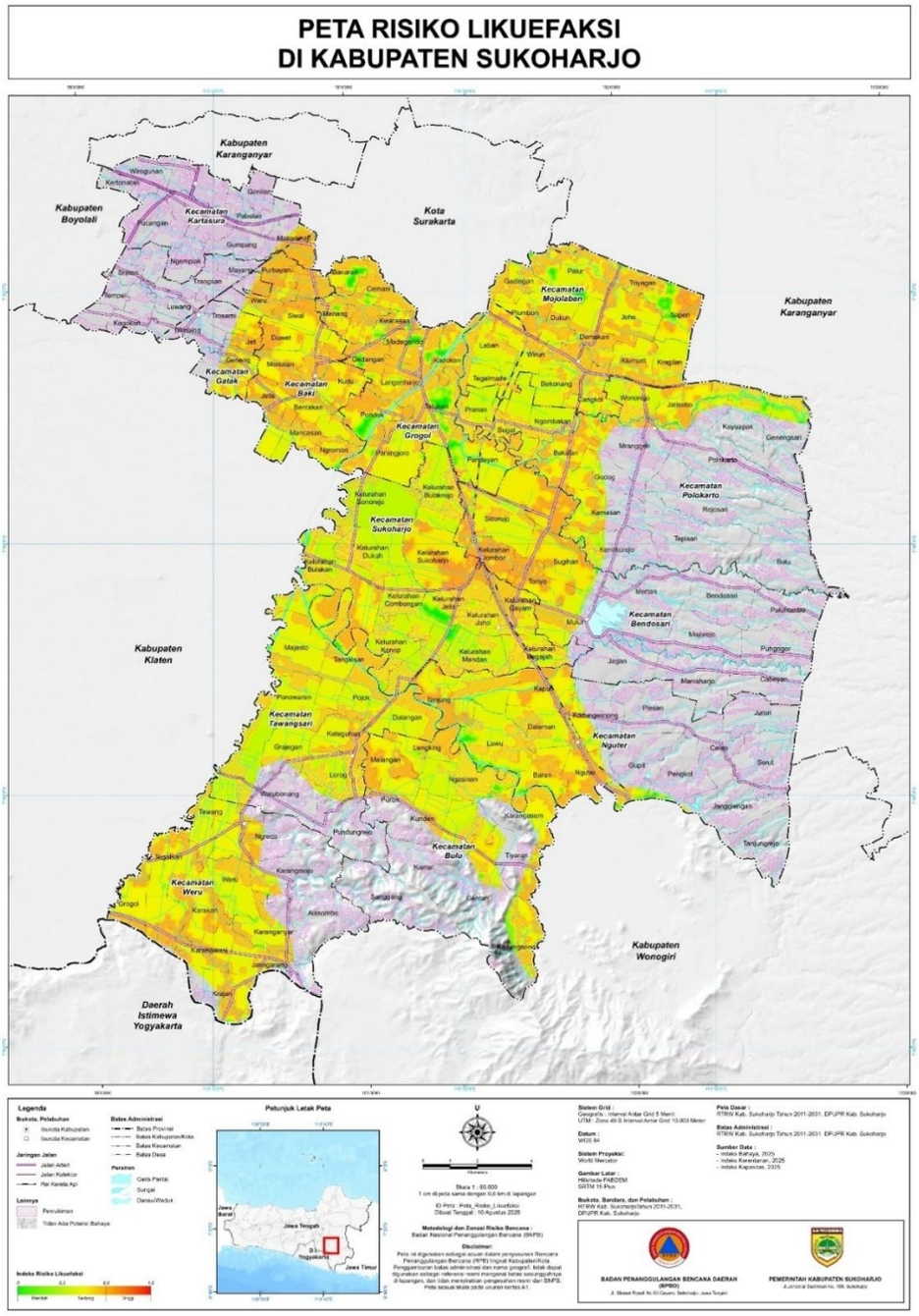
Tabel 2. 6 Risiko Bencana Likuefaksi Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Baki	28,24	2.196,20	0,00	2.224,44	Sedang
2	Bendosari	20,43	1.856,97	9,63	1.887,03	Sedang
3	Bulu	104,13	2.025,81	0,00	2.129,94	Sedang
4	Gatak	12,33	394,56	0,00	406,89	Sedang
5	Grogol	325,08	2.819,95	0,00	3.145,03	Sedang
6	Kartasura	5,76	144,27	0,00	150,03	Sedang
7	Mojolaban	133,20	3.640,48	6,21	3.779,90	Sedang
8	Nguter	115,87	2.289,12	0,00	2.405,00	Sedang
9	Polokarto	102,41	2.358,73	0,00	2.461,14	Sedang
10	Sukoharjo	145,70	4.466,01	19,08	4.630,79	Sedang
11	Tawangsari	68,74	3.054,29	0,00	3.123,03	Sedang
12	Weru	66,87	2.946,24	0,00	3.013,11	Sedang
Kabupaten Sukoharjo		**1.128,77**	**28.192,62**	**34,92**	**29.356,31**	**Sedang**

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo tahun 2027-2030

Seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo berisiko terjadi likuefaksi dengan tingkat risiko sedang. Walaupun demikian luas risiko likuefaksi terbesar berada di Kecamatan Sukoharjo yang memiliki tutupan lahan tinggi dan cenderung berada di tengah wilayah. Luasan risiko terkecil berada di Kecamatan Kartasura yang berada di paling utara wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 2. 10 Peta Risiko Bencana Likuefaksi Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo tahun 2027-

f. Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dapat didefinisikan sebagai pembakaran atau kebakaran tanaman yang tidak terkendali dan tidak ditentukan dalam pengaturan alami seperti hutan, padang rumput, semak belukar, atau tundra, yang mengonsumsi bahan bakar alami dan menyebar berdasarkan kondisi lingkungan (misalnya, angin, topografi). Bahan bakar, oksigen, dan sumber panas membantu penyebaran kebakaran hutan. Sebagian besar kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sukoharjo disebabkan oleh adanya aktivitas manusia dalam pembakaran sampah yg dekat dengan posisi lahan kering, kelalaian lain yaitu pada saat aktivitas pembakaran tersebut tidak di awasi sehingga menyambar ke lahan

kering di sekitarnya. Berikut ini adalah risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan parameter diatas.

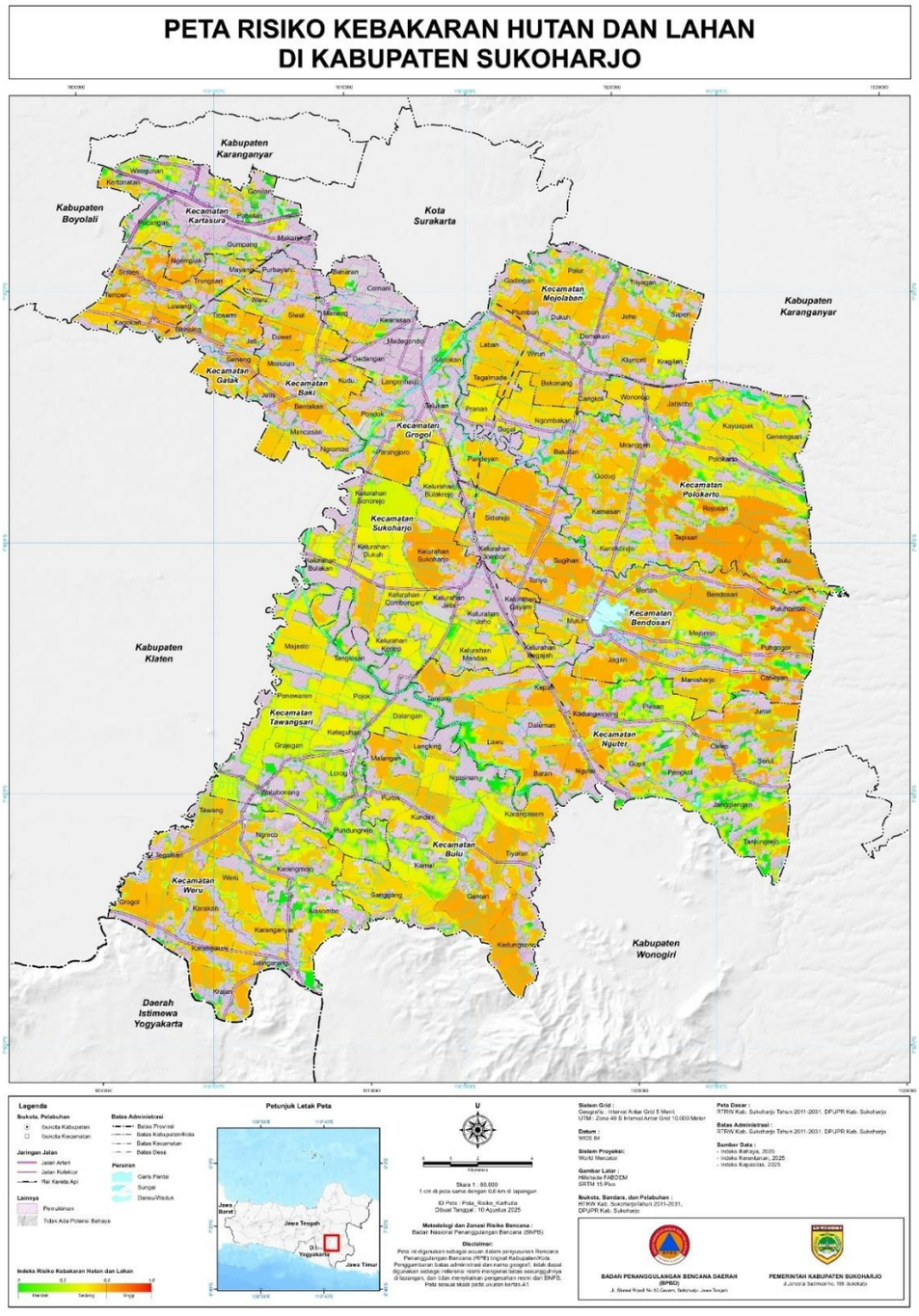
Tabel 2. 7 Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Baki	162,18	1.209,69	7,92	1.379,79	Sedang
2	Bendosari	492,75	1.894,14	1.465,92	3.852,81	Tinggi
3	Bulu	385,65	2.292,66	596,61	3.274,92	Tinggi
4	Gatak	160,29	873,90	331,65	1.365,84	Tinggi
5	Grogol	274,23	969,48	0,00	1.243,71	Sedang
6	Kartasura	315,13	401,81	97,02	813,96	Tinggi
7	Mojolaban	311,85	2.101,32	106,47	2.519,64	Tinggi
8	Nguter	817,29	2.155,95	879,48	3.852,72	Tinggi
9	Polokarto	592,74	3.163,95	1.095,75	4.852,44	Tinggi
10	Sukoharjo	350,55	2.367,27	319,77	3.037,59	Tinggi
11	Tawangsari	450,90	2.179,26	0,00	2.630,16	Sedang
12	Weru	432,54	2.411,01	31,77	2.875,32	Sedang
Kabupaten Sukoharjo		**4.746,10**	**22.020,44**	**4.932,36**	**31.698,90**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

Wilayah risiko bencana terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan tinggi terdapat di 8 kecamatan dari 12 kecamatan yang berpotensi terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Tingginya kelas risiko di kecamatan tersebut tidak berarti seluruh wilayah Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan tersebut memiliki risiko kebakaran hutan dan lahan tinggi melainkan terdapat beberapa wilayah Desa/Kecamatan yang memiliki risiko bencana tinggi karena Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan salah satu bencana yang terjadi hampir di setiap tahun di lokasi tersebut. Luas risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sukoharjo yaitu 31.698,90 Ha dengan kecamatan yang memiliki luas tertinggi yaitu Kecamatan Polokarto dengan luas risiko 4.852,44 Ha atau 9,58% dari luas risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dikarenakan Kecamatan Polokarto memiliki tutupan lahan rendah dan banyak ditemui lahan perkebunan dan pertanian yang masih dikelola konvensional.

Gambar 2. 11 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo tahun 2027-2030

g. Kerawanan Bencana Kekeringan

Kekeringan di Kabupaten Sukoharjo disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Kekeringan ini berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Ada tenggang waktu mulai berkurangnya hujan sampai menurunya elevasi air sungai, waduk, danau dan elevasi muka air tanah. Berikut ini adalah risiko bencana kekeringan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan parameter diatas.

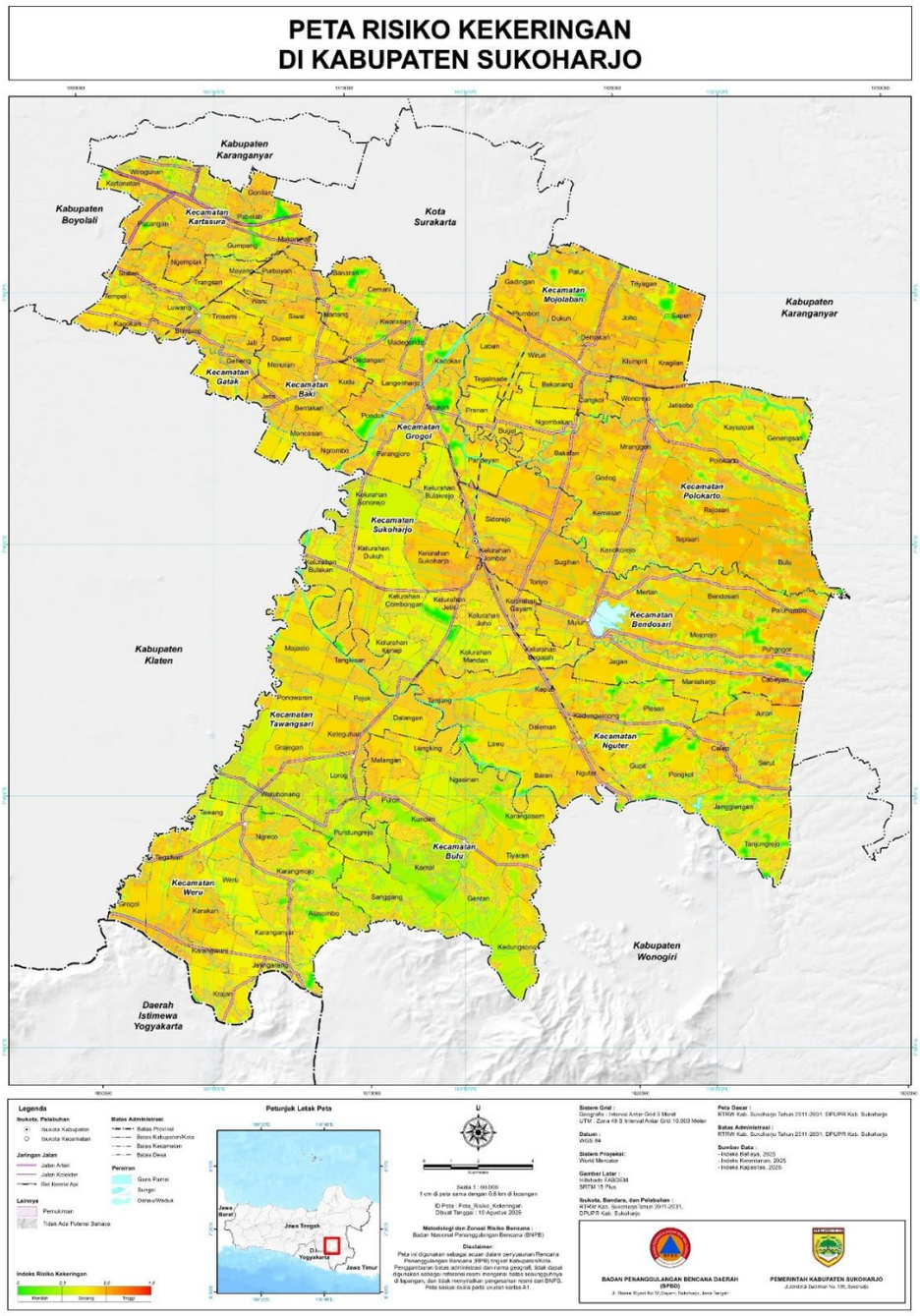
Tabel 2. 8 Risiko Kekeringan Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Baki	22,50	2.263,95	0,00	2.286,45	Sedang
2	Bendosari	253,58	5.271,55	54,14	5.579,27	Sedang
3	Bulu	507,50	4.094,53	0,00	4.602,03	Sedang
4	Gatak	35,57	1.991,20	0,00	2.026,77	Sedang
5	Grogol	297,83	2.849,21	0,00	3.147,04	Sedang
6	Kartasura	128,66	2.036,58	0,00	2.165,24	Sedang
7	Mojolaban	117,49	3.650,42	14,05	3.781,96	Sedang
8	Nguter	407,10	5.384,33	0,00	5.791,43	Sedang
9	Polokarto	172,26	6.519,65	57,53	6.749,43	Sedang
10	Sukoharjo	131,25	4.547,94	0,00	4.679,20	Sedang
11	Tawangsari	124,40	3.856,38	0,00	3.980,78	Sedang
12	Weru	261,79	4.262,58	0,00	4.524,37	Sedang
Kabupaten Sukoharjo		**2.459,94**	**46.728,33**	**125,71**	**49.313,98**	**Sedang**

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

Wilayah risiko bencana kekeringan di Kabupaten Sukoharjo termasuk kelas sedang dengan total luas 49.313,98 ha termasuk dalam kelas sedang. Kekeringan di Kabupaten Sukoharjo lebih di pengaruhi oleh penurunan muka air tanah karena adanya alih fungsi lahan di daerah hulu atau daerah tangkapan air hujan. Selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi geografis khususnya di bagian selatan yang berupa perbukitan karst.

Gambar 2. 12 Peta Risiko Kekeringan Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

h. Kerawanan Bencana Kegagalan Teknologi

Bencana kegagalan teknologi merupakan semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Faktor penyebab dari kegagalan teknologi dibagi menjadi dua, yakni dari faktor manusia sebagai faktor utama dan faktor alam sebagai pelengkap. Kegagalan teknologi disebabkan oleh aspek kesalahan desain, pengoperasian, maupun kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, kegagalan teknologi juga dapat disebabkan oleh adanya kebocoran reaktor nuklir, kebakaran, sabotase, dan dampak ikutan dari bencana alam. Berikut ini adalah

risiko kegagalan teknologi di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan parameter diatas.

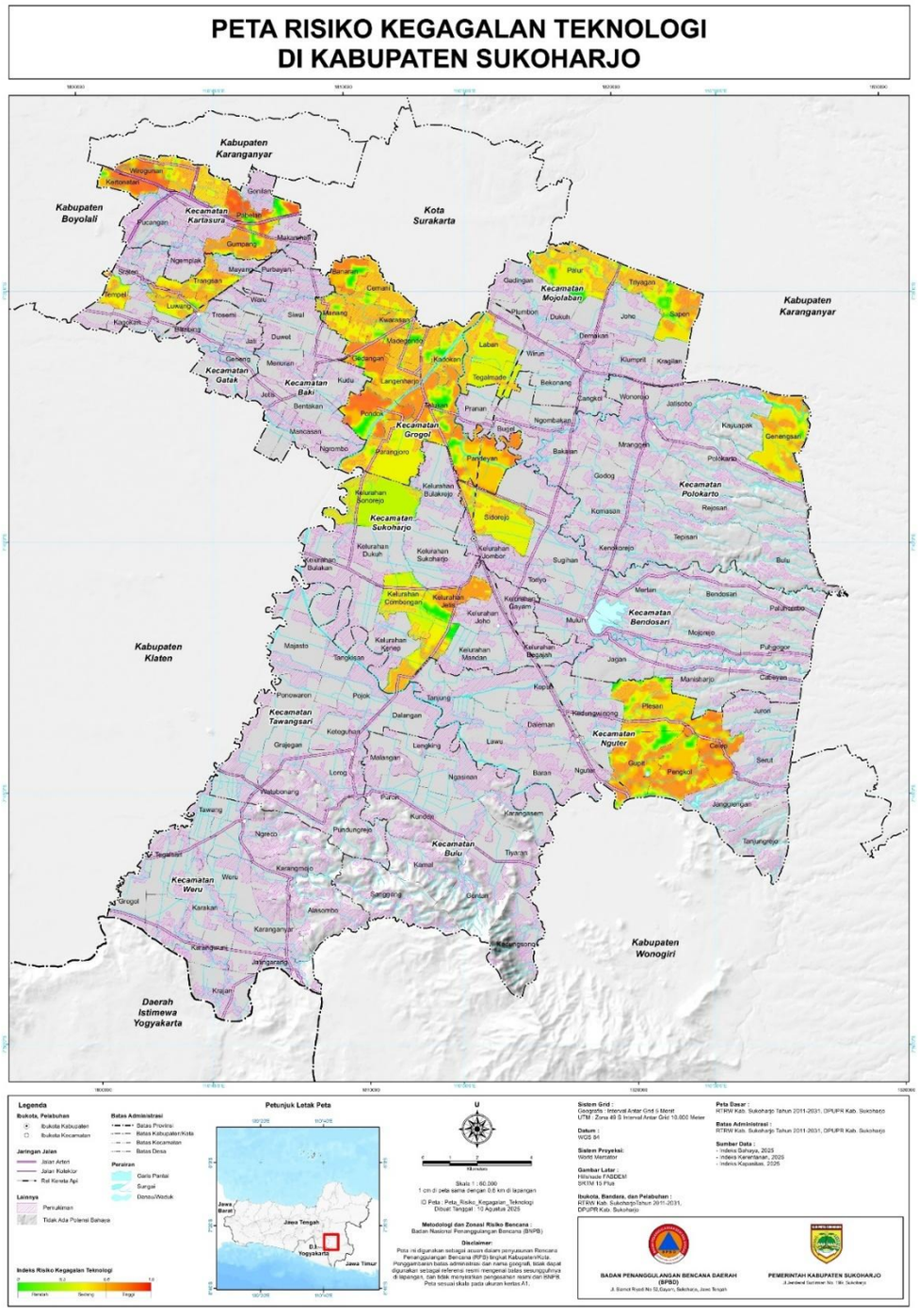
Tabel 2. 9 Risiko Kegagalan Teknologi Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Baki	0,99	0,99	0,72	2,70	Tinggi
2	Bendosari	14,40	392,31	0,54	407,25	Sedang
3	Bulu	-	-	-	-	-
4	Gatak	29,06	446,76	0,27	476,10	Sedang
5	Grogol	306,89	2.159,26	670,59	3.136,74	Tinggi
6	Kartasura	94,96	425,54	470,22	990,72	Tinggi
7	Mojolaban	130,05	1.184,58	23,85	1.338,48	Sedang
8	Nguter	145,89	940,95	497,79	1.584,63	Tinggi
9	Polokarto	41,76	412,20	21,15	475,11	Sedang
10	Sukoharjo	107,10	1.026,90	113,49	1.247,49	Tinggi
11	Tawangsari	0,09	0,18	0,09	0,36	Sedang
12	Weru	-	-	-	-	-
Kabupaten Sukoharjo		**871,18**	**6.989,68**	**1.798,71**	**9.659,57**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

wilayah di Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana Kegagalan Teknologi seluas 9.659,57 ha yang berada pada 5 kecamatan dari 10 kecamatan yang berpotensi terjadi. Potensi berkembangnya Industri di Kabupaten Sukoharjo mengakibatkan timbulnya potensi bencana non alam yaitu kegagalan teknologi, Terdapat 9 industri penghasil limbah B3 di Kabupaten Sukoharjo, industri penghasil limbah terbesar adalah PT. Sritex yang bergerak dibidang tekstil dengan volume 2.340 ton/tahun, sedangkan penghasil limbah terkecil yaitu PT. Suwasta dengan volume limbah 240 liter. Selain industri tersebut, juga terdapat potensi limbah B3 dari aktivitas fasilitas pelayanan kesehatan seperti beberapa rumah sakit di Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 2. 13 Peta Risiko Kegagalan Teknologi Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

i. Kejadian Luar Biasa

Bencana Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sukoharjo dianalisis dari data kemunculan kasus penyakit Malaria, Demam Berdarah Denue (DBD), Campak, Difteri dan Hepatitis B yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. Berikut ini adalah risiko kejadian luar biasa di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan parameter diatas.

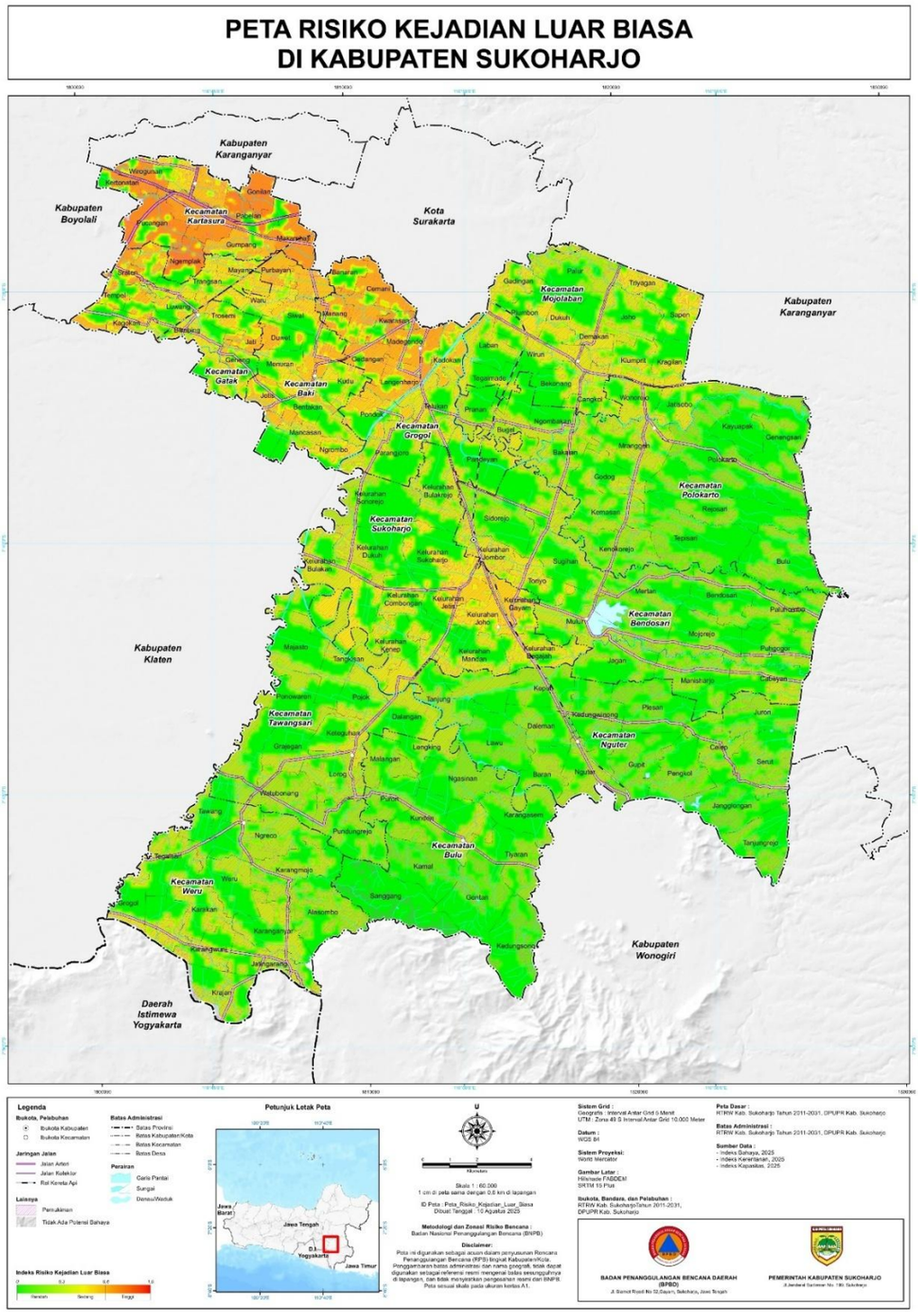
Tabel 2. 10 Risiko Kejadian Luar Biasa Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Risiko				
		Luas Risiko (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Baki	761,99	1.523,47	0,99	2.286,45	Sedang
2	Bendosari	4.711,80	867,46	0,00	5.579,27	Sedang
3	Bulu	4.507,18	94,85	0,00	4.602,03	Rendah
4	Gatak	652,68	1.325,77	48,33	2.026,77	Tinggi
5	Grogol	1.055,00	2.032,60	59,44	3.147,04	Tinggi
6	Kartasura	273,77	647,85	1.243,62	2.165,24	Tinggi
7	Mojolaban	1.908,91	1.873,05	0,00	3.781,96	Sedang
8	Nguter	5.787,02	4,41	0,00	5.791,43	Rendah
9	Polokarto	5.837,63	911,80	0,00	6.749,43	Sedang
10	Sukoharjo	2.388,19	2.290,91	0,09	4.679,20	Sedang
11	Tawangsari	3.147,50	833,28	0,00	3.980,78	Sedang
12	Weru	3.390,41	1.133,96	0,00	4.524,37	Sedang
Kabupaten Sukoharjo		**34.422,10**	**13.539,41**	**1.352,47**	**49.313,98**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

wilayah di Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana Kejadian Luar Biasa (KLB) seluas 49.313,98 ha yang berada pada 3 kecamatan dari 12 kecamatan yang berpotensi terjadi. Kelas risiko di Kecamatan tersebut tidak berarti seluruh wilayah Kecamatan yang berada di Kecamatan tersebut memiliki risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) tinggi melainkan terdapat beberapa desa yang memiliki risiko bencana tinggi. Kecamatan dengan luas risiko tertinggi adalah Kecamatan Polokarto dengan luas risiko 6.749,43 Ha atau 13,69 % dari total luas risiko.

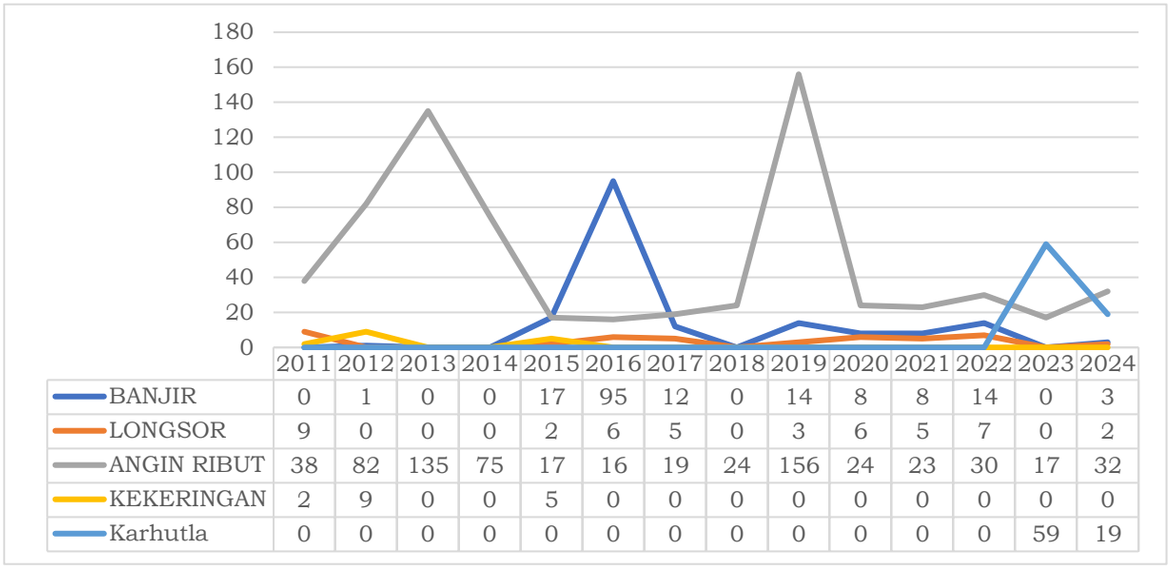
Gambar 2. 14 Peta Risiko Kejadian Luar Biasa Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

Jumlah potensi bencana di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan sejarah kebencanaan dan analisis menggunakan pendekatan SIG dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan di daerah. Bencana-bencana yang berpotensi di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 9 (sembulan) jenis potensi bahaya meliputi Gempabumi, Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Kegagalan Teknologi, Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Likuefaksi. Berikut adalah jumlah kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 2. 15 Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sukoharjo

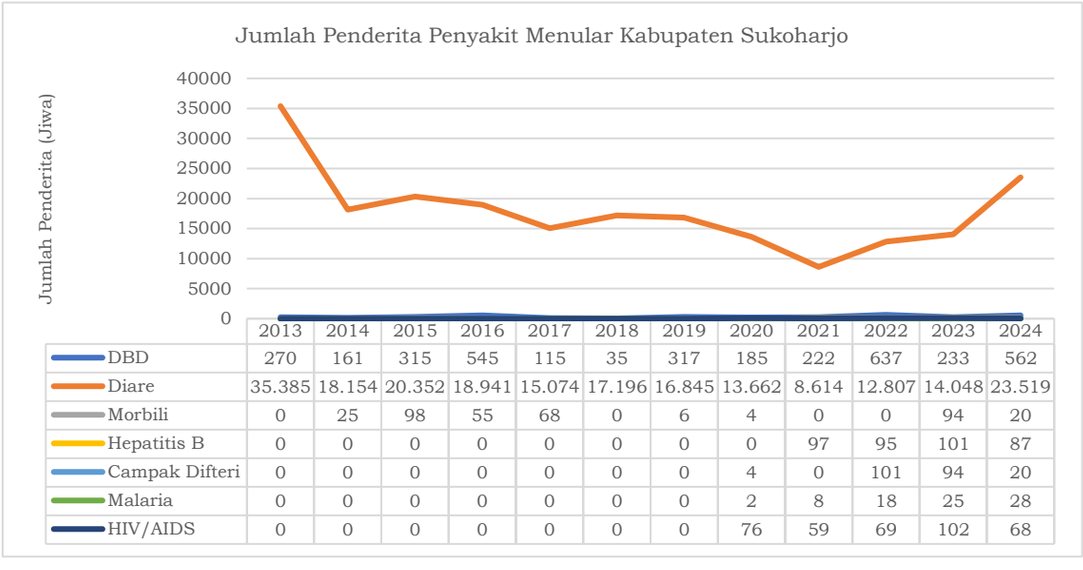


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BANJIR	0	1	0	0	17	95	12	0	14	8	8	14	0	3
LONGSOR	9	0	0	0	2	6	5	0	3	6	5	7	0	2
ANGIN RIBUT	38	82	135	75	17	16	19	24	156	24	23	30	17	32
KEKERINGAN	2	9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karhutla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	19

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

Selain potensi bencana alam tersebut, potensi berkembangnya Industri di Kabupaten Sukoharjo mengakibatkan timbulnya potensi bencana non alam yaitu kegagalan teknologi, Terdapat 9 industri penghasil limbah B3 di Kabupaten Sukoharjo, industri penghasil limbah terbesar adalah PT. Sritex yang bergerak dibidang tekstil dengan volume 2.340 ton/tahun, sedangkan penghasil limbah terkecil yaitu PT. Suwasta dengan volume limbah 240 liter selain perusahaan penghasil limbah B3 adanya aktivitas layanan kesehatan juga memiliki potensi adanya pencemaran lingkungan akibat kegagalan teknologi dalam pengelolaan limbah B3.

Gambar 2. 16 Jumlah Kejadian Bencana Non Alam di Kabupaten Sukoharjo



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DBD	270	161	315	545	115	35	317	185	222	637	233	562
Diare	35.385	18.154	20.352	18.941	15.074	17.196	16.845	13.662	8.614	12.807	14.048	23.519
Morbili	0	25	98	55	68	0	6	4	0	0	94	20
Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0	97	95	101	87
Campak Difteri	0	0	0	0	0	0	0	4	0	101	94	20
Malaria	0	0	0	0	0	0	0	2	8	18	25	28
HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0	0	76	59	69	102	68

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

Potensi bencana non alam lain nya yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo adalah Kejadian Luar Biasa (KLB), berdasarkan data jumlah penderita penyakit menular di Kabupaten Sukoharjo yang

terdapat pada Kabupaten Sukoharjo dalam angka dan data Dinas Kesehatan Tahun 2025, terdapat 7 jenis penyakit yaitu Demam Berdarah Denue (DBD), Diare, Morbili, Hepatitis B, Campak Difteri, Malaria dan HIV/AIDs. Penyakit menular ini juga mempunyai potensi untuk menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) atau epidemi wabah penyakit yang perlu di kaji risiko bencana nya. Berikut ini grafik perkembangan jumlah penderita penyakit menular di Kabupaten Sukoharjo;

Tabel 2. 11 Jumlah Potensi Kerugian Akibat Bencana di Kabupaten Sukoharjo

Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan	
	Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas (ha)	Kelas
Gempabumi	1.174.267,50	1.188.947,49	2.363.214,99	Tinggi	-	-
Banjir	423.040,00	704.173,61	1.127.213,61	Tinggi	0,50	Rendah
Tanah Longsor	12.152,50	3.805,59	15.958,09	Tinggi	1.543,45	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	-	1.198.146,88	1.198.146,88	Tinggi	1.391,65	Tinggi
Kekeringan	-	1.188.947,49	1.188.947,49	Tinggi	2.485,84	Tinggi
Cuaca Ekstrem	8.283.737,50	1.997.391,78	10.281.129,28	Tinggi	-	-
Likuefaksi	783.957,50	949.036,53	1.732.994,03	Tinggi	334,60	Tinggi
Kegagalan Teknologi	1.246.907,50	271.938,46	1.518.845,96	Tinggi	6,00	Rendah
Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	-	-	-
Multibahaya	**8.307.522,50**	**2.130.402,40**	**10.437.924,90**	**Tinggi**	**3.488,72**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030

Total potensi kerugian bencana multibahaya di Kabupaten Sukoharjo adalah 10.437.924,90 juta rupiah yang berada pada kelas tinggi. Kontribusi kerugian perekonomian tertinggi diperoleh dari kerugian fisik karena seluruh daerah berpotensi terkena bencana, terutama bencana gempabumi. Jika ditinjau secara detail Kecamatan yang rentan mengalami kerugian besar yaitu Kecamatan Stabat dimana secara tidak langsung menunjukkan wilayah tersebut banyak terdapat perumahan, fasilitas umum dan kritis yang berpotensi terkena bencana. Potensi kerusakan lingkungan tergolong tinggi yaitu 3.488,72 ha

Di Kabupaten Sukoharjo tercatat telah terbentuk 72 Desa Tangguh Bencana (Destana) yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Destana tersebut dibentuk pada periode tahun 2019 hingga 2025 dengan kategori Pratama, dengan potensi kerawanan bencana yang relatif serupa yaitu banjir, angin kencang, gempa bumi, dan erosi sungai, serta pada beberapa wilayah juga terdapat potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kekeringan. Pembentukan Destana di Kabupaten Sukoharjo didukung oleh berbagai sumber pendanaan, antara lain APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBDes, Mandiri serta dukungan CSR melalui kegiatan KKN Universitas Sebelas Maret, sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan berbagai

pemangku kepentingan dalam memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana.

Tabel 2. 12 Data Desa Tangguh Bencana Kabupaten Sukoharjo

No	Desa	Kecamatan	Tahun Pembentukan	POTENSI KERAWANAN	KATEGORI	Anggaran
1	Mancasan	Baki	2020	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBDES
2	Ngrombo	Baki	2021	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Provinsi
3	Gedongan	Baki	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBDES / Mandiri
4	Purbayan	Baki	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBDES / Mandiri
5	Baki Pandean	Baki	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBDES / Mandiri
6	Jetis	Baki	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
7	Siwal	Baki	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
8	Mulur	Bendosari	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD & APBD Prov
9	Karangasem	Bulu	2023	Karhutla, Kekeringan, , Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	CSR KKN UNS
10	Kunden	Bulu	2024	Kekeringan, Karhutla Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Longsor	Pratama	APBD & APBDes
11	Bulu	Bulu	2025	Kekeringan, , Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
12	Gentan	Bulu	2025	Karhutla,Kekeringan, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Longsor	Pratama	Mandiri
13	Kamal	Bulu	2025	Karhutla Kekeringan, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Longsor	Pratama	Mandiri
14	Kedungsono	Bulu	2025	Karhutla Kekeringan, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Longsor	Pratama	Mandiri
15	Lengking	Bulu	2025	Kekeringan, , Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Banjir	Pratama	Mandiri
16	Malangan	Bulu	2025	Kekeringan, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
17	Ngasinan	Bulu	2025	Karhutla, Kekeringan, , Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Longsor, Banjir	Pratama	Mandiri
18	Puron	Bulu	2025	Karhutla, Kekeringan , Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Longsor	Pratama	Mandiri
19	Sanggang	Bulu	2025	Karhutla, Kekeringan, , Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai Longsor	Pratama	Mandiri
20	Tiyaran	Bulu	2025	Karhutla,Kekeringan, , Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Longsor	Pratama	Mandiri

No	Desa	Kecamatan	Tahun Pembentukan	POTENSI KERAWANAN	KATEGORI	Anggaran
21	Kagokan	Gatak	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD & APBDES
22	Trosemi	Gatak	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD & APBD Prov
23	Mayang	Gatak	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBDES / Mandiri
24	Jati	Gatak	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
25	Pandeyan	Grogol	2019	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	APBD
26	Kadokan	Grogol	2020	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	APBD
27	Telukan	Grogol	2021	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	APBD
28	Madegondo	Grogol	2023	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD
29	Parangjoro	Grogol	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	Mandiri
30	Sanggrahan	Grogol	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	Mandiri
31	Pondok	Grogol	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	Mandiri
32	Makamhaji	Kartasura	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
33	Laban	Mojolaban	2019	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	APBD
34	Tegalmade	Mojolaban	2019	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	APBD
35	Gadingan	Mojolaban	2021	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD
36	Jangglengan	Nguter	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Longsor	Pratama	APBDES / Mandiri
37	Pondok	Nguter	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD & APBD Prov
38	Lawu	Nguter	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBDES / Mandiri
39	Daleman	Nguter	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD & Desa
40	Tanjungrejo	Nguter	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Longsor, Kegagalan Teknologi	Pratama	Mandiri
41	Pengkol	Nguter	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	Mandiri
42	Nguter	Nguter	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri

No	Desa	Kecamatan	Tahun Pembentukan	POTENSI KERAWANAN	KATEGORI	Anggaran
43	Gupit	Nguter	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	Mandiri
44	Baran	Nguter	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	Mandiri
45	Tanjung	Nguter	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
46	Kepuh	Nguter	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
47	Plesan	Nguter	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	Mandiri
48	Bugel	Polokarto	2019	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD
49	Pranan	Polokarto	2021	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD
50	Ngombakan	Polokarto	2021	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai, Kegagalan Teknologi	Pratama	APBD
51	Wonorejo	Polokarto	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
52	Kayuapak	Polokarto	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
53	Kenokorejo	Polokarto	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
54	Karangwuni	Polokarto	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
55	Polokarto	Polokarto	2025	Karhutla, Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
56	Bulu	Polokarto	2025	Karhutla, Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
57	Bakalan	Polokarto	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
58	Tepisari	Polokarto	2025	Karhutla , Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
59	Godog	Polokarto	2025	Karhutla, Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
60	Mranggen	Polokarto	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
61	Kemasan	Polokarto	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
62	Rejosari	Polokarto	2025	Karhutla, Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
63	Genengsari	Polokarto	2025	Karhutla, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
64	Jatisobo	Polokarto	2025	Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
65	Combongan	Sukoharjo	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD

No	Desa	Kecamatan	Tahun Pembentukan	POTENSI KERAWANAN	KATEGORI	Anggaran
66	Kedungjambal	Tawangsari	2024	Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBDES / Mandiri
67	Tambakboyo	Tawangsari	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD & APBDES
68	Dalangan	Tawangsari	2024	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD & APBD Prov
69	Pojok	Tawangsari	2025	Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD & Desa
70	Tegalsari	Weru	2022	Kekeringan, Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	APBD
71	Karangwuni	Weru	2025	Kekeringan , Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri
72	Tawang	Weru	2025	Kekeringan , Banjir, Angin Kencang, Gempa Bumi, Erosi Sungai	Pratama	Mandiri

Sumber: BPBD Kabupaten Sukoharjo, 2025

Rambu yang telah dipasang terkait bencana yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo berupa sistem peringatan dini (EWS) banjir Wilayah Sungai Bengawan Solo. Adapun titik-titik lokasi dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 13 Sistem Peringatan Dini (EWS) Banjir WS Bengawan Solo di Kab. Sukoharjo Wilayah Sub DJA III/1 Perum Jasa Tirta I

No	Sungai	Lokasi	Koordinat	Tahun Pemasangan
1	Bengawan Solo	Ds. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo	7°36'49.3"S 110°49'11.6"E	2015
2	Bengawan Solo	Ds. Kadokan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo	7°35'27.7"S 110°50'18.1"E	2021
3	Bengawan Solo	Ds. Laban Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo	7°35'28.6"S 110°50'25.2"E	2015
4	Wingko	Perum Puri Gading Kec. Grogol Kab. Sukoharjo	7°35'42.8"S 110°49'20.4"E	2015

Sumber: BPBD Kabupaten Sukoharjo

Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025:

- Target : 64,13
- Realisasi : 87,03

Indeks Resiko Bencana (IRB) tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 tercapai sebesar 135,70 %. Indeks Resiko Bencana (IRB) tahun 2025 dibanding tahun 2021-2025:

- Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2025 : 87,03
- Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2024 : 64,18
- Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2023 : 71,27
- Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2022 : 81,29
- Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2021 : 93,20

Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2025 adalah 87,03 atau masuk risiko sedang. Jika dibandingkan Tahun 2024 dengan nilai 64,18,

maka nilai IRB Kabupaten Sukoharjo naik sebesar 22,87. Hal ini dikarenakan komponen bencana yang dinilai bertambah dari 6 jenis menjadi 9 jenis. Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2025-2030:

- Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2025 : 87,03
- Target Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2027 : 64

Capaian Indeks Resiko Bencana (IRB) Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen RPJMD tercapai sebesar 135,98 %.

Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dibandingkan dengan Indeks Resiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah sebesar 87,03
- Indeks Resiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 92,37
- Indeks Resiko Bencana (IRB) Nasional Tahun 2025 adalah sebesar 147,95

Capaian Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025: 87,03 di atas capaian Provinsi Jawa Tengah 92,37 dan Nasional 147,95 terpaut sebesar 5,34 dari IRB Provinsi Jawa Tengah dan 60,92 dari IRB Nasional. Capaian Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Kota Tahun 2025 se-Solo Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Perbandingan Capaian IKD dan IRB Kabupaten/Kota Tahun 2025 se-Solo Raya

No.	Kabupaten/Kota	IKD	IRB
1	Surakarta	0,83	51,08
2	Boyolali	0,91	71,44
3	Sukoharjo	0,68	87,03
4	Karanganyar	0,86	82,14
5	Wonogiri	0,78	83,38
6	Sragen	0,72	97,42
7	Klaten	0,94	74,28

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2025

Berdasarkan data di atas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sukoharjo paling rendah dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sukoharjo cenderung lebih tinggi daripada Kabupaten/Kota lain. Kabupaten Sukoharjo perlu mengupayakan peningkatan mitigasi bencana agar tingkat kerugian yang terjadi akibat bencana bisa diminimalisir dan mendongkrak nilai IKD dan IRB yang ada.

C. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 tercatat sebanyak 959.018 jiwa. Apabila dilihat dari penyebaran penduduk, persentase Kecamatan Grogol paling tinggi yaitu 13,99%, kemudian Kecamatan Kartasura 12,67%, Kecamatan Sukoharjo 12,57%

sedangkan yang terkecil Kecamatan Bulu 3,81 %. Rasio Jenis Kelamin pada tahun 2025 sebesar 99,70 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 - 100 penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan lebih besar 0,08 % dibanding penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu sepuluh tahun (2015-2025) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2025 tercatat sebesar 1.944 jiwa setiap km2. Di sisi lain penyebaran penduduk masih belum merata. Kartasura merupakan kecamatan dengan penduduk paling padat yaitu 5.611 jiwa per km2. Sedangkan Kecamatan Bulu paling jarang kepadatan penduduknya yaitu 785 jiwa per km2.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2025 sebesar 1,47 persen dimana dalam dua tahun terakhir (2021-2023), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,06 persen.

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 99,70 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal dasar pembangunan. Salah satu potensi saat ini adalah penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang mayoritas usia produktif sehingga diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, namun demikian perlu menjadi perhatian bersama bahwa sumber daya manusia yang berkarakter sehat, cerdas dan produktif akan membawa kesejahteraan. Sebaliknya perlu antisipasi dengan banyaknya usia produktif maka persaingan antar pencari kerja semakin meningkat namun lapangan pekerjaan terbatas sehingga berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran serta angka kriminalitas.

Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	33,417	32,096	65,513
5–9	32,537	31	63,537
10–14	32,998	32,05	65,048
15–19	36,299	34,165	70,464
20–24	36,561	34,636	71,197
25–29	34,939	33,415	68,354
30–34	34,625	33,86	68,485
35–39	33,929	33,451	67,38
40–44	35,43	34,873	70,303
45–49	35,746	36,209	71,955
50–54	32,658	33,572	66,23
55–59	29,716	31,043	60,759
60–64	24,811	26,972	51,783
65–69	19,188	20,624	39,812

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
70–74	13,423	15,157	28,58
75+	12,501	17,117	29,618
Sukoharjo	**478,778**	**480,24**	**959,018**

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2. 16 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, 2023 dan 2024

Kecamatan	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk 2019*-2020		Presentase Penduduk		Kepadatan Penduduk per km ²		Rasio Jenis Kelamin	
	2024	2025	2010-2020	2020-2027	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
010 Weru	57.059	57.956	0,48	1,49	6,06	6,04	1.251	1.271	99,5	99,0
020 Bulu	36.845	36.405	1,54	1,73	3,91	3,80	794	785	100,9	102,0
030 Tawangsari	54.412	55.494	0,32	1,46	5,78	5,79	1.383	1.411	100,2	100,3
040 Sukoharjo	100.572	102.501	0,35	1,46	10,68	10,69	2.148	2.189	100,8	100,1
050 Nguter	56.825	55.915	1,43	1,76	6,03	5,83	982	967	101,7	101,1
060 Bendosari	65.644	65.502	1,16	1,64	6,97	6,83	1.178	1.176	99,5	99,2
070 Polokarto	88.055	88.794	0,75	1,55	9,35	9,26	1.316	1.327	100,4	100,2
080 Mojolaban	100.768	102.165	0,55	1,51	10,7	10,65	2.631	2.668	99,1	99,2
090 Grogol	128.105	134.202	0,07	1,23	13,6	13,99	4.088	4.283	100,1	99,9
100 Baki	79.651	80.849	0,50	1,50	8,46	8,43	3.403	3.455	100,7	100,4
110 Gatak	57.597	57.706	1,00	1,61	6,12	6,02	2.887	2.893	100,6	100,2
120 Kartasura	116.117	121.529	0,18	0,24	12,33	12,67	5.360	5.611	97,3	97,5
Sukoharjo	**941.650**	**959.018**	**0,57**	**1,47**	**100,00**	**100,00**	**1.909,15**	**1.944**	**99,9**	**99,7**

Catatan :
1. *Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)*
2. *Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2024 (Pertengahan tahun/Juni)*
3. *Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2020 (September)*
4. *Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2021 (Juni)*
5. *Luas provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019*

Sumber : BPS dan Kementerian Dalam Negeri

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek pemerataan ekonomi serta sosial budaya. Di bidang pembangunan perekonomian indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Sedangkan indikator sosial budaya diantaranya angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, jumlah grup kesenian dan sarana olah raga. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

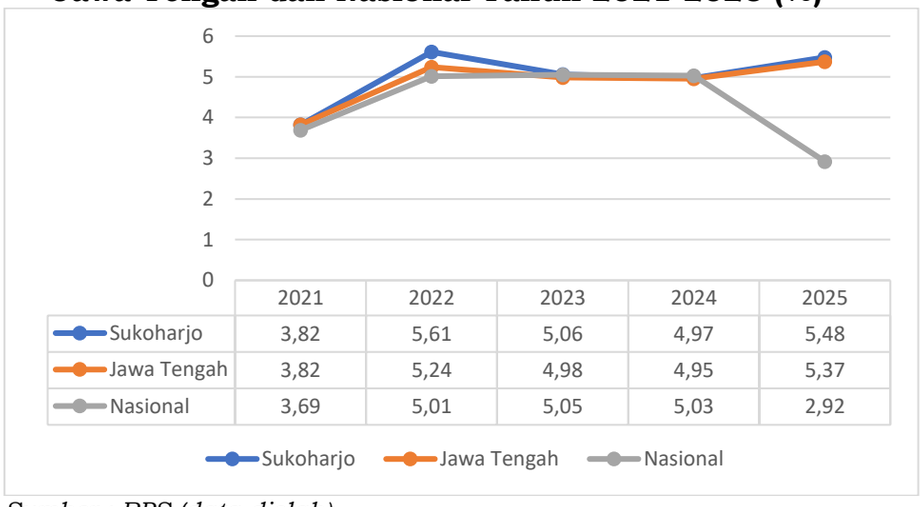
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Selama rentang waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo pada kisaran 3,82%-5,48%, sering capaian Pertumbuhan Ekonomi lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebesar 3,82% meningkat menjadi 5,48 % tahun 2025, capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2022 sebesar 5,61%.

Gambar 2. 17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025
Sukoharjo	3,82	5,61	5,06	4,97	5,48
Jawa Tengah	3,82	5,24	4,98	4,95	5,37
Nasional	3,69	5,01	5,05	5,03	2,92

Sumber : BPS (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Selama rentang waktu tahun 2021-2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo relatif fluktuatif namun selalu lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebesar 3,82% meningkat menjadi 5,61 % tahun 2022, dan capaian di tahun 2023 sebesar 5,06%, Kondisi tahun 2023 ini lebih

baik dibandingkan Provinsi 4,98 % dan nasional 5,05%, hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang dialami oleh seluruh masyarakat di Indonesia karena pandemi *Covid-19* bergerak ke kondisi pemulihan. Namun pada tahun 2024 diprediksi pertumbuhan ekonomi Sukoharjo pada angka 4,97% menurun dibandingkan tahun 2023 dan lebih rendah dari Nasional yang sebesar 5,03%, namun lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 4,95%. Tahun 2025 ekonomi mulai bangkit kembali ke angka 5,48% di atas angka Provinsi dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Sukoharjo dan daerah di sekitar wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN berkisar 4% - 5 %, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo sebesar 5,48 posisi di bawah Kabupaten Wonogiri, Sragen dan Kota Surakarta, namun diatas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar sebesar 5,28%, Kabupaten Klaten yang sebesar 4,62% dan Kabupaten Boyolali sebesar 4,82%

Tabel 2. 17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Subosukawonosraten Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Boyolali	4,63	6,33	5,62	4,64	4,82
Kabupaten Klaten	3,82	5,90	5,7	5,11	4,62
Kabupaten Sukoharjo	3,82	5,61	5,06	4,97	5,48
Kabupaten Wonogiri	3,35	5,63	4,98	4,93	5,67
Kabupaten Karanganyar	3,57	5,87	5,53	5,54	5,28
Kabupaten Sragen	3,75	5,76	5,23	5,39	5,70
Kota Surakarta	4,01	6,25	5,57	5,61	5,63

Sumber : BPS (data diolah)

Pertumbuhan riil sektoral tahun 2025 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pemulihan pasca pandemi serta Perang dibeberapa negara di luar negeri berpengaruh signifikan terhadap beberapa sektor pembentuk PDRB. Sektor dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 11,63%. Selain itu, sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar -0,58%.

Tabel 2. 18 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (persen), 2021–2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,58	0,89	2,68	1,34	3,54
B	Pertambangan dan Penggalian	1,56	-4,91	-5,41	5,89	-0,58
C	Industri Pengolahan	2,63	4,44	3,23	3,63	4,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,66	4,40	5,49	5,31	4,23
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,65	1,65	5,8	6,14	3,02
F	Konstruksi	4,22	1,76	6,19	7,41	5,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,70	4,13	5,01	5,25	5,56
H	Transportasi dan Pergudangan	3,83	66,99	6,34	5,35	7,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,07	14,74	10,71	8,11	11,63
J	Informasi dan Komunikasi	9,64	2,10	11,24	9,24	7,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,67	2,03	3,2	2,49	2,35
L	Real Estat	2,02	4,43	6,81	4,73	6,16
M,N	Jasa Perusahaan	3,35	4,88	6,55	10,76	8,39

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,80	2,15	5,05	8,2	2,84
P	Jasa Pendidikan	1,49	2,38	5,7	5,32	6,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,06	1,23	5,27	6,1	6,15
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1,10	14,13	7,82	6,51	8,31
	Produk Domestik Regional Bruto	3,82	5,61	5,05	4,99	5,48

*Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 adalah 53,489 triliun rupiah, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 49,928 triliun rupiah. Sektor Industri Pengolahan tetap memiliki peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 38,103 persen. Selain itu, sektor yang besar distribusinya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 17,26 persen.

Tabel 2. 19 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (Miliar Rupiah), 2021–2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	3 371,91	3 553,01	3 863,13	4 065,75	4277,97
B	Pertambangan dan Penggalian	163,26	160,78	155,71	164,11	166,39
C	Industri Pengolahan	15 198,04	16 572,83	17 825,06	19 065,48	20341,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	40,77	42,75	45,63	48,36	50,49
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur	14,44	14,93	15,95	17,9	19,06
F	Konstruksi	2 674,38	2 896,98	3 170,60	3444,93	3675,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6 736,68	7 319,94	7970,83	8605,12	9234,21
H	Transportasi dan Pergudangan	933,62	1 650,49	1 891,56	2 026,03	2212,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 398,96	1 635,36	1 831,56	2024,1	2292,54
J	Informasi dan Komunikasi	2 440,34	2 498,07	2784,1	3054,5	3300,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 499,53	1 644,6	1 736,66	1798,8	1869,88
L	Real Estat	865,31	920,6	993,94	1 049,55	1122,45
M N	Jasa Perusahaan	168,81	185,5	206,13	233,23	257,34
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	809,09	845,95	913,49	1 014,89	1048,26
P	Jasa Pendidikan	1 709,30	1 760,6	1 879,77	2 014,55	2187,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	427,89	438,53	472,52	511,65	442,63
R S T U	Jasa Lainnya	538,14	639,66	725,11	795,52	882,20
	Produk Domestik Regional Bruto	38 990,46	42 780,63	46479,60	49 928,42	53489,29

*Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Sedangkan berikut adalah rincian nilai PDRB tiap lapangan usaha ADHK 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 20 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Kostan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (Miliar Rupiah), 2021–2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 228,05	2 247,80	2 307,95	2 337,83	2420,48

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Pertambangan dan Penggalian	93,10	88,53	83,33	87,47	86,96
C	Industri Pengolahan	10 408,91	10 870,88	11 220,39	11 626,60	12127,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35,54	37,1	39,14	41,22	42,96
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,83	11,01	11,64	12,36	12,73
F	Konstruksi	1 768,73	1 799,86	1 911,77	2060,05	2176,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 026,00	5 233,44	5 493,86	5 783,31	6104,59
H	Transportasi dan Pergudangan	720,52	1 203,19	1 279,41	1 347,91	1452,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 021,84	1 172,43	1 297,98	1 403,23	1566,48
J	Informasi dan Komunikasi	2 317,13	2 365,79	2 631,71	2874,9	3101,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	959,11	978,63	1 009,99	1 035,17	1059,52
L	Real Estat	701,09	732,15	782,01	819	869,48
M,N	Jasa Perusahaan	112,55	118,05	125,78	139,31	150,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	544,43	556,14	584,22	632,11	650,06
P	Jasa Pendidikan	995,51	1 019,2	1 077,29	1 134,58	1210,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	288,49	292,04	307,43	326,19	346,24
R,S,T, U	Jasa Lainnya	402,28	459,12	495,02	527,23	571,06
	Produk Domestik Regional Bruto	27 634,12	29 185,35	30 657,93	32 188,46	33951,06

*Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo menurut lapangan usaha selama tahun 2020-2025 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan (35,72%); perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,98 %) dan informasi dan komunikasi (9,13%).

Tabel 2. 21 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025 (%)

	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,65	8,31	8,31	8,14	8,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,42	0,38	0,34	0,33	0,31
C	Industri Pengolahan	38,98	38,74	38,35	38,19	38,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,1	0,1	0,09
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
F	Konstruksi	6,86	6,77	6,82	6,90	6,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,28	17,11	17,15	17,23	17,26
H	Transportasi dan Pergudangan	2,39	3,86	4,07	4,06	4,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,59	3,82	3,94	4,05	4,29
J	Informasi dan Komunikasi	6,26	5,84	5,99	6,12	6,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,85	3,84	3,74	3,6	3,50
L	Real Estat	2,22	2,15	2,14	2,1	2,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,44	0,47	0,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,08	1,98	1,96	2,02	1,96
P	Jasa Pendidikan	4,38	4,12	4,04	4,03	4,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,03	1,02	1,02	1,03
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1,38	1,50	1,56	1,59	1,65
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Sukoharjo akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2021 sampai dengan 2025, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sukoharjo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Kondisi perekonomian Sukoharjo setelah mengalami pemulihan akibat Covid-19 di tahun 2021, hal ini terlihat dari PDRB tahun 2025 yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yang menunjukan arah positif.

Tabel 2. 22 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	26 3339,52	29 021,65	31 519,5	33 761,95	35766,30
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	457,82	532,32	577,8	696,84	729,26
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 974,51	2 027,18	2 141,85	2 186,59	2254,59
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9 224,99	9 744,97	10 386,72	11 210,00	12028,60
Perubahan Inventori	116,17	135,86	148,35	109,39	82,03
Net Ekspor Barang dan Jasa	877,45	1 327,65	1 705,38	1963,65	22628,51
PDRB / GRDP	38 990,46	42780,63	46479,60	49 987,03	53489,51

*Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Peningkatan ekonomi selama tahun 2021 – 2025 tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (ADH) Berlaku dan atas dasar harga (ADH) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB Sukoharjo ADH Berlaku selama periode tahun 2021 sampai dengan 2025 menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian PDRB meningkat menjadi 49,98 triliun rupiah pada tahun 2025. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume konsumsi.

Tabel 2. 23 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18 450,239	19 509,83	20 431,14	21 390,55	22379,63
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	284,305	303,3	323,77	379	390,43

Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 208,492	1 225,41	1 255,93	1 264,88	1268,56
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6 236,171	6 371,02	6 646,47	7 035,96	7438,71
Perubahan Inventori	32,882	38,12	40,37	28,96	22,52
Net Ekspor Barang dan Jasa	1 422,025	1 737,67	1 960,31	2 089,11	2451,21
Produk Domestik Regional Bruto	27 634,117	29 185,35	30 667,93	32 188,46	33951,21

*Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Selain dinilai ADH Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADH Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADH Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADH Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2021–2025, gambaran tentang perkembangan ekonomi Sukoharjo berdasarkan PDRB ADH Konstan dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tahun 2021 PDRB Konstan Sukoharjo mencapai 27,63 triliun rupiah, setelah melalui proses pembangunan ekonomi selama 5 tahun, capaian PDRB meningkat menjadi 33,95 trilyun rupiah pada tahun 2025.

2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2021 hingga 2025 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 akibat pengaruh pandemi yang sedang berlangsung kemudian pada tahun 2022 sudah mengalami peningkatan menjadi 46,322 Juta Rupiah dan selalu naik sampai pada tahun 2025 menjadi sebesar 56,729 Juta Rupiah.

Sedangkan nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga konstan sejak tahun 2021 hingga 2025 digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Capaian PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2024 sebesar 34,183 juta rupiah meningkat dari menjadi 35,722 juta rupiah pada tahun 2025.

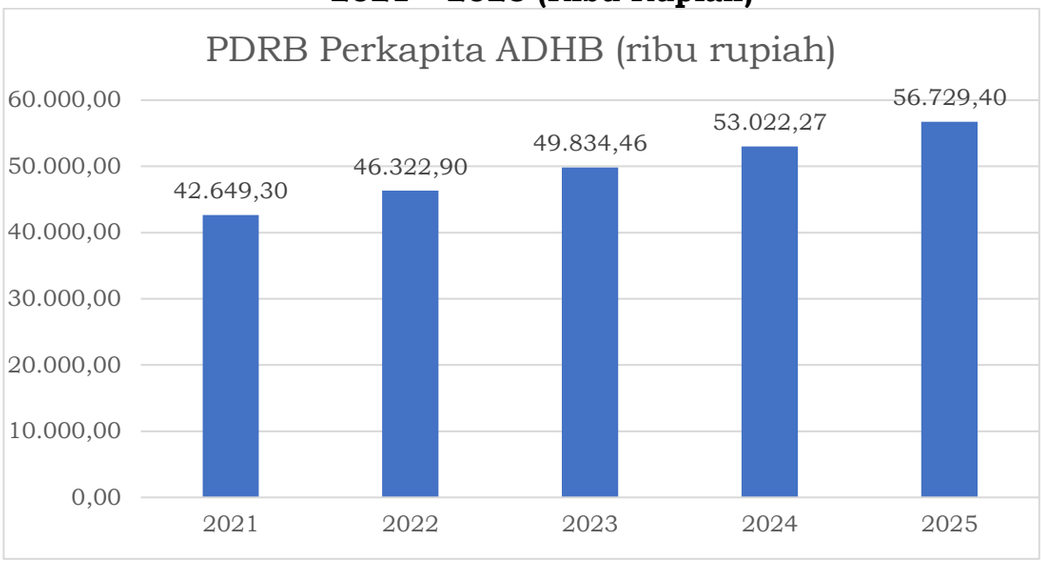
Tabel 2. 24 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025 (000 rupiah)

PDRB Perkapita(Rp)	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
PDRB Perkapita(Rp)					
• ADHB	42.649,30	46.322,90	49.834,46	53.022,27	56.729,40
• ADHK 2010	30.227,29	31.601,92	32.870,79	34.183,04	35.722,01
• Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	2,94	4,55	4,02	3,99	4,50
• Jumlah Penduduk (ribu orang)	914	924	933	942	950
Pertumbuhan jumlah penduduk	0,86	1,02	0,99	0,98	0,93

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Berikut adalah gambaran perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025:

Gambar 2. 18 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2025 (Ribu Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Untuk perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Sukoharjo jika dibandingkan dengan wilayah sekitar (Subosukawonosraten) menempati posisi ke-2 dibawah Kota Surakarta, disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 25 PDRB Per Kapita ADHB Subosukawonosraten

Kabupaten/Kota di Subosukawonosraten	[Seri 2010] PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Boyolali	32,62	35,94	39,20	41,69	44,02
Kabupaten Klaten	33,38	36,54	39,92	42,74	44,91
Kabupaten Sukoharjo	42,77	46,71	49,87	53,08	56,27
Kabupaten Wonogiri	29,14	31,88	35,14	37,72	40,50
Kabupaten Karanganyar	41,71	45,50	49,42	53,36	56,88
Kabupaten Sragen	40,75	44,63	48,69	52,19	55,52

Kabupaten/Kota di Subosukawonosraten	[Seri 2010] PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Surakarta	96,36	107,01	114,80	122,53	130,01

Sumber: BPS Jawa Tengah

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit.

Data di Tabel berikut menunjukkan besaran ICOR menurun dari sebesar 6,13 (2021) menjadi 4,10 (2022) dan 4,50 (2023). Pada tahun 2024 ICOR Kabupaten Sukoharjo sebesar 4,61 di Tahun 2025 turun menjadi 4,22, artinya untuk setiap kenaikan nilai tambah PDRB sebesar 1 juta rupiah terjadi kenaikan pembentukan modal tetap bruto sebesar 4,22 juta rupiah. ICOR selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif namun perubahannya tidak berbeda jauh, yang berarti masih efisien dalam penggunaan PMTB untuk meningkatkan nilai tambah PDRB sebesar satu satuan. Semakin rendah nilai ICOR menunjukkan semakin efisien penggunaan kapital untuk dapat meningkatkan nilai tambah PDRB sebesar 1 unit.

Tabel 2. 26 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	27.634,12	29.185,36	30.661,92	32.187,41	33.951,06
Perubahan (Miliar Rp)	1.017,61	1.551,24	1.476,56	1.525,49	1.763,65
PMTB (ADHK2010) (Miliar Rp)	6.246,54	6.371,02	6.646,41	7.035,96	7.438,71
ICOR	6,13	4,10	4,50	4,61	4,22

Sumber: BPS Jawa Tengah (data diolah)

3. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu tahun 2021-2025 fluktuatif. Tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo.

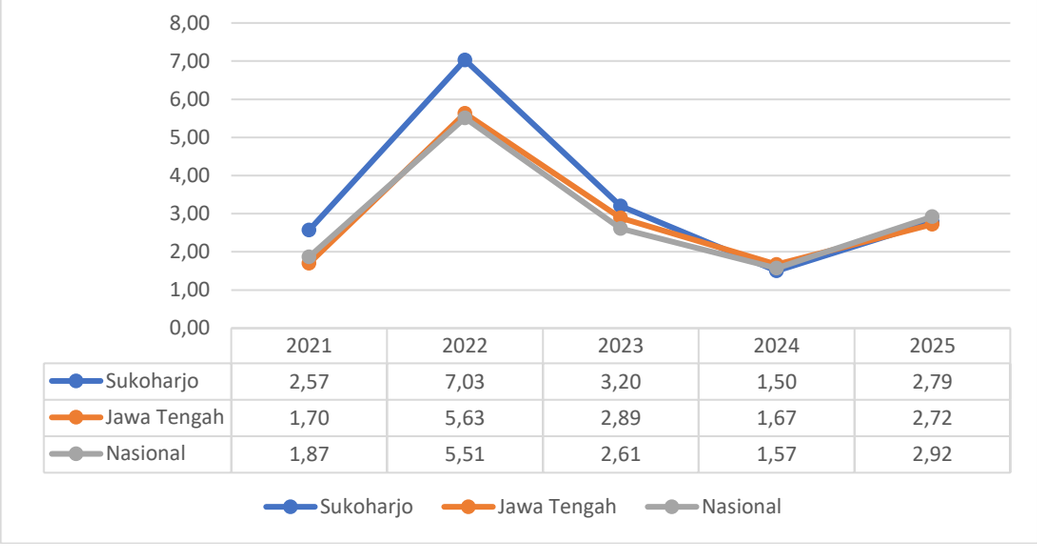
Terkendalinya tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo selama ini tidak terlepas dari optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah

(TPID) Kabupaten Sukoharjo. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi antara lain melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

Pada tahun 2025, 9 kabupaten/kota SBH di Provinsi Jawa Tengah yang dihitung inflasinya, semuanya mengalami inflasi. Kota Semarang mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,84 persen, diikuti Kota Tegal 2,83 persen, Cilacap 2,79 persen, Kota Surakarta 2,79 persen, Kudus sebesar 2,68 persen, Kabupaten Wonosobo sebesar 2,64 persen, Purwokerto sebesar 2,61 persen, Kabupaten Wonogiri 2,52 persen dan Kabupaten Rembang 2,47 persen. Inflasi gabungan 9 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 2,72 persen dan inflasi nasional sebesar 2,92 persen

Pada tahun 2022 BPS tidak menghitung inflasi per Kabupaten, sehingga nilai inflasi didekatkan secara kewilayahan dan dianggap terwakili oleh Kota Surakarta. Pada Tahun 2025 Inflasi Kabupaten Sukoharjo (menggunakan nilai inflasi Gabungan Kota Surakarta) sebesar 2,79. Sedangkan Inflasi Nasional sebesar 2,92%, Inflasi Jateng sebesar 2,72. Nilai inflasi Gabungan Kota Surakarta lebih rendah dari inflasi Nasional namun lebih tinggi dan Inflasi Jawa Tengah.

Gambar 2. 19 Tingkat Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Sukoharjo	2,57	7,03	3,20	1,50	2,79
Jawa Tengah	1,70	5,63	2,89	1,67	2,72
Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo (data diolah)

Secara umum nilai Inflasi gabungan sebesar 2,79% merupakan angka inflasi yang terjaga, hal ini ditunjukkan dengan target besarnya inflasi yang terjaga pada angka 2,5±1 persen. kondisi inflasi diatas 2,5 perlu upaya konsisten dan berkesinambungan dalam mengoptimalkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sukoharjo. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi antara lain melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

4. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Berdasarkan kriteria Bank Dunia distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah dapat diukur menjadi tiga kelompok pendapatan. Sesuai kriteria Bank Dunia, pada tahun 2022-2024 distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Sukoharjo tergolong merata dengan posisi ketimpangan rendah.

Tabel 2. 27 Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

No	Kab/Kota	20% atas			40% tengah			40% bawah		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Kabupaten Boyolali	45,05	44,76	43,13	35,76	35,76	36,32	19,19	18,92	20,55
2	Kabupaten Klaten	44,98	48,85	50,95	35,86	33,71	32,91	19,17	17,44	16,15
3	Kabupaten Sukoharjo	44,99	48,03	47,01	36,40	34,72	35,49	18,62	17,25	17,5
4	Kabupaten Wonogiri	43,79	43,15	46,83	36,44	37,78	35,17	19,76	19,08	18
5	Kabupaten Karanganyar	44,70	47,65	43,53	36,06	33,87	37,33	19,24	18,48	19,14
6	Kabupaten Sragen	43,56	42,39	39,71	36,98	37,47	39,17	19,47	20,13	21,12
7	Kota Surakarta	48,81	47,27	46,28	35,89	34,39	35,86	15,50	18,34	17,85
8	Jawa Tengah	45,58	45,07	44,95	35,91	36,18	36,16	18,51	18,74	18,9

Sumber: BPS Jawa Tengah

Capaian Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia perlu upaya yang harus dilakukan agar semua masyarakat menikmati pendapatan dalam porsi adil adalah dengan redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat tidak mampu.

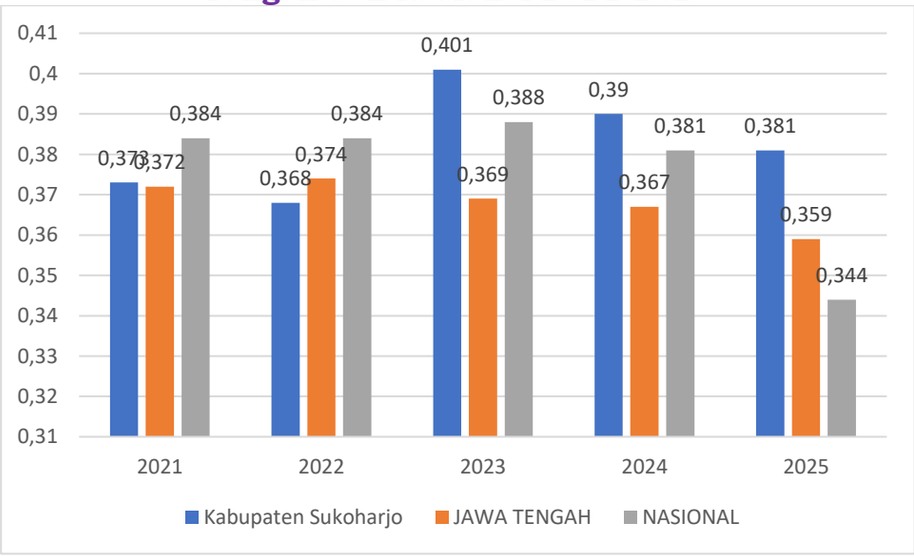
5. Gini Ratio

Dalam rangka memberikan analisis tentang kondisi ketimpangan wilayah maka digunakan metode analisis indeks Gini Ratio. Indeks gini akan mengukur pola pengeluaran masyarakat dan menggolongkannya dalam kondisi ketimpangan bertaraf rendah, sedang, dan tinggi. Indeks Gini mengukur ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditunjukan dengan angka koefisien gini ratio yang berada dalam rentang 0-1 (0< koefisien gini<1). Secara umum angka koefisien gini dapat diklasifikaikan sebagai berikut :

1. 0,00 – 0,35 = Pemerataan Tinggi & Ketimpangan Rendah
2. 0,35 – 0,50 = Pemerataan & Ketimpangan Sedang.
3. 0,50 < gini = Pemerataan Rendah & Ketimpangan Tinggi.

Data yang dianalisis untuk Kabupaten Sukoharjo adalah dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

Gambar 2. 20 Indeks Gini Ratio Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah dan Nasional 2021-2025



Sumber: BPS Jawa Tengah

Perubahan rasio gini Kabupaten Sukoharjo fluktuatif, selama lima tahun terakit indeks gini terendah pada tahun 2022 yang sebesar 0.368, konsisi di tahun 2022 lebih baik dari capaian Nasional yakni dan Provinsi. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,401 menjadi tahun dengan indeks gini tertinggi dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2024 sebesar 0,390. Dan tahun 2025 enurun lagi menjadi 0.381. Tren ini memberikan informasi bahwa pemulihan ekonomi masih bergerak dan belum sepenuhnya stabil sehingga masih terjadi ketimpangan. Sedangkan gini ratio di Subosukawonosraten berkisar 0,3 sampai 0,4 dan gini ratio tertinggi terjadi di Kota Surakarta sebesar 0,398.

Sedangkan untuk perubahan Gini Ratio daerah sekitar (Subosukawonosraten) disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 28 Perubahan Gini Ratio Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2021-2025

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Boyolali	0,364	0,366	0,365	0,339	0,349
2	Kabupaten Klaten	0,351	0,36	0,406	0,437	0,350
3	Kabupaten Sukoharjo	0,373	0,368	0,401	0,390	0,381
4	Kabupaten Wonogiri	0,356	0,348	0,351	0,392	0,326
5	Kabupaten Karanganyar	0,387	0,36	0,389	0,352	0,332
6	Kabupaten Sragen	0,313	0,349	0,336	0,309	0,355
7	Kota Surakarta	0,379	0,419	0,383	0,380	0,398
	Rata-rata Subosukawonosraten	**0,360**	**0,367**	**0,375**	**0,371**	**0.355**
8	JAWA TENGAH	0,372	0,374	0,369	0,367	0,359
9	NASIONAL	0,384	0,384	0,388	0,381	0.344

Sumber: BPS Jawa Tengah

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia menjadi alternatif penting dalam mengevaluasi kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan ekonomi di suatu daerah, menggantikan fokus eksklusif pada Indeks Gini. Kriteria ini menekankan pada alokasi sumber daya

untuk sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2. 29 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan Dan Bukan Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran Di Provinsi Jawa Tengah (Rupiah)

No	Uraian	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	40 % penduduk berpendapatan rendah	557.961	596.581	600.745	643.486
2	40 % penduduk berpendapatan menengah	1.096.671	1.196.135	1.149.514	1.219.503
3	20 % penduduk berpendapatan tinggi	2.701.833	3.328.846	2.857.583	2.956.233

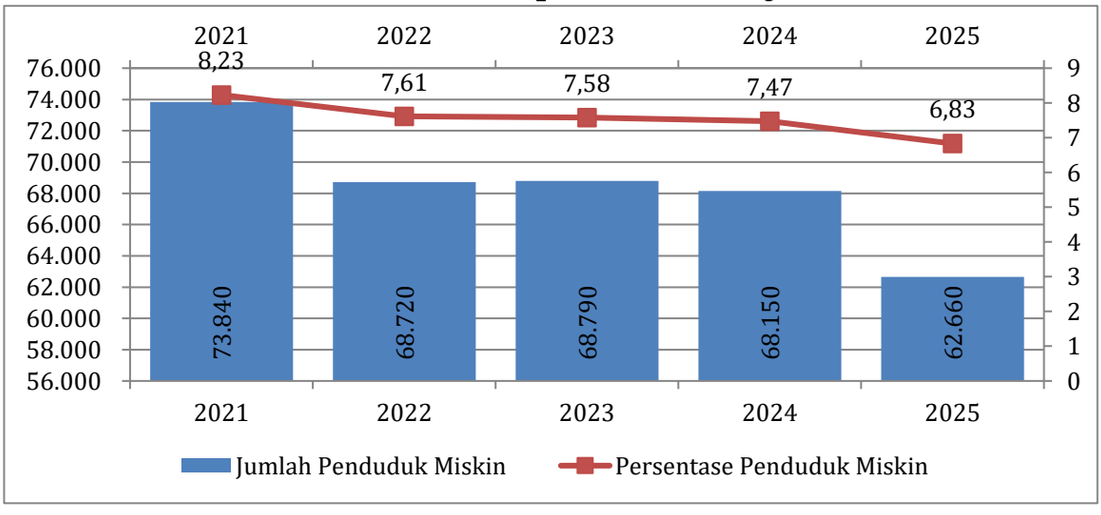
Sumber: BPS Jawa Tengah

6. Kemiskinan

Mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach)*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Tahun 2025 persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 sebesar 6,83 persen, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebesar 7,47 persen, tahun 2021 sebesar 8,23 persen serta tahun 2020 sebesar 7,68 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2021 tersebut merupakan salah satu adanya dampak Corona Virus Disease 2019 yang terjadi di Indonesia.

Gambar 2. 21 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sukoharjo jika dibandingkan dengan Target RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

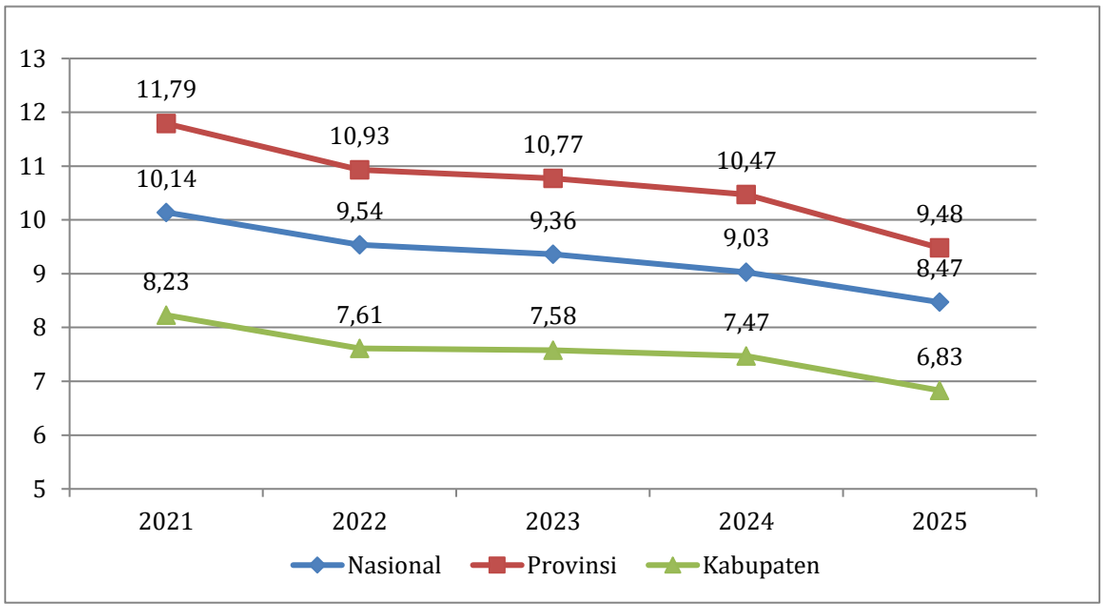
Tabel 2. 30 Perbandingan Persentase Angka Kemiskinan dengan Target Daerah

No	Tahun	Angka Kemiskinan			Keterangan
		Target	Realisasi	Perubahan	
1	2021	8,5-7,7	8,23	0,55	Tercapai
2	2022	7,2-6,9	7,61	-0,62	Tercapai
3	2023	7,0-6,8	7,58	-0,03	Tercapai
4	2024	7,0-6,8	7,47	-0,11	Tercapai
5	2025	7,10-7,30	6,83	-0,64	Tercapai

Sumber: BPS Sukoharjo dan RPJMD 2021-2027 Kabupaten Sukoharjo

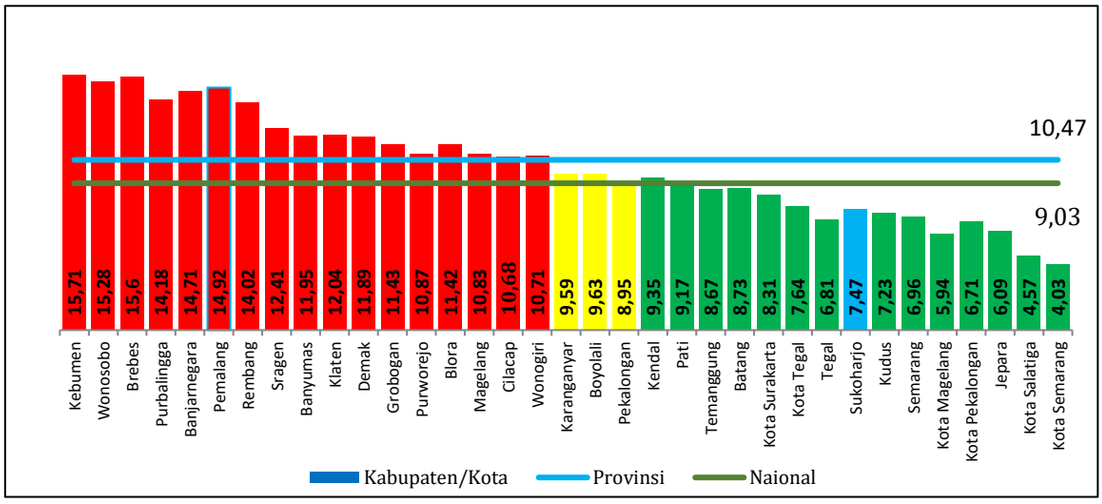
Jika dibandingkan terhadap angka kemiskinan Nasional dan Provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo berada dibawah angka Nasional sebesar 8,47 persen dan Provinsi sebesar 9,48 persen. Bahkan Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat ke 9 Kabupaten/Kota dengan kemiskinan terendah dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 22 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025



Sumber: BPS Jawa Tengah

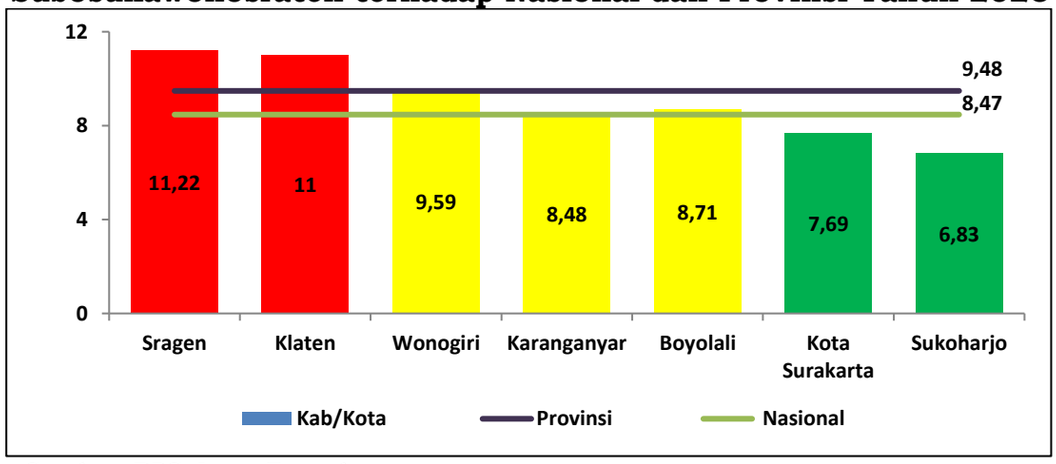
Gambar 2. 23 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber: BPS Jawa Tengah

Apabila dilihat dari perbandingan terhadap wilayah Subosukawonosraten persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan yang cukup menggembirakan, karena berada pada angka terendah (7.47%), hanya Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta yang berada di bawah angka kemiskinan, baik nasional maupun provinsi.

Gambar 2. 24 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Subosukawonosraten terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2025



Sumber: BPS Jawa Tengah

Grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 mengalami penurunan dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab penurunan tingkat kemiskinan nasional. Selama tahun 2022-2025 tingkat kemiskinan Kabupaten Sukoharjo mengalami trend yang menurun.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sukoharjo telah merumuskan berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten hingga APBdes. Secara Umum terdapat beberapa klaster kebijakan intervensi yang telah dan akan dilaksanakan yakni :

1. Pengendalian inflasi daerah,dengan menjaga stabilitas harga komoditas konsumsi makanan maupun non makanan.

2. Menurunkan beban pengeluaran melalui bantuan sosial,jaminan sosial,subsidi,bantuan langsung tunai/jaring pengaman sosial.
4. Meningkatkan pendapatan melalui pelatihan,pemberdayaan,akses modal.
5. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui perluasan akses layanan dasar, pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antar daerah.
6. Bahwa pencapaian target penurunan kemiskinan (khususnya miskin ekstrem) Kabupaten Sukoharjo harus melibatkan seluruh peran serta masyarakat, salah satunya dukungan dari jajaran BUMD, Civitas Akademika, BAZNAS dan Forum TJSLP (Badan Usaha Swasta). Intervensi dan dukungan tersebut dapat lebih terukur, jika dilakukan dikoordinasikan seluruh TKPK. Untuk itu kiranya dua syarat memudahkan intervensi program penanggulanga kemiskinan harus segera diwujudkan yakni kualitas dan sinkronisasi data kemiskinan BNBA serta strategi program (berikut lokus penanganannya).

Selanjutnya tingkat Pertumbuhan Angka Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dibanding Provinsi Jawa Tengah, Rata-rata Kabupaten se-Subosukawonosraten dan Nasional lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan nasional, provinsi dan rata-rata Kab/Kota se-Subosukawonosraten. Selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 31 Perbandingan Pertumbuhan Angka Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dibanding Rata-rata Kab/Kota se-Subosukawonosraten, Provinsi dan Nasional 2021-2025

Tahun	Nasional		Jawa Tengah		Rata-rata Kab/Kota Subosukawonosraten		Sukoharjo	
	Angka Kemiskinan	Perubahan	Angka Kemiskinan	Perubahan	Angka Kemiskinan	Perubahan	Angka Kemiskinan	Perubahan
2021	10,14	0,36	11,79	0,38	11,11	0,50	8,23	0,55
2022	9,57	-0,57	10,93	-0,86	10,34	-0,77	7,61	-0,62
2023	9,36	-0,21	10,77	-0,16	10,18	-0,16	7,58	-0,03
2024	9,03	-0,33	10,47	-0,30	10,02	-0,16	7,47	-0,11
2025	8,47	-0,56	9,48	-0,99	9,08	-0,94	6,83	-0,64

Sumber: BPS Jawa Tengah

Selanjutnya perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo dibanding Rata-rata Kab/Kota se-Subosukawonosraten, Provinsi dan Nasional 2021-2025, sebagai berikut:

Tabel 2. 32 Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo dibanding Rata-rata Kab/Kota se-Subosukawonosraten, Provinsi dan Nasional 2021-2025

Nasional/Provinsi/ Subosukawonosraten	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)				
	2021	2022	2023	2024	2025
NASIONAL	27540,0	26000,36	25.898,55	25.220	
PROVINSI JAWA TENGAH	4109,8	3 831,44	3791,50	3704,33	
Kabupaten Boyolali	104,8	97,18	97,48	95,96	86,97
Kabupaten Klaten	158,2	144,87	144,43	141,84	129,68
Kabupaten Sukoharjo	73,8	68,72	68,79	68,15	62,66
Kabupaten Wonogiri	110,5	105,19	104,82	102,57	91,9

Kabupaten Karanganyar	95,4	88,56	88,64	87,37	77,66
Kabupaten Sragen	122,9	115,14	114,62	110,65	100,08
Kota Surakarta	48,8	45,94	43,89	43,28	40,08

Sumber: BPS Jawa Tengah

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi dimensi lainnya yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan. Selain harus memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan.

Tabel 2. 33 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin serta Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo, 2021–2025

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
2021	410 273	73,84	8,23	0,91	0,21
2022	434 318	68,72	7,61	0,87	0,14
2023	476,675	68,79	7,58	1,17	0,31
2024	501,693	68,15	7,47	1,21	0,31
2025	536,779	62,66	6,83	0,62	0,1

Sumber: BPS Sukoharjo

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Sukoharjo pada 2025 mencapai 62,66 ribu orang (6,83). kemiskinan Tahun 2025 sebesar Rp 536.779.

Analisis data menunjukkan bahwa selama periode 2020–2025, garis kemiskinan terus meningkat, mencerminkan kenaikan biaya hidup. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan pada 2020 dan 2021, diduga akibat dampak pandemi COVID-19, sebelum mengalami penurunan pada 2022 dan stabil pada 2023. Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKP) juga bervariasi. IKK mengalami kenaikan signifikan pada 2023 menjadi 1,21, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. IKP juga naik tajam pada 2023 menjadi 0,31, menunjukkan ketimpangan yang lebih besar di antara penduduk miskin. Tren ini mengindikasikan perlunya strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif untuk mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Sedangkan Perbandingan Pertumbuhan Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo dibanding Rata-rata Kab/Kota se-Subosukawonosraten, Provinsi dan Nasional 2018-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 34 Perbandingan Pertumbuhan Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo dibanding Rata-rata Kab/Kota se-Subosukawonosraten, Provinsi dan Nasional 2021-2025

Thn	Nasional		Jawa Tengah		Rata-rata Kab/Kota Subosukawonosraten		Sukoharjo	
	(P1)	Perubahan (P1)	(P1)	Perubahan (P1)	(P1)	Perubahan (P1)	(P1)	Perubahan (P1)
2021	1,71	0,1	1,91	0,19	1,69	0,23	0,91	-0,06
2022	1,59	-0,12	1,77	-0,14	1,42	-0,27	0,87	-0,04
2023	1,53	-0,02	1,75	-0,02	1,36	-0,06	1,17	0,30
2024	1,46	0,07	1,64	0,11	1,56	-0,2	1,21	-0,04
2025	1,37	0,09	1,56	0,08	1,32	0,24	0,62	0,59

Sumber: BPS Jawa Tengah

C. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo diharapkan memberi dampak positif, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk. Oleh karenanya perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi, salah satunya menggunakan indikator pembangunan manusia, baik komposit maupun tunggal. Secara komposit adalah dengan melihat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 adalah sebesar 79,90. Nilai ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 79,30. Dengan nilai sebesar ini, IPM di Kabupaten Sukoharjo termasuk kategori tinggi menurut UNDP, 2009, akan tetapi belum dapat dikategorikan sangat tinggi karena belum mencapai angka 80.

Nilai IPM Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 menempatkan Kabupaten Sukoharjo sebagai kabupaten dengan nilai IPM tertinggi se Jawa Tengah dan memposisikan Kabupaten Sukoharjo pada peringkat 10 besar nasional. Dalam perencanaan daerah RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2027, IPM ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Untuk Perbandingan IPM dengan target daerah dalam RPJMD disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 35 Pembandingan IPM dengan Target Daerah Tahun 2025 dan Akhir RPJMD 2021-2027 Kabupaten Sukoharjo

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024	2025			Realisasi 2025 thd Target Akhir RPJMD 2021-2027	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,30	78,77	79,90	101,43	78,77	101,15

Sumber: RPJMD Kab. Sukoharjo 2021-2027 dan BPS Sukoharjo

Adapun nilai IPM tertinggi di Jawa Tengah tahun 2025 secara berturut-turut masih diraih oleh Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Magelang. Di dalam kawasan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subosukawonosraten), capaian IPM masing-masing sesuai urutan peringkat adalah, sebagai berikut.

Tabel 2. 36 Perbandingan Nilai IPM Kabupaten/Kota Se-Subosukawonosraten Tahun 2025

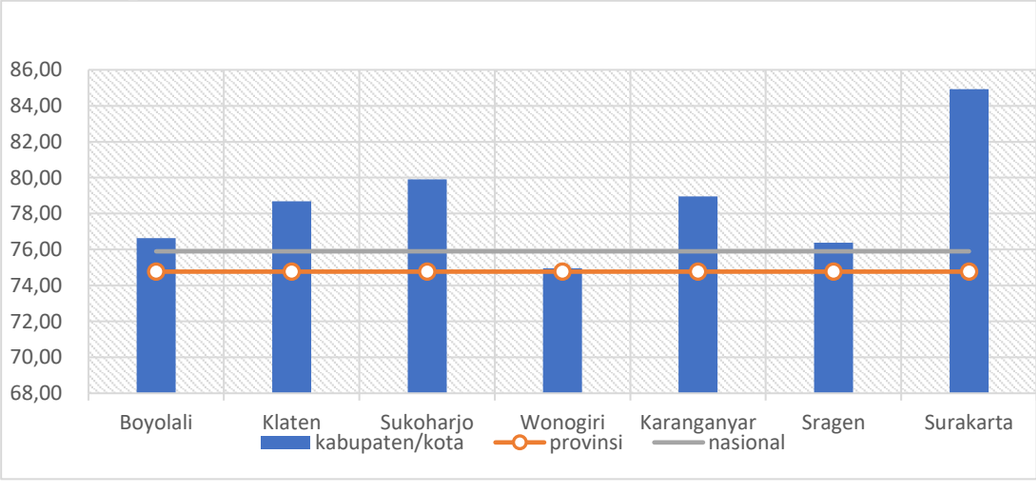
No	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM	Kategori	Peringkat Prov. Jawa Tengah	Peringkat Regional (Subosukawonosraten)
1	Surakarta	84,92	Sangat Tinggi	3	1
2	**Sukoharjo**	**79,90**	**Tinggi**	**5**	**2**
3	Karanganyar	78,96	Tinggi	6	3
4	Klaten	78,68	Tinggi	7	4
5	Boyolali	76,95	Tinggi	11	5
6	Sragen	76,38	Tinggi	13	6
7	Wonogiri	73,42	Tinggi	21	7

Sumber: BPS Jawa Tengah

Selama lima tahun terakhir, nilai IPM Sukoharjo menunjukkan tren yang positif dan selalu mengalami kenaikan, seperti ditunjukkan oleh

indikator IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia sebesar 77,13 pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga pada tahun 2025 sebesar 79,90.

Gambar 2. 25 Perbandingan IPM Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2025



Sumber: BPS Jawa Tengah

Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Sukoharjo dengan Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025, disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 37 Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Sukoharjo dengan Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Kab/Kota	IPM					Pertumbuhan IPM				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Boyolali	74,4	74,97	75,41	75,96	76,95	0,2	0,77	0,58	0,72	1,31
Klaten	76,12	76,95	77,59	78,16	78,68	0,74	1,09	0,83	0,73	0,72
Sukoharjo	**77,13**	**77,94**	**78,65**	**79,30**	**79,90**	**0,19**	**1,05**	**0,91**	**0,82**	**0,75**
Wonogiri	70,49	71,04	71,97	72,54	73,42	0,34	0,78	1,31	0,79	1,21
Karanganyar	75,99	76,58	77,31	78,11	78,96	0,17	0,78	0,95	1,02	1,08
Sragen	74,08	74,65	75,1	75,53	76,38	0,18	0,77	0,6	0,57	1,12
Kota Surakarta	82,62	83,08	83,54	84,41	84,92	0,5	0,56	0,55	1,03	0,60
Rata-rata Subosuka Wonosraten	**75,83**	**76,46**	**77,08**	**77,72**	**78,17**	**0,33**	**0,83**	**0,83**	**0,82**	**0,58**
JAWA TENGAH	**72,16**	**72,79**	**73,39**	**73,87**	**74,77**	**0,4**	**0,87**	**0,82**	**0,65**	**1,21**
NASIONAL	**72,29**	**73,77**	**74,39**	**75,02**	**75,90**	**0,49**	**0,86**	**0,84**	**0,85**	**0,88**

Sumber: BPS Jawa Tengah

Dengan menempati 5 besar di Jawa Tengah, harapan menuju Sukoharjo yang lebih makmur kian dekat dengan masyarakat di Sukoharjo. Secara lengkap komponen pembentuk IPM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38 Nilai Komponen IPM Kabupaten Sukoharjo, Kab/Kota Sekitarnya, Provinsi dan Nasional Tahun 2024 – 2025

No	Kabupaten/ Kota	UHH(e0)		Rata–Rata Lama Sekolah (RLS)		Harapan Lama Sekolah (HLS)		PPP (Rp.000)	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Boyolali	76,44	76,75	8,17	8,41	12,67	13,13	14,195	14.594
2	Klaten	77,31	77,73	9,29	9,30	13,43	13,54	13,513	13.948
3	**Sukoharjo**	**78,01**	**78,43**	**10,01**	**10.02**	**13,92**	**14,29**	**12.758**	**13.238**
4	Wonogiri	76,82	77,22	7,68	7,85	12,61	12,71	10.634	10.938
5	Karanganyar	77,91	78,26	9,26	9,27	13,73	13,62	12.732	13.244
6	Sragen	76,18	76,49	7,88	7,89	12,93	13,1	13.890	14.461
7	Surakarta	77,91	78,17	11,25	11,26	15,07	15,05	16.291	16.883
8	Jawa Tengah	74,91	75,71	8,02	8,15	12,86	13,05	12.276	12.746
9	Nasional	74,15	74,53	8,85	9,07	13,21	13,31	12.341	12.802

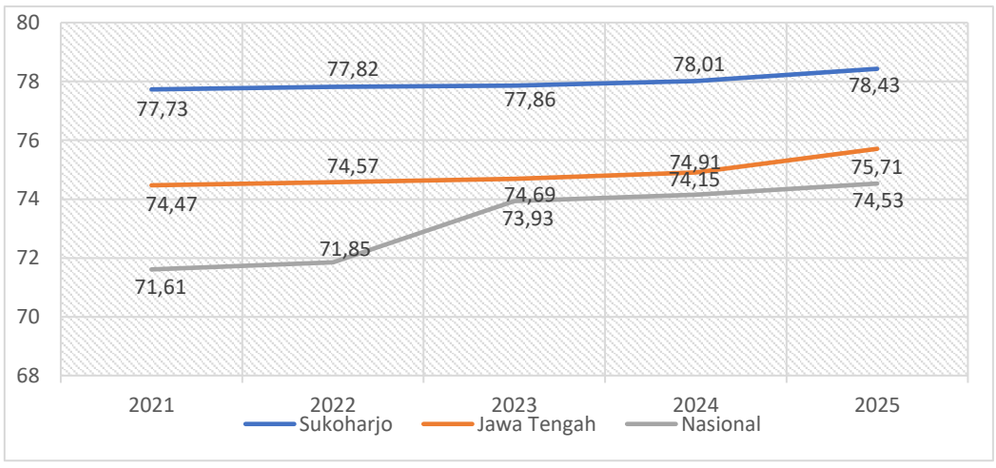
Sumber: BPS Jawa Tengah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa peningkatan nilai tiap kompenen pendukung IPM di Kabupaten Sukoharjo memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai IPM di Kabupaten Sukoharjo memang didukung dari meningkatnya nilai semua komponen IKM.

a. Kesehatan

Untuk mengetahui tingkat kesehatan dapat diukur dari angka harapan hidup. Umur harapan hidup Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 sebesar 78,43. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Sukoharjo dapat hidup hingga lebih dari 78 tahun. Jika dilihat secara harfiah peningkatan yang terjadi tidak tampak signifikan tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Umur harapan hidup di Kabupaten Sukoharjo tertinggi apabila dibandingkan dengan daerah sekitar, dan lebih tinggi dari rata-rata angka harapan hidup di Propinsi Jawa Tengah, dan Nasional.

Gambar 2. 26 Umur Harapan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Jawa Tengah

Selaras dengan angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sukoharjo, Umur Harapan Hidup (UHH) naik dari 77,73 pada tahun 2021 menjadi 78,43 pada tahun 2025. Dalam perencanaan daerah

RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2027, UHH ditetapkan sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Daerah. Untuk Perbandingan UHH dengan target daerah dalam RPJMD disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 39 Pembandingan UHH dengan Target Daerah Tahun 2024 dan akhir RPJMD 2021-2027 Kabupaten Sukoharjo

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024	2025			Realisasi 2025 thd Target RPJMD 2021-2027	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Angka Harapan Hidup	Indeks	78,01	78,10	78,43	100,42	78,20	100,29

Sumber: RPJMD Kab. Sukoharjo 2021-2027 dan BPS Sukoharjo

Sedangkan Perbandingan Pertumbuhan UHH Kabupaten Sukoharjo dengan Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024, disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 40 Perbandingan Pertumbuhan UHH Kabupaten Sukoharjo dengan Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025

No	Kab/Kota	Nilai UHH		Pertumbuhan UHH 2025
		2024	2025	
1	Kabupaten Boyolali	76,44	76,75	0,40
2	Kabupaten Klaten	77,31	77,73	0,54
3	**Kabupaten Sukoharjo**	**78,01**	**78,43**	**0,53**
4	Kabupaten Wonogiri	76,82	77,22	0,52
5	Kabupaten Karanganyar	77,91	78,26	0,45
6	Kabupaten Sragen	76,18	76,49	0,41
7	Kota Surakarta	77,91	78,17	0,33
Jawa Tengah		74,91	75,71	1,06
Nasional		74,15	74,53	0,51

Sumber: BPS Jawa Tengah

b. Pendidikan

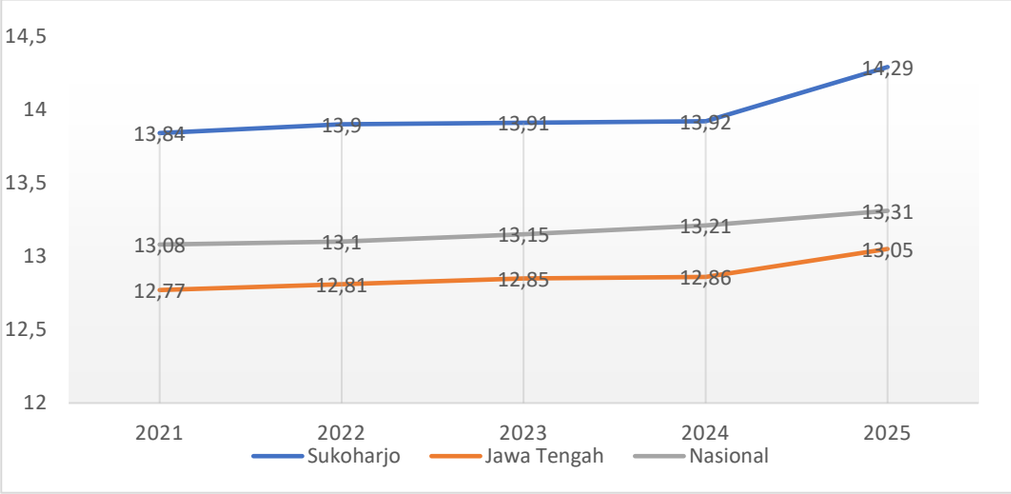
Komponen tingkat pendidikan dihitung dengan dua indikator, yaitu angka harapan lama sekolah yang merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

1. Harapan Lama Sekolah

   Indikator ini merupakan salah satu indikator output bidang pendidikan yang memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar 14,29 memberikan arti bahwa harapan lama sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa datang adalah 14,29 tahun atau telah mencapai pendidikan di universitas atau diploma pada tahun ke dua. Hal ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Sedangkan posisi

dengan daerah sekitar, menduduki posisi ke dua setelah Kota Surakarta.

Gambar 2. 27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Sukoharjo

Sedangkan untuk perbandingan pertumbuhan antar daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. 41 Perbandingan Pertumbuhan HLS Kabupaten Sukoharjo dengan Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025

No	Kab/Kota	Nilai HLS		Pertumbuhan HLS 2025
		2024	2025	
1	Kabupaten Boyolali	12,67	13,13	3,63
2	Kabupaten Klaten	13,43	13,54	0,81
3	**Kabupaten Sukoharjo**	**13,92**	**14,29**	**0,65**
4	Kabupaten Wonogiri	12,61	12,71	0,79
5	Kabupaten Karanganyar	13,73	13,62	-0,80
6	Kabupaten Sragen	12,93	13,1	0,31
7	Kota Surakarta	15,07	15,05	-0,13
Jawa Tengah		12,86	13,05	1,47
Nasional		13,21	13,31	0,01

Sumber: BPS Jawa Tengah

2. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar 10,02 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan secara rata-rata penduduk Kabupaten Sukoharjo memiliki pendidikan tertinggi SMP dan partisipasi sekolah berada di kisaran SMA. Dari enam kabupaten/kota pembanding, Kabupaten Sukoharjo berada pada posisi ke dua setelah Kota Surakarta, sebesar 11,26 tahun. Apabila dibandingkan dengan Rata-rata Jawa Tengah Kabupaten Sukoharjo baik untuk rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan sekolahnya lebih tinggi, dimana rata-rata lama sekolah dan rata rata harapan lama sekolah Jawa Tengah di tahun 2025 masing-masing sebesar 8,15 tahun dan 13,05

tahun. Angka ini sejalan dengan hasil Susenas Jawa Tengah yang mengindikasikan masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak/belum pernah sekolah.

Komponen Rata-Rata Lama Sekolah merupakan Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. RLS ditetapkan sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Daerah. Untuk Perbandingan RLS dengan target daerah dalam RPJMD disajikan sebagai berikut.

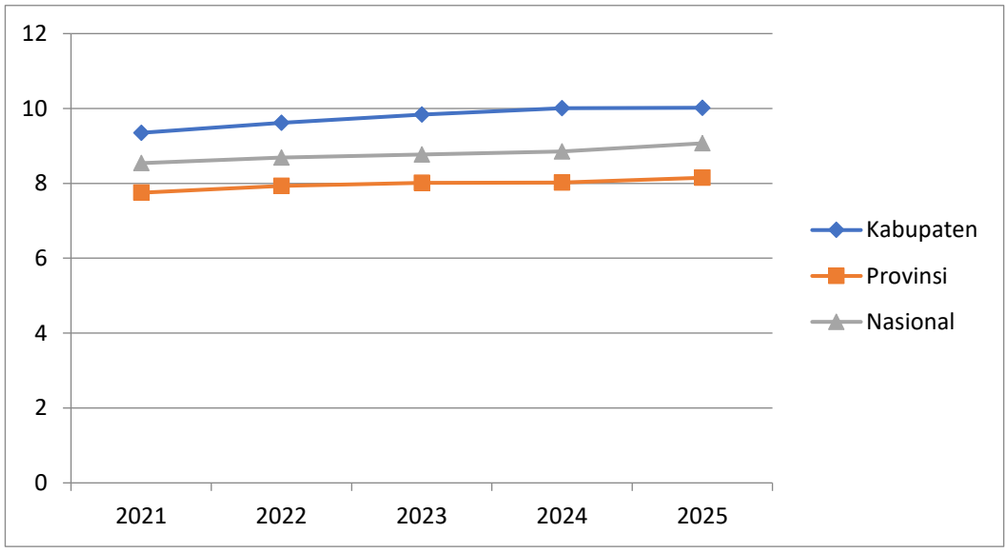
Tabel 2. 42 Perbandingan RLS dengan target daerah Tahun 2025 dan akhir RPJMD 2021-2027 Kabupaten Sukoharjo

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024	2025			Realisasi 2024 thd Target RPJMD 2021-2027	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,01	9,38	10,02	106,82	9,39	106,70

Sumber: RPJMD Kab. Sukoharjo 2021-2027 dan BPS Sukoharjo

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025, disajikan sebagai berikut:

Gambar 2. 28 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Sukoharjo & Hasil Analisis

Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Sukoharjo dengan Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Sukoharjo dengan Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024-2025

No	Kab/Kota	Nilai RLS		Pertumbuhan RLS
		2024	2025	
1	Kabupaten Boyolali	8,17	8,41	2,93
2	Kabupaten Klaten	9,29	9,30	0,1
3	**Kabupaten Sukoharjo**	**10,01**	**10,02**	**0,1**
4	Kabupaten Wonogiri	7,68	7,85	2,21
5	Kabupaten Karanganyar	9,26	9,27	0,1
6	Kabupaten Sragen	7,88	7,85	-0,38
7	Kota Surakarta	11,25	11,26	0,1
Jawa Tengah		8,02	8,15	1,62
Nasional		8,85	9,07	2,48

Sumber: BPS Jawa Tengah

c. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak yang dihitung dengan pendekatan paritas daya beli ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan paritas daya belinya makin meningkat pula. Tetapi hubungan ini tidak selalu benar karena kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

Dua orang yang pendapatannya sama belum tentu mempunyai paritas daya beli yang sama bila tempat tinggal dua orang itu berbeda. Misalnya sama-sama berpendapatan 1 juta rupiah sebulan yang satu tinggal di Sukoharjo yang satu lagi tinggal di Batam, maka kemungkinan paritas daya belinya berbeda.

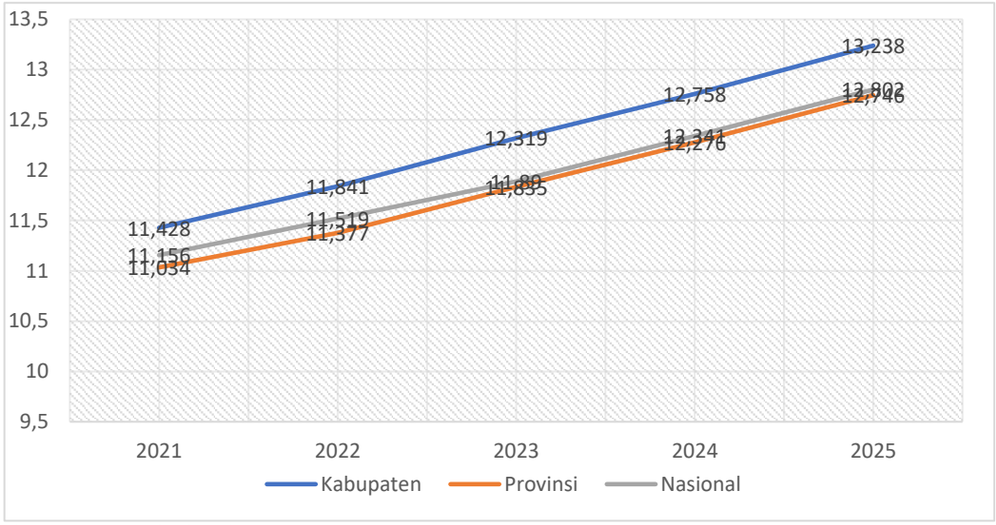
Tabel 2. 44 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan dengan Target Daerah Tahun 2025 dan akhir RPJMD 2021-2027 Kabupaten Sukoharjo (ribu rupiah/orang/tahun)

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2024	2025			Realisasi 2024 thd Target RPJMD 2021-2027	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Pengeluaran per kapita Disesuaikan	(ribu rupiah/orang /tahun)	12.758	12.600			12.700	

Sumber: RPJMD Kab. Sukoharjo 2021-2027 dan BPS Sukoharjo

Pengeluaran per kapita Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi, yaitu sebesar 3,56% merupakan pertumbuhan posisi ke-13 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita di Kabupaten Sukoharjo meningkat dari Rp. 12,319 Juta pada tahun 2023 menjadi Rp. 12,758 Juta pada tahun 2024. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup penduduk Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 2. 29 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Sukoharjo

Perbandingan Pertumbuhan PPP Kabupaten Sukoharjo dengan Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (ribu rupiah/orang/tahun) sebagai berikut:

Tabel 2. 45 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluran Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Sukoharjo dengan Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (ribu rupiah/orang/tahun)

Kab/Kota	Pengeluran Per Kapita yang Disesuaikan					Pertumbuhan Pengeluran Per Kapita yang Disesuaikan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Boyolali	13.031	13.250	13.716	14.195	14.594	1,68	3,52	3,49	2,81
Klaten	12.017	12.522	12.968	13.513	13.948	4,20	3,56	4,20	3,22
Sukoharjo	**11.428**	**11.841**	**12.319**	**12.758**	**13.238**	**3,61**	**4,04**	**3,56**	**3,76**
Wonogiri	9.429	9.780	10.283	10.634	10.938	3,72	5,14	3,41	2,86
Karanganyar	11.509	11.798	12.260	12.732	13.244	2,51	3,92	3,85	4,02
Sragen	12.679	13.052	13.439	13.890	14.461	2,94	2,97	3,36	4,11
Surakarta	14.911	15.463	15.870	16.291	16.883	3,70	2,63	2,65	3,63
JAWA TENGAH	11.034	11.377	11.835	12.276	12.746	3,11	4,03	3,73	3,83
NASIONAL	11.156	11.479	11.899	12.341	12.802	2,90	3,66	3,71	3,73

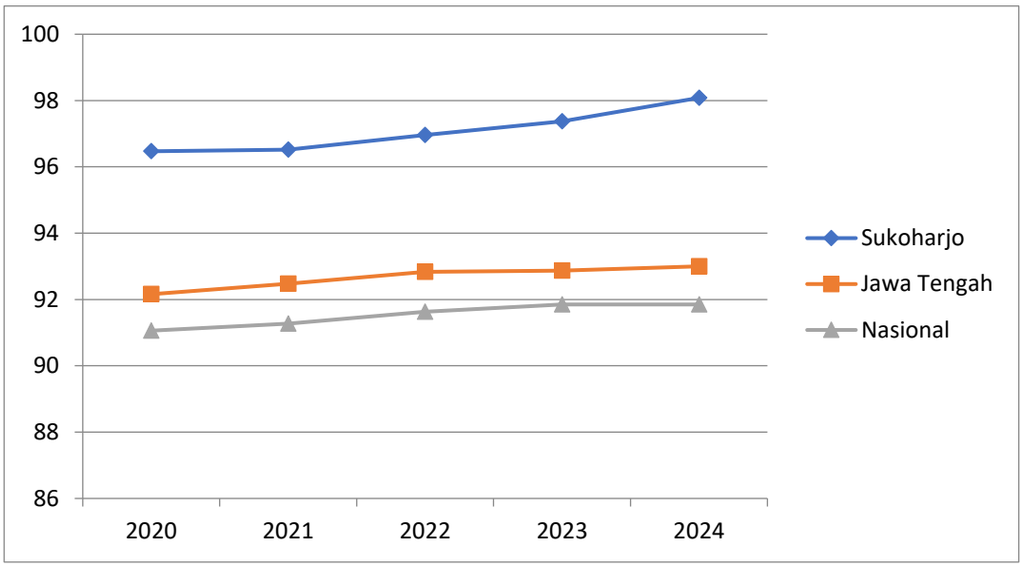
Sumber: BPS Jawa Tengah

2. Indeks Pembangunan Gender

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.

IPG Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kondisi progresif dengan kecenderungan meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo sangat fokus dan komitmen terhadap isu pembangunan gender.

Gambar 2. 30 Perbandingan IPG Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Jawa Tengah

3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Tiga komponen pembentuk IDG yaitu persentase pendapatan perempuan, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

Tabel 2. 46 Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sukoharjo

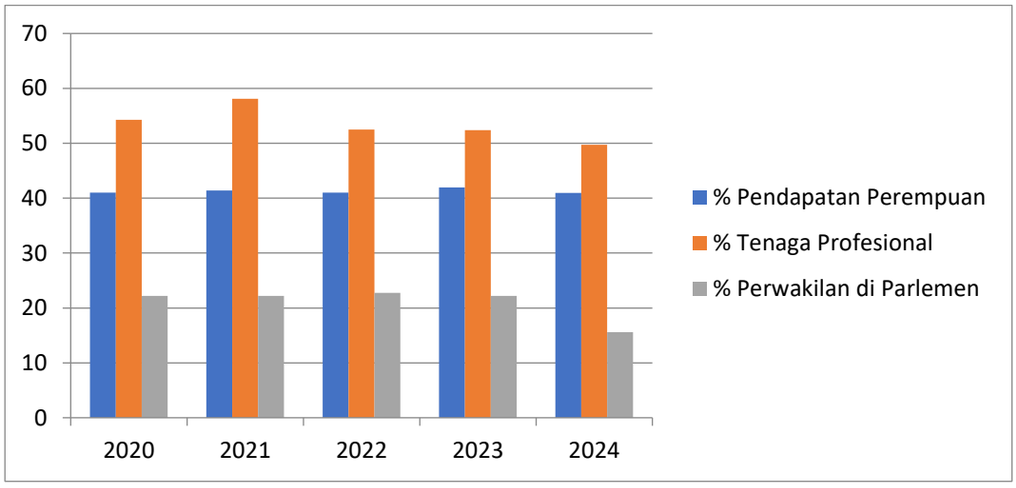
Tahun	% Pendapatan Perempuan	% Tenaga Profesional	% Keterwakilan di Parlemen
2020	41,02	54,28	22,22
2021	41,42	58,12	22,22
2022	40,98	52,48	22,73
2023	41,93	52,40	22,22
2024	40,96	49,71	15,56

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo (data terakhir diperbaharui 13 Maret 2027)

Apabila dilihat dari indikator pembentukan IDG di Kabupaten Sukoharjo, selama kurun waktu 2020-2024, perempuan sebagai tenaga profesional masih merupakan komponen tertinggi dalam menyumbang angka IDG. Fluktuasi komponen pembentuk IDG dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2. 31 Komponen Pembentuk IDG Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

4.

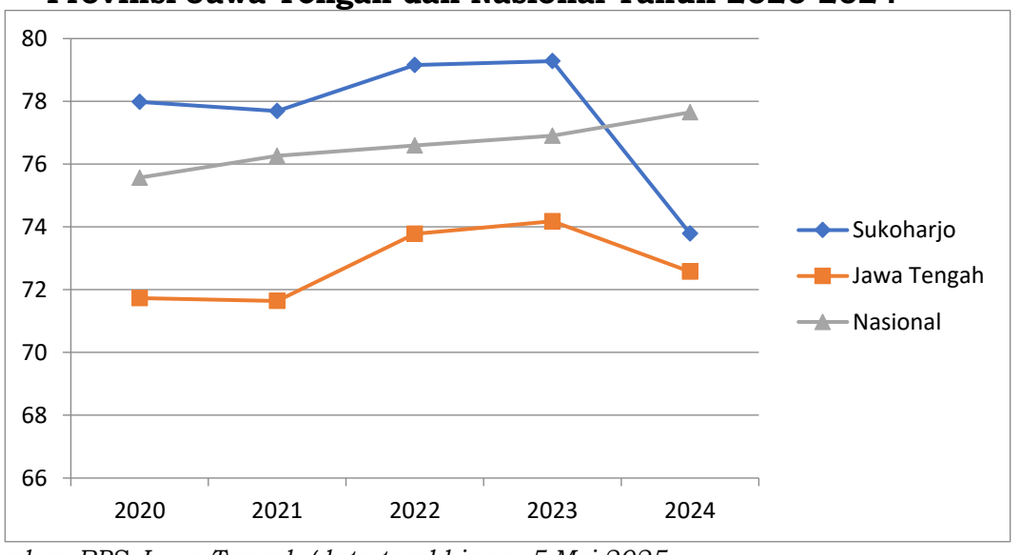


Sumber: BPS Sukoharjo (data terakhir per 6 Mei 2025)

5.

Jika dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, IDG Kabupaten Sukoharjo berada di atas IDG Provinsi dan Nasional. Perkembangan Perbandingan IDG Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi dan Nasional bisa dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2. 32 Perbandingan IDG Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Jawa Tengah (data terakhir per 5 Mei 2025

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Beberapa konsep yang terkait dengan indikator ini, yakni: Angkatan

kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur, Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Secara detail perkembangan TPT dan TPAK Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dari Tabel berikut.

Tabel 2. 47 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Tahun	TPT (%)			TPAK (%)		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Nasional	Provinsi	Kabupaten
2021	6,49	5,95	3,32	67,80	69,58	68,78
2022	5,86	5,57	2,47	68,63	70,84	67,38
2023	5,32	5,13	3,40	69,48	71,72	67,66
2024	4,91	4,78	3,65	70,60	73,74	68,21
2025	4,85	4,66	4,32	70,59	74,36	70,00

Sumber: BPS Jawa Tengah

Perbandingan Realisasi TPT dengan target daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 48 Perbandingan TPT (%) Realisasi dengan Target Daerah dalam RPJMD dan Perubahan TPT tahun 2021-2025

No	Tahun	Target TPT	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Keterangan
1	2021	4,83-4,79	3,32	-3,61	Tercapai
2	2022	4,78-4,66	2,47	-0,85	Tercapai
3	2023	4,67-4,58	3,40	0,93	Tercapai
4	2024	4,57-4,48	3,65	0,25	Tercapai
5	2025	4,47-4,00	4,32	0,67	Tercapai

Sumber: BPS Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 sampai tahun 2025 capaian TPT Kabupaten Sukoharjo dapat mencapai Target TPT yang di tetap dalam RPJMD, Pada tahun 2025 target TPT Kabupaten Sukoharjo pada RPJMD sebesar 4,57-4,48% realisasi tercapai sebesar 4,32% hal ini menunjukkan bahwa Pengangguran terbuka di Sukoharjo terserap di lapangan kerja yang ada sehingga perlu upaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan lapangan kerja di Sukoharjo.

Apabila dibandingkan dengan perubahan TPT nasional, TPT Propinsi dan TPT rata-rata wilayah kabupaten/kota se-Subosukawonosraten, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

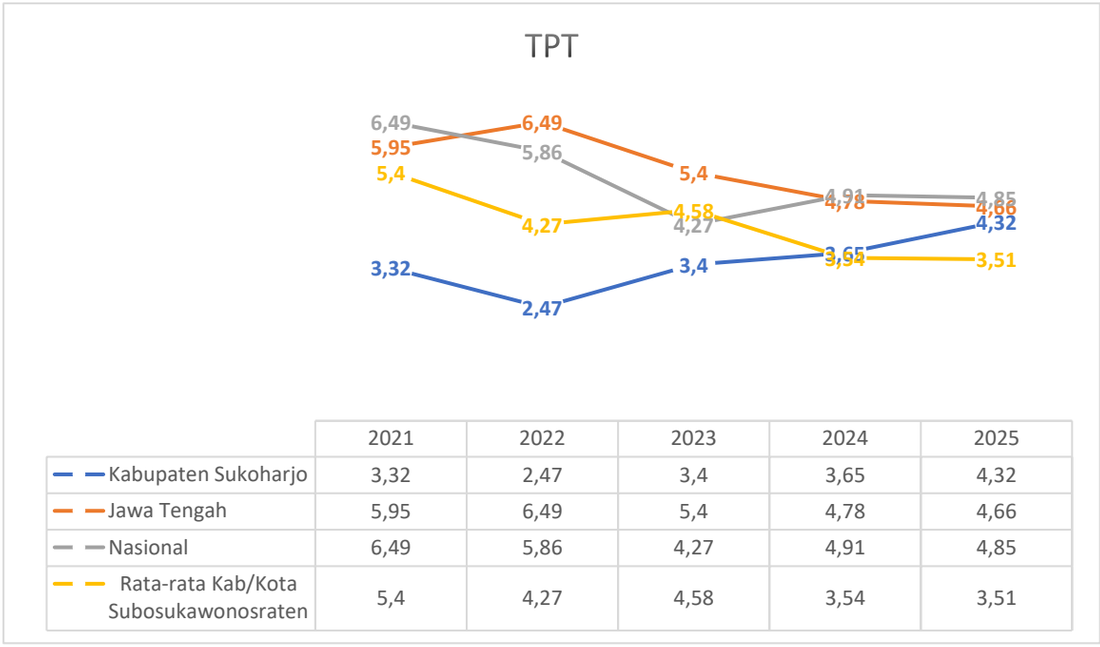
Tabel 2. 49 Perbandingan TPT (%) Kabupaten Sukoharjo terhadap TPT Nasional, Propinsi Jawa Tengah dan Rata-Rata TPT Subosukawonosraten Tahun 2021-2025

Tahun	Nasional		Jawa Tengah		Rata-rata Kab/Kota Subosukawonosraten		Sukoharjo	
	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Realisasi TPT	Perubahan TPT
2021	6,49	-0,58	5,95	-0,53	5,4	-0,48	3,32	-3,61
2022	5,86	-0,63	5,57	-0,38	4,27	-1,13	2,47	-0,85
2023	5,32	-0,54	5,13	-0,44	4,58	0,31	3,40	0,93
2024	4,91	-0,41	4,78	-0,35	3,54	-1,04	3,65	0,25
2025	4,85	-0,06	4,66	0,12	3,51	-0.03	4,32	0,67

Sumber: BPS Jawa Tengah

TPT Sukoharjo pada tahun 2025 masih lebih baik dibanding TPT Jawa Tengah dan Nasional, namun dibanding rata-rata TPT Subosukawonosraten masih lebih tinggi, hal ini perlu upaya untuk dapat menurunkan TPT di Sukoharjo.

Gambar 2. 33 TPT Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024



	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Sukoharjo	3,32	2,47	3,4	3,65	4,32
Jawa Tengah	5,95	6,49	5,4	4,78	4,66
Nasional	6,49	5,86	4,27	4,91	4,85
Rata-rata Kab/Kota Subosukawonosraten	5,4	4,27	4,58	3,54	3,51

Sumber: BPS Jawa Tengah

Untuk gambaran lain tentang ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 50 Penduduk Sukoharjo Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2021-2025

Jenis Kegiatan Tenaga Kerja	Penduduk Sukoharjo Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	717.171	Na. (BPS)	737.148	748.353	757.568
Angkatan Kerja	493.258	487.662	499.743	510.436	530.316
Bekerja	476.867	475.594	482.765	491.805	507.385
Pengangguran Terbuka	16.391	12.068	16.978	18.631	22.931
Bukan Angkatan Kerja	223.913	236.114	238.908	237.917	227.252
T P A K (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	68,78	67,38	67,66	68,21	70,00
T P T (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	3,32	2,47	3,40	3,65	4,32

Sumber: BPS Sukoharjo

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025 sebanyak 530.316 orang. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Tahun 2025 sebanyak 507.385 orang penduduk di Kabupaten Sukoharjo bekerja sedangkan sebanyak 22.931 orang menganggur. Kondisi ekonomi global dan kelesuan usaha tekstil berdampak pada penambahan penduduk penganggur dan mempengaruhi aktivitas ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum di Kabupaten Sukoharjo.

D. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

Pembangunan dan pelestarian kebudayaan dapat menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya, dan tradisi. Pembangunan dan pelestarian kebudayaan juga dapat meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, serta memperkokoh ketahanan budaya. Sebagai bagian dari bangsa yang kaya akan budaya, Kabupaten Sukoharjo memiliki berbagai macam peninggalan sejarah bernilai tinggi. Beberapa tempat telah dikelola sebagai tempat/objek wisata, namun ada juga yang dikelola sebagai cagar budaya agar terjaga kelestariannya. Bukti-bukti keluhuran budaya masyarakat Sukoharjo pada masa lalu dapat dilihat pada peninggalan-peninggalan masa lampau yang sekarang menjadi warisan budaya. Warisan budaya berupa benda dapat dibedakan atas benda, bangunan, struktur, dan situs.

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sesuatu disebut sebagai:

a. Benda cagar budaya, jika:
   1. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
   2. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
   3. merupakan kesatuan atau kelompok.

b. Bangunan cagar budaya, jika:

1. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
2. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

c. Struktur cagar budaya, jika
   1. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
   2. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

d. Situs cagar budaya, jika:
   1. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
   2. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Berdasarkan batasan-batasan tersebut, di Kabupaten Sukoharjo dapat diuraikan jumlah dan pesebarannya, sebagai berikut.

Tabel 2. 51 Rekapitulasi Data Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 – 2025

No	Kecamatan / Penyimpanan	Benda		Bangunan		Struktur		Situs		Jumlah		OPS*	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Kecamatan													
1	Baki	1	1	-	-	3	3	-	-	4	4	1	3
2	Bendosari	5	3	1	1	3	5	-	-	9	9	4	5
3	Bulu	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-
4	Gatak	6	6	-	-	2	2	-	-	8	8	3	5
5	Grogol	2	2	3	3	11	11	-	-	16	16	8	8
6	Kartasura	36	35	2	2	9	10	3	3	50	50	37	11
7	Mojolaban	17	17	1	1	1	1	1	1	20	20	10	10
8	Nguter	12	12	2	2	3	3	-	-	17	17	7	9
9	Polokarto	16	16	4	4	3	3	-	-	23	23	6	17
10	Sukoharjo	2	2	4	4	2	2	-	-	8	8	2	6
11	Tawangsari	2	2	1	1	3	3	-	-	6	6	3	3
12	Weru	3	3	-	-	8	14	1	1	12	18	2	11
Jumlah		**102**	**99**	**18**	**18**	**49**	**58**	**5**	**5**	**174**	**180**	**84**	**88**
Tempat Penyimpanan													
13	Dinas P & K	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
14	Rumah Arca	120	126	-	-	-	-	-	-	120	126	62	57
Jumlah		**120**	**128**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120**	**128**	**62**	**57**
Total		**222**	**227**	**18**	**18**	**49**	**58**	**5**	**5**	**294**	**308**	**146**	**145**

Keterangan : OPS = Objek Peninggalan Sejarah, terinventaris Dinas
Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Sukoharjo dan Hasil Analisis

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mulai tegas dalam melaksanakan perlindungan terhadap benda cagar budaya. Hal ini ditunjukkan dengan telah terbitnya berbagai Surat Keputusan tentang Penetapan Cagar Budaya, sebagai berikut.

Tabel 2. 52 Data Penetapan Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

No.	Nama Objek	Nomor Regnas	Status	Nomor SK	Peringkat	Kategori	Desa/ Kelurahan	Kecamatan/ Lokasi Penyimpanan
1	Pesanggrahan Langenharjo	CB.6060.19700101.01463	CB	PM.24/PW.007/MKP/2007	Nasional	Bangunan	Langenharjo	Grogol
2	Situs Benteng Keraton Kartasura		CB	430/29/2024	Provinsi	Situs	Kartasura	Kartasura
3	Situs Candi Sirih	CB.6060.19700101.01476	CB	430/28/2024	Provinsi	Situs	Karanganyar	Weru
4	Arca Wisnu	CB.6161.20250428.00013	CB	400.6.2/482 Tahun 2025	Kabupaten	Benda	Kel. Mandan	Dinas P & K
5	Fragmen Prabha	CB.6161.20250428.00006	CB	400.6.2/483 Tahun 2025	Kabupaten	Benda	Kel. Mandan	Dinas P & K
6	Arca Agastya	CB.6161.20250428.00014	CB	400.6.2/484 Tahun 2025	Kabupaten	Benda	Kel. Jombor	Rumah Arca
7	Arca Tokoh	CB.6161.20250428.00005	CB	400.6.2/485 Tahun 2025	Kabupaten	Benda	Kel. Jombor	Rumah Arca
8	Lingga	CB.6161.20250428.00007	CB	400.6.2/486 Tahun 2025	Kabupaten	Benda	Kel. Jombor	Rumah Arca
9	Lingga Patok	CB.6161.20250428.00004	CB	400.6.2/487 Tahun 2025	Kabupaten	Benda	Kel. Jombor	Rumah Arca
10	Landasan Lingga Patok	CB.6161.20250428.00003	CB	400.6.2/488 Tahun 2025	Kabupaten	Benda	Kel. Jombor	Rumah Arca
11	Kemuncak	CB.6161.20250428.00002	CB	400.6.2/489 Tahun 2025	Kabupaten	Benda	Kel. Jombor	Rumah Arca
12	Candi Induk	CB.6161.20250428.00011	CB	400.6.2/609 Tahun 2025	Kabupaten	Struktur	Karanganyar	Weru
13	Candi Perwara I (Selatan)	CB.6161.20250428.00010	CB	400.6.2/610 Tahun 2025	Kabupaten	Struktur	Karanganyar	Weru
14	Candi Perwara II (Tengah)	CB.6161.20250428.00009	CB	400.6.2/611 Tahun 2025	Kabupaten	Struktur	Karanganyar	Weru
15	Candi Perwara III (Utara)	CB.6161.20250428.00008	CB	400.6.2/612 Tahun 2025	Kabupaten	Struktur	Karanganyar	Weru
16	Talud Pagar Keliling Halaman I	CB.6161.20250428.00012	CB	400.6.2/613 Tahun 2025	Kabupaten	Struktur	Karanganyar	Weru
17	Struktur Benteng Baluwarti sisi Timur Keraton Kartasura	CB.6161.20270105.00003	CB	646/352 Tahun 2022	Kabupaten	Struktur	Kartasura	Kartasura
18	Struktur Pagar Dalem Singapuran	CB.6060.19700101.01469	CB	032/492 Tahun 2022	Kabupaten	Struktur	Singopuran	Kartasura
19	Situs Eks Pabrik Gula Gembongan Kartasura	CB.6060.19700101.01468	CB	646/592 Tahun 2022	Kabupaten	Situs	Pabelan	Kartasura
20	Bangunan Eks Kawedanan Bekonang	CB.6060.19700101.01464	CB	646/587 Tahun 2022	Kabupaten	Bangunan	Bekonang	Mojolaban
21	Situs Pesanggrahan Krapyak Giriwaya		CB	646/592 Tahun 2022	Kabupaten	Situs	Pucangan	Kartasura
22	Gapura Kwarasan	CB.6060.19700101.00109	CB	646/558 Tahun 2023	Kabupaten	Struktur	Kwarasan	Grogol
23	Gapura Madegondo	CB.6060.19700101.00110	CB	646/560 Tahun 2023	Kabupaten	Struktur	Madegondo	Grogol

No.	Nama Objek	Nomor Regnas	Status	Nomor SK	Peringkat	Kategori	Desa/ Kelurahan	Kecamatan/ Lokasi Penyimpanan
24	Gapura Grogol	CB.6060.19700101.00111	CB	646/580 Tahun 2023	Kabupaten	Struktur	Grogol	Grogol
25	Gapura Makamhaji	CB.6061.20230918.00001	CB	646/581 Tahun 2023	Kabupaten	Struktur	Makamhaji	Kartasura
26	Masjid Tiban Al Barokah Sumedangan	CB.6060.19700101.01470	CB	646/582 Tahun 2023	Kabupaten	Bangunan	Gentan	Bendosari
27	Masjid Agung Jatisobo	CB.6060.19700101.01466	CB	646/584 Tahun 2023	Kabupaten	Bangunan	Jatisobo	Polokarto
28	Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R.Soepomo	CB.6060.19700101.01475	CB	646/592 Tahun 2023	Kabupaten	Bangunan	Sukoharjo	Sukoharjo
29	Makam Sumedangan	CB.6060.19700101.01471	CB	646/593 Tahun 2023	Kabupaten	Bangunan	Gentan	Bendosari
30	Makam Gusti Pangeran Harya Pringgalaya	CB.6060.20231108.00004	CB	400.6.2/724 TAHUN 2024	Kabupaten	Struktur	Wironanggan	Gatak
31	Tempayan Batu Berinksripsi	CB.6161.20240704.00003	CB	400.6.2/869 TAHUN 2024	Kabupaten	Benda	Kel. Jombor	Rumah Arca
32	Komponen Batu Candi berelief SKO.054/19	CB.6060.19700101.15136	CB	400.6.2/871 TAHUN 2024	Kabupaten	Benda	Kel. Jombor	Rumah Arca
33	Yoni Candirejo	CB.6060.19700101.15096	CB	400.6.2/879 TAHUN 2024	Kabupaten	Benda	Kel. Jombor	Rumah Arca
34	Nandi SKO.047/19	CB.6060.19700101.15129	CB		Kabupaten	Benda	Kel. Jombor	Rumah Arca

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Hasil Analisis

Berdasarkan tabel tersebut, hingga tahun 2025 tercatat ada 34 objek cagar budaya yang telah memiliki SK Penetapan, sehingga keberadaan dan kelestariannya dapat terjaga karena telah memiliki payung hukum yang pasti. Ke depannya diharapkan jumlah benda cagar budaya akan makin banyak yang memiliki SK Penetapan, sehingga akan dapat menambah khazanah kebudayaan di Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya dapat memberikan efek ekonomis lebih lanjut ke masyarakat sekitar.

2. Olahraga

Pengembangan di bidang olahraga dimaksudkan untuk mewadahi prestasi atlet lokal atau para bibit atlet untuk dapat lebih berkembang di kancah yang lebih besar. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Sukoharjo hingga tahun 2024 sejumlah 175 orang, di mana jumlah tersebut masih sama dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 memiliki 217 klub olah raga dengan dukungan 152 gedung olahraga sebagai fasilitasnya.

Tabel 2. 53 Perkembangan Kepemudaan & Keolahragaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2025

No	Capaian Pembangunan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Klub Olahraga	217	217	217	217	311
2	Jumlah Gedung Olahraga	152	152	152	152	152
3	Jumlah Atlet Berprestasi	180	160	175	175	200
4	Jumlah Prestasi Olahraga	180	225	450	540	271
5	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	46	83	88,89	91,89	94,59
6	Jumlah Organisasi Pemuda	34	42	50	50	

Sumber : Disporapar Kab. Sukoharjo Tahun 2025

Upaya untuk mengoptimalkan sarpras olahraga harus terus digalakkan baik dari sisi kualitas pada sarpras yang sudah ada maupun menambah jumlah/ kuantitasnya. Dari upaya perbaikan sarana prasarana keolahragaan ini diharapkan mampu memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan keolahragaan serta diharapkan juga semakin meningkatnya penyelenggaran event-event keolahragaan yang secara otomatis akan meningkatkan minat masyarakat untuk hidup sehat melalui berolahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Pembinaan Ketenagaan, Pengembangan Budaya Baca.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi

rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Angka Partisipasi Kasar (PAUD)**	persen	36,72	82,85	89,57	91,62	86,62
2	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**						
2.1	APK SD/MI/Paket A	persen	108,83	109,53	106,95	105,81	106,09
2.2	APK SMP/MTs/Paket B	persen	108,42	117,69	114,16	111,1	108,37
3	**Angka Partisipasi Murni (APM)**	persen					
3.1	APM SD/MI/Paket A	persen	97,1	99,28	97,06	96,36	95,97
3.2	APM SMP/MTs/Paket B	persen	79,39	87,99	88,11	85,63	84,15
4	**Angka Kelulusan**	persen					
4.1	Angka Kelulusan SD	persen	100	100	100	100	100
4.2	Angka Kelulusan SMP	persen	100	100	100	100	100
5	**Angka Melanjutkan**	persen					
5.1	SD/MI ke SMP/MTs	persen	103,9	106,67	102,05	102,08	99,73
5.2	SMP/MTs ke SMA/SMA/MA	persen	101,82	103,74	109,94	113,83	112,52
6	**Angka Putus Sekolah**	persen					
6.1	SD/MI/Paket A	persen	0,02	0	0.0053	0,0013	0
6.2	SMP/MTs/Paket B	persen	0,03	0,01	0,025	0,0051	0
7	**Persentase Guru SD & SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4**	persen	92,33	4.161	95.49	95,49	95,6
8	**Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar**		01:13	01:13	01:13	01:13	01:12

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021–2025, terlihat adanya tren pemulihan yang cukup signifikan setelah penurunan tajam pada tahun 2021 yang hanya mencapai 36,72 persen. Pada tahun 2022 APK PAUD meningkat drastis menjadi 82,85 persen, kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 89,57 persen atau naik sebesar 6,72 persen. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 91,62 persen atau naik sebesar 2,05 persen dari tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2025 APK PAUD mengalami penurunan menjadi 86,62 persen atau turun sebesar 5,00 persen.

Secara umum, capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada periode ini menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pasca tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan mulai pulihnya partisipasi masyarakat terhadap

layanan PAUD, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD). Selain itu, belum adanya regulasi formal berupa Peraturan Bupati terkait program 1 Tahun Pra-SD di Kabupaten Sukoharjo, meskipun telah terdapat komitmen bersama di 12 kecamatan, turut memengaruhi optimalisasi penganggaran dan penyelenggaraan PAUD.

Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya PAUD, serta penguatan kebijakan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan seperti rapat koordinasi bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal (PNF) perlu terus ditingkatkan guna mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan PAUD secara lebih efektif, sehingga capaian APK PAUD dapat lebih stabil dan meningkat secara berkelanjutan.

b. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, termasuk pendidikan Non Formal turut diperhintungkan. Capaian Angka Partisipasi Kasar jenjang SD/MI di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi namun cenderung naik, dilihat dari data bahwa tahun 2020 APK SD/MI sebesar 102,33 persen menjadi 109,53 persen di tahun 2022, sedang di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,72 atau menjadi 105,81.

Dan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, dilihat data pada table penurunan ditahun 2020 sebesar 101,77, mengalami kenaikan sebesar 12,39 atau 114,16 ditahun 2023, namun di tahun 2024 mengalami penurunan disbanding capaian 2023 sebesar 3,06 atau 114,16.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI selama periode 2021–2025 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun setelah mencapai titik tertinggi pada tahun 2022 sebesar 99,28 persen. Pada tahun 2021 sebesar 97,1 persen, kemudian relatif stabil pada tahun 2023 (97,06 persen), namun mengalami penurunan bertahap hingga 95,97 persen pada tahun 2025. Sementara itu, APM SMP/MTs mengalami peningkatan cukup signifikan dari 79,39 persen pada tahun 2021 menjadi 88,11 persen pada tahun 2023, sebelum kembali menurun menjadi 84,15 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah sesuai usia pada jenjang SMP sempat mengalami perbaikan, namun belum stabil.

Dinamika ini mengindikasikan masih adanya anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan sesuai jenjang usianya, terutama pada jenjang SMP/MTs. Faktor penyebab dapat meliputi kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan akses, serta preferensi sebagian masyarakat terhadap pendidikan nonformal atau masuk kerja lebih awal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan berupa peningkatan akses pendidikan, penguatan

program wajib belajar, serta pendampingan bagi kelompok rentan agar partisipasi murni dapat meningkat secara konsisten.

d. Angka Kelulusan

Angka kelulusan pada jenjang SD dan SMP selama periode 2021–2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal dan konsisten, yaitu sebesar 100 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh peserta didik yang mengikuti proses pendidikan mampu menyelesaikan studinya tanpa hambatan administratif maupun akademik yang signifikan. Stabilitas capaian ini juga menunjukkan efektivitas sistem evaluasi dan pembinaan peserta didik di tingkat satuan pendidikan.

Namun demikian, capaian kelulusan 100 persen juga perlu dianalisis lebih lanjut dari sisi kualitas hasil belajar. Tingginya angka kelulusan belum tentu mencerminkan kompetensi lulusan yang optimal jika tidak diiringi dengan standar penilaian yang ketat dan peningkatan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, selain mempertahankan capaian kelulusan, perlu dilakukan penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kurikulum yang adaptif, serta sistem evaluasi yang lebih komprehensif.

e. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan, dari 103,9 persen pada tahun 2021 menjadi 99,73 persen pada tahun 2025. Meskipun masih berada di sekitar angka 100 persen, penurunan ini mengindikasikan adanya sebagian lulusan SD yang tidak langsung melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sebaliknya, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 101,82 persen pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 113,83 persen, sebelum sedikit menurun pada tahun 2025.

Perbedaan tren ini menunjukkan bahwa transisi dari jenjang dasar ke menengah pertama masih menghadapi tantangan, sementara transisi ke jenjang menengah atas relatif lebih baik. Hal ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menengah atas serta ketersediaan pilihan sekolah seperti SMK. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan motivasi dan dukungan bagi lulusan SD agar melanjutkan pendidikan, termasuk melalui bantuan biaya pendidikan dan penguatan kebijakan wajib belajar.

f. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang sangat rendah dan semakin menurun. Pada jenjang SD/MI, angka putus sekolah dari 0,02 persen pada tahun 2021 turun hingga mencapai 0 persen pada tahun 2025. Demikian pula pada jenjang SMP/MTs, dari 0,03 persen pada tahun 2021 menurun menjadi 0 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan pendidikan dasar bagi seluruh peserta didik.

Meskipun demikian, angka yang sangat rendah ini tetap perlu diwaspadai karena masih terdapat potensi kasus putus sekolah yang tidak terdata atau tersembunyi, terutama pada kelompok

masyarakat rentan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendataan yang lebih akurat serta intervensi preventif seperti program bantuan sosial, konseling pendidikan, dan pendekatan berbasis komunitas untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari sistem pendidikan.

g. Persentase Guru SD & SMP yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2021–2025. Dari 92,33 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi sekitar 95,49 persen pada tahun 2023 dan 2024, serta mencapai 95,6 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pemenuhan standar kualifikasi akademik.
Namun demikian, masih terdapat sebagian kecil guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut, yang berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan peningkatan kualifikasi melalui program pendidikan lanjutan, sertifikasi, serta dukungan kebijakan bagi guru untuk melanjutkan studi. Selain itu, peningkatan kualifikasi juga perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional.

h. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Rasio guru terhadap murid pada sekolah pendidikan dasar selama periode 2021–2025 relatif stabil pada angka 1:13, dan mengalami sedikit perbaikan menjadi 1:12 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik relatif mencukupi dalam mendukung proses pembelajaran, sehingga memungkinkan interaksi yang lebih efektif antara guru dan siswa.
Meskipun demikian, rasio yang ideal secara kuantitatif belum tentu merata secara spasial. Masih terdapat kemungkinan ketimpangan distribusi guru antar wilayah, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerataan distribusi guru serta penguatan manajemen tenaga pendidik agar rasio yang baik ini dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2. 55 Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2025 Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	SD / MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung sekolah SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Rasio	Jumlah Gedung sekolah SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	Rasio
1	Weru	49	5.938	1:121	9	3.223	1:358
2	Bulu	31	3.531	1:114	5	2.330	1:466
3	Tawangsari	35	5.120	1:146	7	2.417	1:345
4	Sukoharjo	56	9.058	1:162	13	4.119	1:317
5	Nguter	36	5.029	1:140	6	2.798	1:466
6	Bendosari	47	4.919	1:105	6	2.552	1:425
7	Polokarto	56	6.591	1:118	11	3.125	1:284
8	Mojolaban	50	6.239	1:125	10	3.085	1:308
9	Grogol	44	9.273	1:211	9	4.214	1:468
10	Gatak	37	4.808	1:130	5	2.354	1:471
11	Baki	36	5.390	1:150	7	2.497	1:357
12	Kartasura	56	5.047	1:90	15	3.013	1:201

Sumber: Dapodik Kemendikbud dan Kemenag Kab. Sukoharjo

i. Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada dasarnya menunjukkan kemampuan daya tampung fasilitas pendidikan dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2025 di Kabupaten Sukoharjo, terlihat adanya ketimpangan distribusi layanan pendidikan antar kecamatan. Pada jenjang SD/MI, kecamatan seperti Bendosari (1:105), Bulu (1:114), dan Polokarto (1:118) menunjukkan rasio yang relatif lebih baik (lebih kecil), yang berarti satu sekolah melayani jumlah siswa yang lebih sedikit sehingga potensi kualitas layanan lebih optimal. Sebaliknya, kecamatan seperti Grogol (1:211), Sukoharjo (1:162), dan Tawangsari (1:146) memiliki rasio yang lebih tinggi, yang mengindikasikan beban sekolah terhadap jumlah siswa lebih besar. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan terhadap kapasitas sekolah di wilayah tertentu, yang berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran seperti kepadatan kelas dan keterbatasan sarana.

Pada jenjang SMP/MTs, ketimpangan tersebut tampak lebih signifikan. Kecamatan Kartasura memiliki rasio terbaik (1:201), diikuti Polokarto (1:284) dan Sukoharjo (1:317), yang menunjukkan ketersediaan sekolah relatif memadai. Namun di sisi lain, kecamatan seperti Gatak (1:471), Grogol (1:468), Bulu (1:466), dan Nguter (1:466) menunjukkan rasio yang tinggi, yang berarti satu sekolah harus melayani jumlah penduduk usia 13–15 tahun yang jauh lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk usia sekolah belum sepenuhnya diimbangi dengan penambahan unit sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah pertama. Secara umum, kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan pemerataan pembangunan sarana pendidikan, baik melalui penambahan sekolah baru maupun optimalisasi zonasi dan distribusi peserta didik, agar akses pendidikan dapat lebih merata dan kualitas layanan tetap terjaga di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

j. Rasio Guru dan Siswa

Rasio jumlah guru terhadap jumlah murid menggambarkan kualitas proses pembelajaran disuatu daerah dengan membandingkan ketersediaan tenaga pendidik dengan jumlah ideal murid untuk satu guru. Di Kabupaten Sukoharjo, rasio ketersediaan guru cukup baik, apabila dihitung menghasilkan rata-rata untuk 1 guru mengajar 5-11 murid untuk jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Ketersediaan guru ini mencakup guru PNS dan Guru Non PNS.

Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan ini untuk memberikan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk insentif setiap bulan.

Tabel 2. 56 Jumlah Guru dan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2025 menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	SD / MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Weru	293	4.643	1:16	154	2.607	1:17
2	Bulu	276	2.173	1:8	81	1.075	1:13
3	Tawangsari	239	3.965	1:17	158	2.216	1:14

No	Kecamatan	SD / MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
4	Sukoharjo	506	10.530	1:21	419	7.189	1:17
5	Nguter	265	3.567	1:13	105	1.362	1:13
6	Bendosari	352	5.386	1:15	130	1.571	1:12
7	Polokarto	419	7.624	1:18	235	3.283	1:14
8	Mojolaban	523	7.605	1:14	313	4.765	1:15
9	Grogol	469	8.034	1:17	249	3.694	1:15
10	Gatak	272	4.131	1:15	133	2.104	1:16
11	Baki	344	6.364	1:18	198	3.147	1:16
12	Kartasura	654	10.791	1:16	363	5.261	1:14

Sumber: Dapodik Kemendikbud dan Kemenag Kab. Sukoharjo

k. Jumlah Guru dan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2025 menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Jumlah guru dan siswa pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) tahun 2025 menunjukkan distribusi yang relatif beragam antar kecamatan, baik dari sisi kapasitas tenaga pendidik maupun beban layanan pendidikan. Pada jenjang SD/MI, kecamatan dengan jumlah siswa terbesar terdapat di Kartasura (10.791 siswa), Sukoharjo (10.530 siswa), dan Grogol (8.034 siswa), yang juga diikuti jumlah guru relatif tinggi. Namun demikian, rasio guru terhadap murid di beberapa wilayah seperti Sukoharjo (1:21) menunjukkan beban guru yang lebih besar dibanding kecamatan lain seperti Bulu (1:8) atau Nguter (1:13). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi guru, di mana wilayah dengan jumlah siswa besar belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan guru yang proporsional. Secara nasional, rasio ideal berkisar sekitar 1:15 hingga 1:20 pada jenjang pendidikan dasar, sehingga beberapa kecamatan di Sukoharjo masih berada pada batas atas bahkan melebihi kondisi ideal.

Pada jenjang SMP/MTs, pola serupa juga terlihat dengan konsentrasi siswa tinggi di Sukoharjo (7.189 siswa), Kartasura (5.261 siswa), dan Mojolaban (4.765 siswa). Rasio guru terhadap murid relatif lebih merata, berkisar antara 1:12 hingga 1:17, yang secara umum masih dalam kategori ideal. Namun demikian, kecamatan seperti Weru dan Sukoharjo yang memiliki rasio 1:17 menunjukkan beban pengajaran yang lebih tinggi dibanding wilayah lain seperti Bendosari (1:12). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara agregat ketersediaan guru cukup memadai, masih terdapat tantangan dalam pemerataan distribusi tenaga pendidik antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penataan dan redistribusi guru berbasis kebutuhan riil, serta perencanaan jangka panjang dalam pengangkatan tenaga pendidik untuk memastikan kualitas pembelajaran yang merata di seluruh kecamatan.

Tabel 2. 57 Kondisi Ruang Kelas TK & RA Tahun 2025 menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	TK				RA			
	Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah
Weru	26	0	12	38	43	0	9	52
Bulu	21	2	4	27	6	0	4	10
Tawangsari	28	0	4	32	36	0	1	37
Sukoharjo	58	2	24	84	114	2	13	129
Nguter	27	0	7	34	25	0	7	32
Bendosari	53	0	7	60	30	1	5	36

Polokarto	56	0	24	80	82	0	1	83
Mojolaban	91	0	12	103	56	0	3	59
Grogol	120	1	12	133	59	0	5	64
Baki	67	0	14	81	47	0	3	50
Gatak	45	0	5	50	24	0	0	24
Kartasura	148	1	14	163	27	0	1	28
	740	**6**	**139**	**885**	**549**	**3**	**52**	**604**

Sumber: Dapodik Kemendikbud dan Kemenag Kab. Sukoharjo

Tabel 2. 58 Kondisi Ruang Kelas SD & MI Tahun 2025 menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	SD				MI			
	Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah
Weru	110	102	12	224	96	37	8	141
Bulu	113	70	6	189	2	0	0	2
Tawangsari	107	53	20	180	59	13	4	76
Sukoharjo	295	43	18	356	153	20	3	176
Nguter	139	43	3	185	43	6	3	52
Bendosari	182	45	12	239	77	21	7	105
Polokarto	211	80	16	307	112	9	2	123
Mojolaban	247	89	17	353	41	7	0	48
Grogol	277	74	10	361	38	2	0	40
Baki	159	61	5	225	66	21	2	89
Gatak	107	73	4	184	48	23	0	71
Kartasura	316	93	11	420	90	5	0	95
	2263	**826**	**134**	**3.223**	**825**	**164**	**29**	**1.018**

Sumber: Dapodik Kemendikbud dan Kemenag Kab. Sukoharjo

Tabel 2. 59 Kondisi Ruang Kelas SMP & MTS Tahun 2025 menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	SMP				MTS			
	Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah
Weru	71	9	0	80	15	4	2	21
Bulu	50	4	1	55	3	0	0	3
Tawangsari	59	8	0	67	18	0	0	18
Sukoharjo	192	11	2	205	33	8	0	41
Nguter	70	9	3	82				0
Bendosari	51	14	0	65	32	0	3	35
Polokarto	71	6	0	77	36	10	1	47
Mojolaban	133	2	0	135	0	28	0	28
Grogol	105	7	0	112	31	3	1	35
Baki	84	6	6	96	40	1	0	41
Gatak	61	6	0	67				0
Kartasura	139	7	7	153	45	0	0	45
	1086	**89**	**19**	**1.194**	**253**	**54**	**7**	**314**

Sumber: Dapodik Kemendikbud dan Kemenag Kab. Sukoharjo

1. Kondisi Ruang Kelas

   Salah satu bentuk pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah penyediaan ruang kelas yang layak dan sesuai standar. Kondisi ruang kelas pada jenjang TK dan RA di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 secara umum sudah cukup baik, namun masih terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan. Pada jenjang TK, dari total 885 ruang kelas terdapat 740 dalam

kondisi baik, 6 dalam kondisi rusak ringan, dan 139 dalam kondisi rusak berat, sedangkan pada jenjang RA dari total 604 ruang kelas terdapat 549 dalam kondisi baik, 3 dalam kondisi rusak ringan, dan 52 dalam kondisi rusak berat. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ruang kelas telah memenuhi standar kelayakan, namun masih terdapat proporsi ruang kelas rusak berat yang perlu menjadi perhatian, terutama pada wilayah dengan jumlah ruang kelas besar, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana secara berkelanjutan guna mendukung kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang lebih optimal.

Salah satu bentuk pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar adalah penyediaan ruang kelas yang layak dan sesuai standar nasional pendidikan. Kondisi ruang kelas pada jenjang SD dan MI di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan. Pada jenjang SD, dari total 3.223 ruang kelas, sebanyak 2.263 ruang kelas dalam kondisi baik, 826 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, dan 134 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Sementara itu, pada jenjang MI dari total 1.018 ruang kelas, sebanyak 825 ruang kelas dalam kondisi baik, 164 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, dan 29 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang kelas telah memenuhi standar kelayakan, namun proporsi ruang kelas dalam kondisi rusak ringan masih cukup tinggi, khususnya pada jenjang SD. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, dengan prioritas pada perbaikan ruang kelas rusak ringan agar tidak berkembang menjadi rusak berat, sehingga kualitas layanan pendidikan dasar dapat terus ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Salah satu bentuk pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama adalah penyediaan ruang kelas yang layak dan sesuai standar nasional pendidikan. Kondisi ruang kelas pada jenjang SMP dan MTs di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 secara umum menunjukkan kondisi yang baik, meskipun masih terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan. Pada jenjang SMP, dari total 1.194 ruang kelas, sebanyak 1.086 ruang kelas dalam kondisi baik, 89 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, dan 19 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Sementara itu, pada jenjang MTs dari total 314 ruang kelas, sebanyak 253 ruang kelas dalam kondisi baik, 54 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, dan 7 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar ruang kelas telah memenuhi standar kelayakan, namun keberadaan ruang kelas rusak ringan dan berat masih perlu menjadi perhatian, terutama agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, dengan prioritas pada perbaikan ruang kelas rusak agar kualitas layanan pendidikan menengah pertama dapat terus ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2. 60 Kualifikasi (S1/D4) Pada Jenjang TK & RA Tahun 2025 menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	TK			RA		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Weru	1	29	30	1	43	44
Bulu	2	15	17	-	11	11
Tawangsari	-	20	20	2	39	41
Sukoharjo	1	104	105	1	137	138
Nguter	-	37	37	2	42	44
Bendosari	-	60	60	1	40	41
Polokarto	1	65	66	1	68	69
Mojolaban	-	68	68	4	58	62
Grogol	1	135	136	-	53	53
Baki	3	79	82	-	64	64
Gatak	1	33	34	-	36	36
Kartasura	1	187	188	-	39	39
	11	**832**	**843**	**12**	**630**	**642**

Sumber: Dapodik Kemendikbud dan Kemenag Kab. Sukoharjo

Tabel 2. 61 Kualifikasi (S1/D4) Pada Jenjang SD & MI Tahun 2025 menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	SD			MI		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Weru	79	189	268	51	101	152
Bulu	98	168	266	-	4	4
Tawangsari	60	169	229	28	75	103
Sukoharjo	132	339	471	72	162	234
Nguter	78	176	254	24	37	61
Bendosari	85	249	334	38	101	139
Polokarto	115	283	398	53	108	161
Mojolaban	149	330	479	12	51	63
Grogol	124	329	453	16	33	49
Baki	92	222	314	37	83	120
Gatak	80	185	265	25	67	92
Kartasura	180	421	601	34	115	149
	1272	**3060**	**4.332**	**390**	**937**	**1.327**

Sumber: Dapodik Kemendikbud dan Kemenag Kab. Sukoharjo

Tabel 2. 62 Kualifikasi (S1/D4) Pada Jenjang SMP & MTS Tahun 2025 menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	SMP			MTS		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Weru	43	61	104	18	22	40
Bulu	27	45	72	1	5	6
Tawangsari	49	57	106	13	28	41
Sukoharjo	135	178	313	28	36	64
Nguter	35	61	96	-	-	0
Bendosari	28	53	81	10	29	39
Polokarto	49	87	136	48	39	87
Mojolaban	102	134	236	19	36	55
Grogol	69	96	165	24	28	52
Baki	59	82	141	16	17	33
Gatak	36	82	118	-	-	0
Kartasura	100	149	249	36	50	86
	732	**1085**	**1.817**	**213**	**290**	**503**

Sumber: Dapodik Kemendikbud dan Kemenag Kab. Sukoharjo

m. Kualifikasi S1/D4

Kualifikasi pendidikan S1/D4 bagi pendidik pada jenjang PAUD, khususnya TK dan RA, merupakan indikator penting dalam menjamin mutu layanan pendidikan anak usia dini sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025, jumlah pendidik TK yang memiliki kualifikasi S1/D4 tercatat sebanyak 843 orang, sedangkan pada RA sebanyak 642 orang, yang tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi terbesar di wilayah Sukoharjo, Grogol, dan Kartasura. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas

ketersediaan pendidik berkualifikasi sudah cukup memadai, namun masih terdapat ketimpangan distribusi antar wilayah serta perbedaan proporsi antara TK dan RA. Oleh karena itu, peningkatan kualifikasi akademik pendidik PAUD tetap perlu menjadi perhatian melalui program peningkatan kompetensi dan fasilitasi pendidikan lanjutan, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran sejak usia dini serta berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pendidikan pada jenjang berikutnya.

Kualifikasi pendidikan S1/D4 bagi pendidik pada jenjang SD dan MI merupakan indikator penting dalam menjamin mutu layanan pendidikan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025, jumlah guru SD yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 tercatat sebanyak **4.332 orang**, sedangkan pada jenjang MI sebanyak **1.327 orang**, yang tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi terbesar di wilayah Kartasura, Mojolaban, dan Sukoharjo. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan guru berkualifikasi pada jenjang pendidikan dasar sudah relatif memadai, meskipun masih terdapat ketimpangan distribusi antar wilayah serta perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara SD dan MI. Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan kualifikasi akademik guru tetap perlu menjadi perhatian melalui program peningkatan kompetensi dan fasilitasi pendidikan lanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat dasar serta mendukung pencapaian indikator partisipasi pendidikan seperti APK dan APM secara lebih optimal.

Kualifikasi pendidikan S1/D4 bagi pendidik pada jenjang SMP dan MTs merupakan indikator penting dalam menjamin mutu layanan pendidikan menengah pertama sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025, jumlah guru SMP yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 tercatat sebanyak **1.817 orang**, sedangkan pada jenjang MTs sebanyak **503 orang**, yang tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi terbesar di wilayah Sukoharjo, Mojolaban, dan Kartasura. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan guru berkualifikasi pada jenjang pendidikan menengah pertama sudah cukup memadai, namun masih terdapat ketimpangan distribusi antar wilayah serta adanya kecamatan yang belum memiliki guru MTs berkualifikasi secara merata. Oleh karena itu, peningkatan dan pemerataan kualifikasi akademik guru tetap perlu menjadi perhatian melalui program peningkatan kompetensi, fasilitasi pendidikan lanjutan, serta penataan distribusi tenaga pendidik, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan secara berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo.

n. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas)

tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2025 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2. 63 Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

No	Jenis Layanan	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	99,61%
2	Pendidikan Dasar	99,77%
3	Pendidikan Kesetaraan	96,19%
	Total Capaian	**98,52%**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan total capaian sebesar **98,52 persen**, yang berarti sebagian besar layanan dasar pendidikan telah terpenuhi secara optimal. Secara rinci, capaian tertinggi terdapat pada Pendidikan Dasar sebesar **99,77 persen**, diikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar **99,61 persen**, sementara Pendidikan Kesetaraan berada pada angka **96,19 persen**. Tingginya capaian ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah mampu memenuhi kewajiban pelayanan dasar pendidikan yang mencakup akses, mutu, serta penyediaan layanan minimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep SPM yang merupakan standar layanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk menjamin hak setiap warga dalam memperoleh pendidikan yang layak. Dengan capaian yang mendekati 100 persen, dapat diindikasikan bahwa aspek akses pendidikan dasar dan PAUD di Kabupaten Sukoharjo telah berjalan sangat efektif.

Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, masih terdapat kesenjangan pada layanan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki capaian paling rendah dibandingkan indikator lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat tertentu, seperti warga belajar nonformal atau putus sekolah, belum sepenuhnya terlayani secara optimal. Selain itu, capaian tinggi secara kuantitatif juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, mengingat paradigma SPM saat ini tidak hanya menekankan pemenuhan akses, tetapi juga kualitas pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta lingkungan pendidikan yang inklusif dan aman. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan intervensi pada pendidikan kesetaraan serta peningkatan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh agar capaian SPM tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2. 64 Capaian Literasi dan Numerasi Pendidikan tingkat SD dan SMP

Jenis Pendidikan	Indikator	Capaian	Skor Rapor 2025	Skor Rapor 2024	Skor Rapor 2023	Peringkat di Provinsi	Sumber Data
SD	**Kemampuan literasi**	Baik	81,59%	84,59%	75,57%	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2025
	Kemampuan numerasi.	Baik	80,59%	75,34%	60,13%	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2025
SMP	**Kemampuan literasi**	Baik	91,75%	90,46%	82,18%	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2025
	Kemampuan numerasi	Baik	88,90%	84,93%	63,81%	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional 2025

Sumber: Rapor Pendidikan 2023, 2024 dan 2025

o. Capaian Literasi dan Numerasi Pendidikan tingkat SD dan SMP;

Capaian literasi dan numerasi pada jenjang SD di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 menunjukkan kategori baik, dengan skor literasi sebesar 81,59 persen dan numerasi 80,59 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, literasi mengalami sedikit penurunan dari 84,59 persen (2024), sementara numerasi justru mengalami peningkatan cukup signifikan dari 75,34 persen. Hal ini menunjukkan adanya dinamika kualitas pembelajaran, di mana penguatan pada aspek numerasi mulai menunjukkan hasil, namun literasi perlu kembali mendapat perhatian. Secara umum, capaian ini sudah berada di atas ambang kategori “baik” dalam Rapor Pendidikan, yang berarti sebagian besar peserta didik telah mencapai kompetensi minimum. Namun demikian, tren nasional menunjukkan bahwa meskipun capaian meningkat, masih terdapat sekitar 30–35% siswa yang belum mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran tetap menjadi prioritas penting.

Pada jenjang SMP, capaian literasi dan numerasi menunjukkan performa yang lebih kuat dibandingkan SD, dengan skor literasi mencapai 91,75 persen dan numerasi 88,90 persen pada tahun 2025. Literasi SMP bahkan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (90,46 persen), sementara numerasi juga meningkat dari 84,93 persen. Capaian ini menempatkan Sukoharjo pada kategori menengah atas hingga atas di tingkat provinsi, yang mengindikasikan kualitas pembelajaran pada jenjang SMP relatif lebih matang dan efektif. Namun demikian, jika dilihat lebih dalam, kesenjangan antar kelompok siswa tetap menjadi tantangan, sebagaimana secara nasional masih terdapat disparitas capaian berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan wilayah. Oleh karena itu, meskipun capaian sudah tinggi, diperlukan strategi lanjutan seperti diferensiasi pembelajaran, penguatan literasi dasar sejak dini, serta pemerataan kualitas pendidikan agar peningkatan capaian ini dapat berkelanjutan dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 65 Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah
		ATS
1	Weru	156
2	Bulu	57
3	Tawangsari	56
4	Nguter	52
5	Sukoharjo	135
6	Bendosari	99
7	Polokarto	81
8	Mojolaban	100
9	Grogol	86
10	Baki	84
11	Gatak	71
12	Kartasura	21
Total		**998**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024

Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 tercatat sebanyak 998 anak, yang tersebar tidak merata di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan jumlah ATS tertinggi terdapat di Weru (156 anak), Sukoharjo (135 anak), dan Mojolaban (100 anak), sementara jumlah terendah berada di Kartasura (21 anak). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan ATS cenderung terkonsentrasi pada wilayah dengan jumlah penduduk yang besar atau karakteristik sosial ekonomi tertentu. Secara konsep, ATS mencakup anak usia 5–18 tahun yang tidak sedang bersekolah, baik karena belum pernah sekolah maupun putus sekolah. Tingginya angka di beberapa kecamatan mengindikasikan adanya kelompok anak yang belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Jika dianalisis lebih mendalam, distribusi ATS ini mencerminkan adanya faktor multidimensional seperti kondisi ekonomi keluarga, aksesibilitas pendidikan, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Secara nasional, penyebab utama anak tidak sekolah antara lain keterbatasan biaya, bekerja, serta persepsi bahwa pendidikan sudah cukup. Hal ini kemungkinan juga terjadi di Sukoharjo, terutama di wilayah dengan angka ATS tinggi. Selain itu, kesenjangan antar kecamatan menunjukkan bahwa intervensi kebijakan belum sepenuhnya merata, sehingga diperlukan pendekatan berbasis wilayah (spasial) dalam penanganannya. Upaya seperti penguatan program pendidikan kesetaraan, bantuan sosial pendidikan, serta gerakan kembali sekolah perlu difokuskan pada kecamatan dengan angka ATS tinggi agar dapat menurunkan jumlah ATS secara signifikan dan berkelanjutan.

2. Kesehatan

14. Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah terutama bagi keluarga-keluarga miskin. Terjadinya kematian yang disebabkan oleh penyakit menular, faktor sanitasi, dan faktor ketidaktahuan masyarakat dalam menyikapi kesehatan harusnya

menjadi perhatian utama semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Perkembangan kondisi kesehatan di Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan oleh beberapa indikator diantaranya adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBA) sebagaimana tercantum dalam SDGs. Jika disederhanakan maka faktor-faktor yang cukup besar peranannya dalam mempengaruhi AKB adalah status gizi, perawatan, kesehatan ketika dalam kandungan maupun ketika baru lahir, kelengkapan imunisasi yang diberikan, dan pertolongan persalinan pertama.

Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2025

No	Bidang Urusan / Indikator	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5,52	6,23	9,27	11.13	11.44
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	7,16	7,99	11,22	12.29	12.41
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	3,9	4,92	6,05	8,00	8,39
4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	172,6	111,59	68,31	127.58	73,02
5	Rasio posyandu per satuan balita	24,55	20,81	42,93	1:34	1:37
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	12,24	22,02	23,6	1: 5.540	1:5814 (17,19)
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1,11	1,26	1,10	1: 91.395	1: 91.395 (1.09)
8	Rasio dokter per satuan penduduk	88,47	100,01	102,4	108.87	109.99
9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	368,00	416,04	351,23	345.095	340.523
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	100	100	100
12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100
13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
14	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	98,1	95,4	98	99.1	100
15	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2	9,5	10	14	8,56
16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	26,64	100	100	100	100
17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	35,8	62,5	1,5	0	0
18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk	77,6	129	185	194	203
19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	4,4	3,1	4,2	3.2	7.1
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100	100	98,3	100	100
21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	92,8	92	90,7	83,6	90.3
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
23	Penderita diare yang ditangani	100	100	100	100	100
24	Angka kejadian Malaria	0,008	0,001	0,03	0,04	0.03
25	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
26	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0
27	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0
28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,33	0,09	0,01	0,11	0,12
29	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100
30	Cakupan kunjungan bayi	100	100	100	100	100
31	Cakupan puskesmas	12	12	12	12	12
32	Cakupan pembantu puskesmas	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan / Indikator	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
33	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95,97	94,24	99,56	100	100
34	Cakupan pelayanan nifas	100	98,17	99,80	100	97,12
35	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	100	100	100
36	Cakupan pelayanan anak balita	86,93	95,57	100	100	100
37	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100
38	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	92,27	100	100	100	100
39	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100 %	100%	100%	100%
40	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100 %	100	100	100%
41	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	12010	11.107	11.314	9.552	8922
42	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	11589	10.728	10.218	8.612	8233
43	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	11587	10.753	10.246	8.622	8216
44	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	42319	43.181	53.280	40.852	38252
45	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	58805	26.051	24.788	114.317	114.317
46	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	466714	531.793	562.274	545.773	576.266
47	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	97790	111.501	135.601	133.562	133.921
48	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	115801	139.114	212.188	221.863	211.116
49	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	17349	15.927	17.184	17.568	16.705
50	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan (SPM)	1326	1.499	2034	1.815	1.847
51	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	2174	8.642	12.070	12.398	13.495
52	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	10347	13.895	12.913	13.107	13.031

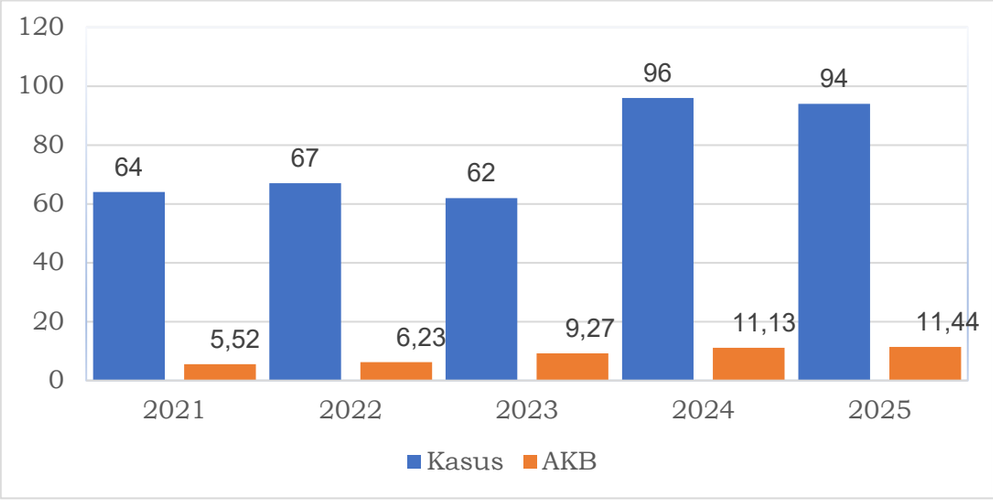
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Jumlah kasus kematian bayi tercatat sebanyak 64 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 67 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 62 kasus pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 96 kasus pada tahun 2024 serta sedikit menurun menjadi 94 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, nilai AKB per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan tren peningkatan dari 5,52 pada tahun 2021 menjadi 11,44 pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan, termasuk peningkatan pelayanan antenatal, persalinan, dan

neonatal, serta optimalisasi peran fasilitas pelayanan kesehatan dan jejaring rujukan. Selain itu, penguatan upaya promotif dan preventif melalui edukasi masyarakat, peningkatan gizi ibu dan bayi, serta deteksi dini faktor risiko menjadi langkah strategis dalam mendukung penurunan angka kematian bayi di masa mendatang.

Gambar 2. 34 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 kasus Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025



b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat melalui tren tabel berikut ini:

Tabel 2. 67 Angka Kematian Ibu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Tahun	Angka	Kasus
2021	172,50	20
2022	111,59	12
2023	68,31	7
2024	127,58	11
2025	121,69	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

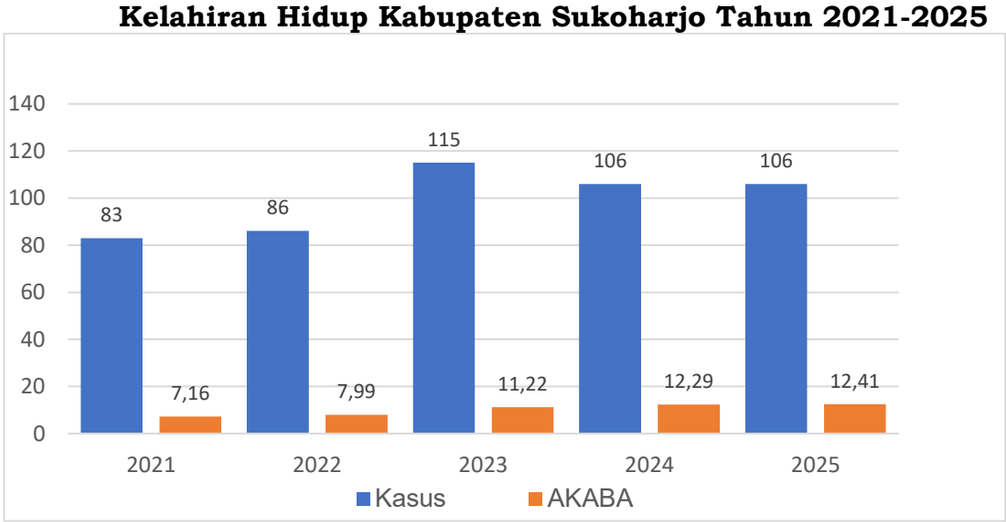
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum mengalami perbaikan dibandingkan tahun awal periode. Pada tahun 2021, AKI tercatat sebesar 172,50 dengan 20 kasus, kemudian menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 111,59 (12 kasus) dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 68,31 (7 kasus). Pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 127,58 dengan 11 kasus, namun kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 121,69 dengan jumlah kasus 6. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan adanya upaya yang cukup efektif dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu, meskipun masih terdapat dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko. Oleh karena itu, diperlukan penguatan berkelanjutan pada pelayanan kesehatan ibu, khususnya pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, serta optimalisasi sistem rujukan dan deteksi dini risiko tinggi guna mendukung penurunan angka kematian ibu secara berkesinambungan..

c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas

kesehatan anak. Jumlah kasus kematian balita tercatat sebanyak 83 kasus pada tahun 2021 dengan AKABA sebesar 7,16 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat menjadi 86 kasus (7,99) pada tahun 2022 dan 115 kasus (11,22) pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah kasus menurun menjadi 106 kasus, namun nilai AKABA masih meningkat menjadi 12,29, dan relatif stabil pada tahun 2025 dengan 106 kasus serta AKABA sebesar 12,41. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan balita, khususnya melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, pemantauan tumbuh kembang anak, perbaikan gizi, serta pencegahan dan penanganan penyakit pada balita, guna mendukung penurunan angka kematian balita secara bertahap dan berkesinambungan.

Gambar 2. 35 Angka Kematian Balita (AKABA) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025



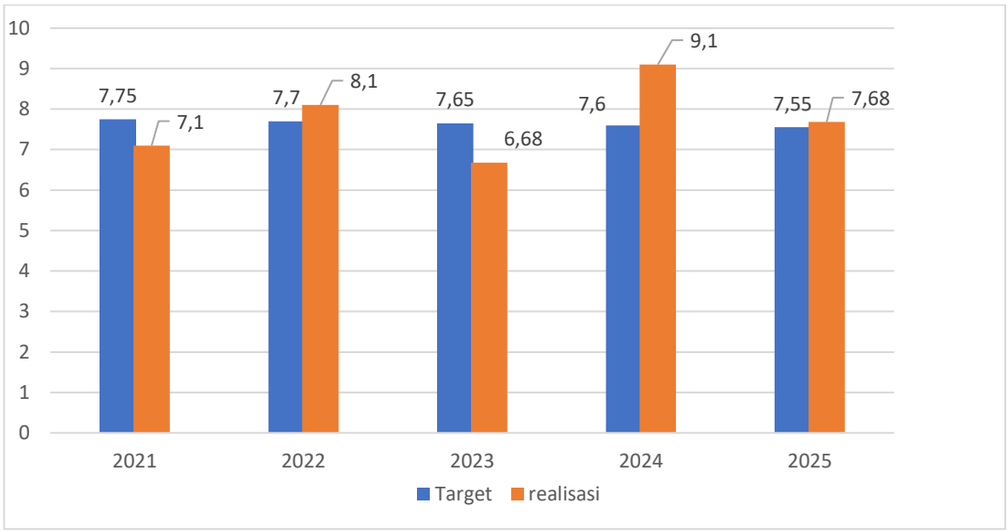
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

d. Persentase Stunting.

Jumlah kasus stunting di Kabupaten Sukoharjo di tahun 2025 sebanyak 3.486 kasus (7,68%). Angka ini diperoleh berdasarkan hasil Penarikan data EPPGBM Desember 2025 yang di entry dalam aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

Prevalensi stunting di tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024, dimana tahun 2024 angka stunting Kabupaten Sukoharjo mencapai 9,1% (3.973 kasus). Kasus stunting di Kabupaten Sukoharjo disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sulitnya mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran berisiko stunting yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas, baduta/balita. Penanganan pada kasus stunting sangat memerlukan surveilans data rutin dan memadai sebagai basis seleksi kasus dan kajian.

Gambar 2. 36 Perkembangan Stunting Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

e. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular dilakukan melalui kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) dan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2TVZ). Kejadian penyakit menular di Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh perilaku penduduk dan iklim. Dari perilaku dan iklim berdampak pada kondisi lingkungan masing masing wilayah desa kelurahan yang hal ini sangat mempenguhi kejadian penyakit menular. Data kejadian penyakit menular digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 68 Data Kejadian Penyakit Menular Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

No	Penyakit	Tahun dan Jumlah Penderita/Kejadian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Demam Berdarah (DBD)	222	637	233	562	261
2	Chikungunya	556	138	29	29	833
3	Malaria	8	17	28	38	38
4	Leptospirosis	4	24	30	23	31
5	Avian Flu/ Flu Burung	0	0	0	0	0
6	Antraks	0	0	0	0	0
7	Filaria	0	1	0	0	8
8	Tubercolusis	708	1.163	1.846	1.719	1860
10	Diare	8.614	12.530	11.127	23.519	38.314
11	Pneumonia Balita	877	1.447	1.190	1,606	1.207
12	Kusta	12	21	18	22	28
13	HIV (kasus baru)	34	55	69	45	60
14	AIDS (Kasus Baru)	26	27	33	23	24
15	IMS (Inf.Men. Seksual)	31	75	65	69	173
17	GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies)	12	28	28	54	52

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data kejadian penyakit menular di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021–2025, menunjukkan dinamika yang fluktuatif pada berbagai jenis penyakit. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) mengalami peningkatan dari 222 kasus pada tahun 2021 menjadi 637 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 233 kasus pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi 562 kasus pada tahun 2024, dan turun cukup signifikan menjadi 261 kasus pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya upaya pengendalian yang mulai efektif. Sebaliknya, kasus Chikungunya relatif terkendali pada tahun 2021–2024 (556; 138; 29; 29 kasus),

namun mengalami lonjakan tajam menjadi 833 kasus pada tahun 2025 yang berpotensi mengarah pada kejadian luar biasa (KLB). Kasus Malaria cenderung meningkat dari 8 kasus pada tahun 2021 menjadi 38 kasus pada tahun 2024 dan tetap pada angka tersebut di tahun 2025, meskipun sebagian besar merupakan kasus impor. Kasus Leptospirosis juga menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat, dari 4 kasus pada tahun 2021 menjadi 31 kasus pada tahun 2025. Selama periode tersebut tidak ditemukan kasus Flu Burung maupun Anthrax, sementara Filariasis sempat tidak ditemukan pada tahun 2023–2024, namun kembali muncul sebanyak 8 kasus pada tahun 2025.

Di sisi lain, penyakit menular kronis masih menjadi tantangan utama. Kasus Tuberkulosis (TB) meningkat signifikan dari 708 kasus pada tahun 2021 menjadi 1.846 kasus pada tahun 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 1.719 kasus pada tahun 2024, yang mencerminkan meningkatnya upaya penemuan kasus aktif sekaligus masih tingginya beban penyakit. Kasus Diare dan Pneumonia Balita juga menunjukkan angka yang tinggi, dengan diare mencapai 23.519 kasus pada tahun 2024 dan pneumonia balita sebesar 1.606 kasus. Kabupaten Sukoharjo masih tergolong endemis Kusta dengan ditemukannya 12 kasus pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 28 kasus pada tahun 2025. Kasus HIV/AIDS juga menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan kasus HIV baru naik dari 34 kasus pada tahun 2021 menjadi 60 kasus pada tahun 2025, sementara kasus AIDS relatif stabil. Selain itu, kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) menunjukkan tren meningkat dari 12 kasus pada tahun 2021 menjadi 52 kasus pada tahun 2025, meskipun Kabupaten Sukoharjo tetap berstatus bebas rabies. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa penyakit berhasil dikendalikan, masih terdapat tantangan serius terutama pada penyakit berbasis lingkungan, penyakit menular kronis, serta potensi kejadian luar biasa, sehingga diperlukan penguatan surveilans, upaya promotif-preventif, dan respons cepat dalam penanganan penyakit menular di masa mendatang.

f. Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan beberapa peningkatan pada jenis layanan tertentu. Jumlah Puskesmas pembantu mengalami penurunan dari 55 unit pada tahun 2021 menjadi 50 unit pada tahun 2025. Fasilitas rumah sakit dan klinik cenderung stabil, dengan klinik meningkat dari 97 unit pada tahun 2021 menjadi 101 unit pada tahun 2025. Sarana pendukung lain seperti apotek juga mengalami peningkatan dari 210 unit pada tahun 2021 menjadi 241 unit pada tahun 2025, serta posyandu yang meningkat dari 1.193 unit menjadi 1.206 unit pada periode yang sama. Di sisi lain, jumlah tenaga praktik seperti dokter praktik menunjukkan fluktuasi, sedangkan toko obat relatif stabil. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo sudah cukup memadai, namun masih diperlukan penguatan pemerataan akses layanan, peningkatan kualitas fasilitas, serta optimalisasi pemanfaatan sarana yang ada guna mendukung peningkatan

derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 69 Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Sarana Pelayanan Kesehatan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
01. Puskesmas induk	12	12	12	12	12
02. Puskesmas Pembantu	55	54	54	52	50
03. R S	10	10	10	10	10
04. Klinik	97	84	102	101	101
05. Dukun Bayi Terlatih	-	0	0	0	0
06. Dokter Praktek	343 *	219*	225*	56	187
07. Dok. Gigi Praktek Swasta	53 *	31*	31*	69	108
08. Apotek Swasta	210	218	218	223	241
09. Klinik Keluarga Berencana	0	0	0	0	o
10. Industri Farmasi	1	1	1	18	1
11. Toko Obat Swasta	22	19	19	22	22
12. Laboratorium	4	4	4	4	4
13. Posyandu	1193	1195	1195	1205	1206

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Sebaran prasarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan telah menjangkau seluruh kecamatan dengan komposisi yang relatif memadai. Secara keseluruhan terdapat 10 unit rumah sakit dengan kapasitas 1.412 tempat tidur, 12 puskesmas, 50 puskesmas pembantu, 101 klinik, dan 223 apotek yang tersebar di 12 kecamatan. Distribusi fasilitas menunjukkan bahwa beberapa wilayah seperti Kecamatan Kartasura, Grogol, dan Sukoharjo memiliki konsentrasi fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, terutama untuk rumah sakit dan klinik, sedangkan kecamatan lainnya lebih didominasi oleh puskesmas dan puskesmas pembantu sebagai layanan kesehatan dasar. Kondisi ini mencerminkan bahwa akses pelayanan kesehatan dasar telah tersedia secara merata, namun masih diperlukan penguatan pemerataan layanan rujukan dan fasilitas kesehatan lanjutan di beberapa wilayah, serta peningkatan kualitas dan integrasi layanan guna mendukung pemerataan akses dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Prasarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 70 Prasarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Kecamatan	Rumah Sakit		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik	Apotek
	Unit	Tempat Tidur				
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
010 Weru	–	–	1	5	1	11
020 Bulu	–	–	1	3	1	1
030 Tawangsari	–	–	1	7	2	9
040 Sukoharjo	2	317	1	5	11	37
050 Nguter	–	–	1	4	5	6
060 Bendosari	1	116	1	4	6	14
070 Polokarto	–	–	1	5	4	17
080 Mojolaban	–	–	1	3	11	19
090 Grogol	2	377	1	4	26	44
100 Baki	–	–	1	4	12	19
110 Gatak	–	–	1	3	1	13
120 Kartasura	5	602	1	5	21	33
Kabupaten Sukoharjo	10	1412	12	50	101	223

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Jumlah tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025

menunjukkan ketersediaan SDM yang cukup besar dengan total 4.968 tenaga kesehatan, terdiri dari 2.006 tenaga ASN dan 2.962 tenaga non-ASN. Sebaran tenaga kesehatan di seluruh kecamatan relatif merata, meskipun terdapat konsentrasi yang cukup tinggi di wilayah dengan fasilitas kesehatan lebih lengkap seperti Kecamatan Sukoharjo, Grogol, dan Kartasura. Kecamatan Grogol tercatat memiliki jumlah tenaga kesehatan terbesar yaitu 1.363 orang, diikuti Sukoharjo sebanyak 954 orang dan Kartasura sebanyak 1.567 orang, sementara kecamatan lainnya memiliki jumlah yang lebih proporsional sesuai dengan kapasitas fasilitas kesehatan yang tersedia. Komposisi tenaga non-ASN yang lebih besar menunjukkan peran penting tenaga kontrak atau non-pemerintah dalam mendukung pelayanan kesehatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan secara umum sudah memadai, namun ke depan masih diperlukan upaya peningkatan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi, serta penguatan status dan kesejahteraan tenaga kesehatan guna mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan secara optimal dan berkelanjutan. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sukoharjo digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Jumlah Tenaga Kesehatan (Puskesmas dan RS) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Kecamatan	PNS	Non PNS	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
010 Weru	87	1	88
020 Bulu	68	8	76
030 Tawangsari	77	5	82
040 Sukoharjo	518	436	954
050 Nguter	87	1	88
060 Bendosari	74	315	389
070 Polokarto	86	10	96
080 Mojolaban	93	2	95
090 Grogol	110	1253	1363
100 Baki	73	8	81
110 Gatak	80	9	89
120 Kartasura	653	914	1567
Kabupaten Sukoharjo	2006	2962	4968

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

g. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Sanitasi merupakan salah satu aspek penting dalam kesehatan lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Kondisi sanitasi yang kurang memadai dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, pencemaran sumber air minum, serta meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare. Sarana jamban sehat di masyarakat diklasifikasikan menjadi jamban sharing/komunal, jamban sehat semi permanen (JSSP), dan jamban sehat permanen (JSP). Selama periode 2021–2025, akses masyarakat terhadap sanitasi layak menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan persentase akses jamban sehat telah mencapai 100 persen sejak tahun 2022. Pada tahun 2023, sebanyak 93,61 persen keluarga (±261.812 KK) telah menggunakan jamban sehat permanen, sementara 2,18 persen menggunakan jamban semi permanen dan 4,21 persen masih menggunakan jamban komunal. Kondisi ini relatif stabil hingga tahun 2025 dengan kecenderungan peningkatan penggunaan jamban permanen. Selain itu, akses air minum berkualitas juga menunjukkan capaian yang tinggi, yaitu sekitar

100,00 persen, dengan fasilitas layak mencapai sekitar 90,91 persen. Pengawasan sarana air minum aman memenuhi syarat kualitas Kesehatan Lingkungan 48,95 persen dan hasil survei kualitas air minum Rumah Tangga (SKMRT) 21,11%. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses sanitasi dasar sudah baik, masih diperlukan peningkatan kualitas, pemerataan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan

h. Standar Pelayanan Minimal

Dasar hukum penetapan SPM bidang kesehatan yaitu Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar.

Tabel 2. 72 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Layanan	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	100,16
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	97,31
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	102,6
4	Pelayanan kesehatan balita;	100,08
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	97,55
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	94,69
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	102,45
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	102,69
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	131,96
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.	117,85
	Total Capaian	**100**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari capaian beberapa jenis layanan yang berada di atas 100 persen, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil (100,16%), pelayanan kesehatan bayi dan balita (di atas 100%), serta beberapa layanan kesehatan lainnya yang bahkan mencapai lebih dari 130 persen. Selain itu, sebagian indikator lainnya juga telah mendekati target optimal dengan capaian di atas 90 persen, seperti pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan lansia. Kondisi ini mencerminkan bahwa akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dengan baik dan menjangkau sebagian besar masyarakat. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya peningkatan pada beberapa layanan yang belum mencapai target maksimal, serta penguatan kualitas pelayanan dan pemerataan akses agar capaian SPM dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jalan dan Jembatan

Secara umum, jalan di Kabupaten Sukoharjo memiliki tiga kewenangan yaitu nasional, provinsi dan kabupaten. Dari masing-masing kewenangan tersebut diketahui memiliki panjang jalan yang ada di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2. 73 Panjang Jalan Menurut Kewenangan

Kewenangan	Panjang jalan (km)
Nasional	14,56
Provinsi	55,59
Kabupaten	605,12
Jumlah	**675,27**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Menurut data di atas, panjang jalan di Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan sepanjang 675,27 km. Jalan terpanjang dimiliki oleh kewenangan kabupaten. Dalam hal ini pemeliharaan jalan kabupaten perlu difokuskan agar aksesibilitas kegiatan di Kabupaten Sukoharjo berjalan dengan baik.

Tabel 2. 74 Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan											
		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
1	Baik	103,59	17,12	185,02	30,58	142,37	23,53	141,04	23,31	300,92	49,53	340,21	55,99
2	Sedang	429,13	70,92	346,28	57,23	394,3	65,16	401,4	66,33	243,11	40,01	204,85	33,72
3	Rusak Ringan	67,39	11,14	71,1	11,75	66,489	10,99	61,81	10,21	56,285	9,26	50,716	8,35
4	Rusak Berat	5,01	0,83	2,72	0,45	1,96	0,32	0,88	0,15	7,259	1,19	11,795	1,94
JUMLAH		605,12	100	605,12	100	605,12	100	605,12	100	607,57	100	607,57	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 menunjukkan bahwa mayoritas kondisi jalan di Kabupaten Sukoharjo dalam kondisi mantap. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kualitas jalan ditandai dengan kondisi jalan memiliki kondisi baik sebesar 50,33%, meningkat dari Tahun 2022 sebesar 23,31%. Meskipun demikian Peningkatan kualitas kondisi jalan masih perlu ditingkatkan lagi agar aksesibilitas di Kabupaten Sukoharjo semakin baik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas jalan antara lain dengan melakukan pelebaran jalan. Kegiatan pelebaran jalan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan panjang jalan yang lebarnya sesuai dengan standar dari 60,50 km menjadi 83,98 km. Walaupun pada tahun 2019 sampai dengan 2022 tidak ada kegiatan pelebaran jalan pemerintah tetap mempertimbangkan kualitas jalan dengan cara memperbaiki jalan di ruas-ruas tertentu. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan kualitas jalan sekitar 23,48 km. Peningkatan kualitas jalan diarahkan pada perbaikan permukaan perkerasan dan pelapiasan permukaan aspal.

Tabel 2. 75 Persebaran Kualitas Jalan di Kabupaten Sukoharjo (Lebar Jalan yang Sesuai Standar >6m)

No. Ruas		Nama Ruas	Kecamatan	Panjang Jalan yang lebarnya sesuai standar >6m (km)					
SK Nomor 620/208 /2018	SK Nomor 621/474 /2023			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	1	Tengklik - Jarum	Tawangsari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
6	6	Tawangsari - Bulu	Tawangsari/Bulu	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27

No. Ruas		Nama Ruas	Kecamatan	Panjang Jalan yang lebarnya sesuai standar >6m (km)					
SK Nomor 620/208 /2018	SK Nomor 621/474 /2023			2020	2021	2022	2023	2024	2025
15	15	Parangjoro - Pondok	Grogol	0,00	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
16	16	Sonorejo - Sidowarno	Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
17	17	Kriwen - Pojok	Sukoharjo/Tawangsari	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20
18	18	Songgorunggi - Malangsari	Nguter	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
19	19	Ambil ambil - Tanjung	Nguter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
21	21	Jayan - Juron	Nguter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
24	24	Mulur - Bancaan	Bendosari	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08
25	x	Mulur - Sidan	Bendosari/ Polokarto	0,00	9,28	9,28	9,28	x	x
x	25	Mulur - Glondongan	Bendosari/Polokarto	x	x	x	x	7,95	7,95
26	26	Sukoharjo - Mulur	Sukoharjo/Bendosari	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80
x	28	Sugihan - Bendosari	Bendosari	x	x	x	x	5,00	5,00
29	x	Gentan - Toriyo	Bendosari/ Sukoharjo	2,40	2,40	2,40	2,40	x	x
30	x	Bularejo - Gentan	Bendosari	3,71	3,71	3,71	3,71	x	x
x	29	Tanjung - Lengking	Nguter/Bulu	x	x	x	x	1,31	1,31
33	33	Gentan - Bekonang	Bendosari/ Mojolaban	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
x	36	Bekonang - Sidan	Mojolaban	x	x	x	x	2,23	2,23
40	40	Bekonang - Mojo	Mojolaban	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
41	41	Wirun - Palur	Mojolaban					4,20	4,20
45	45	Telukan - Cuplik	Grogol/Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
46	46	Langenharjo - Pondok	Grogol	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86
47	47	Pondok - Ngrombo	Grogol/Baki	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88
48	48	Bahu - Dlopo	Grogol	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
49	49	Bacem - Tanjunganom	Grogol	5,89	5,89	5,89	5,89	2,85	2,85
50	50	Tanjunganom - Daleman	Grogol/Baki	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
52	52	Grogol - Gedangan	Grogol					2,08	2,08
57	57	Baki - Pajang	Baki/Grogol	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
58	58	Tinggen - Stasiun Gawok	Gatak	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81
59	59	Stasiun Gawok - Sraten	Gatak	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	3,85
60	x	Blimbing - Makamhaji	Gatak/Kartasura	5,74	5,74	5,74	5,74	x	x
x	60	Blimbing - Stasiun Gawok	Gatak/Kartasura	x	x	x	x	1,00	1,00
63	63	Tegalan - Mangkuyudan	Kartasura	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
64	64	Pajang - Parangtejo	Kartasura	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
65	65	Makamhaji - Kleco	Kartasura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64
66	66	Carikan - Bulakan	Sukoharjo	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
70	70	Pabelan - Gonilan	Kartasura	1,84	1,84	1,84	1,84	0,86	0,86
x	91	Pengkol - Tanjungrejo	Nguter	x	x	x	x	0,00	5,86
95	95	Bulu - Nuricik	Bulu	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
x	102	Glondongan - Sidan	Polokarto	x	x	x	x	1,33	1,33

No. Ruas		Nama Ruas	Kecamatan	Panjang Jalan yang lebarnya sesuai standar >6m (km)					
SK Nomor 620/208 /2018	SK Nomor 621/474 /2023			2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	109	Sanggrahan - Gambiran	Grogol	x	x	x	x	1,25	1,25
x	124	Sidan - Kayuapak	Polokarto	x	x	x	x	0,00	3,46
128	128	Nguter - Celep	Nguter	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30
x	416	Stasiun Gawok - Makamhaji	Gatak/Baki	x	x	x	x	4,74	4,74
Jalan Dalam Kota Sukoharjo									
149	149	Jl. Kyai Mawardi	Bendosari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
170	170	Jl. Mayor Sunaryo	Sukoharjo	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
173	173	Jl. Pasar II	Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
175	175	Jl. Pemuda	Sukoharjo	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
186	186	Jl. Veteran	Sukoharjo	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
188	188	Jl. Gawanan I	Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
205	205	Jl. Anggrek	Sukoharjo	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
212	212	Jl. Brigjen Katamso	Sukoharjo	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
222	222	Jl. Letjend Sudjono Humardani	Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
223	223	Jl. Tentara Pelajar	Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
253	x	Jl. Pahlawan	Sukoharjo	0,96	0,96	0,96	0,96	x	x
x	253	Jl.KH. Samanhudi	Sukoharjo	x	x	x	x	1,12	1,12
254	254	Jl. Dr. Muwardi	Sukoharjo	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	x	Jl. Tawes	Sukoharjo	0,30	0,30	0,30	0,30	x	x
262	x	Jl. Dr. Sutomo	Sukoharjo	1,19	1,19	1,19	1,19	x	x
x	262	Jl. Gatot Subroto	Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62
268	268	Jl. Kawung	Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85
279	279	Jl. Kapten Patimura	Sukoharjo	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
280	280	Jl. Wandyo Pranoto	Sukoharjo	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
281	281	Jl. H.Agus Salim	Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
282	282	Jl. P.Diponegoro	Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
283	283	Jl. Rajawali	Sukoharjo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
288	288	Jl. Kutilang	Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
298	298	Jl. Kacer	Sukoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
x	352	Jl. Jendral Sudirman	Sukoharjo/Bendosari	x	x	x	x	4,27	4,27
x	353	Jl. Slamet Riyadi	Sukoharjo	x	x	x	x	1,48	1,48
x	354	Jl. Jaksa Agung R. Suprapto	Sukoharjo	x	x	x	x	0,74	0,74
Jalan Dalam Kota Kartasura									
352	355	Jl. Adi Sumarmo	Kartasura	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
354	357	Gembongan - Keden	Kartasura	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
355	358	Kranggan - Ngabeyan	Kartasura	0,00	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
357	359	Gembongan - Ngabeyan	Kartasura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30
363	365	Brontowiryan	Kartasura	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
366	368	Papungan - Gerjen	Kartasura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20
368	370	Jl. Wimboharsono	Kartasura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
380	382	Pabelan - Gumpang	Kartasura	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Jalan Dalam Kota Grogol									
388	390	Jl. Kasuari	Grogol	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
389	391	Jl. Cendrawasih	Grogol	0,30	3,00	0,30	0,30	0,30	0,30
390	392	Jl. Merak	Grogol	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
391	393	Jl. Merpati Raya	Grogol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75

No. Ruas		Nama Ruas	Kecamatan	Panjang Jalan yang lebarnya sesuai standar >6m (km)					
SK Nomor 620/208 /2018	SK Nomor 621/474 /2023			2020	2021	2022	2023	2024	2025
396	398	Jl. Anggrek Raya	Grogol	0,00	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
397	399	Jl. Plamboyan	Grogol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
398	400	Jl. Nusa Indah	Grogol	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
399	401	Jl. Melati Raya	Grogol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
400	402	Jl. Sakura	Grogol	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
401	403	Jl. Seruni	Grogol	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
402	404	Jl. Mawar Raya	Grogol	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
403	405	Jl. Seroja	Grogol	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
404	406	Jl. Langenharjo	Grogol	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
405	407	Jl. Kanguru I	Grogol	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
406	408	Jl. Kanguru II	Grogol	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
408	410	Jl. Beruang	Grogol	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
409	411	Jl. Kelinci	Grogol	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
x	412	Jl. Palem Raya	Grogol	x	x	x	x	0,45	0,45
x	413	Jl. Cemara Raya	Grogol	x	x	x	x	1,22	1,22
x	414	Jl. Proklamasi	Grogol	x	x	x	x	0,70	0,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Indikator persentase (%) panjang jalan dalam kondisi mantap untuk baseline tahun 2024 yaitu sebesar 89,36% dan untuk target tahun 2025 yaitu sebesar 89,41%. Sedangkan untuk kondisi jembatan di Kabupaten Suokoharjo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 76 Kondisi Jembatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

NO	KONDISI JEMBATAN	TAHUN									
		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	Baik	160	97,56%	0	0,00%	1	0,61	4	2,44	4	2,44
2	Sedang	4	2,44%	162	98,78%	162	98,78	3	1,83	3	1,83
3	Rusak Ringan	0	0%	0	0	0	0	155	94,51	155	94,51
4	Rusak	-	-	2	1,22%	1	0,61	0	0	0	0
5	Rusak Berat	0	0%	0	0	0	0	2	1,22	2	1,22
	JUMLAH	164	100%	164	100	164	100	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Mulai tahun 2021 metode survey kondisi jembatan berubah menggunakan metode BMS Berdasarkan tabel di atas kondisi jembatan di Kabupaten Sukoharjo juga sejalan dengan kualitas jalan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kondisi jembatan dalam kondisi baik yaitu dari 0% di tahun 2021 menjadi 0.61% di tahun 2022. Pada tahun 2023 kondisi jembatan yang baik terjadi peningkatan sekitar 1,83% dari 0,61% menjadi 2,44%. Kondisi ini perlu ditingkatkan dengan beberapa upaya agar aksesibilitas antar wilayah semakin baik.

Tabel 2. 77 Kondisi Jembatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2024

KONDISI TAHUN 2021									
NO	Kondisi	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Pondasi		Lantai	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	BAIK	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	RUSAK RINGAN	164	100,00%	164	100,00%	163	99,39%	162	98,78%
3	RUSAK	0	0,00%	0	0,00%	1	0,61%	2	1,22%
4	RUSAK BERAT	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	KRITIS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	RUNTUH	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
JUMLAH JEMBATAN		164	100%	164	100%	164	100%	164	100%

KONDISI TAHUN 2022									
NO	Kondisi	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Pondasi		Lantai	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	BAIK	1	0,61%	2	1,22%	1	0,61%	2	1,22%
2	RUSAK RINGAN	163	99,39%	162	98,78%	162	98,78%	162	98,78%
3	RUSAK	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	RUSAK BERAT	0	0,00%	0	0,00%	1	0,61%	0	0,00%
5	KRITIS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	RUNTUH	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
JUMLAH JEMBATAN		**164**	**100%**	**164**	**100%**	**164**	**100%**	**164**	**100%**

KONDISI TAHUN 2023								
Kondisi	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Pondasi		Lantai	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
BAIK	4	2,44	4	2,44	4	2,44	4	2,44
RUSAK RINGAN	160	97,56	159	96,95	157	95,73	158	96,34
SEDANG	0	0,00	1	0,61	1	0,61	2	1,22
RUSAK BERAT	0	0,00	0	0,00	2	1,22	0	0,00
KRITIS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUNTUH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH JEMBATAN	**164**	**100**	**164**	**100**	**164**	**100**	**164**	**100**

KONDISI TAHUN 2024								
Kondisi	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Pondasi		Lantai	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
BAIK	4	2,44	4	2,44	4	2,44	4	2,44
RUSAK RINGAN	160	97,56	159	96,95	157	95,73	158	96,34
SEDANG	0	0,00	1	0,61	1	0,61	2	1,22
RUSAK BERAT	0	0,00	0	0,00	2	1,22	0	0,00
KRITIS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUNTUH	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH JEMBATAN	**164**	**100**	**164**	**100**	**164**	**100**	**164**	**100**

KONDISI TAHUN 2025								
Kondisi	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Pondasi		Lantai	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
BAIK	4	1,8	5	2,25	5	2,25	4	1,8
RUSAK RINGAN	160	72,07	187	84,23	211	95,05	210	94,59
SEDANG	58	26,13	29	13,06	5	2,25	8	3,6
RUSAK BERAT	0	0	1	0,45	1	0,45	0	0
KRITIS	0	0	0	0	0	0	0	0
RUNTUH	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: DD2 SiPDJD, 2025

Pada tahun 2021 metode survey kondisi jembatan berubah menggunakan metode BMS. Pada tahun 2022 kondisi baik meningkat menjadi 0,61% dari Tahun 2021 sebesar 0%, kondisi rusak ringan menurun dari 100% tahun 2021 menjadi 99,39% tahun 2022, pada bangunan bawah kondisi baik meningkat dari 0% di tahun 2021 menjadi 1,22% di tahun 2022, kondisi rusak ringan bangunan bawah dari 100% di tahun 20211 menurun menjadi 98,78% pada tahun 2022, kondisi pondasi baik 0,61%, rusak ringan pondasi tahun 2021 sebesar 99,39% menurun menjadi 98,78% di tahun 2022, kondisi baik pada lantai meningkat dari 0% tahun 2021 menjadi 1,22% pada tahun 2022, rusak ringan lantai 98,78%, kondisi rusak lantai pada tahun 2021 sebesar 1,22% pada tahun 2020 menurun menjadi 0%. Kondisi ini perlu ditingkatkan menjadi kondisi baik agar aksesbilitas antar wilayah semakin baik.

b. Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan hal vital dalam kehidupan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari juga untuk kebutuhan teknis kewilayahan mengingat dominasi penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo adalah pertanian. Dalam hal ini sarana dan prasarana irigasi sangat dibutuhkan.

Berikut adalah persebaran embung yang terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2. 78 Persebaran Embung di Kabupaten Sukoharjo

No.	Nama Embung	Lokasi Kecamatan	Luas (ha)	Volume (m^3)
1	Paluhombo	Bendosari	0,25	5.000
2	Bulu	Polokarto	0,25	5.000
3	Tanjung	Nguter	0,18	3.600
4	Ponowaren	Tawangsari	0,25	5.000
5	Grogol	Weru	0,40	10.000
6	Jagan	Bendosari	0,12	2.250
7	Puhgogor	Bendosari	0,06	1.875
8	Celep	Nguter	0,46	-
9	Kriwen	Sukoharjo	0,2	6.000
10	Sanggang	Bulu	0,25	7.500
11	Penggik	Tawangsari	0,08	3.200
12	Gentan	Bulu	0,8	-
13	Manisharjo	Bendosari	-	-
14	Pengkol	Nguter	-	-
15	Kenep	Sukoharjo	0,16	4.800
16	Serut	Nguter	0,45	-
17	Juron	Nguter	-	21.000
18	Kemasan	Polokarto	-	5.700

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Persebaran embung di Kabupaten Sukoharjo hanya terletak pada lokasi Kecamatan Bendosari, Polokarto, Nguter, Weru, Sukoharjo dan Bulu. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut yang memiliki potensi pertanian tinggi. Oleh karena itu, penyediaan sumber air baku sudah memperhatikan kebutuhan air untuk kepentingan pertanian. Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan sumberdaya air baku ada beberapa kewenangan. Kewenangan tersebut antara lain:

a. Status Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, meliputi DI Colo Barat dan DI Colo Timur
b. DI Trani merupakan Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
c. Status Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten meliputi 70 DI. Sistem jaringan irigasi yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo berupa pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, terdiri atas : Jaringan irigasi primer; Jaringan irigasi sekunder; dan Jaringan irigasi tersier.

Luas daerah irigasi kewenangan pusat provinsi dan kabupaten secara berturut-turut yaitu 10.556 hektar, 4210 hektar dan 6.364 hektar. Menurut data daerah irigasi sudah tersedia di seluruh kecamatan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2. 79 Kondisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo

No	Kondisi Irigasi	Tahun									Jumlah DI
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Baik	50	48,85	51,85	47,15	43,99	44,27	45,45	11,38	23,71	70 DI
2	Rusak Ringan	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	24,17	31,10	
3	Rusak Sedang	42,58	43,73	41,16	45,41	48,23	48,05	47,77	49,88	35,17	
4	Rusak Berat	5,61	5,61	5,61	5,63	5,97	5,87	4,87	14,57	9,02	
	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Dari 70 DI di atas, terdapat penurunan kualitas kondisi daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo. Daerah irigasi dengan kondisi baik th 2017 sebesar 50% menjadi 48,85% di tahun 2018, meningkat menjadi 51,85% pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebesar 47,15% dan pada tahun 2021 menjadi 43,99%. Penurunan kualitas kondisi daerah irigasi disebabkan berbagai permasalahan seperti terjadinya bencana banjir dan pengambilan air secara illegal dengan merusak saluran irigasi. Kondisi irigasi dalam keadaan baik sudah mulai meningkat kembali dari 43,99% di tahun 2021 menjadi 44,27% tahun 2022. Pada tahun 2023 kondisi irigasi baik meningkat sekitar 1,28% menjadi 45,45%, Namun pada tahun 2024 penurunan kualitas kondisi daerah irigasi baik kembali menurun menjadi 11,38% sedangkan kondisi irigasi rusak ringan 24,17%, kondisi irigasi rusak sedang menjadi 49,88%, kondisi irigasi rusak berat sebesar 14,57%. Pada Tahun 2025 kondisi daerah irigasi baik kembali meningkat menjadi 23,71% sedangkan kondisi irigasi rusak ringan 31,10%, kondisi irigasi rusak sedang menjadi 35,17%, kondisi irigasi rusak berat sebesar 9,02%. Berdasarkan data diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo selaku dinas yang menangani irigasi di Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan perhatian terhadap kondisi irigasi di Kabupaten Sukoharjo, mengingat Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan kerawanan bencana kekeringan sehingga kerugian di masa mendatang bisa dicegah dan ditangani sebaik mungkin.

Untuk daya dukung air (ketersediaan dan kebutuhan air) di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan perhitungan kebutuhan air tahun 2019 (DA) untuk keperluan penduduk, sawah, kebun dan peternakan sebesar 255.779.738,49 m^3/ tahun dengan ketersediaan air (SA) sebesar 573.362.827,83 m^3/ tahun. Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa (SA) kebutuhan air tahun 2019 (573.362.827,83 m^3/ tahun) > (DA) ketersediaan air, (255.779.738,49 m^3/ tahun), sehingga kondisi daya dukung air dinyatakan surplus.

Data Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Sukoharjo yang tersaji dalam dokumen ini menggunakan indikator Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik. Untuk kedepan indikator menyesuaikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksud untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi meliputi prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang,

organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A.

c. Drainase

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Drainase di Kabupaten Sukoharjo terbagi atas tiga jenis yaitu primer, sekunder dan tersier. Drainase primer berupa saluran mengarah langsung ke sungai seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Premulung, Sungai Samin dan lain-lain. Saluran sekunder berupa selokan besar yang mengarah ke saluran primer. Sementara itu, saluran yang berasal dari permukiman disebut dengan saluran tersier. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Sukoharjo masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, dimana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik.

Berdasarkan tabel di bawah pembangunan drainase di Kabupaten Sukoharjo tiap tahunnya menurun. Hal ini perlu perlu menjadi perhatian dinas teknis terkait mengingat Kabupaten Sukoharjo memiliki kerawanan bencana akan banjir di seluruh wilayah. Pada tahun 2024 pembangunan drainase sepanjang 4.875,55 m, kondisi ini meningkat dari tahun 2023 sepanjang 667 m. Pembangunan drainase di Kabupaten Sukoharjo perlu ditingkatkan lagi mengingat masih ada jalan belum memiliki drainase dan kondisi drainase yang perlu mendapatkan perbaikan.

Tabel 2. 80 Panjang Pembangunan Drainase Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Tahun	Panjang Pembangunan Drainase
2021	4.071,00 m
2022	2.643,50 m
2023	667,00 m
2024	4.875,55 m
2025	4.101,50 m
Total	30.769,05 m

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

d. Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). SPAM JP selain terdiri dari Unit Air Baku, Unit Produksi, Unit Distribusi dan Unit Pelayanan, juga harus memenuhi ketentuan teknis yaitu menjamin produksi air minum yang disalurkan kepada pelanggan memenuhi standar air minum aman yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Layanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui Perumda Air Minum Tirta Makmur atau yang Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang sumber pendanaannya dari DAK dan APBN. Perumda Air Minum Tirta Makmur melayani penyediaan air bersih perkotaan, sedangkan untuk perdesaan penyediaannya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (DPUPR). Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, Perumda Air Minum Tirta Makmur memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam. Sedangkan PAMSIMAS memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari sumur dalam. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terdiri atas sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air. Persentase masyarakat Kabupaten Sukoharjo menggunakan akses bukan jaringan perpipaan di tahun 2025 sebesar 69,46%.Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sukoharjo masih menggunakan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mentargetkan pemenuhan akses layanan air minum layak sebesar 100% di Tahun 2025, capaian akses layanan air minum layak di Tahun 2925 sebesar 94,315. Target nasional untuk capaian air minum aman sebesar 15%. Untuk Kabupaten Sukoharjo capaian air minum aman tahun 2025 sebesar 13,72%. Untuk mencapai target 100% akses air minum layak dan 15% target air minum aman perlu strategi kolaborasi dalam pencapaiannya. Berikut adalah persentase penggunaan air minum layak di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2. 81 Persentase Penggunaan Air Minum Layak di Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Total Penduduk	Perpipaan			Non Perpipaan		Total perpipaan dan non perpipaan	
		Jiwa	SR	%	Jiwa	%	Jiwa	%
2021	897.916	262.489	68.673	29,23	574.158	63,94	836.648	93,18
2022	899.407	213.925	71.844	23,79	530.339	58,97	744.264	82,75
2023	911.745	220.158	74.239	24,15	633.306	69,46	853.464	93,61
2024	913.950	223.634	75.629	24,47	636.901	69,69	860.535	94,16
2025	917.366	226.919	77.931	24,95	637.295	69,46	866.124	94,41

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Penggunaan air minum layak di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum bidang Air Minum. Namun demikian cakupan air minum layak belum menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerima program dari Pemerintah Pusat untuk penyediaan air minum perkotaan sejak Tahun 2019 yaitu NUWSP (National Urban Water Supply Project) dengan target 3.670 SR di Tahun 2022, dan Program SPAM Regional Wosusokas yang merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam upaya meningkatkan akses air minum aman melalui jaringan perpipaan yang mencakup wilayah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, diharapkan mampu mengatasi permasalahan kebutuhan masyarakat akan air minum aman.

Berikut adalah persentase capaian akses air minum aman di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2. 82 Persentase Penggunaan Air Minum Aman di Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Total Penduduk	PDAM		
		Jiwa	SR	%
2021	897.916	133.235	36.645	14,84
2022	899.407	116.890	39.249	13,00
2023	911.745	121.868	41.090	13,37
2024	913.950	124.273	42.020	13,60
2025	917.388	125.871	42.844	13,72

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo

Secara umum, penggunaan air minum masih belum menjangkau seluruh rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah tetap perlu mengupayakan akses air bersih agar dapat mencapai seratus persen jangkauan. Selain menyediakan secara kuantitas, kualitas air harus dijaga terutama dalam penyediaan air bersih yang layak dan aman.

Untuk meningkatkan layanan air minum perpipaan dan capaian air minum aman, pemerintah pusat menyelenggarakan layanan air minum regional. Kabupaten Sukoharjo ikut dalam layanan penyediaan air minum regional Wosusokas, dengan target 24.000 SR dan debit 300 liter/detik. Untuk program SPAM Regional Wosusokas di wilayah Kabupaten Sukoharjo dibangun 4 reservoir yang sudah selesai pada tahun 2025.

Akses Air Siap Minum di Perkotaan belum dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo, saat ini masih dalam pencapaian target air minum aman.

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

PASMPP = (JRTASMPP:JRT) x 100%
= (0:41090) x 100%
= 0%

Untuk indikator ini Kabupaten Sukoharjo belum menetapkan target di tahun 2025.

e. Sanitasi

Sanitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan Upaya meningkatkan serta mewujudkan derajat kesehatan yang sehat khususnya Kesehatan masyarakat, atau dapat diartikan sebagai cara memelihara lingkungan manusia khususnya lingkungan fisik yaitu lingkungan hidup, bumi, air dan udara. Sedangkan pengertian umum sanitasi adalah suatu cara berperilaku yang bertujuan untuk mengembangkan pola hidup sehat serta strategi untuk mencegah orang bersentuhan langsung dengan bahan berbahaya dan kotor sehingga kebersihan tetap terjaga dan meningkatkan Kesehatan manusia. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Menurut WHO definisi sanitasi merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feses. Di Kabupaten Sukoharjo untuk sanitasi layak diterapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

Tabel 2. 83 Capaian Sanitasi Layak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo (Jiwa)	Pengguna jamban (SR/KK)	Pengguna jamban (Jiwa)	%
2021	897.916	267.857	790.210	88,00
2022	911.966	298.714	875.037	95,95
2023	911.966	286.646	875.057	95,95
2024	913.950	308.265	912.075	99,79
2025	917.388	314.585	917.388	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data tabel capaian sanitasi layak diketahui bahwa pengguna jamban yang layak meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 capaian sanitasi layak sudah 100%. Hal ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 0% serius dilakukan dan diiringi dengan penyediaan prasarana sanitasi.

Tabel 2. 84 Capaian Sanitasi Aman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

TAHUN	TOTAL PENDUDUK	SPALD - S		%	SPALD – T		%	SPALD - S & T		%
		SR	JIWA		SR	JIWA		SR	JIWA	
2021	897.916	3.417	17.570	1,96	656	3144	0,35	4.073	20.714	2,30
2022	911.966	1.529	4.659	0,51	2.707	8.251	0,90	4.236	12.910	1,42
2023	911.966	1.529	4.659	0,51	2.757	8.406	0,92	4.286	13.065	1,43
2024	913.950	1.529	4.538	0,50	2.817	8.327	0,91	4.346	12.865	1,41
2025	917.388	1.663	4.873	0,53	2.851	8.386	0,91	4.514	13.259	1,45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Penanganan pengelolaan air limbah diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh pemerintah salah satu contohnya yaitu IPAL Gumpang dan Jombor. Selain itu, ada juga Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Mojorejo, Bendosari. Berikut adalah data perkembangan IPAL Komunal Perumahan:

Tabel 2. 85 Jumlah IPAL Komunal Perumahan Kabupaten Sukoharjo

No	Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Layanan (KK)
1	2020	77	2.584
2	2021	87	2.662
3	2022	90	2.859
4	2023	41	2.757
5	2024	41	2.877
6	2025	41	2.911

Sumber: IKPLHD Kabupaten Sukoharjo

Sebaran wilayah yang terdapat pengelolaan limbah (IPAL) baik domestik maupun IPAL biogas, tersebar di seluruh wilayah kecamatan sesuai dengan karakterisik limbah yang dihasilkan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah pembangunan IPAL sehingga diharapkan dapat merata diseluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2. 86 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah komulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jarinagan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam sebuah Kab/kota	92,9 %	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, limpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	88,0 %	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPUPR Kabupaten Sukoharjo

f. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penataan ruang Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang sebagaimana dimaksud mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta pedoman pemanfaatan ruang. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan, bahwa terhadap kawasan-kawasan tertentu yang memiliki nilai strategis perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang sebagai penjabaran RTRW.

Capaian kinerja penataan ruang sangat berkaitan dengan ketaatan terhadap rencana tata ruang.

Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, pada tahun 2023 telah dilakukan review terkait dengan kesesuaian kebutuhan ruang untuk pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dikarenakan terjadinya dinamika pembangunan, perubahan regulasi sektoral, revisi RTRW Nasional, serta banyaknya kegiatan strategis di tingkat nasional dan regional. Sampai saat ini penyusunan RTRW sedang berproses menjadi Rancangan Peraturan Daerah. Telah dilakukan revisi RDTR Kecamatan Sukoharjo, RDTR Kecamatan Grogol dan RDTR Kecamatan Kartasura untuk disesuaikan dengan kebutuhan ruang dan pemanfaatannya, yang sudah selesai materi tekniknya ditahun 2025.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 87 Produk Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo

No.	Produk Hukum	Isi
1.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018	Perubahan atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031
2.	Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukoharjo Tahun 2020-2039
3.	Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Grogol Tahun 2020-2039

No.	Produk Hukum	Isi
4.	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kartasura Tahun 2020-2039
5.	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Tahun 2024-2045

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data tersebut Kabupaten Sukoharjo diketahui telah memiliki beberapa regulasi tentang rencana tata ruang. Rencana-rencana tersebut masih bersifat makro sehinga diharapkan di masa mendapat dapat disusun rencana lebih rinci lagi seperti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) agar penataan ruang lebih terarah.

Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya. Potensi wilayah tersebut terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031.

Pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan proses integrasi OSS RDTR Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari. Pada Tahun Anggaran 2024 juga telah melakukan Penyusunan Kajian Peninjauan Kembali RDTR Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura. Untuk Tahun Anggaran 2025 akan melakukan Penyusunan Materi Teknis RDTR Kecamatan Grogol, RDTR Kecamatan Sukoharjo dan RDTR Kecamatan Kartasura.

Penilaian kinerja pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur menggunakan indikator Indek Layanan Infrastruktur. Capaian Indek Layanan Infrastruktur pada tahun 2021 sebesar 67,33% dan pada tahun 2022 sebesar 69,10%. Dilihat dari capaian kinerja Indek Layanan Infrastruktur mengalami peningkatan sebesar 1,77%. Peningkatan itu dipengaruhi oleh capaian kinerja kualitas dan kuantitas infrastruktur publik, sarana dan prasarana dasar masyarakat, capaian kinerja kualitas perencanaan dan pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Rumah/tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak. Kebutuhan rumah sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,87% dimaknai juga sebagai pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan rumah bagi keluarga.

Terpenuhinya kebutuhan rumah/tempat tinggal sangat bergantung pada sisi kebutuhan *(demand)* dan sisi penyediaan *(supply)*. Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga

untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan backlog rumah.

Untuk penyediaan rumah yang layak huni bagi seluruh kepala keluarga sampai akhir tahun 2020, diperkirakan membutuhkan 289.428 unit rumah. Pada tahun 2021 dilakukan validasi data yang meliputi jumlah rumah baik yang layak huni maupun yang tidak layak huni serta jumlah kepala keluarga untuk mengetahui angka backlog sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.Berdasarkan hasil validasi data perumahan tahun 2021 didapatkan informasi jumlah rumah 242.659 unit, jumlah rumah layak huni sebesar 227.503 unit, jumlah total rumah tidak layak huni 15.156 unit, jumlah rumah layah huni yang memenuhi syarat diajukan bantuan sejumlah 11.524 unit, jumlah backlog sebanyak 22.045 KK.

Pembangunan perumahan dan permukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat lain agar dapat berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Penanganan RTLH tahun 2020 sejumlah 1.832 unit sehingga jumlah RTLH pada tahun 2020 tinggal sejumlah 10.849 dari jumlah semula 17.982 di tahun 2015. Pada tahun 2021 dilakukan verifikasi data RTLH ditetapkan dengan SK Bupati Sukoharjo Nomor : 663/479 TAHUN 2021 sejumlah 11.524 unit dan penanganan RTLH tahun 2021 sejumlah 2.230 unit sehingga sisa RTLH sejumlah 10.773 unit. Pada tahun 2022 penanganan RTLH sejumlah 1.152 sehingga sisa RTLH sejumlah 9.936 unit. Pada tahun 2023 penanganan RTLH sejumlah 1.653 unit sehingga sisa RTLH tahun 2023 sejumlah 8.799 unit. Pada tahun 2024 RTLH yang ditangani sejumlah 2.057 unit dan sisanya 7.566 unit. Pada tahun 2025 RTLH yang ditangani sejumlah 1.120 unit dan sisa tahun 2025 sejumlah 4.469 unit. Diperlukan kolaborasi antar stakeholder dalam penanganan RTLH di Kabupaten Sukoharjo. Gambaran penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sukoharjo mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 88 Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 – 2025

No	Tahun	Data Awal dari Basis Data Terpadu RTLH	RTLH yang Ditangani	Jumlah RTLH
1	2017	Data sesuai PBDT 2015 adalah 17.892 unit	1.222	15.506
2	2018		1.356	14.150
3	2019		1.469	12.681
4	2020		1.832	10.849
		Data Hasil verifikasi tahun 2021 ditetapkan dengan SK Bupati Sukoharjo.		11.524
5	2021		2.230	10.773
6	2022		1.152	9.936
7	2023		1.653	8.799
8	2024		2.057	7.566
9	2025		1.120	4.469
Jumlah RTLH yang tertangani			**14.091**	

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

Makin berkurangnya persentase RTLH dan luasan permukiman kumuh juga berdampak signifikan terhadap penurunan persentase lingkungan kumuh di Kabupaten Sukoharjo. Data Luas Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2020-2022 menggunakan data Luas Kabupaten Sukoharjo berdasar BPS seluas 46.667 Ha dan mulai Tahun 2023 Luas Kabupaten Sukoharjo sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2028 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 dengan luas 49.323 Ha. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan baseline luasan kumuh di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 653/412 TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh dengan luas total 620,056 Ha.. Luasan kumuh di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan luas kabupaten sebesar 1,233%. Persentase luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 89 Persentase Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2025

No	Tahun	Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	Luas Kabupaten (Ha)	%
1	2020	138,093	46.667	0,295
2	2021	69,403	46.667	0,148
3	2022	19,780	46.667	0,042
Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 653/412 TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh dengan luas total 620,056 Ha				
4	2023	608,346	49.323	1,233
5	2024	593,883	49.323	1,162
6	2025	557,526	49.323	1.13

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

Pembangunan Kawasan Permukiman meliputi pembangunan permukiman yang sehat dan layak huni. Membangun permukiman merupakan landasan utama dalam membangun bangsa, karena dengan mewujudkan permukiman yang layak bagi masyarakat akan berkontribusi besar terhadap pemenuhan hak dasar rakyat dan pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa yang berjati diri serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Pembangunan kawasan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. Beberapa langkah strategis dalam mewujudkan hal tersebut di antaranya melalui pencapaian amanah pembangunan nasional dengan mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan hingga 0%. Luasan Kumuh Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 653/412 TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh dengan luas total 620,056 Ha. Penanganan kumuh pada tahun 2023 seluas 11,710 Ha sehingga luasan kumuh yang tersisa seluas 608,346 Ha. Pada Tahun 2024 penanganan kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seluas 14,463 Ha sehingga sisa luasan kumuh masih seluas **593,883 Ha**. Luasan kumuh terhadap luas kabupaten sebesar 1,163%. Pada Tahun 2025 penanganan kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seluas 36,360

Ha sehingga sisa luasan kumuh masih seluas **557,523 Ha**. Luasan kumuh terhadap luas kabupaten sebesar **1,13%.**

Tabel 2. 90 Data Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Tahun 2020 – 2025

No	Tahun Penanganan	Capaian Penanganan Kumuh (Ha)
1	2020	32,979
2	2021	35,711
3	2022	49,623
4	2023	11,710
5	2024	14,463
6	2025	36.360
Total		**337,525**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2. 91 Data Penanganan Kumuh setelah terbit Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 653/412 TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh.

No	Tahun	Luas Kumuh	Penanganan Kumuh	Sisa Luasan Kumuh
1	2023	620,056	11,710	608,346
2	2024	608,346	14,463	593,883
3	2025	593,883	36.360	557,523

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

Salah satu indikator perumahan layak huni adalah tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) yang memadai, di mana PSU yang cukup penting adalah ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan orang dan lingkungan. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menangani permasalahan penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah. Penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin keberlanjutan pemeliharaan, dan mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum. Setelah PSU diserahkan ke pemerintah daerah, pemeliharaan dan pengelolaan PSU menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Berikut adalah data PSU yang sudah diserahkan sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2. 92 Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Jumlah PSU yang diserahkan								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Weru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bulu	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Tawangsari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sukoharjo	3	-	2	5	5	3	1	11	7
5	Nguter	-	-	-	-	-	2	2	2	3
6	Bendosari	-	-	-	-	3	-	-	1	5
7	Polokarto	-	-	-	-	1	-	-	1	3
8	Mojolaban	1	-	1	5	11	6	3	5	7
9	Grogol	2	-	2	1	12	8	1	1	4
10	Baki	3	-	1	3	5	12	8	3	3
11	Gatak	3	-	3	1	7	4	2	3	8
12	Kartasura	1	-	-	1	21	13	8	5	3
	Jumlah	**13**	**-**	**9**	**16**	**65**	**48**	**25**	**32**	**44**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

Dari data tabel diatas menunjukan bahwa masih banyaknya pengembang yang belum menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2021 baru sebanyak 107 lokasi PSU yang diserahkan. Penyerahan PSU pada tahun 2022 sebanyak 48 lokasi sehingga penyerahan PSU sampai dengan tahun 2022 sejumlah 155 lokasi. Pada tahun 2023 PSU yang berhasil diserahkan ke pemerintah daerah sejumlah 25 lokasi sehingga sampai dengan tahun 2024 PSU yang sudah diserahkan berjumlah 212 lokasi. Pada tahun 2025 PSU Perumahan yang berhasil diserahkan ke pemerintah daerah sejumlah 44 lokasi sehingga sampai dengan tahun 2025 PSU Perumahan yang sudah diserahkan berjumlah 257 lokasi.

Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai tahun anggaran 2022 sudah memenuhi ketentuan didalam Permendagri Nomor 59 tahun 2021 yaitu mengalokasikan anggaran Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung jenis layanan SPM fasilitasi penyediaan rumah uang layak huni bagi masyarakat yang terkenan relokasi program pemerintah berupa Identifikasi data rumah yang menempati daerah rwan relokasi program pemerintah. Data capaian SPM Perumahan Rakyat dapat dilihat dalam table dibawah :

Tabel 2. 93 Capaian SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan	Capaian (%) 2022	Capaian (%) 2023	Capaian (%) 2024	Capaian (%) 2025
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	100	100	100	100
	Total Capaian	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel diatas capaian SPM Perumahan Rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo menjunjukkan capaian 100%.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

a. Menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
b. Melakukan survey lokasi ke seluruh Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Sukoharjo untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan 7 kriteria kumuh. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 653/412 TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh dengan luas total 620,056 Ha.
c. Menangani permukiman kumuh dengan berbagai macam sumber dana.

d. Memberikan bantuan berupa hibah barang atau uang kepada BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di Desa/Kelurahan yang memiliki wilayah kumuh dengan dana dari APBD.
e. Menyusun dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sukoharjo sebagai pedoman penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Sukoharjo.
f. Melakukan Sosialisasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.

Sedang upaya untuk mencegah permukiman menjadi kumuh dilakukan dengan mengadakan penyuluhan penyadaran publik untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. Penyuluhan ini dilakukan setiap tahun dengan peserta Ketua RT, Ketua RW, Pengurus BKM dan perangkat desa.

Penilaian kinerja pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan indikator Lingkungan Hunian Layak. Capaian kinerja Lingkungan Hunian Layak pada tahun 2021 sebesar 79,80%, tahun 2022 sebesar 85,30%, pada tahun 2023 sebesar 85,42%, tahun 2024 sebesar 91,60 dan tahun 2025 sebesar 92,60 Dilihat dari capaian kinerja Lingkungan Hunian Layak mengalami peningkatan sebesar 1%. Peningkatan itu dipengaruhi oleh tercapainya target pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, tercapainya target penanganan Kawasan Kumuh dan tercapainya target penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah daerah.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Tahun 2025 nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 88,99 dengan kategori **Sangat Baik.** Ini menunjuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo sangat puas dengan capaian kinerja bidang perumahan dan kawasan permukiman, namun demikian masih perlu peningkatan kinerja bidang perumahan dan kawasan permukiman.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta upaya penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Makin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan makin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun kinerja pembangunan aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat tabel berikut :

a. Penyelesaiaan gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sedangkan untuk gambaran angka kriminalitas, penegakkan perda serta penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 94 Angka Kriminalitas, Penegakkan Perda serta Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025

No	Uraian	2021		2022		2023		2024		2025	
		Kasus	Selesai	Kasus	Selesai	Kasus	Kasus	Selesai	Kasus	Selesai	Selesai
1.	Angka Kriminalitas	150	69	205	136	192	150	69	205	136	184
2.	Penegakan Perda	225	221	127	125	n/a	225	221	127	125	n/a
3.	Gangguan Trantibum	5.247	5.142	5168	5107	n/a	5.247	5.142	5168	5107	n/a

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa penyelesaian penegakkan peraturan daerah serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum sudah baik karena persentase penyelesaiannya rata-rata sudah di atas 90%. Hal yang masih perlu membutuhkan perhatian adalah masalah penyelesaian angka kriminalitas karena persentasenya belum mencapai 80%.

b. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat terlatih

Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Jumlah personel anggota Linmas di Kabupaten Sukoharjo akhir tahun 2025 tercatat sejumlah 6.499 personel. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 sejumlah 959.018, maka rasio jumlah Linmas di Kabupaten Sukoharjo per 10.000 penduduk adalah 67,76. Artinya, tiap 10.000 penduduk terdapat 67 personel Linmas.

Tabel 2. 95 Rasio Jumlah Anggota Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Anggota Linmas	Jumlah Penduduk	Persentase
2021	6.499	911.603	71,29
2022	6.499	916.627	70,91
2023	6.499	932.680	69,69
2024	6.499	941.650	69,01
2025	6.499	959,018	67,76

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo

Adapun kinerja pembangunan aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2. 96 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	98,10	98,82	98,82	96,96	98,30

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	95,20	95,30	95,40	95,50	95,50
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	93	95	95	95	95
4	Persentase Penegakan PERDA	97,20	96,95	97,82	96,96	96,96
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	-	-	-	-	-
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	-	-	-	-	-
7	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM)	115	95	-	-	-

Sumber : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan BPBD

Adapun kinerja pembangunan aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2. 97 Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	98	98,10	98,82	98,82	96,96
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	95,20	95,30	95,40	95,50	95,80
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	93	95	95	95	95,80
4	Persentase Penegakan PERDA	97,20	96,95	97,82	96,96	99,70
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	-	-	-	-	-
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	-	-	-	-	-
7	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM)	115	95	-	-	55,00

Sumber : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan BPBD

Adapun jumlah Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana di Kabupaten Sukoharjo, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 98 Jumlah Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	5.200	6.718	10.597	16.226	7.287
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap bencana	7.200	1.688	1.540	2.410	3.615
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	11.966	25.054	23.118	6.395	2.395

Sumber : BPBD Kabupaten Sukoharjo

Capaian orang yang memperoleh Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Jenis Pelayanan Dasar Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana setiap tahunnya meningkat, ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan kesiapsiagaan penanganan berbagai bencana yang terjadi di wilayahnya. Untuk jenis layanan dasar Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2025 mengalami penurunan, ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan edukasi kepada warga dalam Informasi Rawan Bencana sehingga pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meningkat.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Indek Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Indek Ketahanan Daerah yang menjadi salah satu unsur dalam Kajian Resiko Bencana dapat menjadi rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di suatu daerah. Semakin tinggi nilai Indek Ketahanan Bencana maka semakin rendah nilai Indeks Resiko Bencana di suatu daerah. Indek Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 2. 99 Capaian Indek Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kapasitas Daerah	0,27	0,56	0,63	0,63	0,68

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2. 100 Capaian Indek Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Resiko Bencana	93,20	81,29	71,27	64,18	87,03

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo

Indek Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 sebesar 0,56 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,29. Pada Tahun 2023 diperkirakan Indeks Ketahanan Daerah mencapai 0,63 naik sekitar 0,07 dari Tahun 2022. Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 81,29 atau masuk ke kelas sedang. Jika dibanding dengan nilai tahun 2021 sebesar 93,20 mengalami penurunan 11,91 poin di tahun 2022. Pada Tahun 2023 Indeks Resiko Bencana diperkirakan sebesar 71,27 turun sekitar 10,02 dari tahun 2022. Tahun 2024 Indeks Resiko Bencana sebesar 64,18 turun sebesar 7,09. Pada Tahun 2025 nilai Indek Resiko Bencana sebesar 87,03 terjadi peningkatan 22,85 dari tahun 2024, ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2025 ancaman dan resiko bencana bertambah dari 6 jenis acaman dan resiko bencana menjadi 9 ancaman dan rasiko bencana serta banyak kejadian bencana di Kabupaten Sukoharjo. Peningkatan Indek Ketahanan Daerah akan menyebabkan penurunan Indek Resiko Bencana. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya dokumen perencanaan penanganan bencana daerah yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo salah diantaranya Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah yang telah disusun dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor : 62 Tahun 2021 tentang Kajian Resiko Bencana Daerah dan Dokumen Rencana Penanganan Bencana Dearah yang sudah disusun tahun 2022. Penyusunan Dokumen Rencana Operasi Penanganan Bencana Tahun 2023 juga ikut mempengaruhi kenaikan nilai Indeks Ketahanan Daerah. Dengan meningkatnya Indek Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sukoharjo akan berpengaruh pada meningkatnya kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penanggulangan bencana sehingga akan menurunkan Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sukoharjo. Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menyusun Kajian Resiko Bencana Tahun 2027-2030 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2025.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) selengkapnya di tabel berikut:

Tabel 2. 101 Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100
	Total Capaian	**100**

Sumber : BPBD dan SATPOL PP Kabupaten Sukoharjo

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar sub urusan bencana dapat dilihat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Tahun 2025 nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 88,63 dengan kategori **Sangat Baik.** Ini menunjuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo sangat puas dengan capaian kinerja bidang perumahan dan kawasan

permukiman, namun demikian masih perlu peningkatan kinerja pelayanan dasar sub urusan bencana.

6. Sosial

Masih banyak kalangan masyarakat yang hidupnya kurang beruntung, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar/anak jalanan, orang jompo dan lanjut usia, orang cacat dan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka pembangunan daerah harus memperhatikan sistem yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang beruntung tersebut. Sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka semakin berpengaruh terhadap kondisi jumlah penyandang masalah kemiskinan di masyarakat. Penanganan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo berjalan cukup baik ditandai dengan semakin menurunnya jumlah penduduk miskin. Namun demikian dengan adanya kecenderungan tersebut, beberapa tantangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sukoharjo relatif masih sangat besar.

Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo makin turun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019., dan terjadi kenaikan pada Tahun 2020 dan 2021 hal ini dikarenakan dampak Pandemi COVID 19. Pada tahun 2022 tercatat persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo kembali menurun ke angka 7,61%. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 2. 102 Jumlah Penduduk Miskin dan Standar Garis Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	% Penduduk Miskin
2020	393.776	68,9	7,68
2021	410 273	73,84	8,23
2022	434.318	68,72	7,61
2023	476,675	68,79	7,58
2024	501,693	68,15	7,47

Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka

Masalah sosial merupakan masalah yang kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Urusan sosial menangani peningkatan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kabupaten Sukoharjo memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung, seperti gelandangan, pengemis, tunasusila, anak jalanan, anak terlantar dan lain-lain yang dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pembangunan di bidang sosial juga termasuk upaya untuk menanggulangi kemiskinan atau menurunkan penduduk miskin. Perincian capaian indikator sosial tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 103 Capaian Kinerja Bidang Sosial

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase PMKS yang tertangani	%	N/A	12,1	13,2	21	23,3
2	Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan	%	N/A	100	100	100	100
3	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial	%	N/A	14,9	16	17	17,5
4	Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	%	N/A	53,1	53,6	46,3	54,1
5	Prosentase pemenuhan penanganan bencana	%	N/A	73,9	73,9	73,9	73,9

Sumber: Data Penerima PKH, BPNT, dan Database Penerima Bantuan dan PPKS yang tertangani di Dinas Sosial Kab. Sukoharjo

Penanganan pemberian pelayanan PMKS tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta instansi terkait lainnya. Ada banyak PMKS yang belum atau bahkan tidak memiliki administrasi kependudukan padahal dalam pengurusan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus memiliki data administrasi kependudukan yang benar. Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi yang intensif antar perangkat agar pemberian pelayanan dapat menjadi lebih baik.

Kabupaten Sukoharjo sudah mempunyai regulasi terkait aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yaitu Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo. Permasalahan yang muncul terkait infrastruktur fasilitas umum yang ada di Kabupaten Sukoharjo yaitu belum semua ramah disabilitas. Fasilitas aksesibilitas ramp dan handriil baru dimiliki oleh beberapa gedung milik pemerintah.

a. Santunan Kematian

Santunan kematian atau disebut juga bantuan sosial uang duka merupakan program unggulan Bupati Sukoharjo sejak tahun 2011. Pemberian santunan kematian atau bantuan sosial uang duka merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada warganya untuk sekadar meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, serta sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Pemberian santunan kematian atau bantuan sosial uang duka diberikan kepada masyarakat yang ber-KTP Sukoharjo, khususnya masyarakat kurang mampu.

Tabel 2. 104 Rekapitulasi Penerima Santunan Kematian/ Bantuan Sosial Uang Duka bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah		Keterangan
		Orang	Uang (Rp.)	
1	2020	1.804	5.412.000.000	Tahap 1
		1.457	4.371.000.000	Tahap 2
Jumlah		**3.261**	**9.783.000.000**	
2	2021	2.498	7.494.000.000	Tahap 1
		761	2.283.000.000	Tahap 2
Jumlah		**3.259**	**9.777.000.000**	
3	2022	2.337	7.011.000.000	Tahap 1
		3.780	11.340.000.000	Tahap 2
		1.750	5.250.000.000	Tahap 3
Jumlah		**7.867**	**23.601.000.000**	
4	2023	1.700	5.100.000.000	Tahap 1
		2.300	6.900.000.000	Tahap 2
Jumlah		**4.000**	**12.000.00.000**	
5	2024	1.700	5.100.000.000	Tahap 1
		2.300	6.900.000.000	Tahap 2
Jumlah		**4.000**	**12.000.00.000**	

Sumber : Dinas Sosial Kab. Sukoharjo

b. Sanggar Inklusi

Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan guna memenuhi hak-

hak penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sejauh ini, sanggar inklusi diandalkan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas. Konsep sanggar inklusi melibatkan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak penyandang disabilitas. Mereka juga dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan di sanggar inklusi. Konsep sanggar inklusi lainnya adalah membangun kepedulian para donatur agar memberikan kontribusinya. Perusahaan, organisasi atau masyarakat tergerak hatinya untuk menyumbangkan dana yang digunakan untuk membiayai operasional kegiatan sanggar inklusi.

Di Sukoharjo, sanggar inklusi tersebar di tiap kecamatan, sehingga setidaknya terdapat 12 sanggar inklusi dengan persebaraan dan jumlah siswa binaan, sebagai berikut.

Tabel 2. 105 Persebaran Sanggar Inklusi dan Jumlah Siswa Binaan Tahun 2024

No	Kecamatan	Nama Sanggar	Jumlah Siswa Binaan		Total Siswa Binaan
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Weru	Anak Bangsa	48	22	70
2	Tawangsari	Mutiara Hati	47	20	67
3	Bulu	Tunas Harapan	36	28	64
4	Nguter	Tunas Bangsa	53	26	79
5	Sukoharjo	Wijaya Kusuma	44	16	60
6	Bendosari	Tunas Wijaya	26	13	39
7	Polokarto	Permata Hati	47	19	66
8	Mojolaban	Kasih Sayang Bunda	44	26	70
9	Grogol	Anugerah Aulia	42	29	71
10	Baki	Permata Hati Wijaya	53	20	73
11	Gatak	Mutiara Bunda	61	36	97
12	Kartasura	Kinasih Wijaya	72	28	101

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

c. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, dimana capaiannya pada tahun 2023 dan 2024 meraih 100% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 106 Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100
	Total Capaian	**100**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang

menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Dengan melihat TPT secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada diwilayah tersebut. Semakin Tinggi TPT di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Beberapa konsep yang terkait dengan indikator ini, yakni: Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur, Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya

Secara detail perkembangan TPT dan TPAK Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dari Tabel berikut.

Tabel 2. 107 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Tahun	TPT (%)			TPAK (%)		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Nasional	Provinsi	Kabupaten
2021	6,49	5,95	3,32	67,77	69,58	68,78
2022	5,86	5,57	2,47	69,96	70,84	67,38
2023	5,32*	5,13*	3,40	69,85	71,72	67,66
2024	4,91	4,78	3,65	70,60	73,74	68,21
2025	4,85	4,66	4,32	70,59	74,36	70,00

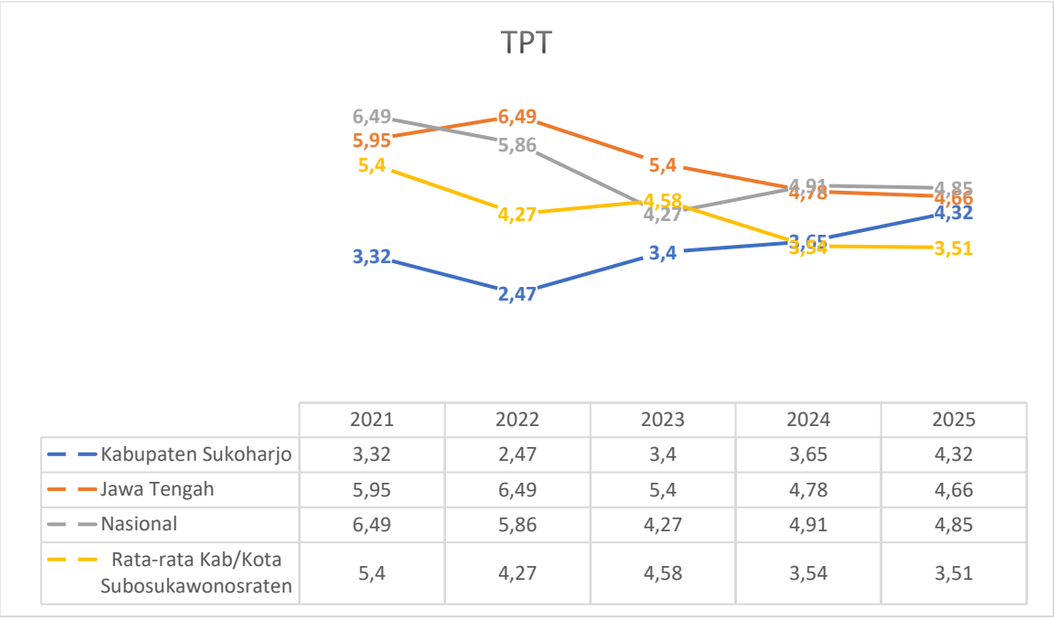
*Sumber : BPS Sukoharjo * sementara*

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025, menunjukkan adanya dinamika ketenagakerjaan yang cukup fluktuatif namun cenderung membaik. TPT Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 sebesar 2,47 persen, namun dalam 3 tahun terakhir terjadi kenaikan menjadi 4,32 persen di tahun 2025, TPT Sukoharjo di Tahun 2025 meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo relatif lebih resilien, namun tetap memerlukan perhatian dalam menjaga stabilitas kesempatan kerja, terutama dalam menghadapi tantangan struktural dan dinamika ekonomi global.

Di sisi lain, TPAK Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, dari

68,78 persen pada tahun 2021 menjadi 68,38 persen pada tahun 2022 berangsur naik di tahun 2023 sebesar 67,66 Persen, pada tahun 2024 sebesar 68,21 persesn dan tertinggi di tahun 2025 sebesar 70,00. Capaian TPAK Kabupaten Sukoharjo di tahun 2025 masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah, yang menunjukkan adanya potensi angkatan kerja yang belum sepenuhnya terserap atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi angkatan kerja melalui penguatan program pelatihan vokasi, penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal, serta peningkatan konektivitas antara dunia pendidikan dan dunia usaha/industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo.selengkapnya perbandingan TPT secara Nasional dan Provinsi dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2. 37 TPT Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Sukoharjo	3,32	2,47	3,4	3,65	4,32
Jawa Tengah	5,95	6,49	5,4	4,78	4,66
Nasional	6,49	5,86	4,27	4,91	4,85
Rata-rata Kab/Kota Subosukawonosraten	5,4	4,27	4,58	3,54	3,51

Sumber : BPS Sukoharjo

Adapun Penduduk Sukoharjo Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 108 Penduduk Sukoharjo Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2020-2024

Jenis Kegiatan Tenaga Kerja	Penduduk Sukoharjo Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	717.171,00	NA	737.148	748.353	757.568
Angkatan Kerja	493.258,00	475.594	499.743	510.436	530.316
Bekerja	476.867,00	475.594	482.765	491.805	507.385
Pengangguran Terbuka	16.391,00	12.068	16.978	18.631	22.931
Bukan Angkatan Kerja	223.913,00	236.114	238.908	237.917	227.252
T P A K (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	68.74	68,78	67,38	68,21	70,00
T P T (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	6.93	3,32	2,47	3,65	4,32

Sumber : BPS Sukoharjo

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025 sebanyak 530.316 orang. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Tahun 2025 sebanyak 507.385 orang penduduk di Kabupaten Sukoharjo bekerja sedangkan sebanyak 22.931 orang menganggur. Kondisi ekonomi global karena perang rusia ukraina dan industri tekstil yang menurun berdampak pada penambahan penduduk penganggur serta menjadi dinamika aktivitas ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum di Kabupaten Sukoharjo. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 5 Tahun terakhir di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel 2. 109 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
2021	58,75
2022	58,14
2023	57,05
2024	56,92
2025	70,00

Sumber : Dispernaker Kabupaten Sukoharjo

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 5 tahun terakhir di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan angka di atas 50%, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan terserap dengan baik di lapangan kerja Sukoharjo. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar 70,00 persen.

b. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dimana pada tahun 2025 sebesar 70 %. Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang lima tahun terakhir jumlah AKL dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif pada tahun 2021 sebanyak 3.572 orang dan cenderung naik dari tahun ke tahun menjadi 5.023 orang di tahun 2025. Untuk jumlah AKAN mmeiliki tren menaik dari 78 orang di tahun 2021 menjadi 480 orang di tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 110 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2021 - 2025

Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2021	3.572	-	78
2022	3.613	-	110
2023	4.333	-	84
2024	4.506	-	413
2025	5.023	-	480

Sumber : BPS Sukoharjo

c. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pencapaian di Kabupaten Sukoharjo selama periode tahun 2021-2025 mengalami peningkatan dan rasio UMK dibandingkan KHL sudah mencapai 100% mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah memenuhi kebutuhan hidup layak.

Tabel 2. 111 Rasio Rata - Rata Upah Minimum Dibanding KHL Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Tahun	UMK (Rp/Bln/orang)	KHL (Rp/bln/Orang)	Ratio (%)
2021	1.986.450,00	1.986.450,00	100,00
2022	1.998.153,18	1.998.153,18	100.00
2023	2.138.247,00	2.138.247,00	100.00
2024	2.215.482,00	2.215.482,00	100.00
2025	2.500.000,00	2.500.000,00	100.00

Sumber : BPS Sukoharjo

Tabel 2. 112 Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Uraian	2020	2021	2022	2023
Penerima Upah	47.493	53.546	55.805	77.577
Bukan Penerima Upah	4.538	6.412	10.939	12.137
Jasa Konstruksi	5.889	9.153	26.882	8.667
Jumlah	57.920	69.111	93.626	98.381

Sumber : Dispernaker Kabupaten Sukoharjo

Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan penekanan pada tenaga kerja informal sudah masuk didalamnya. Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan penekanan pada tenaga kerja informal menjadi bagian / masuk didalam kelompok Bukan Penerima Upah pada tahun 2025 sejumlah 21.325 orang.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan kinerja daerah urusan pemberdayaan perempuan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 113 Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	%	100	100	100	100	100
2	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
3	Persentase laporan kekerasan terhadap anak yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
4	Score kabupaten layak Anak	Score	605	645	620.4	N/A*	
5	Persentase kelompok perempuan produktif yang mendapatkan pelatihan	%	0,035	0,035	0,036	0,036	0,036

**) Skor KLA Tahun 2024 tidak ada evaluasi*
Sumber : DPPKBP3A Kab. Sukoharjo

Tabel tersebut menyajikan perbandingan antara realisasi dan target dari indikator kinerja Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif. Data tersebut menyebutkan bahwa 100% kelembagaan PUG di Kabupaten Sukoharjo aktif. Artinya, saat ini Kelembagaan PUG yang terdata adalah sejumlah OPD yang ada di Kabupaten Sukoharjo, semuanya masih ahtif menerapkan prinsip-prinsip PUG di masing-masing instansinya.

Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti bernilai 100%. Artinya, Satgas Perlindungan anak dari Unsur Pemerintah Daerah dan Unit Perlindungan Perempuan dan

Perlindungan Anak Polri senantiasa merespons, mendampigi, dan menanggapi serius setiap aduan yang diajukan.

Persentase kelompok perempuan yang produktif tercapai 100 % dengan jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan sebesar 0,036%. Angka ini terlihat kecil, karena hanya berupa kelompok perempuan yang produktif. Akan tetapi, tiap tahun kegiatan ini selalu bergulir dan berganti kelompok perempuan dengan bentuk pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok perempuan tersebut

3. Pangan

Sejak tahun 2023 penentuan desa yang termasuk pada kategori desa rawan pangan, tidak lagi menggunakan Peta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tetapi menggunakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA) yang disusun setiap tahun. Adapun desa yang dijadikan prioritas intervensi program penanganan kerawanan pangan adalah desa yang berada pada Prioritas 1, 2 dan 3 dalam Peta FSVA. Prioritas selanjutnya adalah desa-desa yang masuk pada kategori "Agak Tahan Pangan" (prioritas 4), untuk mengantisipasi agar desa-desa tersebut tidak turun peringkat (masuk kategori Agak Rawan Pangan, Rawan Pangan, Sangat Rawan Pangan). Pada Tahun 2025 di Kabupaten Sukoharjo tidak terdapat desa prioritas 1, 2, dan 3. Namun demikian masih terdapat desa prioritas 4 (agak tahan pangan) sebanyak 19 desa, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 114 Jumlah Desa Prioritas 4 Pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Prioritas 3 Pada Peta FSVA	Keterangan
1	Weru	1	Karangwuni
2	Bulu	1	Lengking
3	Tawangsari	-	-
4	Sukoharjo	1	Kriwen
5	Nguter	2	Baran, Plesan
6	Bendosari	1	Cabeyan
7	Polokarto	2	Jatisobo, Kemasan
8	Mojolaban	2	Triyagan, Plumbon
9	Grogol	4	Grogol, Madegondo, Banaran, Cemani
10	Baki	1	Jetis
11	Gatak	1	Tempel
12	Kartasura	3	Makamhaji, Ngadirejo, Kartasura
	Jumlah	19	

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Selain itu pangan, merupakan salah satu aspek utama dalam kaitannya dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa

ekosistem. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang- Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Berikut ini Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2021-2025. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (dietary score)/skor PPH.

Tabel 2. 115 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

URAIAN	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Energi	KKal/Kapita/ Hari	3.695	2.800	2.974	3.015	3.075
Konsumsi Energi	KKal/Kapita/ Hari	2.150	2.110	2.129	2.013	1.953,84
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	99,.07	89,52	93,9	90,89	92,84
Angka Konsumsi Protein	Gr/Kapita/Hari	57	55	55,4	56,8	57,02

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Ketersediaan energi mencerminkan ketersediaan pangan dari sisi kualitas bahan pangan. Dengan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) dari berbagai jenis pangan yang tersedia, diketahui jumlah energi yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan energi per kapita dan Skor Pola Pangan Harapan tahun 2025 sebesar 92,84 (PPH) Ketersediaan. Sedangkan Konsumsi Energi mencerminkan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi penduduk yang menunjukkan jumlah energi yang dikonsumsi oleh penduduk per kapita per hari dalam Kilo Kalori. Demikian juga Angka Konsumsi Protein mencerminkan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi penduduk, yang menunjukkan jumlah protein yang dikonsumsi penduduk per kapita per hari dalam gram. Ketersediaan energi dan protein dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : ketersediaan bahan pangan dan pertumbuhan penduduk. Ketersediaan bahan pangan dipengaruhi oleh produksi pangan dan distribusi pangan ke seluruh wilayah kabupaten serta keluar masuknya bahan pangan di Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2025 ketersediaan energi mencapai 3.075 KKal/Kapita/Hari, Ketersediaan energi pada tahun 2025 bertambah bila dibanding tahun 2024 yang sebesar 3.015 KKal/Kapita/Hari, capaian dimaksud menunjukkan bahwa ketersediaan energi melampaui angka kecukupan energi ketersediaan 2.400 KKal/Kapita/Hari. Kondisi ini perlu upaya dalam mempertahankannya.

Tabel 2. 116 Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2025

Komoditi Beras	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan	174.618	218.709	256.267	222.633	217.692
Kebutuhan	80.217	80.709	79.529	80.080	59.774
Surplus/defisit	94.401	138.000	176.738	142.553	157.918

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Ketersediaan beras di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kondisi yang stabil dan mampu mencukupi kebutuhan dan bahkan terdapat surplus, kinerja ini didukung dengan kemampuan memproduksi bahan pangan (Beras) di Sukoharjo, guna tetap mendukung ketahanan pangan dan Sukoharjo sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional perlu Keberlanjutan kegiatan yang

mendukung ketercapaian produksi pangan. Surplus di Tahun 2025 sebesar 157.918 ton.

Tabel 2. 117 Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2025

Komoditi Jagung	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan	26.947	16.743	17.252	13.423	18.309
Kebutuhan	925	934	809	814	821
Surplus/defisit	26.022	15.809	16.716	12.609	17.488

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Ketersediaan jagung di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kondisi yang stabil dan mampu mencukupi kebutuhan dan bahkan terdapat surplus, hasil ini didukung dengan kemampuan memproduksi jagung di Sukoharjo, guna tetap mendukung ketahanan pangan dan Sukoharjo sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional perlu keberlanjutan kegiatan yang mendukung ketercapaian produksi pangan. Surplus di Tahun 2025 sebesar 17.488 ton

Tabel 2. 118 Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2025

Komoditi Kedelai	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan	4.548	5.561	3.492	2.561	2.030
Kebutuhan	7.664	7.711	8.357	8.415	8.479
Surplus/defisit	-3.115	-2.149	-4.866	-5.854	-6.450

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Selama 5 tahun terakhir ketersediaan kedelai di Sukoharjo dari 4.548 ton di tahun 2021 menalami tren menurun hinga di angka 2.030 ton di tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi Sukoharjo dalam menyediakan bahan pangan berupa kedelai ada, namun hasil belum mampu mencukupi kebutuhan, selama lima tahun terakhir terjadi defisit yang semakin besar sehingga perlu upaya dalam meningkatkan jumlah ketersediaan kedelai di Sukoharjo

IKP dan PoU lingkup Pertanian dan Pangan sebagai berikut:

Tabel 2. 119 Indeks Ketahanan Pangan

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Ketahanan Pangan	87,29	89,11	91,02	90,93	74,12

Sumber Data : Badan Pangan Nasional

2024 menunjukkan tren meningkat, pada tahun 2021 IKP sebesar 87,29 pada tahun 2024 meningkat menjadi 90,93. Mulai tahun 2025, penghitungan IKP oleh Bapanas menggunakan metode baru (ada indikator yang berubah/bertambah) hal ini berakibat pada perbedaan hasil perhitungan IKP, sehingga hasilnya tidak bisa diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 IKP Kabupaten Sukoharjo sebesar 74,12.

Tabel 2. 120 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

No.	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	11,92	12,74	10,31	8,05	8,34

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) di Kabupaten Sukoharjo mengalami naik turun dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025.

PoU Kab. Sukoharjo baseline di 2024 sebesar 8,04 dan ditargetkan di tahun 2025 sebesar 8. Pada tahun 2025 PoU sebesar 8,34, tidak mencapai target. Upaya untuk dapat menurunkan PoU (semakin kecil semakin bagus) adalah dengan intervensi ke kemiskinan. Hal ini sudah diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui penyaluran bantuan pangan kepada kasus kerawanan pangan dan gizi, dan stunting.

Pada tahun 2027, direncanakan pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebesar 15 Ton Gabah Kering Giling (GKG). Dengan Sisa Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Akhir Tahun 2025 sebesar 47 Ton GKG, maka Jumlah CPP Kabupaten pada tahun 2027 sebesar 62 Ton GKG. Salah satu tujuannya untuk mendukung ketersediaan pangan, yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PoU. Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten tersebut antara lain untuk menangani kasus kerawanan pangan dan gizi. Pada Tahun direncanakan penyaluran CPP Kabupaten sebesar 50 Ton GKG pada kasus rawan pangan dan gizi.

Penyediaan pangan rumah tangga/keluarga melalui pemanfaatan pekarangan dengan tanaman sayuran dan pemeliharaan ikan di kolam/ternak kecil guna memenuhi sebagian kebutuhan pangan yaitu pangan sumber vitamin dan protein. Intervensi pangan dan gizi untuk pemenuhan protein pada daerah rawan pangan.

4. Pertanahan

Lahan bersertifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh hak pakai dan merupakan hibah (kecuali bangunan kantor pemerintah daerah). Sampai tahun 2025 ada 3.820 bidang tanah bersertifikat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berikut adalah rincian tanah bersertifikat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2. 121 Jumlah Lahan Bersertifikat yang Dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Bidang
1.	Tanah Bangunan Kantor	71
2.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	68
3.	Tanah Untuk Lapangan	314
4.	Tanah Untuk Jalan komplek	2.408
5	Tanah Untuk Makam	194
6	Tanah Untuk Peruntukan Lainnya	765
	Total	3.820

Sumber: BPKPAD Kabupaten Sukoharjo

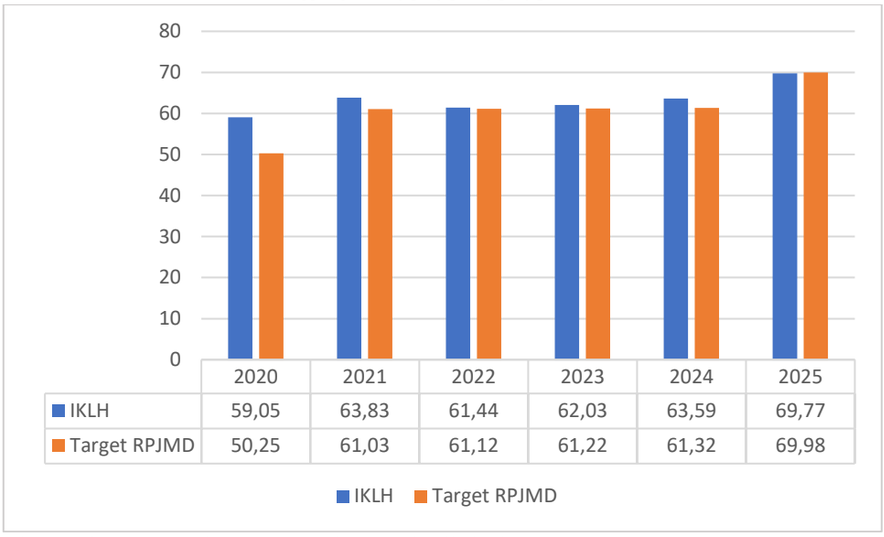
Penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan tuntas atau 100%. Hal ini dikarenakan setiap ada konflik pertanahan selalu diselesaikan oleh instansi terkait. Begitu juga dengan penyelesaian izin lokasi. Penyelesaian izin lokasi tiap tahun mencapai angka 100%. Izin lokasi selalu diselesaikan tiap tahun dengan mengeluarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dari instansi terkait dalam hal ini Kantor Pertanahan. PTP adalah hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. PTP merupakan salah satu instrument pengendalian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Ketuntasan penyelesaian konflik tanah dan izin menandakan ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum terutama tata ruang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan tata ruang untuk semua kalangan.

Di bidang pertanahan Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Di Kabupaten Sukoharjo pelaksanaan Reforma Agraria saat ini hanya penataan akses karena tahun 2024 sudah dilaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sukoharjo. Tahun 2025 telah dilaksanakan penataan akses dengan intervensi terhadap 100 KK di Desa Karangtengah Kecamatan Weru dalam bentuk pemberian bantuan bibit pisang bawen serta pendmpingan terkait perawatan pohon pisang, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pelatihan digital marketing. Perlu ditingkatkan lagi penataan akses agar tanah yang telah dimiliki oleh Masyarakat mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa meningkatkan perekonomian Masyarakat.

5. Lingkungan Hidup

Untuk mengetahui gambaran atau kondisi kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dalam periode tertentu digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan tiga komponen perhitungan yaitu kualitas air, kualitas udara ambien, dan kualitas lahan. IKLH memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah mengenai kondisi lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, IKLH juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020-2025 disajikan sebagaimana grafik berikut:

Gambar 2. 38 Perkembangan IKLH Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo

Sedangkan Perkembangan Komponen IKLH Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 122 Perkembangan Komponen IKLH Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025

No.	Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Target RPJMD
1.	2020	45,00	87,23	31,08	59,05	50,25
2.	2021	55,83	89,44	30,18	63,83	61,03
3.	2022	50,87	87,26	31,84	61,44	61,12
4.	2023	52,79	87,32	31,14	62,03	61,22
5.	2024	53,72	89,47	32,67	63,59	61,32
6.	2025	71,98	78,16	50,44	69,77	69,98

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo

Perlu diketahui bahwa perhitungan IKLH tahun 2025 masih mengacu pada metode yang sama sebagaimana digunakan pada periode sebelumnya berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.318/PPKL/SRT/REN.O/12/2020 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Namun demikian, terdapat perbedaan pendekatan dalam perhitungan komponen Indeks Kualitas Air (IKA) yang pada tahun 2025 menggunakan metode yang lebih rinci (*WQI detail berbasis parameter*), sehingga menghasilkan nilai yang lebih representatif terhadap kondisi aktual di lapangan. Metode perhitungan IKLH Tahun 2025 sebagai berikut :

$$IKLH = (0{,}376 \times IKA) + (0{,}405 \times IKU) + 0{,}219 \times IKL)$$

Perkembangan IKLH Kabupaten Sukoharjo tahun 2020–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Nilai IKLH pada tahun 2025 sebesar 69,77 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 63,59 dan merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut, meskipun masih sedikit di bawah target RPJMD tahun 2025 sebesar 69,98. Secara kategori, nilai tersebut masih termasuk dalam kategori sedang (rentang $50 \leq IKLH < 70$), namun telah berada pada batas atas menuju kategori baik. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perubahan signifikan pada komponen penyusunnya, terutama Indeks Kualitas Air (IKA) yang meningkat menjadi 71,98 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang meningkat menjadi 50,44. Sebaliknya, Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan menjadi 78,16 dari sebelumnya 89,47,

sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan IKLH pada tahun 2025 terutama didorong oleh perbaikan kualitas air dan lahan.

Secara lebih mendalam, peningkatan IKA mengindikasikan membaiknya kondisi badan air yang kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran, seperti pengurangan beban limbah domestik, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah, serta penguatan kegiatan pemantauan dan pengawasan. Faktor hidrologis seperti curah hujan yang lebih merata juga berkontribusi melalui proses pengenceran polutan. Peningkatan IKL mencerminkan adanya perbaikan tutupan dan pengelolaan lahan, antara lain melalui rehabilitasi lahan, pengendalian alih fungsi lahan, serta peningkatan vegetasi penutup yang mampu menekan erosi dan limpasan pencemar. Di sisi lain, penurunan IKU menunjukkan adanya peningkatan tekanan pencemaran udara yang diduga berasal dari pertumbuhan aktivitas transportasi, kegiatan industri, serta pembakaran terbuka yang belum terkendali, ditambah pengaruh kondisi meteorologis terhadap penyebaran polutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas lingkungan hidup secara umum mengalami peningkatan, perbaikan tersebut belum merata antar komponen sehingga diperlukan upaya pengendalian yang lebih terfokus, khususnya pada peningkatan kualitas udara.

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

   Indeks Kualitas Air (Water Quality Index / WQI) merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas air secara komprehensif melalui penyederhanaan berbagai parameter kualitas air menjadi satu nilai indeks yang representatif dan mudah dipahami. Parameter yang digunakan dalam perhitungan IKA meliputi Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), derajat keasaman (pH), Nitrat (NO_3-N), Total Fosfat, serta Fecal Coliform.

   Pada tahun 2025, penghitungan IKA Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan cakupan pemantauan yang terintegrasi dari berbagai sumber, meliputi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, serta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Titik pemantauan mencakup sungai-sungai prioritas pada bagian hulu dan hilir, dengan periode pengambilan sampel pada musim kemarau dan musim hujan. Secara keseluruhan, jumlah titik sampel yang diperhitungkan dalam penghitungan IKA tahun 2025 adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) titik pemantauan.

   Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode WQI detail, diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar 71,98, yang termasuk dalam kategori baik (tercemar ringan). Adapun distribusi status mutu air menunjukkan bahwa sebagian besar titik pemantauan berada pada kategori tercemar ringan, dengan rincian sebagai berikut: kategori memenuhi sebesar 0,00%, kategori tercemar ringan sebesar 63,64%, kategori tercemar sedang sebesar 34,09%, dan kategori tercemar berat sebesar 2,27%, dihasilkan Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai berikut :

Tabel 2. 123 Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2024

Status	Jumlah	Nilai
Memenuhi	0	0,00
Tercemar ringan	28	63,64
Tercemar sedang	15	34,09
Tercemar berat	1	2,27
Jumlah contoh uji	44	-
Indeks Kualitas Air (IKA) 2025		**71,98**
Indeks Kualitas Air (IKA) 2024		53,72
Indeks Kualitas Air (IKA) 2023		52,79

Sumber : IKLH Kab. Sukoharjo Tahun 2024

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 52,79 pada tahun 2023 menjadi 53,72 pada tahun 2024, dan meningkat signifikan menjadi 71,98 pada tahun 2025. Capaian tahun 2025 tersebut menempatkan kondisi kualitas air pada kategori **baik (tercemar ringan)**, dengan dominasi titik pemantauan berada pada kategori tercemar ringan sebesar 63,64%, diikuti tercemar sedang sebesar 34,09% dan tercemar berat sebesar 2,27%. Meskipun menunjukkan perbaikan yang cukup berarti, belum terdapat titik pemantauan yang memenuhi baku mutu air, sehingga secara umum kualitas air masih berada pada kondisi belum optimal dan tetap memerlukan upaya pengendalian pencemaran secara berkelanjutan.

Peningkatan nilai IKA pada tahun 2025 perlu dipahami dengan mempertimbangkan adanya perbedaan metode perhitungan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2025 menggunakan metode WQI detail berbasis parameter yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap kondisi aktual di lapangan. Dengan demikian, peningkatan nilai indeks tidak hanya mencerminkan perbaikan kualitas air, tetapi juga dipengaruhi oleh pendekatan metodologi yang digunakan. Adapun permasalahan utama yang masih dihadapi meliputi masih adanya titik dengan kategori tercemar sedang dan berat, belum tercapainya kondisi memenuhi baku mutu, serta masih berlangsungnya tekanan pencemaran yang berasal dari aktivitas domestik maupun non-domestik yang belum sepenuhnya terkendali.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas udara ambien berdasarkan konsentrasi parameter pencemar utama. Pada tahun 2025, penghitungan IKU Kabupaten Sukoharjo menggunakan parameter Nitrogen Dioksida (NO_2), Sulfur Dioksida (SO_2), dan Partikulat Halus ($PM_{2.5}$) yang merepresentasikan sumber emisi dari sektor transportasi, industri, serta aktivitas domestik. Pemantauan dilakukan pada beberapa sektor utama, yaitu transportasi, industri, perumahan, dan perkantoran, sehingga memberikan gambaran kondisi kualitas udara yang cukup representatif. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai IKU tahun 2025 sebesar 78,16, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 89,47, namun masih berada dalam kategori baik. Hasil perhitungan IKU disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 124 Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2025

Sektor	Rata-Rata Parameter			IKU
	NO_2	SO_2	$PM_{2,5}$	
Transportasi	12,27	5,82	15,03	77,33
Industri	11,08	7,51	15,03	77,09
Perumahan	5,90	4,75	15,03	79,87
Perkantoran	9,80	7,63	15,03	77,48
IKU 2025	**78,16**			
IKU 2024	89,47			
IKU 2023	87,32			

Sumber: Hasil perhitungan, 2025.

Secara sektoral, kualitas udara relatif seragam dengan nilai IKU tertinggi pada sektor perumahan sebesar 79,87, diikuti sektor perkantoran sebesar 77,48, transportasi sebesar 77,33, dan industri sebesar 77,09. Konsentrasi $PM_{2.5}$ yang relatif seragam di seluruh sektor menunjukkan bahwa sumber partikulat halus bersifat menyebar (diffuse sources), seperti debu jalan, pembakaran terbuka, dan aktivitas domestik, sehingga tidak terlokalisasi pada satu sektor tertentu. Sementara itu, variasi NO_2 dan SO_2 mencerminkan karakteristik sumber emisi spesifik, dimana NO_2 lebih dominan dipengaruhi oleh aktivitas transportasi dan mobilitas kendaraan bermotor, sedangkan SO_2 berkaitan dengan aktivitas industri dan penggunaan bahan bakar bersulfur. Penurunan nilai IKU pada tahun 2025 tidak hanya disebabkan oleh peningkatan aktivitas tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh penambahan parameter $PM_{2.5}$ dalam perhitungan yang lebih sensitif dalam menangkap kondisi pencemaran udara secara aktual.

Secara lebih mendalam, peningkatan tekanan pencemaran udara ini dapat dikaitkan dengan bertambahnya volume kendaraan bermotor seiring pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk, yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi NO_2 serta pembentukan partikulat sekunder di atmosfer. Aktivitas industri yang masih menggunakan bahan bakar berbasis sulfur turut meningkatkan konsentrasi SO_2 yang dalam kondisi tertentu dapat bereaksi membentuk partikulat halus. Selain itu, faktor meteorologis seperti rendahnya kecepatan angin, suhu tinggi, dan stabilitas atmosfer dapat menghambat dispersi polutan sehingga terjadi akumulasi pencemar di udara ambien. Kondisi ini berdampak pada penurunan nilai IKU dan turut menahan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025, dimana meskipun IKLH meningkat menjadi 69,77, kontribusi dari komponen kualitas udara justru melemah. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas lingkungan hidup belum merata antar komponen, sehingga diperlukan penguatan kebijakan pengendalian pencemaran udara yang lebih terarah dan berkelanjutan.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

IKL merupakan penyempurnaan dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang digunakan antara tahun 2014 - 2019 yang memperhitungkan luas hutan diluar kawasan hutan, termasuk didalamnya adalah hutan rakyat. Pada metode penghitungan IKTL periode 2014 - 2016, terdapat keterbatasan dalam metode penghitungan, indikator tutupan lahan digunakan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu

dilakukan penyempurnaan metode penghitungan IKTL dengan mengelaborasikan beberapa parameter yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial disamping kondisi tutupannya. Penggabungan beberapa aspek tersebut disajikan secara sederhana dan mudah dipahami melalui sistem pembobotan setiap aspeknya.
IKL tahun 2024 dihitung berdasarkan pada Surat dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S.318/PPKL/SET/REN.O/12/2020 yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL), luas dari setiap jenis tutupan lahan selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus perhitungan sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Direktur Jendral Pengendalian *Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan tutupan Lahan, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.*

Tabel 2. 125 Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Tahun	Luas Wilayah (km^2)	Luas Tutupan Hutan (km^2)	Luas Tutupan RTH (km^2)	Perbandingan Hutan terhadap Luas Wilayah	Perbandingan RTH terhadap Luas Wilayah	IKL
2022	493,23	34,08	27,72	6,91	3,37	31,84
2023	493,23	4,2	71,23	0,85	8,66	31,14
2024	493,23	4,2	84,96	0,85	10.33	32,67
2025	493,23	4,2	73,51	0,85	14,9	50,44

Sumber : IKLH Kab. Sukoharjo Tahun 2024

Pada tahun 2024 nilai IKL mengalami kenaikan setelah mengalami penurunan sebesar 0,7 (2,19%) pada Tahun 2023. Pada tahun 2023 juga sudah diketahui secara jelas batas-batas kawasan hutan dengan berdasarkan pada peta Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Dengan adanya peta PPTPKH tersebut, maka selanjutnya dapat dilakukan deliniasi terhadap hutan rakyat, terutama yang ada di Kecamatan Bulu dan Kecamatan Tawangsari. Nilai IKL pada tahun 2023 mengalami penurunan disebabkan karena adanya perubahan metode perhitungan untuk tutupan lahan berupa hutan rakyat dari yang sebelumnya menggunakan pengali 1(satu) menjadi 0,6. Pada tahun 2024, nilai IKL mengalami kenaikan sebesar1,53 (4,91%). Hal ini disebabkan karena adanya penambahan data tutupan lahan berupa RHL (Rehabilitasi Lahan dan Hutan) ke dalam perhitungan. IKL kembali meningkat pada tahun 2025 dengan nilai mencapai 50,44, didorong oleh peningkatan signifikan luas RTH dan RHL serta rasio RTH terhadap luas wilayah yang mencapai 14,9%. Perhitungan IKL ini mengacu pada Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 dengan metode yang mengintegrasikan aspek tutupan lahan, konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik spasial melalui sistem pembobotan. Peningkatan pada tahun 2024 dan terutama 2025 menunjukkan dampak nyata dari intervensi rehabilitasi lahan (RHL) dan penambahan RTH yang secara langsung meningkatkan kualitas tutupan lahan. Hal ini berimplikasi pada membaiknya fungsi

ekologis wilayah seperti daya resap air, pengendalian erosi, dan keseimbangan lingkungan.

d. Penanganan Sampah

Saat ini sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo secara umum masih dilakukan secara konvensional, yaitu dengan pola kumpul angkut buang sebagaimana juga dilakukan oleh kota-kota provinsi lainnya di Indonesia. Namun telah dibentuk sistem pengelolaan sampah terpadu. Sistem pengelolaan sampah secara teknis terdiri dari sub sistem pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Sukoharjo berasal dari kegiatan rumah tangga, pertokoan, perkantoran, fasilitas pendidikan, pasar, jalan, taman serta area-area publik lainnya. Pengelolaan persampahan di sebagian wilayah Kabupaten Sukoharjo belum semua terlayani. Masih ada sebagian wilayah di Kabupaten Sukoharjo yang menggunakan sistem pembuangan pada lingkungan sekitar dengan ditimbun atau dibakar.

Cakupan penanganan sampah Kabupaten Sukoharjo sebesar 68,84% jumlah tersebut sudah mencapai target jangka pendek penanganan sampah Kabupaten Sukoharjo, yaitu 55%. Sedangkan pengurangan sampah di Kabupaten Sukoharjo sudah mencapai 16,45 % dengan target jangka pendek sebesar 18%. Namun sampah tidak terkelola di Kabupaten Sukoharjo sebesar 14,71%. Rekapitulasi akses pengelolaan sampah perkotaan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 126 Pengelolaan Sampah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
1	Pengurangan sampah	16,45
2	Penanganan sampah	68,84
3	Sampah Tidak Terkelola	14,71
Total		**100**

Sumber : DLH Kab. Sukoharjo Tahun 2025

Timbulan sampah Kabupaten Sukoharjo diperkirakan sebesar 367,46 ton/hari dengan timbulan sampah perkotaan sebesar 341,6 ton/hari dan perdesaan sebesar 25,86 ton/hari. Untuk komposisi sampah organik sebesar 66,15 % dan anorganik 33,85 %. Timbulan sampah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

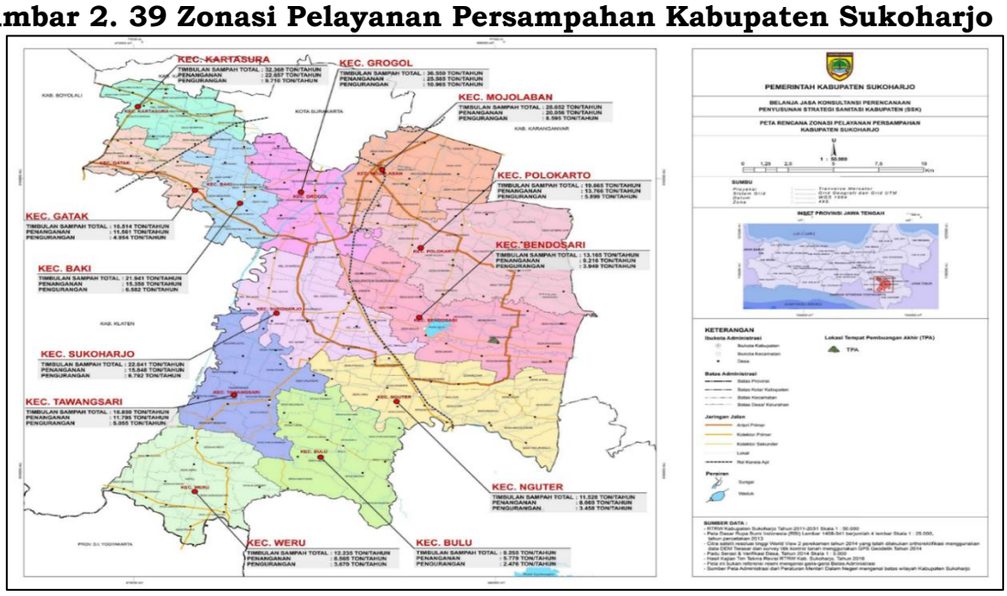
Tabel 2. 127 Timbulan Sampah Kabupaten Sukoharjo

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	367,46
	- Perkotaan	ton/hari	341,6
	- Perdesaan	ton/hari	25,86
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% organik	66,15
		% anorganik	33,85

Sumber : DLH Kab. Sukoharjo Tahun 2025

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo turut berimplikasi pada jumlah timbulan sampah yang dihasilkan baik dari sektor domestik maupun non domestik. Perbandingan jumlah penduduk tiap kecamatan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan disajikan dalam grafik berikut :

Gambar 2. 39 Zonasi Pelayanan Persampahan Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Dokumen SSK Kab. Sukoharjo

Kecamatan dengan timbulan sampah terbesar pada tahun 2025 masih didominasi oleh wilayah dengan aktivitas dan kepadatan tinggi, yaitu Kecamatan Grogol (48,82 ton/hari), Kartasura (44,90 ton/hari), dan Sukoharjo (40,22 ton/hari). Sementara itu, timbulan sampah terendah terdapat di Kecamatan Bulu (14,82 ton/hari). Pola ini menunjukkan bahwa timbulan sampah tetap berkorelasi dengan tingkat aktivitas penduduk dan perkembangan wilayah. Dari sisi fasilitas, jumlah TPS dan kontainer sampah belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya timbulan sampah di masing-masing kecamatan. Kecamatan Sukoharjo memiliki fasilitas terbanyak (74 unit), sedangkan beberapa kecamatan dengan timbulan cukup tinggi seperti Kartasura dan Grogol masih memiliki jumlah fasilitas yang relatif lebih terbatas. Selain itu, pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan unit TPS3R, sehingga kapasitas pengelolaan sampah berbasis kawasan tidak mengalami peningkatan signifikan. Kabupaten Sukoharjo memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari. TPA Mojorejo tersebut berjarak ± 5 km dari pusat Kabupaten Sukoharjo. Sejak Tahun 2010, TPA yang memiliki luas wilayah awal sebesar 2,62 Ha ini, mengalami penambahan area sebesar 0,88 Ha. Luas landfill yang efektif seluas 4,5 ha dengan luas landfill terpakai 4,5 ha. TPA Mojorejo sudah memakai sistem controlled landfill.

Kabupaten Sukoharjo memiliki satu lokasi TPA (Tempat Pemprosesan Akhir) di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari dengan jenis TPA Control Landfill seluas areal 4,183 Ha. Kapasitas TPA Mojorejo 836.600 m3 dan saat ini telah terisi timbunan sampah sebanyak 832.748 m3 atau sekitar 99,54 % dari kapasitas maksimal. Kabupaten Sukoharjo memiliki 172 TPS dan 45 unit kontainer sampah yang tersebar pada 12 kecamatan. Perbandingan jumlah TPS dan timbulan sampah tidak menunjukkan perbandingan yang lurus. Idealnya semakin banyak jumlah timbulan sampah maka semakin banyak TPS nya. Kecamatan yang memiliki jumlah TPS dan kontainer sampah terbanyak adalah Kecamatan Sukoharjo 74 lokasi dan Kecamatan Grogol 44 lokasi. Jumlah sebaran fasilitas persampahan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 128 Jumlah Timbulan Sampah Per Hari dan Fasilitas Persampahan yang Tersedia

No	Kecamatan	Timbulan sampah	Jumlah TPS dan Kontainer Sampah
1	Weru	23,14	4
2	Bulu	14,82	3
3	Tawangsari	22,78	4
4	Sukoharjo	40,22	74
5	Nguter	22,41	6
6	Bendosari	26,13	30
7	Polokarto	35,63	17
8	Mojolaban	37,34	23
9	Grogol	48,82	44
10	Baki	29,28	15
11	Gatak	21,97	9
12	Kartasura	44,90	14

Sumber: IKPLHD Kabupaten Sukoharjo

Dari hasil perhitungan timbulan sampah yang terkelola tahun 2025 yaitu sebesar 85,29%. Data ini didapat berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sukoharjo. Sedangkan jumlah TPS 3R Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 129 Jumlah TPS 3R Kabupaten Sukoharjo

No.	Nama TPS 3R	Lokasi	Tahun Pendirian	Instansi yang Membangun
1	Kanthil	Desa Makamhaji, Kec. Kartasura	2014	DPUPR Provinsi
2	Mapan	Desa Kwarasan, Kec. Grogol	2016	DPU
3	Gonilan Bersih	Desa Gonilan, Kec. Kartasura	2016	DPU
4	Juara	Desa Gumpang, Kec.Kartasura	2016	DPU
5	Gugur Gunung	Desa Ngabeyan, Kec.Kartasura	2017	DPU
6	Gedangan	Desa Gedangan, Kec. Grogol	2019	DAK/DPU
7	Ngudi Mulyo	Kel. Sukoharjo, Kec.Sukoharjo	2019	DPKP
8	Sejahtera Makmur	Kel. Dukuh, Kec.Sukoharjo	2019	DPKP
9	Sido Makmur	Kel. Sonorejo, Kec.Sukoharjo	2019	DPKP
10	Manunggal Jaya	Kel. Bulakan, Kec.Sukoharjo	2019	DPKP
11	Duwet Makmur	Desa Duwet, Kec. Baki	2019	ADD
12	Gedang Selirang	Desa Gedangan, Grogol	2021	DPUPR

Sumber: IKPLHD Kabupaten Sukoharjo

Penanganan limbah B3 dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap perusahaan penghasil limbah secara rutin, hingga tahun 2023 tercatat ada 30 perusahaan yang telah memiliki izin mengelola limbah B3. Telah diterbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo No. 660.1/570/II/2019 untuk menindaklanjuti aplikasi SI RAJA LIMBAH dan Manifest Elektronik (Festronik) Limbah B3 yang diluncurkan KLHK.

Data terkait peningkatan kapasitas dan pengawasan Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 130 Total Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan

No.	Tahun	Persetujuan Lingkungan
1	2021	40
2	2022	14
3	2023	15
4	2024	49
5	2025	58

Sumber: DLH Kabupaten Sukoharjo

Untuk menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan pemantauan dan pembinaan terhadap penanggungjawab

usaha terhadap izin lingkungan dan izin PPLH. Berikut data ketaatan penanggungjawab dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pada tahun 2025.

Tabel 2. 131 Data Ketaatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan

No	Nama Usaha/Kegiatan	Lokasi	Periode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status Ketaatan	Tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rumah Sakit Indriati	Desa Langenharjo Kecamatan Grogol	2025	• TAAT	TAAT	
2.	Rumah Sakit Karima Utama	Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura	2025	• TAAT	TAAT	
3.	Rumah Sakit Islam Surakarta	Desa Pabelan Kecamatan Kartasura	2025	• belum memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air dan belum memiliki penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air Limbah yang memiliki sertifikat kompetensi	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
4.	Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo	Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo	2025	• TAAT	TAAT	
5.	PKU Muhammadiyah Kartasura	Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	2025	• belum memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi • belum memiliki operator instalasi pengolahan Air Limbah yang memiliki sertifikat kompetensi • belum sesuai dengan Persetujuan Teknis/Izin Pembuangan Air Limbah yang dimiliki. pemantauan Air Limbah dilakukan terakhir pada September 2022 • belum melakukan pemantauan pada air permukaan setiap 6 bulan sekali • belum melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan kebisingan sumber emisi berupa 1 Genset sebagai cadangan dengan kapasitas total 60 kVA • belummenempatkan Limbah B3 pada Tempat penyimpanan Limbah B3, misalnya oli bekas, lampu bekas, dll	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
6.	CV Pria Tampan	Desa Manang Kecamatan Grogol	2025	• TAAT	TAAT	
7.	PT Adi Wraksa Atyanta	Desa Telukan Kecamatan Grogol	2025	• tidak melakukan inventarisasi, identifikasi, penamaan, titik koordinat,dan pengkodean seluruh sumber Emisi • tidak melakukan pemantauan udara	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan

No	Nama Usaha/Kegiatan	Lokasi	Periode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status Ketaatan	Tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7
				ambien dan Emisi secara berkala • tidak melakukan uji gangguan kebisingan • belum memiliki rincian teknis penyimpanan Limbah B3 • tidak memiliki kerjasama atau bukti penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 • tidak melakukan penyimpanan Limbah B3 di tempat penyimpanan Limbah B3 • tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan • tidak melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya		pengawasan Tidak Langsung
8.	PT Konimex	Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol	2025	• Belum merubah dokumen lingkungan yang dimiliki (penambahan kapasitas+ bangunan baru)	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
9.	PT Citra Mas Intimates	Desa Luwang Kecamatan Gatak	2025	• TAAT	TAAT	
10.	PT Sami Surya Indah Plastik	Desa Pandeyan Kecamatan Grogol	2025	• tidak memiliki penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air Limbah • tidak melakukan pelaporan penyimpanan Limbah B3	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
11.	PT Hidup Baru Plasindo	Desa Telukan Kecamatan Grogol	2025	• tidak memiliki rintek Limbah B3 • tempat penyimpanan Limbah B3 belum memenuhi ketentuan yang berlaku	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
12.	PT Djerapah Megah Plasindo	Desa Telukan Kecamatan Grogol	2025	• Belum melakukan pelaporan pelaksanaan UKL UPL • Belum memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah • Tidak melakukan pengolah pengolah Air Limbah dari kegiatan domestik karyawan dan cooling tower • Belum merubah perizinan lingkungan terkait penambahan kapasitas dan luas	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
13.	PT Suwastama Tumbuemas Sejahtera	Desa Gumpang Kecamatan Kartasura	2025	• Tidak memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu

No	Nama Usaha/Kegiatan	Lokasi	Periode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status Ketaatan	Tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7
				sertifikat kompetensi • Tidak memiliki operator instalasi pengolahan Air Limbah yang memiliki sertifikat kompetensi		tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
14.	PT Sinar Sakti Kimia	Desa Telukan Kecamatan Grogol	2025	• TAAT	TAAT	
15.	PT Tristar Land Development	Desa Madegondo Kecamatan Grogol	2025	• TAAT	TAAT	
16.	PT Sinar Surya Indah Lestari	Desa Telukan Kecamatan Grogol	2025	• Belum Memiliki persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan. • Belum menyusun rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
17.	PT Intrafood Singabera Indonesia	Desa Telukan Kecamatan Grogol	2025	• TAAT	TAAT	
18.	PT Bening Big Tree Farms	Desa Pandeyan Kecamatan Grogol	2025	• TAAT	TAAT	
19.	Siti Jamilah	Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura	2025	• TAAT	TAAT	
20.	PT Krido Rejosari Kusumo Santoso	Desa Kadokan Kecamatan Grogol	2025	• Belum Melaporkan pelaksanaan UKL UPL • Belum Memiliki Persetujuan Teknis Air Limbah • Belum melakukan pengujian kualitas emisi • Belum memiliki Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan Limbah B3	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
21.	PT Vinsa Mandira Utama	Desa Manang Kecamatan Grogol	2025	• TAAT	TAAT	
22.	PT Dolpin Putra Sejati	Desa Celep Kecamatan Nguter	2025	• Belum Melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan terkait adanya penambahan bangunan • Belum memiliki persetujuan Tekni Baku Mutu Air Limbah • Belum mengolah seluruh Air Limbah yang dihasilkan • Belum memiliki rincian teknis penyimpanan Limbah B3 • Belum memiliki tempat penyimpanan Limbah B3 dan melakukan penyimpanan Limbah • Belum bekerjasama dengan pihak ketiga	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung

No	Nama Usaha/Kegiatan	Lokasi	Periode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status Ketaatan	Tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7
				untuk pengelolaan Limbah B3		
23.	PT Pakuwon Permai	Desa Madegondo Kecamatan Grogol	2025	• TAAT	TAAT	
24.	PT Prima Parquet Indonesia	Desa Genengsari Kecamatan Polokarto	2025	• Belum melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan • Belum melakukan perubahan perling untuk mencantumkan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi • Belum menyusun dan mengintegrasikan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
25.	PT Sami Surya Perkasa	Desa Pandeyan Kecamatan Grogol	2025	• Belum melaporkan pelaksanaan UKL UPL • Belum memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah • Belum melakukan pengujian Udara Ambien dan kebisingan • Belum memiliki rincian teknis penyimpanan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 • Belum memiliki tempat penyimpanan Limbah B3 • Belum memiliki kerjasama dengan pihak ketiga	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
26.	Hotel Tosan	Desa Langenharjo Kecamatan Grogol	2025	• TAAT	TAAT	
27.	PT Sari Multirasa Selaras	Desa Parangjoro Kecamatan Grogol	2025	• Belum mengolah seluruh Air Limbah yang dihasilkan • Belum menguji udara ambien dan kualitas emisi	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
28.	Fave Hotel Solo Baru	Desa Madegondo Kecamatan Grogol	2025	• TAAT	TAAT	
29.	PT Batik Arjuna Cemerlang	Desa Sapen Kecamatan Mojolaban	2025	• Belum mengolah seluruh air limbah domestik yang dihasilkan • Belum memiliki Persetujan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah • Belum menguji seluruh parameter air limbah sesuai Baku Mutu • Belum melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan Limbah B3	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung
30.	CV Sumber Pangan Persama	Desa Gedangan	2025	• Belum mengolah seluruh air limbah	TIDAK TAAT	Akan diberikan surat teguran tertulis

No	Nama Usaha/Kegiatan	Lokasi	Periode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status Ketaatan	Tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7
		Kecamatan Grogol		• Belum menguji seluruh parameter air limbah sesuai Baku Mutu • Belum mencatat nama dan jumlah Limbah B3 • Belum membuat tempat penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan		untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan yang belum sesuai dalam batas waktu tertentu dan dilakukan pengawasan Tidak Langsung

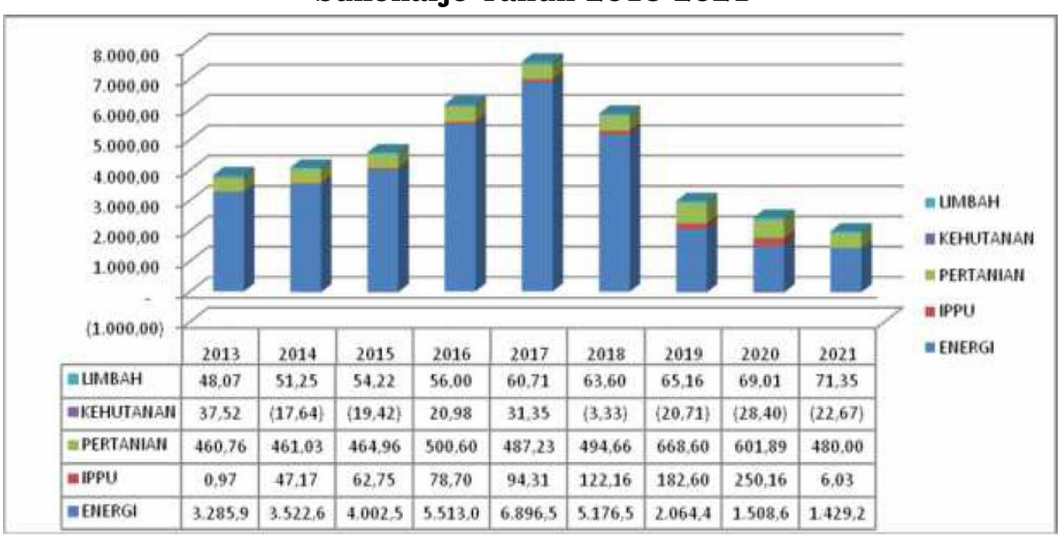
Sumber: DLH Kabupaten Sukoharjo

e. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang berdampak pada perubahan suhu bumi, naiknya permukaan air laut, peningkatan curah hujan dan perubahan klimatik lainnya memerlukan perhatian khusus dan penanganan bersama. Perubahan iklim diantaranya diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer.

Hasil analisa terhadap besaran emisi dan serapan GRK yang dihasilkan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 (tahun data 2021) sebesar 1.963,95 Gg CO_2 eq dimana sektor energi menghasilkan emisi paling besar yakni sebesar 1.429,25 Gg CO_2 eq atau 72,77 %. Urutan kedua emisi dari sektor pertanian yakni sebesar 480 Gg CO2eq (24,44%), selanjutnya sektor limbah menyumbang emisi GRK sebesar 71,35 Gg CO_2 eq atau 3,63 %, kemudian sektor IPPU menyumbang emisi GRK sebesar 6,03 Gg CO_2 eq atau 0,31 % . Serapan GRK di Kabupaten Sukoharjo diperoleh dari sektor kehutanan. Potensi yang dimiliki dari hutan tanaman seluas 427 ha dan perkebunan seluas 908 ha mempu menjerap emisi GRK sebesar -22,67 Gg CO_2 eq atau -1,15 % seperti yang disajikan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2. 40 Emisi dan Serapan Agregrat GRK Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2021



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LIMBAH	48,07	51,25	54,22	56,00	60,71	63,60	65,16	69,01	71,35
KEHUTANAN	37,52	(17,64)	(19,42)	20,98	31,35	(3,33)	(20,71)	(28,40)	(22,67)
PERTANIAN	460,76	461,03	464,96	500,60	487,23	494,66	668,60	601,89	480,00
IPPU	0,97	47,17	62,75	78,70	94,31	122,16	182,60	250,16	6,03
ENERGI	3.285,9	3.522,6	4.002,5	5.513,0	6.896,5	5.176,5	2.064,4	1.508,6	1.429,2

Sumber: IKPLHD Kabupaten Sukoharjo

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pembentukan Kampung Iklim agar masyarakat siap dalam menghadapi tantangan permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan pemanasan global, misalnya: meningkatnya potensi banjir maupun kekeringan; munculnya vektor penyakit dan berkurangnya sumber energi. Hingga saat ini terdapat 53 lokasi Kampung Iklim yang ada di Kabupaten

Sukoharjo, dimana 9 lokasi telah mendapat penghargaan sertifikat Proklim Madya dan 2 lokasi mendapat sertifikat Proklim Pratama. Adapun upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan masyarakat Kampung Iklim diantaranya : pengelolaan sampah, limbah padat dan cair; menggunakan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi; pengolahan budidaya pertanian; peningkatan tutupan vegetasi; mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2. 132 Data Penurunan Emisi

ITEM	2021	2022	2023	2024	2025
Energi	1.429,25	1.215,27			
IPPU	6,03	7,33			
Pertanian	480,00	553,46			
Kehutanan	-22,67	-15,98			
Limbah	71,35	97,52			

Sumber: DLH Kabupaten Sukoharjo

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang lingkungan hidup dapat dilihat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Tahun 2025 nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 88,99 dengan kategori **Baik.** Ini menunjuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo sangat puas dengan capaian kinerja bidang lingkungan hidup, namun demikian masih perlu peningkatan kinerja bidang lingkungan hidup.

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Persentase Kepemilikan KTP

Persentase kepemilikan KTP-el penduduk di Kabupaten Sukoharjo sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 99,11% dari jumlah wajib KTP sejumlah 959.018 jiwa. Berbagai kegiatan/program seperti jemput bola perekaman KTP-el di sekolahan terus dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kepemilikannya. Penduduk yang belum mempunyai KTP-el ini disebabkan karena : 1) Penduduk yang bersangkutan berdomisili di Luar negeri karena suatu pekerjaan atau karena belajar; 2) Penduduk yang bersangkutan hanya numpang alamat saja tapi tidak domisili. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan khususnya KTP-el, pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo bekerja sama dengan PT. POS Indonesia, dimana masyarakat yang mengurus KTP-el baik karena hilang, rusak, perubahan elemen data dan perekaman KTP-el bagi pemula maka KTP-el akan dikirim melalui PT. POS Indonesia, tidak perlu mengambil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk Tingkat kepemilikan akta kelahiran uisa 0-17 Tahun di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 sebesar 99,29 %. Berbagai kebijakan dan kegiatan terus dilaksanakan untuk mendukung program percepatan kepemilikan akta kelahiran, seperti pelayanan secara online, kegiatan jemput bola dan kerjasama pelayanan akta kelahiran dengan melibatkan berbagai instansi/organisasi terkait. Kegiatan sosialisasi layanan administrasi kependudukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan Peningkatan kualitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penguatan pada sarana prasarana yang terkait pelayanan pada masyarakat, dan Pelayanan jemput bola perekaman di sekolah–sekolah, Panti jompo, kerumah warga yang berkebutuhan khusus.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyiapkan layanan admindukcapil di tingkat desa/ kelurahan dengan menyediakan jaringan SIAK dengan operatornya adalah petugas register desa/ kelurahan. Mengintensifkan pelayanan aktif secara jemput bola bagi penduduk usia >50 th yang belum memiliki akte kelahiran. Mengintensifkan pelayanan aktif secara jemput bola bagi penduduk rentan (manula, sebatangkara, disabilitas, ODGJ) yang belum memiliki dokumen kependudukan (KTP dan KK) dengan berkoordinasi dengan dinsos dan dinas kesehatan kabupaten.

Dimulainya pelayanan verifikasi identitas kependudukan digital yang sebelumnya hanya bisa dilayani di Kecamatan dan dinas. Target 167 desa/ kelurahan di kabupaten Sukoharjo terlayani tahun 2025.

Mengintensifkan pelayanan aktif secara jemput bola ke sekolah, universitas, perusahaan, event yang melibatkan banyak massa dengan menghadirkan petugas untuk meningkatkan kepemilikan identitas kependudukan digital (IKD).

b. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan dan lain sebagianya.

Dari kepemilikan KK di 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, yaitu 91,23%. Meskipun demikian kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan harus tetap terus ditingkatkan. Dalam hal ini masyarakat harus didorong untuk tertib mengajukan pembaruan KK ketika data penduduk didalamnya mengalami perubahan sehingga data dalam KK benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat yang sesungguhnya.

c. Persentase Kepemilikan KIA

Persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar 85,57%. Berbagai kebijakan dan program dilaksanakan untuk mendukung percepatan kepemilikan KIA, seperti pelayanan pendaftaran KIA melalui WhatsApp dan mulai dilaksanakannya kerjasama pemanfaatan KIA dengan pelaku usaha di Kabupaten Sukoharjo sebagai Miitra Bisnis KIA.

d. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran

persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar 77,93%. Berbagai kebijakan dan program dilaksanakan untuk mendukung percepatan kepemilikan KIA, seperti pelayanan pendaftaran KIA melalui WhatsApp dan mulai dilaksanakannya kerjasama pemanfaatan KIA dengan pelaku usaha di Kabupaten Sukoharjo sebagai Miitra Bisnis KIA.

e. Cakupan Penerbitan Akte Kematian

Jumlah penerbitan akta kematian tahun 2025 sebanyak 100 %. Sosialisasi tentang pentingnya akta kematian sampai dengan saat ini terus dilakukan agar kesadaran masyarakat untuk mengurus dan mencatatkannya meningkat. Selain itu Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo juga telah melakukan inovasi program/kegiatan untuk meningkatkan capain cakupan kepemilikan akta kematian seperti kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, pelayanan

secara online, jemput bola dan penyederhanaan persyaratan tanpa menimbulkan dampak dikemudian hari.

f. Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak
Penerbitan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sebesar 100%, selama tahun 2025. Hal ini bisa diasumsikan bahwa kesadaran masyarakat untuk mencatatatkan perkawinanya secara sah menurut hukum negara (tidak hanya sah menurut hukum agama) sudah tinggi.

g. Persentase pasangan nikah berakte nikah
Jumlah penduduk yang berstatus kawin yang memiliki akta perkawinan sebanyak 75,24 % di database SIAK sampai dengan tahun 2025.

h. Cakupan Penerbitan Akte Cerai
Cakupan penerbitan akte cerai seperti pada tahun –tahun sebelumnya selalu tercapai 100 %, artinya setiap pasangan yang mengurus perceraiannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan diterbitkan Aktanya. Pencapaian cakupan indikator sasaran meningkatnya kepemilikan administrasi kependudukan oleh masyarakat diatas dipengaruhi oleh. :

1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai perangkat lunak serta berbagai perangkat keras yang selalu dijaga dalam kondisi baik siap untuk dioperasionalkan dalam rangka pelayanan publik.
2) Semakin meningkatnya kualitas SDM
3) Adanya invasi inovasi pelayanan dari Dispendukcapil antara lain: One Day Servis, paket pelayanan Tri in one, Direkam disekolah KTP-el, serta pelayanan Dukcapil.
4) Komitmen dari seluruh jajaran Dispendukcapil
5) Meningkatnya kerja sama dengan petugas registrasi Kelurahan
6) Sosialisasi tentang administrasi kependudukan ke masyarakat Dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo senantiasa berinovasi sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat di capai.

Tabel 2. 133 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2025

NO	INDIKATOR	CAPAIAN (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase kepemilikan KTP	96,82	99,62	97,68	99,8	99,24	99,11
2.	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	96,70	97,90	99,98	-	-	91,23
3.	Persentase kepemilikan KIA	46,91	66,31	55,91	81,84	83,89	85,57
4.	Persentase anak usia (0-18 th) yang memiliki akte kelahiran	99,77	96,26	71,08	-	-	99,29
5.	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	88	88,30	71,08	81,84	83,89	73,93
6.	Cakupan penerbitan Akte Kematian	100	100	100	100	100	100
7.	Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase pasangan nikah berakte nikah	38,35	44,44	57,17	63,68	70,05	75,24
9.	Cakupan Penerbitan Akte cerai	100	100	100	100	100	100
10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	75,36	84,90	86,66	89,22	89,12	89,5

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907
2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989
3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,7072
4. Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155
5. Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Tabel 2. 134 Perkembangan Status IDM Kabupaten Sukoharjo

Status Desa	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Persentase Desa Mandiri	2,66	3,33	5,33	22,66	40,66	0,46
Jumlah Desa Mandiri	4	5	8	34	61	70

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2. 135 Status IDM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 – 2025

No	KECAMATAN	STATUS IDM												JUML DESA
		MANDIRI			MAJU			BERKEMBANG			TERTINGGAL			
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	Weru	-	3	3	5	10	10	8	-	-	-	-	-	13
2	Bulu	-	4	4	9	8	8	3	-	-	-	-	-	12
3	Tawangsari	1	9	3	6	3	9	5	-	-	-	-	-	12
4	Sukoharjo	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nguter	-	12	5	10	4	11	6	-	-	-	-	-	16
6	Bendosari	1	8	6	5	5	7	7	-	-	-	-	-	13
7	Polokarto	-	6	14	15	11	2	2	-	-	-	-	-	17
8	Mojolaban	2	9	6	10	6	9	3	-	-	-	-		15
9	Grogol	2	5	11	8	9	3	4	-	-	-	-		14
10	Baki	-	12	3	8	2	11	6	-	-	-	-		14
11	Gatak	1	10	4	3	4	10	10	-	-	-	-		14
12	Kartasura	1	0	10	9	10		-	-	-	-	-		10
	Sukoharjo	**8**	**89**	**70**	**88**	**61**	**80**	**54**	**0**		**0**	-		150

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo dan Hasil Analisis

Perkembangan status IDM di berbagai wilayah di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan perkembangan yang sangat

menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya status desa berkembang apalagi tertinggal di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan yang mencolok terlihat di kecamatan Baki dan Nguter, karena di tahun 2024, tercatat 12 desa di wilayahnya telah masuk kategori desa mandiri

b. Persentase peningkatan strata Posyandu Madya

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Berikut adalah jumlah posyandu beserta kader yang ada di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2. 136 Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader yang Mendapat Insentif	Jumlah Kader
2020	1.193	7.498	7.677
2021	1.193	7.498	7.715
2022	1.193	7.498	7.715
2023	1.193	7.544	7.715
2024	1.227	7.544	8.284
2025	1.227	7.544	8.284

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo

Keberadaan Posyandu di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan jumlah setelah empat tahun terakhir stagnan. Begitu pula dengan jumlah kader di setiap wilayah juga mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan di tingkat desa serius dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

c. Pendirian BUMDes

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usahanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian.

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berikut adalah perkembangan jumlah BUMDes di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2. 137 Perkembangan Jumlah BUMDes di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Weru	10	11	12	12	13	13
2	Bulu	8	9	9	9	11	11
3	Tawangsari	1	12	12	12	12	12
4	Sukoharjo	-	-	-	-	-	-
5	Nguter	12	14	15	15	16	16
6	Bendosari	4	12	12	12	13	13
7	Polokarto	17	17	17	17	17	17
8	Mojolaban	10	10	10	10	11	11
9	Grogol	5	13	13	13	14	14
10	Baki	12	13	13	13	14	14
11	Gatak	3	3	10	10	14	14
12	Kartasura	5	8	8	8	10	10
	Jumlah	**87**	**122**	**131**	**131**	**145**	**145**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sedangkan berikut adalah klasifikasi BumDes di Kabupaten Sukoharjo beserta jumlahnya:

Tabel 2. 138 Klasifikasi BUMDes di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025

Klasifikasi BUMDes	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dasar	16	37	39	54	53	60
Tumbuh	63	75	82	81	82	37
Berkembang	4	5	5	7	5	43
Maju	4	5	5	4	5	5
Total	87	122	131	146	145	145

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data yang ada keberadaan BUMdes di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah. Upaya pendampingan masih perlu dilakukan guna meningkatkan kondisi BUMDes menuju klasifikasi Berkembang dan Maju.

Salah satu unit usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDesa adalah pasar desa yang berfungsi untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa dan sebagai sumber pendapatan bagi Pemerintahan Desa. Berikut adalah jumlah pasar desa per kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2. 139 Jumlah Pasar Desa Per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Jumlah Pasar Desa	
		2023	2024
1	Weru	4	4
2	Bulu	1	1
3	Tawangsari	2	1
4	Sukoharjo	-	0
5	Nguter	5	4
6	Bendosari	4	4
7	Polokarto	5	5
8	Mojolaban	3	1
9	Grogol	3	3
10	Baki	3	1
11	Gatak	1	1
12	Kartasura	2	2
Total		***33***	***27***

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo

Keberadaan pasar desa merupakan hal penting diadakan untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi, penetapan suatu pasar desa harus memenuhi beberapa persyaratan administratif. Kondisi ini menyebabkan data persebaran pasar desa mengalami penurunan dari tahun 2023 sejumlah 33 menjadi sejumlah 27 di

tahun 2024. Hal ini dikarenakan pendataan pasar desa yang kurang memperhatikan persyaratan suatu pasar desa, sehingga sekumpulan masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli dianggap sebagai pasar. Data tahun 2024 juga sebagai koreksi atas data tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berkualitas tidaknya penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari kapasitas SDM aparat kelurahan. Secara umum kapasitas aparat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal, pemahaman dan kemampuan aparat dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi atas hasil pembangunan belum menunjukkan hasil yang cukup baik.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelayanan Keluarga Berencana dalam upaya pengaturan kelahiran bayi dari tahun ke tahun makin dipermudah. Kemudahan berupa layanan antar jemput calon akseptor KB, perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana bersama mitra kerja melalui kegiatan Bakti Sosial menjaring akseptor dan ketersediaan alat dan obat di fasilitas kesehatan (faskes) terdekat selalu terjaga. Kepesertaan KB Aktif ditunjukkan dengan nilai prevalensi yang cenderung meningkat sejak tahun 2018 (67,62%) dan tahun 2019 (68,55%). Kemudian mulai menurun pada tahun 2020 (68,05%), 2021 (54,62%), dan 2022 (53,90%), sebagaimana terlihat dari tabel berikut.

Tabel 2. 140 Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	KB Aktif	Orang	2.739	94.828	5.264	72.896	5.032	64.985	15.650	80.152	16.706	77008
			97.260		78.160		70.017		95.802		93.714	
2	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	142.918		143.093		133.904		135.982		138.689	
3	Pravelensi	%	68,05		54,62		61,36		57,48		67,57	

Sumber : DPPKBP3A Kab. Sukoharjo

Mulai tahun 2017 basis data menggunakan Pendataan Keluarga (PK) 2015 dan menggunakan standard penghitungan baru. Sebagai contoh jumlah PUS dan PA mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dikarenakan PUS usia 50 tahun dalam sistem pendataan yang baru langsung didrop out meskipun masih aktif menggunakan kontrasepsi. Data tersebut menunjukkan gambaran penggunaan alat kontrasepsi bagi peserta KB aktif. Tingginya angka kepesertaan KB aktif didominasi oleh perempuan, hal ini dikarenakan banyaknya metode kontrasepsi yang dapat digunakan, seperti IUD, Tubektomi, Implan, Suntik, dan Pil, sedangkan metode kontrasepsi pria hanya dilakukan dengan penggunaan Kondom dan Vasektomi. Dari data tersebut juga terlihat adanya kecenderungan kenaikan jumlah PUS dari tahun hingga tahun 2021, namun menurun pada tahun 2022, dan kembali menunjukkan tren yang meningkat hingga tahun 2024.

PUS bukan peserta KB yang belum terlayani (*unmet need*) merupakan potensi bagi calon peserta KB. Di Kabupaten Sukoharjo terdapat unmet need sebesar 9,30%. Angka ini merupakan angka terendah di 5 tahun terakhir, hal ini dikarenakan meningkatnya

pasangan usia subur dan menurunnya PUS bukan peserta KB (unmeetneed), sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 141 PUS Bukan Peserta KB (Unmet Need) Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	142.918	143.093	133.904	135.982	138.689
2	PUS Bukan Peserta KB (*Unmet Need*)	Orang	45.658	64.933	62.134	15.478	12.893
3	Ingin Anak Tunda (IAT)	Orang	10.680	15.955	16.252	3.732	3.099
4	Tidak Ingin Anak Lagi	Orang	11.691	23.541	28.799	11.742	9.794
Persentase		**%**	**15,65**	**27,60**	**33,64**	11,38	**9,30**

Sumber : DPPKBP3A Kab. Sukoharjo

Upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader bina keluarga seperti Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) serta Klinik Ketahanan Keluarga. Pembinaan kelompok bina keluarga dan ketahanan keluarga disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 142 Kelompok Kegiatan KB Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelompok UPPKS	Kelompok	548	431	159	165	167
2	Jumlah Anggota UPPKS	Orang	399	399	449	486	492
3	Kelompok BKB	Kelompok	174	174	175	169	171
4	Kelompomk BKR	Kelompok	160	160	161	161	167
5	Kelompok BKL	Kelompok	168	168	167	165	167
6	PIK KRR	Kelompok	68	87	126	137	171

Sumber : DPPKBP3A Kab. Sukoharjo

Cakupan kepesertaan keluarga yang mengikuti kegiatan kelompok bina keluarga (BKB, BKR, BKL) sangat dinamis perkembangan tiap tahunnya menandakan kepesertaan anggota keluarga dalam mengikuti kegiatan tersebut juga dinamis. Pada tahun 2020 telah disusun regulasi yang mengatur kegiatan pembangunan keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga.

Pemberdayaan ekonomi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kelompok UPPKS. Tujuan dibentuknya kelompok UPPKS adalah upaya peningkatan pendapatan keluarga menuju keluarga sejahtera. Pembinaan kelompok UPPKS dengan melalui pelatihan ketrampilan dan manajeman pengelolaan kelompok serta mengupayakan kemudahan dalam pelayanan pemberian kredit, kemudahan dalam memperoleh SP-IRT, serta mengikuti pameran baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta pendampingan dalam pelatihan ketrampilan. Dari tabel tersebut dapat diketahui adanya kenaikan jumlah anggota yang tergabung dalam kelompok UPPKS dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat peserta KB, pasangan usia subur, khususnya Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera untuk mengenal usaha skala rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraaan keluarga, demikian juga untuk data kelompok BKB, BKR, dan BKL.

Hasil dari kegiatan PIK Remaja adalah terwujudnya remaja GenRe (Generasi Berencana) yaitu remaja yang dapat mempraktikkan pola hidup sehat, seperti: terhindar dari risiko pergaulan bebas, NAPZA, HIV/AIDS, menunda usia perkawinan sampai dengan usia ideal yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, bercita-cita dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, memiliki *life skill* atau keterampilan hidup, dan remaja GenRe harus dapat berperan sebagai model, idola, dan sumber informasi bagi lingkungan dan teman sebayanya.

9. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi dalam wujud sarana dan prasarana. Wujud transportasi berupa sarana inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah.

a. Terminal

Unsur penting dalam urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo ini adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan kelancaran lalu lintas serta penyediaan prasarana perhubungan berupa terminal. Berdasarkan SK Gubernur Jateng No. 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat dua terminal tipe B, yaitu Terminal Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo dan Terminal Kartasura di Kecamatan Kartasurta yang dikelola pemerintah provinsi. Selain itu juga terdapat empat terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Keempat terminal tipe C tersebut berada di Kecamatan Sukoharjo (Terminal Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo), Kecamatan Mojolaban (Terminal Bekonang), Kecamatan Tawangsari (Terminal Tawangsari), dan Kecamatan Weru (Terminal Watukelir). Adapun kondisi pelayanan terminal tipe C di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan sesuai Permenhub 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 143 Terminal Tipe C

No	Nama	Kecamatan	Jumlah	Kewenangan	Ket
1	Terminal Ir.Sukarno	Sukoharjo	1	Kabupaten	Tipe C
2	Terminal Bekonang	Mojolaban	1	Kabupaten	Tipe C
3	Terminal Tawangsari	Tawangsari	1	Kabupaten	Tipe C
4	Terminal Watukelir	Weru	1	Kabupaten	Tipe C

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2025

Tabel 2. 144 Terminal Tipe B

No	Nama	Kecamatan	Jumlah	Kewenangan	Ket
1	Terminal Sukoharjo	Sukoharjo	1	Provinsi	Tipe B
2	Terminal Kartasura	Kartasura	1	Provinsi	Tipe B

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2025

Berikut ini standar pelayanan penyelenggaraan terminal tipe C yang berada di Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 2. 145 Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Tipe C di Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Pelayanan		Uraian	Indikator	Tolak Ukur Indikator				Keterangan
					Terminal Tipe C				
					Ir. Soekarno	Tawangsari	Bekonang	Watukelir	
1	Kehandalan/Keteraturan								
	a	jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum secara beserta realisasi jadwal secara tertulis	jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Pelayanan masih dilakukan di terminal
	b	jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	c	Loket penjualan tiket	Loket tempat calon penumpang membeli tiket	Ketersediaan Keteraturan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	d	Kantor penyelenggaraan terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	Kantor yang terdapat di dalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional seta ruang kontrol dan SIM terminal	Ketersediaan Luas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	e	Petugas Operasional Terminal	Petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal	Ketersediaan Keteraturan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2	Kenyamanan								
	a	Ruang tunggu	Ruang/tempat yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan /atau ruang terbuka)	Ketersediaan Kondisi Keteraturan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	b	Toilet	tersedianya toilet	Jumlah Kondisi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	c	Fasilitas peribadatan/Mushola	fasilitas untuk melakukan ibadah	Luas Kondisi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak	
	d	Ruang terbuka hijau	ruang terbuka hijau disediakan untuk area penghijauan	Ketersediaan Luas Kondisi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	e	Rumah makan	Ruang Makan	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak	
	f	Fasilitas dan petugas kebersihan	Fasilitas dan petugas kebersihan	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	g	Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	Ketersediaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	h	Area merokok	Tempat khusus area merokok	Ketersediaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	i	Drainase	drainase yang memadai	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	j	Area dengan jaringan internet (*hot spot* area)	Area dengan jaringan internet (*hot spot* area)	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	k	Ruang baca	Ruang baca (Reading Corner)	Ketersediaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	l	Lampu penerangan ruangan	Lampu penerangan ruangan	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak	
3	Kemudahan/Keterjangkauan								
	a	Letak jalur pemberangkatan	Kapasitas letak jalur pemberangkatan kendaraan	Keteraturan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Pelayanan masih dilakukan di terminal
	b	Letak jalur kedantangan	Kapasitas letak kedatangan kendaraan	Keteraturan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

No	Jenis Pelayanan		Uraian	Indikator	Tolak Ukur Indikator				Keterangan
					Terminal Tipe C				
					Ir. Soekarno	Tawangsari	Bekonang	Watukelir	
	c	Informasi pelayanan	Visual: -Denah/layout terminal -Nomor Trayek (Nama PO dan Kelas Pelayanan) -Nama terminal keberangkatan -Jadwal -Tarif -Peta Jaringan	Tempat/Ruang	Tidak	Tersedia	Tidak	Tidak	
			Audio: -Informasi Pelayanan (disebutkan apa saja) -Kejadian khusus dan gangguan	-Tempat -Intensitas Cahaya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	d	Informasi angkutan lanjutan	Informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: -Jenis angkutan -Lokasi angkutan lanjutan -Jam pelayanan angkutan lanjutan -Jurusan/rute -Tarif	-Tempat -Kondisi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	e	informasi gangguan perjalanan mobil bus	fasilitas dalam terminal yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional dan keselamatan	Intensitas Suara	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	f	Tempat penitipan barang	Tempat penitipan barang	Ketersediaan					
	g	Fasilitas Pengisian baterai (charging corner)	Fasilitas Pengisian baterai (charging corner)	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak	
	h	Tempat naik/turun penumpang	memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus	Aksesibilitas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak	
	i	Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tempat parkir kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
4	Kesetaraan								
	a	Fasilias Penyandang cacat (difabel)	fasilitas yang disediakan untuk pengguna jasa difabel	Aksesibilitas	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	b	Ruang ibu menyusui	ruangan/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi	Ketersediaan	Tidak	Tersedia	Tidak	Tidak	

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari empat terminal tipe C yang ada di Kabupaten Sukoharjo, terdapat tiga terminal tipe C yang memenuhi Standar Pelayanan Penyelenggaraan yang baik yaitu Terminal Ir. Soerkarno, Terminal Tawangsari dan Terminal Bekonang dan satu yang masih dibawah standar yang ada yaitu Terminal Watukelir. Oleh sebab itu, hal ini menjadi catatan untuk semakin meningkatkan fasilitas terminal tipe C yang ada setiap tahunnya.

b. Fasilitas Keselamatan di Jalan Raya

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi risiko yang diakibatkan dalam berlalu lintas. Berdasarkan data yang ada ketersediaan fasilitas keselamatan jalan selalu meningkat setiap tahunnya namun beberapa kebutuhan fasilitas keselamatan di Kabupaten Sukoharjo masih belum diimbangi dengan ketersediaannya. Beberapa jenis fasilitas keselamatan jalan yang sudah memenuhi kebutuhan seperti APILL, Guardrail, Rambu dan RPPJ namun masih ada beberapa jenis fasilitas keselamatan jalan yang belum sesuai kebutuhan seperti PJU, Warning Light, Marka dan paku jalan. Hal ini berpotensi menjadi salah satu faktor timbulnya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo. Ketersediaan fasilitas keselamatan jalan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 146 Kebutuhan dan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan di Jalan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Keselamatan	KEBUTUHAN						KETERSEDIAAN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	PJU	5.236	5.436	5.436	5.436	5.436	8.086	3.374	3.374	3.384	3.404	3.620	4.222
2	APILL	10	10	10	10	10	14	14	14	15	15	16	14
3	WARNING LIGHT	107	107	107	107	107	114	68	75	82	89	95	102
4	GUARDRAIL	350	350	350	350	350	580	420	450	480	510	538	558
5	RAMBU	3.021	3.021	3.021	3.021	3021	3825	3.271	3.371	3.471	3.571	3673	3775
6	MARKA	88.253	88.253	88.253	88.253	88.253	88253	43.409	44.409	45.409	46.409	49.129	50745
7	PAKU JALAN	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1200	800	800	800	800	800	800
8	RPPJ	150	150	150	150	150	170	146	149	152	155	158	163

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2019-2024

Tabel 2. 147 Kelengkapan Fasilitas Jalan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

No.	Ruas Jalan	PJU	Rambu	Marka	Guard Rill	APILL	Nilai
1	Jalan Gentan – Bekonang	1	1	1	0	1	4
2	Jalan Wirun - Palur	1	1	1	1	1	5
3	Jalan Tanjunganom - Daleman	1	1	1	1	1	5
4	Jalan Telukan - Cuplik	1	1	1	0	0	3
5	Jalan Mulur - Bancakan	1	1	0	0	0	2
6	Jalan Sidan - Triyagan	1	1	0	0	0	2
7	Jalan Tinggen - Stasiun Gawok	1	1	1	0	0	3

No.	Ruas Jalan	PJU	Rambu	Marka	Guard Rill	APILL	Nilai
8	Jalan Bulu - Lengking (Ngasinan-Bulu)	1	1	1	0	0	3
9	Jalan Mulur – Cabean	1	1	0	0	0	2
10	Jalan Tawangsari - Bulu	1	1	1	0	0	3
11	Jalan Sanggung - Blimbing	1	1	0	0	1	3
12	Jalan Dalangan - Lengking	1	1	0	0	0	2
13	Jalan Sugihan – Paluhombo	1	1	1	0	0	3
14	Jalan Pajang - Parangtejo	1	1	1	0	1	4
15	Jalan Bulakrejo - Setran	1	1	0	0	0	2
16	Jalan Tentara pelajar	1	1	1	0	0	3
17	Jalan Rajawali	1	1	1	0	1	4
18	Jalan Diponegoro	1	1	1	0	1	4
19	Jalan Baki - Pajang	1	1	1	0	1	4
20	Jalan Songgorunggi - Malangsari	1	1	1	1	1	5
21	Jalan Bekonang – Kayuapak	1	1	1	0	0	3
22	Jalan Bok Polisi - Blimbing	1	1	0	0	0	2
23	Jalan Tanjunganom - Manang	1	1	1	0	0	3
24	Jalan Nguter - Colo	1	1	0	0	0	2
25	Jl.Tiga Negeri	1	1	0	0	0	2
26	Jalan Tengklik-Jarum	1	1	1	0	0	3
27	Jalan Ngreco-Karangwuni	1	1	0	0	0	2
28	Jalan Pondok - Parangjoro	1	1	1	0	0	3
29	Jalan Mulur - Sidan	1	1	1	0	0	3
30	Jalan Sukoharjo - Mulur	1	1	1	0	1	4
31	Jalan Bulakrejo – Gentan (Jl Prov)	1	1	1	0	0	3
32	Jalan Telukan – Ngombakan	1	1	1	0	1	4
33	Jalan Bekonang - Mojo	1	1	1	0	0	3
34	Jalan Tegalmade – Plumbon	1	1	0	0	0	2
35	Jalan Langenharjo - Pondok	1	1	1	0	0	3
36	Jalan Stasiun Gawok - Sraten	1	1	1	0	1	4
37	Jalan Blimbing - Makamhaji	1	1	1	0	0	3
38	Jalan Manang - Mayang	1	1	1	0	0	3
39	Jalan Sukoharjo - Pondok	1	1	1	0	0	3
40	Jalan Pabelan - Gonilan	1	1	1	0	1	4
41	Jalan Begajah - Mulur	1	1	1	0	1	4
42	Jalan Trangsan - Ngemplak	1	1	1	0	0	3
43	Jalan Mayang - Kandang Menjangan	1	1	1	0	0	3
44	Jalan Gadingan - Palur	1	1	1	0	0	3
45	Jalan Pabelan - Gumpang	1	1	1	0	0	3
46	Jalan Bacem - Tanjunganom	1	1	1	0	1	4
47	Jalan Weru-Tegalsari	1	1	1	1	0	4
48	Jalan Tegalsari-Karang Tengah	1	1	0	0	0	2
49	JalanTegalsari - Grogol	1	1	0	0	0	2
50	Jalan Langkap-Tengklik	1	1	0	0	0	2
51	Jalan Tawangsari - Pojok	1	1	1	0	0	3
52	Jalan Dalangan - Majasto	1	1	0	0	0	2
53	Jalan Langkap - Sanggang	1	1	0	1	0	3
54	Jalan Tawangsari - Lengking	1	1	0	0	0	2
55	Jalan Bulu - Pangkah	1	1	0	0	0	2
56	Jalan Sonorejo - Sidowarno	1	1	0	0	0	2
57	Jalan Kriwen - Pojok	1	1	0	0	0	2
58	Jalan Ambil ambil - Kedungwinong	1	1	0	0	0	2
59	Jalan Ambil ambil - Tanjung	1	1	1	0	0	3
60	Jalan Jayan - Juron	1	1	0	0	0	2

No.	Ruas Jalan	PJU	Rambu	Marka	Guard Rill	APILL	Nilai
61	Jalan Gupit - Serut	1	1	0	0	0	2
62	Jalan Juron – Cabean	1	1	0	0	0	2
63	Jalan Jombor – Ngemul	1	1	0	0	0	2
64	Jalan Dompilan – Cendono	1	1	0	0	0	2
65	Jalan Ngadirejo – Klampisrejo	1	1	0	0	0	2
66	Jalan Glondongan – Tugu	1	1	1	0	0	3
67	Jalan Kemasan – Bulu	1	1	0	0	0	2
68	Jalan Bakalan – Godog	1	1	0	0	0	2
69	Jalan Plumbon - Beton	1	1	0	0	0	2
70	Jalan Pondok - Ngrombo	1	1	0	0	0	2
71	Jalan Bahu - Dlopo	1	1	1	0	0	3
72	Jalan Kaliwingko - Kwarasan	1	1	0	0	0	2
73	Jalan Grogol - Gedangan	1	1	0	0	0	2
74	Jalan Kepuh - Pondok	1	1	1	0	0	3
75	Jalan Bakipandean - Jati	1	1	1	0	0	3
76	Jalan Ngemplak - Kartasura	1	1	1	0	0	3
77	Jalan Tegalan - Mangkuyudan	1	1	1	0	0	3
78	Jalan Makamhaji - Kleco	1	1	1	0	0	3
79	Jalan Carikan - Bulakan	1	1	1	0	1	4
80	Jalan Ngaglik - Sonorejo	1	1	1	0	0	3
81	Jalan Calen - Sonorejo	1	1	0	0	0	2
82	Jalan Krajan - Gudang Dolog	1	1	0	0	0	2
83	Jalan Begajah - Mandan	1	1	0	0	0	2
84	Jalan Mandan - Bedingin	1	1	1	0	0	3
85	Jalan Gentan - Pacinan	1	1	0	0	0	2
86	Jalan Mandan - Tanjung	1	1	1	0	0	3
87	Jalan Gawanan - Klaseman	1	1	0	0	0	2
88	Jalan Ngaglik – Sidorejo	1	1	0	0	0	2
89	Jalan Puhgogor – Cabean	1	1	0	0	0	2
90	Jalan Duwet - Gentan	1	1	0	0	0	2
91	Jalan Tiyaran - Kedungsono	1	1	0	0	0	2
92	Jalan Kepuh - Daleman	1	1	0	0	0	2
93	Jalan Kunden - Ngasinan	1	1	0	0	0	2
94	Jalan Tiyaran - Karangasem	1	1	0	0	0	2
95	Jalan Alasombo - Sanggang	1	1	0	0	0	2
96	Jalan Jarum - Majasto	1	1	0	0	0	2
97	Jalan Pengkol - Tanjung rejo	1	1	0	0	0	2
98	Jalan Puhgogor – Paluhombo	1	1	0	0	0	2
99	Jalan Bekonang - Demakan	1	1	0	0	0	2
100	Jalan Gentan - Jetis	1	1	1	0	0	3
101	Jalan Bulu - Nuricik	1	1	1	0	0	3
102	Jalan Cendono – Sugihan	1	1	0	0	0	2
103	Jalan Pondok - Surobayan	1	1	1	0	0	3
104	Jalan Bendingin - Combongan	1	1	0	0	0	2
105	Jalan Gentan - Sanggrahan	1	1	1	0	0	3
106	Jalan Waru - Purbayan	1	1	0	0	0	2
107	Jalan Kadilangu - Gedangan	1	1	0	0	0	2
108	Jalan Gedangan - Pondok	1	1	0	0	0	2
109	Jalan Daleman - Kembangan	1	1	0	0	0	2
110	Jalan Plumbon - Demakan	1	1	1	0	0	3
111	Jalan Dompilan - Setran	1	1	0	0	0	2
112	Jalan Gumpang - Mayang	1	1	1	0	0	3
113	Jalan Pasar Blimbing - Trosemi	1	1	0	0	0	2
114	Jalan Sanggrahan - Banaran	1	1	0	0	0	2
115	Jalan Wirun – Ngombakan	1	1	0	0	0	2
116	Jalan Parangjoro - Bulakrejo	1	1	0	0	0	2

No.	Ruas Jalan	PJU	Rambu	Marka	Guard Rill	APILL	Nilai
117	Jalan Klurahan - Krajan	1	1	0	0	0	2
118	Jalan Tanjungsari -Sidorejo	1	1	0	0	0	2
119	Jalan Cangkol - Canden	1	1	0	0	0	2
120	Jalan Demakan - Joho	1	1	0	0	0	2
121	Jalan Padasan – Bakalan	1	1	0	0	0	2
122	Jalan Padasan - Rejosari	1	1	0	0	0	2
123	Jalan Polokarto – Rejosari	1	1	0	0	0	2
124	Jalan Rejosari – Plampang	1	1	0	0	0	2
125	Jalan Gentan – Kemasan	1	1	0	0	0	2
126	Jalan Kenoko – Tepisari	1	1	0	0	0	2
127	Jalan Toriyo – Sugihan	1	1	0	0	0	2
128	Jalan Mertan – Tengkil	1	1	0	0	0	2
129	Jalan Mojorejo – Bendosari	1	1	0	0	0	2
130	Jalan Celep - Juron	1	1	0	0	0	2
131	Jalan Juron - Serut	1	1	0	0	0	2
132	Jalan Nguter - Celep	1	1	0	0	0	2
133	Jalan Nguter - Lawu	1	1	0	0	0	2
134	Jalan Plesan - Jagan	1	1	0	0	0	2
135	Jalan Pranan - Mojo	1	1	0	0	0	2
136	Jalan Mulur - Bendungan	1	1	0	0	0	2
137	Jalan Gayam - Mulur	1	1	0	0	0	2
138	Jalan Sengon - Jalakan	1	1	0	0	0	2
139	Jalan Gronong - Jalakan	1	1	0	0	0	2
140	Jalan Daleman - Lawu	1	1	0	0	0	2
141	Jalan Ngasinan - Karangasem	1	1	0	0	0	2
142	Jalan Puron - Malangan	1	1	0	0	0	2
143	Jalan Kamal - Pundungrejo	1	1	0	0	0	2
144	Jalan Kamal - Gentan	1	1	0	0	0	2
145	Jalan Tawang - Sirahan	1	1	0	0	0	2
146	Jalan Karangmojo - Sirahan	1	1	0	0	0	2
147	Jalan Jetis - Karangwuni	1	1	0	0	0	2
148	Jalan Grajegan - Kedungjambal	1	1	0	0	0	2
149	Jalan Kenep - Tangkisan	1	1	0	0	0	2
150	Jalan Bedingin - Kenep	1	1	0	0	0	2
151	Jalan Kenep - Combongan	1	1	0	0	0	2
152	Jalan Geneng - Krajan	1	1	0	0	0	2
153	Jalan Wimboharsono	1	1	0	0	0	2
154	Jalan Adi sumarmo	1	1	1	0	1	4
155	Jalan Gembongan - Ngabeyan	1	1	1	0	1	4
156	Jalan Kranggan-Ngabeyan	1	1	1	0	1	4
157	Jalan Jenderal sudirman	1	1	1	0	1	4
158	Jalan Dr.Muwardi	1	1	1	0	1	4
159	Jalan Veteran	1	1	1	0	1	4
160	Jalan Wandyo pranoto	1	1	1	0	0	3
161	Jalan Merak	1	1	0	0	0	2
162	Jalan Perintis Kemerdekaan	1	1	0	0	0	2
163	Jalan Kh.Samanhudi	1	1	1	0	1	4
164	Jalan Pondok - dingin	1	1	0	0	0	2
165	Jalan Slamet Riyadi	1	1	1	0	1	4
166	Jalan Agus Salim	1	1	1	0	1	4
167	Jalan Brigjen Katamso	1	1	1	0	0	3
168	Jalan Gatot Subroto	1	1	1	0	1	4
169	Jalan Jaksa Agung	1	1	1	0	1	4
170	Jalan Brontowiryan	1	1	0	0	1	3
Persentase (%)		**100,00**	**100,00**	**40,00**	**2,94**	**16,47**	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo 2024

Tabel 2. 148 Kelengkapan Fasilitas Jalan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

No.	Ruas Jalan	PJU	Rambu	Marka	Guard Rill	APILL	Nilai
1	Jalan Gentan – Bekonang	1	1	1	0	1	4
2	Jalan Wirun - Palur	1	1	1	1	1	5
3	Jalan Tanjunganom - Daleman	1	1	1	1	1	5
4	Jalan Telukan - Cuplik	1	1	1	0	0	3
5	Jalan Mulur - Bancakan	1	1	0	0	0	2
6	Jalan Sidan - Triyagan	1	1	1	0	0	3
7	Jalan Tinggen - Stasiun Gawok	1	1	1	0	0	3
8	Jalan Bulu - Lengking (Ngasinan-Bulu)	1	1	1	0	0	3
9	Jalan Mulur – Cabean	1	1	0	0	0	2
10	Jalan Tawangsari - Bulu	1	1	1	0	0	3
11	Jalan Sanggung - Blimbing	1	1	0	0	1	3
12	Jalan Dalangan - Lengking	1	1	0	0	0	2
13	Jalan Sugihan – Paluhombo	1	1	1	0	0	3
14	Jalan Pajang - Parangtejo	1	1	1	0	1	4
15	Jalan Bulakrejo - Setran	1	1	0	0	0	2
16	Jalan Tentara pelajar	1	1	1	0	0	3
17	Jalan Rajawali	1	1	1	0	1	4
18	Jalan Diponegoro	1	1	1	0	1	4
19	Jalan Baki - Pajang	1	1	1	0	1	4
20	Jalan Songgorunggi - Malangsari	1	1	1	1	1	5
21	Jalan Bekonang – Kayuapak	1	1	1	0	0	3
22	Jalan Bok Polisi - Blimbing	1	1	0	0	0	2
23	Jalan Tanjunganom - Manang	1	1	1	0	0	3
24	Jalan Nguter - Colo	1	1	0	0	0	2
25	Jl.Tiga Negeri	1	1	0	0	0	2
26	Jalan Tengklik-Jarum	1	1	1	0	0	3
27	Jalan Ngreco-Karangwuni	1	1	0	0	0	2
28	Jalan Pondok - Parangjoro	1	1	1	0	0	3
29	Jalan Mulur - Sidan	1	1	1	0	0	3
30	Jalan Sukoharjo - Mulur	1	1	1	0	1	4
31	Jalan Bulakrejo – Gentan (Jl Prov)	1	1	1	0	0	3
32	Jalan Telukan – Ngombakan	1	1	1	0	1	4
33	Jalan Bekonang - Mojo	1	1	1	0	0	3
34	Jalan Tegalmade – Plumbon	1	1	0	0	0	2
35	Jalan Langenharjo - Pondok	1	1	1	0	0	3
36	Jalan Stasiun Gawok - Sraten	1	1	1	0	1	4
37	Jalan Blimbing - Makamhaji	1	1	1	0	0	3
38	Jalan Manang - Mayang	1	1	1	0	0	3
39	Jalan Sukoharjo - Pondok	1	1	1	0	0	3
40	Jalan Pabelan - Gonilan	1	1	1	0	1	4
41	Jalan Begajah - Mulur	1	1	1	0	1	4
42	Jalan Trangsan - Ngemplak	1	1	1	0	0	3
43	Jalan Mayang - Kandang Menjangan	1	1	1	0	0	3
44	Jalan Gadingan - Palur	1	1	1	0	0	3

No.	Ruas Jalan	PJU	Rambu	Marka	Guard Rill	APILL	Nilai
45	Jalan Pabelan - Gumpang	1	1	1	0	0	3
46	Jalan Bacem - Tanjunganom	1	1	1	0	1	4
47	Jalan Weru-Tegalsari	1	1	1	1	0	4
48	Jalan Tegalsari-Karang Tengah	1	1	0	0	0	2
49	JalanTegalsari - Grogol	1	1	0	0	0	2
50	Jalan Langkap-Tengklik	1	1	0	0	0	2
51	Jalan Tawangsari - Pojok	1	1	1	0	0	3
52	Jalan Dalangan - Majasto	1	1	1	0	0	3
53	Jalan Langkap - Sanggang	1	1	0	1	0	3
54	Jalan Tawangsari - Lengking	1	1	0	0	0	2
55	Jalan Bulu - Pangkah	1	1	0	0	0	2
56	Jalan Sonorejo - Sidowarno	1	1	0	0	0	2
57	Jalan Kriwen - Pojok	1	1	0	0	0	2
58	Jalan Ambil ambil - Kedungwinong	1	1	0	0	0	2
59	Jalan Ambil ambil - Tanjung	1	1	1	0	0	3
60	Jalan Jayan - Juron	1	1	0	0	0	2
61	Jalan Gupit - Serut	1	1	0	0	0	2
62	Jalan Juron – Cabean	1	1	0	0	0	2
63	Jalan Jombor – Ngemul	1	1	0	0	0	2
64	Jalan Dompilan – Cendono	1	1	0	0	0	2
65	Jalan Ngadirejo – Klampisrejo	1	1	0	0	0	2
66	Jalan Glondongan – Tugu	1	1	1	0	0	3
67	Jalan Kemasan – Bulu	1	1	0	0	0	2
68	Jalan Bakalan – Godog	1	1	0	0	0	2
69	Jalan Plumbon - Beton	1	1	0	0	0	2
70	Jalan Pondok - Ngrombo	1	1	0	0	0	2
71	Jalan Bahu - Dlopo	1	1	1	0	0	3
72	Jalan Kaliwingko - Kwarasan	1	1	0	0	0	2
73	Jalan Grogol - Gedangan	1	1	0	0	0	2
74	Jalan Kepuh - Pondok	1	1	1	0	0	3
75	Jalan Bakipandean - Jati	1	1	1	0	0	3
76	Jalan Ngemplak - Kartasura	1	1	1	0	0	3
77	Jalan Tegalan - Mangkuyudan	1	1	1	0	0	3
78	Jalan Makamhaji - Kleco	1	1	1	0	0	3
79	Jalan Carikan - Bulakan	1	1	1	0	1	4
80	Jalan Ngaglik - Sonorejo	1	1	1	0	0	3
81	Jalan Calen - Sonorejo	1	1	0	0	0	2
82	Jalan Krajan - Gudang Dolog	1	1	0	0	0	2
83	Jalan Begajah - Mandan	1	1	0	0	0	2
84	Jalan Mandan - Bedingin	1	1	1	0	0	3
85	Jalan Gentan - Pacinan	1	1	0	0	0	2
86	Jalan Mandan - Tanjung	1	1	1	0	0	3
87	Jalan Gawanan - Klaseman	1	1	0	0	0	2
88	Jalan Ngaglik – Sidorejo	1	1	0	0	0	2
89	Jalan Puhgogor – Cabean	1	1	0	0	0	2
90	Jalan Duwet - Gentan	1	1	0	0	0	2
91	Jalan Tiyaran - Kedungsono	1	1	0	0	0	2
92	Jalan Kepuh - Daleman	1	1	0	0	0	2

No.	Ruas Jalan	PJU	Rambu	Marka	Guard Rill	APILL	Nilai
93	Jalan Kunden - Ngasinan	1	1	0	0	0	2
94	Jalan Tiyaran - Karangasem	1	1	0	0	0	2
95	Jalan Alasombo - Sanggang	1	1	0	0	0	2
96	Jalan Jarum - Majasto	1	1	0	0	0	2
97	Jalan Pengkol - Tanjung rejo	1	1	0	0	0	2
98	Jalan Puhgogor – Paluhombo	1	1	0	0	0	2
99	Jalan Bekonang - Demakan	1	1	0	0	0	2
100	Jalan Gentan - Jetis	1	1	1	0	0	3
101	Jalan Bulu - Nuricik	1	1	1	0	0	3
102	Jalan Cendono – Sugihan	1	1	0	0	0	2
103	Jalan Pondok - Surobayan	1	1	1	0	0	3
104	Jalan Bendingin - Combongan	1	1	0	0	0	2
105	Jalan Gentan - Sanggrahan	1	1	1	0	0	3
106	Jalan Waru - Purbayan	1	1	0	0	0	2
107	Jalan Kadilangu - Gedangan	1	1	0	0	0	2
108	Jalan Gedangan - Pondok	1	1	0	0	0	2
109	Jalan Daleman - Kembangan	1	1	0	0	0	2
110	Jalan Plumbon - Demakan	1	1	1	0	0	3
111	Jalan Dompilan - Setran	1	1	0	0	0	2
112	Jalan Gumpang - Mayang	1	1	1	0	0	3
113	Jalan Pasar Blimbing - Trosemi	1	1	0	0	0	2
114	Jalan Sanggrahan - Banaran	1	1	0	0	0	2
115	Jalan Wirun – Ngombakan	1	1	0	0	0	2
116	Jalan Parangjoro - Bulakrejo	1	1	0	0	0	2
117	Jalan Klurahan - Krajan	1	1	0	0	0	2
118	Jalan Tanjungsari -Sidorejo	1	1	0	0	0	2
119	Jalan Cangkol - Canden	1	1	0	0	0	2
120	Jalan Demakan - Joho	1	1	0	0	0	2
121	Jalan Padasan – Bakalan	1	1	0	0	0	2
122	Jalan Padasan - Rejosari	1	1	0	0	0	2
123	Jalan Polokarto – Rejosari	1	1	0	0	0	2
124	Jalan Rejosari – Plampang	1	1	0	0	0	2
125	Jalan Gentan – Kemasan	1	1	0	0	0	2
126	Jalan Kenoko – Tepisari	1	1	0	0	0	2
127	Jalan Toriyo – Sugihan	1	1	0	0	0	2
128	Jalan Mertan – Tengkil	1	1	0	0	0	2
129	Jalan Mojorejo – Bendosari	1	1	0	0	0	2
130	Jalan Celep - Juron	1	1	0	0	0	2
131	Jalan Juron - Serut	1	1	0	0	0	2
132	Jalan Nguter - Celep	1	1	0	0	0	2
133	Jalan Nguter - Lawu	1	1	0	0	0	2
134	Jalan Plesan - Jagan	1	1	0	0	0	2
135	Jalan Pranan - Mojo	1	1	0	0	0	2
136	Jalan Mulur - Bendungan	1	1	0	0	0	2
137	Jalan Gayam - Mulur	1	1	0	0	0	2
138	Jalan Sengon - Jalakan	1	1	0	0	0	2
139	Jalan Gronong - Jalakan	1	1	0	0	0	2
140	Jalan Daleman - Lawu	1	1	0	0	0	2
141	Jalan Ngasinan - Karangasem	1	1	0	0	0	2

No.	Ruas Jalan	PJU	Rambu	Marka	Guard Rill	APILL	Nilai
142	Jalan Puron - Malangan	1	1	0	0	0	2
143	Jalan Kamal - Pundungrejo	1	1	0	0	0	2
144	Jalan Kamal - Gentan	1	1	0	0	0	2
145	Jalan Tawang - Sirahan	1	1	0	0	0	2
146	Jalan Karangmojo - Sirahan	1	1	0	0	0	2
147	Jalan Jetis - Karangwuni	1	1	0	0	0	2
148	Jalan Grajegan - Kedungjambal	1	1	0	0	0	2
149	Jalan Kenep - Tangkisan	1	1	0	0	0	2
150	Jalan Bedingin - Kenep	1	1	0	0	0	2
151	Jalan Kenep - Combongan	1	1	0	0	0	2
152	Jalan Geneng - Krajan	1	1	0	0	0	2
153	Jalan Wimboharsono	1	1	0	0	0	2
154	Jalan Adi sumarmo	1	1	1	0	1	4
155	Jalan Gembongan - Ngabeyan	1	1	1	0	1	4
156	Jalan Kranggan-Ngabeyan	1	1	1	0	1	4
157	Jalan Jenderal sudirman	1	1	1	0	1	4
158	Jalan Dr.Muwardi	1	1	1	0	1	4
159	Jalan Veteran	1	1	1	0	1	4
160	Jalan Wandyo pranoto	1	1	1	0	0	3
161	Jalan Merak	1	1	0	0	0	2
162	Jalan Perintis Kemerdekaan	1	1	0	0	0	2
163	Jalan Kh.Samanhudi	1	1	1	0	1	4
164	Jalan Pondok - dingin	1	1	0	0	0	2
165	Jalan Slamet Riyadi	1	1	1	0	1	4
166	Jalan Agus Salim	1	1	1	0	1	4
167	Jalan Brigjen Katamso	1	1	1	0	0	3
168	Jalan Gatot Subroto	1	1	1	0	1	4
169	Jalan Jaksa Agung	1	1	1	0	1	4
170	Jalan Brontowiryan	1	1	1	0	1	4
Persentase (%)		**100,00**	**100,00**	**41,76**	**2,94**	**16,47**	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2025

Ketersedian fasilitas keselamatan sebagaimana data di atas tentu saja sangat berpengaruh terhadap angka kecelakaan yang terjadi dan titik kemacetan yang muncul. Ketersediaan fasilitas keselamatan setiap tahun meningkat namun ada beberapa jenis fasilitas keselamatan yang belum sesuai dengan kebutuhan fasilitas keselamatan sehingga masih diperlukan langkah-langkah untuk pemenuhan ketersediaan fasilitas keselamatan sesuai kebutuhan. Adapun angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 149 Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lakalantas) Kabupaten Sukoharjo

No	Kecelakaan		Jumlah Kejadian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Lakalantas	1201	1.135	1.527	1.486	1.514	1.752
2	Korban Meninggal Dunia	64	94	90	70	91	100
3	Indek Fatalitas	0,053	0,083	0,059	0,047	0,060	0,057

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2020-2025

Angka lakalantas pada tahun 2025 sejumlah 1.752 meningkat 238 kejadian dari tahun 202 sejumlah 1.514 dan korban meninggal dunia juga tahun 2025 sejumlah 100 mengalami peningkatan 9 orang dari tahun 2024 sebesar 91 orang. Indek fatalitas di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 0,060 dan pada tahun 2023 sebesar 0,047, ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,013. Pada tahun 2025 indek fatalitas sebesar 0,057 menurun dari tahun 2024 sebesar 0,060. Berdasarkan data diatas, indek fatalitas yang mengalami penurunan 0,003, namun demikian masih perlu adanya langkah-langkah strategis untuk dapat lebih menurunkan indek fatalitas di Kabupaten Sukoharjo pada tahun selanjutnya karena keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas.

Adapun lokasi-lokasi tertentu yang memiliki kerawanan akan kecelakaan (blackspot). Titik-titik yang sering menjadi lokasi rawan kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo yaitu :

1. Jl Kartasura - Batas Kotas Surakarta
2. Jl Sukoharjo - Wonogiri
3. Jl Pajang - Parangtejo

Adapun ruas jalan/ titik kemacetan yang ada di Wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Jl Boyolali - Kartasura (Simpang Tugu Kartasura)
2. Jl Kartasura - Batas Kota Klaten (Simpang Sanggung)
3. Jl Kartasura - Batas Kotas Surakarta (Pasar Kartasura dan Kawasan UMS)
4. Jl Surakarta - Sukoharjo (Pasar Telukan)
5. Jl Sukoharjo - Wonogiri (Pasa Nguter)
6. Jl Jenderal Sudirman (Pasar Ir Soekarno)
7. Jl Bahu - Dlopo (Sekolah Al Azhar)
8. Jl Samanhudi (Kawasan Agen Bus)
9. Jl Veteran (Kawasan PKL Alun-Alun)
10. Jl Blimbing - Makamhaji (Pasar Gawok)
11. Jl Manang - Mayang (Perlintasang Sebidang Mayang)
12. Jl Pajang - Parangtejo (Underpass Makamhaji)
13. Jl Baki - Pajang (Kawasan CBD Kec. Baki)

Untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan beberapa strategi penanganan lokasi-lokasi yang memiliki kerawanan kecelakaan tinggi (blackspot). Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas perlu upaya-upaya mengurai kemacetan di daerah rawan kemacetan.

c. Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum

Salah satu upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas adalah dengan menjaga kondisi kelayakan kendaraan sesuai standar dengan melaksanakan uji kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan operasional kendaraan angkutan. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 150 Data Kelayakan Kendaraan Umum Di Kabupaten Sukoharjo

No	Tahun	Jumlah Kendaraan yang uji KIR	Uji KIR yang dikeluarkan	Rasio
1	2020	195	144	0,73
2	2021	169	123	0,72
3	2022	259	198	0,76
4	2023	349	273	0,78
5	2024	406	396	0,97
6	2025	591	456	0,77

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Dilihat dari data kelayakan kendaraan umum di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 mencapai 0,76 terjadi peningkatan sekitar 0,04 dari tahun 2021. Pada tahun 2023 kelayakan kendaraan umum mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 0,78. Pada tahun 2024 rasio kelayakan kendaraan umum di Kabupaten Sukoharjo meningkat sekitar 0,19% dari tahun 2023 sebesar 0,78 menjadi 0,97 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 rasio data kelayakan kendaraan umum sebesar 0,77 menurun sebesar 0,20 dari tahun 2024 sebesar 0,97. Namun demikian capaian kelayakan kendaraan umum di Kabupaten Sukoharjo masih perlu ditingkatkan lagi sehingga perlu dilakukan peningkatan pemahaman terhadap pemilik kendaraan agar secara sadar melakukan uji KIR kendaraan bermotor.

Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada Tahun 2021 Kabupaten Sukoharjo sudah melaksanakan survei IKM pada Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan hasil 81,24 dengan kategori BAIK. Pada tahun 2022 nilai IKM naik menjadi 82,24 dengan kategori BAIK. Dengan kenaikan nilai IKM menandakan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi nilainya 82,21 kategori BAIK. Pada Tahun 2024 Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi nilainya 82,41 kategori BAIK. Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan nilai IKM tersebut meliputi : Penambahan loket pengaduan, peningkatan kompetensi bagi petugas uji KIR dan penambahan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Peran Dinas Perhubungan dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca adalah uji emisi pada kendaraan bermotor wajib uji. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan uji emisi terhadap 5.023 kendaraan. Berikut data uji emisi kendaraan bermotor mulai tahun 2017-2021.

Berikut data perkiraan besarnya emisi (CO) dan (HC) pada kendaraan bermotor yang diuji setiap bulan pada tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 2. 151 Perkiraan Besarnya Emisi (CO) dan (HC) pada Kendaraan Bermotor yang Diuji Setiap Bulan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Bulan		Premium					Solar	
		Karbon Monoksida (CO)			Hidro Karbon (HC)			
		(KBWU<2007)	(KBWU>2007)		(KBWU<2007)	(KBWU>2007)	<2010	>2010
		(%)	(%)		(ppm)	(ppm)	(%)	(%)
1		2	3		4	5	6	7
1	Januari	3,1	0,8		650	91	32	19
2	Pebruari	3,3	0,7		689	91	33	18
3	Maret	3,1	0,8		820	85	30	16
4	April	3,2	0,8		820	85	33	20
5	Mei	3,1	0,7		850	88	33	21
6	Juni	3,1	0,9		900	87	32	20
7	Juli	3,5	0,9		880	84	34	21
8	Agustus	2,8	0,6		700	89	35	25
9	September	2,6	0,7		810	88	33	21
10	Oktober	3,3	0,6		800	86	40	23
11	November	2,9	0,8		810	85	31	22
12	Desember	3,2	0,7		900	92	37	20
	Rata-rata	3,49	0,8		832,5	91,1	35,58	20,67

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Berikut data perkiraan besarnya emisi (CO) dan (HC) pada kendaraan bermotor yang diuji setiap bulan pada tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 2. 152 Perkiraan Besarnya Emisi (CO) dan (HC) pada Kendaraan Bermotor yang Diuji Setiap Bulan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018

Bulan		Premium					Solar	
		Karbon Monoksida (CO)			Hidro Karbon (HC)			
		(KBWU<2007)	(KBWU>2007)		(KBWU<2007)	(KBWU>2007)	<2010	>2010
		(%)	(%)		(ppm)	(ppm)	(%)	(%)
1		2	3		4	5	6	7
1	Januari	3,2	0,9		800	91	30	20
2	Pebruari	3,3	0,7		750	90	35	21
3	Maret	3,1	0,9		820	91	40	25
4	April	3,4	0,8		800	92	30	27
5	Mei	3,2	0,7		900	90	30	20
6	Juni	3,3	0,9		930	91	35	20
7	Juli	3,5	0,8		890	93	40	22
8	Agustus	3,2	0,8		700	90	35	25
9	September	3,2	0,7		800	92	35	26
10	Oktober	3,3	0,9		800	90	40	20
11	November	3,1	0,8		850	90	40	20
12	Desember	3,4	0,8		950	94	37	20
	Rata-rata	3,49	0,8		832,5	91,1	35,58	20,67

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Berikut data perkiraan besarnya emisi (CO) dan (HC) pada kendaraan bermotor yang diuji setiap bulan pada tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 2. 153 Perkiraan Besarnya Emisi (CO) dan (HC) pada Kendaraan Bermotor yang Diuji Setiap Bulan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019

Bulan		Premium					Solar	
		Karbon Monoksida (CO)			Hidro Karbon (HC)			
		(KBWU<2007)	(KBWU>2007)		(KBWU<2007)	(KBWU>2007)	<2010	>2010
		(%)	(%)		(ppm)	(ppm)	(%)	(%)
-1		-2	-3		-4	-5	-6	-7
1	Januari	3,2	0,3		700	80	32	20
2	Pebruari	3,2	0,7		750	70	25	15
3	Maret	3,3	0,8		775	50	26	18
4	April	3,5	0,6		742	65	28	16
5	Mei	3	0,7		851	68	24	25
6	Juni	3,7	0,4		823	62	29	24
7	Juli	3,8	0,5		850	65	26	23
8	Agustus	3,6	0,3		750	90	24	21
9	September	3,9	0,8		650	80	25	25
10	Oktober	3,1	0,4		540	60	30	15

Bulan		Premium					Solar	
		Karbon Monoksida (CO)			Hidro Karbon (HC)			
		(KBWU<2007)	(KBWU>2007)		(KBWU<2007)	(KBWU>2007)	<2010	>2010
		(%)	(%)		(ppm)	(ppm)	(%)	(%)
11	November	3,5	0,6		350	70	35	16
12	Desember	3,1	0,5		850	30	40	29
	Rata-rata	3,4083333	0,55		719,25	65,833333	28,666667	20,583333

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Berikut data perkiraan besarnya emisi (CO) dan (HC) pada kendaraan bermotor yang diuji setiap bulan pada tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 2. 154 Perkiraan Besarnya Emisi (CO) dan (HC) pada Kendaraan Bermotor yang Diuji Setiap Bulan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

Bulan		Premium					Solar	
		Karbon Monoksida (CO)			Hidro Karbon (HC)			
		(KBWU<2007)	(KBWU >2007)		(KBWU <2007)	(KBWU >2007)	<2010	>2010
		(%)	(%)		(ppm)	(ppm)	(%)	(%)
-1		-2	-3		-4	-5	-6	-7
1	Januari	3,2	0,3		750	75	35	25
2	Pebruari	3,2	0,5		750	85	25	26
3	Maret	3,4	0,8		850	50	30	24
4	April	3,5	0,6		742	90	28	16
5	Mei	3,1	0,6		950	80	35	50
6	Juni	3,7	0,4		650	40	30	80
7	Juli	3,8	0,6		620	65	35	23
8	Agustus	3,8	0,3		750	60	24	90
9	September	3,2	0,5		840	51	40	30
10	Oktober	3,1	0,6		520	26	45	40
11	November	3,6	0,2		450	28	35	50
12	Desember	3,1	0,5		750	50	50	29
	Rata-rata	3,3916667	0,4916667		718,5	58,333333	34,333333	40,25

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Berikut data perkiraan besarnya emisi (CO) dan (HC) pada kendaraan bermotor yang diuji setiap bulan pada tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2. 155 Perkiraan Besarnya Emisi (CO) dan (HC) pada Kendaraan Bermotor yang Diuji Setiap Bulan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Bulan		Premium					Solar	
		Karbon Monoksida (CO)			Hidro Karbon (HC)			
		(KBWU<2007)	(KBWU>2007)		(KBWU<2007)	(KBWU>2007)	<2010	>2010
		(%)	(%)		(ppm)	(ppm)	(%)	(%)
-1		-2	-3		-4	-5	-6	-7
1	Januari	2,8	0,4		800	120	30	25
2	Pebruari	2,7	0,6		950	100	25	26
3	Maret	3,4	0,8		800	90	32	21
4	April	3,1	0,6		750	95	33	23
5	Mei	3,1	0,4		800	85	34	22
6	Juni	3,3	0,4		680	75	36	25
7	Juli	3,8	0,9		630	98	38	28
8	Agustus	3,5	0,3		700	75	25	24
9	September	3,2	0,5		780	76	21	26
10	Oktober	3,1	0,8		510	50	28	29
11	November	3,6	0,9		550	85	27	19
12	Desember	3,1	0,9		550	50	20	20
	Rata-rata	3,225	0,625		708,33333	83,25	29,083	24

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2. 156 Perkiraan Besarnya Emisi (CO) dan (HC) pada Kendaraan Bermotor yang Diuji Setiap Bulan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

	Bulan	Premium				Solar	
		Karbon Monoksida (CO)		Hidro Karbon (HC)			
		(KBWU <2007) (%)	(KBWU >2007) (%)	(KBWU <2007) (ppm)	(KBWU >2007) (ppm)	<2010 (%)	>2010 (%)
	1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	2,2	0,8	840	57	33	22
2	Pebruari	2,4	0,8	844	52	36	26
3	Maret	2,5	0,9	844	90	28	24
4	April	2,6	0,3	862	86	29	28
5	Mei	2,3	0,3	900	88	26	21
6	Juni	2,1	0,3	905	85	34	26
7	Juli	1,9	0,5	901	55	37	23
8	Agustus	2,3	0,9	555	40	31	27
9	September	2,2	1,1	541	46	36	29
10	Oktober	2,7	0,9	621	89	38	26
11	November	2,9	0,5	685	55	31	23
12	Desember	3	0,3	577	66	33	26
	Rata-rata	2,425	0,6333333	756,25	67,416667	32,666667	25,083333

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

d. Perparkiran

Parkir menjadi salah satu komponen yang sangat penting untuk ditinjau. Keberadaan parkir pada badan jalan yang ada menjadi permasalahan tersendiri berkenaan dengan salah satu komponen yang memengaruhi kemacetan akibat manuver parkir maupun pengurangan lebar efektif jalan. Saat ini perparkiran yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdapat parkir di badan jalan dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Parkir memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo. Untuk melakukan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perparkiran.

Berikut adalah data potensi parker Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil kajian yang ada:

Tabel 2. 157 Data Potensi Parkir Kabupaten Sukoharjo

Lokasi	Jumlah Potensi Pendapatan
Kecamatan Gatak	62.000.000
Kecamatan Baki	137.240.000
Kecamatan Bendosari	238.345.000
Kecamatan Mojolaban dan Polokarto	230.860.000
Kecamatan Nguter	109.865.000
Kecamatan Bulu, Tawangsari dan Weru	125.166.667

Lokasi	Jumlah Potensi Pendapatan
Kecamatan Grogol (Sistem Gate)	113.583.333
Kecamatan Kartasura	1.162.407.737
Kecamatan Grogol	1.742.400.000
Kecamatan Sukoharjo	1.893.240.000

Sumber: Kajian Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Sedangkan berikut adalah sebaran lokasi parkir yang sudah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2. 158 Data Lokasi Parkir yang Sudah Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Rp)

Lokasi	Jumlah Pendapatan				
	2020	2021	2022	2024	2025
Kec. Kartasura	171,900,000	235.441.000	251.561.700	185.100.000	297.350.000
Kec. Grogol	181,800,000	248.903.000	265.597.500	283.400.000	295.050.000
Kec. Sukoharjo	191,437,500	259.702.000	279.250.000	305.100.000	317.100.000
Kec. Mojolaban, Kec. Polokarto	36,150,000	49.587.000	52.600.000	57.100.000	60.100.000
Kec.Bulu,Kec.Twngsari,Kec. Weru	17,400,000	24.368.000	26.400.000	35.763.300	37.550.000
Kec. Gatak	9,825,000	13.802.000	14.700.000	17.100.000	18.800.000
Kec. Baki	17,325,000	24.068.000	26.987.800	29.050.000	31.050.000
Kec. Bendosari	28,575,000	38.934.000	42.500.000	49.600.000	52.600.000
Kec. Nguter	16,575,000	22.179.000	23.600.000	25.550.000	26.550.000
Grogol Jl. Ir. Soekarno(Sistem Gate)	15,037,500	23.341.000	27.600.000	32.075.000	33.950.000
Tk. Alfamart	47,250,000	66.052.000	73.555.000	83.150.000	44.550.000
Tk. Indomart				41.550.000	44.750.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa potensi parkir masih terbuka sangat luas, capaian pendapatan parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan namun demikian capaian pendapatan dari pengelolaan parkir dimaksud masih di bawah potensi parkir yang diperkirakan. Sehingga perlu adanya inovasi dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Sukoharjo. Peningkatan pengelolaan kawasan parkir dilakukan dengan mengajak investor atau organisasi pemuda/kemasyarakatan dalam memanfaatkan potensi parkir yang ada, untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo.

e. Trayek Angkutan Lalu Lintas

Sebelum adanya rencana pengembangan transportasi Aglomerasi Solo-Wonogiri, di Wilayah Sukoharjo sudah ada transportasi yang menghubungkan antara wilayah kabupaten/kota lain dengan wilayah Kabupaten Sukoharjo, yaitu trayek Angkutan Perdesaan melampaui wilayah kabupaten. Trayek Angkutan tersebut menghubungkan Wilayah Sukoharjo dengan wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Karanganyar, antara lain:

1. Kota Surakarta: Gemblegan, Gading, Tipes, Pajang
2. Kabupaten Karaganyar: Klerong, Jatipuro, Jatiyoso
3. Kabupaten Wonogiri: Terminal Tipe A (Krisak)

Angkutan penumpang dengan kendaraan umum di Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Selain angkutan penumpang tersebut masih ada lagi alat

transportasi aglomerasi yaitu Buy The Service (BST) dan Bus Trans Jateng yang melintasi wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Berikut ini rasio izin trayek di Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut :

Tabel 2. 159 Rasio Izin Trayek di Kabupaten Sukoharjo

No	Tahun	Izin Trayek yang dikeluarkan	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2020	21	910.024	0.000023
2	2021	16	911.966	0.000017
3	2022	40	911.966	0,000044
4	2023	60	911.966	0,000065
5	2024	24	913.950	0,000026
6	2025	23	916.472	0,000025

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2020-2025

Berikut ini rasio konektivitas transportasi, sebagai berikut :

Tabel 2. 160 Rasio Konektivitas Transportasi

No	Tahun	Persentase
1	2020	11
2	2021	11
3	2022	10,75
4	2023	11
5	2024	11
6	2025	10,58

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2020-2025

Pada tahun 2021 rasio konektivitas transportasi sebesar 11 persen Pada tahun 2022 sebesar 10,75 mengalami penurunan 0,25 namun pada tahun 2023 kembali menjadi 11. Pada tahun 2024 rasio konektivitas masih sebesar 11. Rasio Konektivitas Transportasi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 sebesar 10,58 menurun sebesar 0,02 dari tahun 2024. Ini membuktikan tingkat cakupan layanan transportasi di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan diakibatkan beberapa transportasi pedesaan dan perkotaan sudah tidak beroperasi lagi. Perlu inovasi dan strategi agar capaian konektivitas rasio transportasi kembali meningkat untuk mewujudkan konelktivitas wilayah di Kabupaten Sukoharjo.

Pada tahun 2025 jumlah moda angkutan di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan jumlah moda, ini dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2. 161 Moda Angkutan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020–2025

Nama	Jumlah (Unit) 2020	Jumlah (Unit) 2021	Jumlah (Unit) 2022	Jumlah (unit) 2023	Jumlah (unit) 2024	Jumlah (unit) 2025
Moda Angkutan Barang						
Truk Barang Umum	1.654	1700	1.401	1.502	1.563	591
Mobil Box	104	183	107	181	536	122
Mobil Peti Kemas	0	0	0	0	0	0
Mobil Tangki	14	24	32	34	18	44
Moda Angkutan Umum						
Bus	434	425	537	540	379	236
Angkutan Kota	50	35	40	45	32	32
Taksi	24	24	22	25	16	12

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Rencana jalur Aglomerasi jurusan Solo-Wonogiri diharapkan tetap memperhatikan keberadaan angkutan perdesaan yang sudah ada,

dengan memberikan kesempatan pada pengusaha dan pengemudi eksisting untuk terlibat di dalam pengelolaannya. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk pencapaian SDG's terkait peningkatan jumlah pengguna angkutan umum di perkotaan, utamanya optimalisasi layanan angkutan umum aglomertasi perkotaan (Trans Jateng) Solo—Sukoharjo—Wonogiri yang mulai operasional Agustus 2023:

1. Pembangunan shelter integrasi dengan moda kereta api di lahan eks gedung bioskop.Shelter di lahan eks gedung bioskop akan dibangun pada tahun 2023 ini dengan anggaran APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023. Saat ini shelter sudah tebangun.
2. Pembangunan shelter dan Tempat Pemberhentian Bus (TPB) di ruas jalan kabupaten. Pada bulan Juli ini akan dipasang 14 rambu-rambu tempat pemberhentian bus di titik-titik pemberhentian bus di jalan kabupaten, yaitu di Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Slamet Riyadi Sukoharjo. Pembangunan halte/ shelter akan dilaksanakan di tahun 2023 dan 2024.
3. Penjajagan pembangunan shelter yang besrumber dari CSR
   Pembangunan shelter dari CSR yang sudah dikoordinasikan sampai saat ini adalah dengan manajemen The Park dan penjajagan CSR dari karoseri Gunung Mas Madiun, sedangkan dari perusahaan lain belum dilakukan penjajagan.
4. Himbauan/Sosialisasi penggunaan angkutan umum
   Sosialisasi penggunaan angkutan umum akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini melalui sosialisasi langsung ke pelajar/masyarakat umum, penyebaran leaflet, dan spanduk.
5. Kajian / rencana re-routing angkutan umum perkotaan dan perdesaan sebagai feeder Trans Jateng. Kajian tentang rute angkutan umum sudah dilaksanakan pada trahun 2022 dengan judul "Kajian Revitalisasi Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022". Untuk pelaksanaan dari hasil kajian tersebut menunggu kebijakan pimpinan.
6. Himbauan pelakasanaan edu trip. Pelaksanaan edu trip akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Porpar
7. Penyiapan daya tarik wisata sebagai objek edu trip
   Penyiapan daya tarik wisata merupakan kewenangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
8. Penyiapan etalase produk UMKM lokal unggulan kab. Sukoharjo yang bisa diakses dari shelter Trans Jateng Akan dikoordinasikan dengan Disdagkop UKM

Melakukan Kajian Revitalisasi Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Sukoharjo sebagai feeder Trans Jateng.

Selain Trans jateng, di Kabupaten Sukoharjo juga sudah beroperasi *Buy The Service (BST)* koridor 5 dan 6 juga sudah melewati wilayah Kabupaten Sukoharjo. On Time Performance Layanan Transportasi *Buy The Service* koridor 5 dan 6 hampir tidak terjadi keterlambatan,

sebagian besar sudah tepat waktu. On Time Performance Transportasi untuk angkutan umum di Kabupaten Sukoharjo belum terjadwalkan secara teratur. Keberangkatan angkutan umum menyesuaikan kebutuhan penumpang pada jam-jam tertentu. Pada tahun 2027 mulai bulan Januari *Buy The Service (BST)* koridor 6 yang rutenya melewati Kabupaten Sukoharjo sudah resmi berhenti beroperasi, namun demikian masih ada Trans Jateng yang dapat mengcover penumpang di Kabupaten Sukoharjo.

f. Perkeretaapian

Pengelolaan perkeretaapian di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari dua hal yaitu kondisi stasiun kereta dan perlintasan kereta yang ada baik sebidang ataupun tidak sebidang.

Seperti yang diketahui wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat tiga stasiun kereta yang aktif melayani seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2. 162 Data Stasiun KA di Kabupaten Sukoharjo

No	Nama Stasiun	Lokasi	Kewenangan
1	Gawok	Kecamatan Gatak	Kementerian Perhubungan
2	Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	Kementerian Perhubungan
3	Nguter	Kecamatan Nguter	Kementerian Perhubungan

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Adapun panjang lintasan kereta api yang melewati Wilayah Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi dua jalur perlintasan yaitu jalur lintasan kereta nasional sepanjang 8,5 (delapan koma lima) kilometer dan jalur lintasan Surakarta - wonogiri sepanjang 21 (dua puluh satu) Kilometer. Jalur lintasan Surakarta - wonogiri terhitung mulai dari KM. 1+700 s.d KM. 22+700. Lintasan kereta tersebut melewati 37 (tiga puluh tujuh) titik perlintasan kereta sebidang dengan 16 (enam belas) perlintasan dijaga dan 21 (dua puluh satu) perlintasan tak terjaga. Titik perlintasan kereta tersebut terletak di 2 (dua) jalan Provinsi dan 35 (tiga puluh lima) jalan Kabupaten. Untuk meningkatkan layanan PT. KAI pada tahun 2023 lintasan kereta api jalur Surakarta - Wonogiri sedang dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN. Sedangkan di jalur lintasan nasional terdapat 37 (tiga puluh tujuh) perlintasan sebidang yang mana semuanya terletak di jalan kabupaten dan penjagaannya merupakan kewenangan PT. KAI. Selain perlintasan sebidang terdapat pula 2 (dua) perlintasan tidak sebidang yang terletak di Wilayah Desa Palur dan Desa Makamhaji. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 163 Data Perlintasan Tidak Sebidang di Kabupaten Sukoharjo

No	Lokasi	Kecamatan	Jumlah	Kewenangan	Jenis
1	Palur	Mojolaban	1	Kemen PUPR	Flyover
2	Makamhaji	Kartasura	1	Kementrian Perhbungan	Underpass

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Adapun rincian perlintasan sebidang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 164 Data Perlintasan di Kabupaten Sukoharjo

NO JPL	RESOR	LINTAS	KORIDOR	ANTARA	KM/HM	NAMA JALAN	KODYA/KAB	STATUS JPL	PENJAGA PERLINTASAN
1	x6.11 PALUR			PALUR-SLJB	257+459	BRIGIF PALUR	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PEMDA
2	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	1+706	Plumbon	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER – TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
3	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	3+505	Kyai Mojo	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PEMDA
4	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	3+888	Pabrik	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
5	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	5+236	Tegalmade	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
6	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	5+574	Nusa Indah	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
7	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	7+207	Kalisamin	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PEMDA
8	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	7+885	Pandeyan	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
9	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	9+585	Ring Road I	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PEMPROV
10	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	10+185	Norawi	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
11	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	10+741	Sidorejo	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
12	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	11+277	Nandan	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
13	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	11+575	Let Jend Sujono	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PEMDA
14	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	11+732	Duabelasan	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
15	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	12+075	Duabelasan	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
16	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	12+370	Tentara Pelajar	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PEMDA
17	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	13+082	Nglarangan	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
18	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	13+632	Dr. Muwardi	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PT KAI (JJ)
19	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	13+949	Honggopati	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
20	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	14+250	Sidoluhur	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA

NO JPL	RESOR	LINTAS	KORIDOR	ANTARA	KM/HM	NAMA JALAN	KODYA/KAB	STATUS JPL	PENJAGA PERLINTASAN
21	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	14+505	Dukuh	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
22	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	14+980	Ring Road II	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PEMPROV
23	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	15+335	Cenderawasih	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
24	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	15+950	Begajah	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PEMDA
25	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	16+997	Bogor	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
26	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	17+297	Bogor	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
27	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	18+537	Songgorunggi	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
28	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	18+680	Mento	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PEMDA
29	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	19+724	Kasuari	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
30	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	20+340	Ngrombot	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
31	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-WNG	21+415	Pasarnguter	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PEMDA
32	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-WNG	22+385	Telesan	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	PEMDA
33	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-WNG	22+575	Telesan	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
34	6.7 DELANGGU	Sm-Yk	SKO-KI	PWS-GW	114+055	Purbayan	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - DIJAGA	SWADAYA
35	6.7 DELANGGU	Sm-Yk	SKO-KI	PWS-GW	115+264	Mayang	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	DIJAGA PT.KAI
36	6.7 DELANGGU	Sm-Yk	SKO-KI	GW-DL	117+445	Gawok	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	DIJAGA PT.KAI
37	6.7 DELANGGU	Sm-Yk	SKO-KI	GW-DL	118+382	Blimbing	SUKOHARJO	REGISTER – DIJAGA	DIJAGA PT.KAI
	REGISTER – DIJAGA (PEMDA)	9							
	REGISTER – DIJAGA (PEMPROV)						2		
	REGISTER - TIDAK DIJAGA						15		
	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA						6		

NO JPL	RESOR	LINTAS	KORIDOR	ANTARA	KM/HM	NAMA JALAN	KODYA/KAB	STATUS JPL	PENJAGA PERLINTASAN
	DIKELOLA/DIJAGA PT. KAI						4		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Tabel 2. 165 Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(10)*
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	27.522	24.120	27.522	75.455	78.322	110.330
2	Rasio ijin trayek	0,00002	0,00002	0,00002	0,000029	0,000032	0,000029
3	Jumlah uji kir angkutan umum	198	123	198	273	396	280
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4	4	4	4	4	4
5	Persentase layanan angkutan darat	0,03043	0,0017	0,03043	0,03052	0,03073	0.03
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	76,44	72,78	76,44	78,22	97,53	77,157
7	Pemasangan Rambu- rambu	89,263	89,133	89,263	99,37	89,721	89,823
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,55	0,5000	0,55	0,45	0,52	0.56
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	973.281	741.600	973.281	1.035.944	1.361.312	1.650.305
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	71.280	64.800	71.280	72.530	61.774	70.543

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Kinerja urusan perhubungan Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan pada indikator jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2025 mengalami kenaikan penumpang menjadi 110.330 dibanding tahun 2024 sejumlah 78.332, rasio ijin trayek pada tahun 2025 sebesar 0,000029 menurun dari tahun 2024 sebesar 0,000032, jumlah uji kir angkutan umum tahun 2025 sejumlah 280 menurun dari tahun 2024 menjadi 396, layanan angkutan darat tahun 2025 sebesar 0,03, persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2025 mencapai 77,157% mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 97,53%, pemasangan rambu-rambu pada tahun 2025 sebesar 89,823% mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 89,721%, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum 2025 sejumlah 1.650.305 meningkat dari tahun 2024 sebesar 1.361.312.

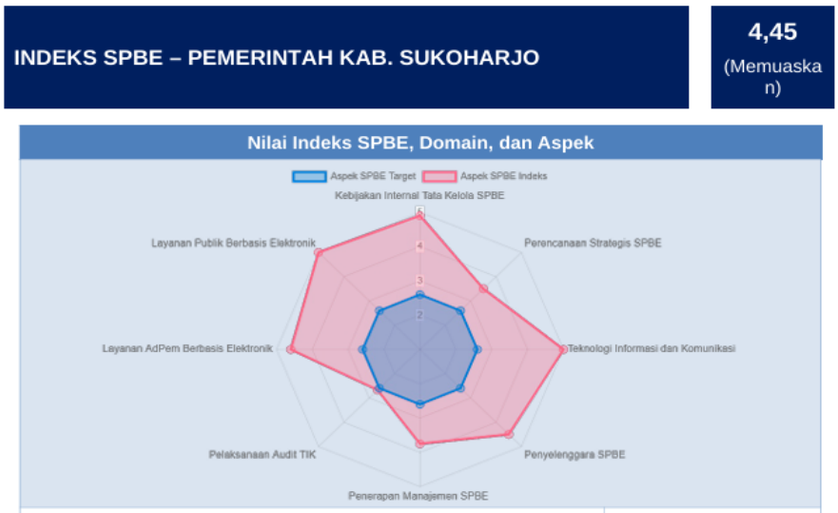
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang perhubungan dapat dilihat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Tahun 2025 nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 83,53 dengan kategori **Baik.** Ini menunjuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo puas dengan capaian kinerja Bidang Perhubungan, namun demikian masih perlu peningkatan kinerja Bidang Perhubungan.

10. Komunikasi dan Informatika

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Nilai SPBE tahun 2023 sebesar 4,35 dengan predikat MEMUASKAN. Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2024 oleh Kementerian PANRB, Pemkab Sukoharjo memperoleh nilai 4,45 dengan Predikat MEMUASKAN. Nilai SPBE mengalami peningkatan sebesar 0,10. Tahun 2025 Kabupaten Sukoharjo tidak termasuk lokus pemantauan dan evaluasi. Indeks SPBE terakhir tahun 2024.

Gambar 2. 41 Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**4,45**
Domain Kebijakan SPBE	4,90
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,90*
Domain Tata Kelola SPBE	4,30
Perencanaan Strategis SPBE	*3,50*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*5,00*
Penyelenggara SPBE	*4,50*
Domain Manajemen SPBE	3,45
Penerapan Manajemen SPBE	*3,75*
Audit TIK	*2,67*
Domain Layanan SPBE	4,76
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,60*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*5,00*

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo

SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) bertransformasi menjadi **Pemerintah Digital (Pemdi)**, yang dijadwalkan diimplementasikan secara penuh pada tahun 2027. Perubahan ini menitikberatkan pada integrasi layanan, dampak nyata bagi masyarakat, serta sinergi ekosistem digital, bukan sekadar penerapan sistem elektronik, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2025. Untuk menghindari Pembangunan aplikasi yang tumpeng tindih antar unit kerja dan untuk memberikan arah bagi pengembangan SPBE, Kabupaten Sukoharjo telah Menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dengan rentang waktu 5 tahun, tetapi belum ditetapkan menjadi kebijakan daerah karena masih menunggu acuan dari pusat. Untuk peningkatan layanan SPBE perlu dikembangkan sistem untuk mengintegrasikan layanan yang sudah ada sehingga akan memudahkan Masyarakat dalam memperoleh layanan.

Pembangunan infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Sukoharjo terus dilakukan dan diupayakan pengembangannya sehingga memungkinkan terkoneksinya perangkat daerah se-Kabupaten Sukoharjo dalam jaringan internet/intranet sehingga transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan lancar. Sejak tahun 2023 seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo sudah ter-coverage (terlayani telekomunikasi) Ketersediaan berbagai layanan dan sarana/prasarana informasi dan komunikasi di Kabupaten Sukoharjo tercatat, sebagai berikut:

Tabel 2. 166 Berbagai Layanan dan Sarana/Prasarana Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Kecamatan	Layanan Telepon Seluler	Jml BTS	Jml Provider	Jaringan Telepon	Jml Kant Pos	Kantor Pos Pemb	Kant Pos Kelilining	Jml Stasiun Radio	Jml Stasiun TV	VoIP	FO	Hotspot
Weru	13	16	7	4	1	2	13			1	13	14
Bulu	12	12	7	3	1	1	12			1	12	12
Tawangsari	12	11	17	6	1	-	12			1	12	12
Sukoharjo	14	29	12	14	1	12	14	1		1	14	16
Nguter	16	23	10	10	1	3	16			1	16	17
Bendosari	14	13	12	7	1	4	14			1	14	15
Polokarto	17	22	8	11	1	2	17			1	17	18
Mojolaban	15	29	11	11	1	1	15			1	15	16
Grogol	14	32	13	12	1	10	14	2		1	14	14
Baki	14	27	9	12	1	8	14	1	1	1	14	14
Gatak	14	13	12	6	1	3	14			1	14	14
Kartasura	12	53	14	12	1	13	12	2		1	12	12

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo

Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi dimaksudkan sebagai upaya mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Untuk mendukung sistem informasi dan

komunikasi pembangunan, masing-masing PD didorong untuk membangun jaringan komunikasi online melalui website. Pengguna website di Sukoharjo sudah 100% atau seluruh PD telah terkoneksi. Tujuan pembangunan web bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah mempermudah komunikasi dengan antar lembaga, dengan masyarakat maupun pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi. Komunikasi melalui website akan jauh lebih mudah karena tidak mengenal perbedaan lokasi baik jauh maupun dekat dan juga lebih efisien dalam hal biaya dan waktu. Pada tahun 2025 hotspot yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sejumlah 228, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sejumlah 226. Jumlah hotspot di tempat publik yang dikelola pemerintah kabupaten sejumlah 20. Penggunaan sandi oleh perangkat daerah dalam berkomunikasi sudah mencapai 100%.

Adapun perkembangan di bidang teknologi informasi di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 167 Perkembangan Teknologi Informasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

No	Jenis Perkembangan Teknologi Informasi	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah OPD yang terkoneksi internet	40	40	40	40	40
2	Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi internet	167	167	167	167	167
3	Jumlah hotspot yang dikelola Pemkab	210	217	224	226	228
4	Jumlah hotspot di tempat publik yang dikelola pemkab	12	12	19	20	20
5	Voip ke Kecamatan	12	12	12	12	12
6	Persentase OPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah sub-domain OPD	40	40	40	40	40
8	Jumlah domain desa	150	150	150	150	150
9	Perkada terkait tentang implementasi e-goverment	3	7	1	1	-

Sumber : Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Sukoharjo, 2021-2025

Untuk memberikan arahan strategis, terintegrasi, dan terukur dalam pembangunan kota guna meningkatkan kualitas hidup warga, pelayanan publik, serta efisiensi pengelolaan sumber daya melalui teknologi informasi dan komunikasi perlu disusun Rencana Induk Smart City. Kabupaten Sukoharjo telah menyusun Rencana Induk Smart City dan telah disahkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 tahun 2018. Dalam Rencana Induk Smart City pembangunan difokuskan pada enam strategy Smart City, yaitu Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment. Rencana Aksi Smart City terdiri atas pengembangan kebijakan dan kelembagaan, rencana pembangunan infrastruktur, pembangunan aplikasi, dan penguatan literasi Smart

City. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Penghargaan Implementasi Smart City Nusantara dari Telkom atas Implementasi dalam hal Infrastruktur Teknologi Informatika, aplikasi dan pemanfaatannya dalam pemerintahan, Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan aplikasi teknologi informatika dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi anggaran. Setiap desa di Kabupaten Sukoharjo juga telah terakses internet dan memiliki website dan juga sistem pengelolaan anggaran yang sudah online.

Dalam upaya pencapaian SPBE untuk mendukung Smart City perlu dilakukan:

a. Pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE dan harmonisasi kebijakan SPBE antara Provinsi dengan Kab/Kota.
b. Pemanfaatan hasil pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat, Media Informasi dan SDM penggiat Infokom dan publikasi informasi yang telah dilaksanakan provinsi, bila perlu bisa bekerjasama dengan pembuat konten bersama dan optimalisasi media penyiaran (misalkan radio daerah).
c. Computer Security Incident Response Team/CSIRT, perlu dibentuk kab/kota untuk penanganan insiden siber atau minimal untuk melakukan koordinasi terkait insiden siber.

11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan.

Persentase koperasi aktif di Tahun 2025 mengalami Peningkatan dibandingkan Tahun 2021, hal ini menunjukkan kegiatan koperasi mulai tumbuh seiring dengan kebijakan Pemerintah yang mendorong terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Capaian koperasi aktif masih perlu ditingkatkan agar seluruh koperasi yang ada menjadi koperasi yang aktif.

Tabel 2. 168 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
2021	356	435	81,84
2022	357	440	81,10
2023	341	818	41,68
2024	346	820	42,20
2025	523	626	83,55

Sumber : DISKOPUMDAG Kabupaten Sukoharjo

Tingkat keaktifan koperasi di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun, dari sebesar 81,84 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 42,20 persen di Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena banyak koperasi aktif yang naik badan hukum ke Provinsi. Secara umum tingkat keaktifan koperasi

dipengaruhi oleh keaktifan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi. Terdapat pula koperasi yang dibentuk karena adanya bantuan yang mengharuskan kelompok membentuk koperasi, sehingga pasca penerimaan bantuan, koperasi tidak lagi aktif dalam mengembangkan usaha koperasi. Selanjutnya di Tahun 2025 Koperasi Aktif di Sukoharjo mencapai 83,55% capaian ini belum optimal karena masih adanya koperasi yang tidak aktif dan perlu adanya pendampingan khusus.

b. Jumlah UMKM

Sedangkan menengenai usaha mikro, makro dan menengah di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada data berikut.

Tabel 2. 169 Jumlah UMKM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

TAHUN	JUMLAH (Unit)	VOLUME USAHA (000)
2021	227,405	36,877,590,000
2022	198,250	19,871,084,000
2023	203.580	20,438,138,000
2024	208.725	22.371.976.000
2025	210.864	NA

Sumber : Dinas Kopumdag Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas pada rentang Tahun 2020-2024 terjadi Penurunan jumlah UMKM Kabupaten Sukoharjo dari 227.405 Unit di Tahun 2021 dengan volume usaha sebesar Rp. 36.877.590.000 menjadi sebesar 208.725 unit di Tahun 2024 dengan volume usaha terbesar sebesar Rp. 22,371,976,000. sedangkan Jumlah di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 198.250 unit dengan Volume usaha 19.871.084.000 hal ini karena perpindahan dari usaha rumahan karena pandemic covid, pasca pandemi menjadi tenaga kerja di sektor industri dan jasa lainnya, namun berangsur menunjukkan tren positif mulai tahun 2023 dan tahun 2025 kembali naik dengan 210.864 unit UMKM

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB pada tahun 2025 sebesar ..... base line di tahun 2025 ditetapkan sesuai SE Sekda Provinsi Jawa Tengah sebesar .....

12. Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus melaksanakan kewenangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut antara lain memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui capaian indikator penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo selam kurun waktu 2021-2025. Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA) tahun 2021 – 2025 cenderung meningkat. Pada tahun 2021 sebanyak 4.659 investor, dan meningkat menjadi sebanyak 18.402 investor di tahun 2023. Namun di tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 15.926 investor dan naik kembali di tahun 2025 sebanyak 17.867 investor hal ini menunjukkan bahwa perlu upaya promosi investasi dan pelayanan perijinan investasi yang berkelanjutan dan menunjukkan adanya pemulihan minat investasi meskipun masih menghadapi tantangan stabilitas.

Tabel 2. 170 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Pertumbuhan jumlah investor (PMDN/PMA)
2021	4.659 investor	14,14%
2022	10.881 investor	144,5%
2023	18.402 investor	69,1%
2024	15.926 investor	-14,34%
2025	17.867 investor	12,18%

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2021–2025 menunjukkan pola fluktuatif, dimana pada Tahun 2021 sebesar Rp9,56 triliun, kemudian melonjak signifikan pada Tahun 2022 menjadi Rp 83,01 triliun yang dipengaruhi oleh penyesuaian dan migrasi data dalam implementasi sistem Online Single Submission (OSS-RBA), sehingga baik investasi lama maupun baru tercatat kembali dalam sistem. Selanjutnya, pada Tahun 2023 nilai investasi menurun drastis menjadi Rp 8,37 triliun dan terus menurun hingga Tahun 2025 sebesar Rp 4,81 triliun, yang mengindikasikan belum stabilnya realisasi investasi serta masih adanya ketergantungan pada proyek investasi.

Tabel 2. 171 Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA (rupiah)	Kenaikan / Penurunan Nilai Investasi PMDN dan PMA (%)
2021	9.561.654.680.139	5,71
2022	83.015.810.589.710	788,22 *
2023	8.371.459.678.872	-89,91
2024	7.223.692.108.020	-13,71
2025	4.807.053.924.064	-33,45

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Dari aspek ketenagakerjaan, penyerapan tenaga kerja pada perusahaan PMDN dan PMA menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2022, yaitu dari 52.450 orang pada tahun 2020 menjadi 101.401 orang pada tahun 2022. Namun setelah itu terjadi penurunan menjadi 86.559 orang pada tahun 2023, 68.069 orang pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 60.362 orang pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran karakteristik investasi dari yang bersifat padat karya menuju padat modal, sehingga berdampak pada berkurangnya daya serap tenaga kerja.

Tabel 2. 172 Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMDN dan PMA	62.208	101.401	86.559	68.069	60.362
Jumlah Investor PMDN dan PMA	4.659	10.811	18.402	15.726	17.867

Sumber: Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka

Tabel 2. 173 Target dan Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025

Tahun	Target (Juta Rp)	Realisasi (Juta Rp)	Persentase Realisasi
2021	1.770.000,00	895.102,22	50,57%
2022	1.110.000,00	1.903.201,48	171,46%
2023	2.000.000,00	1.460.604,48	73,03%
2024	900.000,00	943.143,17	104,79%
2025	1.500.000,00	2.219.242,33	147,95%

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo (berdasarkan LKPM)

Berdasarkan tabel tersebut, capaian realisasi investasi di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021 realisasi investasi masih relatif rendah, yaitu sebesar 50,57 persen dari target, kemudian meningkat secara bertahap pada tahun 2022 dengan realisasi mencapai 171,46 persen dari target, yang dipengaruhi oleh peningkatan pelaporan LKPM pasca implementasi OSS-RBA. Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi investasi kembali mengalami penurunan menjadi 73,03 persen, namun pada tahun 2024 dan 2025 kembali menunjukkan perbaikan dengan capaian masing-masing sebesar 104,79 persen dan 147,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi, secara umum realisasi investasi masih mampu melampaui target pada beberapa tahun tertentu.

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

a. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Pembangunan Pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta berperan penting untuk memetik bonus demografi. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur dengan Indeks pembangunan Pemuda (IPP) dan telah menjadi indikator dalam RPJMN maupun RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2027.

Kinerja pembangunan pemuda Kabupaten Sukoharjo menunjukan perkembangan positif, target RPJMD sebesar 40 dapat terlampaui, meski pada awalnya (Tahun 2021) hanya sebesar 41,77, namun pada tahun 2022 dapat mencapai 52,53, tahun 2023 mencapai 54,59 dan tahun 2024 mencapai 60,83, dan tahun 2025 mencapai 69,20. Kenaikan yang cukup signifikan ini dapat dicapai karena adanya perbaikan terhadap metode dan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap ketersediaan data pendukung. Hal ini merupakan konsekuensi positif dari pelaksanaan perhitungan IPP

tahun sebelumnya sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan perbaikan yang cukup merata.

b. Cakupan Pemberdayaan Pemuda

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada pemuda dan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya. Berikut gambaran bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025.

Tabel 2. 174 Jumlah Pemuda di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021– 2025

No	Kecamatan	2021		2022		2023		2024		2025	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	W e r u	6.122	5.820	6.320	8.488	6.122	5.820	6.320	8.488	6.518	6.518
2	B u l u	4.210	3.818	4.296	5.421	4.210	3.818	4.296	5.421	4.108	4.108
3	Tawangsari	6.193	5.925	6.302	8.415	6.193	5.925	6.302	8.415	6.375	6.375
4	Sukoharjo	10.543	10.464	10.592	14.900	10.543	10.464	10.592	14.900	11.288	11.288
5	Nguter	5.725	5.568	5.892	8.089	5.725	5.568	5.892	8.089	6.240	6.240
6	Bendosari	6.712	6.596	6.858	9.463	6.712	6.596	6.858	9.463	7.329	7.329
7	Polokarto	9.365	9.222	9.413	13.110	9.365	9.222	9.413	13.110	9.992	9.992
8	Mojolaban	10.065	9.856	10.023	14.002	10.065	9.856	10.023	14.002	10.508	10.508
9	Grogol	13.615	13.085	13.891	18.880	13.615	13.085	13.891	18.880	13.711	13.711
10	B a k i	7.780	7.538	7.900	10.850	7.780	7.538	7.900	10.850	8.200	8.200
11	Gatak	5.775	5.450	5.837	7.891	5.775	5.450	5.837	7.891	6.174	6.174
12	Kartasura	12.134	11.857	12.165	16.278	12.134	11.857	12.165	16.278	12.781	12.781
JUMLAH		99.489	98.239	95.199	99.489	135.784	98.239	95.199	99.489	103.186	103.224

Sumber: Dispora Kabupaten Sukoharjo & Hasil Analisis

Perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan pada tahun 2025 terlihat berimbang, yaitu 50,01% perempuan dan 49,99% laki-laki. Adapun jumlah pemuda (laki-laki dan perempuan) tertinggi adalah di Kecamatan Grogol sebesar 27.424 jiwa, sedangkan jumlah pemuda (laki-laki dan perempuan) terendah

adalah di Kecamatan Bulu 8.328 jiwa. Secara umum, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 175 Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021– 2025

No	Kecamatan	Jumlah Organisasi Pemuda				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	W e r u	2	1	1	1	1
2	B u l u	-	-	-	-	-
3	Tawangsari	1	1	1	1	1
4	Sukoharjo	13	15	16	17	18
5	Nguter	-	-	-	-	-
6	Bendosari	9	11	11	11	11
7	Polokarto	-	-	-	-	-
8	Mojolaban	-	-	-	-	-
9	Grogol	3	3	3	3	3
10	B a k i	-	1	1	1	1
11	Gatak	-	-	-	-	-
12	Kartasura	4	4	4	4	4
JUMLAH		**24**	**32**	**36**	**37**	**38**

Sumber: Dispora Kabupaten Sukoharjo & Hasil Analisis

Dari data tersebut, terlihat bahwa secara kuantitatif, jumlah pemuda berkurang, namun secara kualitas mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah organisasi pemuda yang tersebar di setiap kecamatan. Artinya, pemuda mulai banyak yang sadar dan terlibat dalam suatu organisasi.

c. Cakupan Prestasi Olahraga

Pengembangan di bidang olahraga dibentuk untuk mewadahi prestasi atlet lokal atau para bibit atlet untuk dapat lebih berkembang di kancah yang lebih besar. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Sukoharjo tiap tahun selalu mengalami perubahan, dari sejumlah 180 atlet berprestasi di Tahun 2021, turun di angka 160 di tahun 2022, hingga sejumlah 175 atlet berprestasi di tahun 2023 dan 2024, hingga pada tahun 2025 mencapai 200 atlet berprestasi. Akan tetapi, peningkatan jumlah atlet berprestasi tersebut berbanding terbalik dengan jumlah prestasi olahraga yang dicapai, karena dari 200 atlet berprestasi di tahun 2025 tersebut hanya mampu mencatatkan 271 prestasi olahraga. Artinya, cabang-cabang olahraga yang menghasilkan prestasi berkurang, namun memunculkan atlet-atlet berprestasi yang lebih banyak.

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 memiliki 311 klub olah raga, angka ini meningkat, karena sejak tahun 2020 jumlah klub olahraga hanya sejumlah 217, demikian juga dengan ketersediaan gedung olahraga yang berjumlah 152 gedung olahraga.

Tabel 2. 176 Perkembangan Kepemudaan & Keolahragaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

No	Capaian Pembangunan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Klub Olahraga	217	217	217	217	311
2	Jumlah Gedung Olahraga	152	152	152	152	152
3	Jumlah Atlet Berprestasi	180	160	170	175	200
4	Jumlah Prestasi Olahraga	180	225	450	540	271
5	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	46	83	88,89	91,89	94,59
6	Jumlah Organisasi / Klub Olahraga	34	42	50	50	50

Sumber : Dispora Kab. Sukoharjo

Upaya untuk mengoptimalkan sarana prasarana olahraga harus terus digalakkan baik dari sisi kualitas pada sarpras yang sudah ada maupun menambah jumlah/kuantitasnya. Dari upaya perbaikan sarana prasarana keolahragaan ini diharapkan mampu memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan keolahragaan serta diharapkan juga makin meningkatkan minat para pengurus cabang olahraga untuk menggelar event-event keolahragaan yang secara otomatis akan meningkatkan minat masyarakat untuk hidup sehat dengan berolahraga..

14. Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral masih menjadi penyebab keterlambatan penyajian data untuk pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan n+2, sedangkan data yang tersedia adalah n-1. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan dengan penyusunan dokumen analisis makro ekonomi, analisis PDRB, analisis IPM, dokumen database daerah, pengelolaan Portal Satu Data serta koordinasi pengelolaan data bersama dengan BPS.

15. Persandian

Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi untuk mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termuat dalam Bab V pasal 17 huruf c 6 persandian merupakan bagian dari yang dikecualikan. Masalah persandian pada pemerintah

daerah sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persandian masuk menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kewenangan pertama yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu terkait dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JIK) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Adapun layanan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam urusan persandian:

a. Layanan penyampaian informasi melalui radio komunikasi
b. Layanan pendistribusian informasi melalui faximile
c. Layanan pengamanan ruangan kerja pimpinan
d. Layanan pengamanan rumah dinas pimpinan
e. Layanan pengamanan pada kegiatan strategis pimpinan
f. Layanan telekomunikasi intra pemerintahan berbasis internet (VoIP)
g. Layanan IT Security assessment
h. Layanan pengamanan data dan aplikasi e-government
i. Layanan sertifikat elektronik memuat tandatangan elektronik
j. dukungan layanan pengamanan VVIP (Presiden dan Wapres)
k. layanan penanggulangan insiden siber (TTIS / SukoharjoKab-CSIRT)
l. layanan email terenkripsi melalui sanapati.net

Jumlah Perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah tahun 2025 sejumlah 39 perangkat daerah.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dimana Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Sarana Keamanan Informasi dengan fasilitasi penerbitan sertifikat elektronik dalam hal ini TTE bagi Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Sukoharjo dengan capaian target 95 persen

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

a. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan
b. Tata Kelola Keamanan Informasi
c. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
d. Kerangka Kerja Keamanan Informasi

e. Pengelolaan Aset Informasi
f. Teknologi dan Keamanan Informasi
g. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (Cloud Service) dan Perlindungan Data Pribadi.

Untuk keperluan Indeks KAMI, tingkat kematangan tersebut didefinisikan sebagai:

a. Tingkat I – Kondisi Awal
b. Tingkat II – Penerapan Kerangka Kerja Dasar
c. Tingkat III – Terdefinisi dan Konsisten
d. Tingkat IV – Terkelola dan Terukur
e. Tingkat V – Optimal

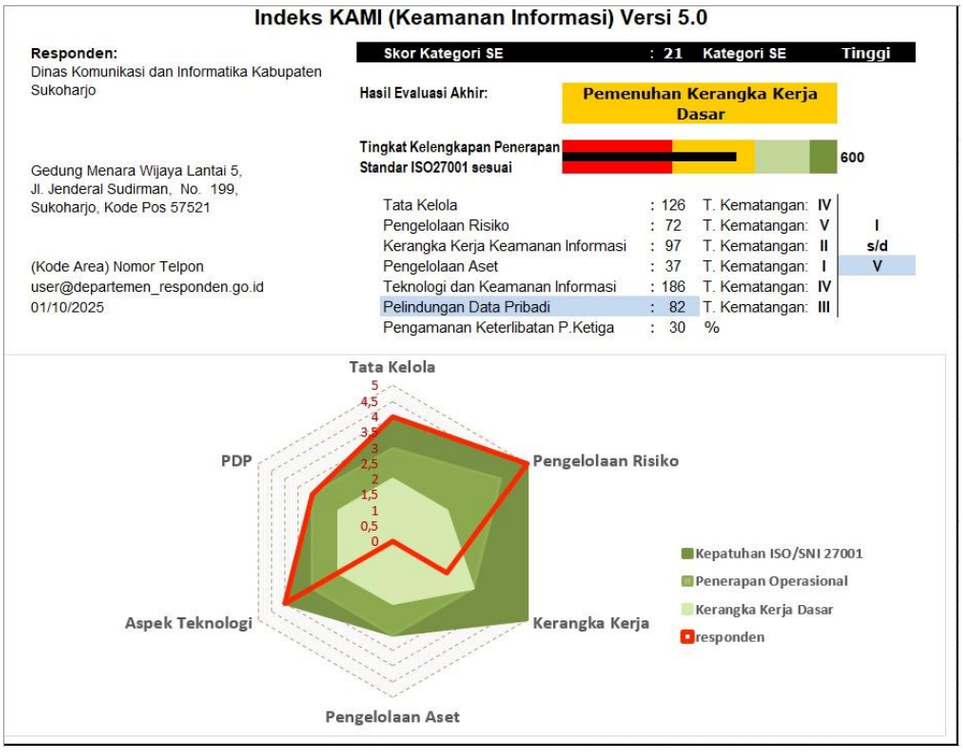
Untuk membantu memberikan uraian yang lebih detil, tingkatan ini ditambah dengan tingkatan antara – I+, II+, III+, dan IV+, sehingga total terdapat 9 tingkatan kematangan

Sebagai awal, semua responden akan diberikan kategori kematangan Tingkat I. Sebagai padanan terhadap standar ISO/IEC 27001, tingkat kematangan yang diharapkan untuk ambang batas minimum kesiapan sertifikasi adalah Tingkat III+.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Tingkat kelengkapan penerapan standar ISO dengan capaian nilai 600 dari target.

Gambar 2. 42 Gambar Indeks KAMI



Sumber : Diskominfo Kab. Sukoharjo

16. Kebudayaan

Pembangunan dan melestarikan kebudayaan diusahakan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkokoh ketahanan budaya. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keragaman suku bangsa dan bahasa. Termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Sukoharjo, terdapat beberapa suku-bangsa, tetapi mayoritas adalah suku Jawa. Cagar Budaya yang dimiliki daerah meliputi:

a. Benda Cagar Budaya jumlah 192 buah
b. Bangunan Cagar Budaya jumlah 24 buah
c. Situs Cagar Budaya jumlah 6 lokasi
d. Kawasan Cagar Budaya jumlah 2 kawasan

Sedangkan untuk bahasa, menggunakan bahasa lokal (bahasa Jawa). Untuk kawasan wisata budaya meliputi:

a. Wisata situs bersejarah meliputi:
   - Patilasan Keraton Kartasura dan Keraton Pajang di Kecamatan Kartasura;
   - Pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol;
   - Peninggalan Pabrik Gula Gembongan, Peninggalan Benteng Singopuran, dan Pesanggrahan Kandang Menjangan di kecamatan Kartasura;
b. Wisata religi/ziarah meliputi:
   - Makam Ki Ageng Purwoto Sidik dan makam Kyai Banyubiru di Kecamatan Weru;
   - Makam Balakan dan makam Mbah Marbot/Sayyidiman di Kecamatan Bendosari;
   - Makam Majasto di Kecamatan Tawangsari;
   - Makam Kyai Shirot dan makam Patih Pringgoloyo di Kecamatan Kartasura;
c. Wisata Benda Cagar Budaya di Univet, Kecamatan Bendosari.

17. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat belajar (learning society) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Peningkatan minta baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 177 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Kunjungan selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang harus dilayani	Rasio
2021	132.722	898.448	14,77
2022	351.930	911.603	38,61
2023	379.979	916.627	41,45
2024	463.222	932.680	49,67
2025	470.647	916.472	51,35

Sumber: Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kab. Sukoharjo

Melihat perkembangan rasio jumlah pengunjung terhadap jumlah populasi yang harus dilayani di Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat adanya tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2025.

a) **Tahun 2021**: Di tahun 2021, jumlah pengunjung melonjak tajam menjadi **132.722** orang, sementara populasi yang harus dilayani sedikit meningkat menjadi 898.448 jiwa. Rasio pengunjung terhadap populasi pun melonjak menjadi **14,77**, mencerminkan peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh pembukaan kembali akses ke perpustakaan setelah penurunan pembatasan pandemi dan pelaksanaan program digitalisasi layanan yang mempermudah akses masyarakat.
b) **Tahun 2022**: Tahun 2022 menunjukkan angka kunjungan yang lebih tinggi lagi, yakni **351.930** pengunjung. Meskipun jumlah populasi sedikit meningkat menjadi 911.603 jiwa, rasio pengunjung terhadap populasi kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi **38,61**. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan semakin sukses dalam menarik minat masyarakat untuk mengunjungi, baik secara langsung maupun melalui program-program berbasis digital yang memperluas jangkauan.
c) **Tahun 2023**: Pada tahun 2023, jumlah pengunjung kembali meningkat menjadi **379.979**, sementara jumlah populasi yang harus dilayani mencapai 916.627 jiwa. Rasio pengunjung terhadap populasi mencapai **41,45**, yang mencerminkan tren pertumbuhan yang konsisten. Ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan layanan perpustakaan, seperti penyediaan koleksi yang lebih relevan dan peningkatan layanan digital, semakin berdampak positif terhadap minat masyarakat.
d) **Tahun 2024**: Hingga tahun 2024, jumlah pengunjung terus meningkat tajam menjadi **463.222** orang, dengan jumlah populasi yang harus dilayani mencapai 932.680 jiwa. Rasio pengunjung terhadap populasi naik menjadi **49,67**, yang menunjukkan hampir setengah dari populasi yang dilayani mengunjungi perpustakaan, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, seperti GELIS, Ndog Dadar, TITIKBACA, Eperpus

Sukoharjo: digital library, Perpustakaan Digital Berbasis Web, Sukoharjo Library Breaking News. Selain itu ada beberapa inovasi berbasis layanan berbasis Inklusi Sosial seperti WILIS, PISA KUSUKA.

e) **Tahun 2025**: kinerja layanan perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan capaian yang sangat positif, dengan jumlah pengunjung mencapai 470.647 orang meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 463.222 orang, sementara jumlah populasi yang harus dilayani tercatat sebesar 916.472 jiwa sehingga menghasilkan rasio kunjungan sebesar 51,35 yang mengindikasikan bahwa lebih dari separuh masyarakat telah memanfaatkan layanan perpustakaan baik secara langsung maupun melalui platform digital. Tren peningkatan yang signifikan sejak tahun 2021 mencerminkan keberhasilan transformasi layanan, terutama melalui digitalisasi perpustakaan seperti E-Perpus Sukoharjo dan pengembangan perpustakaan berbasis web, serta inovasi layanan berbasis inklusi sosial seperti TITIKBACA, WILIS, dan PISA KUSUKA yang mampu memperluas jangkauan layanan hingga ke komunitas. Namun demikian, mulai melandainya pertumbuhan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengembangan ke depan tidak lagi semata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan, melainkan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, penguatan literasi masyarakat yang lebih mendalam, serta pemerataan akses terutama di wilayah perdesaan melalui pengembangan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat (community hub), layanan perpustakaan keliling berbasis digital, dan penguatan ekosistem literasi keluarga dan komunitas sebagai bagian dari strategi pembangunan sektor perpustakaan dan kearsipan pada RKPD Tahun 2027.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo telah berhasil meningkatkan rasio jumlah pengunjung terhadap jumlah populasi yang harus dilayani dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan perpustakaan dalam merespons kebutuhan masyarakat akan akses informasi, baik secara fisik maupun digital, serta menunjukkan bahwa program pengembangan perpustakaan berjalan dengan baik dan efektif.

Tabel 2.178 Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	132.722	351.930	379.979	463.222	470.647
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	76.380	76.881	92.002	120.624	124.307
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,066	0,069	0,070	0,072	0,074

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/ tahun	11.060	29.328	31.665	38.602	39.220
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	368.618	468.683	645.878	924.250	546.345
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	270	270	270	287	327

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo antara tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dalam jumlah pengunjung, koleksi buku, maupun kualitas sumber daya manusia. Sejak tahun 2021 hingga 2025, seluruh jenis perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo terlibat dalam pencatatan pengunjung dan koleksi. Peningkatan jumlah pengunjung dan koleksi buku yang terus berkembang menunjukkan adanya upaya yang lebih intensif dalam memperluas akses dan layanan perpustakaan kepada masyarakat.

Analisis kinerja ini akan mengulas capaian-capaian tersebut serta memberikan gambaran mengenai perkembangan perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir.

a) **Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (Eksemplar):** Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sebagai bagian dari upaya penguatan layanan literasi masyarakat. Pada tahun 2021, jumlah koleksi tercatat sebanyak 76.380 eksemplar, kemudian meningkat menjadi 76.881 eksemplar pada tahun 2022 dan kembali bertambah cukup signifikan menjadi 92.002 eksemplar pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih pesat terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah koleksi mencapai 120.624 eksemplar, dan terus bertambah hingga 124.307 eksemplar pada tahun 2025. Pertumbuhan koleksi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang berkualitas, baik dalam bentuk buku cetak maupun digital, sekaligus mendukung penguatan budaya literasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sumber pengetahuan yang beragam dan mudah diakses.

b) **Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk:** Rasio perpustakaan per satuan penduduk di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang gradual meskipun masih relatif rendah. Pada tahun 2021, rasio tercatat sebesar 0,066 dan mulai meningkat menjadi 0,069 pada tahun 2022, kemudian kembali naik menjadi 0,070 pada tahun 2023. Peningkatan berlanjut pada tahun 2024 dengan rasio mencapai 0,072, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 0,074. Kenaikan

ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan perpustakaan serta meningkatkan ketersediaan fasilitas perpustakaan bagi masyarakat. Namun demikian, capaian rasio tersebut masih menunjukkan bahwa pemerataan akses layanan perpustakaan belum optimal, sehingga ke depan diperlukan penguatan strategi melalui penambahan unit layanan perpustakaan, pengembangan perpustakaan berbasis komunitas, serta optimalisasi perpustakaan digital guna menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.

c) **Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun:**

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan sebagai dampak dari pengembangan layanan dan inovasi yang dilakukan. Pada tahun 2021, rata-rata pengunjung tercatat sebesar 11.060 orang, kemudian meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 29.328 orang dan terus bertambah menjadi 31.665 orang pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih tinggi terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 38.602 orang, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 39.220 orang. Tren ini menunjukkan bahwa perpustakaan semakin diminati oleh masyarakat sebagai pusat pembelajaran, informasi, dan aktivitas literasi. Meskipun demikian, laju pertumbuhan yang mulai melandai pada tahun 2025 mengindikasikan perlunya inovasi lanjutan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan, diversifikasi kegiatan literasi, serta penguatan akses berbasis digital dan inklusi sosial guna menjaga keberlanjutan minat masyarakat terhadap perpustakaan

d) **Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan:**

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah koleksi tercatat sebanyak 368.618 judul, kemudian meningkat menjadi 468.683 judul pada tahun 2022 dan terus bertambah menjadi 645.878 judul pada tahun 2023. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah koleksi mencapai 924.250 judul, yang mencerminkan upaya intensif dalam memperkaya dan memperluas ragam koleksi bahan pustaka guna memenuhi kebutuhan literasi masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah koleksi judul buku tercatat menurun menjadi 546.345 judul. Penurunan ini bukan disebabkan oleh berkurangnya koleksi secara riil, melainkan karena adanya penyesuaian cakupan penghitungan, di mana pada tahun 2025 hanya menghitung koleksi judul buku pada perpustakaan dalam wilayah kewenangan pembinaan, yaitu perpustakaan umum kabupaten, perpustakaan desa/kelurahan/komunitas, perpustakaan SD, dan perpustakaan SMP, sedangkan perpustakaan SMA dan perguruan tinggi tidak lagi

termasuk dalam cakupan perhitungan sehingga tidak dihitung dalam total koleksi.

e) **Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat:** Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan. Pada tahun 2021, jumlah tenaga yang memiliki sertifikat tercatat sebanyak 270 orang, dan relatif stabil pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah yang sama, kemudian meningkat menjadi 287 orang pada tahun 2024 dan kembali bertambah menjadi 327 orang pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar pustakawan dan tenaga teknis di Kabupaten Sukoharjo telah mengikuti berbagai workshop atau pelatihan dan memperoleh sertifikat kepesertaan sebagai bentuk peningkatan kompetensi. Peningkatan jumlah SDM bersertifikat ini menjadi indikator penting dalam mendukung profesionalisme layanan perpustakaan, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan pada berbagai indikator utama, seperti peningkatan jumlah pengunjung, pertumbuhan koleksi buku baik eksemplar maupun judul, bertambahnya jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki sertifikat, serta meningkatnya rasio perpustakaan per satuan penduduk. Tren peningkatan yang konsisten ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor perpustakaan, baik dari sisi peningkatan kualitas layanan, perluasan aksesibilitas, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, terutama dalam pemerataan distribusi layanan perpustakaan di seluruh wilayah serta optimalisasi pemanfaatan perpustakaan digital yang semakin penting dan relevan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat.

18. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan daerah di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan capaian yang relatif stabil dan cenderung meningkat pada beberapa indikator utama. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku tercatat konsisten sebesar 100% dari tahun 2021 hingga 2025, yang menandakan seluruh perangkat daerah telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan. Dari sisi peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola arsip, terjadi kenaikan dari 2 orang pada tahun 2021 menjadi 3 orang pada tahun 2022 dan relatif stabil hingga tahun 2025. Sementara itu, tingkat kunjungan layanan dan wisata arsip menunjukkan fluktuasi, dari 44 kunjungan pada tahun 2021,

menurun menjadi 32 kunjungan pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 49 kunjungan pada tahun 2023 dan mencapai 52 kunjungan pada tahun 2024, sebelum kembali berada pada angka 44 kunjungan di tahun 2025.

Di sisi lain, cakupan arsip yang berhasil dikelola menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang, meskipun sempat mengalami penurunan pada awal periode. Pada tahun 2021 jumlah arsip yang dikelola tercatat sebanyak 43.173 arsip, kemudian sedikit menurun menjadi 42.330 arsip pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 43.123 arsip pada tahun 2023 serta 43.501 arsip pada tahun 2024, hingga mencapai 43.729 arsip pada tahun 2025. Tren ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah. Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan kearsipan daerah menunjukkan arah yang positif, didukung oleh konsistensi penerapan standar kearsipan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pengelolaan arsip sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis informasi.

Tabel 2. 179 Perkembangan Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Presentase Perangkat Daerah yang Mengelola arsip secara baku	100	100	100	100	100
2	Peningkatan SDM Pengelola Arsip	2	3	3	3	3
3	Tingkat Kunjungan layanan dan Wisata Arsip	44	32	49	52	44
4	Cakupan Arsip yang berhasil dikelola	43.173	42.330	43.123	43.501	43.729

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Realisasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2025 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 180 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2025

Indikator	Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	19,50	23,06	23,70	24,20	24,80
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	12.843	14.662	14.791	14.476	14.908 ,10
Persentase cakupan bina kelompok perikanan (%)	100	100	100	100	100
Peningkatan Produksi Ikan (%)	**4,28**	**4,46**	**3,22**	**3,16**	**3,36**

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

Konsumsi ikan tahun 2025 sebesar 24,80 kg/kap/tahun meningkat dengan Konsumsi ikan pada tahun 2024 sebesar 24,20 kg/kap/tahun, sedangkan produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 tercapai 14.908 ada peningkatan dari capaian tahun 2023 yang sebesar 14.476 ton, sedangkan Persentase cakupan bina kelompok perikanan di tahun 2024 tercapai 100%

Tercapainya target konsumsi ikan perkapita ditunjang dengan kebijakan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pengolah hasil Perikanan dan pembinaan pengolah dan pemasar hasil Perikanan. Kebijakan ini didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan seperti:

1) Penyuluhan Gemar Makan Ikan (GEMARI)
2) Bazar Olahan Ikan
3) Rapat Koordinasi FORIKAN

2. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya.

Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri dari Objek wisata alam, Objek wisata buatan, Objek wisata ziarah, dan Objek wisata. Capaian kinerja urusan pariwisata kabupaten Sukoharjo sebagai berikut. Beberapa objek wisata di wilayah Kabupaten Sukoharjo meliputi:

a. Objek wisata alam, di antaranya
1. Objek Wisata Batu Seribu di Kecamatan Bulu.
2. Gunung Sepikul di Kecamatan Bulu.
3. Curug Krajan di Kecamatan Weru
4. Telaga Claket di Kecamatan Nguter.
5. Gunung Taruwongso di Kecamatan Sukoharjo.
6. Gunung Pegat di Kecamatan Bulu.
7. Sendang Sumurup, Juron di Kecamatan Nguter

b. Objek wisata buatan, di antaranya:
1. Pandawa Water World di Kecamatan Grogol
2. Royal Water Adventure di Kecamatan Grogol
3. Dam Colo di Kecamatan Nguter
4. Pemandian Sendang Pinilih di Kecamatan nguter
5. Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari
6. Alas Karet di Kecamatan Polokarto
7. The Heritage Palace di Kecamatan Kartasura
8. Kiddoland di Kecamatan Nguter

9. Desa Wisata Wirun di Kecamatan Mojolaban, dengan produk khasnya adalah gamelan
10. Desa Wisata Kenep di Kecamatan Sukoharjo, dengan produk khasnya Karak dan jenang.
11. Desa Wisata Sonorejo di Kecamatan Sukoharjo, dengan produk khasnya tatah sungging (wayang kulit).
12. Kawasan perbelanjaan di Solobaru, Kecamatan Grogol

c. Objek wisata ziarah, di antaranya:

1. Makam Ki Ageng Balak di Kecamatan Polokarto.
2. Pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol
3. Makam Ki Ageng Sutowijoyo di Kecamatan Tawangsari
4. Makam Ki Ageng Purwotosidik di Kecamatan Weru
5. Makam Mbah Sayidiman dan Goa Mertan di Kecamatan Bendosari
6. Candi Sonosewu di Kecamatan Mojolaban.

d. Objek wisata sejarah, di antaranya:

1. Petilasan Keraton Pajang di Kecamatan Baki
2. Petilasan Keraton Kartasura di Kecamatan Kartasura.
3. Selain itu Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai wisata Seni Budaya, di antaranya ritual Pulung Langse, Kebo Kinul dan Jurit Suropaten

Salah satu bagian integral dari perkembangan pariwisata suatu daerah adalah kulinernya. Warung makan dan restoran merupakan hal yang tidak lepas dari kegiatan pariwisata. Usaha penyediaan makanan selain dapat mendukung kegiatan pariwisata namun juga bisa menjadi daya tarik wisata utama. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui wisata kuliner khas sehingga dapat menarik kepuasan wisata yang berkunjung di Sukoharjo. Beberapa kuliner khas di Kabupaten Sukoharjo antara lain yaitu jenang dodol, krasikan, alakatak, ayam goreng kampung dan masih ada banyak lagi. Berikut adalah persebaran warung makan dan restoran yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Rumah Makan/ Restauran di Sukoharjo yang telah memiliki izin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 181 Perkembangan Rumah Makan yang Memiliki Izin TDUP Kabupaten Sukoharjo

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Weru	-	1	7	6	6
2	Bulu	4	2	9	7	7
3	Tawangsari	5	2	18	9	9
4	Sukoharjo	15	20	29	41	54
5	Nguter	2	2	21	19	20
6	Bendosari	5	5	18	28	29
7	Polokarto	6	2	11	16	18
8	Mojolaban	7	8	26	27	30
9	Grogol	18	115	63	51	59
10	Baki	26	7	39	19	22
11	Gatak	4	7	22	21	22

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
12	Kartasura	23	35	123	80	95
TOTAL		115	206	386	324	371

Sumber: Disporapar Sukoharjo

Data rumah makan/restoran yang sudah memiliki izin mengalami peningkatan di Tahun 2021 sampai 2023 dan jumlah terbanyak pada tahun 2023 sebanyak 386, namun di tahun 2024 menurun menjadi 324 dan naik kembali di tahun 2025 menjadi 371. Rumah makan yang berizin belum terdistribusi secara merata pada tiap Kecamatan, di Kecamatan Bulu, Weru dan Tawangsari jumlah yang berizin masih rendah.

Tabel 2. 182 Jumlah Warung Makan Dan Restoran di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Weru	1	1	-	59	59
Bulu	2	2	-	29	31
Tawangsari	2	2	2	63	69
Sukoharjo	16	20	5	194	228
Nguter	2	2	2	77	83
Bendosari	6	5	3	79	89
Polokarto	-	2	5	77	83
Mojolaban	8	8	3	112	122
Grogol	102	115	35	223	263
Baki	7	7	7	129	144
Gatak	7	7	2	61	72
Kartasura	17	35	24	309	347
Kabupaten Sukoharjo	170	206	88	1.412	1.590

Sumber: Disporapar Sukoharjo

Perkembangan jumlah warung makan dan restoran dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa antusias pengembang usaha kuliner dalam masih tinggi. Potensi ini dapat digunakan untuk menunjang atraksi dan amenitas wisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo, namun di tahun 2023 mengalami penurunan jumlah pelaku kuliner dan bangkit kembali pada tahun 2024 dan 2025 peningkatan jumlah warung makan dan restoran di Sukoharjo yang menunjukkan antusias pengembang usaha kuliner di Sukoharjo meningkat.

Akomodasi merupakan hal penunjang dalam wisata dengan menggunakan bangunan atau Sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Akomodasi yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo berupa hotel berbintang dan hotel non bintang, serta akomodasi lainnya. Data jumlah hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 183 Jumlah hotel dan penginapan di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	Hotel Berbintang					Hotel non bintang dan akomodasi lainnya				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Weru										
Bulu										
Tawangsari										
Sukoharjo	1	1	1	1	1	1	1	1		
Nguter										
Bendosari			1	1	1	1	1	1		
Polokarto										
Mojolaban				1	1					
Grogol	7	7	8	8	8	1	1	1	1	1
Baki	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1
Gatak	-					-		1	1	1
Kartasura	-		3	3	3	-		2	2	2
Kab. Sukoharjo	**9**	**9**	**14**	**16**	**16**	**4**	**4**	**7**	**5**	**5**

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Selama tahun 2021 sampai 2025 jumlah hotel berbintang yang ada di Kabupaten Sukoharjo jumlahnya bertambah dari 9 Hotel menjadi 16 Hotel, terbanyak berlokasi di Kecamatan Grogol sejumlah 8 Hotel berbintang, sedangkan hotel non bintang mengalami kenaikan di tahun 2023 dengan jumlah 7 hotel non bintang, namun di tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan menjadi 5 hotel non bintang. Secara umum jumlah penginapan dan hotel di sukoharjo mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun mulai 2021 sampai 2025. hal ini menunjukkan bahwa Usaha perhotelan di Sukoharjo di Tahun 2023 mengalami peningkatan setelah pandemi Covid-19.

Tabel 2. 184 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kunjungan wisata	0	33.147	90.180	95.052	331.259
PAD sektor pariwisata (Ribu Rupiah)	n.a	165.735	2.234.760	1.960.684	177.980.000

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

Jumlah tamu wisatawan lokal dan mancanegara menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, mulai sejak terjadi covid-19 tahun 2021 yang terjadi pembatasan /penutupan kunjungan tempat wisata di menjadi 33.147 di tahun 2022 dan bertambah menjadi 331.259 di tahun 2025. Hal dimaksud sebanding dengan PAD sektor pariwisata yang terjadi kenaikan dengan nilai PAD di Tahun 2025 sebesar Rp. 177.980.000.

3. Pertanian

Berdasarkan data eksisting penggunaan lahan pertanian (Ladang dan Sawah) di Kabupaten Sukoharjo sebesar 21.664,643 ha untuk sawah irigasi dan 3.121,691 ha untuk ladang. Data tersebut diambil berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

Urusan pertanian di Kabupaten Sukoharjo meliputi sektor tanaman pangan, data capaian kinerja pada sektor pertanian sebagai berikut:

Tabel 2. 185 Capaian Kinerja Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Indikator	Capaian				
	2022	2023	2023	2024	2025
Produksi padi (ton)	389.248	399.793	388.275	340.997	375.737
Produktivitas padi (kw/ha)	74,49	73.14	74,78	70,64	69,850
Produksi jagung (ton)	18.812	17.702	21.964	18.494	17.006
Produktivitas jagung (kw/ha)	94	96.54	102,45	88,05	105,070
Produksi kedelai (ton)	5.875	3.527	2.587	2.050	1.042
Produktivitas kedelai (kw/ha)	25	23,58	23,48	22,33	20,930
Produksi kacang tanah (ton)	2.799	1.983	1.747	1.455	2.591
Produksi hortikultura (bawang merah, cabe, melon, semangka (ton)	1.924	2.618	2.748,6	2.442,4	2.086
Produksi biofarma (ton)	1.399	NA	1.587,8	1.587,9	1.663,591
Produksi ubi kayu (ton)	14.987	1.315	8.969	9.654	7.513
Produktivitas ubi kayu (kw/ha)	310	287	271,78	279,83	267,35
Rata-rata konsumsi energi (Kkal/kap/hari)	2.150	NA	NA	NA	NA
Rata-rata ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	3.882	NA	NA	NA	NA
Produksi kelapa (ton)	597	598	599	591,2	602,55
Produksi lada (ton)	0,30	0,2	0,18	0,19	0
Produksi mete (ton)	72	72	72	72,19	73,17
Produksi tebu (ton)	2.933,00	2.010,23	2.043,22	1.374,45	2.568,11
Produksi hasil peternakan (daging) (ton)	13.905	14.462	NA	14.384,28	20.674,799
Produksi hasil peternakan (telur) (ton)	13.422	13.947	NA	14.031,195	238.056,366

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

a. Produktivitas Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Data produktivitas tanaman pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 186 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi	310.778	399.793	388.275	340.997	375.737
2	Jagung	30.277	17.702	21.964	18.494	17.006
3	Ubi Kayu	19.331	13.135	8.969	9.654	7.513
4	Ubi Jalar	0	0	0	0	0
5	Kacang Tanah	4.654	1.893	1.747	1.455	2.591
6	Kacang Kedelai	4.805	3.527	2.587	2.050	1.042
7	Kacang Hijau	28	94	10	27	47
TOTAL		369.873	369.873	423.552	372.677	403.936

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian

Produksi tanaman pangan Kabupaten Sukoharjo ada kecenderungan menurun dari tahun 2021-2025, komponen tanaman pangan produksi padi pada tahun 2024 terbapai 375.737 ton lebih tinggi dari capaian tahun 2024 yang sebesar 340.997 ton.

b. Produktivitas Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, kentang, dan tomat. Data produktivitas tanaman hortikultura dapat dilihat pada tebel berikut.

Tabel 2. 187 Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bawang Merah	707	767	732,2	842,4	779
2	Bawang Putih	0	0	0	0	0
3	Cabai Besar	179,7	236,7	67,4	106,4	90,1
4	Cabai Rawit	13,7	53,1	431,1	544,4	364,8
5	Kentang	0	0	0	0	0
6	Tomat	0	28,4	0	0	44,5
TOTAL		900,4	1.084,8	1.215,7	1.493,2	1.278,4

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian

Selama periode 2021-2024, produksi tanaman holtikultura di Kabupaten Sukoharjo mengalami tren menaik. Pada tahun 2024 Bawang Merah mencapai 842,4 ton dan Cabai Rawit produksinya mencapai 544,4 ton. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan bawang merah menjadi 779 ton dan Cabai rawit 364,8 ton

c. Produktivitas Tanaman Buah-Buahan

Tanaman buah-buahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari mangga, durian, jeruk siam, pisang, papaya, salak, rambutan, dan Nangka/ cempedak. Data produktivitas tanaman buah-buahan dapat dilihat pada tebel berikut.

Tabel 2. 188 Produksi Tanaman Buah-Buahan Sukoharjo Tahun 2021-2025 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Mangga	12243,9	1581,9	15.251,2	14.658,2	10.640
2	Durian	7,1	114,1	73	96,9	71,5
3	Jeruk Siam	104,9	94,06	97	79,4	26,194
4	Pisang	5836,6	11916,3	11.899,3	12.069,2	8.301,93
5	Pepaya	2210,7	1908,8	1.872,5	2.041,0	1.280,856
6	Salak	0	0	0,1	0	0
7	Rambutan	1463,2	2695,3	968,9	1.268,1	959,5
8	Nangka/ Cempedak	2487,5	1523	1.532,2	1.557,8	1.193,910
JUMLAH		24.353,9	19.833,46	31.694,2	31.770,5	21.514,39

Sumber : Analisis Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian

Produktivitas tanaman buah-buahan di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 sampai 2024 cenderung naik pada angka 31.770,5 pada tahun 2024 namun mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi 21.514,39. Penurunan disumbang dari produksi buah Mangga dan pisang dan cempedak.

d. Produktivitas Tanaman Biofarmaka

Tanaman biofarmaka yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, dan temulawak. Data produktivitas tanaman biofarmaka dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 2. 189 Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jahe	165,865	106,313	104,692	113,242	132,475
2	Lengkuas	88,098	91,017	97,845	93,289	99,482
3	Kencur	58,673	47,265	59,573	67,846	82,295
4	Kunyit	660,921	827,393	691,584	633,428	647,591
5	Lempuyang	116,381	162,94	125,364	111,568	70,850
6	Temulawak	56,662	112,115	76,401	79,584	135,020
JUMLAH		1.146,6	1.373,488	1.155.459	1.098,957	1.167,713

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian

Selama periode 2021-2025, produktivitas tanaman biofarmaka di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 jumlah produksi mengalami jumlah tertinggi sebesar 1.373,488 terjadi penurunan di tyahun 2023 dan 2024, namun mengalami kenaikan kembali di tahun 2025 sebesar 1.167,713 walau belum mencapai hasil tertinggi selama 5 tahun.

e. Produktivitas Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari tebu, tembakau, kelapa, cengkeh, kapuk, mete, kemiri, dan wijen. Data produktivitas tanaman perkebunan dapat dilihat pada tebel berikut.

Tabel 2. 190 Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025(Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tebu	2.933,00	2.168,00	2.043,22	1.425,83	2.568,11
2.	Tembakau	101,00	100,00	120,42	265,00	319,70
3.	Kelapa	602,59	602,62	602,74	590,66	602,55
4.	Cengkeh	-	-	-	-	-
5.	Kapuk	70,21	70,20	69,86	-	70,57
6.	Mete	72,00	72,13	72,18	69,21	73,17
7.	Kemiri	75,00	73,00	71,00	-	-
8.	Wijen	0	0	0	-	-
JUMLAH		3.853,80	3.085,95	2.979,42	2.350,7	3.634,1

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian

Selama periode 2021-2024, produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun pada tahun mengalami tren penurunan, pada tahun 2024 produksi tanaman perkebunan pada angka yang terkecil yaitu 2.350,7 ton. Namun berdasarkan data BPS terdapat potensi produksi perkebunan baru yaitu berupa Tebu, sehingga di Tahun 2025 Tanaman Tebu menyumbang 2.568,11 ton yang mendorong capaian produksi perkebunan tahun 2025 naik menjadi 3.634,1 ton. Pengembangan produksi perkebunan ini perlu didorong guna mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo.

Sektor pertanian juga merupakan andalan setelah sektor perindustrian dan perdagangan. Luas lahan pertanian di

Kabupaten Sukoharjo per Desember akhir 2025 tercatat sebesar 20.078 Ha. Dari jumlah tersebut, terdiri atas sawah irigasi teknis 14.179 Ha, sawah irigasi ½ teknis 1.696 Ha, irigasi sederhana 2.086 Ha, dan sawah tadah hujan 2.117 Ha.

Dari 14.179 irigasi teknis tersebut, 73% di antaranya tergantung pada aliran Dam Colo, sedangkan sisanya tergantung pada aliran irigasi provinsi atau kabupaten. Selain sumber irigasi teknis, petani juga menggunakan sumber pengairan lainnya seperti sumur dalam. Data hingga September 2019 melaporkan bahwa kondisi pertanian di Kabupaten Sukoharjo tercatat seluas 11.934 Ha. Terdiri atas tanaman padi seluas 10.914 Ha, tanaman perkebunan 167 Ha, hortikultura 148 Ha, dan palawija 71 Ha. Kondisi ini ditambah masih adanya potensi lahan yang dapat ditanami sebesar 1.535 Ha.

Tabel 2. 191 Peternakan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2025 (ekor)

NO	JENIS PETERNAKAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
TERNAK BESAR						
1.	Kuda Muda	50	119	169	29	31
2.	Kuda Dewasa	198	205	263	39	41
3.	Kerbau Muda	216	232	243	52	29
4.	Kerbau Dewasa	393	399	414	89	50
5.	Sapi Muda	14.363	14.048	14.312	10.561	9.807
6.	Sapi Dewasa	16.721	12.886	13.150	9.032	8.387
TERNAK KECIL						
1.	Ayam Ras	5.688.115	5.830.367	5.873.955	12.517.651	14.496.518
2.	Ayam Bukan Ras	893.428	1.082.875	1.137.228	1.182.717	1.360.124
3.	Itik Muda	59.673	78.729	87.345	68.946	79.288
4.	Itik Dewasa	185.552	204.628	213.244	168.322	193.571

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ternak besar didominasi oleh ternak sapi dewasa. Sedangkan untuk ternak kecil didominasi oleh ternak ayam ras. Jumlah sapi dewasa cenderung turun dari tahun ke tahun hal ini perlu diupayakan daya dukung lahan dan ketersediaan pakan serta upaya kesehatan hewan yang selalu diperhatikan agar populasi sapi dan umumnya peternakan dapat ditingkatkan.

Pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Sukoharjo meliputi beberapa aktivitas Vaksin AI, Vaksin Rabies, pengobatan cacing pada hewan dan pengobatan massal.

Tabel 2. 192 Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Pelayanan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Vaksin AI	55.100	-	20.850	53.200	61.200
2	Vaksin Rabies	460	-	111	0	170
3	Pengobatan Cacing	2.039	2.106	2.363	2.798	6.658
4	Pengobatan Massal + Vaksinasi (PMK/Antrax/LSD)	474	-	30.000	9.436	14.425

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo

Jumlah petani dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun petani milenial ada peningkatan sampai tahun 2024, sebagaimana data berikut:

Tabel 2. 193 Data Petani Milenial (orang)

Tahun	Jumlah Petani	Petani Milenial	%
2021	44.662	2.771	6,20
2022	43.783	4.476	10,22
2023	42.488	5.076	11,94
2024	41.968	5.083	12,11
2025	39.814	345	0,8

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo

Dari tahun 2021 sampai tahun 2025 jumlah petani mengalami penurunan, jumlah petani milenial mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 sebesar 12,11% dari jumlah petani di Kabupaten Sukoharjo, namun di tahun 2025 jumlah petani milenial turun menjadi 0,8 % dari jumlah petani di Sukoharjo, perlu upaya keras untuk meningkatkan Petani di Sukoharjo agar tenaga kerja di bidang pertanian terjaga

4. Perdagangan

Pembangunan sektor perdagangan sampai dengan Tahun 2025 mencapai hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 194 Jumlah Pengusaha di Kabupaten Sukoharjo

No	Tahun	Jumlah Pengusaha				Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
1	2021	-	-	-	-	1.194
2	2022	-	-	-	-	1.319
3	2023	15.088	2.507	147	467	18.209
4	2024	13.528	1.662	145	390	15.726
5	2025	15.319	1.828	284	476	17.907

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Setelah diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, maka semua perijinan berusaha harus melalui sistem OSS. Disamping itu semua perijinan berusaha tidak lagi diklasifikasikan berdasarkan SIUP Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, tetapi didasarkan pada modal yang ada yaitu modal dibawah 50 juta masuk kriteria Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan diatas 50 juta masuk Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik , dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka TDP (Tanda Daftar Perusahaan) diganti dengan Nomor Induk Berusaha, yang berlaku Identitas Pelaku Usaha.

Tabel 2. 195 Jumlah Perusahaan yang Mendaftar NIB pada Tahun 2021- 2025

No	Tahun	Jenis Perusahaan						Jumlah
		PT	Koperasi	CV	Firma	Perorangan	Badan Usaha Lainnya	
1	2021	142	4	251	1	1.389	46	1.833
2	2022	369	19	380	2	4.535	64	5.369
3	2023	169	9	318	-	1.652	52	2.200
4	2024	355	10	375	-	8.765	38	9.543
5	2025	508	147	510	3	11.233	270	12.671

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan menyatakan bahwa pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran perusahaan mendapatkan NIB yang berlaku sebagai TDP. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS *(Online Single Submission)* setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Jumlah perusahaan yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NIB di tahun 2024 sejumlah 9.543 perusahaan didominasi dari NIB untuk perusahaan perorangan yang mencapai 8.765 ijin.

a. Kontribusi Terhadap PDRB

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2021 hingga tahun 2025 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Kabupaten Sukoharjo dan hingga saat ini merupakan dua besar sub sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan. Nilai PDRB ADHK sektor perdagangan tahun 2025 sebesar Rp. 6.104.590 juta, nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Rp 9.234.210 juta yang memberikan kotribusi terhadap total PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo sebesar 17,26 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 196 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025 (JutaRupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2021**	2022**	2023**	2024	2025
1	Nilai total PDRB	27.634.117,53	29.185.359,18	30.657.930	32.188.460	33.951.060
2	Nilai Sektor Perdagangan	5.025.998,71	5.233.435,1	5.493.860	5.783.310	6.104.590
3	Kontribusi (%)	18,19	17,93	17,92	17,97	17,98

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Sedangkan berikut adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2. 197 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai total PDRB	38.90.458,19	42.780.630,00	46.479.600,00	49.928.420,00	53.489.290,00
2	Nilai Sektor Perdagangan	6.736.676,76	7.319.940,00	7.970.830,00	8.605.120,00	9.234.210,00
3	Kontribusi (%)	17,28	17,11	17,15	17,23	17,26

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

b. Realisasi Ekspor

Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebutsebagai "*Ekspor Neto*", apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Tabel 2. 198 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2021–2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Net ekspor(X–M) ADHB*(juta Rp)*	877,45	1.327,65	1.705,38	1.963,65	2.628,51
PDRB ADHB *(juta Rp)*	38.990,46	42.780,63	46.479,60	49.928,42	53.489,29
Proporsi (%)	2,26	3,10	3,67	3,93	4,91

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo

Selama periode 2021-2025, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Sukoharjo dengan luar negeri dan antar kabupaten/provinsi menunjukkan nilai positif dan cenderung semakin meningkat. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran uang masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai "surplus luar wilayah". Pada tahun 2025, neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai 2.628,51 juta rupiah.

Ekspor perdagangan tahun 2021 mencapai US$ 156,372,255.66 kondisi ini didukung dengan kegiatan industri peralatan kesehatan saat pandemic Covid-19, di tahun 2022 menurun menjadi US$ 110.829.969,98 namun berangsung meningkat dari tahun ke tahun menjadi 146.441.965,02 pada tahun 2025 dengan perincian sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2. 199 Data Realisasi Ekspor Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025

NO	TAHUN	NILAI FOB (USD)	IDR (Rp)	Kenaikan dari tahun sebelumnya
1	2021	156,372,255.66	2.236.123.255.938,00	-38,53%
2	2022	110.829.969,98	1.744.170.387.401,20	-0,22%

NO	TAHUN	NILAI FOB (USD)	IDR (Rp)	Kenaikan dari tahun sebelumnya
3	2023	107.677.106,89	1.668.995.156.795,00	-2,84%
4	2024	130.081.667,68	2.126.705.184.900,00	20,81%
5	2025	146.441.965,02	2.477.431.943.226,85	12,58%

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo

c. Realisasi Import

Sedangkan mengenai kegiatan impor, Kabupaten Sukoharjo melalui perusahaan-perusahaan besar yang ada sebagai bahan utama dan bahan pendukung kegiatan industri tidak tersaji secara sektoral.

Nilai impor Sukoharjo lebih kecil dari nilai ekspornya, sehingga pada tahun 2021 terjadi surplus neraca perdagangan. Surplus perdagangan pada tahun 2021 mencapai 872,63 milyar rupiah. Nilai impor pada tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo tidak tersaji secara sektoral.

- Rasio Kewirausahaan Daerah;
  Kewirausahaan Daerah di tahun 2023 sebesar 2,8 dan base line di tahun 2025 ditetapkan sesuai SE Sekda Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,37
- Disparitas Harga;
  Disparitas harga tahun 2023 sebesar 0,61 base line di tahun 2025 ditetapkan sesuai SE Sekda Provinsi Jawa Tengah sebesar + 10.

5. Perindustrian

Pembangunan sektor industri untuk menumbuhkembangkan home industri di pedesaan sesuai potensi desa, meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, dan memperkuat penguasaan teknologi peralatan dalam upaya pencapaian akses pasar dan penguasaan modal.

Sektor industri memiliki kinerja terhadap sumbangan PDRB Kabupaten Sukoharjo yang menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) untuk sektor industri pada tahun 2025 sebesar Rp 12.127.500 Juta dan memberikan kontribusi sebesar 36,13% terhadap total PDRB sebesar Rp 33.951.060 Juta. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 200 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHK Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai total PDRB	27.634.117,53	29.185.360	30.661.920	32.187.410	33.951.060
2	Nilai Sektor Industri	10.408.909,89	10.870.880	11.222.390	11.629.360	12.127.500
3	Kontribusi (%)	37,67	37,25	36.60	36,16	36,13

Sumber:BPS Kabupaten Sukoharjo

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2025 sebesar Rp 20.341.000 Juta dan memberikan kontribusi sebesar 38,03% terhadap total PDRB sebesar Rp 53.489.290 juta. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025 dalam tabel berikut:

Tabel 2. 201 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai total PDRB	38.990.458,19	42.819.990	46.521.250	49.987.030	53.489.290
2	Nilai Sektor Industri	15.198.038,15	16.573.920	17.828.170	19.069.260	20.341.000
3	Kontribusi (%)	38,98	38,74	38,32	38,14	38,03

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Sektor industri dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan perkonomian daerah, yaitu mencapai 36,13 % pada tahun 2025 ada penurunan dibanding kontribusi di tahun 2024 yang sebesar 36,16 %. Penurunan Sektor industri karena kelesuan industri Tekstil di Sukoharjo.

Posisi Sektor industri merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan di sektor industri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 202 Jumlah Industri Kecil, Sedang, Besar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Bidang Usaha	Jumlah Usaha				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kecil	706	1.172	2.778	3.754	5.773
Menengah	116	205	14	17	13
Besar	52	241	64	67	73
Jumlah	**874**	**1.618**	**2.858**	**3.838**	**5.859**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas jumlah industri di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. Peningkatan ini didukung terutama oleh pertumbuhan jumlah industri kecil yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Industri kecil ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2. 203 Data Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kecamatan Weru	118	131	138	213	123
2	Kecamatan Bulu	56	62	65	256	78
3	Kecamatan Tawangsari	74	83	87	145	105
4	Kecamatan Sukoharjo	52	58	61	462	419
5	Kecamatan Nguter	268	298	314	157	393
6	Kecamatan Bendosari	78	86	91	135	2318

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
7	Kecamatan Polokarto	256	284	299	228	193
8	Kecamatan Mojolaban	680	755	795	569	433
9	Kecamatan Grogol	133	147	155	436	621
10	Kecamatan Baki	227	253	266	394	289
11	Kecamatan Gatak	206	229	241	310	173
12	Kecamatan Kartasura	197	219	230	449	628

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Sukoharjo

Pada tahun 2021-2025 di kecamatan wilayah Kabupaten Sukoharjo, jumlah industri kecil dan menengah masih di angka dua digit, upaya menumbuhkan industri kecil dan menengah agar merata di wilayah Kabupaten Sukoharjo di tahun 2027 mampu mencapai angka 3 digit serta pesebaran pertumbuhannya merata, kondisi perolehan di tahun 2025 perlu upaya dampingan dan peningkatan akses daya saing Industri kecil dan menengah serta dipertahankan dan ditingkatkan jumlahnya.

Tabel 2. 204 Data Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian di Kabupaten Sukoharjo

No	Tahun	Jumlah Proyek	Pertanian	Non Pertanian
1	2021	550	4	546
2	2022	2.410	10	2.400
3	2023	2.589	16	2.573
4	2024	2.878	29	2.856
5	2025	14.059	311	13.800

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Sukoharjo

Usaha Kecil dan Menengah non pertanian menunjukkan tren menaik, hal ini perlu upaya dalam mempertahankan jumlah usaha non pertanian tetap eksis dan berkotribusi lebih banyak agar kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB di Sukoharjo semakin naik

Peran industri penyediaan makan dan minum di kabupaten Sukoharjo memiliki kontribnusi dengan tren menaik sejak tahun 2021 sampai 2025 dari 3,59 persen menjadi 4,29 persen di tahun 2025. Distribusi PDRB ADHB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dalam tabel berikut :

Tabel 2. 205 Industri Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Tahun	% Kontribusi	Selisih (Tahun ini-Tahun Lalu)
2021	3,59	0,04
2022	3,82	0,23
2023	3,94	0,12
2024	4,05	0,11
2025	4,29	0,24

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Sukoharjo

Dengan bertambahnya kontribusi industri penyediaan makan dan minum di kabupaten Sukoharjo dari tahun 2021 sampai 2025

menunjukkan bahwa kegiatan ini tumbuh dan perlu dukungan agar pertumbuhannya tidak hanya sebagas jumlah/kuantitas danum juga dari segi kualitas (daya saing usaha dan Volume usaha juga meningkat)

6. Transmigrasi

Program penempatan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.

Pada tahun 2020, tidak dilaksanakan pemberangkatan transmigrasi sebagai dampak dari antisipasi wabah pandemi Covid-19. Hal tersebut menyebabkan kegiatan transmigrasi berupa penjajagan, cek lokasi, pemberangkatan, dan pemodalan calon transmigran tidak dapat direalisasikan yang mengacu pada surat edaran Direktorat Jendral Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI nomor B.676/PKT.04.01/IV/2020 tentang penundaan Transmigrasi tahun 2020. selanjutnya pada tahun 2023 tidak terlaksana karena tidak mendapatkan kuota dari Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2. 206 Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	5 KK	2 KK	20 %
2022	5 KK	2 KK	40 %
2023	2 KK	1 KK	50 %
2024	5 KK	0 KK	0 %
2025	5 KK	0 KK	0 %

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dalam rangka melakukan kegiatan pemberangkatan trasmigran ke lokasi transmigrasi, peran Pemerintah Daerah adalah melakukan persiapan berupa sosialisasi program dan penyampaian informasi lokasi tujuan transmigrasi, sehingga diperlukan penguatan informasi dari daerah tranmigran agar menarik minat masyarakat untuk bertransmigrasi

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pemkes

1. Sekretariat Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 207 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020- 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
IRB	55,24	59,59	72,92	86,2	

Sumber: KemenpanRB Republik Indonesia

Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sebanyak 9 (sembilan) hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut :

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil *(result oriented government)*. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan pada RPJMD periode baru dilanjutkan dengan perbaikan Renstra Perangkat Daerah (PD) dengan kualitas yang lebih berorientasi hasil. Selan itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga telah meningkatkan kualitas penyajian laporan kinerja pada level pusat dengan menyajikan analisis kinerja dan analisis penggunaan sumber daya serta tingkat akurasi data yang lebih baik.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai 66,94 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit

perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut ditampilkan seperti tabel berikut:

Tabel 2. 208 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	20,20	20,55	21,52	21,90	
2	Pengukuran Kinerja	30	13,66	17,44	17,66	17,82	
3	Pelaporan Kinerja	15	9,99	10,74	10,77	10,87	
4	Evaluasi Kinerja	25	5,91	14,85	15,09	16,35	
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**60,07**	**63,58**	**65,04**	**66,94**	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**B**	**B**	**B**	**B**	

Sumber: KemenpanRB

c. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah mampu memenuhi harapan masyarakat, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja unit pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan publik. Evaluasi dilaksanakan dengan meminta pendapat masyarakat selaku pihak penerima/pengguna pelayanan, evaluasi pemenuhan standar kepatuhan dan pengembangan inovasi pelayanan publik serta pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). Salah satu metode evaluasi kinerja pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan dan hasilnya disusun dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 yang telah disampaikan dapat disimpulkan dengan hasil pengukuran kepuasan masyarakat pada tiap-tiap Unit Pelayanan Publik dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 209 Rekapitulasi Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UIT PELAYANAN
1.	Dinas P dan K	86,72	B	Baik
2.	Dinas Kesehatan	85,56	B	Baik
3.	Dinas PUPR	87,67	B	Baik
4.	Satpol PP (dan Damkar)	84,70	B	Baik
5.	Dinas Sosial	86,76	B	Baik
6.	Dinas Lingkungan Hidup	84,78	B	Baik
7.	Dinas Dukcapil	89,83	A	Sangat Baik
8.	Dinas Perhubungan	83,53	B	Baik
9.	Dinas Kominfo	86,26	B	Baik
10.	Dinas PM & PTSP	90,67	A	Sangat Baik
11.	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	86,79	B	Baik
12.	Dinas Pertanian & Perikanan	84,08	B	Baik
13.	Dinas Dagkop UKM	87,99	B	Baik
14.	Dinas Perindustrian &Tenaga Kerja (Bid. Penta)	91,42	A	Sangat Baik
15.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan	90,13	A	Sangat Baik

NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UIT PELAYANAN
	dan Aset Daerah			
16.	BKPSDM	91,20	A	Sangat Baik
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88,63	A	Sangat Baik
18.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85,39	B	Baik
19.	RSUD Ir. Soekarno	84,50	B	Baik
20.	Kecamatan Kartasura	86,12	B	Baik
21.	Kecamatan Gatak	84,94	B	Baik
22.	Kecamatan Baki	91,36	A	Sangat Baik
23.	Kecamatan Grogol	88,61	A	Sangat Baik
24.	Kecamatan Mojolaban	90,09	A	Sangat Baik
25.	Kecamatan Polokarto	89,97	A	Sangat Baik
26.	Kecamatan Bendosari	89,79	A	Sangat Baik
27.	Kecamatan Nguter	88,94	A	Sangat baik
28.	Kecamatan Sukoharjo	91,65	A	Sangat Baik
29.	Kecamatan Tawangsari	89,36	A	Sangat baik
30.	Kecamatan Bulu	83,54	B	Baik
31.	Kecamatan Weru	89,33	A	Sangat baik
32.	Kelurahan Jombor	83,11	B	Baik
33.	Kelurahan Kartasura	90,69	A	Sangat baik
34.	Kelurahan Ngadirejo			
35.	Kelurahan Banmati			
36.	Kelurahan Begajah			
37.	Kelurahan Bulakan			
38.	Kelurahan Bulakrejo			
39.	Kelurahan Combongan			
40.	Kelurahan Dukuh			
41.	Kelurahan Gayam	86,47	B	Baik
42.	Kelurahan Jetis			
43.	Kelurahan Joho			
44.	Kelurahan Kenep	80,00	B	Baik
45.	Kelurahan Kriwen			
46.	Kelurahan Mandan	100	A	Sangat Baik
47.	Kelurahan Sonorejo			
48.	Kelurahan Sukoharjo			
49.	Puskesmas Weru			
50.	Puskesmas Bulu			
51.	Puskesmas Tawangsari			
52.	Puskesmas Sukoharjo			
53.	Puskesmas Nguter	87,88	B	Baik
54.	Puskesmas Bendosari			
55.	Puskesmas Polokarto			
56.	Puskesmas Mojolaban			
57.	Puskesmas Grogol			
58.	Puskesmas Baki			
59.	Puskesmas Gatak	81,32	B	Baik
60.	Puskesmas Kartasura			
61.	UPTD Laboratorium Kesehatan			
62.	UPTD Benih Pertanian			

NO	UNIT PELAYANAN	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UIT PELAYANAN
63.	UPTD Pembibitan Ternak, Ikan dan IB			
64.	UPTD Rumah Potong Hewan dan Puskeswan			
65.	UPTD Balai Latihan Kerja			
66.	Perumda Air Minum Tirta Makmur	77,19	B	Baik
67.	PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	85,17	B	Baik
68.	PD Percada	81,33	B	Baik
NILAI RATA-RATA		**87,15**	**B**	**Baik**

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Sukoharjo

Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar 87,15 yang berarti pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di tahun 2025 masuk dalam kategori “B” atau “Baik”.

Berdasarkan data yang telah dirangkum dalam tabel hasil survei indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Mayoritas dari Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yaitu 24 Unit Pelayanan Publik, mendapatkan predikat mutu pelayanan, “B” atau “Baik”.
b. 17 Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan predikat mutu pelayanan “A” atau “Sangat baik
c. Pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 ini Unit Pelayanan Publik tidak ada yang mendapatkan predikat mutu pelayanan “C” atau “Kurang baik”

Tabel 2. 210 Penghitungan IKM Institusi Pelayanan Bidang Kesehatan, Investasi, dan Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

IKM TAHUN 2025				
INSTITUSI PELAYANAN BIDANG KESEHATAN			INSTITUSI PELAYANAN BIDANG INVESTASI (DPMPTSP)	INSTITUSI PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN (DISDUKCAPIL)
DINKES	RSUD			
86,56 (B)	84,50 (B)		90,67 (A)	89,83 (A)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Sukoharjo (data diolah)

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada

tahun 2025, usulan Raperda yang masuk ke Propemperda Tahun 2025 sebanyak 7 Raperda, 7 Raperda usulan Bupati dan 6 Raperda Komulatif Terbuka yang terdiri atas Raperda APBD dan Raperda Komulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Agung, Raperda Komulatif Terbuka akibat Pembatalan atau Klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Tengah. Untuk tahun 2025 tidak ada usulan raperda inisiatif DPRD.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipasif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akess dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam rangka menciptakan konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah pemerintah daerah, perlu adanya kendali penyusunan RKPD terhadap RPJMD yang telah disusun. Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 211 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Sukoharjo

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase capaian target kinerja tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	80%	94,82 %	98,9 %	100 %	100 %	100 %
Persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran PD terhadap target kinerja tujuan dan sasaran PD	80%	77,18 %	99,5%	100 %	100 %	100 %
Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	75%	75%	100 %	100 %	100 %	133,33 %

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo

2. Keuangan

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerinah Kabupaten Sukoharjo meraih opini WTP 10 kali berturut-turut sejak

2016 atau satu dekade terakhir. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanjadan tertib pengelolaan asset daerah.

Realisasi pendapatan selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan belanja daerah pada Tahun 2025 (unaudited BPK) terealisasi sebesar 97,77 % dari rencana anggaran yang telah ditetapkan pada APBD, khusus di tahun 2025 realisasi Pendapatan sebesar Rp 2,140,294,078,053,00 atao tercapai 108,02 % dari target Pendapatan sebesar Rp. 1,981,205,125,649,00

Ditinjau dari Kapasitas Fiskal Daerah yang merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, maka trend Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo selama rentang waktu 2020-2025 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2024, sesuai dengan 65/PMK.07/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo masuk kategori Rendah. Tahun 2024 kategori rendah, selanjutnya pada tahun 2025 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 97 Tahun 2025 tentang Kapasitas Fiskal Daerah, nilai Kabupaten Sukoharjo 0,165, nilai ini masuk pada kategori Sedang. Kondisi ini mencerminkan kondisi keuangan daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal, Ketergantungan Tranfer yang masih tinggi, sehingga memacu daerah untuk selalu mengoptimalkan PAD.

3. Kepegawaian

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance),* ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II, serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Pada akhir tahun 2024 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sukoharjo tercatat sebanyak 5.527 orang yang terdiri atas 2.197 pegawai laki-laki dan 3.330 pegawai perempuan.

Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 212 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jabatan	2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Struktural	253	148	4 469
Fungsional	1.314	2.733	2 085
Pelaksana	630	448	459
Jumlah/Total	**2.197**	**3.329**	**5.526**

Sumber : BKPSDM Sukoharjo

Sedangkan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 213 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
SD	29	1	30
SMP	85	3	88
SMA	364	154	518
D I	1	9	10
D II	34	29	63
D III	177	843	1020
S1	1237	2011	3248
S2	269	279	548
S3	1	0	1
Jumlah/Total	**2.197**	**3.329**	**5.527**

Sumber : BKPSDM Sukoharjo

Upaya lain yang nantinya akan dilakukan yaitu dengan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari Sistem Merit antara lain :

a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenangwenangan;
l. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks penerapan Sistem Merit menurut Pasal 134 Ayat (2) PP No. 11 tahun 2017 yaitu :

a. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
c. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;

d. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
e. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
f. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
g. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
h. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
i. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam usaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, telah diberikan kesempatan yang luas kepada para pegawai untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal serta pelatihan-pelatihan. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 214 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

No	Diklat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Diklatpim Tk II	3	2	0	2	-
2	Diklatpim Tk III	2	8	5	30	30
3	Diklatpim Tk IV	30	0	32	30	30

Sumber : BPKSDM Kab. Sukoharjo

Berbagai macam jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan ketrampilan teknis jabatan-jabatan tertentu. Belum banyak jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang dimiliki. Selengkapnya jenis dan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 215 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Fungsional di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

No	Diklat	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Diklat Teknis Fungsional	214	30	2	192	238
2	Diklat Pra Jabatan Gol II	60	-	164	-	2
3	Diklat Pra Jabatan Gol III	352	-	251	1	2

Sumber : BPKSDM Kab. Sukoharjo

5. Penelitian dan Pengembangan

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK, pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mendorong untuk menerapkan Sistem Inovasi Daerah (SIDA).

Berikut adalah capaian kinerja bidang penelitian dan pengembangan Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2. 216 Capaian Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Uraian	2021	2021	2022	2023	2024
Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100
Persentase pemanfaat hasil Kelitbangan	100	100	100	100	100
Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan SIDa	100	100	100	100	100
Persentase kebijakan infilasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDa	100	100	100	100	100

Sumber: Bapperida Kab. Sukoharjo

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Sukoharjo sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 217 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Penguatan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi					
Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kab. Sukoharjo

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Fungsi Penunjang Kewilayahan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Baki, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tawangsari, dan Kecamatan Weru. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Secara normatif, kedudukan dan fungsi kecamatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang menegaskan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Dalam regulasi tersebut, kecamatan memiliki fungsi utama

meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan pelayanan publik tertentu.

Dalam konteks pembangunan daerah, fungsi penunjang kewilayahan diarahkan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kapasitas manajemen sumber daya aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, kecamatan juga berperan sebagai simpul koordinasi lintas sektor dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan. Peran ini mencakup fasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif, pengendalian pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi kinerja pelayanan publik di wilayahnya. Dengan demikian, kecamatan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, fungsi penunjang kewilayahan juga diarahkan untuk mendorong optimalisasi potensi lokal berbasis kearifan lokal, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Kecamatan diharapkan mampu memberikan masukan strategis kepada pemerintah daerah dalam rangka pengembangan wilayah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, sesuai dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah.

Dengan penguatan fungsi tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan semakin meningkat, sehingga mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Beberapa capaian urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat berdasarkan data berikut:

Tabel 2. 218 Capaian Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Sukoharjo

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan	95,5	95,5	81	83	85
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	99	99	78	78	78
3	Presentase kegiatan kerukunan umat beragama	94	94	75	80	85

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sukoharjo

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan hasil Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai indeks rata-rata 4,11 dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 2. 219 Nilai Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Berdasar Komponen

NO	KOMPONEN DAYA SAING DAERAH	NILAI ASPEK
1.	Lingkungan Pendukung	4,33
2.	Sumber Daya Manusia	4,39
3.	Pasar	3,77
4.	Ekosistem Inovasi	4,04
	Rata-rata 2024	**4,11**
	Nilai IDSD 2023	**3,69**
	Nilai IDSD 2022	**3,48**
	PDSD 2021	

Sumber: Laporan PDSD Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2023

Pencapaian nilai Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Kabupaten Sukoharjo sejak Tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah mengalami penurunan akibat pandemi COVID 19. Kondisi secara berkelanjutan membaik sampai dengan Tahun 2023. Aspek daya saing direpresentasikan dengan "Ekosistem Inovasi" memperoleh skor tertinggi, sedangkan "Faktor Sumber Daya Manusia" memiliki Skor terendah. Pilar evaluasi PDSD menunjukan bahwa Ketenagakerjaan merupakan kekuatan terbesar dengan nilai tertinggi, dan beberapa pilar lainnya juga mencapai skor diatas 4, seperti kesiapan teknologi, infrastruktur, ukuran pasar, dinamika bisnis, kelembagaan dan kesehatan. Meskipun demikian, terdapat pilar dengan nilai dibawah 4, yaitu efisiensi pasar produk dan perekonomian daerah, serta pilar yang memerlukan perhatian khusus yaitu pilar pendidikan dan ketrampilan serta akses keuangan. Pilar pendidikan digambarkan dengan Rasio jumlah lulusan S1/S2/S3 relatif kecil kurang dari 2%, serta jumlah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) kurang dari 100 unit. Sementara Akses Keuangan digambarkan melalui pertumbuhan UMKM relatif kecil dan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan UMKM pada tahun 2022 sebesar 6% sedangkan pada tahun 2023 kurang dari 1%. Hal tersebut dikarenakan salah satunya pertumbuhan kredit perbankan terhadap UMKM kecil, hal tersebut disebabkan oleh dampak Pandemi COVID-19 dimana kredit macet menjadikan perbankan lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit terhadap UMKM.

Daya Saing Daerah tidak terlepas dari Peran dan Kapasitas Daerah dalam konteks konektivitas wilayah. Kabupaten Sukoharjo terletak di lokasi strategis pada simpul jalur transportasi vital JOGLOSEMAR (Yogyakarta-Solo-Semarang) dan pusat pertumbuhan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Yogyakarta, Solo dan Semarang. Kabupaten Sukoharjo juga akses menuju kawasan pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagian penting dari sistem Perwilayahan Surakarta dan sekitarnya. Dalam struktur wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam konteks wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN memiliki peran penting dalam layanan lokal, perdagangan, industri pengolahan, produksi tanaman pangan serta penyediaan tenaga kerja. Fungsi dan peran Kabupaten Sukoharjo dalam konteks konektivitas wilayah dapat terlihat dalam gambar berikut :

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo dalam rentang tahun 2021-2025 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,82%. Sedangkan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,48%, hal ini dipengaruhi oleh kejadian pemulihan pasca pandemi Covid 19, namun di tahun 2024 terjadi penurunan karena terpegaruh oleh kelesuan industry pengolahan khsusunya tekstil. Dukungan sector industry pengolahan, Sektor perdagangan dan Sektor pertanian yang relative stabil di lima tahun terakhir menjadi modal yang kuat diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatgkan Pertumbuan ekonomi Sukoharjo diatas 5%

Tabel 2. 220 Perkembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Sukoharjo

NO	ASPEK EKONOMI	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,82	5,61	5,06	4,97	5,48
2	Tingkat Inflasi (%)	1,87*	7,03*	3,20	1,50	2,79
3	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,178	1,302	1,231	1,067	0,165

**angka didekatkan dengan Kota Surakarta, karena BPS tidak melakukan perhitungan*
Sumber: Bapperida diolah, BPS dan Kementerian Keuangan

b. Tingkat inflasi

Nilai inflasi di tahun 2024 sebesar 1,50 ini menggunakan nilai inflasi Kota Surakarta (Infasi Gabungan) hal ini karena Publikasi Badan Pusat Statistik tidak menampilkan detail per Kabupaten. Secara umum nilai Inflasi gabungan sebesar 1,50 diatas Provinsi maupun Nasional, namun pada tahun 2025 Inflasi Sukoharjo (menggunakan nilai inflasi Kota Surakarta) sebesar 2,79 % konsisi ini masih dalam rentang nilai terjaga dari target yang ditetapkan sebesar 2,5±1 persen, konsisi ini perlu upaya lebih keras lagi dalam mengoptimalkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sukoharjo. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi antara lain melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

c. Kapasitas Fiskal Daerah

Ditinjau dari Kapasitas Fiskal Daerah yang merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, maka trend Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo selama rentang waktu 2020-2025 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2024, sesuai dengan 65/PMK.07/2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo masuk kategori Rendah. Tahun 2024 kategori rendah, selanjutnya pada tahun 2025 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 97 Tahun 2025 tentang Kapasitas Fiskal Daerah, nilai

Kabupaten Sukoharjo 0,165, nilai ini masuk pada kategori Sedang. Kondisi ini mencerminkan kondisi keuangan daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal, Ketergantungan Tranfer yang masih tinggi, sehingga memacu daerah untuk selalu mengoptimalkan PAD.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Sukoharjo meliputi aksesibilitas wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan fasilitas perdagangan dan jasa. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan daya saing daerah.

a. Aksesibilitas wilayah

Kabupaten Sukoharjo berada pada posisi jalur yang sangat strategis yaitu pada kawasan simpang segitiga emas JOGLOSEMAR (Yogya – Solo – Semarang), yang merupakan simpang kutub pusat pertumbuhan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Yogyakarta, Solo dan Semarang. Selain itu, posisi Kabupaten Sukoharjo berada pada jalur akses menuju Kawasan Pantai Selatan (PANSELA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Sistem Perwilayahan Surakarta dan sekitarnya (SUBOSUKAWONOSRATEN) yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Berdasarkan hirarki Struktur Ruang maka Kabupaten Sukoharjo sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal).

Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kabupaten Sukoharjo antara lain: Sarana jalan di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari Jalan Nasional (14,56 km), Jalan Provinsi (55,59 km) dan Jalan Kabupaten (607,570 km). Dengan kondisi jalan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 dengan kondisi baik sepanjang 305,776 km (50,33%), dengan kondisi sedang sepanjang 238,250 km (39,21%), kondisi rusak ringan sepanjang 56,285 km (9,26%) dan kondisi rusak berat sepanjang 7,259 km (1,19%). Nilai kestrategisan aksesibilitas Kabupaten Sukoharjo juga ikut meningkat seiring dengan pada Tahun 2024 telah diberlakukan secara fungsional Tol Jogja-Semarang dengan pintu tol yang berada di sekitar Kawasan Klaten yang jaraknya cenderung dekat dengan perbatasan Kabupaten Sukoharjo bagian barat.

Terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan antar Provinsi. Berdasarkan SK Gubernur Jateng No. 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat dua terminal tipe B, yaitu Terminal Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo dan Terminal Kartasura di Kecamatan Kartasurta yang dikelola pemerintah provinsi. Selain itu juga terdapat empat terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Keempat terminal tipe C tersebut berada di Kecamatan Sukoharjo (Terminal Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo), Kecamatan Mojolaban (Terminal Bekonang), Kecamatan Tawangsari (Terminal Tawangsari), dan Kecamatan Weru (Terminal Watukelir).

Wilayah Kabupaten Sukoharjo sudah dilalui angkutan darat aglomerasi yaitu Trans Jateng dan Batik Solo Trans (BST). Untuk meningkatkan mobilitas masyarakat perlu dikembangkan angkutan fider dari wilayah tiap kecamatan menuju jalur Trans Jateng dan BST.

Stasiun kereta api di Kabupaten Sukoharjo untuk melayani angkutan penumpang. Untuk pelayanan kereta api komuter Yogya – Solo di Stasiun Gawok di Kecamatan Gatak. Untuk Stasiun Sukoharjo dan Stasiun Nguter untuk melayani angkutan wisata di sekitaran Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Untuk meningkatkan pelayanan kereta api, jalur kereta api lintasan Surakarta - Wonogiri dilakukan rehabilitasi oleh pemerintah pusat.

b. Layanan Air Minum

Layanan air minum diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Makmur, DPUPR yang berbasis Masyarakat dan mandiri oleh perorangan. Untuk layanan air minum aman bergantung pada layanan Perumda Tirta Makmur, karena untuk penyelenggaran air minum berbasis Masyarakat dan perorangan belum memenuhi kriteria aman karena belum dilakukan uji berkala terhadap kualitas air. Capaian air minum disajikan dalam table berikut:

Tabel 2. 221 Capaian Air Minum Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Penduduk	Air Minum Aman			Air Minum Layak	
		Jiwa	SR	%	Jiwa	%
2021	897.916	133.235	36.645	14,84	836.648	93,18
2022	899.407	116.890	39.249	13,00	744.264	82,75
2023	911.745	121.868	41.090	13,37	853.464	93,61
2024	913.950	124.273	42.020	13,60	860.535	94,16
2025	917.388	125.871	42.844	13,73	866.124	94,41

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Untuk penggunaan air minum aman terjadi peningkatan penggunaan tiap tahunnya. Secara umum, layanan air minum masih belum menjangkau seluruh rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah tetap perlu mengupayakan akses air bersih agar dapat mencapai seratus persen jangkauan. Selain menyediakan secara kuantitas, kualitas air harus dijaga terutama dalam penyediaan air bersih yang layak dan aman menuju air minum yang siap minum. Untuk meningkatkan layanan air minum aman di Kabupaten Sukoharjo, Perumda Tirta Makmur meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan layanan, untuk itu Perumda Tirta Makmur berencana membangun SPAM baru yang direncanakan berlokasi di Kelurahan Bulakan. Untuk pemenuhan akses air minum Pemerintah Kabupaten melakukan kolaborasi pendanaan baik melalui APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun swasta (TJSLP).

c. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan dan jasa dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Fasilitas hotel berbintang tidak ada penambahan dari Tahun 2024 sejumlah 5 buah. Untuk jumlah restoran/rumah makan bertambah menjadi 1590 buah daripada tahun 2024 sebanyak 1412 buah. Untuk pusat perbelanjaan modern/mall pada tahun 2025 tetap

tercatat 5 buah, pasar modern sebanyak 103 buah, pasar umum 26 buah dan pasar hewan sebanyak 6 buah.

C. Fokus Iklim Investasi

Dalam rangka mendorong peningkatan iklim investasi daerah, diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat melalui jaminan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi perizinan, ketersediaan lahan, pemberian insentif fiskal sesuai ketentuan, dukungan sosial kemasyarakatan, serta pelaksanaan promosi investasi secara berkelanjutan. Promosi investasi dilakukan melalui kegiatan roadshow maupun partisipasi dalam berbagai event pameran guna memperkenalkan potensi dan keunggulan investasi daerah kepada calon investor, baik domestik maupun internasional.

a. Perijinan

Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan investor dalam pengurusan perizinan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan serta integrasi pelayanan perizinan usaha maupun pelayanan administrasi/dokumen sosial terus dilakukan.

Sejak tahun 2025, penguatan layanan diwujudkan melalui penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik “Sevaka Bhakti Wijaya” yang menyediakan 1.150 layanan publik dari 35 instansi. Mall Pelayanan Publik tersebut memberikan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, mulai dari tahap permohonan hingga penyelesaian produk layanan

Selain itu, dalam rangka mendukung percepatan pelayanan perizinan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan pelayanan berbasis digital melalui Online Single Submission (OSS) sebagai sistem perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, serta Sistem Pelayanan Perizinan Online (SPION) sebagai aplikasi layanan perizinan nonberusaha dan layanan nonperizinan daerah Kabupaten Sukoharjo. Penerapan sistem tersebut didukung melalui layanan full online service dan paperless service guna mewujudkan proses pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun layanan perizinan online Kabupaten Sukoharjo dapat diakses melalui portal https://spion.sukoharjokab.go.id/.

b. Investasi

Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2025, realisasi investasi tercatat sebesar Rp4.807.053.924.064 atau menurun sebesar 33,45 persen dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar Rp7.223.692.108.020.

Penurunan capaian investasi tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Strategi yang perlu terus diperkuat antara lain melalui peningkatan kemudahan berusaha, optimalisasi pelayanan perizinan, penguatan promosi potensi unggulan daerah, penyediaan

infrastruktur pendukung investasi, serta peningkatan daya tarik investasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

c. Kondusivitas Wilayah

Iklim investasi membutuhkan dukungan kondusivitas wilayah yang aman. Dalam hal kondusivitas wilayah yang dapat mencerminkan kepastian hukum, terkait dengan aspek Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan komponen pembentuknya adalah Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dan Penegakkan Perda. Pada tahun 2025 dengan persentase Penanganan Pelanggaran K3 sebesar 9,70%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 96,96%. Sedangkan Penegakkan Perda pada Tahun 2025 dengan persentase 99,70%, juga naik jika dibandingkan Tahun 2024 yaitu sebesar 96,96%.

D. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2025, tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang ditunjukkan melalui rasio lulusan pendidikan tinggi (S1/S2/S3) mencapai **6,63%**, dengan jumlah lulusan sebanyak 60.862 jiwa dari total penduduk 917.388 jiwa. Capaian ini menggambarkan bahwa sebagian kecil penduduk telah mengenyam pendidikan tinggi, yang menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia di daerah.

Meskipun demikian, proporsi lulusan pendidikan tinggi tersebut masih tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang semakin menuntut tenaga kerja terampil dan berdaya saing tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi keterjangkauan, pemerataan, maupun relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, faktor ekonomi, sosial, dan ketersediaan fasilitas pendidikan juga turut memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mendorong berbagai upaya strategis, seperti pemberian beasiswa, peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, serta pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan rasio lulusan pendidikan tinggi dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 222 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Sukoharjo Periode 2025

NO	URAIAN	2025
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	60.862
2	Jumlah penduduk	917.388
3	Rasio	6,63%

Sumber: Statistik Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

b. Rasio ketergantungan

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena dilihat secara ekonomis masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tingginya persentase dependency ratio, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.

Data komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dapat menunjukkan usia produktif dan non-produktif suatu wilayah. Data ini juga akan menunjukkan potensi sumberdaya manusia berdasarkan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kabupaten Sukoharjo cenderung pada komposisi usia produktif lebih banyak dari pada usia belum produktif dan usia tidak produktif. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi sumberdaya manusia yang membutuhkan lapangan kerja.

Tabel 2. 223 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio ketergantungan Kabupaten Sukoharjo (%)	43,38	43,38	43,44	43,15	43,61

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari data jumlah penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Sukoharjo diketahui bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Sukoharjo pada rentang tahun 2021-2025 adalah kisaran ±43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja menanggung 44 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

E. Fokus Lain-lain

a. Ketepatan waktu dalam Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya ditandai dengan penetapan APBD tepat waktu, dimana Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 berhasil menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, yang memenuhi

ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Penggunaan *e-procurement*

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mulai tahun 2018 dalam pengadaan barang dan jasa, sudah menggunakan e-procurement yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Pada tahun 2022 sebagai upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kabupaten Sukoharjo telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan SK Bupati Nomor 500/200/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

c. Penggunaan *e-budgeting*

Penerapan *e-budgeting* dapat meminimalisir risiko korupsi. *E-budgeting* akan membuat laporan anggaran menjadi lebih transparan karena dapat diakses oleh setiap pihak. Dengan begitu, setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa diawasi oleh masyarakat. Untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan penggunaan sistem informasi berbasis *website* yang terintegrasi dalam Aplikasi SIPD.

d. Proporsi besaran SILPA

Penggunaan analisis pembiayaan dilakukan untuk menjelaskan pengaruh kebijakan pembiayaan daerah dalam menutup Surplus/Defisit riil pada tahun tahun sebelumnya.

e. Penggunaan e-ASB (Analisis Standar Belanja)

e-ASB (Analisis Standar Belanja) adalah aplikasi yang digunakan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan biaya kegiatan secara otomatis berdasarkan standar harga dan koefisien yang sudah ditetapkan. Pengguna hanya perlu memilih jenis kegiatan, memasukkan parameter seperti jumlah peserta atau durasi kegiatan, lalu sistem menghitung dan menampilkan rincian belanja sesuai standar. Hasilnya kemudian dapat langsung digunakan dalam penyusunan RKA sehingga proses anggaran menjadi lebih cepat, seragam, dan akuntabel.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2024

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 2. 224 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	●
2	76% ≤ 90%	Tinggi	▶
3	66% ≤ 75%	Sedang	■
4	51% ≤ 65%	Rendah	◀
5	≤ 50%	Sangat Rendah	▼

Sumber : Permendagri 86/2027

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama

Tingkat Capaian Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2027 sampai dengan Tahun 2025, disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 225 Tingkat Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Tahun 2025			Status	Perangkat Daerah Koordinator
			Target 2025	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	86,94	86,04	87,33	●	Sekretariat Daerah
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	79,3	79,5	79,9	●	Sekretariat Daerah
3	Angka Kemiskinan	%	7,47	7,3-7,1	6,83	●	Sekretariat Daerah
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	98,08	97,88	96,08	●	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	60,83	61	69,2	●	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,97	5,3-5,94	5,48	●	Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,65	4,0-3,4	4,32	●	Sekretariat Daerah
8	Pendapatan perkapita	Rp (Juta)	53,08	54	56,279	●	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	73,79	69,25	74,05	●	Sekretariat Daerah
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,59	69,98	69,77	●	Sekretariat Daerah
11	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	64,18	92	87,03	●	Sekretariat Daerah
12	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	90,37	88,37	88,07	●	Sekretariat Daerah

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2027, data diolah

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Program dalam RKPD 2025

Capaian indikator kinerja daerah merupakan capaian indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Program dalam RKPD 2025:

Tabel 2. 226 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Program dalam RKPD 2025

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	T	10,01	10,1	10,02	99,21	Sangat Tinggi
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	T	13,92	13,94	14,03	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	79	79	N/A		
Meningkatnya kualitas dan Akses pendidikan masyarakat	Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,62	92,62	86,62	93,52	Sangat Tinggi
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	96,36	98,95	95,97	96,99	Sangat Tinggi
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. 4.1.1.(e)	%	85,63	85,63	84,15	98,27	Sangat Tinggi
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. 4.1.1.(d)	%	105,81	104,29	106,09	100	Sangat Tinggi
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. 4.1.1.(e)	%	111,1	105,03	108,37	100	Sangat Tinggi
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	102,08	100	99,73	99,73	Sangat Tinggi
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	113,83	100	112,52	100	Sangat Tinggi
	Capaian SPM Pendidikan	%	99,51	100	98,52	98,52	Sangat Tinggi
Meningkatnya profesionalisme Pendidik	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	%	95,49	98,87	95,6	96,69	Sangat Tinggi
RATA-RATA IKUPD						**98,69**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5-15 dalam Satuan pendidikan	%	84,97	96,82	84,97	87,76	Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum pendidikan yang dikembangkan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	%	75	80	75	93,75	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**95,38**	**Sangat Tinggi**

2. Kesehatan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMDs.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI).	Per 100.000 Kelahiran Hidup	127,58	93	72,83	100	Sangat Tinggi
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 Kelahiran Hidup	11,13	7	11,44	36,57	Sangat Rendah
	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Per 1000 Kelahiran Hidup	12,29	8,2	12,41	48,66	Sangat Rendah
	Persentase Stunting	%	9,5	7,55	7,72	97,75	Sangat Tinggi
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	129,2	95	147,4	100	Sangat Tinggi
	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	86,5	72	99,46	100	Sangat Tinggi
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	70,5	54	71,9	100	Sangat Tinggi
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Nett Death Rate (NDR)	permil	35,96	30	33,4	100	Sangat Rendah
Rata-Rata IKUPD						**85,37**	**Tinggi**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayan penyakit menular	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) terakreditasi	%	73,9	75	73,7	98,27	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMDs.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	%	62,1	65	67,9	100	Sangat Tinggi
	Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	%	60	62	60	96,77	Sangat Tinggi
	Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	%	44,26	60	62,7	100	Sangat Tinggi
	Persentase Capaian UHC	%	98,46	98,6	98,8	100	Sangat Tinggi
	Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	%	100	60	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reprduksi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	88,56	85	85,95	100	Sangat Tinggi
	Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (RSUD)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMDs.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)						
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	86,09	87	88,81	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa siaga aktif mandiri	%	63,47	65	69	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD)	%	100	100	98,57	98,57	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	88,56	86	89,67	100	Sangat Tinggi
	Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**99,77**	**Sangat Tinggi**

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kualitas infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur	indeks	69,44	71,24	70,3	98,68	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur publik,sarana dan prasarana dasar masyarakat	Akses air minum yang layak	%	94,19	100	94,44	94,44	Sangat Tinggi
	Akses layanan Sanitasi	%	99,79	100	100	100	Sangat Tinggi
	Rasio Jaringan Irigasi	%	53	55	56,03	100	Sangat Tinggi
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	7,45	8,05	8,13	100	Sangat Tinggi
	Rasio bangunan sesuai ketentuan	%	26,97	27,4	27,46	100	Sangat Tinggi
	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	89,54	88,35	88,33	99,98	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	65	70	85,23	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	74,71	76	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**99,14**	**Sangat Tinggi**

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan	%	80,59	100	94,44	94,44	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	%	1,41	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber PBG dan SLF	%	26,97	27,4	27,46	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	7,45	8,05	8,13	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi	%		100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	prosentase Daerah irigasi yang baik	%	53	55	56,03	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	89,54	88,35	88,33	99,98	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah prov/kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%		100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase perwujudan terhadap perencanaan tata ruang	%	65	70	85,23	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**99,44**	**Sangat Tinggi**

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan permukiman	Persentase Lingkungan Hunian Layak	%	91.6	91,6	91,6	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Cakupan Pelayanan SPM Perumahan Rakyat	Prosentase pelayanan SPM Perumahan Rakyat	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya RTLH menjadi RLH	Prosentase pemenuhan rumah yang layak	%	32,9	32,9	32,9	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Prosentase penurunan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	%	47,07	33,35	33,35	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah	Prosentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dan Tertangani dengan baik	%	89,99	89,99	89,99	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	74,56	75	N/A		
Rata-Rata IKUPD						100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah baru (backlog)	%	20	20	20	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase penurunan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas permukiman kumuh yang tertangani	Ha	14,46	32	32	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	prosentasi PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	320	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Satpol PP)	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	90,37	91,88	92,67	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan per UU daerah, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta meningkatnya kemampuan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Satpol PP)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perundang - undangan Daerah	%	96,96	97,6	98,7	100	Sangat Tinggi
	Persentase Penyelesaiaan Gangguan Tibum Tranmas	%	98,51	98,5	99,7	100	Sangat Tinggi
	Persentase anggota Satlinmas terlatih	%	58	60	60	100	Sangat Tinggi
	Persentase Tanggap Kebakaran (Respon Time)	%	95,5	95,6	95,8	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publikl (Satpol PP)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	74,82	75	N/A		

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Lingkungan sehat, aman tangguh berkelanjutan	Indeks Kapasitas Daerah	nilai	0,63	0,63	0,68	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Cakupan Mitigasi Bencana	nilai	64.18	64,18	87,03	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	73.22	73,22	N/A		
RATA-RATA IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SATPOL PP)	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	96,96	97,6	98,7	100	Sangat Tinggi
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	98,51	98,5	99,7	100	Sangat Tinggi
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (SATPOL PP)	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	95,5	95,6	95,8	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (SATPOL PP)	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD)	Persentase capaian penanggulangan bencana	%	97,7	100	95,24	95,24	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (BPBD)	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	88,95	100	96,67	96,67	Sangat Tinggi
RATA-RATA						**98,84**	**Sangat Tinggi**

6. Sosial

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RPJMD s.d 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) **	%	5,34	4,37	14,84	100	Sangat Rendah
	Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) **	%	2,48	2,34	1,8	100	Sangat Rendah

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RPJMD s.d 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	23,28	14,31	0,77	5,38	Sangat Rendah
Meningkatnya kualitas SDM PSKS	Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	77,84	86,47	73,98	85,56	Tinggi
Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Jumlah taman makam pahlawan dalam kondisi baik	tmp	1	1	1	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	72,92	72,92	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**81,82**	**Tinggi**
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	%	5,12	5,63	0,66	11,72	Sangat Rendah
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase pemenuhan penanganan bencana	%	73,91	73,91	17,19	23,26	Sangat Rendah
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial	%	17,48	19,04	21,07	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RPJMD s.d 2025		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	77,84	86,47	73,98	85,56	Tinggi
Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PRROGRAM PNUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**74,36**	**Sedang**

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya pertumbuhan Produktifitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	%	60,06	85	99,82	100	Sangat Tinggi
Menurunnya Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	angka	18.631	20.909	22.910	100	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik	Capaian Nilai SAKIP	poin	62,03	79,05	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase akurasi proyeksi indikator dalam RTK	%	100	90	90	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,11	0,45	0,53	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	prosentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	%	63,00	83	99,8	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	46,24	72,55	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	98,08	97,88	97,87	99,99	Sangat Tinggi
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	73,79	73,79	73,79	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan terhadap anak	Rasio	1:4988	28,09	26,35	100	Sangat Tinggi
	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	1:9150	13,62	13,66	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	72,72	72,73	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**99,99**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	%	40	45	45	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	%	80	90	90	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi	%	0,17	0,18	0,18	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	nilai	620,4	620,5	620,5	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

3. Pangan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,9	94	93,94	99,94	Sangat Tinggi
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Tingkat Konsumsi Energi (Kalori)	%	93,65	98,4	90,88	92,36	Sangat Tinggi
	Tingkat Konsumsi Protein	%	99,65	99,82	100,04	100	Sangat Tinggi
	Penguatan Cadangan Pangan	%	30	99,75	97,98	98,23	Sangat Tinggi
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	4,79	3,59	3,59	100	Sangat Tinggi
	Ketersediaan Bidang Pangan utama	%	278,01	268,4	364,19	100	Sangat Tinggi
	Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan	%	90	94	96,67	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kapasitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	82,43	80	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**98,65**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan	%	13,77	15,56	14,97	96,21	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	%	137,04	127,91	139,77	100	Sangat Tinggi
	Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Telur	%	3,19	3,17	3,37	93,69	Sangat Tinggi
	Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Bawang Merah	%	12,66	12,55	12,98	96,57	Sangat Tinggi
	Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Cabe	%	22,21	22,19	23,42	94,45	Sangat Tinggi
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani	%	62,5	75	75	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	%	37,5	43,75	43,75	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**97,61**	**Sangat Tinggi**

4. Pertanahan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Prosentase penanganan sengketa tanah garapan	%	46	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	prosentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	%	67	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan perencanaan penatagunaan tanah	%	57	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

5. Lingkungan Hidup

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	53,72	51,25	53,75	100	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	89,47	87,25	89,85	100	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	32,67	31,09	32,67	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya standar kualitas lingkungan hidup sesuai baku mutu lingkungan hidup dan kreteria baku kerusakan lingkungan hidup	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LH)	%	85,26	85,26	102,95	100	Sangat Tinggi
	Prosentase timbulan sampah yang dikelola (LH)	%	79,07	99	16,45	16,62	Sangat Rendah
	Prosentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan (LH)	%	38,63	38,63	38,63	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	76,51	76,51	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**86,10**	**Tinggi**
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	70	83	83	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan	%	80	100	102,55	100	Sangat Tinggi
	Prosentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	%	29	29	29	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan (LH)	%	38,63	38,63	38,63	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase ketaatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH, PUULH, dan ijin yang diterbitkan oleh kabupaten	%	106,67	100	96,8	96,8	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian B3 dan LB3 pada penghasil dan pengumpul skala kabupaten	%	124,88	100	140,23	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	%	62	81	81	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase penghargaan lingkungan hidup	%	60	80	120	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	116,7	100	175	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah	%	62,9	70	68,82	98,31	Sangat Tinggi
	Prosentase pengurangan sampah	%	16,08	30	16,48	54,93	Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**95,84**	**Sangat Tinggi**

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TSasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Adminduk	nilai	89,17	84	89,51	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	79,52	80	N/A		
Meningkatnya Kuallitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase terlayaninya pemohon dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Rata-rata lamanya waktu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	jam	12	6	6	100	Sangat Tinggi

TSasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Data Kependudukan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Cakupan Lembaga Pengguna yang Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	nilai	0,7946	0,7946	0,7895	99,36	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	72,68	80	N/A		
Meningkatnya Desa Maju	Persentase Berdirinya Bumdes	%	96,67	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Desa Mandiri	%	40,67	42,67	46,67	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa Yang dibina	%	81,82	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**99,84**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Kegiatan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PROSENTASE DESA YANG MELAKUKAN KERJA SAMA DESA	%	8,67	10,67	10,67	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberdayakan/Dibina	%	83,33	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang penyelenggaraan administrasinya tertib	%	83,33	100	100	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Rata-Rata						**85**	**Tinggi**

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,52	0,52	0,23	100	Sangat Tinggi
Menurunnya Angka Kelahiran	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	1,33	1,4	1,3	100	Sangat Tinggi
	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	3,4	4,7	3,36	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Umur	22,8	22	22	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan stakeholder yang memanfaatkan GDPK	%	35	40	40	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	%	67,57	67,57			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	%	78	80	80	100	Sangat Tinggi

9. Perhubungan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	angka	0,03	0,185	0,043	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	%	0	0,75	0,06	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	%	16,9	18	17,07	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	75,86	77	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	%	73,58	71,5	71,75	100	Sangat Tinggi
	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	%	10,76	11,49	11,49	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	%	100	100	24	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	%	84,3	85	85	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	23	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

10. Komunikasi dan Informatika

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Tata Kelola dan Ekosistem E-Government	Nilai Indeks Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE)	nilai	4,45	4,45	4,45	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	74,58	78	N/A		
Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	nilai	99,38	99,38	99,45	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas Layanan publik berbasis elektronik	Nilai Indeks Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	nilai	4,76	4,76	4,88	100	Sangat Tinggi
Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Telekomunikasi	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	nilai	4,3	4,3	4,4	100	Sangat Tinggi
Cakupan Infrastruktur TI	Cakupan Infrastruktur TI	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	96,06	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase Badan Publik Terbuka	%	99,38	99,38	99,11	99,73	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	%	98,75	98,75	98,88	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penyelenggaraan jaringan intra pemerintahan daerah	%	99,29	99,29	98,88	99,59	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**99,83**	**Sangat Tinggi**

11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktifitas sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pertumbuhan usaha mikro ke Usaha kecil	%	6,1	6,1	6,3	100	Sangat Tinggi
	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	31,66	31,66	31,98	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase koperasi aktif	%	42,2	42,2	83,55	100	Sangat Tinggi
	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	22	25	25	100	Sangat Tinggi
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,75	99,75	99,76	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Wira Usaha Baru	Presentase Wirausaha Baru yang mempunyai NIB	%	9,57	9,57	9,84	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	75,13	75,13	N/A		
Rat-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	42,2	42,2	83,55	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	26,37	80	95,62	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dinilai Kesehatannya	%	22	25	25	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset Produk UMKM	%	28,82	29	35,89	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Fasilitasi Peningkatan Perizinan bagi UMKM Persentase kemitraan KUMKM	%	35,45	35,45	35,89	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	8,78	8,78	N/A		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	%	100	100	56,5	56,5	Rendah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**94,56**	**Sangat Tinggi**

12. Penanaman Modal

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	nilai	85,79	85,79	90,67	100	Sangat Tinggi
Tercapainya Pertumbuhan Investasi	Pertumbuhan investasi	%	57	24	135,3	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi	%	104,79	100	147,95	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	82,30	76	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi	%	81,25	100	100	100	Sangat Tinggi
	Prosentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal	%	81,25	100	100	100	Sangat Tinggi
	Cakupan Pelayanan Penaman Modal yang Optimal	%	81,25	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi	%	100	100	63	63	Rendah
	Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo	%	100	100	63	63	Rendah
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase jumlah pertumbuhan realisasi penanaman modal	%	81,64	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**91,78**	**Sangat Tinggi**

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	angka	60,83	61	60,83	99,72	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	77,24	78	N/A		

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Cakupan pemberdayaan pemuda	%	22,3	14,6	1,82	12,47	Sangat Rendah
Meningkatnya Kualitas Keolahragaan	Cakupan prestasi olahraga	%	52,5	58	52,5	90,52	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**67,57**	**Sedang**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	80,56	62,5	80,56	100	Sangat Tinggi
	Persentase wirausaha muda	%	15,89	16,47	15,89	96,48	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pramuka berprestasi	%	16	17	16	94,12	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	%	67,5	75	67,5	90	Tinggi
	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	64,65	70	64,65	92,36	Sangat Tinggi
	Cakupan pembinaan atlet muda	%	44,29	44,41	44,29	99,73	Sangat Tinggi
	Persentase atlet berprestasi	%	59,54	60	59,54	99,23	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**96,49**	**Sangat Tinggi**

14. Statistik

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Prosentase/cakupan data statistik sektoral	%	94,29	95,59	97,14	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	98,91	98,91	99,04	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

15. Persandian

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi	Indek KAMI	nilai	405	450	600	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase Ketersediaan sarana keamanan informasi	%	98,5	98,5	97,86	99,35	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Rata-Rata						**99,35**	**Sangat Tinggi**

16. Kebudayaan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kearifan budaya local	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang terlayani	%	60	60	60	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang berkembang	%	40	50	40	80	Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	20	20	20	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	9	13	9	69,23	Sedang
RATA RATA						**83,08**	**Tinggi**

17. Perpustakaan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Perpustakaan	Prosentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	49,67	51	51,35	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase pembinaan perpustakan dan kegemaran membaca	%	53,84	55	55	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	%	45	57	60	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

18. Kearsipan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya penyelenggaran kearsipan yang tertib dan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	22,62	24	23,8	99,17	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
peningkatan Budaya Literasi Masyarakat							
	Indeks Manajemen Kearsipan	indeks	62,28	62,5	62,28	99,65	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	74,51	75	N/A		
Meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan	Pengawasan Kearsipan Internal	nilai	27,47	27,75	27,47	98,99	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**99,27**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	77,5	78	56,66	73	Sedang
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	43,3	45	33,33	74	Sedang
Rata-Rata						**82,24**	**Tinggi**

A. Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Produksi Perikanan dan nilai produksi Ikan	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	ton	-275,86	421,57	421,11	99,89	Sangat Tinggi
	Nilai Produksi Ikan (Rp. 000)	ton	271204,6	276632	278877	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	0,7	0,5	0,8	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**99,96**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap	ton	401	408,25	406,44	99,56	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	ton	14475	15594,25	14907,89	95,60	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB	Kelompok	55	65	59	90,77	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP)	%	60	70	60	85,71	Tinggi
Rata-Rata						**92,91**	**Sangat Tinggi**

2. Pariwisata

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Destinasi Wisata yang berdaya saing	Persentase Destinasi Wisata yang Berdaya Saing	%	60	67,5	60	88,89	Tinggi
Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	%		28,89			
Rata-Rata IKUPD						**88,89**	**Tinggi**
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik/Destinasi Wisata yang ditingkatkan	%	40,00	50	40,00	80	Tinggi
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase even pariwisata yang dilaksanakan	%	15,00	17	15,00	88,24	Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dikembangkan	%	31,20	43,7	31,20	71,40	Sedang
Rata-Rata						**79,88**	**Tinggi**

3. Pertanian

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Pertumbuhan PDRB sekor pertanian dan perikanan	rata-rata Prosentase Pertumbuhan Produksi sektor Pertanian	%	158,47	1,89	28,24	100	Sangat Tinggi
	Prosentase Pertumbuhan Nilai produksi perikanan (%)	%	3,67	2,79	3,63	100	Sangat Tinggi
	Prosentase Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (%)	%	2,98	2,08	3,29	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Produktivitas Sektor Padi, Jagung, Kedelai dan Produksi pada Komoditas Pertanian Utama	Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	70,64	69,59	69,85	100	Sangat Tinggi
	Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	88,05	79,65	105,07	100	Sangat Tinggi
	Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	Ku/Ha	22,33	18,94	20,93	100	Sangat Tinggi
	Peningkatan Produksi Padi (Ton)	ton	13105,76	7385,82	32918,44	100	Sangat Tinggi
	Peningkatan Produksi Jagung (Ton)	ton	2151,76	50	369,24	100	Sangat Tinggi
	Peningkatan Produksi Kedelai (Ton)	ton	267,14	5	-788,65	0	Sangat Rendah
	Peningkatan Produksi bawang merah (ku)	ku	40,61	59,5	2762,69	100	Sangat Tinggi
	Peningkatan Produksi Cabe (ku)	ku	54,56	106,7	2249,29	100	Sangat Tinggi
	Peningkatan Produksi Biofarmaka (Ton)	ton	143,641	5000	3591	71,82	Sedang
	Peningkatan Produksi Tebu	ton	-1180,74	25,71	7,33	28,51	Sangat Rendah
	Peningkatan Produksi Pisang (ku)	ku	61,66	110	1162	100	Sangat Tinggi
	Peningkatan Produksi Tembakau (Ton)	ton	146,81	3,81	152,75	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Produksi Daging dan telur yang berkualitas	Peningkatan Produksi Daging (Ton)	ton	1381,09	163,44	4764,59	100	Sangat Tinggi
	Prosentase Daging ASUH	%	92,86	93,2	93,5	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD	poin	74,66	78	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**88,25**	**Tinggi**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani	%	96,5	97	97	100	Sangat Tinggi
	Prosentase penggunaan benih padi bersertifikat	%	93,1	93,8	94	100	Sangat Tinggi
	Prosentase Kelompok Menggunakan Alsintan	%	77	78	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani	%	77	78	100	100	Sangat Tinggi
	Jumlah Luas Tanam (Ha)	Ha	49907	50079	54289	100	Sangat Tinggi
	Prosentase BPP Kecamatan sesuai Standar Kompetensi	%	47	49	44	89,80	Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase gagal panen	%	3	3	2,3	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase kenaikan nilai klas kelompok	%	2,5	3	3	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	34	34,5	44	100	Sangat Tinggi
	Jumlah Populasi ternak (animal unit)	unit	20666,02	20976,01	16390	78,14	Tinggi
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berijin	%	90	95	88,26	92,91	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Pengendalian penyakit Zoonosis	%	0,1	0,1	0,1	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai SAKIP	poin	76	78	80,05	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**96,73**	**Sangat Tinggi**

4. Perdagangan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktifitas sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,25	5,4	5,56	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Non- Migas	%	15,46	15,46	12,53	81,05	Tinggi
	Persentase Peredaran Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Standart	%	0	0	0	100	Sangat Tinggi
	Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik	%	80,77	96,1	80,77	84,05	Tinggi
	Persentase Pasar Tertib Ukur	%	57,7	57,7	57,7	100	Sangat Tinggi
Rat-Rat IKUPD						**93,02**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang baik	%	80,77	96,1	80,77	84,05	Tinggi
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian Harga Persentase Kios Pupuk Lengkap (KPL)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Ekspor	%	15,46	15,46	12,53	81,05	Tinggi
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pasar Tertib Ukur	%	57,7	57,7	57,7	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	%	42,39	42,39	19,8	46,71	Sangat Rendah
Rat-Rata IKUPD						**82,36**	**Tinggi**

5. Perindustrian

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya pertumbuhan produktivitas PDRB sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	3,63	6,06	4,31	71,12	Sedang
Meningkatnya PDRB sektor industri Pengolahan	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	38,15	40,5	38,03	93,90	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**82,51**	**Tinggi**
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	26,24	46,88	26,75	57,06	Rendah
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	%	10,00	17	17	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan	%	48,00	90	66,67	74,08	Sedang
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara Lengkap dan Terkini	dok	74,70	8	75,95	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**82,78**	**Tinggi**

6. Transmigrasi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	terpenuhinya alokasi pemberangkatan transmigrasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

B. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	86,04	84	86,37	100	Sangat Tinggi
	Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	angka	99,36	87	89,47	100	Sangat Tinggi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	66,94	75	67,33	85,23	Tinggi
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	101,01	100	121,21	100	Sangat Tinggi
	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	113,26	100	101,25	100	Sangat Tinggi
	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	78,78	79	N/A		
RATA-RATA IKUPD						**97,54**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	%	100	97	150	100	Sangat Tinggi
	Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Cakupan pengadaan barang dan jasa (Indeks Tata Kelola Pengadaan)	nilai	77,49	78	81,47	100	Sangat Tinggi
	Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

2. Sekretariat DPRD

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Sukoharjo	Indek Kepuasan Masyarakat (Survey Kepuasan Masyarakat Yang Sasarannya DPRD)	angka	84,53	80	84,55	100	Sangat Tinggi
Meningkatkan Kepuasan DPRD atas layanan Pendukung di Bidang Legislasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Legislasi	angka	84,12	80	83,31	100	Sangat Tinggi
Meningkatkan Kepuasan DPRD atas layanan Pendukung di Bidang Penganggaran dan Pengawasan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Penganggaran dan Pengawasan	angka	84,94	80	85,78	100	Sangat Tinggi
Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	79,14	76	N/A		
RATA-RATA IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	86,66	90	91,05	100	Sangat Tinggi
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelayanan Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada Bagian Anggaran dan Pengawasan	%	96,98	100	84,13	84,13	Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	98,98	100	99,1	99,1	Sangat Tinggi
RATA-RATA						**94,41**	**Sangat Tinggi**

C. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan yang Berkualitas	Persentase capaian target kinerja tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	%	99,4	96	100	100,00	Sangat Tinggi
Meningkatnya sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	96,71	75	100	100,00	Sangat Tinggi
Meningkatnya efektivatas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja tujuan dan sasaran PD terhadap target kinerja tujuan dan sasaran PD	%	100	96	100	100,00	Sangat Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	nilai	85,2	77	N/A		

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Rata-Rata IKUPD						**100**	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	96	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	96	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	96	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan PD	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	98,32	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata						**100**	**Sangat Tinggi**

2. Keuangan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dan aset yg transparan dan akuntabel	Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	angka	1,067	1,141	0,165	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini LHP BPK atas LKPD	kategori		4	N/A		
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka		76,5	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kepatuhan OPD dalam menyusun RAPBD	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase OPD yg taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yg telah ditetapkan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase ketepatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Target PAD	%	115,49	3-5%	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

3. Kepegawaian

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Mengimplementasikan Manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Indeks Sistem Merit	indeks	III (307)	III	III(307)	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	81,66	78	N/A		
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	%	85,75	92,5	96,43	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
	Prosentase pemenuhan formasi usulan ASN	%	91,4	98	99,42	100	Sangat Tinggi
	Prosentase jabatan yang terisi sesuai syarat jabatan	%	51,6	75	86,29	100	Sangat Tinggi
	Prosentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	88	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**

4. Pendidikan dan Pelatihan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase Pengembangan ASN	%	97,17	87	94,15	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana	%	97,17	96	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

5. Penelitian dan Pengembangan

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	50	50	50	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**

D. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Profesional Melalui Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif	Nilai Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	point	9	10	N/A		
Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	3	2,794	93,13	Sangat Tinggi
Meningkatnya peran konsultan dan katalisator APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	100	Sangat Tinggi
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	79	79	N/A		
RATA-RATA IKUPD						**96,57**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase cakupan jenis pengawasan internal yang dilakukan APIP	%	100	89,5	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Cakupan pendampingan dan Asistensi di bidang Pengawasan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase cakupan pemenuhan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan	%	100	80	100	100	Sangat Tinggi
RATA-RATA						**100**	**Sangat Tinggi**

E. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Weru

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	89.02	90	89,25	99,17	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	76,99	70	N/A		

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Rata-Rata IKUPD						**99,58**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	80,5	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	99,86	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Bulu

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	86,92	83	87,03	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	74,15	67	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	101,71	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Tawangsari

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	89,14	90	88,63	98,48	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	70,96	74	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**99,74**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Sukoharjo

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	91,26	89	91,43	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	99,85	99,85	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	77,15	70	NA		
Rata-Rata IKUPD						**99,93**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	96,31	100	95,6	95,6	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**99,27**	**Sangat Tinggi**

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Nguter

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	90,223	91	90,27	99,20	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	75,87	65	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**99,60**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Bendosari

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	90,88	85	90,27	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	71,46	75	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	99,45	99,45	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	99,22	99,22	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	94,92	100	90,29	90,29	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**98,16**	**Sangat Tinggi**

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Polokarto

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang reponsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	88,23	90	89,12	99,02	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas Aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	75,66	67	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**99,02**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Mojolaban

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	88,45	90	90,06	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	88,49	69	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Baki

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	89,72	86	89,93	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	76,46	68	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Grogol

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	88,02	88,25	88,51	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	nilai	73,69	70	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Kartasura

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	83,71	85	88,85	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	98,33	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Aparatur Dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD	nilai	74,17	72	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	91,67	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	97,66	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

Capaian Kinerja Urusan Kecamatan Gatak

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	85,75	86	85,85	99,83	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Persentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	70,24	74	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**99,91**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

F. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2025	Realisasi Capaian RKPD s.d Semester II		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya kesatuan bangsa dan bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	82	85	85	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Idiologi Pancasila	Presentase masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan	%	86	92	92	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partsipasi politik masyarakat;	Presentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	80	80	80	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama	Presentase kegiatan kerukunan umat beragama	%	80	83	83	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	78,28	80	N/A		
Rata-Rata IKUPD						**100**	**Sangat Tinggi**
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan masyarakat yang paham ideologi pancasila dan karakter bangsa	%	84	97	97	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan ormas	%	80	89	89	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	%	84	90	90	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase pemahaman politik bagi masyarakat	%	80	80	80	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase masyarakat yang paham terhadap sosial, budaya, dan agama	%	80	83	83	100	Sangat Tinggi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata						**100**	**Sangat Tinggi**

2.3. Rangkuman Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Rangkuman Rekapitulasi Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Tahun 2025, Indikator Kinerja Kinerja Daerah serta Program Perangkat Daerah Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2027 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 227 Rekapitulasi Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2027

Indikator	Jumlah Indikator	Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
IKU	12	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0
IKD	230	215	93,47	4	1,74	2	0,87	6	2,61	3	1,30
Program	262	194	90,83	11	4,20	3	1,14504	5	1,91	5	1,91

2.4. Permasalahan Pembangunan

2.4.1. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD menunjukkan tren fluktuatif dan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 86,62 persen, yang mengindikasikan masih terbatasnya partisipasi anak usia dini dalam layanan PAUD, terutama dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran orang tua serta belum optimalnya dukungan kebijakan seperti implementasi program 1 Tahun Pra-SD.

b. Masih terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 998 anak yang tersebar di beberapa kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah Weru, Sukoharjo, dan Mojolaban, yang menunjukkan masih adanya permasalahan akses dan keberlanjutan pendidikan akibat faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

c. Kondisi sarana prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan, ditandai dengan masih adanya ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat pada seluruh jenjang pendidikan, khususnya pada SD (826 rusak ringan dan 134 rusak berat) serta SMP (89 rusak ringan dan 19 rusak berat), yang berpotensi memengaruhi kualitas proses pembelajaran.

d. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 sudah cukup tinggi namun belum sepenuhnya optimal (sekitar 95,6 persen), sehingga masih terdapat sebagian kecil guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik sesuai standar, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini.

e. Distribusi guru antar wilayah dan satuan pendidikan masih belum merata, tercermin dari adanya perbedaan rasio guru terhadap murid yang cukup signifikan, seperti pada jenjang SD berkisar antara 1:8 hingga 1:21, yang menunjukkan adanya ketimpangan beban kerja guru antar sekolah.

2. Kesehatan

a. Masih perlunya penguatan penurunan angka kematian bayi (AKB).

Jumlah kematian bayi (0–11 bulan) masih tercatat, yang sebagian besar disebabkan oleh kelainan kongenital dan bayi berat lahir rendah (BBLR), serta faktor lain seperti asfiksia, infeksi, dan gangguan pernapasan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, khususnya pada masa kehamilan, persalinan, dan neonatal, termasuk deteksi dini faktor risiko dan peningkatan kualitas layanan rujukan

b. Risiko kesehatan pada bayi dengan BBLR dan kondisi khusus lainnya

Bayi dengan berat lahir rendah (<2.500 gram) memiliki kerentanan tinggi terhadap gangguan tumbuh kembang dan infeksi, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih

komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan neonatal serta pemantauan tumbuh kembang bayi.

c. Kematian balita yang masih memerlukan perhatian
Kematian balita (0–59 bulan) masih terjadi dengan jumlah yang cukup signifikan dan merupakan akumulasi dari kematian neonatal, bayi, dan balita. Selain faktor penyebab pada masa bayi, kematian balita usia 12–59 bulan juga dipengaruhi oleh penyakit seperti kelainan kongenital, gangguan jantung, infeksi, serta faktor kecelakaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pelayanan kesehatan anak secara menyeluruh, termasuk pemantauan tumbuh kembang, perbaikan gizi, serta pencegahan penyakit dan kecelakaan.

d. Masih adanya penyakit menular yang perlu dikendalikan
Kasus penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, Malaria, dan Leptospirosis masih ditemukan dengan tren yang fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan surveilans epidemiologi, serta kesiapsiagaan dalam penanganan potensi kejadian luar biasa (KLB).

e. Belum optimalnya kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan
Meskipun akses air minum berkualitas telah mencapai 100 persen, dengan fasilitas layak mencapai 90,91 persen, namun capain sanitasi aman relatif rendah (9,09 persen), sehingga diperlukan penguatan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mencegah penyakit berbasis lingkungan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan capaian kinerja sektor pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2025, masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya :

a. Secara keseluruhan kondisi permukaan jalan di Kabupaten Sukoharjo belum maksimal, karena kondisi jalan baik 55,99%, sedang 33,72%, rusak ringan 8,35% dan rusak berat sebesar 1,94%;
b. Kondisi jalan jembatan belum maksimal ditandai kondisi jembatan baik 1,8%, sedang 35,59%, rusak ringan 62,16% dan rusak berat 0,45%.
c. Masih adanya jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak, dimana kondisi baik baru mencapai 23,71%, sedangkan kondisi rusak ringan sekitar 31,10% terdiri dari rusak sedang 35,17% dan rusak berat 9,02%;
d. Pembangunan drainase di Kabupaten Sukoharjo belum optimal di tahun 2025 pembangunan drainase 4.101,50 m, hal ini perlu menjadi perhatian mengingat Kabupaten Sukoharjo memiliki kerawanan bencana akan banjir di seluruh wilayah.
e. Masih adanya jumlah rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan

jaringan perpipaan terlindungi. Pada tahun 2025 masih ada 5,59% penduduk yang belum mengakses air minum layak;

f. Capaian akses air minum aman masih rendah sekitar 13,72%.
g. Masih adanya jumlah rumah tangga yang belum memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik capaian sanitasi aman sekitar 1,45%.
h. Masih rendahnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan IPAL pada tahun 2025 baru 2.911 KK;
i. Belum seluruh perkotaan mempunyai rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar perijinan.

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan capaian kinerja sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2025, masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya :

a. Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni, jumlah RTLH pada Tahun 2025 sejumlah 4.469 unit
b. Tingginya luasan kawasan permukiman kumuh, luasan kumuh tahun 2025 seluas 557,526 Ha;
c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) belum memadai, sampai dengan tahun 2025 penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah daerah sebanyak 252 perumahan.
d. Masih tingginya angka backlog rumah sejumlah 22.045 unit.
e. Ketersedian dokumen perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum lengkap.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Masih lemahnya kemampuan dan ketrampilan anggota Satpol PP dan PPNS terhadap penguasaan Perda dan Perbup.
b. Masih banyak Perda/Perbup yang hanya mengandung sanksii administrasi tanpa ada sanksi pidana, serta Perda yang mengandung sanksi 3 (tiga) bulan keatas.
c. Anggota PPNS masih menyebar diberbagai Perangkat Daerah.
d. Perlu adanya specialisasi keahlian PPNS terhadap penguasaan Perda dan Perbup.
e. Masih perlu membutuhkan perhatian adalah masalah penyelesaian angka kriminalitas karena persentasenya belum mencapai 80%.
f. Perlu peningkatan kinerja Kader Siaga Trantib (KST) sebagai wujud partisipasi masyarakat.
g. Masih rendahnya SDM sebagian anggota Satlinmas.
h. Belum terbentuk kelembagaan Satlinmas sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
i. Dengan keberadaan Pemadam Kebakaran yang memjadi bagian dari Satpol PP, maka perlu ditingkatkan SDM anggota Damkar dalam pelayanan penanganan Pemadaman Kebakaran.
j. Optimalisasi pemetaan daerah rawan pelanggaran prokumda termasuk pelanggaran aset, serta perlu dilakukan pemetaan SDM dan sarpras sehingga intervensi kebijakan dan dukungan

anggaran dapat di fokuskan sesuai dengan pemetaan kebutuhan tersebut.

k. Optimalisasi pemetaan dalam sektor kebakaran seperti pemetaan daerah rawan kebakaran, pemetaan SDM dan sarpras serta pemetaan jumlah relawan kebakaran. Dimana relawan damkar di provinsi merupakan akumulatif relawan damkar yang ada di Kabupaten/Kota.
l. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan peningkatan kapasitas Linmas dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan.
m. Pemahaman masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana masih kurang.
n. Jumlah Desa Tangguh Bencana masih sedikit, jumlah destana baru 72 desa dari 167 desa/kelurahan.
o. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo. Tahun 2025 jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sejumlah 7.287 orang.
p. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo. Tahun 2025 jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sejumlah 3.615 orang.
q. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo. Tahun 2025 jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana sejumlah 2.395 orang

6. Sosial

a. Memastikan verval berjalan dengan baik sehingga meminimalisir *inclusion eror* maupun *exclusion eror* untuk akurasi data.
b. Intervensi melalui pemberdayaan masyarakat (empowermen) diperbanyak/diperluas agar kemandirian masyarakat meningkat sehingga peningkatan pendapatan tumbuh dari bawah (masyarakat sebagai subjek pembangunan)
c. Optimalisasi dana desa untuk penanggulangan kemiskinan
d. Konvergensi lintas sektor dilakukan melalui 3 strategi (pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan mengurangi kantong kemiskinan)
e. Melaporkan PPKE triwulanan
f. Bagi TKPK berkinerja baik dilakukan penilaian kinerja TKPK dan mendapatkan reward Insentif fiskal.

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah termasuk pekerja rumahan;

b. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;
c. Pada tahun 2025 ini masih adanya penganguran;
d. Belum optimalnya fungsi kelembagaan ketenagakerjaan
e. Kompetensi tenaga kerja perlu ditingkatkan dengan sertifikasi kompetensi.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak;
b. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
c. Masih rendahnya jumlah kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan.
d. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum semua dilaksanakan.

3. Pangan

a. Masih ada desa yang masuk dalam kategori “Agak Tahan Pangan” (prioritas 4), untuk mengantisipasi agar desa-desa tersebut tidak turun peringkat (masuk kategori Agak Rawan Pangan, Rawan Pangan, Sangat Rawan Pangan). Pada Tahun 2025 di Kabupaten Sukoharjo tidak terdapat desa prioritas 1, 2, dan 3. Namun demikian masih terdapat desa prioritas 4 (agak tahan pangan) sebanyak 19 desa yang bisa diberi bantuan pemberdayaan untuk mengatasi ketidakmampuan secara ekonomi maupun karena gizi buruk akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan, menjadikan ketahanan pangan sangat rentan;
b. Dari sisi konsumsi pangan, tidak mudah mengubah pemahaman dan pola konsumsi pangan masyarakat menuju ke arah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Adanya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok beras, belum terlihat respon masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan pangan alternatif. Sehingga perlu upaya yang intensif dan berkesinambungan dalam pembinaan untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat. Perlu peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat untuk melakukan stop boros Pangan
c. Masih adanya perilaku produsen pangan segar dan olahan belum menjamin mutu dan keamanan pangan (food savety). Masih ditemui residu pestisida pada pangan segar dan bahan tambahan pangan yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi pada pangan olahan.

4. Pertanahan

Penataan akses untuk mendukung reforma agraria belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo sampai tahun 2025 baru dilaksanakan di Desa Karang Tengah Kecamatan Weru.

5. Lingkungan Hidup

a. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup;
b. Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama pada capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dimana masih terdapat sungai dengan status tercemar sedang dan tercemar berat;
c. Terjadi penurunan indeks kualitas udara (IKU) yang cukup signifikan pada tahun 2025 sebesar 79,16 dibandingkan IKU tahun 2024 sebesar 89,47. Emisi gas SO^2 dan NO^2 yang merupakan parameter pecemar udara dari sektor industri dan transportasi menjadi indikasi perlunya upaya preventif dan perbaikan kualitas lingkungan antar komponen, serta diperlukan penguatan kebijakan pengendalian pencemaran udara yang lebih terarah dan berkelanjutan.
d. Belum optimalnya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Meskipun sudah mengalami penurunan 19% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 emisi GRK yang dilepaskan di Kabupaten Sukoharjo tercatat masih cukup tinggi yaitu 1.963,95 Gg CO^2 eq;
e. Belum optimalnya pengurangan sampah dari sumbernya dan kapasitas TPA perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan kapasitas TPA Mojorejo yang hampir penuh, sudah terpakai 99,54% serta kurang aktifnya pemanfaatan TPS3R dalam mengelola sampah dari hulu;
f. Pencapaian IKLH Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 sebesar 69,77 meningkat apabila dibandingkan dengan capaian IKLH tahun 2024, namun masih berada di bawah target RPJMD. Dapat dikatakan peningkatan kualitas lingkungan belum optimal;

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Strategi terhadap capaian kinerja urusan admindukcapil, terutama pada
b. kepemilikan dokumen wajib admindukcapil, terutama pada dokumen wajib yang digunakan untuk pendataan intervensi kemiskinan
c. pelayanan verifikasi identitas kependudukan digital yang sebelumnya hanya bisa dilayani di Kecamatan dan dinas. Target 167 desa/ kelurahan di kabupaten Sukoharjo
d. Mengintensifkan pelayanan aktif secara jemput bola ke sekolah, universitas, perusahaan, event yang melibatkan banyak massa dengan menghadirkan petugas untuk meningkatkan kepemilikan identitas kependudukan digital (IKD)

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Masih sedikitnya desa mandiri di Kabupaten Sukoharjo;
b. Belum optimalnya kapasitas dan ketrampilan aparatur pemerintahan desa dan kader /kelembagaan masyarakat;
c. Belum optimalnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Desa dan aplikasi profil desa oleh perangkat Desa;

d. BUMDes yang ada masih didominasi dengan klasifikasi tumbuh (56,55%) sehingga masih perlu pendampingan guna meningkatkan kondisi BUMDes menjadi lebih mandiri dan maju;
e. Belum adanya regulasi dan penetapan dana pendampingan bantuan keuangan dari pusat dan provinsi;
f. Kurang optimalnya perangkat desa dalam menangani bantuan Dana Desa baik pengajuan sampai pencairan bantuan;
g. Masih banyaknya kelompok penerima bantuan TTG yang belum berbadan hukum sesuai syarat utama untuk proposal pengajuan bantuan TTG pada kelompok TTG;
h. Masih adanya Pasar Desa yang kurang berkembang;
i. Masih adanya desa yang belum mendirikan Bumdes, dan masih adanya bumdes yang kurang berkembang;
j. Belum optimalnya koordinasi antar bidang baik pada tahap perencanaan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi program kegiatan sehingga pencapaian sasaran belum tercapai secara maksimal.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Stigma dan Norma Sosial yang Negatif:
Stigma dan norma sosial yang negatif terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat menjadi penghalang dalam menerima dan menggunakan layanan yang tersedia. Beberapa masyarakat masih menganggap topik ini sebagai tabu atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya atau agama mereka. Hal ini dapat menyebabkan penolakan terhadap program-program tersebut dan menghambat akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diperlukan.
b. Perubahan Demografi dan Urbanisasi:
Perubahan demografi dan urbanisasi dapat menjadi permasalahan tersendiri dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Peningkatan urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat menyebabkan sulitnya mencapai target populasi yang lebih luas. Sementara itu, perubahan dalam struktur demografi seperti peningkatan usia harapan hidup atau perubahan tren kelahiran juga dapat mempengaruhi strategi dan kebijakan yang diperlukan dalam pengendalian penduduk.

9. Perhubungan

Berdasarkan capaian kinerja sektor perhubungan tahun 2025, masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya :

a. Ketersediaan fasilitas keselamatan jalan masih kurang, ditandai dengan fasilitas keselamatan jalan yang tersedia belum memenuhi jumlah kebutuhan;
b. Rasio konektivitas kabupaten masih rendah ditandai capaian rasio konektivitas tahun 2025 sebesar 10,58.
c. Kinerja lalu lintas belum mkasimal, ditandai capaian rasio trayek tahun 2025 sebesar 0,000025;
d. Kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji berkala masih rendah ditandai dengan kendaraan yang

melakukan uji KIR sejumlah 591 dan sertifikat uji KIR yang dikeluarkan 456;

e. Pengelolaan perparkiran belum maksimal, dengan bukti capaian pendapatan dari pengelolaan parkir masih di bawah potensi parkir yang diperkirakan.
f. Pemasangan PJU belum maksimal ditandai dengan kebutuhan PJU tahun 2025 sebesar 8086 unit dan PJU yang tersedia baru mencapai 4.222 unit.
g. Pelaksanaan uji emisi untuk menurunkan Gas Rumah Kaca belum maksimal.
h. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas sekitar 1.752 kejadian lakalantas per tahun.
i. Masih tingginya angka korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas sekitar 100 orang per tahun.
j. Masih adanya perlintasan sebidang yang belum dipasang palang pintu kereta api.

10. Komunikasi dan Informatika

a. Capaian nilai indeks SPBE Tahun 2024 sebesar 4,45 belum mencapai nilai maksimal yaitu 5,00.
b. Nilai indeks keterbukaan informasi publik belum memenuhi kriteria informatif.

11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

a. Belum optimalnya koperasi yang berkualitas
b. Masih terdapat koperasi yang todak sehat
c. Belum maksimalnya penguatan dan pendampingan kelembagaan koperasi, khususnya kiperasi baru;
d. Masih terbatasnya peningkatan volume usaha UMKM dan penguatan jaringan usaha dan belum maksimalnya pendampingan UMKM berorientasi ekspor

12. Penanaman Modal

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu:

a. Keberlanjutan Kemudahan Pelayanan Investasi
b. Peluang persebaran investasi yang merata
c. Optimalisasi pemanfaatan kawasan industri.

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

a. Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin;
b. Kurangnya minat pemuda untuk bergabung dalam organisasi kepemudaan;
c. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan internasional;
d. Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar;
e. Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan stakeholder.

14. Statistik

a. Pengelolaan dan penyelenggaraan statistik sektoral yang ada di daerah untuk kebutuhan perencanaan dan bahan pengambilan kebijakan belum maksimal.
b. Data belum up to date
c. Pengumpulan data sektoral seringkali terlambata

15. Persandian

a. Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi ditandai dengan belum dilaksanakannya *assessment* indeks keamanan informasi
b. Meningkatnya ancaman terhadap data dan informasi pemerintahan di era *e-government*, yang menuntut persandian untuk tidak sekadar menjaga sandi tradisional, tetapi juga mampu menjamin keamanan informasi digital.
c. Adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga kerahasiaan informasi pemerintah (persandian) dengan hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik sesuai UU, yang sering kali menimbulkan kekhawatiran publik akan tertutupnya pemerintahan.
d. Terbatasnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menunjang kegiatan persandian.
e. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang ahli di bidang persandian dan keamanan informasi, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan kemampuan mereka agar mampu bergerak menuju penerapan keamanan informasi digital

16. Kebudayaan

Nilai-nilai budaya merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai berbagai persoalan antara lain adanya indikasi yang mengarah pada melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda, terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan, serta didukung kondisi sarana prasarana dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.

17. Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat positif, ditandai dengan peningkatan jumlah pengunjung yang mencapai 470.647 orang pada tahun 2025 serta rasio kunjungan terhadap populasi sebesar 51,35. Selain itu, koleksi buku baik dalam bentuk judul maupun eksemplar juga mengalami peningkatan signifikan, serta didukung oleh bertambahnya jumlah pustakawan dan tenaga teknis yang memiliki sertifikat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka optimalisasi pembangunan sektor perpustakaan.

a. Rasio perpustakaan per satuan penduduk meskipun meningkat menjadi 0,074 pada tahun 2025, masih tergolong rendah

sehingga menunjukkan bahwa pemerataan layanan perpustakaan belum sepenuhnya optimal, khususnya di wilayah perdesaan.

b. Pengayaan koleksi bahan pustaka masih perlu terus ditingkatkan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendukung literasi digital, pendidikan, dan penguatan budaya lokal.
c. Meskipun jumlah SDM perpustakaan bersertifikat meningkat hingga 327 orang pada tahun 2025, peningkatan kompetensi masih diperlukan untuk mendukung layanan berbasis inklusi sosial dan transformasi digital.
d. Peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan budaya baca, sehingga masih terdapat kesenjangan minat baca antarwilayah.
   Inovasi layanan digital seperti e-perpus, TITIKBACA, dan program berbasis inklusi sosial telah memberikan dampak positif, namun perlu diperluas dan dioptimalkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

18. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan capaian yang cukup baik, ditandai dengan persentase perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku mencapai 100% secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2025. Selain itu, jumlah SDM pengelola arsip yang kompeten juga mengalami peningkatan, meskipun masih terbatas, dari 2 orang pada tahun 2021 menjadi 3 orang hingga tahun 2025. Cakupan arsip yang berhasil dikelola juga menunjukkan tren stabil dengan peningkatan hingga mencapai 43.729 arsip pada tahun 2025, serta didukung oleh tingkat kunjungan layanan dan wisata arsip yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain belum optimalnya pengelolaan arsip secara menyeluruh terutama dalam aspek digitalisasi dan integrasi sistem kearsipan, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM kearsipan yang belum sepenuhnya memenuhi standar profesional, serta keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan arsip, baik melalui pengembangan sistem kearsipan digital, peningkatan kapasitas SDM, maupun penyediaan infrastruktur kearsipan yang memadai guna mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis informasi.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

a. Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan darat yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan.
b. Sektor perikanan ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan

lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

c. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan serta belum optimalnya pengolahan produk unggulan hasil perikanan.

2. Pariwisata

a. Belum optimalnya konsep *eco socio tourism*;
b. Belum optimalnya pariwisaya Syariah
c. Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan;
d. Belum optimalnya kerjasama lintas sektor Pariwisata (lembaga);
e. Belum adanya design untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata;
f. Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.
g. Perlu penguatan kelembagaan Desa Wisata

3. Pertanian

a. Fluktuasi hasil komoditas pertanian karena adanya anomali iklim yang berpengaruh pada ketersediaan air untuk pertanian. Perubahan iklim juga akan berpengaruh pada pola tanam dan tata tanam sehingga mempengaruhi indek pertanaman. Jenis tanaman berganti ganti di lahan pertanian menyesuaikan ketersedian air setiap masa tanam;
b. Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sector pertanian;
c. belum maksimalnya produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Sukoharjo
d. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;
e. Belum optimalnya perlindungan terhadap petani
f. Belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Sukoharjo.

4. Perdagangan

a. Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, domestik maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan info pasar dan menciptakan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
b. Belum adanya pendampingan untuk menangkap arah perdagangan kedepan (isu milenial), dimana model disribusi pasar berubah kedepannya.

5. Perindustrian

a. Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi;
b. Belum optimalnya inovasi teknologi industri;
c. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan, dan lainnya);

d. Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya;
e. Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam.

6. Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia:
Pemerintah Sekretariat Daerah mungkin menghadapi permasalahan terkait keterbatasan sumber daya manusia. Bisa jadi terdapat kekurangan pegawai yang berkualifikasi dan berpengalaman di bidang administrasi, keuangan, dan manajemen. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan juga dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas.
b. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi:
Kurangnya koordinasi antar instansi dalam Pemerintah Sekretariat Daerah juga dapat menjadi permasalahan. Bisa jadi terdapat hambatan dalam berbagi informasi, kerjasama antar unit kerja, atau koordinasi kegiatan yang saling terkait. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih pekerjaan, ketidakjelasan tanggung jawab, dan menghambat efektivitas kerja.

2. Sekretariat DPRD

a. Teknologi dan Sistem Informasi yang Terbatas:
Keterbatasan teknologi dan sistem informasi juga dapat menjadi permasalahan bagi pendukung Sekretariat DPRD. Penggunaan teknologi yang terbatas, kurangnya integrasi sistem informasi, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang ketinggalan zaman dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja. Kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi modern juga dapat membatasi pengelolaan data dan akses informasi yang cepat dan akurat.
b. Kurangnya Pembaruan Kebijakan dan Prosedur Kerja:
Pendukung Sekretariat DPRD mungkin dihadapkan pada permasalahan dalam pembaruan kebijakan dan prosedur kerja yang sesuai dengan perkembangan terkini. Ketidakmampuan dalam mengadopsi perubahan dalam regulasi, kebijakan, atau praktik terbaik dapat menghambat kelancaran tugas administratif dan manajerial. Kurangnya pembaruan kebijakan juga dapat

mempengaruhi responsifitas terhadap tuntutan dan isu-isu baru yang muncul dalam proses legislasi dan pengawasan.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;
b. Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;
c. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai *feed back* dalam proses pembangunan daerah.

2. Keuangan

a. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah;
b. Belum semua aset daerah dapat termanfaatkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

3. Kepegawaian

a. Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;
b. Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat.

4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Belum optimalnya pemenuhan usulan diklat Perangkat Daerah
b. Kurangnya Keterlibatan dan Keterkaitan dengan Instansi Pemerintah Lainnya:
   Keterlibatan dan keterkaitan yang kurang dengan instansi pemerintah lainnya dapat menghambat sinergi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kerjasama yang minim antara BKPSDM dengan instansi terkait, seperti lembaga pendidikan, instansi pemerintah pusat, dan sektor swasta, dapat menghambat pertukaran pengetahuan, pengembangan program yang holistik, dan kebijakan yang terintegrasi dalam pendidikan dan pelatihan.

5. Penelitian dan Pengembangan

a. Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan masih belum optimal;
b. Hilirisasi hasil litbang dan inovasi belum optimal untuk mendukungdaya saing daerah.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Permasalahan lain yang dihadapi antara lain tentang bagaimana kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) harus selalu dapat meningkat, dan bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN.

G. Unsur Kewilayahan

1. **Kecamatan**

Belum meratanya pencapaian komponen angka IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang sudah ditetapkan dalam pelayanan publik merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kewilayahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain SDM yang terbatas dan belum mengikuti kemajuan teknologi serta sarana prasarana yang kurang memadai sehingga mengurangi kenyamanan dan kecepatan pelayanan.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. **Kesatuan Bangsa dan Politik**

Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkaitpemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikanmasalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

2.4.2. Isu Strategis Daerah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukoharjo.

Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukoharjo diperlukan dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat sehingga tercapai manusia Kabupaten Sukoharjo yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing, serta memberikan dukungan terhadap kebijakan transformasi sosial. Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukoharjo dihadapkan pada tantangan: (a) Akses, penyelenggaraan dan kualitas pendidikan perlu ditingkatkan; (b) Kualitas kesehatan masyarakat dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat perlu ditingkatkan; dan (c) Kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender perlu ditingkatkan. Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukoharjo difokuskan pada peningkatkan kualitas layanan dasar secara merata dan inklusif, terutama kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar dan meningkatkan akses kehidupan yang sehat.

Modernisasi dan globalisasi memiliki implikasi terhadap kehidupan masyarakat, terdapat karakter baru yang berseberangan terhadap budaya asli masyarakat Sukoharjo. Untuk itu ketahanan budaya menjadi hal penting untuk mengembalikan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang

berkarakter memiliki identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur. Peran dan fungsi agama menjadi penting untuk menempatkan dalam konteks membangun ketahanan budaya. Pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter masyarakat sejak dini, serta budaya literasi dalam berbagai aspek. Ketahanan budaya yang kuat dan kokoh akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, selain itu sebaliknya ketahanan budaya akan tercapai apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan daerah. Dengan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah daerah menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama dan inklusif dalam pembangunan daerah tanpa memandang latar belakang, identitas, dan status.

Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukoharjo perlu mendukung terhadap kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dalam upaya penanaman nilai budaya dan upaya menumbuhkembangkan budaya mencintai alam lingkungan dan mitigasi bencana dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, dan lingkungan dalam pemantapan ketahanan ekologi mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

2. Tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang adaptif dan amanah (*governance*)

Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) diperlukan dalam rangka memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, gerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih agile) dengan tetap menjaga integritas semakin kuat serta mendukung kebijakan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) dihadapkan pada tantangan: (a) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu ditingkatkan; (b) Kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan; (c) Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditingkatkan; dan (d) Daya saing daerah perlu ditingkatkan.

Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) difokuskan pada pemerintahan berbasis digital yang efektif lincah dan kolaboratif didukung budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dan partisipasi masyarakat sipil yang mandiri

dalam pembangunan daerah, serta sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

Birokrasi yang dinamis tercermin dari pelayanan publik yang semakin berkualitas, manajemen organisasi dan proses bisnis yang semakin adaptif dan berorientasi pada hasil, kelembagaan yang efektif, digitalisasi tata kelola pemerintahan, manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien, regulasi, pengawasan yang independen dan berintegritas, pengembangan budaya kerja, pola pikir birokrasi, serta komitmen.

Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis dalam. Hal tersebut didasari karena adanya dependensi antardaerah yang pada akhirnya akan semakin besar. Tidak hanya kolaborasi antardaerah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya pun perlu semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai dalam mendukung kebijakan kesinambungan pembangunan. Birokrasi kolaboratif juga diperlukan untuk mewujudkan daya saing daerah kategori tinggi mendukung kebijakan transformasi ekonomi pada kebijakan hilirisasi, digitalisasi ekonomi, serta berbasis riset dan inovasi dalam peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah. Birokrasi kolaboratif juga diarahkan pada peningkatan kemandirian desa untuk semakin memperkuat pembangunan perdesaan.

3. **Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif.**

   Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif diperlukan dalam rangka membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan, serta perwujudan sistem perlindungan sosial dan sistem pangan yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif dihadapkan pada tantangan (a) Pemanfaatan potensi ekonomi untuk pembangunan daerah masih belum maksimal; dan (b) Kemampuan daya beli masyarakat masih harus ditingkatkan. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif difokuskan pada meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi, dan meningkatkan sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo.

   Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan, terutama sektor-sektor unggulan daerah yang berkontribusi besar pada perekonomian daerah yaitu sektor pertanian (dalam arti luas), sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM) terutama penduduk usia produktif agar lebih kreatif, produktif dan inovatif dalam menghasilkan produk-produk yang memiliki

nilai tambah dan bersaing di pasar global. Selain itu, perwujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu semakin ditingkatkan aktivitas ekonomi produktif yang berdaya saing berbasis kewirausahaan melalui pengembangan sektor UMKM dan koperasi dan pengembangan ekonomi kreatif. Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif diharapkan akan mendukung implementasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Stabilitas ekonomi makro daerah diperlukan agar mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan menciptakan pekerjaan yang layak.

Meningkatkan sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif sehingga tercapai manusia Kabupaten Sukoharjo yang semakin makmur. Dalam mendukung kebijakan transformasi sosial, memastikan penyediaan jaminan perlindungan sosial secara merata dan inklusif, serta meningkatkan ketahanan pangan yang lebih terjangkau, beragam, bergizi seimbang dan aman, serta dalam mendukung transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat seiring dengan perkembangan inflasi daerah yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif, Pemerintah Daerah menjamin adanya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

4. **Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan.**

   Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan diperlukan dalam rangka membangun sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan, pemantapan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan yang mudah diakses dan berkelanjutan, serta perwujudan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman yang berkelanjutan dan inklusif memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan dihadapkan pada tantangan (a) Pengelolaan lingkungan belum optimal; (b) Tingginya laju degradasi lingkungan; (c) Kapasitas prasarana jaringan jalan dan transportasi masih harus ditingkatkan; (d) Kapasiitas pemenuhan air minum aman dan sanitasi aman rendah; dan (e) Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan dalam mendukung kebijakan transformasi ekonomi dalam mendorong produktivitas sektor-sektor unggulan daerah dilakukan melalui pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam mendukung kebijakan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas hunian layak serta permukiman sehat bagi masyarakat dan penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang dalam mendukung pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dalam mendukung kebijakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah Lingkungan;, serta memperhatikan perencanaan wilayah mendasarkan rencana arah pengembangan wilayah Subosukowosraten. Ikan

Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan dalam mendukung kebijakan ketahanan sosial budaya dan ekologi perlu memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam proses pembangunan daerah, serta upaya penanaman nilai budaya dan upaya menumbuhkembangkan budaya mencintai alam lingkungan dan mitigasi bencana. Pembangunan daerah dapat optimal tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, ketahanan sumber daya alam dan ekologi harus kuat mengingat daya dukung dan daya tampung Kabupaten Sukoharjo perlu menjadi perhatian.

Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan merupakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan pembangunan daerah. Ketahanan ekologi fokus pada memantapkan ketahanan sumber daya lahan, ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sumber daya mineral, kualitas lingkungan hidup (baik pada lingkup air, udara, dan tutupan lahan), penataan ruang, ketahanan perubahan iklim, dan ketangguhan bencana, serta penerapan prinsip ekonomi hijau untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarinya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana.

2.5. Kinerja Pembangunan Daerah

2.5.1. Kinerja terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP 2025 di Daerah

Tabel 2. 228 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Daerah dengan Nasional

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
1	**PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia**									
	S.1.1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia									
	1.1. Indeks Demokrasi Indonesia	74,12	80,41	79,51	79,51	Persentase Penegakan Perda	-	-	-	96,96
	1.2. Indeks Hak Asasi Manusia			2,7	2,7	-	-	-	-	-

Tabel 2. 229 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru di Daerah dengan Nasional

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
2	**PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**									
	S.2.1. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan									
	1.1. Asia Power Index (Military Capability)				15,7	Bukan Kewenangan Daerah				
	1.2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)				65,6	Bukan Kewenangan Daerah				
	1.3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	62,8 (2020)	62,8 (2020)	62,8 (2020)	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	-	-	-	74,87
	1.4. Global Cybersecurity Index	94,88	94,88		100	Indeks KAMI (Kemanaan Informasi)	-	-	-	304
	1.5. Indeks Keamanan Laut Nasional				59	Bukan Kewenangan Daerah				
	S.2.2. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)									
	2.1. Indeks Ketahanan Pangan				71,2	Rasio Ketersediaan Pangan	-	-	-	22
	2.2. Pertumbuhan PDB Pertanian,			1,3	1,3					
	Kehutanan, dan Perikanan (%)									
	S.2.3. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam mcmcnuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)									
	3.1. Indeks Ketahanan Energi				6,64					
	3.2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	12,2	12,3	13,2	13,2	-	-	-	-	-
	S.2.4. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekaten Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)									
	4.1. Indeks Ketahanan Air Nasional		3,48	3,48	3,48					
	4.2. Kapasitas tampungan air (m3/kapita)				59,59					
	4.3. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)				24 (2020)	Persentase Akses Air Minum Aman	14,84	13	13,46	13,6
	4.4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)			10,21	10,21	Persentase Akses Sanitasi Aman	2,31	1,42	1,39	1,41
	S.2.5. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif inklusif, dan berkelanjutan									
	5.1. Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)			3	3					
	5.2. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)			34,25	34,25					
	5.3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)			45	45	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	3,48	3,69	4,11
	S.2.6. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau									
	6.1. Indeks Ekonomi Hijau			60,08	60,08					
	6.2. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15	15	15	15 (13 terdaur	Persentase sampah yang tertangani	51,23	56,41	60,78	63,76

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
					ulang 2022)					
	6.3. Persentaae Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	27,07	26,87	17,02	17,02	-	-	-	-	-
	6.4. Persentaae Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	32,97	26,7	23,48	23,48	-	-	-	-	-
	6.5. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35	0,35	0,35	0,35 (2020)					
	6.6. lndeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,45	72,42	72,54	72,54	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,83	61,44	62,03	63,59
	lndeks Kualitas Udara			88,67		lndeks Kualitas Udara	89,44	87,26	87,32	89,47
	lndeks Kualitas Air			54,59		lndeks Kualitas Air	55,83	50,87	52,79	53,72
	lndeks Kualitas Lahan				61,79	lndeks Kualitas Lahan	30,18	31,84	31,14	32,67
	lndeks Kualitas Air Laut				78,84	-	-	-	-	-

Tabel 2. 230 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi di Daerah dengan Nasional

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
3	**PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi**									
	S.3.1. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan									
	1.1. Stok lnfrastruktur terhadap PDB (%)				43 (2019)					
	S.3.2. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB									
	2.1. Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)			17,05		-	-	-	-	-
	2.2. Aset Perbankan/PDB (%)			57,2						
	2.3. Aset Dana Pensiun/PDB (%)			7,3						
	2.4. Aset Asuransi/PDB (%)			9						
	2.5. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)			55,9						
	2.6. Total Kredit/PDB (%)			33,9						
	2.7. Inklusi Keuangan (%)			88,7						
	S.3.3. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas									
	3.1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)				23,96	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	0,55	0,67	0,71	0,60
	3.2. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07								
	3.3. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)				3,06	Jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina	36	38	40	42
	3.4. Rasio Kewirausahaan (%)	2,89	2,86	3,04	3,08	Rasio Kewirausahaan (%)	2.4	2.6	2.8	3
	S.3.4. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata									
	4.1. Rasio PDB Pariwisata (%)	2,4	3,6	3,6	3,6	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	3,59	3,59	3,7	3,69
	4.2. Devisa Pariwisata (Miliar USD)	0,55	7,04	14	14	-	-	-	-	-
	S.3.5. Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif									
	5.1. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)			6,77						

Tabel 2. 231 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas di Daerah dengan Nasional

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
4	**PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi**									
	Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan									
	Penyandang Disabilitas									
	S.4.1 Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata									
	1.1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas l5tahun (tahun)	8,97	9,08		9,22	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,35	9,62	9,84	10,01
	1.2. Harapan lama sekolah (tahun)	13,08	13,1	13,21	13,21	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,84	13,9	13,91	13,92
	1.3. Rata-rata nilai PISA					-	-	-	-	-
	(a) Membaca		359			-	-	-	-	-
	(b) Matematika		366			-	-	-	-	-
	(c) Sains		383			-	-	-	-	-
	1.4. Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional									
	(a) Literasi Membaca			60,89						
	(b) Numerasi			51,36						
	1.5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)			31,45		-	-	-	-	-
	1.6. Proporsi penduduk berusia l5 tahun ke ataa yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)			10,15						
	1.7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	40,39	40,49	66,3	66,3					
	S.4.2. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua									
	2.1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)			72,13		Angka Harapan Hidup (AHH)	77,73	77,82	77,86	78,01
	2.2. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur I5-49 tahun)	2,24	2,14	2,14	2,14	-	-	-	-	-
	2.3. Angka kematian lbu (per 100.000 kelahiran hidup)	189	n.a	n.a.	n.a	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	172,60	111,59	68,31	127,58
	2.4. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24,1	24,37	21,5	21,5	Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	7,10	8,10	7,00	9,5
	2.5. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	301	354	387	387	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	78,79	139,24	206,52	217,79
	2.6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)				98,42					
	S.4.3. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat lnklusif									
	3.1. Indeks Pembangunan Keluarga	54,01	56,07	69,51	69,51	Indeks Pembangunan Keluarga	56,19	60,53	67,65	67,99
	3.2. Indeks Perlindungan Anak	61,38	69,87	68,29	68,29	Indeks Perlindungan Anak	N/A	N/A	67,43	Belum Rilis
	3.3. Indeks Pembangunan Pemuda	51	53,33	60,59	60,59	Indeks Pembangun an Pemuda (IPP)	41.77	52.53	54.66	60.83
	3.4. lndeks Ketimpangan Gender			0,447		lndeks Ketimpangan Gender	0.16	0.26	0.15	0.17
	3.5. lndeks Pembangunan Gender	91,27	91,63	91,85	91,85	Indeks Pembangun an Gender (IPG)	96.52	96.96	97.32	97.87
	3.6. Mobilitas Penduduk lanjut Usia (%)			92,94						
	3.7. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)			68,42						
	S.4.4. Menguatnya lptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja									
	4.1. Peringkat lndeks Inovasi Global	87	75		54	Indeks Inovasi Daerah	96.52	96.96	97.32	97.87
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				4,91	Tingkat Penganggura n Terbuka (%)	3,32	2,47	3,4	3,65
	b. Pengeluaran lPTEK dan Inovasi (% PDB)	0,28								
	c. Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan (%)				56,42					
	S.4.5. Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat									
	5.1. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games				2					

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
	5.2. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games				1					
	5.3. Peringkat pada Asian Games			13						
	5.4. Peringkat pada Asian Para Games			6						
	5.5. Peringkat pada Sea Games			3						
	5.6. Peringkat pada Asean Para Games			1						
	5.7. Persentase penduduk berumur 10 tahun yang aktif berolahraga				9,04					

Tabel 2. 232 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri pada Nasional dan Daerah

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
5	**PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**									
	S.5.1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan									
	1.1. Rasio PDB lndustri Pengolahan (%)	19,24	18,34	18,67	18,67	Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB	38,98%	38,74%	38,32%	38,15%
	S.5.2. Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domcstik dan Global									
	2.1. Biaya Logistik (% PDB)		14,29							
	2.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)			29,3						
	2.3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)			21,7						

Tabel 2. 233 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan di Nasional dan Daerah

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
6	**PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**									
	S.6.1. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan									
	1.1. Tingkat kemiskinan (%)				9,03	Tingkat kemiskinan (%)	8,23	7,61	7,58	7,47
	1.2. Tingkat kemiskinan ekstrem (%)				1,47					
	1.3. Proporsi penduduk kelas menengah (%)				17,13					
	1.4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)				29,77	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)				34,37
	1.5. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)			9,07						
	S.6.2. Meningkatkan akscs hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan									
	2.1. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	60,9	60,66		65,25	Persentase rumah layak huni	95,56	95,90	96,37	96,76
	S.6.3. Mewujudkan pcmbangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan									
	3.1. Persentase desa mandiri (%)				22,85	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri				40,66
	S.6.4. Perkotaan sebagai pusat penumbuhan ekonomi									
	4.1. Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)		56,56							
	4.2. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)		44,13							

Tabel 2. 234 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan di Nasional dan Daerah

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
7	**PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**									
	S.7.1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional									
	1.1. Indeks Pembangunan Hukum	0,6	0,56	0,68	0,68	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,55	83,69	85,35	85,49
	1.2. Indeks Persepsi Korupsi			34		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	n.a	n.a	n.a	3
	1.3. Indeks Materi Hukum			0,6						
	1.4. Indeks Integritas Nasional			70,97		Indeks Integritas Nasional	N/A	79,81	77,39	79,37
	1.5. Indeks Integritas Partai Politik				62,83					
	2.1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional				69,98	Indeks Reformasi Birokrasi	55,24	59,59	72,92	86,2
	2.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			2,79		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,93	3,42	4,35	4,45
	2.4. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri				93					
	S.7.3. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba									
	3.1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika			1,73						
	S.7.4. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan									
	4.1. Return on Asset (ROA) BUMN (%)			3,14						-
	S.7.5. Tercapainya Peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan									
	5.1. Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)				12,82	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	24,926	24,58	24,85	24,69
	5.2. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	9,12	10,39	9,12	10,07	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100	100	100	98,16
	S.7.6. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan									
	6.1. Tingkat Inflasi (%)	1,87	5,51	2,61	1,57	Inflasi				

Tabel 2. 235 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur di Nasional dan Daerah

No	Prioritas Nasional/Sasaran Prioritas Nasional/Indikator	Capaian Nasional				Indikator Program Daerah	Capaian Daerah			
		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
8	**PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**									
	S.8.1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju									
	1.1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85								
	1.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51,9	59,71	57,13		Terlestarikannya Cagar Budaya	0,35	2,90	5,78	7,14
	1.3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,39	73,09	76,02	76,47	Indeks Kerukuman Umat Beragama	70	75	78	80
	S.8.2. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim									
	2.1. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)		0,14							

2.5.2. Intervensi Daerah dalam Mendukung Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dan stabilitas di tengah berbagai tantangan global, seperti perlambatan ekonomi, tekanan

inflasi, serta ketidakpastian geopolitik. Kondisi tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengarahkan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerataan kesejahteraan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya. Adapun intervensi yang dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 236 Intervensi Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
1	Gerakan Membangun Petani Milenial **(Gerbang Tami)**	DINAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.492.000.000	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah):• 2023: 49,88• 2024: 53,08 PDRB Sektor Pertanian (Miliar Rupiah):• 2023: 3.863,13• 2024: 4.069,27
		BAPPERIDA	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	840.000.000	
		DISPERNAKER	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	432.800.000	
		DPMD	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	11.150.578.000	
			JUMLAH	**24.915.378.000**	

Sumber: Bapperida 2025 (data diolah)

B. Penurunan Kemiskinan

Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif di Kabupaten Sukoharjo diarahkan untuk memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Upaya penurunan kemiskinan tidak hanya difokuskan pada penurunan angka kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga diarahkan pada pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut memerlukan sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Adapun intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 237 Intervensi Daerah dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
2	Pengurangan Kemiskinan	DISHUB	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	38.587.962.651	1. Tingkat Kemiskinan 2023 : 7,58 2024 : 7,47 2. TPT 2023: 3,4; 2024: 3,65
		DPKP	Program Kawasan Permukiman	866.100.000	
			Program Pengembangan Perumahan	915.000.000	
		DPUPR	Program Penyelenggaraan Jalan	64.673.359.963	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.714.603.500	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.991.635.000	

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	585.000.000	
		DINKES	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89.861.946.244	
		DINAS P DAN K	Program Pengelolaan Pendidikan	142.777.184.988	
			Program Pengembangan Kebudayaan	2.634.701.500	
		DISKOPUMDAG	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	304.000.000	
			Program Pengembangan UMKM	127.342.000	
		DISPERNAKER	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	818.996.958	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	432.800.000	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.575.000.200	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.492.000.000	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	336.000.240	
		DINSOS	Program Rehabilitasi Sosial	405.594.000	
			Program Pemberdayaan Sosial	570.135.000	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.801.690.000	
		Dinas PPKB dan P3A	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.155.300.000	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.525.348.800	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	359.150.000	
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	413.040.000	
		BPBD	Program Penanggulangan Bencana	1.809.986.000	
		DISDUKCAPIL	Program Pencatatan Sipil	393.315.660	
		DISDUKCAPIL	Program Pendaftaran Penduduk	1.255.977.440	
		DPMD	Program Penataan Desa	2.460.000.000	
		BAPPERIDA	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.994.900.000	
		SETDA	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	18.146.734.000	
			JUMLAH	**420.984.804.144**	

Sumber: Bapperida 2025 (data diolah)

C. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menempatkan

penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, sekaligus mendukung transformasi ekonomi melalui inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika global. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan berdaya. Adapun intervensi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 238 Intervensi Daerah dalam Mendukung Peningkatan Sumber Daya Manusia

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
3	Peningkatan Sumber Daya Manusia	DINAS P DAN K	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	30.000.000	IPM 2023: 78,65; 2024: 79,3
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	142.777.184.988	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	496.000.000	
		DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	484.895.400	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	89.861.946.244	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.271.630.400	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	330.056.073.545	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	548.642.600	
		DPUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.714.603.500	
		DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	570.135.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.801.690.000	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	405.594.000	
		DINAS PPKB P3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.155.300.000	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.525.348.800	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	120.000.000	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	413.040.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	25.510.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	357.092.500	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	359.150.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.038.412.800	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	117.525.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	220.607.500	
		DISKOMINFO	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.399.860.600	
		DISPUSIP	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	11.287.750.000	

No	Intervensi Daerah	Stakeholder Penanggung Jawab	Program	Dukungan Anggaran dalam Intervensi	Efektivitas Intervensi Daerah
		DISPERNAKER	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	818.996.958	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	432.800.000	
		SETDA	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18.146.734.000	
			JUMLAH	**630.436.523.835**	

Sumber: Bapperida 2025 (data diolah)

2.6. Inovasi Dan Program Unggulan Daerah

2.6.1. Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang dimaknai sebagai segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlandaskan pada prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan umum. Pelaksanaan inovasi daerah dilakukan secara terbuka, akuntabel, serta memenuhi prinsip kepatutan, dengan tahapan yang meliputi pengusulan, penetapan, uji coba, hingga penerapan inovasi. Sumber inovasi dapat berasal dari berbagai pihak, antara lain Kepala Daerah, DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, maupun masyarakat.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan kebijakan inovasi daerah melalui regulasi daerah yang mengatur pedoman pelaksanaan inovasi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat kemandirian daerah melalui pengembangan inovasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah juga secara konsisten melaksanakan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang menghasilkan inovasi, antara lain melalui penyelenggaraan ajang kreativitas dan inovasi daerah (Krenova), serta fasilitasi pengembangan hak kekayaan intelektual.

Selanjutnya, penerapan inovasi daerah di Kabupaten Sukoharjo diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta disinergikan melalui forum koordinasi perangkat daerah. Pengembangan inovasi dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing daerah. Dengan demikian, inovasi daerah diharapkan mampu menjadi pengungkit utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 239 Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo sd Tahun 2025

Perangkat Daerah	Inovasi
Bagian Pemerintahan	a. SIPATAS
	b. APLIKASI LKPJ/LPPD
Bagian Hukum	a. E-Koreksi
	b. Sukoharjo Care
	c. JDIH mobile

Perangkat Daerah	Inovasi
	d. Website JDIH Sukoharjo
	e. Mars JDIH Sukoharjo
	f. Mas Raharjo
Bagian Administrasi Pembangunan	a. SIMPOK
	b. SI e-Mon
	c. SIDAK Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus
Bagian Umum	a. Buka SPJ KU
	b. Surat Masuk dan Surat Keluar
	c. SI KERDIL
	d. ERTIGA (RRR)
	e. SI GAWAI (Penyampaian Informasi Gaji Pegawai)
Bagian Kesra	a. Umroh Gratis bagi Takmir Masjid
	b. SI ABAH (Sistem Informasi Belanja Hibah)
Bagian Perekonomian dan SDA	Aplikasi SINERGI
Sekretariat DPRD	a. JDIH DPRD Kabupaten Sukoharjo (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD)
	b. "BUDI PINTAR" Buku Digital Panduan Inovatif Tata Kelola Pertanggungjawaban Keuangan
Inspektorat Daerah	Whistle Blowing System Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Dinas Pendidikan	a. PPDB ONLINE
	(Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru)
	b. SIMON PENDEKAR SD
	(Sistem Monitoring Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Jenjang SD)
	c. KOMPAS
	(Kolam Pancing Cerdas)
	d. PAPI KRASAN
	(Pembiasaan Positif Kragilan Satu Mojolaban)
	e. KOTAK PINTAR
	(Peningkatan Lima Bidang Pengembangan Menggunakan Media Kotak Pintar Bagi Anak)
	f. Pendikar Gama (Pendidikan Karakter Gayam Lima)
	g. SABTU RELIGI
	h. Multimedia Interaktif "STOP BULLYING"
	i. Film Pendek Berjudul "Satu Pohon Seribu Kehidupan"
	j. TIMBUL (Tim Buletin SMP N 2 Gatak)
	k. Inovasi Elektrolisa Air Minum Panen Air Hujan Masjid Ramah Lingkungan Nurul Iman SMP N 1 Sukoharjo
	l. Program Gizi Berkarsa
	m. Duta Pelajar
	n. Pagelaran Budaya Taman Budaya Suryani
	o. Jam Wajib Belajar Anak Sekolah
	p. Zero Gadget Anak PAUD dan TK
	q. SD School Guard
	r. Sapa Dapodik
	s. GEBERSODHA D' PUMA (Gerakan Bersama Sholat Dhuha SD Negeri Pucangan 05)
	t. KEGIATAN KOKURIKULER (Kami Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan YME)
	u. Jumpa Berseri(Jumat Pagi Bersih, Sehat, dan Religi)
	v. Tranformasi Pembelajaran Konvensional ke Pemanfaatan TV Smart Android di SMP Negeri 5 Sukoharjo
	w. Pemanfaatan Pekarangan Sekolah
	x. D-CLASS (Digital Creative Learning Student Share) melalui optimalisasi komunitas belajar di SD Negeri Combongan 01 Kecamatan Sukoharo Tahun 2025
	y. MBG KARSA BANGSA
	z. Pocket ASN SKH
	aa.Mifisol "Gamifikasi Solfegio"
Dinas Kesehatan	a. SUKOHARJO NGOPENI AKHU (Monggo Peduli Anak Berkebutuhan Khusus)
	b. Pemanfaatan "E DARRIS" untuk Peningkatan Pengendalian Intern di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
	c. "SI PENARI TAMPAN" Integrasi Pelayanan Primer untuk Mengoptimalkan Layanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Sukoharjo
	d. SIMPUS ANGKRINGAN (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Pengembangan Skrining Kesehatan)
RSUD Ir. Soekarno	a. BINCANG SEHAT

Perangkat Daerah	Inovasi
	b. Salin Akhir Topi Osin
	c. SIREB
	d. GERAKAN PAKAI BATIK
	e. Tekon Gizi
	f. Mejik Provent
	g. Prima JKN
	h. Poskemis
	i. "SEPAKET" Untuk Meningkatkan Efektivitas Dalam Pengelolaan Alat Kesehatan Terintegrasi di RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo
	j. "Sikompas" Sistem Notifikasi Komplain Pasien Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo
	k. "PAS BATAS" Panduan Swakelola Badan Layanan Umum Daerah Terakreditasi di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo
	l. "PENA TALI RASA" Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Kerjasama Melalui Digitalisasi berbasis Web di Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo
DPUPR	a. e-siPLah (Sistem Informasi Pertanahan dan Lahan)
	b. Sistem Pendamping Khusus Dokumen SIMBG (SENDIKO SIMBG)
	c. SAHABAT-PBG (Sarana Hebat Bantu Tuntas Persetujuan Bangunan Gedung
DPKP	a. GELORA PEDULI SUKOHARJO
	b. "Disun Mas Karjo" (Digitalisasi Pelayanan Administrasi Rusunawa Masyarakat Kabupaten Sukoharjo)
	c. Sigap PSU (Sistem Informasi dan Komunikasi via Google Form dalam Pengelolaan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan)
	d. "NGOLAH DIRI" Percepatan Penanganan Sampah Melalui Pengelolaan Sa
Dinas Sosial	a. “NGOBRAS” (Ngobrol Bareng Masalah Sosial) Penerapan eKIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Elektronik)
	b. "ADA RASA SOSIAL"
Dinas Pangan	Gerakan Pangan Murah
Dinas Lingkungan Hidup	a. SEMBADA PROKLIM
	(Semangat Bangun Desa Melalui Program Kampung Iklim)
	b. GOEZ ASIK
	(Gerakan Olah Eco Enzym Atasi Sampah Organik)
	c. BEBAS SAMPAH (Bebas Sampah Soko Ngomah)
	(Zero Waste Family Sistem)
	d. SIDALLING
	(Sistem Informasi dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan)
	e. GEMAS RIPAH
	(Gerakan masyarakat membangun desa mandiri sampah)
	f. SIMONIT
	(Peningkatan Kinerja)
	g. SIPIRDA CETAR (Sistem Informasi Penerimaan Insentif Retribusi Daerah)
	h. Penguatan Aksi Lokal Masyarakat Melalui Kecamatan ProKlim untuk Mendukung Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Sukoharjo (Gatutkaca Sigrak)
Disdukcapil	a. MAKE PETAN TUMA (Melayani Keliling Penduduk Rentan Terpadu Bersama)
	b. MAKE DIKE SEMOKE (Melayani Administrasi Kependudukan di Kecamatan Semakin Oke)
	c. TAMAT (Takziah Membawa Akta Kematian)
	d. MAKE CETAR (Melayani Administrasi Kependudukan Cetak KTP Antar)
	e. Melodi (Media Layanan Online dan Informasi)
	f. CUS DAPET DOKU MAKE (Cukup Sekali Urus Dapat Dokumen Administrasi Kependudukan)
	g. PADAMU PENDEKAR (Pengiriman Data Mutasi Penduduk Pindah dan Datang Kepada Desa dan Kelurahan)
	h. PADUKA (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa dan Kelurahan)
	i. WETONKU (Web Repository Akuntabilitas Kinerja Dukcapil)
Dinas PMD	a. PIDEKSO (Pusat Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo

Perangkat Daerah	Inovasi
	b. KOREKSI ONLINE PENCAIRAN HIBAH
	c. SASA SANGGULAN
Dinas Perhubungan	a. SIMPKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor)
	b. SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Parkir Elektronik)
	c. SI LOLA JALAN JALAN di SUKOHARJO (Strategi Pengelolaan Jalan Berkeselamatan di Jalan Kabupaten Sukoharjo)
	d. LIPAT DISHUB (LINK CEPAT Dinas Perhubungan)
	e. Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	f. CCTV Dishub Sukoharjo
Diskominfo	a. SUKO – NET (Sukoharjo Network)
	b. SUKODRIVE (Media penyimpanan file berbasis online atau digital (Cloud)
	c. "SSO SIAP" Single Sign On untuk Integrasi Aplikasi Administrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
	d. Satu Data Sukoharjo
	e. SI BEJO PINTAR (Sertifikat Elektronik sebagai Penjamin Keabsahan Dokumen Pemerintah yang diunggah pada Web Milik Perangkat Daerah)
Dinas PM dan PTSP	a. SPION (Sistem Pelayanan Izin Online)
	b. DPMPTSP Goes to Mall
Disporapar	a. Aplikasi Siraga
	b. Desa Wisata Jangglengan Kampung Bengawan
	c. Aplikasi Sukoharjo Pintar
Dispusip	a. GELIS (Gerakan Literasi Sukoharjo)
	b. PISA KUSUKA (Pusat Informasi Sahabat Anak Kabupaten Sukoharjo)
	c. KITAPUN SENAPAS (Kita Tata Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan)
	d. MAS LESMANA
Dispertan dan Perikanan	a. OPTION (One Stop Service Animal Health and Reproduction)
	b. GERBANG TAMI (Gerakan Membangun Petani Milenial)
	c. " SIBINATANI MAPAN " (Sinergitas Pembinaan Petani Milenial untuk Meningkatkan Produksi Pertanian) di Kabupaten Sukoharjo
	d. “DATAKOE” untuk Pengelolaan Data Produksi Perikanan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo
	e. One Stop Service Layanan Online “ Bakulpasar “ (Branding, Konsultasi Dan Pemasaran) UPTD Pembibitan Ternak, Ikan Dan Inseminasi Buatan Kabupaten Sukoharjo
Diskopumdag	a. Aplikasi “Bang Kepo”
	(Aplikasi Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok)
	b. PAGODA “Pasar Go Digital”
	(Sistem Digitalisasi bagi Pedagang Pasar)
	c. KOMPAS UMKM
	(Kemudahan online mengangkat produk asli Sukoharjo)
	d. SIPDADAKU (Simpan Data Dariku)
	e. ARDI ALIM (Arsip Digital dan Alih Media) untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Arsip Dokumen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
Dispernaker	a. GOTA KEREN (Gerakan Orang Tua Asuh Pekerja Rentan)
	b. SINERGI PENGELOLAAN DATA ALUMNI BLK YANG BELUM BEKERJA UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN DI KABUPATEN SUKOHARJO DI UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUKOHARJO
BAPPERIDA	a. SISAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)
	b. Kolaborasi Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sukoharjo
	c. PISDA (Pusat Informasi Spasial Daerah)
	d. "SULAP-PERI" untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Risiko
	e. “KLINIK PINTAR” Klinik Penyusunan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah guna Meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan di Kabupaten Sukoharjo
	f. GITARKU (Digitalisasi Arsip Dokumen Konsultansi)
BPKPAD	a. BILLING CENTER KABUPATEN SUKOHARJO
	b. E-BPHTB KABUPATEN SUKOHARJO

Perangkat Daerah	Inovasi
	c. LEADER (Layanan Elektronik Pajak Daerah Sukoharjo)
	d. Chek 346 (Transparansi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan melalui digitaliasi)
BKPSDM	a. SI PECUT (Sistem Informasi Pengajuan Cuti)
	b. SIPENATA
	c. SIMONE PENCAK (Sistem Monitoring Capaian Kinerja)
	d. SIAP-ON (Sistem Aplikasi Presensi Online)
	e. "RODA NINJA"
	f. SINDIKA (Sistem Integrasi Digital AKPK)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Layanan SKT ORMAS
	b. SIBERMUDA Sosialisasi Bersih Narkoba
BPBD	KOMANDAN BEJO (Komando Penanganan Bencana Sukoharjo)
Kecamatan Sukoharjo	a. GREBEG PAKUJOYO
Kecamatan Mojolaban	a. Demakan Klunting (Demakan Kerja Nglawan untuk Nyegah Stunting)
	b. Degan Ijo Mamse (Demakan Bergerak Antisipasi Perubahan Iklim Jaman Now Melalui Aksi Mitigasi Adaptasi Kelembagaan)
	c. DLAPOR MOJO (Layanan Aset Pemeliharaan Online Real-Time Mojolaban melalui Google Spreat Sheet)
Kecamatan Polokarto	“JENANG KETAN POLOKARTO”
Puskesmas Mojolaban	DEWI SEMBODRO (Dedikasi Wanita Beraksi Mensukseskan Proses Menyusui)
Puskesmas Sukoharjo	a. SUKET TEKI (Sukoharjo Peduli Tekanan Darah Tinggi)
	b. Rindu padamu (Penjaringan Terduga TB pada Masyarakat Umum)
Kecamatan Jetis	a. PASTI GO
	b. SISTEM PELAYANAN GANGGUAN KEAMANAN” (SIGMA)
Kecamatan Gayam	GERTASTING (Gerakan Terpadu Cegah Stunting)
Kecamatan Gatak	BANTER (Pengembangan Terpadu)
Kecamatan Grogol	"SIMPEN TAPE KETAN" Sistem Monitoring Penjagaan Data Pegawai Kecamatam
Kelurahan Kriwen	"SIPARJAK" Si Penarik Pajak
Kelurahan Sukoharjo	BERGASING (Gerakan Bersama Cegah Stunting)
Kelurahan Dukuh	GELISIH”
	GERAKAN LINGKUNGAN BERSIH DALAM OPTIMALISASI TPS3R “SEJAHTERA MAKMUR” DI KELURAHAN DUKUH KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO
Kelurahan Joho	WALIMAMAH(Pemanfaatan Whatsapp untuk Pengisian Formulir Layanan Umum Secara Mandiri dari Rumah)
Kelurahan Sonorejo	"SIANDRA" Sistem Informasi dan Administrasi Rakyat
Puskesmas Bendosari	OKE PASTI (Optimalisasi Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Hipertensi)
Puskesmas Grogol	a. GEMPUR RESTI
	b. KELUARGA TERAMPIL
Puskesmas Baki	a. GEDHE BERKASE (Gerakan Deteksi Dini Hipertensi Bersama Kader Kesehatan)
	b. SI DARA CEKATAN (Deteksi Dini Payudara dan Rahim dengan Cek Kesehatan)
	c. PenitiMas
Puskesmas Weru	BERAMESTI (Bersama Dampingi Ibu Hamil Periksa Triple Eliminasi)
Puskesmas Gatak	a. KONTER BABAT
	b. HIV
	c. ANTING BERLIAN
	d. SUSAN SIMPATI
Puskesmas Bulu	a. BULU KUCING (Bulu Kurangi dan Cegah Stunting)
	b. LENTERA PUTRI (LEngkapi Nutrisi Edukasi RemajA Putus Risiko Anemia dan Pernikahan Dini)
	c. MAS WALOYO (Bersama MASyarakat KaWAL Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Biar Tidak SuloYO
	d. BUKA TUTUB LEMARI (Bulu Bareng Kader Tuntaske Tuberkulosis Sampe Mari)
	e. SI GADIS MANIS (Sesarengan Ibu Bapak Goleki Anak Disabilitas Untuk Mengoptimalkan Kemandirian Individu dan Sosial Sebagai Intervensi Lanjutan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus)
Puskesmas Polokarto	a. Cek Hiptin Gulali (Cek Hipertensi Rutin Gula Darah Terkendali)

Perangkat Daerah	Inovasi
	b. SEGAR JIWANI RUMPI GEMABYOR (Senam Bugar Sehat Jasmani dan Rohani, Rutin Minum Jamu, Gemar Makan Buah dan Sayur)
	c. BUNDA SEHATI (Bersama Dampingi Selamatkan Hamil Resiko Tinggi)
	d. BESTI (Bersama Eliminasi Stunting)
Puskesmas Nguter	a. Nguter Nguber Bumil Suber
	b. "DISUPAR" Digitalisasi Pengelolaan Surat dan Pengarsipan
Puskesmas Tawangsari	a. KURMA MANIS (Kunjungan Rumah Ibu Hamil dan Ibu Nifas yang Berkualitas)
	b. RATU CERIA (Remaja Tawangsari Tangguh Cegah Anemia)
	c. MEDIASI BUTARI (Media Komunikasi dan Informasi Ibu Hamil Resti Tawangsari)
	d. SEMEDI BUTARI (Semangat Memberikan Edukasi Pada Ibu Hamil Tawangsari)
	e. KANTIL BUTARI (Kawal dan Kintil Ibu Hamil RESTI TAWANGSARI)
Puskesmas Kartasura	a. GERAI TENSI (Gerakan Terintegrasi Atasi Hipertensi)
	b. Garda TB

Sumber: Bapperida 2025 (data diolah)

2.6.2. Program Unggulan Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Program Unggulan

Penutupan beberapa perusahaan besar di Sukoharjo, khususnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRITEX) membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Angka pengangguran di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya meningkat. Penutupan tersebut membawa efek domino bagi UMKM dan bisnis lokal, seperti warung makan, kos-kosan, jasa transportasi dan lainnya. Dengan hilangnya pendapatan ribuan pekerja, konsumsi rumah tangga menurun dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Perekonomian Kabupaten Sukoharjo ditopang oleh UMKM, pertanian, dan usaha berbasis rumah tangga. Sektor-sektor ini berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat desa. Sebanyak 208.725 pelaku usaha aktif pada tahun 2024 yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, industry pengolahan, pertanian, hingga peternakan.

Dibalik peran pentingnya UMKM dalam struktur perekonomian, masih menghadapi permasalahan mendasar yang menghambat perkembangan dan daya saingnya. Peran Pemerintah Daerah sebagai katalisator, regulator dan fasilitator dalam mensinergikan sektor UMKM agar naik kelas dan berdaya saing belum berjalan optimal. Dalam praktiknya, program penguatan ekonomi masih berjalan terpisah antar perangkat daerah sehingga kurang optimal memberi nilai tambah.

Untuk menjawab kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengembangkan inovasi **JAMU GENDONG** sebagai model kerja bersama yang menghubungkan UMKM, petani, desa, BUMDes, BUMD dan dunia usaha dalam satu ekosistem ekonomi

lokal. **JAMU** berasal dari kata **J**alinan **A**ksi **M**andiri **U**MKM yang bermakna terjallinnya hubungan kolaboratif antara pemerintah, pelaku UMKM, petani dan masyarakat guna mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. **GENDONG** mewakili konsep mangangkat dan mengusahakan agar dapat bergerak maju. Memaknai peran Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan kuat dan menyeluruh kepada pelaku ekonomi lokal.

Inovasi **JAMU GENDONG** merupakan inovasi penguatan ekonomi loka berbasis kolaborasi UMKM,Pertanian, BUMD, Desa, Perempuan dalam satu ekosistem terpadu. Inovasi **JAMU GENDONG** tidak berdiri sebagai satu program baru, tetapi sebagai cara baru dalam menyatukan berbagai kegiatan yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri agar saling mendukung dan saling menguatkan Melalui pendekatan ini, penguatan ekonomi dilakukan dari hulu sampai hilir. Petani dan komunitas didorong meningkatkan produksi dan kualitas bahan baku, rumah tangga memperkuat pengolahan dan pengemasan produk, sementara Pemerintah dan mitra usaha membuka akses pembiayaan, pasar, promosi serta teknologi, termasuk ekspor. Seluruh proses tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi sederhana dan sistem informasi digital untuk mendata pelaku usaha, memantau perkembangan program, dan membantu pengambilan keputusan.



1.2. Keterkaitan Program Unggulan yang dikembangkan dengan Tema Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.

Penguatan Landasan Pembangunan Tahun 2027 dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027-2030, adalah Penguatan Pondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi, melalui inovasi **JAMU GENDONG** berkontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan penguatan ekonomi dari hulu sampai hilir.

Jalinan Aksi Mandiri UMKM yang mencakup kolaborasi, pemberdayaan, penguatan kapasitas serta integrasi dengan berbagai sektor menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inovasi **JAMU GENDONG** berperan sebagai penghubung antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Melalui penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, peningkatan akses serta penguatan ekonomi lokal. Sejalan dengan arah pembangunan nasional dan daerah dalam menekankan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.3. Relevansi Konsep Perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Inovasi **JAMU GENDONG** memiliki keterkaitan kuat dengan konsep perencanaan pembangunan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) karena pengembangan UMKM tidak berjalan parsial, namun menjadi bagian utuh dari sistem pembangunan. Pendekatan Tematik menekankan pada fokus atau tema prioritas pembangunan, yaitu penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Pendekatan holistik, pengembangan UMKM berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan berbasis pada sumber daya lokal yang mendorong usaha berkelanjutan. Beberapa komponen pendukung program meliputi UMKM Naik Kelas, Smart Farming, Petani Milenial, Sukoharjo GO GLOBAL, 1 Desa 1 Program Unggulan, Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas, Peningkatan Ketahanan Daerah, dan Pengolahan Sampah Terintegrasi. Pendekatan integratif, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, swasta dan komunitas, sedangkan pendekatan spasial merujuk pada pengembangan potensi lokal / sentra UMKM melalui model **Simpul Gendong Kecamatan**.

1.4. Ruang Lingkup Perencanaan

Inovasi JAMU GENDHONG adalah inovasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penguatan ekonomi lokal berbasis kolaborasi UMKM, Pertanian, BUMD, Desa, Perempuan dalam satu ekosistem terpadu. Ruang lingkup JAMU GENDHONG meliputi tiga tahap utama, yaitu tahap hulu, tahap pengolahan dan tahap hilir. Tahap hulu difokuskan pada proses produksi dan penguatan dasar usaha, tahap pengolahan melalui peningkatan nilai tambah produk dan penguatan usaha lokal, selanjutnya tahap hilir penekanan pada akses pasar dan daya saing daerah.

1.5. Tujuan dan Sasaran

Inovasi **JAMU GENDONG** memiliki tujuan memperkuat ekonomi lokal Sukoharjo melalui mengintegrasikan program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi saling dukung dan saling menguatkan.

Sasaran inovasi JAMU GENDONG yaitu :

a) meningkatnya produktivitas dan kualitas usaha UMKM dan petani, yang ditandai dengan kepemilikan legalitas usaha, penerapan teknologi produksi dan perlindungan resiko.

b) Meningkatnya nilai tambah produk lokal, yang ditandai dengan bertambahnya produk olahan berbasis rumah tangga,

1.6. Muatan Program Unggulan dalam Dokumen Perencanaan

Program unggulan "Penguatan Pondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi" tertera dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 yang dijabarkan melalui RKPD dan RENJA, terintervensi di beberapa Perangkat Daerah.

2. KERANGKA PROGRAM UNGGULAN

2.1. Ringkasan Kerangka Kerja Logis Program Unggulan

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
Akar Masalah	Belum optimalnya program penguatan ekonomi antar perangkat daerah sehingga kurang memberi nilai tambah.	
Permasalahan	• Intervensi program bersifat parsial • Rantai nilai ekonomi tidak terbangun • Kurangnya kesiapan infrastruktur dan SDM • Pertumbuhan ekonomi tidak merata	
Input	Regulasi	Jumlah regulasi
	SDM	Jumlah SDM
	Anggaran	Jumlah intervensi program PD
	Sarana Prasarana	Jumlah sarana prasarana
	Pemanfaatan Tehnologi	Unit
Proses	Identifikasi Permasalahan	Data permasalahan
	Inventarisasi pelaku usaha	Jumlah Usaha
	Inventarisasi kemitraan	Jumlah stake holder
	Optimalisasi tehnologi	Unit
	Penetapan Inovasi	Sistem
	Pembagian Peran	Jumlah SDM
	Implementasi inovasi	Jumlah Kecamatan
	Penyebarluasan informasi	Jumlah program
	Monitoring dan Evaluasi	Laporan
Output	UMKM ber NIB,	Jumlah NIB
	Petani Milenial	Jumlah petani
	Unit Usaha Desa dan BUMDes Aktif	Unit
	Produk 282ocal berlabel dan berkemasan	Jumlah produk
	Kemitraan pasar dan ekspor terbentuk	Jumlah mitra
	Sistem data terpadu terbentuk	unit

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
Outcome Langsung	Akses pasar global	
	Pendapatan BUMDes dan unit usaha desa meningkat	
	Kemitraan dagang, offtaker dan jaringan ekspor terhubung	
	Pengelolaan lingkungan berbasis komunitas lebih tertata	
	Program lebih tepat sasaran dan terpantau	
Outcome Antara	Meningkatnya produktivitas UMKM dan petani	
	Meningkatnya nilai tambah dan kualitas produk lokal	
	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa	
	Meningkatnya akses pasar	
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian Pembangunan daerah	
	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat dan ketahanan wilayah terhadap bencana	
	Meningkatnya kualitas lingkungan	
Dampak	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Laju pertumbuhan ekonomi
	Meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah	Skor IDSD
	Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	Angka kemiskinan
	Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	IPM
	Tata Kelola Pembangunan daerah meningkat	IRB
	Pertumbuhan ekonomi merata	Rasio Gini
	Keberlanjutan lingkungan daerah menguat	IKLH

2.2. Penjelasan Input

Pelaksanaan “Penguatan Pondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi” yang diimplementasikan dalam inovasi JAMU GENDONG meliputi :

a. Regulasi
b. Alokasi anggaran APBD
   Intervensi program unggulan Penguatan Pondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi tersebar pada beberapa perangkat daerah pengampu program tersebut, antara lain Sekretariat Daerah, Bapperida, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Menengah dan Perdagangan, Dinas Pangan, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, dan BPBD.
c. Kelembagaan

Inovasi JAMU GENDONG dalam rangka mendukung program Penguatan Pondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo. Bapperida Kabupaten Sukoharjo selaku koordinator pelaksanaan inovasi JAMU GENDONG.

d. Institusi dan Stakeholders yang terlibat

Dengan konsep ***Pentahelix Plus*** guna memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, stakeholders yang terlibat antara lain :

- **Pemerintah**; sebagai katalisator, regulator dan fasilitator dalam mensinergikan program
- **UMKM dan pelaku usaha rumah tangga**; Subjek sekaligus penggerak ekonomi lokal
- **Desa dan BUMDes**; penghubung antara usaha rumah tangga dan sistem ekonomi yang lebih besar.
- **BUMD dan Perbankan**; Penguatan pembiayaan dan keberlanjutan usaha
- **Dunia Usaha dan Mitra Pasar**; Pembuka akses pasar dan penggerak rantai nilai tambah
- **Akademisi**; Memberikan riset, rekomendasi berbasis data, dan pendampingan teknis program
- **Media**; Penguat informasi, promosi, dan citra produk lokal
- **Komunitas Kreatif**; Pendorong inovasi, desain, dan daya saing produk

e. Pemanfaatan Tehnologi

Melalui portal "**Kompas UMKM" (Kemudahan Online Mengangkat Produk Asli Sukoharjo)** adalah platform digital yang diluncurkan Pemkab Sukoharjo untuk mempercepat transformasi digital, mempermudah pemasaran, dan memberdayakan UMKM naik kelas. Aplikasi ini menghubungkan berbagai produk local langsung ke konsumen secara online, mengatasi tantangan teknologi.

f. Sarana Prasarana

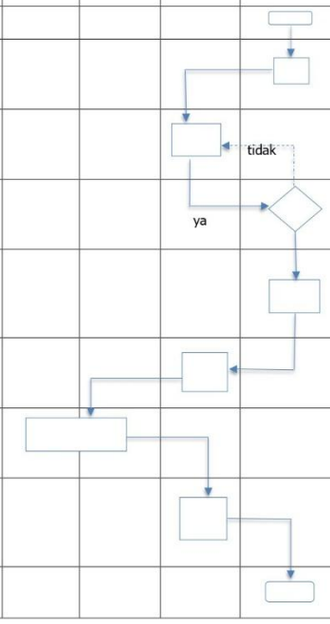
Ruang pelatihan, Rumah produksi, Demplot pertanian, TPS3R, Bank Sampah, ruang rapat, internet.

2.3. Penjelasan Proses

Proses intervensi program unggulan dirancang untuk memastikan integrasi antara inovasi **JAMU GENDONG** dengan prioritas pembangunan daerah. Berikut adalah tahapan proses secara rinci :

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
	Mitra/ Perbankan	UMKM / Petani	PD Teknis	Bapperida	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mulai								
Koordinasi dengan PD Teknis					Undangan, ruang rapat	1 minggu	Form pendataan	
Inventarisasi pelaku usaha, kemitraan					Form pendataan	2 minggu	Daftar pelaku usaha dan kemitraan	
Memeriksa data pelaku usaha dan kemitraan					Daftar pelaku usaha dan kemitraan	1 minggu	Daftar usulan kegiatan	
Mengidentifikasi dan menyusun usulan kegiatan					Daftar usulan kegiatan	2 minggu	Surat penawaran kolaborasi kegiatan	
Menyampaikan penawaran program					Surat penawaran kolaborasi kegiatan	1 minggu	Kesepakatan kerjasama	
Menyetujui program kerja sama					Kesepakatan kerjasama	1 minggu	pelaksanaan program	
Intervensi program					pelaksanaan program	... bulan	Laporan	Pelatihan, pendampingan, fasilitas legalitas, akses pembiayaan, standarisasi produk, akses pasar
Monitoring dan Evaluasi								



b. Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Program Unggulan
   - Identifikasi Permasalahan; menganalisis kapasitas SDM, penguatan ekosistem dan kelembagaan, dan pola akses pasar
   - Inventarisasi pelaku usaha/kemitraan; penguatan data pelaku usaha dan mitra pasar, serta portal KOMPAS UMKM
   - Mengidentifikasi usulan kegiatan; pengerintegrasian intervensi program lintas sektor dan wilayah
   - Kesepakatan program kerja sama; membangun ekosistem kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, desa/BUMDes, BUMD, perbankan, dan mitra pasar
   - Intervensi program; inovasi JAMU GENDONG diujicobakan di Kecamatan sebagai Simpul Gendong Kecamatan.
   - Monitoring dan Evaluasi; dilakukan secara berkala untuk mengukur dampak ekonomi dan sosial.

c. Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan
   Penguatan ekonomi inklusif bertujuan memastikan seluruh kelompok Masyarakat, antara lain UMKM, petani kecil, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin memiliki akses setara terhadap peluang ekonomi. Berikut masalah yang dihadapi serta Upaya tindak lanjutnya :

No.	Masalah yang dihadapi	Tindak Lanjut
1.	Rendahnya kapasitas SDM	▪ Pelatihan berjenjang: manajemen usaha, literasi keuangan, digital marketing, pengemasan produk. ▪ Pendampingan berkelanjutan

		▪ Inkubasi bisnis berbasis potensi lokal dan keterlibatan generasi muda
2.	Lemahnya ekosistem dan kelembagaan	▪ Penguatan tata kelola BUMDes dan unit usaha produktif desa. ▪ Pengembangan klaster usaha berbasis komoditas unggulan
3.	Keterbatasan akses; pembiayaan dan pasar	▪ Pengembangan skema pembiayaan inklusif ▪ Kemitraan dengan off-taker, dan e-commerce. ▪ Fasilitasi legalitas usaha (NIB, PIRT, Halal, BPOM). ▪ Penguatan branding produk lokal dan promosi terpadu.
4.	Belum terintegrasinya intervensi program lintas sektor dan wilayah	▪ Pembentukan forum kolaborasi ekonomi inklusif daerah ▪ Integrasi data UMKM/petani dalam satu sistem

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan bersama-sama dengan stake holders berbasis data spasial dan kelompok sasaran. Pengukuran berbasis outcome yaitu peningkatan pendapatan, omzet, tenaga kerja. Dan kedepannya perlu dibangun sebuah sistem monitoring perkembangan usaha penerima program yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan riil usaha setelah menerima bantuan/intervensi, mengukur dampak program, serta menjadi dasar perbaikan kebijakan dan penentuan intervensi lanjutan.

e. Kunci Keberhasilan

Kunci keberhasilan pelaksanaan program unggulan selain Komitmen Pemerintah Daerah terletak pada terbentuknya ekosistem yang memastikan akses setara terhadap pembiayaan, kapasitas usaha, kelembagaan yang kuat, serta keterhubungan pasar bagi UMKM, petani kecil, dan kelompok rentan. Ekosistem ini diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, desa, perbankan, swasta, dan pendamping, dengan digitalisasi sebagai pengungkit utama efisiensi dan perluasan akses. sehingga pertumbuhan yang dihasilkan bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.4. Penjelasan Output

No	Uraian	Indikator	Output
1	UMKM ber NIB,	Jumlah NIB	
2	Petani Milenial	Jumlah Petani	
3	Unit Usaha Desa dan BUMDes Aktif	Jumlah Unit usaha desa/BUMDes aktif	
4	Produk lokal berlabel dan berkemasan	Jumlah produk	Halal : BPOM :
5	Kemitraan pasar dan ekspor terbentuk	Jumlah mitra	Perbankan : Mitra usaha :
6	Sistem data terpadu terbentuk	Unit	

2.5. Penjelasan Outcome dan Dampak

Implementasi program unggulan melalui Inovasi "JAMU GENDONG" berkontribusi menghasilkan outcome antara lain :

a. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat pada tahun 2025 sebesar 5,13%
b. Meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah tahun 2024 sebesar 4,11. Masuk dalam Kabupaten tertinggi ke 2 tingkat Nasional. Untuk tingkat Subosukawonosraten berada dibawah Kota Surakarta.
c. Menurunnya tingkat kemiskinan daerah di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 sebesar 6,83% turun 0,64% dari 7,47 persen pada tahun sebelumnya.
d. Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan Masyarakat, ditunjukan melalui potret kualitas hidup Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025 sebesar 79,9% melampaui rata-rata Provinsi maupun Nasional.
e. Tata Kelola Pembangunan daerah meningkat; ditunjukan melalui peningkatan pertumbuhan kinerja Pemerintah Daerah, pada tahun 2024 memiliki skor 86,2, meningkat pesat dalam kurun waktu 2021-2024 sebesar 30,96 poin.
f. Pertumbuhan ekonomi merata, ditunjukan dengan Rasio Gini di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 0,390 lebih tinggi dari provinsi maupun Nasional.
g. Keberlanjutan lingkungan daerah menguat.

3. KEBERLANJUTAN DAN POTENSI REPLIKASI

3.1. Potensi Repikasi

Inovasi "JAMU GENDONG" dapat direplika di daerah lain dengan pola Kerjasama dan penyesuaian pada kondisi lokal masing-masing, menjadikannya model rujukan dalam penguatan ekonomi berbasis data. Karakteristik inovasi "JAMU GENDONG" menawarkan pendekatan inovatif yaitu sistem kolaboratif, akuntabilitas digital, partisipatif, skalabilitas dan adaptabilitas, serta integrasi multi-pihak untuk penguatan ekonomi yang inklusif.

3.2. Strategi Keberlanjutan

Metode Inovasi JAMU GENDONG dari "dibantu", menjadi "terhubung" dan selanjutnya menjadi "Mandiri", hal tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, namun sebuah gerakan ekonomi daerah. Strategi keberlanjutan inovasi dilakukan melalui penguatan kelembagaan melalui forum kolaborasi UMKM lintas perangkat daerah, integrasi program prioritas lintas sektor, membangun ekosistem usaha, pendampingan berkelanjutan, membina kemitraan dengan sektor swasta, membuka akses pasar jangka panjang. Disamping itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berbasis data untuk efektivitas program, serta penguatan mindset kewirausahaan mendorong kemandirian UMKM atau pelaku usaha.

2.7. Penghargaan yang Diterima Kabupaten Sukoharjo

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 telah menunjukkan capaian kinerja yang positif melalui perolehan berbagai penghargaan di

tingkat provinsi, nasional, maupun internasional pada berbagai bidang pembangunan. Capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, inovasi, dan daya saing daerah. Adapun penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 240 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

NO	NAMA PENGHARGAAN	NAMA PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT	TAHUN	DESKRIPSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024	Dinas Sosial	Ombudsman RI	Nasional	2024	Penghargaan dari Ombudsman RI untuk Penilaian Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)
2	PIAGAM PENGHARGAAN JUARA I KOMPETISI KETERAMPILAN INSTRUKTUR NASIONAL IX TAHUN 2024 TINGKAT NASIONAL BIDANG KOMPETISI PENGELASAN	AZIS ISMAIL, S.Pd. (INSTRUKTUR AHLI MUDA UPTD BLK DISPERNAKER)	KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN	NASIONAL	2024	Predikat juara I bidang pengelasan dalam lomba Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) yang ke IX di BPVP Sorong Papua Barat Tanggal 2 - 7 September 2024
3	PENGHARGAAN IBANGGA TINGKAT NASIONAL	BUPATI SUKOHARJO	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Nasional	2024	Diberikan kepada Kabupaten Sukoharjo oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nasional pada tahun 2024 atas prestasi dalam implementasi program IBANGGA tingkat nasional.
4	JUARA 1 TINGKAT NASIONAL LOMBA USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) DENGAN KATEGORI TERCEPAT DAN TERLENGKAP GERAKAN SERENTAK PENERBITAN 1000 NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	KELOMPOK UPPKA RAHAYU DESA PENGKOL, KECAMATAN NGUTER	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Nasional	2024	Kelompok UPPKA Rahayu Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, meraih juara pertama pada lomba ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nasional pada tahun 2024.
5	JUARA 1 TINGKAT NASIONAL LOMBA KELOMPOK KB PRIA	KELOMPOK KB PRIA SURYA KENCANA DESA KARANGWUNI, KECAMATAN WERU	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Nasional	2024	Diterima oleh Kelompok KB Pria Surya Kencana Desa Karangwuni, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, sebagai pengakuan atas partisipasi dan kontribusi dalam pengelolaan program KB Pria tingkat nasional pada tahun 2024.
6	SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR	OKKPD KABUPATEN SUKOHARJO	BADAN PANGAN NASIONAL	NASIONAL	2024-2027	PREDIKAT "A" SANGAT BAIK DALAM PELAKSANAAN SISTEM

NO	NAMA PENGHARGAAN	NAMA PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT	TAHUN	DESKRIPSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						MANAJEMEN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI DAERAH
7	Sekolah Adiwiyata Nasional	SDN Jetis 01 Kecamatan Sukoharjo	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	2024	Sekolah Adiwiyata Provinsi merupakan Sekolah yang telah melakukan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan mencapai passing grade 90
8	Sekolah Adiwiyata Nasional	SMP Islam Al Hadi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	2024	
9	Sekolah Adiwiyata Nasional	SMPN 1 Gatak	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	2024	
10	Sekolah Adiwiyata Nasional	SMPN 1 Nguter	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	2024	
11	Sekolah Adiwiyata Nasional	SMPN 1 Polokarto	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	2024	
12	Sekolah Adiwiyata Nasional	SMPN 1 Tawangsari	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	2024	
13	Sekolah Adiwiyata Nasional	SMPN 2 Tawangsari	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	2024	
14	Sekolah Adiwiyata Nasional	SMPN 3 Kartasura	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	2024	
15	Sekolah Adiwiyata Mandiri	SMKN 2 Sukoharjo	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	2024	Sekolah Adiwiyata Mandiri merupakan Sekolah yang telah melakukan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan mencapai passing grade 95 serta membina setidaknya 2 sekolah
16	Penghargaan kepada Kepala Daerah Yang Berhasil Mendukung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2024	Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	2024	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah yang telah berhasil mendukung pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
17	Adiwiyata Photography Competition Kategori SD	SDN Polokarto 04	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	2024	Dalam rangka menyambut Penghargaan Adiwiyata Tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan Adiwiyata Photography Competition
18	PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	NASIONAL	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO MENDAPAT PREDIKAT ZONA HIJAU KUALITAS TERTINGGI PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

NO	NAMA PENGHARGAAN	NAMA PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT	TAHUN	DESKRIPSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						PUBLIK DENGAN NILAI 99.65
19	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Tahun 2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kemendagri	kementrian	2024	Pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan aset desa dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil inventarisasi
20	Penghargaan Bhumandala RAJATA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Informasi Geospasial	Nasional	2024	Ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah bersinergi dalam penyelenggaraan penegasan batas desa dan kelurahan melalui tahapan verifikasi teknis.
21	Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	KEMENDES	kementrian	2024	Untuk mengapresiasi kinerja dalam mendorong percepatan pembangunan desa berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun tahun 2024
22	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Bupati Sukoharjo	Kementerian Perhubungan	Nasional	2024	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan sehingga tercipta sistem transportasi perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman, dan berkelanjutan Kategori Kota Kecil
23	Penghargaan Hub Awards nominasi Transportasi Berkelanjutan Kategori Kabupaten Besar	Bupati Sukoharjo	Kementerian Perhubungan	Nasional	2024	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meraih peringkat 3 besar Hub Awards 2024 dengan nominasi Transportasi Berkelanjutan kategori Kabupaten besar
24	PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TERBAIK PADA KATEGORI KABUPATEN	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOPHARJO	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	NASIONAL	2024	PENGHARGAAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TERBAIK KE-3 UNTUK KATEGORI KABUPATEN PADA DIGITAL GOVERNMENT AWARD SPBE SUMMIT 2024
25	Juara 1 Stand Terbaik Pergelaran Pameran Produk Kreatif Pariwisata dan Bisnis Jakarta	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Koperasi dan UKM	Nasional	2024	Stand Terbaik 1 Pameran Produk Kreatif Pariwisata dan Bisnis Jakarta 2024 di Green Pramuka Square

NO	NAMA PENGHARGAAN	NAMA PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT	TAHUN	DESKRIPSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Jakarta Pusat tanggal 1-4 Februari 2024
26	Juara 1 Stand Favorit Lombok Sumbawa ITTAF	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	PT. Aaliyah Cipta Pradana	Nasional	2024	Stand Favorit 1 Pameran Lombok Sumbawa ITTAF di Lombok Epicentrum Mall tanggal 27 – 29 September 2024
27	Juara 1 Stand Terbaik Pameran Produk UMKM dan Industri Olahraga	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	Nasional	2024	Pameran Produk UMKM dan Industri Olahraga pada 13 Oktober 2024 di Jogja City Mall
28	Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Nasional	2024	Diberikan untuk 12 pasar di Kabupaten Sukoharjo pada saat acara Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024 pada tanggal 18 November 2024 di Banjarmasin
29	Produktivitas Padi Tertinggi Kedua Tingkat Nasional	Dinas Pertanian dan Perikanan	Kementerian Pertanian RI	Nasional	2024	Kabupaten Sukoharjo mendapatkan penghargaan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia atas capaian prestasi produktivitas padi tertinggi kedua tingkat nasional
30	JDIH Award 2024	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Nasional	2024	Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HN-04.HN-03.05 TAHUN 2024 tanggal 14 Agustus 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Penganugerahan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Oktober 2024 bertempat di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta Barat. Dalam kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada acara penganugerahan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Bapak Widodo menerima

NO	NAMA PENGHARGAAN	NAMA PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT	TAHUN	DESKRIPSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Penghargaan JDIH Award tahun 2024 dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., **Kabupaten Sukoharjo masuk dalam terbaik ke II Nasional tahun 2024** dengan kategori Kabupaten dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Penganugerahan ini merupakan perghargaan yang diberikan bagi anggota pengelola Jaringan Dokumetasi dan Informasi hukum yang mampu melakukan terobosan dan inovasi dalam membangun kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang mendasar pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
31	Penghargaan Kabupaten peduli HAM	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)	Nasional	2024	Selasa, 10 Desember 2024. Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo Menghadiri Penghargaan KPP HAM 2024 Sekaligus memperingati Hari Ham Sedunia yang ke 76. Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo diwakili Bp. Agustinus Stiyono, S.Sos. MH. selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. dan didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Bp. Teguh

NO	NAMA PENGHARGAAN	NAMA PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT	TAHUN	DESKRIPSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Pramono, SH. MH. Puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke 76 telah diselenggarakan meriah di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 10 Desember 2024. Acara ini dihadiri oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, para Menteri, para komisioner, para deputi, Gubernur, Bupati Walikota penerima penghargaan KKP HAM seluruh Indonesia serta para Pimpinan Eselon I Jajaran Kemenkum dan Kemenimipas. Menham Natalius Pigai Juga memberikan penghargaan KKP HAM kepada para Gubernur atas pencapaiannya yang telah berhasil mendorong kabupaten/kota di daerahnya menjadi kabupaten/ kota peduli HAM.
32	Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Nasional	2024	Senin, 16 Desember 2024. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerima **Penghargaan Terbaik III Indeks Reformasi Hukum Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2024**. Penghargaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sukoharjo mewakili Bupati Sukoharjo dari Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas capaian Kabupaten Sukoharjo sebagai peringkat 3 dalam kategori pemerintah kabupaten. Kabupaten Sukoharjo berhasil menorehkan prestasi gemilang bersama dengan

NO	NAMA PENGHARGAAN	NAMA PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT	TAHUN	DESKRIPSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Kabupaten Semarang dan Kabupaten Bogor sebagai penerima penghargaan serupa. Penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk pengakuan atas prestasi, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Menteri Hukum menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan membangun sistem hukum yang lebih baik.
33	PENGHARGAAN SUBROTO 2024	Gedung Menara Wijaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI	Nasional	2024	Penghematan Energi pada Instansi Pemerintah Subkategori Instansi Pemerintah Daerah
34	PENGHARGAAN EBTKE TAHUN 2024 BIDANG EFISIENSI ENERGI	Gedung Menara Wijaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	Nasional	2024	Penghematan Energi Pada Instansi Pemerintah Subkategori Gedung perkantoran di Instansi Pemerintah Daerah
35	Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif)	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI	Nasional	2024	Piagam Penghargaan yang diberikan oleh LKPP RI kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atas pencapaiannya memenuhiklengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif)
36	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penylenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Ombudsman Republik Indonesia	Nasional	2024	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 berhasil menerima penghargaan penganugerahan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI yang digelar

NO	NAMA PENGHARGAAN	NAMA PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT	TAHUN	DESKRIPSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						pada Kamis (14/11/2024) di Hotel Le Meridien Jakarta. Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat 2 Nasional kategori Kabupaten dengan capaian nilai 99.36 Zona Hijau Opini Kualitas Tertinggi (A). Perolehan nilai tersebut naik secara signifikan dari tahun ketahun, dimana pada Tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai 90.19, Tahun 2023 memperoleh nilai 97.42. Capaian ini adalah buah dari komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan yaitu Bupati Sukoharjo, seluruh Perangkat Daerah yang dijadikan lokus penilaian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PM dan PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas Kartasura, Puskesmas Sukoharjo dan Bagian Organisasi Setda Kab. Sukoharjo untuk menyelenggarakan dan menghadirkan pelayanan publik yang prima dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37	OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN	BUPATI SUKOHARJO	BPK RI	NASIONAL	2024	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Pemkab Sukoharjo TA. 2023 yang diterimakan pada Tahun 2024
38	piagam penghargaan atas keberhasilannya menerapkan sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2023 dengan kualitas baik		Komisi Aparatur Sipil Negara		2024	piagam penghargaan atas keberhasilannya menerapkan sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2023 dengan kualitas baik
39	piagam penghargaan anugerah manajemen ASN 2024	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Badan Kepegawaian Negara	Nasional	2024	piagam penghargaan anugerah manajemen ASN 2024 atas

NO	NAMA PENGHARGAAN	NAMA PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT	TAHUN	DESKRIPSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						capaiannya sebagai peringkat 3 dengan kategori pengelolaan disiplin
40	Innovative Government Award (IGA)	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Dalam Negeri	Nasional	2024	Mendapatkan Kategori Kabupaten "**Sangat Inovatif**" Penghargaan IGA diberikan untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil melahirkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan
41	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024	DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo	Ombudsman Republik Indonesia	Nasional	2024	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 berhasil menerima penghargaan penganugerahan kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombusman RI yang digelar pada kamis (14/11/2014) di Hotel Le Meriden Jakarta. DPMPTSP adalah salah satu OPD Pendukung dari 5 OPD lainnya. DPMPTSP pada penilaian tahun 2024 mendapatkan capaian nilai 99,30 Zona Hijau (Kualitas Tertinggi).
42	Kader Posyandu Inovasi Bidang Kesehatan	Posyandu Muji Lestari Kabupaten Sukoharjo	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2024	Harapan 2 Kader Posyandu Inovasi Bidang Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2024
43	Universal Health Coverage (UHC) Awards	Kabupaten Sukoharjo	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Nasional	2024	Pemerintah Daerah dengan Kategori Pratama dalam Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
44	Bebas Frambusia	Kabupaten Sukoharjo	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2024	Kabupaten Kota Bebas Frambusia
45	Penghargaan Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2024	Juara 2 Nasional Profil Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2024
46	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Weru	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
47	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Bulu	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
48	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Tawangsari	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
49	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Sukoharjo	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
50	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Nguter	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna

NO	NAMA PENGHARGAAN	NAMA PENERIMA	INSTANSI PEMBERI	TINGKAT	TAHUN	DESKRIPSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
51	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Bendosari	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
52	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Polokarto	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
53	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Mojolaban	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
54	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Grogol	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
55	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Baki	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
56	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Gatak	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
57	Akreditasi Puskesmas	Puskesmas Kartasura	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2028	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
58	Akreditasi RSUD	RSUD Ir. Soekarno	Kementrian Kesehatan RI	Nasional	2023-2027	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Paripurna
59	Medali Emas PON ACEH	AMELIA PUTRI WIBOWO	PON ACEH - SUMUT	Nasional	2024	Kejuaraan Terbuka Taekwondo
60	Medali Emas PON ACEH	SILVIANA BEBBY KUMALASARI	PON ACEH - SUMUT	Nasional	2024	Kejuaraan Terbuka Paralayang
61	Medali Perak PON ACEH	SHALEHA FITRIANA YUSUF	PON ACEH - SUMUT	Nasional	2024	Kejuaraan Terbuka Taekwondo
62	Medali Emas PON ACEH	THOMAS WIDYANANTO	PON ACEH - SUMUT	Nasional	2024	Kejuaraan Terbuka Paralayang
63	Pemilihan Duta Wisata Nasional	Sekar Ayu Salsabila	Duta Wisata Berprestasi Tingkat Nasional	Nasional	2023	Pemilihan Duta Wisata Nasional
64	Pemilihan Duta Wisata Nasional	Eksa Fauzi	Duta Wisata Berprestasi Tingkat Nasional	Nasional	2024	Pemilihan Duta Wisata Nasional

Sumber: Setda 2025 (data diolah)

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah merupakan manifestasi strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang dilakukan dengan mencermati dinamika ekonomi global dan tantangan nasional. Kebijakan ini berpijak pada kondisi perekonomian terkini di berbagai tingkatan, sehingga mampu menjawab kebutuhan pembangunan kabupaten Sukoharjo yang adaptif terhadap perubahan zaman.

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Dinamika perekonomian global pada tahun ini berada dalam kondisi yang sangat fluktuatif akibat eskalasi konflik geopolitik yang memicu efek domino pada berbagai sektor fundamental. Pecahnya ketegangan militer di jalur-jalur strategis dunia telah melumpuhkan rantai pasok energi, yang secara instan mendorong lonjakan harga minyak mentah dan gas alam ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kelangkaan energi ini kemudian memicu tekanan inflasi yang masif di berbagai negara, di mana biaya produksi dan logistik yang membengkak memaksa harga barang kebutuhan pokok ikut merangkak naik. Fenomena ini menciptakan ancaman stagflasi, yaitu situasi pelik di mana pertumbuhan ekonomi global melambat secara signifikan namun beban biaya hidup masyarakat terus meningkat, sehingga memperlemah daya beli secara keseluruhan.

Berdasarkan laporan *World Economic Outlook (WEO*) terbaru dari *International Monetary Fund (IMF)*, dinamika ekonomi dunia saat ini berada di bawah tekanan revisi pertumbuhan akibat ketidakpastian global yang meningkat. IMF secara resmi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari sebelumnya 3,4% menjadi 3,1% untuk tahun 2027, yang menandai salah satu laju pertumbuhan terlemah dalam dua dekade terakhir. Penurunan ini didorong oleh pecahnya konflik di Timur Tengah yang menguji ketahanan aktivitas ekonomi global setelah sebelumnya sempat terbebani oleh hambatan perdagangan. IMF memprediksi bahwa jika konflik tetap terbatas dalam durasi dan cakupan, pertumbuhan akan sedikit membaik menjadi 3,2% pada tahun 2027, meski risiko penurunan tetap mendominasi akibat potensi fragmentasi geopolitik dan kerentanan utang publik yang tinggi.

China sebagai ekonomi terbesar di Asia sebagai importir energi utama sekaligus pemimpin transisi energi hijau global. Di tengah lonjakan harga minyak akibat konflik, China mempercepat diversifikasi pasokan energinya melalui jalur darat Asia Tengah dan meningkatkan produksi energi terbarukan secara masif untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Sementara itu, Jepang memainkan peran penting sebagai jangkar stabilitas moneter dan penyedia bantuan pembangunan di kawasan Pasifik. Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor energi, Jepang menghadapi tekanan inflasi impor yang cukup berat, yang memaksa *Bank of Japan (BoJ)* melakukan penyesuaian kebijakan moneter

yang sangat hati-hati. Pertumbuhan ekonomi Jepang diproyeksikan tertahan di level 0,9% hingga 1,1% pada 2027.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mencermati beberapa langkah sederhana dan tepat untuk menghadapi dampak gejolak ekonomi global, seperti menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil melalui operasi pasar dan pengawasan distribusi, memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi pertanian lokal, serta melindungi daya beli masyarakat melalui bantuan sosial dan program padat karya. Selain itu, dukungan terhadap UMKM harus ditingkatkan lewat kemudahan akses modal dan pemasaran digital agar ekonomi lokal tetap bergerak. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mendorong efisiensi energi dan penggunaan energi alternatif, memperbaiki infrastruktur distribusi, serta menjaga iklim investasi agar tetap kondusif sehingga perekonomian daerah tetap stabil meskipun kondisi global tidak menentu.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi nasional lima tahun ke depan merupakan langkah awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan ekonomi nasional tumbuh lebih kuat, dari 5,3% di tahun 2025 menjadi 8,0% pada tahun 2029. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, fokus utama pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat dengan cara menekan angka kemiskinan hingga tersisa sekitar 4,5%–5% di akhir tahun 2029. Selain itu, pendapatan rata-rata penduduk diharapkan meningkat signifikan melalui penguatan sektor industri, pengolahan sumber daya alam, dan optimalisasi potensi laut nasional.

Untuk mencapai target tersebut, kebijakan ekonomi akan difokuskan pada percepatan pengolahan bahan mentah di dalam negeri agar memiliki nilai jual lebih tinggi (hilirisasi). Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital, penguatan riset, serta pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan untuk memperlancar arus barang dan menurunkan biaya logistik di seluruh wilayah. Di sisi lain, usaha kecil (UMKM) dan koperasi akan diperkuat sebagai penggerak ekonomi warga. Melalui strategi ini, pembangunan tidak hanya berpusat di satu titik, tetapi menyebar ke seluruh pelosok tanah air agar tercipta keadilan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Stabilitas sistem keuangan Indonesia saat ini masih cukup terjaga, meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar sedang melemah. Sejak awal 2027, rupiah bergerak dari sekitar Rp16.700 hingga di atas Rp17.000 per dolar AS karena tekanan dari kondisi global seperti kuatnya dolar dan ketidakpastian ekonomi dunia. Namun, pelemahan ini masih tergolong wajar dan belum menunjukkan krisis. Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat dengan cadangan devisa yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Bank Indonesia juga terus menjaga nilai tukar agar tidak melemah terlalu tajam. Jadi, meskipun rupiah sedang tertekan, sistem keuangan Indonesia secara umum masih stabil.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027 menetapkan landasan strategis untuk menjaga

stabilitas di tengah dinamika global yang menantang. Fokus utama kebijakan ini adalah mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan kemandirian ekonomi sebagai fondasi menuju Indonesia Tangguh. Pemerintah secara optimis namun terukur menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2% hingga 5,8% (dengan target titik tengah APBN sebesar 5,4%), yang diharapkan menjadi pijakan penting untuk akselerasi pertumbuhan jangka menengah. Angka ini mencerminkan upaya maksimal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi, meskipun lembaga internasional seperti IMF baru saja mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia ke level 5,0% akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang menekan harga komoditas energi.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk ikut mendukung pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, perlu menerapkan beberapa strategi yang bisa ditempuh meliputi percepatan hilirisasi industri berbasis potensi lokal, khususnya sektor tekstil, garmen, dan agroindustri, serta penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi melalui digitalisasi, peningkatan akses pembiayaan, dan penguatan kapasitas usaha. Pembangunan infrastruktur daerah diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan efisiensi distribusi barang guna menekan biaya logistik, didukung oleh pengembangan ekonomi digital dan inovasi berbasis teknologi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong ketahanan pangan melalui modernisasi sektor pertanian, serta penerapan prinsip ekonomi hijau melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan program pelatihan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja. Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global dan tekanan nilai tukar, pemerintah daerah juga berkomitmen mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah secara optimal dan berkeadilan.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2027 difokuskan pada upaya membangun perekonomian yang kuat, merata, dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah mendorong penguatan sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi daerah. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas, pengembangan inovasi dan riset, serta penguatan hilirisasi terutama pada sektor pertanian dan perikanan agar hasil produksi tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi juga dalam bentuk olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Selain itu, kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat peran koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih berdaya saing dan mampu menyerap tenaga kerja.

Pemerintah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi daerah serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Peningkatan investasi menjadi salah satu fokus penting dengan cara menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kolaboratif, sehingga dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha. Pengembangan ekonomi syariah juga didorong sebagai salah satu alternatif penguatan sistem ekonomi daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, terutama untuk memperlancar distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat antarwilayah. Arah kebijakan ini juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, seperti menjaga ketahanan sumber daya alam, mengurangi risiko bencana, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis lingkungan. Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi desa agar pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2027 diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Proyeksi arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 diarahkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan baru, tanpa meninggalkan penguatan sektor industri pengolahan, pertanian, dan UMKM. Kebijakan ini diperkirakan menitikberatkan pada pengembangan destinasi dan konektivitas wisata, penguatan rantai nilai halal, hilirisasi komoditas unggulan daerah, digitalisasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM vokasi, stabilisasi inflasi pangan, serta pembangunan ekonomi berbasis wilayah dan ekonomi hijau. Dengan arah tersebut, Jawa Tengah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga lebih merata, menyerap tenaga kerja, dan menurunkan kemiskinan.

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo

Perekonomian Kabupaten Sukoharjo terus menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Pada tahun 2024, nilai PDRB Sukoharjo mencapai sekitar Rp49,99 triliun. Kegiatan ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, diikuti oleh perdagangan serta jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sukoharjo memiliki kekuatan pada sektor industri sekaligus didukung oleh aktivitas perdagangan dan layanan yang terus berkembang.

Pertumbuhan ekonomi Sukoharjo juga tetap berada pada jalur positif. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,97 persen. Meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa perekonomian daerah stabil setelah masa pemulihan pandemi. Beberapa sektor bahkan tumbuh cukup tinggi, terutama jasa perusahaan, informasi dan komunikasi, serta sektor

akomodasi dan makan minum. Hal ini menandakan bahwa peran sektor jasa semakin penting dalam mendorong perekonomian daerah, meskipun sektor industri masih menjadi tulang punggung utama.

Kondisi di Sukoharjo juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan terus menurun, dari 7,47 persen pada tahun 2024 menjadi sekitar 6,83 persen pada tahun 2025. Namun demikian, masih terdapat tantangan di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran yang sempat menurun kembali mengalami kenaikan menjadi sekitar 4,32 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja yang cukup dan sesuai kebutuhan masih menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah daerah.

Pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan, yang terlihat dari PDRB per kapita yang mencapai sekitar Rp53 juta per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat relatif cukup baik dibandingkan rata-rata di tingkat provinsi. Meski demikian, masih diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Harga kebutuhan pokok, kondisi inflasi masih relatif terkendali, meskipun tetap perlu diwaspadai. Pada tahun 2027, inflasi di wilayah sekitar Sukoharjo menunjukkan adanya kenaikan, sehingga pengendalian harga terutama untuk kebutuhan pangan menjadi hal yang penting. Kelancaran distribusi barang dan kestabilan pasokan menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan melihat kondisi tersebut, arah pembangunan ekonomi Sukoharjo pada tahun 2027 difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berupaya mengembangkan potensi lokal, terutama di sektor pertanian, industri, dan jasa. Pertanian tetap menjadi perhatian penting, tidak hanya sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber ekonomi masyarakat. Upaya dilakukan melalui peningkatan produktivitas, perlindungan lahan pertanian, serta pengembangan inovasi di bidang pertanian.

Sektor industri dan usaha kecil menengah juga menjadi prioritas. Hal ini dilakukan agar produk lokal memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pemerintah juga mendorong peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, sehingga dapat membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, tahun 2027 menjadi masa penguatan bagi perekonomian Kabupaten Sukoharjo. Fokus utama tidak hanya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan, pengurangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. Dengan langkah tersebut, diharapkan pembangunan ekonomi di Sukoharjo dapat berjalan lebih seimbang, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Selanjutnya proyeksi indikator ekonomi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

No	Indikator	Capaian 2025	Proyeksi	
			RKPD 2026	RKPD 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,48	5,50-6,30	5,60-7,45
2	Inflasi (%)	-1.1	± 2,5	± 2,5
3	Tingkat Penganguran Terbuka (%)	4,32	3,61-3,31	4,10 - 3,90
4	Angka Kemiskinan (%)	6,83	7,3-7,15	6,40 - 6,21
5	Pendapatan Per Kapita (juta)		59,58	
6	Rasio Gini	0,381	0,365	0,36

Sumber: : Bapperida Kabupaten Sukoharjo (data diolah)

Kebijakan pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 diarahkan pada "**Pengembangan Perekonomian Daerah Termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan Serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah**". prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 diarahkan pada :

1. Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah.
2. Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana.
3. Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh.
4. Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat.
5. Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi.
6. Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni social.

Pembangunan perekonomian Kabupaten Sukoharjo tahun 2027 diarahkan pada penguatan struktur ekonomi berbasis industri pengolahan, UMKM, dan sektor jasa yang terintegrasi. Kebijakan difokuskan pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, pengembangan UMKM berbasis digital dan rantai nilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan iklim investasi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga diarahkan pada transformasi pertanian menuju agroindustri dan pemerataan berbasis potensi wilayah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan siklus pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Keseluruhan tahapan tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada dasarnya, APBD memuat rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

mencerminkan sumber-sumber pendapatan serta alokasi belanja yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam perkembangannya, penyusunan APBD tidak hanya menggunakan pendekatan *money follow* program, tetapi juga telah berkembang menjadi *money follow priority*, yaitu pendekatan penganggaran yang lebih menitikberatkan pada pembiayaan program dan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan daerah dan nasional serta memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini juga didukung dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja *(performance-based budgeting),* sehingga setiap alokasi anggaran harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi.

Dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah tetap harus memperhatikan beberapa hal utama, yaitu: (1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga dokumen perencanaan seperti RKPD dapat selaras dengan dokumen penganggaran; (2) konsistensi dan sinkronisasi program, baik secara vertikal dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, maupun secara horizontal antar perangkat daerah; serta (3) relevansi program dan kegiatan yang disusun dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi daerah, sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain hal tersebut, arah kebijakan keuangan daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai kerangka acuan dalam penyusunannya, yang saat ini semakin diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi *(e-planning dan e-budgeting)* guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Adapun norma dan prinsip tersebut meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah
   Transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. APBD harus mampu menyajikan informasi yang jelas terkait tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Selain itu, pengelolaan anggaran saat ini didukung dengan sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi keuangan daerah secara lebih terbuka dan akuntabel.
2. Disiplin Anggaran
   Disiplin anggaran mengandung makna bahwa seluruh program dan kegiatan harus disusun secara cermat, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan keseimbangan antara belanja pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Penyusunan anggaran harus berlandaskan prinsip efisiensi, tepat guna, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam pengendalian defisit dan optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan daerah.
3. Keadilan Anggaran
   Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, dan sumber lainnya pada dasarnya berasal dari masyarakat, sehingga penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan merata. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh

lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan serta upaya pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
   Pemanfaatan anggaran harus dilakukan secara optimal untuk menghasilkan output dan outcome yang maksimal bagi masyarakat. Setiap program dan kegiatan harus direncanakan secara jelas, terarah, dan terukur, dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya. Selain itu, penganggaran saat ini juga menekankan pada pencapaian kinerja (outcome-based), sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang masuk ke kas pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di wilayah tersebut. Sumber pendapatan ini pada umumnya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah mencakup seluruh transaksi yang menambah ekuitas dana pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak menimbulkan kewajiban pengembalian di kemudian hari.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan regulasi nasional dan kondisi ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang tersedia serta meningkatkan efektivitas pemungutannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Besaran tarif pajak dan retribusi daerah pada beberapa sektor masih relatif terbatas, sehingga kontribusinya terhadap PAD belum optimal, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi dan dinamika ekonomi. Selain itu, beberapa regulasi daerah masih memerlukan penyesuaian dengan kebijakan terbaru, seperti implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), sehingga diperlukan pembaruan kebijakan yang tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
2. Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih adanya wajib pajak yang belum patuh, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan aktif, edukasi, serta penegakan aturan secara proporsional.
3. Sistem informasi dan basis data perpajakan daerah belum sepenuhnya terintegrasi dan mutakhir, sehingga masih terdapat ketidaksesuaian data objek dan subjek pajak dengan kondisi riil di lapangan.

4. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, baik dari sisi profitabilitas maupun tata kelola usaha.

Berdasarkan permasalahan diatas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pungutan Pendapatan Asli Daerah, melalui:
   a. Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
   b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
   c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
   d. Mengembangkan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan berbasis online system menjadi lebih mudah dan murah.
2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;

Gambaran mengenai realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025 (unaudited)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.119.633.370.538**	**2.014.818.262.391**	**2.161.303.983.213**	**2.241.420.563.371**	**2.334.422.850.188**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**528.354.094.902**	**495.282.321.890**	**537.438.438.968**	**553.602.937.171**	**726.256.622.750**
4.1.1	Pajak Daerah	234.425.731.615	286.451.988.069	322.272.545.286	325.763.944	462.202.270.490
4.1.2	Retribusi Daerah	18.364.680.507	19.616.594.010	24.184.714.724	61.113.222.225	151.577.495.505
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.782.214.740	39.098.713.731	39.448.230.309	42.298.309.636	51.017.452.543
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	240.781.468.040	150.115.026.080	151.532.948.649	124.427.460.695	61.459404.212
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.520.527.625.636**	**1.516.005.336.404**	**1.622.210.149.245**	**1.687.817.626.200**	**1.608.166.227.438**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.345.610.640.075	1.317.912.105.404	1.419.859.108.974	1.475.220.471.981	1.485.029.284.973
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	174.916.986.561	198.093.231.000	202.351.040.271	212.597.154.219	123.136.942.465
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**70.751.650.000**	**3.530.604.097**	**1.655.395.000**	**0**	**0**
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.997.000.000	3.530.604.097	1.655.395.000	0	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	67.754.650.000	-	-	-	-

Sumber: Bapperida dan BPKAD Kabupaten Sukoharjo (data diolah)

Sedangkan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

NO			U R A I A N	APBD 20256	PROYEKSI 2027	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1			*2*	*3*	*4*	*5*
1.			**PENDAPATAN DAERAH**	**1.881.587.562.793**	**1.607.021.001.101**	**-274.566.561.692**
1.	***1.***		***Pendapatan Asli Daerah***	**584.753.782.401**	**588.220.656.101**	**3.466.873.700**
1.	1.	1	Hasil Pajak Daerah	367.140.000.000	372.805.000.000	5.665.000.000
1.	1.	2	Hasil Retribusi Daerah	124.796.536.694	125.577.010.394	780.473.700
1.	1.	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.581.050.000	43.099.900.000	-481.150.000
1.	1.	4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.236.195.707	46.738.745.707	-2.497.450.000
1.	***2.***		***Pendapatan Transfer***	**1.296.833.780.392**	**1.018.800.345.000**	**-278.033.435.392**
1.	2.	1	Transfer Pemerintah Pusat	1.191.287.339.620	916.630.345.000	-274.656.994.620
1.	2.	2	Transfer Pemerintah Daerah	105.546.440.772	102.170.000.000	-3.376.440.772
1.	***3.***		***Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah***	***0***	***0***	***0***
1.	3.	1	Pendapatan Hibah	-	-	-
1.	3.	2	Lain-2 Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan per-UU	-	-	-
			Jumlah Pendapatan	***5.644.762.688.379***	***4.821.063.003.303***	***-823.699.685.076***

Sumber: Bapperida dan BPKAD Kabupaten Sukoharjo (data diolah)

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui pengunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum belanja daerah yang berdasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap OPD berdasarkan pada hasil pengelolaan keuangan tahun sebelumnya. Kebijakan umum Belanja Daerah dalam pencapaian sasaran dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun diarahkan pada tema **"Pengembangan Perekonomian Daerah Termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan Serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah",** dengan fokus utama pada :

1. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 diarahkan pada :

a. Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah.
b. Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana.
c. Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh.
d. Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat.
e. Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi.
f. Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial.

2. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
3. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's);
4. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran/aspirasi Legislatif dan masukan masyarakat.

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2025

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025 (unaudited)
5	**BELANJA DAERAH**	**2.089.455.558.854**	**2.042.027.814.977**	**1.974.147.489.374**	**2.350.492.492.454**	**2.222.286.846.196**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.472.694.410.236**	**1.476.279.908.868**	**1.476.711.296.974**	**1.709.135.538.150**	**1.637.945.380.717**
5.1.1	Belanja Pegawai	830.659.026.029	824.229.915.680	828.276.548.612	911.823.685.254	871.745.130.656
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	575.798.113.836	588.004.129.525	577.071.994.683	672.311.280.676	670.608.129.339
5.1.4	Belanja Subsidi	624.509.495	704.788.792	580.074.513	632.535.549	555.450.657
5.1.5	Belanja Hibah	48.541.701.076	61.033.159.330	67.598.379.166	107.657.436.671	80.092.135.066
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	17.071.059.800	2.307.915.541	3.184.300.000	16.710.600.000	14.944.534.999
5.2	**BELANJA MODAL**	**283.872.873.485**	**220.460.187.459**	**281.276.975.400**	**234.714.674.156**	**184.840.574.170**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	57.390.168.126	14.666.775.507	2.612.595.129	0	0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.022.615.391	43.732.158.456	64.593.578.315	57.057.488.669	66.034.827.992
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.356.082.100	57.712.175.084	114.282.812.756	68.487.478.404	44.255.393.345,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.714.959.040	98.571.813.860	99.142.721.002	104.768.565.884	67.077.468.429
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.389.048.828	5.777.264.552	645.268.198	4.401.141.199	7.320.367.074
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0				152.517.330
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**405.163.533**	**53.657.650**	**40.890.000**	**250.222.728**	**229.959.559**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	405.163.533	53.657.650	40.890.000	**250.222.728**	229.959.559
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**332.483.111.600**	**345.234.061.000**	**216.118.327.000**	**406.392.057.420**	**399.270.931.750**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	20.319.837.000	27.436.569.000	24.698.997.000	37.331.519.000	52.507.236.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	312.163.274.600	317.797.492.000	191.419.330.000	369.060.528.420	346.763.695.750
	SURPLUS / DEFISIT	**30.177.811.684**	**-27.209.552.586**	**187.156.493.839**	**-109.071.929.083**	**112.136.003.992**

Sumber: Bapperida dan BPKAD Kabupaten Sukoharjo (data diolah)

Sedangkan untuk Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

NO			U R A I A N	APBD 2027	PROYEKSI 2027	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		1	2	3	4	5
2.			**BELANJA DAERAH**	**2.008.465.970.793**	**1.700.021.001.101**	**-308.444.969.692**
2.	***1.***		***Belanja Operasi***	***1.588.775.936.121***	***1.327.307.519.661***	***-261.468.416.460***
2.	1.	1	Belanja Pegawai	977.510.074.743	824.440.766.743	-153.069.308.000
2.	1.	2	Belanja Barang dan Jasa	562.108.635.305	471.742.326.845	-90.366.308.460
2.	1.	3	Belanja Bunga	-	-	-
2.	1.	4	Belanja Subsidi	756.864.073	756.864.073	-
2.	1.	5	Belanja Hibah	40.778.062.000	22.745.262.000	-18.032.800.000
2.	1.	6	Belanja Bantuan Sosial	7.622.300.000	7.622.300.000	-
2.	***2.***		***Belanja Modal***	***126.557.391.980***	***113.368.813.820***	***-13.188.578.160***
2.	***3.***		***Belanja Tidak Terduga***	***6.421.895.692***	***6.421.895.692***	-
2.	***4.***		***Belanja Transfer***	***286.710.747.000***	***252.922.771.928***	***-33.787.975.072***
2.	4.	1	Belanja Bagi Hasil	27.206.562.000	27.206.562.000	-
2.	4.	2	Belanja Bantuan Keuangan	259.504.185.000	225.716.209.928	-33.787.975.072
			Jumlah Belanja	***2.008.465.970.793***	***1.700.021.001.101***	***-308.444.969.692***
			Surplus / (Defisit)	**-126.878.408.000**	**-93.000.000.000**	**33.878.408.000**

Sumber: Bapperida dan BPKAD Kabupaten Sukoharjo (data diolah)

Asumsi penggunaan rencana belanja daerah dalam RKPD Tahun 2027 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai dalam RKPD 2027 diasumsikan menurun dikarenakan adanya pengurangan dan penyesuaian jumlah penerima gaji PNS P3K (guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis) dan CPNS;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akutabilitas dan azas manfaat. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk pembiayaan program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan keterntraman dan ketertiban;

c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan pendidikan TK, SD, SMP swasta dan MI, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik;
d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya Pemberian Bantuan Rumah Tangga Layak Huni dan perlindungan sosial masyarakat;

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal diantaranya untuk Pengadaan Meubel, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun dirinci atas jenis:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa antara lain meliputi bantuan berupa sarana prasarana, desa wisata, dan pengembangan kawasan pedesaan.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatn Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu.

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2027 adalah:

1. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui:
   a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat,

pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan perturan perundangan yang berlaku.

3. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pencairan Dana Cadangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2025:

Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2025

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025 (unaudited)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**358.453.599.194**	**361.683.602.117**	**335.172.798.126**	**299.638.209.105**	**167.566.280.022**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	358.453.599.194	361.683.602.117	304.412.025.326	233.237.051.521	174.566.280.022
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	66.401.157.584	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**26.836.457.124**	**30.062.024.205**	**27.010.000.000**	**16.000.000.000**	**7.000.000.000**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	1.848.466.542	21.562.024.205	20.000.000.000	0	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	24.987.990.582	8.500.000.000	7.010.000.000	**16.000.000.000**	7.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**331.617.142.070**	**331.621.577.912**	**308.162.798.126**	**283.638.209.105**	**160.566.280.022**
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**361.794.953.754**	**304.412.025.326**	**495.319.291.965**	**174.566.280.022**	**279.702.284.014**

Sumber: Bapperida dan BPKAD Kabupaten Sukoharjo (data diolah)

Sedangkan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

NO			U R A I A N	APBD 20256	PROYEKSI 2027	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1			*2*	*3*	*4*	*5*
3.			**PEMBIAYAAN DAERAH**	**126.878.408.000**	**93.000.000.000**	**-33.878.408.000**
3.	***1.***		***Penerimaan Pembiayaan***	***133.878.408.000***	***100.000.000.000***	***-33.878.408.000***
3.	1.	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	133.878.408.000	100.000.000.000	-33.878.408.000
3.	1.	2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.	1.	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
3.	1.	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
3.	1.	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0
3.	1.	6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
3.	1.	7	Pencairan Deposito	0	0	0
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	133.878.408.000	100.000.000.000	-33.878.408.000
3.	***2.***		***Pengeluaran Pembiayaan***	7.000.000.000	7.000.000.000	-
3.	2.	1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	-
3.	2.	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000	7.000.000.000	-
			PDAM	7.000.000.000	7.000.000.000	-
			BANK JATENG	-	-	-
3.	2.	3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
3.	2.	4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	***7.000.000.000***	***7.000.000.000***	***-10.000.000.000***
			Pembiayaan Netto	**126.878.408.000**	**93.000.000.000**	**-33.878.408.000**
3.	***3.***		***SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)***	***0***	-	-

Sumber: Bapperida dan BPKAD Kabupaten Sukoharjo (data diolah)

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi dan Misi

Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun kedua selama lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis regional serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2025-2029 yaitu: **"SUKOHARJO LEBIH MAJU, ADIL DAN BERMARTABAT"**. Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

Lebih, memiliki arti bahwa Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas, keadilan yang menyeluruh, dan kehidupan yang lebih bermakna bagi seluruh warganya.

Maju, memiliki arti bahwa Sukoharjo sebagai Kabupaten yang memiliki kondisi perekonomian daerah yang tumbuh baik dengan kemudahan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam mendukung tantangan perekonomian nasional untuk mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, serta tantangan Jawa Tengah sebagai kontributor perekonomian nasional. Perekonomian Kabupaten Sukoharjo yang tumbuh baik dengan perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif (aman).

Adil, mencerminkan komitmen untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, baik itu masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, maupun pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, makna **ADIL** tidak hanya merupakan visi pemerintah daerah semata, tetapi juga menjadi visi bersama yang menggambarkan harapan dan aspirasi seluruh warga Sukoharjo untuk masa depan yang lebih baik.

Bermartabat, adalah Sukoharjo sebagai Kabupaten yang memiliki sumber daya manusia (masyarakat dan aparatur) yang berintegritas dan unggul dengan jatidiri, karakter dan budaya yang kuat, serta memiliki kepedulian yang tinggi dalam proses pembangunan yang didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan amanah *(governance)* dalam mewujudkan daerah yang maju dan makmur.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah *(Governance)* Serta Layanan Publik yang Berkualitas;**

   Misi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah *(Governance)* serta Layanan Publik yang Berkualitas" merupakan fondasi utama dalam upaya membangun Kabupaten Sukoharjo yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk terus memperbarui dan menyesuaikan kebijakan serta prosedur pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, serta adopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintahan akan lebih cepat dan tepat dalam merespons perubahan, baik dalam konteks lokal maupun global.

   Selain adaptif, pemerintahan yang amanah menjadi pilar penting yang memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk menjalankan setiap tugas dan kewajiban dengan integritas tinggi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan dilandasi oleh prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab, serta melibatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pemerintahan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

   Untuk memastikan layanan publik yang berkualitas, Kabupaten Sukoharjo akan memperkuat sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan publik akan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, serta penggunaan teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan lain sebagainya. Dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, Kabupaten Sukoharjo yakin bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, dan pada akhirnya, tercipta Kabupaten Sukoharjo yang lebih sejahtera dan harmonis.

2. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender;**

   Misi "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif, dan Responsif Gender" merupakan landasan utama dalam membangun masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang unggul dan siap bersaing di era global. Meningkatkan kecerdasan SDM tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas

pendidikan formal, tetapi juga melalui pengembangan keterampilan hidup yang relevan dengan tuntutan zaman. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperkuat pendidikan karakter agar generasi muda Sukoharjo tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang kuat. Melalui program-program pendidikan berbasis teknologi dan pelatihan keterampilan, Kabupaten Sukoharjo akan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal.

Kesehatan merupakan fondasi penting dalam menciptakan SDM yang produktif, oleh karena itu, Kabupaten Sukoharjo akan meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas, memperluas jangkauan program kesehatan preventif, serta memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk memastikan tumbuh kembang generasi penerus yang sehat. Program-program kesehatan berbasis komunitas juga akan ditingkatkan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Di samping itu, Kabupaten Sukoharjo akan mendorong penerapan pola hidup sehat melalui berbagai kampanye dan fasilitas olahraga yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dengan tujuan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat secara fisik dan mental.

Selain itu, Kabupaten Sukoharjo memahami pentingnya responsivitas gender dalam pembangunan SDM. Dengan menjadikan responsivitas gender sebagai bagian integral dari semua kebijakan dan program, Kabupaten Sukoharjo akan mendorong kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, mulai dari akses pendidikan dan pekerjaan hingga peran aktif dalam pengambilan keputusan. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai peran perempuan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya adil bagi semua, tetapi juga memberdayakan semua kelompok masyarakat. Dengan demikian, Kabupaten Sukoharjo akan menjadi daerah yang inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang gender, dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah dan meraih kualitas hidup yang lebih baik.

3. Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif;

Misi "Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif" berfokus pada menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo, dengan tujuan agar setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berarti tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka makroekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua, termasuk kelompok rentan dan marjinal.

Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mendorong sektor-sektor ekonomi potensial seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Kabupaten Sukoharjo akan mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal. Ini mencakup pemberian akses yang lebih mudah terhadap permodalan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan teknologi bagi UMKM, serta penguatan rantai pasok lokal yang akan mendorong keberlanjutan ekonomi di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, program revitalisasi pasar tradisional akan dilaksanakan untuk meningkatkan daya tarik dan efisiensi pasar lokal sebagai pusat ekonomi masyarakat. Kabupaten Sukoharjo juga akan fokus pada peningkatan infrastruktur pendukung, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi, yang akan mempermudah distribusi produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Sukoharjo.

Selanjutnya, untuk memastikan pendapatan masyarakat meningkat secara merata, Kabupaten Sukoharjo akan memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses produksi dan pemasaran. Ini termasuk program desa wisata, agroindustri, serta pengembangan koperasi berbasis digital yang dapat membantu masyarakat memasarkan produk mereka lebih luas. Kabupaten Sukoharjo juga akan mendorong investasi yang berkelanjutan dengan menarik investor yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat setempat dan memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. Dengan pendekatan yang inklusif ini, Kabupaten Sukoharjo percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tidak hanya akan meningkat secara signifikan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

4. **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan;**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh, Kabupaten Sukoharjo akan berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar yang kokoh dan tahan terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Ini meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi yang tidak hanya memadai secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kelestarian alam. Pembangunan infrastruktur yang tangguh ini akan mendukung konektivitas antar wilayah, mempercepat akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem infrastruktur yang kuat juga akan memperkuat fondasi ekonomi daerah dengan memudahkan distribusi barang dan jasa dari desa ke kota serta mendorong investasi di sektor-sektor strategis.

Pembangunan berwawasan lingkungan akan menjadi prioritas dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur. Langkah ini mencakup pengurangan penggunaan material yang berdampak buruk pada lingkungan, pengelolaan limbah konstruksi, serta peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Setiap proyek infrastruktur akan melalui proses penilaian dampak lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem lokal. Selain itu, upaya penghijauan dan pengelolaan sumber daya air, termasuk pembangunan embung dan sistem drainase yang efisien, akan menjadi bagian dari kebijakan berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir dan kekeringan.

Infrastruktur hijau juga akan diintegrasikan dengan pembangunan perkotaan, di mana ruang terbuka hijau, taman, dan area resapan air akan diprioritaskan. Pengembangan infrastruktur transportasi publik yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan jalur sepeda akan dipromosikan untuk mengurangi emisi karbon dan kemacetan lalu lintas. Selain itu, program revitalisasi sungai, pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah yang modern, dan penggunaan energi bersih di fasilitas umum akan menjadi bagian dari upaya untuk menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah yang tangguh terhadap perubahan iklim dan berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan di masa depan.

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Dalam misi "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan," Kabupaten Sukoharjo akan berfokus pada penguatan nilai-nilai sosial yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, serta semangat solidaritas antarwarga. Kabupaten Sukoharjo akan mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis melalui berbagai program yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, dan olahraga. Pembinaan terhadap kelompok-kelompok sosial, pemuda, dan komunitas akan terus ditingkatkan untuk membangun kohesi sosial yang lebih kuat, serta menciptakan ruang-ruang interaksi yang inklusif dan menyatukan berbagai elemen masyarakat. Dalam hal ini, peran lembaga masyarakat seperti karang taruna, kelompok perempuan, serta organisasi kemasyarakatan lainnya akan diperkuat untuk memperkuat kehidupan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, kehidupan keagamaan akan menjadi pilar penting dalam pembangunan spiritual masyarakat Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo akan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan yang kondusif, serta memberikan dukungan terhadap rumah-rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di seluruh wilayah kabupaten. Program-program peningkatan toleransi antarumat beragama akan diprioritaskan untuk memastikan terciptanya suasana kerukunan yang damai dan harmonis di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Selain itu, perhatian khusus akan diberikan pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan literasi

keagamaan, agar masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari secara bijak dan harmonis.

Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya telah dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029 melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan ditingkat nasional, provinsi maupun daerah. Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Nasional dan Provinsi Tahun 2025-2029 terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Visi dan Misi RPJP/RPJM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	**RPJM Nasional 2025-2029**	**RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**	**RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045**	**RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029**
Visi	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan	Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang Maju, Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045	Sukoharjo Bermartabat, Maju, Makmur dan Berkelanjutan	Sukoharjo Lebih Maju, Adil Dan Bermartabat
Misi	1. Transformasi Sosial	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1. Transformasi Sosial	1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif, dan berwawasan global	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah *(Governance)* Serta Layanan Publik yang Berkualitas
	2. Transformasi Ekonomi	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Transformasi Ekonomi	2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan	2. Mewujudkan Sumber Saya Manusia yang Unggul	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	**RPJM Nasional 2025-2029**	**RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**	**RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045**	**RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029**
	3. Transformasi Tata Kelola	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	3. Transformasi Tata Kelola	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas	3. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	3. Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	**RPJM Nasional 2025-2029**	**RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**	**RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045**	**RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029**
	4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	4. Mewujudukan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan	4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan
	5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	5. Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi	5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan		5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	**RPJM Nasional 2025-2029**	**RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**	**RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045**	**RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029**
	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	6. Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan	6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.		
	7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	7. Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan			

	NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
	RPJP Nasional 2025-2045	**RPJM Nasional 2025-2029**	**RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045**	**RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**	**RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045**	**RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029**
	8. Kesinambungan Pembangunan	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	8. Kesinambungan Pembangunan			

Sumber: Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

Kesesuaian Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Kesesuaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 Dengan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi	"Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Misi	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) Serta Layanan Publik yang Berkualitas	● Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba dan Judi
	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender	● Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
	3. Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif	● Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
		● Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Penumbuhan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
	4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan	● Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapanga Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
	5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan	● Memperkokoh idelogi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
		● Memperkuat Penyekarasan Kehidupan yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Untuk Mencapaia Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sumber: Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

Sedangkan kesesuaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo dengan Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Kesesuaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 Dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Visi	**"Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat**	**Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045**
Misi	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) Serta Layanan Publik yang Berkualitas	• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Integritas
	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender	• Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif Untuk Mewujudkan Sumber Saya Manusia yang Manidiri, Kompetitif dan Berwawasan Global
	3. Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif	• Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Perdesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatof, Mandiri dan Berkelanjutan;
		• Menjaga Iklim Investasi yang Kondusif dan Kolaboratif Untuk Membuka Kesempatan Kerja dan Berusaha Seluas-Luasnya Bagi Warga Jawa Tengah, serta Mengembangkan Pembiayaan Pembangunan yang Pertisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi.
	4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan	• Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yan Merata dan Berkeadilan Melalui Perencanaan Tata Ruang yang Responsif
	5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan	• Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah Dengan Pendekatan Budaya Lokal serta Menjamin Kebebasan Warga Dalam Menjalankan Ibadah, Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.

Sumber: Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Strategi dan Arah Kebijakan

4.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Implementasi pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerjanya sebagai ukuran kinerja bersifat operasional.

Perumusan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029, yaitu **Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat**. Guna mengetahui pencapaian tujuan pembangunan daerah digunakan indikator kinerja yaitu Laju pertumbuhan ekonomi Rasio Gini dan Indeks Daya Saing Daerah sebagai keberhasilan masyarakat Sukoharjo yang Lebih Maju, Adil dan Bermartabat.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ditetapkan **sasaran** pembangunan daerah yaitu:

1) **Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;**
   Sasaran 1 dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pembentuk PDRB ditunjukkan dengan PDRB per kapita, yang didukung oleh infrastruktur berkualitas sebagai penggerak pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan, yang ditunjukkan dengan Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) dalam rangka mendukung pencapaian *net zero emission* pada tahun 2060 dan Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan gambaran komitmen Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau, serta peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sasaran 1 mendukung fokus pembangunan Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan, Peningkatan produktivitas daerah, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Peningkatan infrastruktur berkelanjutan.
2) **Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif; dan**
   Sasaran 2 dalam rangka mencapai kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh dan kondusivitas wilayah yang aman, tertib, dan harmonis, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung oleh peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ditunjukkan dengan Tingkat Kemiskinan / Persentase Penduduk Miskin semakin menurun, yang diharapkan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo akan semakin menurun. Sasaran 2 mendukung fokus Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan dan Penguatan daya saing SDM berkelanjutan.
3) **Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip *Good Governance*.**
   Sasaran 3 dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi

yang didukung kondusivitas wilayah yang aman, tertib, dan harmonis, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya Indeks Harmoni Indonesia. Sasaran 3 mendukung fokus pembangunan Tata kelola pemerintahan yang baik dan Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan berbudaya maju.

Berdasarkan penjelasan masing-masing tujuan dan sasaran, maka disajikan keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah diukur dengan indikator tujuan dan sasaran, dimana untuk target indikator kinerja RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 mempertimbangkan proyeksi target dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 untuk tahun 2027 yang secara rinci dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027
Visi: SUKOHARJO LEBIH MAJU, ADIL DAN BERMARTABAT **Misi:** 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah *(Governance)* Serta Layanan Publik yang Berkualitas 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berkepribadian, Produktif dan Responsif Gender 3. Mewujudkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif 4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh Dan Berwawasan Lingkungan 5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan	Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60-7,45
			Rasio Gini	Rasio	0,360
			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	4,17
		1. Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	Rp Juta	62,98
			Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	1.215.147,43
			Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	59,17
		2. Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,42
			Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin	%	6,40 - 6,21
		3. Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip *Good Governance*	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	81
			Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,5

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029, 2025

4.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2027-2030 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2027-2030 dirumuskan penahapan, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2030, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2027	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahunn 2030
Mewujudkan Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat	Sasaran 1: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Strategi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian dan UMKM, dengan fokus pada pembukaan lapangan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi penduduk usia produktif	Arah kebijakan pada strategi 1 dalam pencapaian sasaran 1, yaitu:					
			a) Memperkuat kewirausahaan dan UMKM melalui kemitraan usaha, peningkatan akses pembiayaan, pengembangan koperasi, penciptaan peluang usaha, peningkatan nilai tambah usaha sosial, dan pengembangan UMKM berbasis syariah;	✓	✓	✓	✓	✓
			b) Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi kreatif berbasis potensi lokal melalui promosi, peningkatan SDM, dan kolaborasi yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;	✓	✓	✓	✓	✓
			c) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan penguatan kelembagaan, infrastruktur, dan akses pemasaran serta permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani;	✓	✓	✓	✓	✓
			d) Menciptakan akses ekonomi produktif dan	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2027	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahunn 2030
			perluasan lapangan kerja melalui peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, termasuk pengembangan keuangan syariah, subsidi, jaminan usaha, dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;					
			e) Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah; dan	✓	✓	✓	✓	✓
			f) Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi dan pemasaran peluang investasi	✓	✓	✓	✓	✓
		Strategi 2: Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang semakin merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	Arah kebijakan pada strategi 2 dalam pencapaian sasaran 1, yaitu:					
			a) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan penataan infrastruktur antar wilayah, daerah perbatasan, serta wajah kota dilakukan untuk mendukung perekonomian dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang;	✓	✓	✓	✓	✓
			b) Peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi untuk	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2027	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahunn 2030
			memastikan pembangunan berkualitas;					
			c) Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo;	✓	✓	✓	✓	✓
			d) Peningkatan penanganan permukiman kumuh;	✓	✓	✓	✓	✓
			e) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi;	✓	✓	✓	✓	✓
			f) Peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di seluruh wilayah;	✓	✓	✓	✓	✓
			g) Penguatan perlindungan lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran dan peningkatan pengelolaan persampahan; dan (h) Peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dengan memperkuat mitigasi, respons darurat, dan pemulihan untuk mengurangi risiko serta kerentanan masyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓
			h) Peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dengan memperkuat mitigasi, respons darurat, dan pemulihan untuk mengurangi risiko serta kerentanan masyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2027	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahunn 2030
	Sasaran 2: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Strategi 3: Membangun SDM unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.	Arah kebijakan pada strategi 3 dalam rangka pencapaian sasaran 2, yaitu:					
			a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif, penguatan sistem kesehatan, peningkatan akses dan mutu layanan dasar, termasuk pencegahan dan penanagan stunting, posyandu lansia serta peningkatan layanan primer dan rujukan;	✓	✓	✓	✓	✓
			b) Memperbaiki kualitas dan akses pendidikan melalui peningkatan sarana, kompetensi pendidik, manajemen mutu, pendidikan inklusi, dan budaya literasi;	✓	✓	✓	✓	✓
			c) Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarustamaan gender, serta perlindungan hak anak;	✓	✓	✓	✓	✓
			d) Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pramuka, serta pelatihan startup wirausaha muda; dan	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2027	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahunn 2030
			e) Mengembangkan keolahragaan dengan peningkatan sarana olahraga, penghargaan atlet, dan penyelenggaraan event.	✓	✓	✓	✓	✓
		Strategi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu melalui penguatan perlindungan sosial, dan penuntasan layanan dasar yang berkelanjutan dan partisipatif untuk penanggulangan kemiskinan	Arah kebijakan pada strategi 4 dalam pencapaian sasaran 2, yaitu:					
			a) Meningkatkan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin dan rentan dengan penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif terutama penanganan anak tidak sekolah, pengembangan pembiayaan kesehatan, serta pelayanan kesejahteraan sosial;	✓	✓	✓	✓	✓
			b) Meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin dan rentan dengan pemberdayaan secara partisipatif;	✓	✓	✓	✓	✓
			c) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat; dan	✓	✓	✓	✓	✓
			d) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau	✓	✓	✓	✓	✓
	Sasaran 3: Terwujudnya Penguatan	Strategi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan	Arah kebijakan pada strategi 5 dalam rangka pencapaian sasaran 3, yaitu:					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2027	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahunn 2030
	Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, layanan publik yang transparan dan berkualitas	a) Meningkatkan layanan publik langsung dan membangun pemerintahan terbuka dengan keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan serapan aspirasi melalui kunjungan lapangan, termasuk peningkatan tata kelola dan layanan admindukcapil;	✓	✓	✓	✓	✓
			b) Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan manajemen SDM aparatur melalui sistem merit yang transparan, obyektif, dan akuntabel serta penataan dan pengembangan kompetensi ASN;	✓	✓	✓	✓	✓
			c) Mengembangkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunannya;	✓	✓	✓	✓	✓
			d) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui manajemen pembangunan berbasis kinerja, pengawasan yang ketat, dan pengendalian produk hukum;	✓	✓	✓	✓	✓
			e) Menguatkan kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2027	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahunn 2030
			sumber pembiayaan non pemerintah;					
			f) Memperluas kerjasama antarregional untuk pembangunan kawasan, penanggulangan bencana, penguatan ekonomi, dan percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM);	✓	✓	✓	✓	✓
			g) Memperluas kerjasama dengan dunia usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) serta kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan; dan	✓	✓	✓	✓	✓
			h) Meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes, usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.	✓	✓	✓	✓	✓
		Strategi 6: Mewujudkan masyarakat berkarakter yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjaga keluhuran adat istiadat, serta menguatkan gotong royong dan kerukunan dalam	Arah kebijakan pada strategi 6 dalam pencapaian sasaran 3, yaitu:					
			a) Memperkuat koordinasi penanganan keamanan, ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;	✓	✓	✓	✓	✓
			b) Meningkatkan kebebasan sipil dan kualitas	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2027	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahunn 2030
		harmoni kebhinekaan	kehidupan masyarakat yang harmonis serta menjaga kerukunan antarumat beragama;					
			c) Mengedukasi masyarakat tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan serta meningkatkan kerjasama dengan pengampu kepentingan terkait; dan	✓	✓	✓	✓	✓
			d) Melestarikan nilai budaya lokal dan cagar budaya melalui pemeliharaan nilai agama, penguatan forum kebudayaan, dan peningkatan tata kelola kebudayaan dan kepariwisataan	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029, 2025

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 dirumuskan pentahapan RPJMD, dimana pada tahun 2027 yaitu **Pengembangan Perekonomian Daerah Termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan Serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah.** Arah Pengembangan perekonomian daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 difokuskan pada penguatan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing melalui akselerasi UMKM, ekonomi kreatif, serta pengembangan ekonomi syariah sebagai alternatif pertumbuhan yang berkeadilan. Selain itu, pariwisata berkelanjutan dikembangkan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan terintegrasi, sementara penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur fisik dan digital diarahkan untuk memperlancar mobilitas, distribusi, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Tahun 2027 merupakan tahun kedua dalam kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu perlu penyelarasan kebijakan antara RKPD tahun 2027 dengan RPJPD Tahun 2025-2045. Arah kebijakan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.6 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

	RJPD 2025-2045	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027
	Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)	
Visi	Penguatan Landasan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo	Pengembangan Perekonomian Daerah Termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan Serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah
Misi 1	Landasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo	
Misi 2	Peningkatan kualitas SDM Kabupaten Sukoharjo	
Misi 3	Peningkatan Produktivitas Sektor Pembentuk PDRB	
Misi 4	Peningkatan kualitas infrastruktur sebagai penggerak akitivitas sosial ekonomi masyarakat	

Sumber: Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

4.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.3.1. Tema Pembangunan Tahun 2027

Tema RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 bersumber dari tema pembangunan/arah kebijakan pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **"Pengembangan Perekonomian Daerah Termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan Serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah"**. Adapun keselarasan antara tema RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 dengan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dan RKP Nasional Tahun 2027 tercantum pada tabel berikut

Tabel 4.7 Tema RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

Tema RKP Nasional Tahun 2027	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	Tema RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi	Pengembangan perekonomian daerah termasuk ekonomi syariah & pariwisata berkelanjutan serta digitalisasi tata kelola & penguatan konektivitas daerah

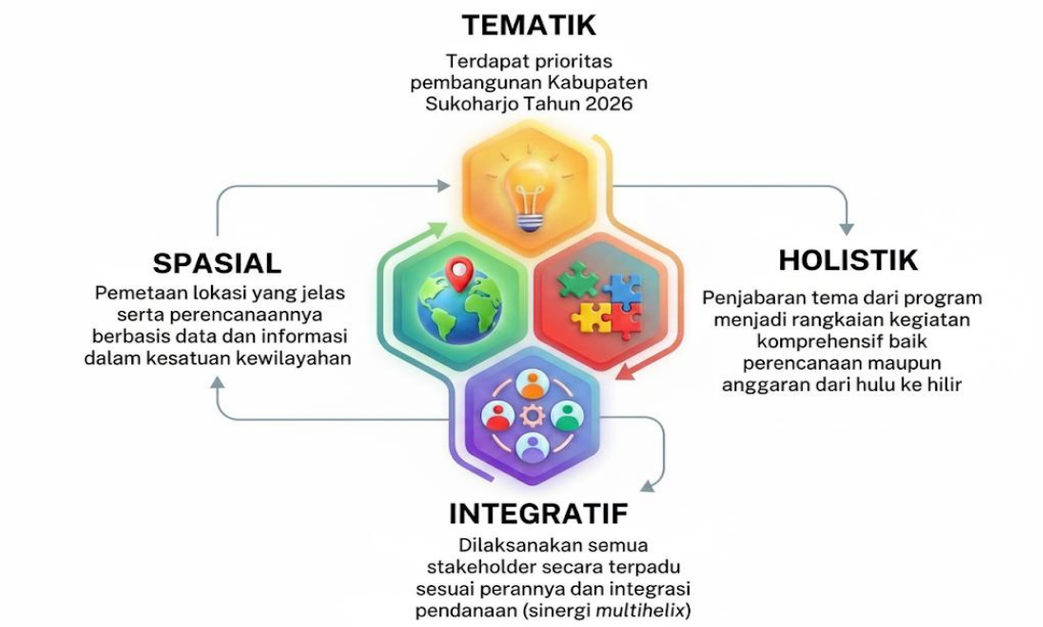
Sumber: Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

Berdasarkan tabel di atas, tema pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 selaras dengan tema pembangunan baik RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Tema RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2027 bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPJMD 2025-2029 yaitu "**Pengembangan Perekonomian Daerah Termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan Serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah"**.

Perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 disusun dengan menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tematik tercermin dari penetapan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan tema pembangunan pada tahun berjalan. Tema tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan melalui tahapan perencanaan yang saling terkait serta diselaraskan dengan proses penganggaran, sehingga menunjukkan penerapan pendekatan holistik dalam penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027.

Selain itu, proses perencanaan pembangunan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media (pentahelix), yang mencerminkan penerapan pendekatan integratif. Sementara itu, pendekatan spasial diwujudkan melalui penetapan lokasi yang jelas dan terarah untuk setiap program prioritas yang direncanakan.

Gambar 4. 1 Konsep THIS dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

Gambar 4. Contoh Implementasi Konsep THIS dalam Penentuan Prioritas Pembangunan



Sumber: Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

Pembangunan tahun 2027 ditujukan untuk Pengembangan Perekonomian Daerah Termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan Serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah dengan prioritas dan fokus pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Tema/Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

No	Tema/Arah Kebijakan	Fokus Pembangunan
1	Pengembangan Perekonomian Daerah Termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan Serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah	1. Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
		2. Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana.
		3. Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh.
		4. Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat
		5. Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi.
		6. Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial.

Sumber: Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

4.3.2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027

Tahun 2027 adalah tahun ketiga untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terdapat 8 prioritas nasional pembangunan (Asta Cita) dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.3.3. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025–2029, serta mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2027 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025–2029 diarahkan pada tema Pembangunan Daerah Tahun 2027, yaitu **"Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"**.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, tahun 2027 sebagai tahap kedua RPJMD Tahun 2025–2029 **"Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah"** diarahkan pada prioritas daerah yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sepenuhnya mendukung program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Program delegasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35 program/kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, antara lain:

1. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center);
2. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional;
3. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;
4. Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
5. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila; (Tidak relevan langsung karena Sukoharjo bukan wilayah pesisir);
6. Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta;
7. Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan;
8. Membangun 1.000 Desa/Kampung wisata baru;
9. BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng);

10. Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat;
11. Cek Kesehatan Gratis;
12. Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu;
13. Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;
14. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak;
15. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru;
16. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
17. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
18. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;
19. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
20. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
21. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya;
22. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
23. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata;
24. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM;
25. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau;
26. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa;
27. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.
28. Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan;
29. Peningkatan operasional kader Posyandu;
30. Peningkatan kualitas hidup lansia;
31. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilienial untuk membuka lapangan kerja;
32. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;
33. Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga;
34. Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan;
35. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.

4.3.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2027

Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 diwujudkan melalui serangkaian program prioritas yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Dengan memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, maka arah pembangunan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2027 difokuskan pada ***"Pengembangan Perekonomian Daerah Termasuk Ekonomi Syariah dan Pariwisata Berkelanjutan Serta Digitalisasi Tata Kelola dan Penguatan Konektivitas Daerah"*,** dengan prioritas pembangunan daerah diarahkan pada:

1) **Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah,** dengan fokus pada:
   a. Transformasi digital bagi UMKM dan koperasi, termasuk perluasan akses *marketplace* digital, pelatihan *e-commerce,* dan fasilitasi pemasaran berbasis teknologi, serta peningkatan pengembangan UMKM berbasis syariah.
   b. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan teknologi, melalui program peningkatan keterampilan digital bagi pelaku industri kreatif serta penguatan jejaring bisnis kreatif.
   c. Modernisasi pertanian dengan peningkatan infrastruktur irigasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kelembagaan petani.
   d. Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan akses permodalan bagi usaha ekonomi produktif, termasuk pengembangan keuangan syariah, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar industri.
   e. Memperkuat daya saing produk unggulan daerah dengan meningkatkan standar kualitas dan pengawasan perdagangan.
   f. Meningkatkan investasi daerah dengan skema insentif dan promosi investasi berbasis keunggulan lokal.
   g. Pengembangan ekonomi berbasis syariah.

   Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
   (1) UMKM Naik Kelas
   (2) Desa Wisata Berkelanjutan
   (3) Subsidi Bunga Pinjaman UMKM
   (4) Smart Farming
   (5) Investasi Berbasis Potensi Lokal
   (6) Program Pengembangan Pasar Lokal dan Ekspor *(Sukoharjo Go Global)*
   (7) Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal
   (8) Program Asuransi Pertanian
   (9) Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga
   (10) Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian

2) **Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana,** dengan fokus pada:

a. Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur utama di perkotaan dan daerah perbatasan guna memperkuat konektivitas antar wilayah, dan peningkatan konektivitas antar obyek wisata untuk mendukung pertumbuhan usaha dan ekonomi kreatif.
b. Peningkatan sertifikasi dan keterampilan tenaga kerja konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi.
c. Peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan dan sanitasi layak dengan target akses universal.
d. Penataan kawasan permukiman dengan pendekatan berbasis tata ruang.
e. Pengembangan sistem transportasi publik berbasis ramah lingkungan untuk mengurangi kemacetan dan emisi karbon.
f. Penguatan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi berbasis teknologi dan *smart city*.
g. Pengembangan dan implementasi infrastruktur hijau, seperti sistem drainase ramah lingkungan, ruang terbuka hijau perkotaan, dan fasilitas daur ulang persampahan yang lebih efisien.
h. Peningkatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim, melalui rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi dan penguatan adaptasi lingkungan berbasis tata ruang yang responsif terhadap risiko bencana

Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
(1) Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus
(2) Penataan Wajah Kota *(Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho)*
(3) Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh
(4) Terangi Jalanku
(5) Sukoharjo Sehat: Akses Air Minum dan Sanitasi Layak
(6) Mobilitas Sukoharjo: Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi
(7) Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK
(8) Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi
(9) Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

3) Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh, dengan fokus pada:

a. Peningkatan cakupan layanan kesehatan masyarakat, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak (KIA). Penyediaan fasilitas kesehatan diperluas ke wilayah yang masih memiliki kesenjangan layanan, dengan pendekatan proaktif dan berbasis data wilayah. Program penurunan stunting diperkuat melalui inovasi intervensi gizi spesifik dan sensitif berbasis data keluarga berisiko tinggi. Pengembangan posyandu lansia mulai dilakukan secara sistematis, termasuk pelatihan kader dan integrasi dengan layanan primer dan rujukan.
b. Penguatan pendidikan inklusif melalui penyesuaian kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, penguatan budaya literasi, serta peningkatan kompetensi pendidik.

c. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan penguatan peran perempuan di sektor ekonomi dan penguatan perlindungan anak dari kekerasan.
d. Mendorong jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda, melalui inkubasi bisnis startup dan peningkatan keterampilan pemuda dalam industri kreatif.
e. Peningkatan prestasi olahraga melalui pengembangan *sport center*, pembinaan atlet muda, serta penyelenggaraan kompetisi olahraga daerah.

Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
(1) Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD
(2) Posyandu Terpadu *(One Stop Health Center)* untuk Integrasi Layanan Primer
(3) Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS)
(4) Pencegahan dan Penanganan Stunting
(5) Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus
(6) Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS)
(7) Sukoharjo Pemuda Produktif
(8) Sukoharjo Juara

4) Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat, dengan fokus kepada:
a. Penguatan kolaborasi multi-pihak dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan peningkatan partisipasi sekolah.
b. Pengembangan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin
c. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
d. Peningkatan akses pangan berkualitas melalui penguatan distribusi pangan lokal dan stabilisasi harga.
e. Pengembangan layanan kesejahteraan sosial berbasis digital dan berbasis komunitas.

Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
(1) Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar
(2) Penyediaan Rumah Layak Huni
(3) Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas
(4) Santunan Kematian *(Program Lanjutan)*

5) Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi, dengan fokus kepada:
a. Memperluas layanan publik berbasis digital yang lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat..
b. Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi kelembagaan.
c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang inovatif.
d. Penguatan mekanisme evaluasi kinerja berbasis teknologi untuk memastikan efektivitas birokrasi.
e. Diversifikasi sumber pembiayaan daerah dengan memanfaatkan teknologi keuangan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

f. Peningkatan kerja sama regional dalam pengembangan layanan publik berbasis teknologi.
g. Memperkuat sinergi dengan sektor swasta dalam pemanfaatan AI dan big data untuk tata kelola pemerintahan.
h. Mendorong penguatan ekonomi desa melalui digitalisasi usaha BUMDes dan pengembangan program peningkatan kapasitas wirausaha desa berbasis teknologi.

Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
(1) Sukoharjo Digital Government (Tol Layanan Publik)
(2) *Sukoharjo Smart Village Program* (Program Kampung Pintar 1 Desa 1 Program Unggulan)
(3) Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK)
(4) Reformasi Birokrasi Dinamis *(Dynamic Bureaucracy Reform)*
(5) *Sukoharjo Open Government (SOG)*

6) Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial, dengan fokus kepada:
a. Peningkatan efektivitas lembaga keamanan dan sistem penegakan hukum, termasuk optimalisasi layanan perlindungan perempuan dan anak serta pemantapan sistem peradilan berbasis keadilan sosial.
b. Membangun ekosistem sosial yang inklusif dan bebas dari diskriminasi, dengan mendorong regulasi yang menjamin kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat.
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersamaan dan gotong royong, melalui program penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan forum lintas agama.
d. Penguatan tata kelola kebudayaan berbasis data dan inovasi, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk dokumentasi dan pelestarian warisan budaya.

Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
(1) Umroh Gratis untuk Takmir Masjid
(2) Sukoharjo Mengaji
(3) Sukoharjo Harmoni
(4) Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren
(5) Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan
(6) Sukoharjo Berkarakter
(7) Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo)

4.3.5. Konsistensi/ Keselarasan/ Keterkaitan dalam Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo

1. Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, strategi dan arah kebijakan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

Permasalahan pembangunan Kabupaten Sukoharjo diidentifikasi dengan mempertimbangkan keterkaitannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Sementara itu, penetapan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan gambaran kondisi daerah secara menyeluruh, permasalahan yang dihadapi, capaian indikator kinerja, serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya disusun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo secara terarah dan terukur.

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan sejak tahap awal, melalui penggalian permasalahan dan isu strategis dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo juga didukung oleh pemanfaatan media informasi kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif. Media yang digunakan antara lain media sosial yang menyediakan akses terhadap materi perencanaan, sarana penyampaian saran dan masukan, serta kanal aspirasi masyarakat melalui SIPD.

Permasalahan pembangunan dan isu strategis tersebut telah diuraikan dalam Bab II RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027. Selanjutnya, permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan kembali berdasarkan masing-masing isu strategis guna memastikan konsistensi antara prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan/Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia	• Kualitas kesehatan masyarakat belum optimal, ditandai dengan masih adanya kasus stunting, permasalahan gizi, serta kesenjangan akses layanan kesehatan antar wilayah. • Kualitas dan pemerataan pendidikan belum sepenuhnya merata, termasuk keterbatasan sarana prasarana, kompetensi pendidik, serta layanan pendidikan inklusif. • Kualitas pemuda dan olahraga daerah belum sepenuhnya mendukung daya saing, kreativitas, dan prestasi daerah. • Masih terdapat kesenjangan gender dan perlindungan anak yang memerlukan penguatan layanan dan pemberdayaan.	3) Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Strategi 3: Membangun SDM unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.	Arah kebijakan pada strategi 3 dalam rangka pencapaian sasaran 2, yaitu: (a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif, penguatan sistem kesehatan, peningkatan akses dan mutu layanan dasar, termasuk pencegahan dan penanagan stunting, posyandu lansia serta peningkatan layanan primer dan rujukan; (b) Memperbaiki kualitas dan akses pendidikan melalui peningkatan sarana, kompetensi pendidik, manajemen mutu, pendidikan inklusi, dan budaya literasi; (c) Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarustamaan gender, serta perlindungan hak anak; (d) Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor, wirausaha

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
					muda, dan pramuka, serta pelatihan startup wirausaha muda; dan (e) Mengembangkan keolahragaan dengan peningkatan sarana olahraga, penghargaan atlet, dan penyelenggaraan event.
		• Tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat masih rentan terhadap guncangan ekonomi dan sosial. • Masih terdapat penduduk miskin dan rentan yang membutuhkan perlindungan sosial adaptif dan berkelanjutan. • Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar kesejahteraan belum sepenuhnya merata. • - Akses terhadap pangan bergizi, aman, dan terjangkau belum optimal bagi seluruh kelompok masyarakat.	4) Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat	Strategi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu melalui penguatan perlindungan sosial, dan penuntasan layanan dasar yang berkelanjutan dan partisipatif untuk penanggulangan kemiskinan	Arah kebijakan pada strategi 4 dalam pencapaian sasaran 2, yaitu: (a) Meningkatkan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin dan rentan dengan penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif terutama penanganan anak tidak sekolah, pengembangan pembiayaan kesehatan, serta pelayanan kesejahteraan sosial; (b) Meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin dan rentan dengan pemberdayaan secara partisipatif; (c) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat; dan (d) Meningkatkan kualitas

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
					konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau
		• Tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk potensi konflik sosial dan kriminalitas. • Perlunya penguatan nilai-nilai keagamaan, toleransi, dan kerukunan sosial dalam masyarakat yang semakin majemuk. • - Pelestarian budaya lokal dan cagar budaya belum optimal sebagai identitas daerah dan daya tarik sosial-budaya.	6) Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial	Strategi 6: Mewujudkan masyarakat berkarakter yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjaga keluhuran adat istiadat, serta menguatkan gotong royong dan kerukunan dalam harmoni kebhinekaan	Arah kebijakan pada strategi 6 dalam pencapaian sasaran 3, yaitu: (a) Memperkuat koordinasi penanganan keamanan, ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) Meningkatkan kebebasan sipil dan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis serta menjaga kerukunan antarumat beragama; (c) Mengedukasi masyarakat tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan serta meningkatkan kerjasama dengan pengampu kepentingan terkait; dan (d) Melestarikan nilai budaya lokal dan cagar budaya melalui pemeliharaan nilai agama, penguatan forum kebudayaan, dan peningkatan tata kelola kebudayaan dan kepariwisataan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
2	Tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang adaptif dan amanah *(governance)*	• Transformasi digital pemerintahan belum sepenuhnya terintegrasi dan merata di seluruh perangkat daerah dan desa. • Kualitas layanan publik masih perlu ditingkatkan dari sisi kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses. • Efisiensi kelembagaan, manajemen SDM aparatur, dan penerapan sistem merit masih memerlukan penguatan. • Kapasitas fiskal daerah dan optimalisasi PAD belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pembangunan daerah. • - Sinergi kerjasama antar daerah, dunia usaha, dan desa masih perlu diperluas dan diperdalam.	5) Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi,	Strategi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, layanan publik yang transparan dan berkualitas	Arah kebijakan pada strategi 5 dalam rangka pencapaian sasaran 3, yaitu: (a) Meningkatkan layanan publik langsung dan membangun pemerintahan terbuka dengan keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan serapan aspirasi melalui kunjungan lapangan, termasuk peningkatan tata kelola dan layanan admindukcapil; (b) Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan manajemen SDM aparatur melalui sistem merit yang transparan, obyektif, dan akuntabel serta penataan dan pengembangan kompetensi ASN; (c) Mengembangkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunannya; (d) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui manajemen pembangunan berbasis

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
					kinerja, pengawasan yang ketat, dan pengendalian produk hukum; (e) Menguatkan kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber pembiayaan non pemerintah; (f) Memperluas kerjasama antarregional untuk pembangunan kawasan, penanggulangan bencana, penguatan ekonomi, dan percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM); (g) Memperluas kerjasama dengan dunia usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) serta kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan; dan (h) Meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes, usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.
3	Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan	• Pertumbuhan ekonomi daerah masih membutuhkan	1) Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses	Strategi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Arah kebijakan pada strategi 1 dalam pencapaian sasaran 1,

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
	perekonomian daerah yang inklusif	penguatan ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian, UMKM, dan kewirausahaan. • Daya saing UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif belum optimal akibat keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. • Produktivitas sektor pertanian dalam arti luas masih menghadapi tantangan kelembagaan, infrastruktur, dan nilai tambah. • Kesempatan kerja produktif bagi penduduk usia kerja belum sepenuhnya seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. • Investasi daerah masih perlu ditingkatkan melalui penyediaan informasi dan kemudahan perizinan.	Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	daerah yang ditopang oleh ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian dan UMKM, dengan fokus pada pembukaan lapangan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi penduduk usia produktif	yaitu: (a) Memperkuat kewirausahaan dan UMKM melalui kemitraan usaha, peningkatan akses pembiayaan, pengembangan koperasi, penciptaan peluang usaha, peningkatan nilai tambah usaha sosial, dan pengembangan UMKM berbasis syariah; (b) Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi kreatif berbasis potensi lokal melalui promosi, peningkatan SDM, dan kolaborasi yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; (c) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan penguatan kelembagaan, infrastruktur, dan akses pemasaran serta permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani; (d) Menciptakan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja melalui peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, termasuk pengembangan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
					keuangan syariah, subsidi, jaminan usaha, dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; (e) Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah; dan (f) Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi dan pemasaran peluang investasi
4	Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan	• Kualitas dan pemerataan infrastruktur ekonomi dan sosial belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan wilayah secara berkeadilan. • Akses air minum layak, sanitasi, dan penanganan permukiman kumuh masih perlu ditingkatkan. • Kualitas layanan transportasi dan konektivitas antar wilayah belum optimal. • Infrastruktur TIK belum merata sebagai	2) Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	Strategi 2: Pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang semakin merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	Arah kebijakan pada strategi 2 dalam pencapaian sasaran 1, yaitu: (a) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan penataan infrastruktur antar wilayah, daerah perbatasan, serta wajah kota dilakukan untuk mendukung perekonomian dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang; (b) Peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi untuk memastikan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		pendukung transformasi digital daerah. • Tekanan terhadap lingkungan hidup, pengelolaan sampah, serta risiko bencana masih memerlukan penguatan mitigasi dan adaptasi.			pembangunan berkualitas; (c) Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo; (d) Peningkatan penanganan permukiman kumuh; (e) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi; (f) Peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di seluruh wilayah; (g) Penguatan perlindungan lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran dan peningkatan pengelolaan persampahan; dan (h) Peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dengan memperkuat mitigasi, respons darurat, dan pemulihan untuk mengurangi risiko serta kerentanan masyarakat.

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

2. Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2027

Berdasarkan amanat Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD disusun sebagai hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui rapat dengar pendapat dan/atau kegiatan reses, yang kemudian dirumuskan menjadi kajian atas permasalahan pembangunan daerah.

Dalam proses perencanaannya, Pokok-Pokok Pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta mempertimbangkan kapasitas riil pendanaan yang tersedia. Hasil penelaahan tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam daftar permasalahan pembangunan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan antara isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2027 disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2027

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia	3. Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkualitas; penguatan sistem kesehatan daerah termasuk puskesmas dan rumah sakit; pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan; penanganan stunting secara terpadu; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; penguatan budaya literasi dan pemanfaatan teknologi informasi pendidikan.
		4. Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat	Penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja; pembekalan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja; peningkatan akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha dan akses pasar bagi pelaku usaha rintisan; pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender; peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui ketenagakerjaan yang layak.
		6. Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial	Peningkatan kebebasan sipil masyarakat; peningkatan edukasi tentang keberagaman; penguatan kohesi sosial dan harmoni kehidupan bermasyarakat;

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD
			peningkatan koordinasi lintas pihak dalam penanganan isu sosial kemasyarakatan.
2	Tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang adaptif dan amanah (governance)	5. Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi,	Peningkatan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat; peningkatan efisiensi kelembagaan dan manajemen SDM aparatur; penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; penguatan kapasitas fiskal daerah; perluasan kerja sama antar daerah dan dengan dunia usaha; mendorong inovasi daerah melalui program unggulan perangkat daerah.
3	Peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif	1. Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	Penguatan kewirausahaan dan UMKM; peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan; pembukaan peluang investasi berbasis potensi daerah; peningkatan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri; pengembangan pariwisata daerah; peningkatan kemandirian ekonomi melalui pengembangan BUMDes.
4	Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan	2. Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan penataan infrastruktur daerah; peningkatan kualitas pelayanan transportasi; penuntasan infrastruktur TIK; peningkatan infrastruktur air minum dan sanitasi; peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh; perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; penguatan mitigasi bencana, respon darurat, pemulihan, dan adaptasi perubahan iklim.

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

3. Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Prioritas Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2027 telah dirumuskan ke dalam delapan Prioritas Nasional yang selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci melalui sasaran pada masing-masing Prioritas Nasional. Sejalan dengan hal tersebut, perumusan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 perlu memperhatikan keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029 dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Keselarasan antara sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN tersebut disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Persandingan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP 2027

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
1	PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM Indikator: · Indeks Demokrasi Indonesia · Indeks HAM	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Indeks Harmoni Indonesia	7,5	Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial
2	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2	Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Indikator: · Asia Power Index (Military Capability) · Asia Power Index (Diplomatic Influence) · Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya · Global Cybersecurity Index · Indeks Keamanan Laut Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Indeks Harmoni Indonesia	7,5	Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial
		3	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Indikator: · Indeks Ketahanan Pangan · Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan · Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
				Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Tingkat Kemiskinan/ Persentase Penduduk Miskin	6,40 - 6,21	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat
		4	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Indikator: · Indeks Ketahanan Energi · Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	-	-	-	-
		5	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Indikator: • Indeks Ketahanan Air	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	59,17	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			Nasional • Kapasitas Tampungan Air • Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan • Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman				
		6	Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan Indikator: · Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global · Indonesia Blue Economy Index (IBEI) · Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
		7	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau Indikator: · Indeks ekonomi hijau · Indeks kualitas pengelolaan sampah (IKPS) · Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah · Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif · Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	1.215.147,43 TonCO2eq	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			(GRK) tahunan · Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati · Indeks kualitas lingkungan hidup				
3	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	8	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan Indikator: • Stok infrastruktur terhadap PDB	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	59,17	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana
		9	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB Indikator: · Total aset sektor keuangan/PDB · Aset perbankan/PDB · Aset dana pension/PDB · Aset asuransi/PDB · Kapitalisasi pasar modal/PDB · Total kredit/PDB · Inklusi keuangan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
		10	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas Indikator: · Proporsi Penciptaan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			Lapangan Kerja Formal · Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB · Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah · Rasio kewirausahaan	Inklusif dan Berkelanjutan			perintisan pengembangan UMKM syariah
				Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	59,17	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana
		11	Meningkatnya nilai tambah pariwisata Indikator: · Rasio PDB pariwisata · Devisa pariwisata	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
		12	Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif Indikator: · Proporsi PDB ekonomi kreatif	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
4	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	13	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata Indikator: · Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun · Harapan Lama Sekolah · Rata-rata nilai PISA : membaca, matematika,	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Indeks Pembangunan Manusia	81,42	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			sains · Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi membaca numerasi · Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi · Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi · Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi				
		14	Terwujudnya kesehatan untuk semua Indikator: · Usia Harapan Hidup · Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) · Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) · Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita · Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk) · Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Indeks Pembangunan Manusia	81,42	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh
		15	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat	Terwujudnya Penguatan Landasan	Indeks Pembangunan Manusia	81,42	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			inklusif Indikator: · Indeks pembangunan kualitas keluarga · Indeks perlindungan anak · Indeks pembangunan pemuda · Indeks ketimpangan gender · Indeks pembangunan gender · Mobilitas penduduk lanjut usia · Mobilitas penduduk penyandang disabilitas	Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif			Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh
		16	Menguatnya iptek, inovasi dan produktivitas tenaga kerja Indikator: • Peringkat indeks inovasi global • Tingkat pengangguran terbuka • Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) • Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Indeks Pembangunan Manusia	81,42	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh
		17	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat Indikator: · Peringkat pada Asian	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Indeks Pembangunan Manusia	81,42	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			Games · Peringkat pada Asian Para Games · Peringkat pada ASEAN Para Games · Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga				
5	PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	18	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan Indikator: · Rasio PDB industri pengolahan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
		19	Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global Indikator: · Biaya logistik . Pembentukan modal tetap bruto (%PDB) . Ekspor barang dan jasa (%PDB)	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
6	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	20	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan Indikator: · Tingkat kemiskinan · Tingkat kemiskinan ekstrem · Proporsi penduduk kelas menengah	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Tingkat Kemiskinan/ Persentase Penduduk Miskin	5,60-7,45	Penguatan Fondasi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan
				Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial	Indeks Pembangunan Manusia	81,42	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
			· Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan · Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	yang Merata dan Responsif			Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh
		21	Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan Indikator: · Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	59,17	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh BencanaBerkelanjutan
		22	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Indikator: · Persentase desa mandiri	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	81	Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi,
		23	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indikator: · Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional · Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
7	PN 7: Memperkuat Reformasi	24	Terwujunya supremasi hukum yang transparan,	Terwujudnya Penguatan	Indeks Reformasi Birokrasi	81	Pengembangan layanan publik berbasis digital

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
	Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional Indikator: · Indeks pembangunan hukum · Indeks persepsi korupsi · Indeks integritas partai politik	Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance			dan reformasi birokrasi berbasis inovasi,
		25	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani Indikator: · Indeks reformasi birokrasi nasional · Indeks pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	81	Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi,
		26	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba Indikator: · Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Indeks Harmoni Indonesia	7,5	Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial
		27	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Indikator: · Return on asset (RoA) BUMN	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
		28	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan Indikator: · Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB · Rasio Perpajakan terhadap PDB	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
		29	Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Indikator: · Tingkat inflasi	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	62,98 juta rupiah	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
8	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk	30	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju Indikator: · Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) · Indeks Pembangunan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Indeks Harmoni Indonesia	7,5	Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial

No	Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Pembangunan
	mencapai masyarakat adil dan makmur		Kebudayaan (IPK) .Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)				
		31	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Indikator: · Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	1.215.147,43 TonCO2eq	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana
Jumlah Sasaran PN					**31**		
Jumlah Sasaran Pembangunan Daerah					**5**		

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa secara umum sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 telah selaras dengan sasaran prioritas nasional dalam RKP Tahun 2027. Namun demikian, terdapat satu sasaran prioritas nasional yang belum dapat dikaitkan secara langsung dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh urusan energi yang bukan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Sasaran prioritas nasional tersebut adalah *meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan melalui pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus).*

Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025–2029 dengan prioritas nasional RPJMN 2025–2029 dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12 Persandingan antara Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo 2025-2029

No	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah
1	PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PD 6: Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial
2	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD 1: Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
		PD 2: Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana
		PD 4: Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat
		PD 6: Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial
3	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PD 1: Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
		PD 2: Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana

No	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Daerah
4	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	PD 3: Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh
5	PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PD 1: Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
6	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PD 1: Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
		PD 2: Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana
		PD 3: Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh
		PD 4: Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat
		PD 5: Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi,
7	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PD 1: Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah
		PD 5: Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi,
		PD 6: Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial
8	PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	PD 2: Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana
		PD 6: Penguatan fondasi keamanan dan harmoni sosial

Sumber: Bapperida (data diolah)

Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo dalam RKPD 2027 dengan sasaran Prioritas Nasional 2027 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13 Keterkaitan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 dengan Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PDRB per kapita	Rp Juta	62,98	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	(1) UMKM Naik Kelas (2) Desa Wisata Berkelanjutan (3) Subsidi Bunga Pinjaman UMKM (4) Smart Farming (5) Investasi Berbasis Potensi Lokal (6) Program Pengembangan Pasar Lokal dan Ekspor (Sukoharjo Go Global) (7) Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal (8) Program Asuransi Pertanian (9) Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga (10) Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan 3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)
							Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	1. Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global 2. Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 3. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global
						PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	1. Total aset sektor keuangan/PDB 2. Aset perbankan/PDB 3. Aset dana pension/PDB 4. Aset asuransi/PDB 5. Kapitalisasi pasar modal/PDB

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
						agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		6. Total kredit/PDB 7. Inklusi keuangan
							Meningkatnya nilai tambah pariwisata	1. Rasio PDB pariwisata 2. Devisa pariwisata
							Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi PDB ekonomi kreatif
							Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 2. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB 3. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah 4. Rasio kewirausahaan
							Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Stok infrastruktur terhadap PDB

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
						PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	Menguatnya iptek, inovasi dan produktivitas tenaga kerja	1. Peringkat indeks inovasi global 2. Tingkat pengangguran terbuka 3. Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) 4. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
						PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Rasio PDB industri pengolahan
							Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	1. Biaya logistik 2. Pembentukan modal tetap bruto (%PDB) 3. Ekspor barang dan jasa (%PDB)
						PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1. Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional 2. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	1.215.147,43 TonCO2eq	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	(6) Mobilitas Sukoharjo: Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi (8) Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi (9) Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	1. Indeks ekonomi hijau 2. Indeks kualitas pengelolaan sampah (IKPS) 3. Timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah 4. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif 5. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan 6. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati 7. Indeks kualitas lingkungan hidup
						PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
	Indeks Pembangunan Infrastruktur		59,17	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	(1) Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus (2) Penataan Wajah Kota (Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho) (3) Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh (4) Terangi Jalanku (5) Sukoharjo Sehat: Akses Air Minum dan Sanitasi Layak (7) Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	1. Indeks Ketahanan Air Nasional 2. Kapasitas Tampungan Air 3. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
						PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Stok infrastruktur terhadap PDB

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka / Indeks	81,42	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	(1) Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD (2) Posyandu Terpadu (One Stop Health Center) untuk Integrasi Layanan Primer (3) Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS) (4) Pencegahan dan Penanganan Stunting (5) Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus (6) Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS) (7) Sukoharjo Pemuda Produktif (8) Sukoharjo Juara	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-rata nilai PISA : membaca, matematika, sains 4. Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi membaca numerasi 5. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi 6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi 7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
							Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup 2. Angka Kelahiran Total (Total 3. Fertility Rate) (rata-rata 4. kelahiran per wanita usia 5. subur 15–49 tahun) 6. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 7. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 8. Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk) 9. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
							Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	1. Peringkat pada Asian Games 2. Peringkat pada Asian Para Games 3. Peringkat pada ASEAN Para Games 4. Persentase penduduk berumur 10

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
								tahun ke atas yang aktif berolahraga
							Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1. Indeks pembangunan kualitas keluarga 2. Indeks perlindungan anak 3. Indeks pembangunan pemuda 4. Indeks ketimpangan gender 5. Indeks pembangunan gender 6. Mobilitas penduduk lanjut usia 7. Mobilitas penduduk penyandang disabilitas
						PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
	Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin	%	6,40 - 6,21	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat	(1) Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar (2) Penyediaan Rumah Layak Huni (3) Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas (4) Santunan Kematian (Program Lanjutan)	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	1. Tingkat kemiskinan 2. Tingkat kemiskinan ekstrem 3. Proporsi penduduk kelas menengah 4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 5. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
							Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka / Indeks	81	Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi,	(1) Sukoharjo Digital Government (Tol Layanan Publik) (2) Sukoharjo Smart Village Program (Program Kampung	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Persentase desa mandiri

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
					Pintar 1 Desa 1 Program Unggulan) (3) Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK) (4) Reformasi Birokrasi Dinamis (Dynamic Bureaucracy Reform) (5) Sukoharjo Open Government (SOG)	PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	1. Indeks reformasi birokrasi nasional 2. Indeks pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri
							Terwujunya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	1. Indeks pembangunan hukum 2. Indeks persepsi korupsi 3. Indeks integritas partai politik
							Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika
							Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan	Return on asset (RoA) BUMN

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
							Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	1. Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB 2. Rasio Perpajakan terhadap PDB
							Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tingkat inflasi

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Nasional
	Indeks Harmoni Indonesia	Angka / Indeks	7,5	Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial	(1) Umroh Gratis untuk Takmir Masjid (2) Sukoharjo Mengaji (3) Sukoharjo Harmoni (4) Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren (5) Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan (6) Sukoharjo Berkarakter (7) Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo)	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	1. Indeks Demokrasi Indonesia 2. Indeks HAM
						PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan	1. Asia Power Index (Military Capability) 2. Asia Power Index (Diplomatic Influence) 3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
						PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

Berdasarkan Tabel 4.13, terdapat konsistensi antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 dengan sasaran Prioritas Nasional, termasuk keselarasan pada indikator kinerjanya. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.

Selain itu, indikator dampak *(impact)* telah digunakan sebagai indikator kinerja pada tingkat sasaran pembangunan daerah, sehingga mencerminkan orientasi pada hasil pembangunan yang bersifat strategis dan berkelanjutan.

Selanjutnya, seluruh program prioritas telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang menggunakan indikator hasil (outcome), yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

4. Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Program Prioritas Daerah

Perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan konsistensi dengan program prioritas, sebagaimana tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14 Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	(1) UMKM Naik Kelas	Program Pengembangan UMKM	Diskopumdag
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskopumdag
		(2) Desa Wisata Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar
		(3) Subsidi Bunga Pinjaman UMKM	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda
		(4) Smart Farming	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dispertan dan Perikanan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dispertan dan Perikanan
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dispertan dan Perikanan
		(5) Investasi Berbasis Potensi Lokal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP
		(6) Program Pengembangan Pasar Lokal dan Ekspor (Sukoharjo Go Global)	Program Pengembangan Ekspor	Diskopumdag
		(7) Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diskopumdag
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskopumdag
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskopumdag
		(8) Program Asuransi Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dispertan dan Perikanan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dispertan dan Perikanan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dispertan dan Perikanan
		(9) Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskopumdag
			Program Penyuluhan Pertanian	Dispertan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dispertan dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dispertan dan Perikanan
		(10) Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dispertan dan Perikanan
2	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	(1) Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
		(2) Penataan Wajah Kota (Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho)	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskopumdag
		(3) Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh	Program Kawasan Permukiman	DPKP
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPKP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
			Program Pengembangan Permukiman	DPKP
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
		(4) Terangi Jalanku	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DPKP
		(5) Sukoharjo Sehat: Akses Air Minum dan Sanitasi Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		(6) Mobilitas Sukoharjo: Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
		(7) Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		(8) Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas LH
		(9) Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Penanganan Bencana	Dinsos
3	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	(1) Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas P dan K
			Program Pengembangan Kurikulum	Dinas P dan K
		(2) Posyandu Terpadu (One Stop Health Center) untuk Integrasi Layanan Primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		(3) Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		(4) Pencegahan dan Penanganan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKB dan P3A
		(5) Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas P dan K
		(6) Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKB dan P3A
			Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas PPKB dan P3A

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		(7) Sukoharjo Pemuda Produktif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disporapar
		(8) Sukoharjo Juara	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disporapar
4	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat	(1) Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disporapar
		(2) Penyediaan Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPKP
			Program Pengembangan Perumahan	DPKP
		(3) Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
		(4) Santunan Kematian (Program Lanjutan)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
5	Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi	(1) Sukoharjo Digital Government (Tol Layanan Publik)	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
			Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		(2) Sukoharjo Smart Village Program (Program Kampung Pintar 1 Desa 1 Program Unggulan)	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas PMD
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
		(3) Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		(4) Reformasi Birokrasi Dinamis (Dynamic Bureaucracy Reform)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
			Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		(5) Sukoharjo Open Government (SOG)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
6	Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial	(1) Umroh Gratis untuk Takmir Masjid	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		(2) Sukoharjo Mengaji	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		(3) Sukoharjo Harmoni	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesbangpol
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		(4) Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		(5) Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		(6) Sukoharjo Berkarakter	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas P dan K
		(7) Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo)	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas P dan K
			Program Pemasaran Pariwisata	Disporapar

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

5. Keselarasan prioritas pembangunan dengan prioritas nasional RPJMN 2025-2029

Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Sasaran PN RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Sasaran PN RKP Tahun 2027

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029
1	PN 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	
	Sasaran 1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance
	Indikator	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Harmoni Indonesia
		Indeks Hak Asasi Manusia	
2	PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	
	Sasaran 1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance
	Indikator	Asia Power Index (Military Capability)	Indeks Harmoni Indonesia
		Asia Power Index (Diplomatic Influence)	
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	
		Global Cybersecurity Index	
		Indeks Keamanan Laut Nasional	
	Sasaran 2	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Indeks Ketahanan Pangan	PDRB per kapita
		Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	
	Sasaran 3	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	-
	Indikator	Indeks Ketahanan Energi	--
		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	
	Sasaran 4	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Indeks Ketahanan Air Nasional	Indeks Pembangunan Infrastruktur
		Kapasitas tampungan air (m3/kapita))	
		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	
	Sasaran 5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	PDRB per kapita
		Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	
		Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	
	Sasaran 6	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Indeks Ekonomi Hijau	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Indeks Kualitas Udara	
		Indeks Kualitas Air	
		Indeks Kualitas Lahan	
		Indeks Kualitas Air Laut	
3	PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
	Sasaran 1	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	Indeks Pembangunan Infrastruktur
	Sasaran 2	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	PDRB per kapita
		Aset Perbankan/PDB (%)	
		Aset Dana Pensiun/PDB (%)	
		Aset Asuransi/PDB (%)	
		Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	
		Total Kredit/PDB (%)	
		Inklusi Keuangan (%)	
	Sasaran 3	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	PDRB per kapita
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	
		Rasio Kewirausahaan (%)	
	Sasaran 4	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Rasio PDB Pariwisata (%)	PDRB per kapita
		Devisa Pariwisata (Miliar USD)	
	Sasaran 5	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	PDRB per kapita
4	PN 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	
	Sasaran 1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif
	Indikator	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Indeks Pembangunan Manusia
		Harapan lama sekolah (tahun)	
		Rata-rata nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains	
		Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (b) Numerasi	
		Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	
		Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	
		Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029
	Sasaran 2	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif
	Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Indeks Pembangunan Manusia
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	
		Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)c	
	Sasaran 3	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif
	Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Manusia
		Indeks Perlindungan Anak	
		Indeks Pembangunan Pemuda	
		Indeks Ketimpangan Gender	
		Indeks Pembangunan Gender	
		Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	
5		Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	
	Sasaran 4	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Peringkat Indeks Inovasi Global	PDRB per kapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	
		Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	
	Sasaran 5	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif
	Indikator	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	Indeks Pembangunan Manusia
		Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games	
		Peringkat pada Asian Games	
		Peringkat pada Asian Para Games	
		Peringkat pada SEA Games	
		Peringkat pada ASEAN Para Games	
		Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	
	PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	
	Sasaran 1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	PDRB per kapita
		Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
	Sasaran 2	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Biaya Logistik (% PDB)	PDRB per kapita
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	
6	PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
	Sasaran 1	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif
	Indikator	Tingkat kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin
		Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	
		Proporsi penduduk kelas menengah (%)	
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	
		Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029
	Sasaran 2	Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Indeks Pembangunan Infrastruktur
	Sasaran 3	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance
	Indikator	Persentase desa mandiri (%)	Indeks Reformasi Birokrasi
	Sasaran 4	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	PDRB per kapita
		Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	
7	PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	
	Sasaran 1	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance
	Indikator	Indeks Pembangunan Hukum	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Harmoni Indonesia
		Indeks Persepsi Korupsi	
		Indeks Materi Hukum	
		Indeks Integritas Nasional	
		Indeks Integritas Partai Politik	
	Sasaran 2	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance
	Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Pelayanan Publik	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
		Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	
	Sasaran 3	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance
	Indikator	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	Indeks Harmoni Indonesia
	Sasaran 4	Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	PDRB per kapita
	Sasaran 4	Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	PDRB per kapita
		Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	
	Sasaran 5	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Tingkat Inflasi (%)	PDRB per kapita
8	PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
	Sasaran 1	Terwujudnya kehidupan beragam yang maslahat dan berkebudayaan maju	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance
	Indikator	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks Harmoni Indonesia

No	PN/ Sasaran/ Indikator Sasaran RPJMN 2025-2029		Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	
	Sasaran 2	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Indikator	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

Persandingan antara program prioritas dan program nomenklatur sebagaimana tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16 Persandingan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2025-2029 dengan Program Nomenklatur

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
Sasaran 1: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			PDRB per kapita	
			Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	
			Indeks Pembangunan Infrastruktur	
	1. UMKM Naik Kelas	Meningkatnya kapasitas wirausaha terhadap perizinan dan legalitas bagi UMKM, literasi dan akses keuangan, pemasaran digita, keiukutserta dalam pameran skala nasional, event UMKM dan business Matching, serta monev UMKM	Pertumbuhan Wirausaha	Program Pengembangan UMKM
			Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	2. Desa Wisata Berkelanjutan	Meningkatnya pembentukan desa wisata berdasarkan klaster yang berdaya saing dalam mendukung kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	3. Subsidi Bunga Pinjaman UMK	Meningkatnya pelaksanaan penganggaran terhadap subsidi bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil Se-Kabupaten Sukoharjo	Persentase Dokumen Penganggaran Yang Tepat Waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
	4. Smart Farming	Meningkatnya produksi hasil-hasil pertanian, serta pengendalian dan pencegahan bencana pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Prosentase SDM Petani yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian
			Persentase Peningkatan Kelembagaan Petani dan Kenaikan Kelas Kelompok	Program Penyuluhan Pertanian
			Prosentase gagal panen	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	5. Investasi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya investasi potensi unggulan daerah	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	6. Program Pengembangan Pasar Lokal dan Ekspor *(Sukoharjo Go Global)*	Meningkatnya ekspor produk unggulan dalam skala nasional dan llobal	Prosentase Peningkatan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor
	7. Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal	Meningkatnya pemantauan kebutuhan pokok di 3 pasar tradisiona dalam rangka stabilitasi stok dan harga barang kebutuhan pokok masyarakat	Prosentase Pengendalian Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			Persentase Pasar Rakyat yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	8. Program Asuransi Pertanian	Meningkanya perlindungan petani dari risiko gagal panen akibat faktor alam dan hama	Persentase Gagal Panen	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Meningkatnya kapasitas SDM dan kelompok pertanian dalam peningkatan produksi hasil-hasil pertanian, serta pengendalian dan pencegahan bencana pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Meningkatnya kapasitas SDM dan kelompok pertanian dalam	Prosentase SDM Petani yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian
			Persentase Peningkatan Kelembagaan Petani dan Kenaikan Kelas Kelompok	Program Penyuluhan Pertanian
	9. Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga	Meningkatnya kapasitas pemasaran dan packaging bagi UMKM olahan produk pertanian	Persentase SDM Pelaku UMKM Yang Ditingkatkan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Persentase Peningkatan Kelembagaan Petani dan Kenaikan Kelas Kelompok	Program Penyuluhan Pertanian
			Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Meningkatnya Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidaya Bersertifikat CBIB	Jumlah Pembudidaya Bersertifikat CBIB	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	10. Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian	Meningkatnya areal persawahan teraliri air dalam rangka peningkatan produksi hasil-hasil pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	11. Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus	Meningkatnya aksesibilitas bagi masyarakat yang nyaman dan aman	Cakupan Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Persentase Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			V/C Rasio Di Jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Proporsi Jalan dalam Kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan
			Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	12. Penataan Wajah Kota (Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho)	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata pada Penataan wajah kota (Sukoharjo kuncoro Mbangun Deso Noto Kutho) dengan penataan kawasan alun - alun/simpanglima Kabupaten Sukoharjo,Kawasan Kartasura (Eeks terminal Kartasura),Wajah Kota Ibukota Kecamatan, dan penataan bangunan dan lingkungan lainnya sesuai dengan regulasi	Rasio bangunan ber PBG dan SLF	Program Penataan Bangunan Gedung
			Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Jumlah Terbangunnya Pujasera dan Sarana Perdagangan Lainnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	13. Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh	Menurunnya kawasan lingkungan kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 ha Yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman
			Prosentase RTLH Diluar Kawasan Kumuh Yang Sudah Tertangani	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Aman, Pedesaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Persentase Desa Dengan Fasilitas Pengelolaan Persampahan Terbangun	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman Dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	14. "Sukoharjo Sehat": Akses Air minum dan Sanitasi Aman	Meningkatnya aKses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Aman, Pedesaan	Program Pengekolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Meningkatnyan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	15. Terangi Jalanku	Terpenuhinya kebutuhan PJU di jalan kabupaten/kota	Persentase Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	16. "Mobilitas Sukoharjo": Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi	Tersedianya transportasi umum angkutan sekolah bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Cakupan Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	17. Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Meningkatnya llayanan public secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
	18. Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi	Pembangunan TPST, pembangunan TPS3R, pendampingan dan pembinaan bank sampah dan eco enzim, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
	19. Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatnya kapasitas berkuranganya Risiko Bencana	Cakupan Capaian Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana
Sasaran 2: Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
			Tingkat Kemiskinan/	
	20. Pencegahan dan Penanganan Stunting	Menurunnya prevalensi stunting di Kabupaten Sukoharjo	Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	21. Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD	Meningkatnya Partisipasi Sekolah Tingkat SD melalui Pilot Project Sekolah Efektif/ Unggulan Tingkat SD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang beartisipasi dalam pendidikan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan
			Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum
	22. Posyandu Terpadu (*One Stop Health Center*) untuk Integrasi Layanan Primer	Terwujudnya pelayanan kesehatan terintegrasi pada seluruh siklus hidup	Persentase ibu hamil risiko tinggi tertangani	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase neonatal risiko tinggi tertangani	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase kecamatan dengan proporsi non-hipertensi minimal 75%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase kecamatan dengan proporsi non-Diabetes Mellitus minimal 85%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase lanjut usia mandiri (RIBK)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Angka Keberhasilan dan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate) (RIBK,IUP)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) (RIBK, IUP)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase ODHIV on ARV tersupresi viral load	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Positive Rate Malaria	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			Persentase kecamatan memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase Capaian SPM RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	23. Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS)	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (RIBK)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Persentase Kecamatan dengan Peningkatan Aktivitas Fisik Cukup	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	24. Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus	Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Pemenuhan SDM dan sarana prasana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi serta Penunjukkan piloting project Sekolah Inklusi (SD, SMP, PAUD di setiap kecamatan)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang beartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan
	25. Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS)	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam kemandirian ekonomi perempuan dan peran aktif perempuan dalam pembangunan.	Persentase Anggaran Responsif Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Proporsi keluarga yang mendapatkan layanan dari Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sesuai kebutuhan.	Peningkatan Kualitas Keluarga
	26. Sukoharjo Pemuda Produktif	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan Pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	27. Sukoharjo Juara	Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah Atlet Berestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	28. Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar	Meningkatnya Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi berupa Beasiswa Kuliah	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
	29. Penyediaan Rumah Layak Huni	Meningkatnya menyediaan rumah layak huni bagi penduduk miskin	Prosentase RTLH Diluar Kawasan Kumuh Yang Sudah Tertangani	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan
	30. Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas	Meningkatnya ketahanan pangan berbasis komunitas	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Persentase Cadangan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Tingkat Konsumsi Energi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Persentase Kelembagaan Kemandirian Pangan yang aktif	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Persentase Desa/Kelurahan Rentan/Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	31. Santunan Kematian (Program Lanjutan)	Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penduduk Miskin untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Warga Penduduk Miskin	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Penanganan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
			Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PPKS Lainnya diluar HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Sasaran 3:			Indeks Reformasi Birokrasi	
			Indeks Harmoni Indonesia	

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance				
	32. Sukoharjo Digital Government (Tol Layanan Publik)	Meningkatnya penjangkauan dan aksesbilitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	33. *Sukoharjo Smart Village Program* (Program Kampung Pintar 1 Desa 1 Program Unggulan)	Meningkatnya kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Meningkatnya penjangkauan dan aksesbilitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Perkawinan Yang	Program Pencatatan Sipil

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	
			Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pendaftaran Penduduk
	34. Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK)	Meningkatnya akuntabiltas dan Integritas Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Persentase OPD Yang Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Persentase PDTT Yang Selesai Ditangani	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	35. Reformasi Birokrasi Dinamis (*Dynamic Bureaucracy Reform*)	Meningkatnya evaluasi kinerja berkala untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Persentase Sakip Perangkat Daerah Kategori Minimal BB	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Persentase Wajib Lapor LHKPN Yang Melapor	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	36. Sukoharjo *Open Government (SOG)*	Meningkatnya pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan yang sesuai dengan usulan kegiatan pembangunan dari tingkat desa	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	37. Umroh Gratis untuk Takmir Masjid	Meningkanya fasilitasi pelaksanaan ibadah umrah bagi takmir masjid sebagai bentuk penghargaan dan peningkatan Kepedulian Pemerintah terhadap Pelayan Keagamaan serta peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan takmir masjid di Kabupaten Sukoharjo	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	38. Sukoharjo Mengaji	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pengajian dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan di Kabupaten Sukoharjo	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	39. Sukoharjo Harmoni	Meningkatnya pembinaan keagamaan guna memperkuat kerukunan, toleransi, dan keberagaman di Kabupaten Sukoharjo.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
			Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sasaran	Program Prioritas RPJMD 2025-2029	Outcome	Indikator	Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas
			Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Persentase linmas yang terlatih dan dikukuhkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	40. Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi bagi pondok pesantren	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	41. Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Meningkatnya akses dan kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan beraktivitas keagamaan serta Tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	42. Sukoharjo Berkarakter	Meningkatnya penguatan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral, etika, budi pekerti, dan penggunaan Bahasa Jawa pada masyarakat Sukoharjo	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
	43. Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo)	Meningkatnya pelaksanaan Event Budaya Sukoharjo dan pemenuhan sarana prasarana Taman Budaya Suryani Sukoharjo	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Tingkat hunian akomodasi	Program Pemasaran Pariwisata

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

4.3.6. Dukungan Sasaran Dan Prioritas Daerah

1. Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, strategi dan arah kebijakan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pedoman fundamental bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Ketentuan mengenai SPM diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat, implementasi SPM diarahkan untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan yang layak dan merata sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat enam jenis pelayanan dasar yang menjadi ruang lingkup SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Dalam rangka mendukung pencapaian SPM, Pemerintah Daerah telah menetapkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan pemenuhan pelayanan dasar tersebut. Prioritas daerah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan jenis layanan, tetapi juga pada peningkatan mutu dan kualitas pelayanan.

Secara lebih rinci, sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17 Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antanental sesuai standar	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperolah fasilitas penyediaan rumah yang layak huni		Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana 2. Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat	Kumuh 3. Program Pengembangan Permukiman
5	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	1. Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial 2. Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program Penanggulangan Bencana 3. Program Penanganan Bencana
		Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada			
		Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakusi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Penanganan Bencana
		Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial			

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

2. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2027

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum partisipatif antar pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota dan nasional. Musrenbang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah sekaligus instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 telah memperhatikan dan mengintegrasikan hasil Musrenbang yang dilaksanakan pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Dengan demikian, dokumen perencanaan yang disusun mencerminkan pendekatan partisipatif serta sinergi antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Adapun hasil Musrenbang sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Sukoharjo 2027

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
1	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bendung Siluwur	Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Weru
2	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dk Gangin Kulon	Luas jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi	DISPERTAN	Kecamatan Weru
3	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pembangunan Jembatan Dayu Desa Tawang, Kecamatan Weru	Jumlah jembatan yang dibangun	BPKPAD	Kecamatan Weru
4	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Pilang	Luas daerah irigasi yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Weru
5	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Siluwur	Luas daerah irigasi yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Weru

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
6	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Grogol - Tegalsari)	Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU	DISHUB	Kecamatan Weru
7	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pelebaran Jalan Tanjung-Lengking	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	DPUPR	Kecamatan Bulu
8	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan Tiyaran - Karangasem	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Bulu
9	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud Jalan Tengklik - Jarum	Panjang talud jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Bulu
10	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Bulu - Lengking)	Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU	DISHUB	Kecamatan Bulu

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
11	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Tawangsari - Pojok	Panjang jalan yang ditingkatkan menuju standar	DPUPR	Kecamatan Tawangsari
12	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan Kwaron-Bokuning Kec. Tawangsari	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Tawangsari
13	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud jalan Toriyo - Ngemul	Panjang talud jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Bendosari
14	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Madoh	Luas daerah irigasi yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Bendosari
15	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud Jalan Jombor - Ngemul	Panjang talud jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Bendosari

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
16	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl Sidan - Mulur)	Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU	DPUPR	Kecamatan Polokarto
17	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Grogol	Luas daerah irigasi yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Polokarto
18	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Embung Dk. Melikan RT 2 RW 1, Tanjungrejo, Kec. Nguter	Jumlah embung yang dibangun	DISPERTAN	Kecamatan Nguter
19	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Ambil - Ambil Tanjung	Panjang jalan yang ditingkatkan menuju standar	DPUPR	Kecamatan Nguter
20	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud Jalan Juron-Serut	Panjang talud jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Nguter
21	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Penguatan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur,	PROGRAM PENGELOLAA	Pembangunan Jembatan Desa	Jumlah jembatan	BPKPAD	Kecamatan Nguter

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
	Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	N KEUANGAN DAERAH	Pengkol, Kecamatan Nguter	desa yang dibangun		
22	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Pengkol - Tanjungrejo)	Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU	DISHUB	Kecamatan Nguter
23	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Gentan - Bekonang	Panjang sasluran drainase yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Mojolaban
24	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Bekonang - Mojo	Panjang sasluran drainase yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Mojolaban
25	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pemeliharaan Berkala Jalan Plumbon-Demakan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala	DPUPR	Kecamatan Mojolaban
26	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan Wirun - Karangwuni	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Mojolaban

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
	Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana					
27	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud Jalan Sidan – Triyagan	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Mojolaban
28	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Plumbon - Demakan)	Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU	DISHUB	Kecamatan Mojolaban
29	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Wirun - Palur)	Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU	DISHUB	Kecamatan Mojolaban
30	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pembangunan Masjid di Kawasan Bekas Terminal Kartasura	Jumlah masjid yang dibangun	DPUPR	Kecamatan Kartasura
31	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Adi Sumarmo	Panjang jalan yang ditingkatkan menuju standar	DPUPR	Kecamatan Kartasura

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
	Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Inklusif dan Berkelanjutan	Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana					
32	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Adi Sumarmo, Kec. Kartasura	Panjang sasluran drainase yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Kartasura
33	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Kertonatan, Kecamatan Kartasura	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang dibangun	DLH	Kecamatan Kartasura
34	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Permukiman Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Permukiman yang dibangun	DPUPR	Kecamatan Kartasura
35	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Trangsang - Ngemplak)	Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU	DISHUB	Kecamatan Kartasura
36	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi,	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pembangunan Drainase Kampung Makamhaji RT 1 RW 1 Desa	Panjang drainase jalan yang dibangun	BPKPAD	Kecamatan Kartasura

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
	Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Inklusif dan Berkelanjutan	Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo			
37	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Grogol-Kadokan, Kec. Grogol	Panjang jalan yang ditingkatkan menuju standar	DPUPR	Kecamatan Grogol
38	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Grogol - Gedangan, Kec. Grogol	Panjang sasluran drainase yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Grogol
39	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Proklamasi, Kec. Grogol	Panjang sasluran drainase yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Grogol
40	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Bacem - Tanjunganom, Kec. Grogol	Panjang sasluran drainase yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Grogol
41	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi,	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Langenharjo -	Panjang sasluran drainase yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Grogol

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
	Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Inklusif dan Berkelanjutan	Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		Pondok, Kec. Grogol			
42	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Tanjunganom-Daleman	Panjang jalan yang ditingkatkan menuju standar	DPUPR	Kecamatan Baki
43	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Baki-Pajang	Panjang jalan yang ditingkatkan menuju standar	DPUPR	Kecamatan Baki
44	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Jumeneng	Luas daerah irigasi yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Baki
45	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Nglondo	Luas daerah irigasi yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Baki
46	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengaspalan Jalan /Talud se-Kecamatan Gatak	Panjang jalan aspal yang dibangun	BPKPAD	Kecamatan Gatak

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
	Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional		Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana					
47	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rehabilitasi Gedung / Kantor Desa	Jumlah gedung/kantor desa yang direbilitasi	BPKPAD	Kecamatan Gatak
48	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo)	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
49	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan Pudak (Selatan Pondok Al Ukuwah)	Panjang jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
50	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud Jalan Dompilan-Gawangan	Panjang talud jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
51	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Gorong-Gorong dan Talud Jalan Ngaglik - Sonorejo	Panjang talud jalan yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo

No	Tema Tahunan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
52	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Saluran Pembuang Bulakrejo	Panjang saluran pembuang yang direhabilitasi	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
53	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Carikan - Bulakan)	Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
54	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Dompilan - Cendono)	Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
55	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Ngaglik - Sonorejo)	Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
56	Penguatan Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal Pertanian Dalam Arti Luas Dan Inovasi, Mendukung Kebijakan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pengadaan Sarpras di Kelurahan (Gapura/Tugu, Lapangan)	Jumlah pengadaan sarpras kelurahan	KEC. SUKOHARJO	Kecamatan Sukoharjo

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada tabel di atas, terlihat adanya keselarasan antara arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, dan program dengan usulan kegiatan yang disampaikan melalui forum Musrenbang. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilaksanakan secara partisipatif dan terintegrasi. Selanjutnya, usulan kegiatan yang telah disepakati menjadi bagian dari rencana kerja dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

3. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 (nol) persen, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan tiga strategi utama sebagai langkah percepatan pencapaiannya.

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi. Strategi ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, antara lain Bantuan Sosial Reguler (PKH dan Sembako), Bantuan Sosial Khusus (BLT Dana Desa, BST, dan top up bantuan sosial reguler), PBI JKN, bantuan bagi siswa miskin, iuran jaminan sosial, Kartu Jateng Sejahtera, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jambanisasi, instalasi dan subsidi listrik, serta bantuan dan rehabilitasi bagi kelompok berkebutuhan khusus.
2. Pengurangan beban pengeluaran sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Upaya ini diwujudkan melalui program padat karya, program vokasi dan pelatihan, peningkatan akses terhadap aset produktif, akses permodalan dan pemanfaatan lahan, perluasan akses pembiayaan dan pasar, serta pemberian modal usaha bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
3. Penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar. Strategi ini mencakup penyediaan akses air minum dan sanitasi layak, peningkatan layanan dan infrastruktur pendidikan serta kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur jalan.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui peningkatan validitas dan akurasi data dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan mekanisme pendataan secara bottom-up sebagai dasar dalam penentuan intervensi. Pendekatan intervensi dilakukan berbasis individu dan kewilayahan secara kolaboratif, terfokus, dan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan potensi serta permasalahan yang dihadapi masing-masing kelompok sasaran.

Fokus intervensi diarahkan pada pemberian bantuan yang tepat sasaran, peningkatan akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan produk lokal.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen kuat dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan. Komitmen tersebut tercermin dalam arah kebijakan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 yang sekaligus merupakan implementasi dari tiga strategi percepatan penghapusan kemiskinan sebagaimana dimaksud.

Adapun sasaran, prioritas daerah, dan program dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.19 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Pelaksana
1	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
2	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	Program Kawasan Permukiman	DPKP
3	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	
4	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
5	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
6	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS P DAN K
7	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial	Program Pengembangan Kebudayaan	
8	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	DISKOPUMDAG
			Program Pengembangan UMKM	
9	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISPERNAKER
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Pelaksana
10	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISPERTAN
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
11	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
			Program Pemberdayaan Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Program Penanganan Bencana	
12	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas PPKB dan P3A
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
13	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
14	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Penguatan peningkatan infrastruktur digital dan transparansi tata kelola pemerintahan	Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
			Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
15	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Penguatan peningkatan infrastruktur digital dan transparansi tata kelola pemerintahan	Program Penataan Desa	DPMD
16	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Penguatan peningkatan infrastruktur digital dan transparansi tata kelola pemerintahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
17	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

Dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) melaksanakan koordinasi dan sinergi secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain lembaga amil zakat, pelaku *Corporate Social Responsibility (CSR)*, serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), guna memperkuat efektivitas dan ketepatan intervensi dalam percepatan penghapusan kemiskinan.

4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting

Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 16,8 persen. Capaian tersebut masih berada di atas target nasional yang telah ditetapkan sebesar 19,8 persen.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mendukung pencapaian target nasional percepatan penurunan stunting. Komitmen tersebut tercermin dalam arah kebijakan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027.

Selanjutnya, sasaran, prioritas daerah, serta program pembangunan dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sukoharjo disajikan pada Tabel 4.20 berikut.

Tabel 4.20 Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Pelaksana
1	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS P DAN K
2	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
3	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DINAS PPKB DAN P3A
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
4	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Penguatan Fondasi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
5	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	Program Kawasan Permukiman	DPKP

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	Pelaksana
6	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
7	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISPERTAN

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Sukoharjo

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen penuh dalam mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)* melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sukoharjo. Implementasi program dan kegiatan tersebut diselaraskan dengan target dan indikator SDGs sesuai kewenangan daerah. Adapun terdapat satu tujuan, yaitu Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), yang kontribusinya tidak secara langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena sebagian besar merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Tabel 4.21 Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2027

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Penguatan Fondasi Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh
			Penguatan Fondasi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan
		Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Kewirausahaan, UMKM Berdaya Saing, dan Kelembagaan Ekonomi Berkelanjutan, termasuk ekonomi syariah
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Kewirausahaan, UMKM Berdaya Saing, dan Kelembagaan Ekonomi Berkelanjutan, termasuk ekonomi syariah
		Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Penguatan Fondasi Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh
			Penguatan Fondasi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Penguatan Fondasi Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Penguatan Fondasi Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Penguatan Fondasi Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Infrastruktur dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota	
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Kewirausahaan, UMKM Berdaya Saing, dan Kelembagaan Ekonomi Berkelanjutan, termasuk ekonomi syariah
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Infrastruktur dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Infrastruktur dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan
		Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Penguatan peningkatan infrastruktur digital dan transparansi tata kelola pemerintahan
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Infrastruktur dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan
		Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Penguatan fondasi keamanan dan harmoni sosial
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Kewirausahaan, UMKM Berdaya Saing, dan Kelembagaan Ekonomi Berkelanjutan, termasuk ekonomi syariah
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Infrastruktur dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan

No	Tujuan SDGs	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak ada indikator berikut karena tidak mempunyai laut	
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak ada indikator berikut karena bukan merupakan indikator di tingkat kabupaten/kota	
16	Mewujudkan Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Penguatan peningkatan infrastruktur digital dan transparansi tata kelola pemerintahan
		Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Penguatan fondasi keamanan dan harmoni sosial
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Kewirausahaan, UMKM Berdaya Saing, dan Kelembagaan Ekonomi Berkelanjutan, termasuk ekonomi syariah
		Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Penguatan peningkatan infrastruktur digital dan transparansi tata kelola pemerintahan

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

6. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Sukoharjo

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Seluruh Perangkat Daerah dan pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada setiap program dan kegiatan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender dilakukan dengan menggunakan instrumen analisis gender, antara lain *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)*, guna memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan telah mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender tersebut dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.22 Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

No	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	PD Pengampu
1	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskopumdag
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Diskopumdag
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Diskopumdag
			Program Penyuluhan Pertanian	Dispertan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispertan
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dispernaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dispernaker
2	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar kewilayahan	Program Pengelolaan dan Penghembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
			Program Pengembagan Permukiman	DPKP
			Pogram Pengembangan Perumahan	DPKP
			Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	DPKP
3	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas PPKB dan P3A
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKB dan P3A
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas PPKB dan P3A
			Program Pengendalian Penduduk	Dinas PPKB dan P3A
			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas PPKB dan P3A
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas P dan K
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dispusip
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disporapar

No	Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Nomenklatur	PD Pengampu
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
4	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
5	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi,	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
			Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
			Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
			Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
			Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPERIDA
			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BAPPERIDA
			Program Riset Dan Inovasi	BAPPERIDA
			Program Penelitian dan Pengembangan	BAPPERIDA
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	DPMD
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol
6	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam keamanan dan harmoni sosial	Program pemeliharaan Kentetraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
			Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
			Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas P dan K

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim, degradasi lingkungan dan pencemaran, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang dikenal sebagai tiga krisis global *(triple planetary crisis)* merupakan tantangan global yang diperkirakan akan terus berlangsung dan sulit dihindari. Fenomena tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, antara lain kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, keberlanjutan mata pencaharian, serta kinerja pembangunan secara keseluruhan apabila tidak direspons melalui langkah-langkah yang sistematis dan terintegrasi.

Krisis global tersebut mendorong perubahan paradigma dalam dinamika pembangunan, dari pendekatan *business as usual* menuju praktik pembangunan yang lebih berkelanjutan. Perubahan tersebut menuntut transformasi menuju aktivitas ekonomi rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, termasuk energi, industri, penggunaan lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta pengelolaan limbah melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengintegrasikan isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo. Adapun sasaran dan prioritas daerah yang mendukung upaya tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.23 Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
1	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dishub
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas LH
			Program Pengelolaan Persampahan	Dinas LH
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas LH
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dispertan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dispertan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dispertan

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2027

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, serta Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan terarah dalam rangka mendorong pemerataan serta percepatan pembangunan ekonomi kawasan.

Pendekatan pembangunan kawasan tersebut diarahkan agar lebih fokus, terukur, dan tepat sasaran guna meningkatkan daya saing wilayah, mendorong pertumbuhan investasi, serta memperkuat kontribusi kawasan terhadap perekonomian nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendukung penguatan konektivitas dan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui program dan kegiatan prioritas yang terintegrasi dalam dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo, sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing kawasan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 4.24 Usulan Program/ Kegiatan Kawasan Subobosukawonosraten di Lokasi Kabupaten Sukoharjo Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan	Estimasi Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana
1	Kab. Sukoharjo	Pembangunan tanggul Sungai Bengawan Solo, Kab. Sukoharjo	200	APBN
2	Kab. Sukoharjo	Pengembangan Kawasan Pusat Furniture Indonesia, Kab. Sukoharjo	100	Swasta
3	Kab. Sukoharjo	Pengembangan *Agriculture Estate* melalui *Corporate Farming*, Kab. Sukoharjo	50	APBN

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tabel 4.25 berikut.

Tabel 4.25 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
1	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Infrastruktur dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
2	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP
			Program Pengembangan Ekspor	Diskopumdag
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskopumdag
			Program Pengendalian Dan	Dispertan

			Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dispertan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dispertan
			Program Penyuluhan Pertanian	Dispertan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Dispertan

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2027

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada pemerataan penyediaan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Upaya tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Penyediaan infrastruktur dasar meliputi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta penataan ruang yang berkualitas. Selain itu, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan sarana prasarana jalan, transportasi yang memenuhi standar keselamatan dan terintegrasi antarwilayah serta peningkatan distribusi perdagangan.

Di samping infrastruktur fisik, pembangunan juga didukung oleh infrastruktur lintas sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia, antara lain sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, olahraga, penanggulangan bencana, perlindungan lingkungan, serta infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan pertanian.

Adapun sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.26 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
1	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Infrastruktur dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	DISHUB

NO	SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
			Program Kawasan Permukiman	DPKP
			Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP
			Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Persampahan	DLH
		Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISPERTAN
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DISKOPUMDAG
2	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Sosial yang Merata dan Responsif	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS P DAN K
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
3	Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Pengembangan layanan publik berbasis digital dan reformasi birokrasi berbasis inovasi,	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DISKOMINFO

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026

10. Penyelenggaran Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan bersama antar instansi pemerintah. Kebijakan ini menjadi landasan dalam meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah menyusun, mengelola, dan berbagi data secara terstandar, akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah melalui berbagai regulasi dan kelembagaan yang mendukung pengelolaan data pembangunan daerah. Implementasi kebijakan tersebut antara lain diatur melalui Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2024. Selain itu, telah ditetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 050/345 Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah serta Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 470/392 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Dalam rangka memperkuat pengelolaan data dan statistik sektoral, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 500.12/21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengumpul Data dan Statistik Daerah. Melalui kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan data pembangunan daerah dapat terlaksana secara terintegrasi, terstandar, dan berkelanjutan guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat dan berbasis data.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sukoharjo memberikan manfaat penting dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan yang berbasis data. Perencanaan pembangunan yang efektif memerlukan dukungan data yang akurat, valid, dan terintegrasi sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran.

Pemanfaatan kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sukoharjo tercermin melalui pengelolaan dan penyediaan data pembangunan daerah yang dapat diakses melalui portal Satu Data Kabupaten Sukoharjo pada laman https://satudata.sukoharjokab.go.id/ serta portal data terbuka daerah pada laman https://data.sukoharjokab.go.id/. Kedua portal tersebut menyediakan berbagai data sektoral yang dikelola oleh Perangkat Daerah sebagai produsen data.

Dengan tersedianya data yang terintegrasi dan mudah diakses, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta menetapkan prioritas pembangunan secara lebih efektif dan efisien.

11. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintahan Daerah

Pengendalian pemerintahan daerah merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui sistem pengendalian yang efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja organisasi, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sukoharjo didukung oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). APIP berperan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700.152 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka memperkuat implementasi SPIP, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggara SPIP Terintegrasi melalui Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700.146 Tahun 2025 serta Tim Penyelenggara SPIP Terintegrasi melalui Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700.170 Tahun 2025. Pembentukan kelembagaan tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengendalian intern pemerintah berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selain itu, untuk mendukung penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan selaras dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RKPD dilakukan melalui proses sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran guna memastikan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam penyusunannya, RKPD menerapkan pendekatan *money follows program*, yaitu pengalokasian sumber pendanaan yang difokuskan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi antara perangkat daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta peningkatan pengendalian program melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Perumusan program dan kegiatan merupakan tahapan teknokratis untuk menerjemahkan sasaran pembangunan daerah ke dalam rencana program dan kegiatan yang terukur, di mana indikasi rencana program tersebut disusun untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Rencana kerja dan pendanaan daerah dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi utama, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, guna menjamin terciptanya sinkronisasi serta integritas data antara dokumen perencanaan strategis dengan penganggaran tahunan yang akuntabel di lingkup Bapperida Kabupaten Sukoharjo.

Sejalan dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 oleh Pemerintah Pusat, maka RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan dan menyelaraskan program serta kegiatan pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2027.

5.1.1. Dukungan Program Daerah RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional

5.1.1.1. Dukungan Program Daerah RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 terhadap Arah Kebijakan RKP 2027

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah beserta dukungan pendanaannya. Dukungan tersebut juga diarahkan untuk mendukung tema RKP Tahun 2027, yaitu **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"**.

Selanjutnya, dukungan program dan pendanaan dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2027 sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 Terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2027

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2026	Jumlah Program yang Mendukung	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	13	18.841.392.800	Badan Kesbangpol, Diskominfo, Dinas Sosial. Dinas PPKB dan P3A
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	28	69.527.926.806	Badan Kesbangpol, Diskominfo, Dinas Pertanian, DPUPR, DLH, Diskopumdag, Dispernaker
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim dan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	8	460.996.456.440	Dishub, DPUPR, Diskominfo, Diskopumdag, BPKPAD, Disporapar
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	18	243.368.105.624	Dinas P dan K, Bapperida, Dispusip, Dinkes, Dinas PPKB dan P3A, Badan Kesbangpol, Dinsos, Disporapar
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	16	161.748.441.376	Diskopumdag, Dispernaker, DPUPR, Dispernaker, Diskominfo, Dishub, Dinas PM dan PTSP
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	11	24.422.377.000	DLH, DPMD, Disdukcapil, Dinsos
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	17	381.461.475.682	Badan Kesbangpol, Inspektorat Daerah, SETDA, BKPSDM, Diskominfo, Dispusip, Dinas PM dan PTSP, BPKPAD, Diskopumdag, Satpol PP
8	Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	13	42.455.725.000	Badan Kesbangpol, Dinas P dan K, DLH, BPBD, Satpol PP, Dinsos
JUMLAH			**1.402.821.900.728**	

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Tabel 5. 2 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Terhadap PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
1	**Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia**							
	Program Pembangunan 1.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	84	%	1.880.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
	Kegiatan Pembangunan 1.1. 1. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 2. Aktualisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan							
	Program Pembangunan 1.2. Penguatan Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan peningkatan peran Parpol dan Lembaga Pendidikan melalui Diklat Politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik	86	%	1.800.000.000		
	Kegiatan Pembangunan 1.2. 1. Penguatan Kebebasan dan Kesetaraan Masyarakat 2. Penguatan Lembaga Demokrasi							
	Program Pembangunan 1.3 Pemantapan Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	92	Nilai	1.300.000.000	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
	Kegiatan Pembangunan 1.3 1. Penguatan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik 2. Pembangunan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat Industri							
	Program Pembangunan 1.4 Kepemimpinan Nasional yang Berdasarkan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	77	%	1.330.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
	Kegiatan Pembangunan 1.4 1. Peningkatan Kualitas kader pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah 2. Peningkatan Semangat Persatuan, Kesatuan dan Kebagsaan pada Generasi Muda	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	88	%	750.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	82	%	3.065.000.000		
	Program Pembangunan 1.5 Transformasi Akses terhadap Keadilan dan Pengarustamaan HAM	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Penanganan Sosial	100	%	392.000.000	Sosial	Dinas Sosial
	Kegiatan Pembangunan 1.51. Transformasi Pengarustamaan HAM 2. Transformasi Layanan Akses Terhadap Keadilan yang Subtansial Terutama dan Tidak Terbatas bagi kelompok rentan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	100	%	6.500.000		
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PPKS Lainnya diluar HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	310.000.000		
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	%	7.454.000.000		
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender	4,95	%	347.786.400	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPKB dan P3A
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63,65	Indeks	89.062.000		
		Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk anak)	27,95	Rasio	117.044.400		
JUMLAH						**18.841.392.800**		

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

2. *Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru*

Tabel 5. 3 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Terhadap PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
2	**Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru**							
	Program Pembangunan 2.1 Penguatan Pertahanan Negara							
	Kegiatan Pembangunan 2.1 1. Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan Optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI 2. Memperkuat komponen cadangan 3. Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara 4. Memperkuat kapabilitas Badan Pertahanan Siber 5. Melanjutkan proggram penguatan postur pertahanan dengan konsep Optimum Essential Force dalam rangka meningkatkan Efektivitas menjaga kedaulatan NKRI 6. Meningkatkan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar 7. Memperkuat Instrumen Pertahanan dalam Rangka Sinergi Antarinstrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 8. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 9. Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Strategis							
	Program Pembangunan 2.2. Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan							
	Kegiatan Pembangunan 2.2 1. Mempercepat Peningkatan Kemampuan Industri Strategis Nasional dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri 2. Meningkatkan Komitmen untuk Menggunakan Produk-Produk Industri Strategis Nasional dan Mendayagunakan Sebesar Mungkin Kapasitas Industri Strategis Dalam Negeri 3. Pembentukan Ekosistem Industri Pertahanan							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	4. Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend To Invest 5. Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan Alpalhankam							
	Program Pembangunan 2.3. Penguatan Sistem Keamanan Negara							
	Kegiatan Pembangunan 2.3. 1. Melakukan Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, serta Paham Kebhinekaan di Daerah-Daerah yang Rawan Konflik serta Rentan Isu Separatisme 2. Meningkatkan Sistem Deteksi Dini untuk Memperkuat Sistem Keamanan Negara 3. Memperkuat Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi Seluruh Rakyat Indonesia 4. Memperkuat Instrumen Keamanan dalam Rangka Sinergi Antarinstrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 5. Penguatan Sistem Keamanan Negara di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar 6. Pencegahan, Penanganan, dan Deradikalisasi Terorisme							
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	82	%	3.065.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
	Program Pembangunan 2.4. Profesionalisme Pelayanan Kepolisian							
	Kegiatan Pembangunan 2.4. 1. Memperkuat Polisi dalam Rangka Sinergi antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme 2. Peningkatan Jumlah dan Proporsi Polwan 3. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 4. Penguatan Kapabilitas Polri dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum, Pemeliharaan Keamanan, dan Penanganan Kriminalitas 5. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personil Polri							
	Program Pembangunan 2.5. Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi							
	Kegiatan Pembangunan 2.5 1. Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI 2. Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut 3. Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, Alki, dan Choke Point 5. Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personil Lembaga Keamanan Laut 6. Pemetaan Batimetri dan Alur Laut							
	Program Pembangunan 2.6 Keamanan Siber, sandi, dan sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	550	Nilai	617.528.167	Persandian	Diskominfo
	Program Pembangunan 2.7 Diplomasi Ekonomi							
	Kegiatan Pembangunan 2.7 1. Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional 2. Diplomasi Ekonomi yang Adaptif 3. Diplomasi Ekonomi Strategis dengan Mitra Utama 4. Diplomasi Ekonomi dengan Negara Tetangga Perbatasan, Regional, dan Subregional 5. Proses Aksesi Indonesia ke OECD							
	Program Pembangunan 2.8 Hubungan Internasional yang Kondusif							
	Kegiatan Pembangunan 2.8 1. Intensifikasi Penyelesaian Batas Maritim dan Batas Darat serta Penguatan Diplomasi Kedaulatan 2. Penguatan Supremasi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Fora dan Organisasi Internasional 3. Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Mendorong Perdamaian Dunia 4. lntensifikasi Diplomasi Publik dan Budaya, serta Memperjuangkan Warisan Budaya Nasional menjadi Warisan Budaya Dunia 5. lntensifikasi Diplomasi Publik dan Budaya, Serta Memperjuangkan Warisan Budaya Nasional menjadi Warisan Budaya Dunia							
	Program Pembangunan 2.9 Swasembada Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	14650	Ton	730.000.000	Pertanian	Dinas Pertanian
	Kegiatan Pembangunan 2.9 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah 2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Sumatera Selatan							
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	26	Kg/Kapita/Tahun	200.000.000		
			Peningkatan Produksi Padi	2500	Ton	1.990.000.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Nusa Tenggara Timur 4. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan(KSPP) Papua 5. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan 6. Pengembangan Lumbung Pangan Nasional 7. Penguatan Cadangan Pangan 8. Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) 9. Pengembangan Pangan Hewani 10. Pengembangan Pangan Nabati 11. Penganekaragaman Konsumsi Pangan 12. Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan 13. Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan 14. Penguatan Pangan Lokal 15. Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi 16. Penguatan Satu Data Pangan 17. Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan 18. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 19. One Health 20. Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis / Unggulan 21. Pengembangan Korporasi Petani, Nelayan, Pembudi Daya lkan, Petambak Garam (KPN) 22. Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian yang Adaptif dan Inklusif 23. Penguatan Regenerasi Petani 24. Pendayagunaan Praktik Pertanian Berkelanjutan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Jagung	300	Ton			
			Peningkatan Produksi Cabe	60	Ku			
			Peningkatan Produksi Bawang Merah	25	Ku			
			Peningkatan Produksi Daging	200	Ton			
			Peningkatan Produksi Telur	30	Ton			
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Luas Tanam	410	Ha	11.700.000.000		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	37,5		465.000.000		
			Jumlah Populasi Ternak (Animal Unit)	21.472	ekor			
			Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	50	%			
		Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase SDM Petani yang ditingkatkan	3,5	%	1.125.000.000		
			Persentase Peningkatan Kelembagaan Petani Dan Kenaikan Kelas Kelompok	2	%			
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Rentan/Rawan Pangan	4,2	%	550.965.000		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	92	%	90.432.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	26	Kg/Kapita/Tahun	200.000.000		
	Program Pembangunan 2. 10 Swasembada Energi							
	Kegiatan Pembangunan 2.10 1. Peningkatan Penyediaan Energi 2. Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi 3. Penguatan Implementasi Transisi Energi							
	Program Pembangunan 2.11 Swasembada Air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	15,86	%	3.386.831.000	Pekerjaan dan Penataan Ruang	DPUPR
	Kegiatan Pembangunan 2.11 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Air 2. Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan 3. Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air 4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan							
	Program Pembangunan 2.12 Pemenuhan Akses Air Minum Aman							
	Kegiatan Pembangunan 2.12 1. Pengembangan Spam Terintegrasi Hulu ke Hilir2. Pengamanan dan Pengawasan Kualitas Air Minum3. Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan SPAM4. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pemenuhan Air Minum							
	Program Pembangunan 2.13 Percepatan Pemenuhan Akses Sanitasi Aman untuk Masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	%	910.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
	Kegiatan Pembangunan 2.13 1. Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim 2. Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Sanitasi yang Berorientasi pada Keberlanjutan dan Ketahanan Iklim 3. Pengembangan Ekosistem Berbasis Inovasi Penyelenggaraan Sanitasi 4. Penguatan Peran Masyarakat dalam Penyediaan dan Penyelenggaraan Sanitasi yang Aman							
	Program Pembangunan 2.14 Ekonomi Syariah	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Ekspor	16,05	%	525.000.000	Perdagangan	Diskopumdag
	Kegiatan Pembangunan 2.14 1. lndustri Halal 2. Ekspor Halal dan Kerja Sama Ekonomi Syariah Internasional 3. Ekosistem UMKM Halal 4. Keuangan Syariah 5. Dana Sosial Syariah							
	Program Pembangunan 2.15 Ekonomi Digital			65	%	4.000.000.000		Diskominfo

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.15 1. Penguatan Ekosistem Infrastruktur Ekonomi Digital 2. Penguatan Ekosistem Industri Digital Lingkup Ekonomi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				Komunikasi dan Informatika	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang ditingkatkan kualitasnya	88,46	%	8.855.000.000	Perdagangan	Diskopumdag
	Program Pembangunan 2.16 Ekonomi Sirkular Industri Kegiatan Pembangunan 2.16 1. Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Perpanjangan Daya Guna 2. Pengembangan Produk Ramah Lingkungan 3. Penguatan Ekosistem Daur Ulang	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH	60	%	56.300.000		DLH
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1,55	%	940.032.000	Pekerjaan dan Penataan Ruang	DPUPR
	Prioritas Pembangunan 2.17 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik Kegiatan Pembangunan 2.17 1. Penguatan Pengelolaan Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi2. Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi3. Pengurangan Status Keterancaman Spesies dan Ekosistem4. Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati5. Peningkatan Pemanfaatan Jasa Ekosistem secara Berkelanjutan6.Pengembangan Bioprospeksi Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik7. Pengelolaan Bioteknologi dan Keamanan Hayati (Biosafety)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Luas Wilayah Perkotaan	38,012	%	3.301.850.000		DLH
	Prioritas Pembangunan 2.18 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kegiatan Pembangunan 2.18 1. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air di Sungai dan Danau 2. Peningkatan Pengelolaan Kualitas Udara di Kab/Kota di Indonesia 3. Peningkatan Pengelolaan Kualitas dan Kesehatan Air Laut 4. Peningkatan Kualitas Laban 5. Penurunan Laju Deforestasi 6. Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut 7. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 8. Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai Potensi Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Mitigasi Perubahan Iklim	27.500	Tonco2eq	1.037.500.000	Lingkungan Hidup	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Yang Diberikan	50	%	19.800.000		
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan	50	%	67.500.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	9. Pengendalian dan Penertiban Penyelesaian Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemanfaatan Ruang 10. Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kelembagaan dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan di Pusat dan Daerah serta Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang 11. Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Penguatan Instrumen Pencegahan dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		pengelolaan lingkungan hidup					
	Program Pembangunan 2.19 Penerapan Ekonomi Sirkular dari Sumber Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara Partisipatif (Hulu)	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	73,5	%	23.458.970.000	Lingkungan Hidup	DLH
	Kegiatan Pembangunan 2.19 1. Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Sumber serta Pengumpulan dan Pengangkutan Terpilah Terjadwal 2. Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah							
	Program Pembangunan 2.20 Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Hilir)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai Potensi Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Mitigasi Perubahan Iklim	27500	Tonco2eq	1.037.500.000		
	Program Pembangunan 2.21 Pembangunan Rendah Karbon							
	Kegiatan Pembangunan 2.21 1. Penurunan Emisi GRK Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan 3. Pencegahan Pengurangan dan Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan 4. Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon 5. Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru 6. Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri 7. Penguatan Aksi Penurunan Emisi GRK di Sektor Pengelolaan Limbah 8. Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan	60	%	46.850.000		
	Program Pembangunan 2.22 Tenaga Kerja Hijau	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,45	%	607.808.639	Tenaga Kerja	Dispernaker

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 2.22 1. Pengembangan Ekosistem Tenaga Kerja Hijau 2. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau 3. Penguatan Peran Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau dan Tenaga Kerja Hijau	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	83	%	295.260.000		
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	46,93	%	247.800.000		
	Program Pembangunan 2.23 Pengelolaan Hutan Lestari							
	Kegiatan Pembangunan 2.23 1. Peningkatan Produktivitas Hutan 2. Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan Melalui Agroforestri 3. Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari 4. Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari 5. Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan							
	Program Pembangunan 2.24 Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru							
	Kegiatan Pembangunan 2.241. Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru2. Peningkatan Pengelolaan Ekosistem, Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir3. Pengembangan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam Perikanan dan Kelautan yang Modern, Terintegrasi, dan Berkelanjutan4. Penguatan Industri Manufaktur Perkapalan dan Bahan Baku Perkapalan5. Penguatan Sistem Logistik, Transportasi, dan Perdagangan Jalur Perairan6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau serta Pemanfaatan Jasa Kelautan Berkelanjutan7. Peningkatan Kapasitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi Biru serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Maritim							
JUMLAH						**69.527.926.806**		

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

3. *Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi*

Tabel 5. 4 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Terhadap PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	**Prioritas Nasional: 03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**							
	Program Pembangunan 3.1 Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum	100,00	%	41.091.000.000	Perhubungan	Dishub
			Persentase Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	7,47	%			
			V/C Rasio Di Jalan Kabupaten/Kota	0,639	Angka			
	Kegiatan Pembangunan 3.1. 1. Penguatan Konektivitas Jalan 2. Penguatan Konektivitas Kereta Api 3. Penguatan Konektivitas Laut 4. Penguatan Konektivitas Udara 5. Penguatan Konektivitas Darat 6. Pengembangan Transportasi Perkotaan 7. Peningkatan Sumber Daya Manusia Transportasi	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	88,45	%	64.923.833.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
	Program Pembangunan 3.2. Penguatan Konektivitas dan Transisi Energi Listrik							
	Kegiatan Pembangunan 3.2 1. Dekarbonisasi dan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Termasuk Terbarukan 2. Peningkatan Konektivitas dan Digitalisasi Tenaga Listrik 3. Peningkatan Pemanfaatan Tenaga Listrik 4. Pengembangan Ekosistem Pendorong Transisi Energi Listrik							
	Program Pembangunan 3.3. Penguatan Konektivitas dan Ekosistem Digital	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65	%	4.000.000.000	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 3.3. 1. Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran 2. Pengelolaan Sumber Daya TIK 3. Peningkatan Kondusivitas Ruang Digital							
	Program Pembangunan 3.4. Pengembangan Pengairan dan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	57	%	8.851.169.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
	Kegiatan Pembangunan 3.4 1. Pengembangan Irigasi 2. Pembangunan Bendungan							
	Program Pembangunan 3.5Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	21	%	1.119.022.430	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Diskopumdag
	Kegiatan Pembangunan 3.5 1. Pengembangan Koperasi Sektor Produksi 2. Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif 3. Pengembangan Kewirausahaan	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	0	%	0		
	Program Pembangunan 3.6 Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	%	340.500.000.000	Keuangan	BPKPAD
	Kegiatan Pembangunan 3.6 1. Penguatan Peran Perbankan 2. Penguatan Peran Sektor Keuangan Nonbank 3. Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan		Persentase Dokumen Penganggaran Yang Tepat Waktu	100	%			
	Program Pembangunan 3.7 Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	7,7	%	511.432.010	Pariwisata	Disporapar
	Kegiatan Pembangunan 3.7 1. Penguatan Destinasi Regeneratif Bali 2. Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau 3. Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta 4. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena 5. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	6. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung 7. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba							
	8. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta• Prambanan 9. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat 10. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo 11. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi 12. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru 13. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai							
	Program Pembangunan 3.8Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan lntelektual							
	Kegiatan Pembangunan 3.8 1. Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif 2. Penguatan Ekosistem Film, Animasi, dan Video 3. Penguatan Ekosistem Fesyen dan Kriya 4. Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim 5. Penguatan Ekosistem Kuliner							
JUMLAH						**460.996.456.440**		

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

4. *Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas*

Tabel 5. 5 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Terhadap PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
4	**PRIORITAS NASIONAL: 04-MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS**							
	Program Pembangunan 4.1 Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ Sederajat	100,00	%	143.945.168.364	Pendidikan	Dinas P dan K
	Kegiatan Pembangunan 4.1 1. Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Penyaluran Bantuan Pendidikan 4. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah 5. Revitalisasi Pendidikan Nonformal 6. Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren yang Berkualitas dan Pendidikan Keagamaan Lainnya 7. Pembangunan Sekolah Unggul Terintegrasi 8. Makan Bergizi di Sekolah dan Pesantren		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ Sederajat	100	%			
			Iklim Inklusivitas (SD)	67,91	Indeks			
			Iklim Inklusivitas (SMP)	60,63	Indeks			
			Iklim Keamanan (SD)	76,56	Indeks			
			Iklim Keamanan (SMP)	73,62	Indeks			
			Iklim Kebinekaan (SD)	75,04	Indeks			
	Program Pembangunan 4.2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		Iklim Kebinekaan (SMP)	74,26	Indeks			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	94,4	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 4.2 1. Penerapan Kurikulum yang Berfokus pada Kompetensi Esensial, Adaptif, dan Kontekstual 2. Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK) 3. Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif 4. Penciptaan Ekosistem Satuan Pendidikan yang Mendukung Penguatan Karakter dan Wellbeing Peserta Didik dan Pendidik 5.Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 6.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-lntegratif (PAUD-HI)							
	Program Pembangunan 4.3 Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas							
	Kegiatan Pembangunan 4.3 1. Reformasi LPTK dan Penguatan PPG 2. Restrukturisasi Kewenangan Pengangkatan dan Distribusi Guru 3. Peningkatan Kompentesi Guru dan Tenaga Kependidikan							
	Program Pembangunan 4.4 Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan							
	Kegiatan Pembangunan 4.4 1. Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan 2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan 3. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu							
	Program Pembangunan 4.7 Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	Program penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	50	%	380.500.000	Penelitian dan Pengembangan	BAPPERIDA

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Program Pembangunan 4.9 Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Peustakaan	1,93	%	622.900.000	Perpustakaan	Dispusip
	Kegiatan Pembangunan 4.9 1. Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan 2. Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca							
	Program Pembangunan 4.10 Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil risiko tinggi tertangani	100	%	76.874.398.000	Kesehatan	DINKES
			Persentase neonatal risiko tinggi tertangani	100	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.10 1. Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2. Pencegahan dan Penurunan Stunting Dan Bantuan Pangan Bergizi bagi Ibu Hamil dan Balita 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro		Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	5,15	%			
	Program Pembangunan 4.11 Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	39,34	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.11 1. Penuntasan TBC 2. Pengendalian Penyakit Menular Lainnya 3. Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta dan Schistosomiasis) 4. Eliminasi Penyakit Tropis Terabaikan Lainnya 5. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa 6. Pembudayaan Hidup Sehat, Penyehatan Lingkungan dan Olahraga		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (RIBK)	81,7	%			
	Program Pembangunan 4.12 Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan		Persentase kecamatan dengan proporsi non-hipertensi minimal 75%	66	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.12 1. Penguatan Surveilans, Laboratorium, Pos Pintu Masuk Negara, Pengendalian KLB / wabah dan Penanganan Bencana		Persentase kecamatan dengan proporsi non-Diabetes Mellitus minimal 85%	66	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	2. Pemenuhan dan Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 3. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (RIBK)	40	%			
	Program Pembangunan 4.13 Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola		Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK)	23,4	%			
	Kegiatan Pembangunan 4.13 1. Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 2. Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 3. Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 4. Penguatan JKN dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 5. Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Data, Informasi dan Inovasi Teknologi Kesehatan		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)	8,2	%			
			Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90	%			
			Persentase lanjut usia mandiri (RIBK)	83,5	%			
			Angka Keberhasilan dan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate) (RIBK,IUP)	89	%			
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) (RIBK, IUP)	91	%			
			Persentase ODHIV on ARV tersupresi viral load	30	%			
			Positive Rate Malaria	5	%			
			Persentase kecamatan memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	33,33	%			
			Persentase Puskemas melaksanakan kegiatan surveilans	100	%			
			Persentase Capaian SPM RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	84	%			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (RIBK)	4,56	%	219.753.860		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta	93	%	51.138.000		

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
			pangan yang berijin sesuai ketentuan					
	Program Pembangunan 4.15 Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63,65	Indeks	89.062.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPKB dan P3A
	Kegiatan Pembangunan 4.15 1. Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak 2. Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya							
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Proporsi Keluarga Yang Mendapatkan Layanan Dari Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Sesuai Kebutuhan.	55	%	338.474.000		
		Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19 Tahun)	4,48	Angka	34.269.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Program Pembangunan 4.16 Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	22,76	%	4.683.500.000	Kepemudaan dan Olahraga	Disporapar
	Kegiatan Pembangunan 4.16 1. Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, dan Pencegahan Perilaku Berisiko 2. Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaan 3. Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	21,28				
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	86	%	1.800.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
	Program Pembangunan 4.17Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender	4,95	%	347.786.400	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPKB dan P3A
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	13,55	%	228.124.000		
	Program Pembangunan 4.18 Peningkatan Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	%	7.454.000.000	Sosial	DINSOS
	Kegiatan Pembangunan 4.18 1. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	2. Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Proses Pembangunan							
	Program Pembangunan 4.19 Peningkatan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Pelatih Bersertifikasi	106	Orang	4.865.000.000	Kepemudaan dan Olahraga	Disporapar
	Kegiatan Pembangunan 4.19 1. Pengembangan Budaya Olahraga 2. Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul 3. Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Berstandar Intemasional 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Intemasional yang Ramah Disabilitas 5. Peningkatan Partisipasi dan Penyelenggaraan Event/ Festival/Kompetisi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Prestasi Kepramukaan Tingkat Internasional, Nasional Dan Provinsi Yang Diraih	10	Medali	1.434.032.000	Kepemudaan dan Olahraga	
	TOTAL					**243.368.105.624**		

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

5. *Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri*

Tabel 5. 6 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Terhadap PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	**PRIORITAS NASIONAL: 05-MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI**							
	Program Pembangunan 5.1 Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang ditingkatkan kualitasnya	88,46	%	8.855.000.000	Perdagangan	Diskopumdag
	Kegiatan Pembangunan 5.1. 1. Hilirisasi Industri Berbasis Mineral Penting (Nikel, Tembaga, Bauksit) 2. Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Hayati (Sawit, Kelapa, Rumput Laut) 3. Pengembangan Industri Medium-High Technology (Alat Angkut, Elektronik dan Digital, Kimia dan Farmasi) 4. Penguatan Produktivitas Industri Padat Karya Terampil (Makanan Minuman, TPT, dan Alas Kaki) 5. Penguatan Industri Dasar (Kimia Dasar dan Logam Dasar)							
	Program Pembangunan 5.2. Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	46,93	%	247.800.000	Perindustrian	Dispernaker
	Kegiatan Pembangunan 5.2 1. Perencanaan, Perizinan dan Tata Ruang KI/KEK Prioritas 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam dan Luar KI/KEK Prioritas 3. Penyiapan Sumber Daya Manusia untuk KI/KEK Prioritas 4. Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok untuk KI/KEK Prioritas	Program penataan bangunan gedung	Rasio bangunan ber PBG dan SLF	28,11	%	35.000.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan	100	%	500.000.000		
	Program Pembangunan 5.3. Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,45	%	607.808.639	Tenaga Kerja	Dispernaker

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	83	%	295.260.000		
	Kegiatan Pembangunan 5.3. 1. Penguatan Layanan Konektivitas Backbone Integrasi Ekonomi 2. Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Sarana Penunjang Logistik 3. Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik 4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	92	Nilai	1.300.000.000	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	88,45	%	64.923.833.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum	100	%	41.091.000.000	Perhubungan	Dishub
			Persentase Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	7,47	%			
			V/C Rasio Di Jalan Kabupaten/Kota	0,639	Angka			
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	-	Angka			
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase saluran drainase kondisi baik	8,94	%	7.474.257.737	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
	Program Pembangunan 5.4. Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	100	%	297.407.000	Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	4,4	%	85.000.000		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	82	%	116.975.000		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	94	%	109.100.000		
	Program Pembangunan 5.5 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Ekspor	16,05	%	525.000.000	Perdagangan	Diskopumdag
	Kegiatan Pembangunan 5.5 1. Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global 2. Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi 3. Peningkatan Ekspor Produk Industri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	96	%	320.000.000	Perindustrian	Dispernaker

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	4. Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA 5. Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif 6. Peningkatan Ekspor Produk UMKM dan Integrasi UMKM dalam Rantai Nilai Global 7. Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif Termasuk Electric Vehicle (EV) 8. Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global 9. Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha, dan Perlindungan Konsumen							
JUMLAH						**161.748.441.376**		

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

6. *Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan*

Tabel 5. 7 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Terhadap PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
6	**PRIORITAS NASIONAL: 06-MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN**							
	Program Pembangunan 6.1 Pembangunan Wilayah Metropolitan							
	Kegiatan Pembangunan 6.1. 1. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Medan 2. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang 3. Pemantapan Wilayah Metropolitan Jakarta 4. Pemantapan Wilayah Metropolitan Bandung 5. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang 6. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya 7. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar 8. Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin 9. Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar 10. Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado							
	Program Pembangunan 6.2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara							
	Kegiatan Pembangunan 6.2 1. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara 2. Pembangunan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara 3. Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia Ibu Kota Nusantara 4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara 5. Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara 6. Pemindahan dan Penyelenggaraan Pusat							

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
	Pemerintahan Ibu Kota Nusantara 7. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara							
	Program Pembangunan 6.3. Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Pembangunan 6.3. 1. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU 2. Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu 3. Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan 4. Penguatan Ekosistem Perumahan 5. Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 ha Yang Ditangani	100	%	740.719.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
	Program Pembangunan 6.4. Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang meningkat status desanya	14,61	%	263.752.000	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DPMD
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	%	2.792.985.000		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	25,65	%	10.794.421.000		
	Program Pembangunan 6.5 Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	20	%	1.120.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	91	%			
			Persentae Perekaman KTP-el	99,42	%			
	Kegiatan Pembangunan 6.5 1. Pengembangan Tata Kelola Registrasi Sosial Ekonomi 2. Penguatan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi 3. Sinkronisasi Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati dengan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	98,88	%	289.000.000		
			Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	%			
			Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	%			
			Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	%			
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	100	% %	259.000.000		
			Persentase Ketersediaan Sistem Informasi dan Data	100	%			

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran		Perangkat Daerah
			Kependudukan yang Terintegrasi dan bisa diakses					
	Program Pembangunan 6.6 Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Kegiatan Pembangunan 6.6 1. Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara Inklusif 2. Penguatan Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Penanganan Sosial	100	%	392.000.000	Sosial	DINSOS
	Program Pembangunan 6.7 Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif Kegiatan Pembangunan 6. 1. Pengembangan dan Sinkronisasi Pendanaan yang Berbasis Risiko 2. Penerapan Graduasi Bantuan Sosial dan Penguatan Kemandirian Masyarakat melalui Kartu Usaha 3. Penyaluran Bantuan Sosial yang Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan 4. Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria 5. Penguatan Pendamping Pembangunan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	100	%	6.500.000		
	Program Pembangunan 6.8 Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Kegiatan Pembangunan 6.81. Penyediaan Layanan Pengasuhan bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Rentan Lain2. Pengembangan PendanaanPerawatan/ Pengasuhan3. Penguatan Kapasitas Perawatan Masyarakat	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	%	7.454.000.000		
	Program Pembangunan 6.9 Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Kelompok Rentan Kegiatan Pembangunan 6.9 1. Penjangkauan Pendataan Kelompok Rentan 2. Akses yang Setara terhadap Perekonomian, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi Sosial untuk Kelompok Rentan	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PPKS Lainnya diluar HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	310.000.000		
JUMLAH						**24.422.377.000**		

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

7. *Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*

Tabel 5. 8 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Terhadap PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

No	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
3	**PRIORITAS NASIONAL: 07-MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN**						
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase pendidikan politik pada kader partai politik	86	%	1.800.000.000	Kesatuan bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	77	%	1.330.000.000		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	100	%	2.152.190.000	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Persentase Sakip Perangkat Daerah Kategori Minimal BB	31	%			
		Persentase Wajib Lapor LHKPN Yang Melapor	100	%			
		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	3	Indeks			
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	%	40.656.000.000	Setda	SETDA
		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	%			
		Nilai EPPD (bagian pemerintahan)	3,3835	Nilai/Angka			
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	99,7	%	2.456.450.000	Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	99,3	%			
		Persentase OPD Yang Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP	100	%			
		Persentase PDTT Yang Selesai Ditangani	100	%			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	84	%	1.880.000.000	Kesatuan bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	27,52	4.668.000.000	Kepegawaian	BKPSDM
		IP ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan	Nilai	20,525			
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65	%	4.000.000.000	Komunikasi	Diskominfo
	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 Dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	79	%	107.300.000	Kearsipan	Dispusip
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	94	%	109.100.000	Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,85	%	10.500.000.000	Keuangan	BPKPAD
		Persentase Peningkatan Target PAD	3,25	%			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	%	340.500.000.000		
		Persentase Dokumen Penganggaran Yang Tepat Waktu	100	%			

No	Program Daerah Dalam RPD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah dalam hal penyerapan anggarannya berdasarkan angaran kas yang telah ditetapkan	100	%			
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	92	%	1.962.835.682	Setda	SETDA
		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	95,8	%			
		Tingkat Kematangan UKPBJ	3	Angka			
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Pengendalian Harga	100	%	300.000.000	Perdagangan	Diskopumdag
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	82,2	%	110.600.000		
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	98,7	%	6.520.000.000	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	97,8	%			
		Persentase linmas yang terlatih dan dikukuhkan	64	%			
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	%			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	82	%	3.065.000.000	Kesatuan bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
JUMLAH					**381.461.475.682**		

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

8. *Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur*

Tabel 5. 9 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Terhadap PN 8: Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
8	**PRIORITAS NASIONAL: 08-MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR**							
	Program Pembangunan 8.1 Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	88	%	750.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
	Kegiatan Pembangunan 8.1. 1. Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan 2. Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis 3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan 5. Transformasi Layanan Kua yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif 6. Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman 7. Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 8. Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	77	%	1.330.000.000		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	82	%	3.065.000.000		
	Program Pembangunan 8.2. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa Kegiatan Pembangunan 8.2 1. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Berdasarkan Pancasila	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	65	%	1.550.000.000	Kebudayaan	Dinas P dan K

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	2. Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya 3. Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan 4. Jaminan Hak Berkebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 5. Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia 6. Pengembangan Budaya Bahari dan Revitalisasi Jalur Rempah 7. Transformasi Layanan Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	84	%	1.880.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol
	Program Pembangunan 8.3. Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai Potensi Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Mitigasi Perubahan Iklim	27.500	Tonco2 eq	1.037.500.000	Lingkungan Hidup	DLH
	Kegiatan Pembangunan 8.3. 1. Peningkatan Ketahanan Pesisir dan Laut 2. Pembangunan dan Konservasi Sumber Daya Air 3. Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim 4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sensitif Iklim 5. Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Luas Wilayah Perkotaan	38,012	%	3.301.850.000		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH	60	%	56.300.000		
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Yang Diberikan	50	%	19.800.000		
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	73,5	%	23.458.970.000		
	Program Pembangunan 8.4. Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Capaian Penanggulanngan Bencana	0,69	Nilai	4.048.305.000	Ketentraman dan Ketertiban Umum	BPBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran	70	%	1.798.000.000		Satpol PP

No	Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program Daerah Dalam RPJMD/ RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	Bidang	Perangkat Daerah
	Kegiatan Pembangunan 8.4 1.Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi 2. Peningkatan Layanan Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana 3. Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana 4. Peningkatan Resiliensi Masyarakat terhadap Bencana 5. Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	160.000.000	Sosial	DINSOS
			JUMLAH			**42.455.725.000**		

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah telah mendukung pencapaian Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Dukungan tersebut tercermin melalui keterkaitan antara program daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional yang menjadi fokus pembangunan pada tahun berjalan.

Selanjutnya, rekapitulasi dukungan program dan kegiatan daerah terhadap Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2027 sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 10 Dukungan Program Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2026 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2027

No	Jumlah Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2027			Dukungan Program Daerah RPJMD/ RKPD Tahun 2027			
				RPJMD 2025–2029		RKPD Tahun 2027	
	Prioritas Nasional	Program Pembangunan	Kegiatan Prioritas	Program Daerah	Persentase	Program Daerah	Persentase
1	PN 1	5	10	15	100%	13	100%
2	PN 2	24	143	32	100%	28	100%
3	PN 3	8	36	9	100%	8	100%
4	PN 4	19	70	20	100%	18	100%
5	PN 5	5	23	17	100%	16	100%
6	PN 6	9	44	11	100%	11	100%
7	PN 7	14	36	18	100%	17	100%
8	PN 8	4	25	15	100%	13	100%

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

5.1.1.2. Dukungan Program Daerah RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 terhadap Arah Kebijakan RKP 2027

Kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Unsur tersebut meliputi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, lembaga nonpemerintah, akademisi, media massa, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa proses pembangunan dilaksanakan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial guna memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029, yang menitikberatkan pada penguatan fondasi perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi lokal, khususnya sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor pendukung lainnya, yang didukung oleh inovasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan nilai tambah produk. Selain itu, pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta

penguatan ketahanan pangan daerah, sehingga Kabupaten Sukoharjo dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan Provinsi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.

Tema RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 ditetapkan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029, yaitu **"Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Tema Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"** Tema tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memperkuat struktur perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata berkelanjuran dengan memperhatikan lingkungan dan juga ekonomi syariah dalam arti luas yang didukung oleh inovasi, peningkatan produktivitas, dan penguatan nilai tambah. Selain itu, tema pembangunan daerah Tahun 2027 juga diselaraskan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah serta tema RKP Nasional Tahun 2027 guna memastikan keterpaduan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Tabel 5. 11 Rekapitulasi Dan Penjabaran Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Pagu	PD Penanggungjawab
Program Pengembangan UMKM	128.387.945	Diskopumdag
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.119.022.430	Diskopumdag
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	511.432.010	Disporapar
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	340.500.000.000	BPKPAD
Program Perekonomian dan Pembangunan	1.962.835.682	Setda
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.000.550.000	Dispertan dan Perikanan
Program Penyuluhan Pertanian	1.125.000.000	Dispertan dan Perikanan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.105.000.000	Dispertan dan Perikanan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	297.407.000	Dinas PM dan PTSP
Program Pengembangan Ekspor	525.000.000	Diskopumdag
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	300.000.000	Diskopumdag
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8.855.000.000	Diskopumdag
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	200.000.000	Dispertan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	20.000.000	Dispertan dan Perikanan
Program Penyelenggaraan Jalan	64.923.833.000	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	7.474.257.737	DPUPR
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	41.091.000.000	Dishub
Program Penataan Bangunan Gedung	35.000.000.000	DPUPR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	500.000.000	DPUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.093.216.000	DPUPR
Program Kawasan Permukiman	740.719.000	DPKP
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.405.059.000	DPKP
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.386.831.000	DPUPR
Program Pengelolaan Persampahan	23.458.970.000	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	940.032.000	DPUPR
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3.345.538.000	DPKP
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.386.831.000	DPUPR
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.300.000.000	Diskominfo
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.000.000.000	Diskominfo

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Pagu	PD Penanggungjawab
Program Penanggulangan Bencana	4.048.305.000	BPBD
Program Penanganan Bencana	160.000.000	Dinsos
Program Pengelolaan Pendidikan	143.945.168.364	Dinas P dan K
Program Pengembangan Kurikulum	498.347.500	Dinas P dan K
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76.874.398.000	Dinkes
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	219.754.000	Dinkes
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	559.223.000	Dinkes
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.793.585.000	Dinas PPKB dan P3A
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	347.786.400	Dinas PPKB dan P3A
Peningkatan Kualitas Keluarga	338.474.000	Dinas PPKB dan P3A
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.683.500.000	Disporapar
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.865.000.000	Disporapar
Program Pengembangan Perumahan	910.000.000	DPKP
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.800.720.000	Dinas Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	43.305.000	Dinas Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	550.965.000	Dinas Pangan
Program Pemberdayaan Sosial	392.000.000	Dinsos
Program Rehabilitasi Sosial	310.000.000	Dinsos
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.454.000.000	Dinsos
Program Pencatatan Sipil	289.000.000	Disdukcapil
Program Pendaftaran Penduduk	1.120.000.000	Disdukcapil
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	54.080.000	Dinas PMD
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	10.794.421.000	Dinas PMD
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.456.450.000	Inspektorat Daerah
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.152.190.000	Inspektorat Daerah
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.740.300.800	Sekretariat Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	428.340.000	Kecamatan
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.165.000.000	BAPPERIDA
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.880.000.000	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.800.000.000	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.330.000.000	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	750.000.000	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.065.000.000	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.520.000.000	Satpol PP
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	40.656.000.000	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Kebudayaan	1.550.000.000	Dinas P dan K
Program Pemasaran Pariwisata	257.521.059	Disporapar

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

Tabel 5. 12 Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo : Penguatan Fondasi Kewirausahaan, UMKM Berdaya Saing, dan Kelembagaan Ekonomi Berkelanjutan, termasuk ekonomi syariah

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Wirausaha	12	%	128.387.945	Diskopumdag
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	21	%	1.119.022.430	Diskopumdag
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	7,7	%	511.432.010	Disporapar
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	%	340.500.000.000	BPKPAD
	Persentase Dokumen Penganggaran Yang Tepat Waktu	100	%		
	Persentase Perangkat Daerah dalam hal penyerapan anggarannya berdasarkan angaran kas yang telah ditetapkan	100	%		
Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	92	%	1.962.835.682	Setda
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	95.8	%		
	Tingkat Kematangan UKPBJ	3	Angka		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Padi	2.500	Ton	1.990.000.000	Dispertan dan Perikanan
	Peningkatan Produksi Jagung	300	Ton		
	Peningkatan Produksi Cabe	60	Ku		
	Peningkatan Produksi Bawang Merah	25	Ku		
	Peningkatan Produksi Daging	200	Ton		
	Peningkatan Produksi Telur	30	Ton		
Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase SDM Petani yang ditingkatkan	3,5	%	1.125.000.000	Dispertan dan Perikanan
	Persentase Peningkatan Kelembagaan Petani Dan Kenaikan Kelas Kelompok	2	%		
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Gagal Panen	3	%	1.105.000.000	Dispertan dan Perikanan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100	%	297.407.000	Dinas PM dan PTSP
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Ekspor	16,05	%	525.000.000	Diskopumdag

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pengendalian Harga	100	%	300.000.000	Diskopumdag
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang ditingkatkan kualitasnya	88,46	%	8.855.000.000	Diskopumdag
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	26	Kg/Kapita/Tahun	200.000.000	Dispertan dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya Bersertifikat NIB	5	Kelompok	20.000.000	Dispertan dan Perikanan
Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Wirausaha	12	%	128.387.945	Diskopumdag

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

Tabel 5. 13 Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo : Penguatan Fondasi Infrastruktur dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	88.45	%	64.923.833.000	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	8.94	%	7.474.257.737	DPUPR
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum	100	%	41.091.000.000	Dishub
	Persentase Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	7,47	%		
	V/C Rasio Di Jalan Kabupaten/Kota	0,639	Angka		
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	-	Angka		
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber PBG dan SLF	28,11	%	35.000.000.000	DPUPR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan	100	%	500.000.000	DPUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat Perwujudan Rencana Tata Ruang	85.5	%	1.093.216.000	DPUPR
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang ditingkatkan kualitasnya	88,46	%	8.855.000.000	Diskopumdag
Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 ha Yang Ditangani	100	%	740,719,000	DPKP
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH Diluar Kawasan Kumuh Yang Sudah Tertangani	100	%	3,405,059,000	DPKP
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	15.86	%	3.386.831.000	DPUPR
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	73.5	%	23.458.970.000	DPUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1.55	%	940,032,000	DPUPR
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah	100	%	3,345,538,000	DPKP
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	15.86	%	3.386.831.000	DPUPR

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	92	Nilai	1.300.000.000	Diskominfo
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65	%	4.000.000.000	Diskominfo
Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Capaian Penanggulanngan Bencana	0.69	Nilai	4.048.305.000	BPBD
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	%	160.000.000	Dinsos

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

Tabel 5. 14 Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo : Penguatan Fondasi Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ Sederajat	100	%	143.945.168.364	Dinas P dan K
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ Sederajat	100	%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	94,4	%		
	Iklim Inklusivitas (SD)	67,91	Indeks		
	Iklim Inklusivitas (SMP)	60,63	Indeks		
	Iklim Keamanan (SD)	76,56	Indeks		
	Iklim Keamanan (SMP)	73,62	Indeks		
	Iklim Kebinekaan (SD)	75,04	Indeks		
	Iklim Kebinekaan (SMP)	74.26	Indeks		
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100	%	498.347.500	Dinas P dan K
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil risiko tinggi tertangani	100	%	76.874.398.000	Dinkes
	Persentase neonatal risiko tinggi tertangani	100	%		
	Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	5,15	%		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	39.34	%		
	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (RIBK)	81.7	%		
	Persentase kecamatan dengan proporsi non-hipertensi minimal 75%	66	%		
	Persentase kecamatan dengan proporsi non-Diabetes Mellitus minimal 85%	66	%		
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (RIBK)	40	%		
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK)	23.4	%		
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)	8,2	%		
	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90	%		

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Persentase lanjut usia mandiri (RIBK)	83,5	%		
	Angka Keberhasilan dan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate) (RIBK,IUP)	89	%		
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) (RIBK, IUP)	91	%		
	Persentase ODHIV on ARV tersupresi viral load	30	%		
	Positive Rate Malaria	5	%		
	Persentase kecamatan memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	33,33	%		
	Persentase Puskemas melaksanakan kegiatan surveilans	100	%		
	Persentase Capaian SPM RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	84	%		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (RIBK)	4.56	%	219.754.000	Dinkes
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatan dengan Peningkatan Aktivitas Fisik Cukup (RIBK)	58,33	%	559.223.000	Dinkes
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	67.65	%	10.793.585.000	Dinas PPKB dan P3A
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender	4.95	%	347.786.400	Dinas PPKB dan P3A
Peningkatan Kualitas Keluarga	Proporsi Keluarga Yang Mendapatkan Layanan Dari Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Sesuai Kebutuhan.	55	%	338,474,000	Dinas PPKB dan P3A
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	22.76	%	4.683.500.000	Disporapar
	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	21.28			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Pelatih Bersertifikasi	106	Orang	4.865.000.000	Disporapar
	Jumlah Atlet Berprestasi	331	Orang		
	Jumlah Event Olahraga Yang Dilaksanakan Di Sarana Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	17	Event		

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

Tabel 5. 15 Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo : Penguatan Fondasi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	22.76	%	4.683.500.000	Disporapar
	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	21.28			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH Diluar Kawasan Kumuh Yang Sudah Tertangani	100	%	3,405,059,000	DPKP
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	%	910.000.000	DPKP
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	128,2	%	1.800.720.000	Dinas Pangan
	Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Beras	1.32	%	1,457,866,000	
	Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Telur	3.15	%	1,457,866,000	
	Persentase Cadangan Pangan	39	%	1,457,866,000	
	Tingkat Konsumsi Energi	87,4	%	1,457,866,000	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Kelembagaan Kemandirian Pangan yang aktif	51	%	43.305.000	Dinas Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Rentan/Rawan Pangan	4.2	%	550.965.000	Dinas Pangan
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Penanganan Sosial	100	%	392.000.000	Dinsos
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PPKS Lainnya diluar HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	310.000.000	Dinsos
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	%	7.454.000.000	Dinsos

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

Tabel 5. 16 Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo : Penguatan Peningkatan Infrastruktur Digital Dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	98,88	%	289.000.000	Disdukcapil
	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	%		
	Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	%		
	Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	%		
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	20	%	1.120.000.000	Disdukcapil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	91	%		
	Persentae Perekaman KTP-el	99,42	%		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	65	%	4.000.000.000	Diskominfo
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	40	%	54.080.000	Dinas PMD
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	25,65	%	10.794.421.000	Dinas PMD
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	99,7%	%	2.456.450.000	Inspektorat Daerah
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	99,3	%		
	Persentase OPD Yang Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP	100	%		
	Persentase PDTT Yang Selesai Ditangani	100	%		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	100	%	2.152.190.000	Inspektorat Daerah
	Persentase Sakip Perangkat Daerah Kategori Minimal BB	31	%		
	Persentase Wajib Lapor LHKPN Yang Melapor	100	%		

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	3	Indeks		
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	100	%	54.740.300.800	Sekretariat Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	89.5	%	428.340.000	Kecamatan
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	%	100	1,165,000,000	BAPPERIDA
	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan Renstra PD	%	100		
	Persentase Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100		

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

Tabel 5. 17 Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo : Penguatan Peningkatan Infrastruktur Digital Dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	%	40.656.000.000	Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	%		
	Nilai EPPD (bagian pemerintahan)	3.3835	Nilai/Angka		
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	84	%	1.880.000.000	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	86	%	1.800.000.000	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	77	%	1.330.000.000	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	88	%	750.000.000	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	82	%	3.065.000.000	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	98.7	%	6.520.000.000	Satpol PP
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	97.8	%		
	Persentase linmas yang terlatih dan dikukuhkan	64	%		
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	%		
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	92	%	1.962.835.682	Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	95.8	%		

Program Nomenklatur yang Mendukung Program Prioritas	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Tingkat Kematangan UKPBJ	3	Angka		
Program Pengembangan Kebudayaan	TTingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	65	%	1.550.000.000	Dinas P dan K
Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	30,44	%	257.521.059	Disporapar

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

5.1.2. Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerapkan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan konsep **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)** dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Konsep Tematik diterapkan melalui ***penetapan tema pembangunan daerah setiap tahun*** yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029. Melalui pendekatan ini, pembangunan daerah diarahkan pada fokus prioritas tertentu sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan efektif dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.

Konsep Holistik diwujudkan melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan ini menekankan keterpaduan antar sektor dalam menangani berbagai isu strategis pembangunan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganan stunting, serta peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat.

Konsep Integratif dilaksanakan melalui sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah. Pendekatan ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah, antara lain akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga sosial, serta kelompok masyarakat. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan, termasuk dalam penanganan kemiskinan, penurunan stunting, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta berbagai program pembangunan lintas sektor lainnya.

Konsep Spasial diterapkan melalui penguatan pendekatan kewilayahan dalam pembangunan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan pada setiap wilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta pelaksanaan program pembangunan yang mempertimbangkan aspek kewilayahan. Selain itu, pendekatan spasial juga didukung oleh pemanfaatan data dan informasi kewilayahan yang disajikan dalam bentuk peta atau informasi geospasial sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 5. 18 Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2027 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027: Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi				
1	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan perintisan pengembangan UMKM syariah	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro	Diskopumdag
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Diskopumdag
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Disporapar
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	BPKPAD
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Setda
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dispertan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
			Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
			Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
		Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dispertan dan Perikanan
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
			Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dispertan dan Perikanan
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	
		Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
		Program Pengembangan Ekspor	Pameran Dagang Nasional	Diskopumdag
			Pameran Dagang Lokal	
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Diskopumdag
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskopumdag

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pendukung	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dispertan dan Perikanan
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Dispertan dan Perikanan

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

5.1.3. Dukungan Program RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah

1. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 5. 19 Dukungan Program Kabupaten Sukoharjo Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung SPM Tahun 2027

NO	SPM BIDANG	PROGRAM	ANGGARAN	OPD PELAKSANA
1	Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	143.945.168.364	Dinas P dan K
		2. Program Pengembangan Kurikulum	498.347.500	Dinas P dan K
2	Kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76.874.398.000	Dinas Kesehatan
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	219.754.000	Dinas Kesehatan
		3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	559.223.000	Dinas Kesehatan
		4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	51.138.000	Dinas Kesehatan
		5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.793.585.000	Dinas PPKB dan P3A
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.386.831.000	Dinas PUPR
		2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	940.032.000	Dinas PUPR
		3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	7.474.257.737	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Program Kawasan Permukiman	740.719.000	Dinas PKP
		2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.405.059.000	Dinas PKP
5	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.520.000.000	Satpol PP
		2. Program Penanggulangan Bencana	4.048.305.000	BPBD
		3. Program Penanganan Bencana	160.000.000	Dinas Sosial
6	Sosial	1. Program Pemberdayaan Sosial	392.000.000	Dinas Sosial
		2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	6.500.000	Dinas Sosial
		3. Program Rehabilitasi Sosial	310.000.000	Dinas Sosial
		4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.454.000.000	Dinas Sosial
		5. Program Penanganan Bencana	160.000.000	Dinas Sosial

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

2. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2027

Tabel 5. 20 Dukungan Program Kabupaten Sukoharjo Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Hasil Musrenbang RKPD 2027

No	Program	Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bendung Siluwur	4.000.000.000	DPUPR	Kecamatan Weru
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dk Gangin Kulon	1.000.000.000	DISPERTAN	Kecamatan Weru
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pembangunan Jembatan Dayu Desa Tawang, Kecamatan Weru	1.800.000.000	BPKPAD	Kecamatan Weru
4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Pilang	500.000.000	DPUPR	Kecamatan Weru
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Siluwur	200.000.000	DPUPR	Kecamatan Weru
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Grogol - Tegalsari)	207.825.000	DISHUB	Kecamatan Weru
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pelebaran Jalan Tanjung-Lengking	325.000.000	DPUPR	Kecamatan Bulu
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan Tiyaran - Karangasem	572.000.000	DPUPR	Kecamatan Bulu
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud Jalan Tengklik - Jarum	160.000.000	DPUPR	Kecamatan Bulu
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Bulu - Lengking)	207.825.000	DISHUB	Kecamatan Bulu
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Tawangsari - Pojok	2.500.000.000	DPUPR	Kecamatan Tawangsari
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan Kwaron-Bokuning Kec. Tawangsari	200.000.000	DPUPR	Kecamatan Tawangsari
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud jalan Toriyo - Ngemul	165.000.000	DPUPR	Kecamatan Bendosari
14	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Madoh	200.000.000	DPUPR	Kecamatan Bendosari
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud Jalan Jombor - Ngemul	130.000.000	DPUPR	Kecamatan Bendosari
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl Sidan - Mulur)	207.825.000	DPUPR	Kecamatan Polokarto
17	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Grogol	1.000.000.000	DPUPR	Kecamatan Polokarto
18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Embung Dk. Melikan RT 2 RW 1, Tanjungrejo, Kec. Nguter	1.000.000.000	DISPERTAN	Kecamatan Nguter
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Ambil - Ambil Tanjung	2.000.000.000	DPUPR	Kecamatan Nguter
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud Jalan Juron-Serut	130.000.000	DPUPR	Kecamatan Nguter
21	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pembangunan Jembatan Desa Pengkol, Kecamatan Nguter	1.700.000.000	BPKPAD	Kecamatan Nguter
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Pengkol - Tanjungrejo)	207.825.000	DISHUB	Kecamatan Nguter

No	Program	Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Gentan - Bekonang	200.000.000	DPUPR	Kecamatan Mojolaban
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Bekonang - Mojo	1.700.000.000	DPUPR	Kecamatan Mojolaban
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pemeliharaan Berkala Jalan Plumbon-Demakan	510.000.000	DPUPR	Kecamatan Mojolaban
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan Wirun - Karangwuni	403.160.000	DPUPR	Kecamatan Mojolaban
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud Jalan Sidan – Triyagan	145.000.000	DPUPR	Kecamatan Mojolaban
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Plumbon - Demakan)	207.825.000	DISHUB	Kecamatan Mojolaban
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Wirun - Palur)	207.825.000	DISHUB	Kecamatan Mojolaban
30	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pembangunan Masjid di Kawasan Bekas Terminal Kartasura	25.000.000.000	DPUPR	Kecamatan Kartasura
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Adi Sumarmo	8.000.000.000	DPUPR	Kecamatan Kartasura
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Adi Sumarmo, Kec. Kartasura	1.105.000.000	DPUPR	Kecamatan Kartasura
33	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Kertonatan, Kecamatan Kartasura	500000000	DLH	Kecamatan Kartasura
34	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Permukiman Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura	550.000.000	DPUPR	Kecamatan Kartasura
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Trangsang - Ngemplak)	207.825.000	DISHUB	Kecamatan Kartasura
36	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pembangunan Drainase Kampung Makamhaji RT 1 RW 1 Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo	273.297.000	BPKPAD	Kecamatan Kartasura
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Grogol-Kadokan, Kec. Grogol	1.360.000.000	DPUPR	Kecamatan Grogol
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Grogol - Gedangan, Kec. Grogol	200.000.000	DPUPR	Kecamatan Grogol
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Proklamasi, Kec. Grogol	200.000.000	DPUPR	Kecamatan Grogol
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Bacem - Tanjunganom, Kec. Grogol	200.000.000	DPUPR	Kecamatan Grogol
41	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Langenharjo - Pondok, Kec. Grogol	200.000.000	DPUPR	Kecamatan Grogol
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Tanjunganom-Daleman	19.200.000.000	DPUPR	Kecamatan Baki
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Jalan Baki-Pajang	1.300.000.000	DPUPR	Kecamatan Baki
44	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Jumeneng	200.000.000	DPUPR	Kecamatan Baki
45	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi D.I. Nglondo	200.000.000	DPUPR	Kecamatan Baki
46	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengaspalan Jalan /Talud se-Kecamatan Gatak	2000000000	BPKPAD	Kecamatan Gatak
47	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rehabilitasi Gedung / Kantor Desa	430000000	BPKPAD	Kecamatan Gatak

No	Program	Kegiatan	Pagu	Perangkat Daerah Pengampu	Kecamatan
48	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen-Sonorejo)	1.723.465.000	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
49	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan Pudak (Selatan Pondok Al Ukuwah)	281.000.000	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
50	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Talud Jalan Dompilan-Gawangan	130.000.000	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
51	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Gorong-Gorong dan Talud Jalan Ngaglik - Sonorejo	140.000.000	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
52	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rehabilitasi Saluran Pembuang Bulakrejo	200.000.000	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
53	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Carikan - Bulakan)	207.825.000	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
54	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Dompilan - Cendono)	207.825.000	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan dan Pemasangan PJU (Jl. Ngaglik - Sonorejo)	207.825.000	DPUPR	Kecamatan Sukoharjo
56	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pengadaan Sarpras di Kelurahan (Gapura/Tugu, Lapangan)	2.000.000.000	KEC. SUKOHARJO	Kecamatan Sukoharjo

Sumber : Bapperida Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

3. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Tabel 5. 21 Dukungan Program Kabupaten Sukoharjo Terhadap Sasaran dan Prioritas Daerah Percepatan Penghapusan Kemiskinan

No	Program Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Pelaksana
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum	100	%	38.746.223.528	DISHUB
		Persentase Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	7,47	%		
		V/C Rasio Di Jalan Kabupaten/Kota	0,639	Angka		
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	-	Angka		
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 ha Yang Ditangani	100	%	740.719.000	DPKP
3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	%	910.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	88,45	%	64.923.833.000	DPUPR
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	15,86	%	3.386.831.000	
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	57	%	8.851.169.000	
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1,55	%	940.032.000	
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Persentase ibu hamil risiko tinggi tertangani	100	%	76.874.398.000	DINKES
		Persentase neonatal risiko tinggi tertangani	100	%		

No	Program Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Pelaksana
	Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	5,15	%		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	39,34	%		
		Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (RIBK)	81,7	%		
		Persentase kecamatan dengan proporsi non-hipertensi minimal 75%	66	%		
		Persentase kecamatan dengan proporsi non-Diabetes Mellitus minimal 85%	66	%		
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (RIBK)	40	%		
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK)	23,4	%		
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)	8,2	%		
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90	%		
		Persentase lanjut usia mandiri (RIBK)	83,5	%		
		Angka Keberhasilan dan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate) (RIBK,IUP)	89	%		
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) (RIBK, IUP)	91	%		
		Persentase ODHIV on ARV tersupresi viral load	30	%		
		Positive Rate Malaria	5	%		
		Persentase kecamatan memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	33,33	%		
		Persentase Puskemas melaksanakan kegiatan surveilans	100	%		
		Persentase Capaian SPM RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	84	%		
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ Sederajat	100	%	143.945.168.364	DINAS P DAN K
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ Sederajat	100	%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	94,4	%		
		Iklim Inklusivitas (SD)	67,91	Indeks		
		Iklim Inklusivitas (SMP)	60,63	Indeks		
		Iklim Keamanan (SD)	76,56	Indeks		
		Iklim Keamanan (SMP)	73,62	Indeks		
		Iklim Kebinekaan (SD)	75,04	Indeks		
		Iklim Kebinekaan (SMP)	74,26	Indeks		
10	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	65	%	1.550.000.000	
11	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Pengendalian Harga	100	%	300.000.000	DISKOPUMDAG
12	Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Wirausaha	12	%	128.387.945	

No	Program Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Pelaksana
13	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,45	%	607.808.639	DISPERNAKER
14	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	83	%	295.260.000	
15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	96	%	320.000.000	
16	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Padi	2500	Ton	1.990.000.000	DISPERTAN
		Peningkatan Produksi Jagung	300	Ton		
		Peningkatan Produksi Cabe	60	Ku		
		Peningkatan Produksi Bawang Merah	25	Ku		
		Peningkatan Produksi Daging	200	Ton		
		Peningkatan Produksi Telur	30	Ton		
17	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Luas Tanam	410	Ha	11.700.000.000	
18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	37,5	%	465.000.000	
		Jumlah Populasi Ternak (Animal Unit)	21.472	Ekor		
		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	50	%		
19	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PPKS Lainnya diluar HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	%	310.000.000	DINSOS
20	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Penanganan Sosial	100	%	392.000.000	
21	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	%	7.454.000.000	
22	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	%	160.000.000	
23	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terenuhi (unmet need)	9,26	%	277.146.000	Dinas PPKB dan P3A
24	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	67,65	%	10.793.585.000	
25	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Proporsi Keluarga Yang Mendapatkan Layanan Dari Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Sesuai Kebutuhan.	55	%	338.474.000	

No	Program Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan	Pagu	Pelaksana
26	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender	4,95	%	347.786.400	
27	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Capaian Penanggulanngan Bencana	0,69	Nilai	4.048.305.000	BPBD
28	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	98,88	%	289.000.000	DISDUKCAPIL
		Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	%		
		Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	%		
		Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100	%		
29	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	20	%	1.120.000.000	DISDUKCAPIL
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	91	%		
		Persentae Perekaman KTP-el	99,42	%		
30	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang meningkat status desanya	14,61	%	263.752.000	DPMD
31	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	100	%	431.000.000	BAPPERIDA
		Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur \Dan Kewilayahan	100	%	682.000.000	
		Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian Dan SDA	100	%	295.000.000	
32	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100	%	40.656.000.000	SETDA
		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	%		
		Nilai EPPD (bagian pemerintahan)	3,3835	Nilai/ Angka		

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

4. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Sukoharjo

Tabel 5. 22 Dukungan Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2026

No	Program Nomenklatur	Anggaran	Pelaksana
1	Program Pengelolaan Pendidikan	143.945.168.364	DINAS P DAN K
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76.874.398.000	DINKES
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	559.223.000	
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	277.146.000	DINAS PPKB DAN P3A
5	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	338.474.000	
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.793.585.000	
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	89.062.000	
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.454.000.000	DINSOS
9	Program Kawasan Permukiman	740.719.000	DPKP

10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.386.831.000	DPUPR
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	940.032.000	
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.990.000.000	DISPERTAN

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Sukoharjo

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs),* penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan sebagian besar Perangkat Daerah serta didukung oleh partisipasi lembaga nonpemerintah.

Selanjutnya, program dan kegiatan daerah yang mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (*SDGs*), penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengarusutamaan gender di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 23 Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
I	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 4		
II	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 3		
		tujuan 6		
		tujuan 13		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	tujuan 3	V	V
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	tujuan 3	V	V
III	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	tujuan 6	V	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	tujuan 1		V
		tujuan 6		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	tujuan 1	V	
4	Program Pengembangan Permukiman	tujuan 1	V	V
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Tujuan 9	V	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	tujuan 9	V	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tujuan 9	V	
		Tujuan 11		
		Tujuan 13		
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tujuan 9	V	
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tujuan 9	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
IV	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**			
1	Program Pengembangan Perumahan	tujuan 1		V
		tujuan 6		
2	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	tujuan 1		V
		tujuan 6		
		tujuan 11		
V	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**			
1	Program Penanggulangan Bencana	tujuan 1	V	
		tujuan 11		
		tujuan 13		
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			V
3	Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum			V
VI	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	tujuan 1	V	V
		tujuan 2		
		tujuan 3		
2	Program Rehabilitasi Sosial	tujuan 3	V	
3	Program Pemberdayaan Sosial			V
VII	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**			
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	tujuan 1	V	V
		tujuan 8		
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	tujuan 8	V	V
3	Program Hubungan Industrial	tujuan 8	V	
		tujuan 10		
VIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**			
1	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	tujuan 5	V	V
		tujuan 16		
2	Program Perlindungan Perempuan	tujuan 16	V	V
		tujuan 5		
		tujuan 10		
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	tujuan 3		V
4	Program Pemenuhan Hak Anak	tujuan 16	V	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	tujuan 10	V	
IX	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	tujuan 2	V	
		tujuan 13		
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	tujuan 2	V	
		tujuan 8		
		tujuan 13		
X	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**			
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tujuan 6	V	
		tujuan 9		
		tujuan 12		
		tujuan 13		
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	tujuan 13	V	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	tujuan 6	V	
		tujuan 11		
		tujuan 13		
		tujuan 15		
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	tujuan 6	V	
		tujuan 12		
		tujuan 13		
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tujuan 6	V	
6	Program Pengelolaan Persampahan	tujuan 1	V	V
		tujuan 12		
		tujuan 11		
		tujuan 13		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
XI	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**			
1	Program Pencatatan Sipil	tujuan 1	V	V
		tujuan 16		
		tujuan 17		
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	tujuan 16	V	V
3	Program Pendaftaran Penduduk	tujuan 16	V	V
XII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**			
1	Program Penataan Desa	tujuan 10	V	
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	tujuan 10	V	
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	tujuan 10	V	
4	Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa			V
5	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat			V
XIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**			
1	Program Pengendalian Penduduk	tujuan 1		V
		tujuan 3		
		tujuan 5		
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	tujuan 1		V
		tujuan 3		
		tujuan 5		
3	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	tujuan 3	V	V
XIV	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**			
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	tujuan 8	V	
		tujuan 9		
2	Program Pengembangan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	tujuan 8	V	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal			V
XV	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Publik**			
1	Program nformasi dan Komunikasi Publik	tujuan 16	V	V
2	Program Aplikasi Informatika	tujuan 4	V	V
		Tujuan 9		
XVI	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tujuan 3	V	
		Tujuan 11		
XVII	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi**			
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Tujuan 8		V
XVIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	tujuan 1	V	
		tujuan 4		
		tujuan 8		
XIX	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**			
1	Program Pengembangan Kebudayaan	tujuan 8	V	
2	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Tujuan 11	V	
XX	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**			
1	Program Pembinaan Perpustakaan			V
XXI	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**			
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	tujuan 2	V	
		tujuan 8		
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tujuan 8	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
XXII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**			
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	tujuan 8	V	
2	Program Pemasaran Pariwisata	tujuan 8	V	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	tujuan 8	V	
XXIII	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**			
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	tujuan 2	V	
		tujuan 13		
2	Program Penyedian dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tujuan 13	V	
3	Program Pengendalian bencana Pertanian	Tujuan 13	V	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Tujuan 13	V	
XXIV	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**			
1	Program Pengembangan Ekspor	tujuan 17	V	
2	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Tujuan 12	V	
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			V
XXV	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**			
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	tujuan 8		V
XXVI	**Sekretariat Daerah**			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tujuan 1	V	
		tujuan 4		
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tujuan 12	V	V
		tujuan 16		
		tujuan 17		
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	tujuan 16	V	V
		tujuan 8		
4	Program Administrasi Umum	tujuan 16	V	
XXVII	**Perencanaan**			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tujuan 11	V	V
2	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tujuan 1	V	V
		tujuan 11		
		tujuan 17		
3	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam			V
XXVIII	**Keuangan**			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	tujuan 16	V	
		tujuan 17		
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tujuan 16	V	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tujuan 16	V	
		Tujuan 17		
XXIX	**Kepegawaian**			
1	Program Kepegawaian Daerah		V	
XXX	**Pendidikan Dan Pelatihan**			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	tujuan 5	V	V
		tujuan 16		
XXXI	**Penelitian Dan Pengembangan**			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	tujuan 1	V	
		tujuan 9		
XXXII	**Inspektorat Daerah**			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		V	V
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		V	
XXXIII	**Kecamatan**			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		V	
XXXIV	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	tujuan 5		V
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	Tujuan 3	V	

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

Berdasarkan hasil pemetaan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)* dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sukoharjo, telah teridentifikasi keterkaitan indikator pada berbagai tingkatan, meliputi indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program, serta indikator yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh indikator SDGs menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga terhadap indikator yang berada di luar kewenangan daerah tidak seluruhnya terakomodasi dalam dokumen perencanaan tahunan, baik dalam Renja Perangkat Daerah maupun RKPD.

Adapun hasil pemetaan indikator SDGs sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 24 Pemetaan Indikator *SDG's* dalam Dokumen Perencanaan Daerah

No	Spesifikasi Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Jumlah Indikator
1	Indikator Kinerja Tujuan	2	1	0	0	3
2	Indikator Kinerja Sasaran	0	4	0	3	7
3	Indikator Kinerja Program	24	7	16	10	57
4	Indikator pada Renstra PD	34	3	0	2	39
5	Indikator Bukan Kewenangan	7	3	0	1	11
	Jumlah	**67**	**18**	**16**	**16**	**117**

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

6. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarustamaan Gender (PUG) Kabupaten Sukoharjo

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan berdasarkan kebijakan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender. Kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa wajib mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pada setiap program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penerapan pengarusutamaan gender dilakukan melalui penggunaan instrumen analisis gender, antara lain *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)*.

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun sebagai bagian integral dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, guna mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Tabel 5. 25 Dukungan Program Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pengarustamaan Gender (PUG) Kabupaten Sukoharjo

No	Program Nomenklatur	Anggaran	PD Pengampu
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8.855.000.000	Diskopumdag
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	110.600.000	Diskopumdag
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	1.119.022.430	Diskopumdag
4	Program Penyuluhan Pertanian	1.125.000.000	Dispertan
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	730.000.000	Dispertan
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	116.975.000	Dinas PM dan PTSP
7	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	297.407.000	Dinas PM dan PTSP
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	607.808.639	Dispernaker
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	295.260.000	Dispernaker
10	Program Pengelolaan dan Penghembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.386.831.000	DPUPR
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	940.032.000	DPUPR
12	Program Kawasan Permukiman	740.719.000	DPKP
13	Pogram Pengembangan Perumahan	910.000.000	DPKP
14	Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	3.405.059.000	DPKP
15	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	338.474.000	Dinas PPKB dan P3A
16	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	347.786.400	Dinas PPKB dan P3A
17	Program Perlindungan Perempuan	228.124.000	Dinas PPKB dan P3A
18	Program Pengendalian Penduduk	34.269.000	Dinas PPKB dan P3A
19	Program Pembinaan Keluarga Berencana	10.793.585.000	Dinas PPKB dan P3A
20	Program Pengelolaan Pendidikan	143.945.168.364	Dinas P dan K
21	Program Pembinaan Perpustakaan	623.000.000	Dispusip
22	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.865.000.000	Disporapar
23	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76.874.398.000	Dinkes
24	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	559.223.000	Dinkes
25	Program Penanggulangan Bencana	4.048.305.000	BPBD
26	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.454.000.000	Dinsos
27	Program Rehabilitasi Sosial	310.000.000	Dinsos
28	Program Pendaftaran Penduduk	1.120.000.000	Disdukcapil
29	Program Pencatatan Sipil	289.000.000	Disdukcapil
30	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.668.000.000	BKPSDM
31	Program Kepegawaian Daerah	3.347.400.000	BKPSDM
32	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	40.656.000.000	SETDA
33	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.962.835.682	SETDA
34	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.456.450.000	Inspektorat Daerah
35	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.165.000.000	BAPPERIDA
36	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	431.000.000	BAPPERIDA
37	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	295.000.000	BAPPERIDA

No	Program Nomenklatur	Anggaran	PD Pengampu
38	Program Riset Dan Inovasi	269.500.000	BAPPERIDA
39	Program Penelitian dan Pengembangan	380.500.000	BAPPERIDA
40	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	10.794.421.000	DPMD
41	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.000.000.000	Diskominfo
42	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.330.000.000	Badan Kesbangpol
43	Program pemeliharaan Kentetraman dan Ketertiban Umum	6.520.000.000	Satpol PP
44	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.798.000.000	Satpol PP
45	Program Pengembangan Kebudayaan	1.550.000.000	Dinas P dan K

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

7. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Adapun bentuk dukungan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 26 Dukungan Program Kabupaten Sukoharjo Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

No	PROGRAM	Anggaran	OPD PENGAMPU
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76.874.398.000	Dinas Kesehatan
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	41.091.000.000	Dishub
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.301.850.000	Dinas LH
4	Program Pengelolaan Persampahan	23.458.970.000	Dinas LH
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	18.000.000	Dinas LH
6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.037.500.000	Dinas LH
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.700.000.000	Dispertan
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.990.000.000	Dispertan
9	Program Penyuluhan Pertanian	1.125.000.000	Dispertan

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

8. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2027

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi kawasan, fokus pada percepatan pembangunan wilayah melalui peningkatan konektivitas infrastruktur, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan yang berdaya saing. Kami memprioritaskan sinkronisasi program lintas sektor, peningkatan investasi daerah, serta optimalisasi potensi lokal secara berkelanjutan melalui inovasi pelayanan publik dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Dukungan tersebut

diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi kawasan dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 27 Dukungan Program Kabupaten Sukoharjo Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2027

No	PROGRAM	Anggaran	OPD Pengampu
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8.851.169.000	DPUPR
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	116.975.000	Dinas PM dan PTSP
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	297.407.000	Dinas PM dan PTSP
4	Program Pengembangan Ekspor	525.000.000	Diskopumdag
5	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	700.000.000	Diskopumdag
6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.105.000.000	Dispertan
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.700.000.000	Dispertan
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.990.000.000	Dispertan
9	Program Penyuluhan Pertanian	1.125.000.000	Dispertan
10	Program Perizinan Usaha Pertanian	30.000.000	Dispertan

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

9. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2027

Program prioritas pembangunan infrastruktur Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, kualitas permukiman, layanan dasar, serta ketahanan lingkungan dan bencana, yang diwujudkan melalui berbagai program strategis, antara lain Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus, Penataan Wajah Kota *(Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho)*, Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh, Terangi Jalanku, Sukoharjo Sehat: Akses Air Minum dan Sanitasi Aman, Mobilitas Sukoharjo: Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi, Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK, Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi, serta Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana. Selain itu, penguatan infrastruktur juga didukung melalui Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian sebagai bagian dari pengembangan sektor pertanian berbasis potensi lokal, serta Penyediaan Rumah Layak Huni dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat. Keseluruhan program tersebut merupakan upaya terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tabel 5. 28 Dukungan Program Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2027

No	PROGRAM	Anggaran	OPD PENGAMPU
1	Program Penyelenggaraan Jalan	64.923.833.000	DPUPR
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	500.000.000	DPUPR
3	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	41.091.000.000	DISHUB
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.386.831.000	DPUPR

5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	940.032.000	DPUPR
6	Program Kawasan Permukiman	740.719.000	DPKP
7	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.798.000.000	SATPOL PP
8	Program Penanggulanga Bencana	4.048.305.000	BPBD
9	Program Pengelolaan Persampahan	23.458.970.000	DLH
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.700.000.000	DISPERTAN
11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8.855.000.000	DISKOPUMDAG
12	Program Pengelolaan Pendidikan	143.945.168.364	DINAS P DAN K
13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76.874.398.000	DINKES
14	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.000.000.000	DISKOMINFO

Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

10. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Satu Data Indonesia

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagai bagian dari penguatan tata kelola data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Adapun bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 29 Dukungan Program Kabupaten Sukoharjo Terhadap Satu Data Indonesia

No	Program	Anggaran (Rp)	Pelaksana
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.300.000.000	Diskominfo
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.000.000.000	Diskominfo
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	132.000.000	Diskominfo
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.165.000.000	Bapperida
	Jumlah Total	**6.597.000.000**	

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026, data diolah

5.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2027 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum beserta indikator dan targetnya.

5.1.4. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program pengelolaan pendidikan ini diarahkan pada peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan bagi warga yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar, sehingga program ini dapat mendukung fokus prioritas dalam pencapaian

pendidikan berbasis digitalisasi dan globalisasi, dengan menghubungkan sekolah dan perguruan tinggi dengan ekosistem industri global. Selain itu Program ini juga mendukung program prioritas Bupati yaitu **Sekolah Efektif/Unggulan Tingkat SD** dan program prioritas **Pendidikan Inklusi dan Keterampilan Khusus.** Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ Sederajat dengan target capaian 100 persen, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ Sederajat, dengan target capaian 100 persen, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dengan target capaian 94,4 persen, Iklim Inklusivitas (SD) dengan target capaian 67,91 persen, Iklim Inklusivitas (SMP) dengan target capaian 60,65 persen, Iklim Keamanan (SD) dengan target capaian 76,56 persen, Iklim Keamanan (SMP) dengan target capaian 73,62 persen, Iklim Kebinekaan (SD) dengan target capaian 75,04 persen, dan Iklim Kebinekaan (SMP) dengan capaian target 74,26 persen.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program pengembangan kurikulum ini diarahkan pada pengembangan kurikulum yang adaptif berbasis karakter, *soft skill* dan potensi lokal melalui penyusunan dan implementasi kurikulum muatan lokal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal dengan target capaian 100 persen.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program pendidik dan tenaga kependidikan ini diarahkan pada pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang paud, pendidikan dasar dan kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik dengan target capaian 76,4 persen, dan Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 dengan capaian target 85,90 persen.

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

2. Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan mutu fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan dan primer sesuai standar; peningkatan layanan deteksi dini bagi ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia remaja, usia produktif dan lansia; pelaksanaan program prioritas Bupati yaitu **layanan Posyandu Terpadu (*One Stop Health Center*)**; pemberian PMT bagi balita *wasting, underweight, stunting* dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK);

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi. Program ini juga mendukung fokus prioritas dalam pencapaian Sistem layanan kesehatan berbasis teknologi AI dan Big Data untuk meningkatkan efektivitas pencegahan penyakit dan pelayanan Kesehatan. Selain itu juga mendukung program prioritas **Pencegahan dan Penanganan Stunting,** serta program prioritas **Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS)**. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ibu hamil risiko tinggi tertangani dengan target capaian 100 persen, persentase neonatal risiko tinggi tertangani dengan target capaian 100 persen, Prevalensi Wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita dengan target capaian 5,15 persen, persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK) dengan target capaian 39,34 persen, cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (RIBK) dengan target capaian 81,7 persen, persentase kecamatan dengan proporsi non-hipertensi minimal 75% dengan target capaian 66 persen, persentase kecamatan dengan proporsi non-Diabetes Mellitus minimal 85% dengan target capaian 66 persen, cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (RIBK) dengan target capaian 40 persen, Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK) dengan target capaian 23,4 persen, persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK) dengan target capaian 8,2 persen, persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target capaian 90 persen, persentase lanjut usia mandiri (RIBK) dengan target capaian 83,5 persen, angka keberhasilan dan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate) (RIBK, IUP) dengan target capaian 89 persen, cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) (RIBK, IUP) dengan target capaian 91 persen, persentase ODHIV on ARV tersupresi viral load dengan target capaian 30 persen, Positive Rate Malaria dengan target capaian 5 persen, persentase kecamatan memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan dengan target capaian 33,33 persen, persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan surveilans dengan target capaian 100 persen, persentase capaian SPM RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo dengan target capaian 84 persen.

b. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan, serta penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (RIBK) dengan target capaian 4,56 persen.

c. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**

Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman diarahkan pada peningkatan pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pengawasan terhadap Makanan dan Minuman yang beredar di masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berizin sesuai ketentuan dengan target capaian 93 persen.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan permasalahan Kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam Upaya penyelenggaraan Kesehatan serta pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Kampanye Hidup Sehat Sukoharjo (KHS)**. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase Kecamatan dengan Peningkatan Aktivitas Fisik Cukup (RIBK) target capaian 58,33 persen.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum layak dan aman kepada Masyarakat. Program ini mendukung program prioritas Bupati **Sukoharjo melalui "Sukoharjo Sehat": akses air minum dan sanitasi aman**. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rumah tangga dengan akses air minum aman dengan target capaian 15,86 persen.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah diarahkan pada fasilitiasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestic) yang layak dan aman untuk Masyarakat. Program ini mendukung program prioritas Bupati Sukoharjo yaitu **"Sukoharjo Sehat": akses air minum dan sanitasi aman**. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman dengan target capaian 1,55 persen.

c. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung diarahkan pada bantuan teknis pendataan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan gedung milik Pemerintah Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio bangunan ber PBG dan SLF dengan target capaian 28,11 persen.

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik dengan target capaian 8,94 persen.

e. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, sehingga dapat mendukung program prioritas Bupati yaitu **Penataan Wajah Kota *(Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho)***. Program ini dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi dengan target capaian 100 persen.

f. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) diarahkan pada Pembangunan dan rehabilitasi prasaranan dan sarana Sumber Daya Air (SDA), serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigrasi. Program ini juga mendukung fokus prioritas dalam pencapaian Keberlanjutan akses air minum dan sanitasi dengan manajemen sumber daya air terpadu. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Daerah irigasi dalam kondisi baik dengan target capaian 57 persen.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Infrastruktur Mantap, Jalanku Mulus**. Program diarahkan pada meningkatkan kualitas jalan, terutama di daerah perbatasan dan pedesaan, serta membangun jembatan yang kokoh dan tahan lama. Fokus utamanya adalah pada perbaikan jalan berlubang, pelebaran jalan, serta pembangunan infrastruktur jalan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Indikator kinerja program ini adalah Presentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota dengan target capaian 88,45 persen.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga kerja di bidang jasa konstruksi melalui pelatihan dan pembinaan. Selain itu program ini juga mendukung fokus prioritas untuk Optimalisasi tenaga kerja konstruksi dengan integrasi sistem pendidikan vokasi dan industri. Program ini untuk mencpai target Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi sebesar 100%.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang diarahkan pada Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Tingkat Perwujudan Rencana Tata Ruang dengan target capaian 85,5 persen.

j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

a. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan diarahkan pada Pendataan, Penyediaan serta Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi; Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dengan target capaian 100 persen.

b. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

c. Program Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diarahkan pada Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Prorgram ini difokuskan pada RTLH diluar kawasan kumuh yang sudah tertangani. Program ini juga mendukung Program Prioritas Bupati yaitu **Penyediaan Rumah Layak Huni.** Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Prosentase RTLH Diluar Kawasan Kumuh Yang Sudah Tertangani dengan target capaian 100 persen. Untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan kolaborasi pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

d. Program Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Penataan Kawasan Lingkungan Kumuh**. Fokus utama dari program ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. Program ini akan mencakup pembangunan rumah layak huni, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, penyediaan infrastruktur jalan dan drainase yang memadai, serta pengembangan ruang publik dan hijau di kawasan yang sebelumnya tidak tertata. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Permukiman yang Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah dengan capaian target 100%.

e. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Permukiman yang Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah dengan capaian target 100 persen.

f. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan Produk Hukum Daerah, pengendalian terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta meingkatkan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dan satgas Linmas. Program ini mendukung program prioritas **Sukoharjo Harmoni**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penegakan Perda dan Perkada dengan target capaian 97,8 persen, Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan target capaian 98,7 persen, Persentase linmas yang terlatih dan dikukuhkan dengan target capaian 64 persen, Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan target capaian 100 persen.

b. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran diarahkan pada penyediaan informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran serta meningkatkan pembinaan terkait pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran serta Penyelamatan Non Kebakaran. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran dengan target capaian 70 persen, dan Cakupan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target capaian 70 persen.

c. **Program Penanggulangan Bencana**

Program Penanggulangan Bencana diarahkan pada peningkatan layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini juga mendukung Program Prioritas Bupati yaitu **Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator

kinerja yaitu Cakupan Capaian Penanggulangan Bencana dengan capaian nilai 0,69.

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

6. Sosial

a. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial diarahkan pada perlindungan dan pemenuhan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar dan fakir miskin. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar dengan target capaian 100 persen.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada penanganan terhadap warga negara migran korban tindak kekerasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan yang Tertangani dengan target capaian 100 persen.

c. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik dengan target capaian 100 persen.

d. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial diarahkan peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, Dan Kelembagaan Dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial. Program ini mendukung program prioritas Bupati **Santunan Kematian**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase SDM Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Penanganan Sosial dengan target capaian 100 persen.

e. Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam maupun sosial, penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan serta layanan psikososial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana dengan target capaian 100 persen.

f. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PPKS Lainnya diluar HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target capaian 100 persen.

g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

5.1.5. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program perencanaan tenaga kerja diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja (RTK). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja dengan target capaian 40 persen.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja diarahkan pada peningkatan kapasitas tenagakerja sesuai kompetensi kerja dan pasar kerja serta melakukan pembinaan terhadap Lembaga pelatihan kerja swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dengan target capaian 0,45 persen.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahka pada pengelolaan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenagakerja sesuai kompetensiperlindungan terhadap tanagakerja Pra dan Purna Penempatan (PMI). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota dengan target capaian 83 persen.

d. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian persilisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berdampak pada kepentingan Daerah melalui pembinaan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/buruh, penetapan struktur skala upah dan fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan target capaian 46,93 persen.

e. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a. **Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

Program pengarusutamaan geder dan pemerdayaan perempuan diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah; pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; serta penguatan dan pengembangan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Anggaran Responsif Gender dengan target capaian 4,95 persen.

b. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**

Program pengelolaan sistem data gender dan anak diarahkan pada pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan Sistem Data Gender dan Anak yang terintegrasi di tingkat daerah kabupaten/kota dengan target capaian 62 persen.

c. **Program Perlindungan Perempuan**

Program perlindungan perempuan diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan; penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dengan target capaian 13,55 persen.

d. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program peningkatan kualitas keluarga diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. Program ini juga mendukung program prioritas Bupati yaitu **Pemberdayaan Perempuan Sukoharjo (PPS)**, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kepemimpinan dengan peningkatan jumlah Perempuan dalam posisi strategis pemerintah dan sektor bisnis. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi Keluarga Yang Mendapatkan Layanan Dari Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Sesuai Kebutuhan dengan target capaian 55 persen.

e. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dengan target capaian 63,65 persen.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program perlindungan khusus anak diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak; penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio kekerasan terhadap anak, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk anak) dengan target capaian 27,95 persen.

g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

3. Pangan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan diarahkan pada fokus prioritas perwujudan ketersediaan dan keterjangkauan pangan inklusif melalui produksi lokal dan distribusi efisien. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kelembagaan Kemandirian Pangan yang aktif dengan target capaian 51 persen.

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok; menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan cadangan pangan pemerintah; serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Program ini mendukung Program Prioritas Bupati yaitu **Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan dengan target capaian 128,2 persen, Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Beras dengan capaian target 1,32 persen, Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Telur dengan capaian target 3,15 persen,

Persentase Cadangan Pangan dengan capaian target 39 persen, dan Tingkat Konsumsi Energi dengan capaian target 87,4 persen.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program penanganan kerawanan pangan diarahkan pada penanganan desa/kelurahan rawan pangan; dan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Desa/Kelurahan Rentan/Rawan Pangan dengan target capaian 4,2 persen.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan diarahkan pada pengawasan pangan terutama pangan segar yang beredar di pasar, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap bahan pangan yang beredar layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan dengan target capaian 92 persen.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

4. Pertanahan

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah Untuk Pembangunan diarahkan pada penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah dengan target capaian 100 persen.

b. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria dengan target capaian 100 kepala keluarga.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penggunaan Tanah yang dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan target capaian 78 persen.

d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai

indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan dengan target capaian 100 persen.

5. Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program perencanaan lingkungan hidup diarahkan pada penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup dengan target capaian 50 persen.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diarahkan pada pengendalian pencemaran kualitas air dan udara serta pembangunan rendah karbon. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator yaitu nilai potensi penurunan gas rumah kaca dari mitigasi perubahan iklim dengan capaian 27,500 Tonco2eq.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) diarahkan pada pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Luas Wilayah Perkotaan dengan target capaian 38,012 persen.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) diarahkan pada Pengendalian B3 Dan LB3 Pada Penghasil Dan Pengumpul Skala Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase pengendalian B3 dan LB3 pada penghasil dan pengumpul skala kabupaten dengan target capaian 50 persen.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diarahkan pada ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketaatan penanggug jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dengan target capaian 60 persen.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator

kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan dengan target capaian 60 persen.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat maupun lembaga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kabupaten Yang Diberikan dengan target capaian 50 persen.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan target capaian 100 persen.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini menjadi program prioritas Bupati yaitu **Program Lingkungan Sehat: Pengelolaan Sampah Terintegrasi**. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Sukoharjo melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan. Program ini akan mencakup sistem pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir dengan pendekatan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Fokus utama dari program ini adalah untuk mengurangi timbunan sampah, meningkatkan daur ulang, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber energi terbarukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengelolaan Sampah dengan target capaian 73,5 persen.

j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk diarahkan pada peningkatan layanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Program ini dilaksanakan untuk indikator kinerja yaitu Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital dengan target capaian 20 persen, Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak dengan target capaian 91 persen, dan persentase perekaman KTP-el dengan target capaian 99,42 persen.

b. Program Pencatatan Sipil

Program pendaftaran penduduk diarahkan pada peningkatan layanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk,

penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun dengan target capaian 98,88 persen, persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan dengan target capaian 100 persen, persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan dengan target capaian 100, persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan dengan target capaian 100 persen.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan diarahkan pada pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan. Program ini dilaksanakan mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan dengan target capaian 100 persen dan persentase ketersediaan sistem informasi dan data kependudukan yang terintegrasi dan bisa diakses dengan target capaian 100 persen.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan yang valid dan efektif untuk mendukung pengambilan Keputusan dan perumusan kebijakan oleh Pemerintah. Program ini dilaksanakan mencapai indikator kinerja yaitu Persentase cakupan pengelolaan profil kependudukan dengan target capaian 100 persen.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong penyelenggaraan penataan desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase Desa yang meningkat status desannya dengan target capaian 14,61 persen.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya fasilitasi kerja sama antar desa dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan kerjasama desa dengan target capaian 40 persen.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Pencapaian indikator kinerja pada program ini yaitu Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target capaian 20 persen.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten. Pencapaian indikator kinerja pada program ini yaitu Persentase Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target capaian 25,65 persen.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate / ASFR* 15-19 Tahun) dengan target capaian angka 4,48.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluaraga berencana; pemberdayaan dan penignkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kesertaan KB. Program ini mendukung program prioritas **Pencegahan dan Penanganan Stunting.** Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / *Modern Contraceptive (mCPR)* dengan target capaian 67,65 persen.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan target capaian 9,26 persen.

9. Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini merupakan program prioritas Bupati yaiu **"Mobilitas Sukoharjo": Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas transportasi di Kabupaten Sukoharjo, baik transportasi publik maupun infrastruktur pendukung. Program ini juga mendukung Program Prioritas **"Terangi Jalanku".** Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum dengan target capaian 100 persen, Presentase Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan dengan target capaian 7,47 persen, Persentase V/C Rasio Di Jalan Kabupaten dengan target capaian 0,639.

b. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada penanganan perlintasan kereta api. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Perlintasan Kereta Api Yang Ditangani dengan target capaian 100 persen.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

10. Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik antar perangkat daerah maupun kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih baik. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan target capaian nilai 92 poin.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Penuntasan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK**. Program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di seluruh sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik. Selain itu juga mendukung pencapaian program prioritas ***Sukoharjo Digital Government*** **(Tol Layanan Publik)**. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Presentase layanan publik yang diselenggarakan secera online dan terintegrasi dengan capaian nilai 65 persen.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program pelayanan izin usaha simpan pinjam diarahkan pada fasilitasi pemenuhan perizinan berkaitan dengan usaha simpan pinjam. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase koperasi aktif dengan target capaian 42,8 persen.

b. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

Program pendidikan dan latihan perkoperasian diarahkan pada peningkatan kapasitas kepada pengurus/pengawas/pengelola koperasi melalui pendidikan dan pelatihan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan dengan target capaian 27,87 persen.

c. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM difokuskan pada pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu UMKM naik Kelas. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Pertumbuhan Wirausaha dengan target capaian 12 persen.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **UMKM Naik Kelas**. Selain itu juga mendukung program **prioritas Pengolahan Produk Pertanian Berbasis Rumah Tangga.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengolahan langsung oleh masyarakat di tingkat rumah tangga. Program ini juga di fokuskan untuk mewujudkan Penguatan sektor pertanian dan peternakan sebagai penyokong utama ekonomi daerah melalui optimalisasi rantai pasok dan akses pasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal dengan target capaian 21 persen.

e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan serta pengembangan jaringan pemasaran dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi dengan target capaian 8,84 persen.

g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk

mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

12. Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal diarahkan pada penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas serta dukungan kemudahan dan fasilitasi untuk kemudahan berusaha. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Investasi Berbasis Potensi Lokal.** Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Regulasi yang mendukung Realisasi Total Terhadap Target Investasi dengan target capaian 100 persen.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Investasi Berbasis Potensi Lokal**. Program ini harapannya dapat mendorong penanaman modal di sektor-sektor unggulan Kabupaten Sukoharjo, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, dengan menyediakan informasi investasi yang komprehensif serta insentif bagi investor yang berkontribusi pada pemberdayaan lokal. Program ini dilakukan untuk Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi dengan target capaian 4,4 persen.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah pertumbuhan realisasi penanaman modal dengan target capaian 94 persen.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat dan terpadu serta fasilitasi penyelesaian pengaduan perizinan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan dengan target capaian 82 persen.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal diarahkan pada pengembangan aplikasi dan system informasi penanaman modal yang akurat dan valid dalam mendukung iklim investasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target capaian 91 persen.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk

mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan diarahkan pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda; peningkatan wirausaha muda pemula, dan pemuda kader; serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu Sukoharjo Pemuda Produktif, yang ditujukan untuk mewujudkan Pemuda sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi, dengan dukungan penuh bagi startup pemuda dan proyek inovasi berbasis teknologi. Selain itu juga mendukung program prioritas Bupati Beasiswa Kuliah Sukoharjo Pintar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan target capaian 22,76 persen dan Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dengan target capaian 21,28 persen.

b. Program pengembangan kapasitas daya saing Keolahragaan

Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan organisasi olahraga; serta menyelenggarakan kejuaraan olahraga. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu Sukoharjo Juara, yang ditujukan untuk Membangun Sukoharjo sebagai pusat sport tourism, dengan infrastruktur olahraga bertaraf internasional dan peningkatan daya saing atlet di kancah nasional dan internasional. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Pelatih Bersertifikasi dengan target capaian 106 orang, Jumlah Atlet Berprestasi dengan target capaian 331 orang, Jumlah Event Olahraga Yang Dilaksanakan Di Sarana Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan target capaian 17 persen.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Prestasi Kepramukaan Tingkat Internasional, Nasional Dan Provinsi Yang Diraih dengan target capaian 10 medali.

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

14. Statistik

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan statistik sektoral untuk mewujudkan big data melalui penerapan portal data menuju layanan keterbukaan data, sekaligus mendukung implementasi **Satu Data Indonesia** melalui penyediaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase/cakupan Data Statistik Sektoral dengan target capaian 95,15 persen.

15. Persandian

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada ketangguhan layanan kemananan informasi pemerintah daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dengan target capaian 550 (nilai).

16. Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program pengembangan kebudayaan diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan Lembaga kebudayaan. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Sukoharjo Spektakuler (Festival Budaya Sukoharjo)** dan program prioritas **Sukoharjo Berkarakter**. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan dengan target capaian 65 persen.

b. Program Pembinaan Sejarah

Program pembinaan sejarah diarahkan pada pembinaan sejarah local satu daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sejarah Lokal yang dilestarikan dengan target capaian 44 persen.

c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya difokuskan pada penetapan, pengelolaan, perlindungan serta pemanfaatan cagar budaya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan dengan target capaian 10,88 persen.

17. Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten, dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dengan target capaian 2,25 persen.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dengan target capaian 62,5 persen.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 77%.

18. Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan dan layanan kearsipan Pemerintah, serta peningkatan kelestarian arsip. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan target capaian 79 persen.

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada perlindungan dan penyelamatan arsip untuk mewujudkan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan target capaian 45 persen.

5.1.6. Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Produksi perikanan Tangkap dengan target capaian 412 ton.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Produksi Perikanan Budidaya dengan target capaian 14.650 ton.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten. Program ini

dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB dengan target capaian 5 kelompok.

d. Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Angka Konsumsi Ikan dengan target capaian 26 Kg/Kapita/Tahun.

2. Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD dengan target capaian 7,7 persen.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase event pariwisata yang diadakan dengan target capaian 30,44 persen.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Persentase Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina dengan target capaian 25 persen.

3. Pertanian

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Smart Farming,** Program **Smart Farming** adalah inisiatif untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kegiatan pertanian di Sukoharjo. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Program Asuransi Pertanian**. Selain itu juga mendukung program prioritas **Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian**. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Peningkatan Produksi Padi dengan target capaian 2.500 ton, Peningkatan Produksi jagung dengan target capaian 300 ton, Peningkatan Produksi Cabe dengan target capaian 60 ku, Peningkatan Produksi Bawang Merah dengan target capaian 25 ku, Peningkatan Produksi Daging dengan target capaian 200 ton, dan Peningkatan Produksi telur dengan target capaian 30 ton.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak serta, pengembangan lahan penggembalaan umum. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Revitalisasi Irigasi dan Infrastruktur Pertanian**, yang

di fokuskan pada pembangunan dan revitalisasi embung, jaringan irigasi air tanah dalam, serta pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan jalan usaha tani. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Peningkatan Luas Tanam dengan capaian target 410 ha.

c. **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**
Program diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sehingga menurunkan kemungkinan gagal panen. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase gagal panen dengan target capaian 3 persen.

d. **Program Penyuluhan Pertanian**
Program penyuluhan pertanian diarahkan pada pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase SDM Petani yang ditingkatkan dengan target capaian 3,5 persen dan Persentase Peningkatan Kelembagaan Petani dan Kenaikan Kelas Kelompok dengan target capaian 2 persen.

e. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**
Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan serta fasilitasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan target capaian 37,5 persen, Jumlah Populasi ternak (animal unit) dengan target capaian 21.472 unit, dan Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular dengan target capaian 50 persen.

f. **Program Perizinan Usaha Pertanian**
Program ini diarahkan pada fasilitasi izin usaha pertanian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan dengan target capaian 15 dokumen.

g. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

4. Perdagangan

a. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat/tradisional dengan melakukan revitalisasi pasar dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL). Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Penguatan Rantai**

Pasok Produk Lokal serta mendukung program prioritas Penataan Wajah Kota (*Sukoharjo Kuncoro mBangun Deso Noto Kutho)*. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pasar Rakyat Yang Ditingkatkan Kualitasnya dengan target capaian 88,46 persen.

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada stabilisasi harga dan stok barang pokok penting (Bapokting) yang beredar, penyediaan informasi ketersediaan stok bapokting, serta fasilitasi sembako murah. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Penguatan Rantai Pasok Produk Lokal.** Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pengendalian Harga dengan target capaian 100 persen.

c. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada peningkatan promosi produk daerah yang mampu ekspor sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor daerah. Program ini mendukung program prioritas Bupati Yaitu **Program Pengembangan Pasar Lokal dan Ekspor** (***Sukoharjo Go Global***) ditujukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal Sukoharjo di pasar nasional dan internasional melalui penguatan standar kualitas, branding, dan akses pasar ekspor. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Ekspor dengan target capaian 16,05 persen.

d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program standarisasi dan perlindungan konsumen diarahkan pada pelayanan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku dengan target capaian 82,2 persen.

e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri diarahkan pada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran dengan target capaian 16,05 persen.

f. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program perizinan dan pendaftaran perusahaan diarahkan pada peningkatan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha perdagangan untuk memeroleh rekomendasi izin sesuai peraturan perundangan (IUPP/SIUP Pusat Pembelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Permohonan Izin Usaha Perdagangan Yang Memperoleh Rekomendasi dengan target capaian 100 persen.

5. Perindustrian

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program perencanaan dan pembangunan industri diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi sektor industri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri dengan target capaian 96 persen.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten

Program ini diarahkan pada fasilitasi penerbitan izin usaha industri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Izin Usaha Industri Yang Diterbitkan dengan target capaian 92 persen.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini dengan target capaian 76persen.

6. Transmigrasi

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program perencanaan kawasan transmigrasi diarahkan pada pemberangkatan dan pembekalan ketrampilan bagi calon transmigran yang akan diberangkatkan menuju daerah transmigrasi. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Pemenuhan Alokasi Tujuan Transmigran dengan target capaian 100 persen.

5.1.7. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat diarahkan pada penataan administrasi pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, serta fasilitasi kerja sama daerah. Program ini juga mendukung program prioritas Bupati **Umroh Gratis untuk Takmir Masjid**, **Sukoharjo Mengaji** dan **Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan**. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan dengan target capaian 100 persen, Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan target capaian 100 persen, Nilai EPPD (bagian pemerintahan) dengan target capaian 3,3835 persen.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program perekonomian dan pembangunan diarahkan pada pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Subsidi Bunga Pinjaman UMK** serta program prioritas **Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren.** Program ini diarahkan untuk kegiatan Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perikonomian dan Pembangunan dengan target capaian

92 persen, Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan capaian target 95,8 persen, Tingkat Kematangan UKPBJ dengan target capaian 3.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan serta penataan organisasi. Program ini juga mendukung pencapaian proram prioritas **Reformasi Birokrasi Dinamis *(Dynamic Bureaucracy Reform)***. Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Indeks PPID Setda sebesar 89, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81 dan Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah sebesar 39.

2. Sekretariat DPRD

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD diarahkan pada pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintah, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat serta pembahasan Kerjasama daerah. Program ini diarahkan untuk kegiatan indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Ketepatan Penetapan Perda Apbd Tahun N dengan capaian target 100 persen, Persentase Penetapan Ranperda Tahun N dengan target capaian 100 persen.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

5.1.8. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA serta infrastruktur dan kewilayahan untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan Pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA serta infrastruktur dan kewilayahan. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Keselarasan

RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia dengan target capaian 100 persen, Persentase Keselarasan SDA Dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur \Dan Kewilayahan dengan target capaian 100 persen, dan Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian Dan SDA dengan target capaian 100 persen.

b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembangunan daerah diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah. Program ini mendukung program prioritas Bupati Sukoharjo Open Government (SOG). Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD daerah dengan target capaian 100 persen, Persentase Keselarasan RPJMD Dengan Renstra PD dengan target capaian 100 persen, dan Persentase Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan target capaian 100 persen.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Program ini mendukung program prioritas Bupati yaitu **Subsidi Bunga Pinjaman UMK**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dengan target capaian 100 persen, Persentase Dokumen Penganggaran Yang Tepat Waktu dengan target capaian 100 persen, Persentase Perangkat Daerah dalam hal penyerapan anggarannya berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan dengan target capaian 100 persen.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program pengelolaan barang milik daerah diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD, pengamanan aset, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu,

serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penatausahaan aset daerah yang tertib dengan target capaian 100 persen.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi peningkatan pad melalui pajak dan retribusi daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target capaian 26,85 persen dan Persentase peningkatan target PAD dengan target capaian 3,25 persen.

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

3. Kepegawaian

a. Program Kepegawaian Daerah

Program kepegawaian daerah diarahkan pada pendistribusian ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui upaya pengadaan pegawai sesuai kebutuhan, pengembangan kompetensi ASN selaras dengan tujuan Pembangunan daerah, promosi dan mutasi berdasarkan kompetensi, penilaian dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel, pemberhentian ASN, serta menyediakan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase terpenuhinya formasi kebutuhan ASN dengan target capaian 91,7 persen, IP ASN Dimensi Kinerja dengan target capaian nilai 24,04, Persentase jabatan yang terisi sesuai syarat jabatan dengan target capaian 65 persen, dan IP ASN Dimensi Disiplin dengan target capaian nilai 4.995.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN serta menjamin mutu dan sertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Indeks Profesionalitas ADN DImensi Kompetensi dengan target capaian indeks 27,52 dan IP ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan dengan target capaian nilai 20,525.

5. Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program penelitian dan pengembangan daerah diarahkan pada pelaksanaan kajian potensi unggulan daerah dan pemanfaatan hasil kajian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan dengan target capaian 50 persen.

b. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program ini diorientasikan untuk kegiatan Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan potensi keberagaman inovasi Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah dengan target capaian 100 persen.

5.1.9. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program penyelenggaraan pengawasan diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini mendukung program prioritas Bupati **Sukoharjo Bersih dari Korupsi (SBK)**, serta mendukung penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 dengan target capaian 99,7 persen, Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP dengan target capaian 99,3 persen, Persentase OPD Yang Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP dengan target capaian 100 persen, dan Persentase PDTT Yang Selesai Ditangani dengan target capaian 100 persen.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi manajemen risiko, penguatan integritas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dengan target capaian 100 persen, Persentase Sakip Perangkat Daerah Kategori Minimal BB dengan target capaian 31 persen, Persentase Wajib Lapor LHKPN Yang Melapor dengan target capaian 100 persen dan Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah dengan target capaian indeks 3.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%

5.1.10. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan terhadap masyarakat desa dan kelurahan. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dengan target capaian 100 persen di semua Kecamatan

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase cakupan Tingkat Kinerja Indeks kepuasan masyarakat pada Pelayanan Umum dengan target capaian 89,65 persen di Kecamatan Weru, 88 di Kecamatan Bulu, 92 persen di Kecamatan Tawangsari, 90,5 persen di Kecamatan Nguter, 92,75 persen di Kecamatan Sukoharjo, 90,94 persen di Kecamatan Bendosari, 89 persen di Kecamatan Polokarto, 89,5 persen di Kecamatan Mojolaban, 100 persen di Kecamatan Grogol, 90,5 persen di Kecamatan Baki, 86,25 persen di Kecamatan Gatak, 86 persen di Kecamatan Kartasura.

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum diarahkan pada koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan target capaian 100 persen di semua Kecamatan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

e. Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat dengan target capaian 100 persen di semua Kecamatan.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase administrasi desa tepat waktu dengan target capaian 100 persen di semua Kecamatan.

5.1.11. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan diarahkan pada edukasi pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme; serta pembentukan kader bela negara. Program ini mendukung program prioritas **Sukoharjo Harmoni**. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaandengan target capaian 84 persen.

b. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

   Program ini diarahkan pada pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi dengan memfasilitasi pemenuhan atas apek kesetaraan dan kebebasan, serta pemantauan situasi politik guna stabilitas daerah. Program ini juga mendukung program prioritas **Sukoharjo Harmoni.** Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik dengan target capaian 86 persen.

c. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

   Program diarahkan pada fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif dengan target capaian 77 persen.

d. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

   Program ini diarahkan pada edukasi tentang kewaspadaan dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen Masyarakat dalam meminimalisir konflik dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan dengan target capaian 82 persen.

e. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

   Program ini diarahkan pada edukasi dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, social dan budaya. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan target capaian 88 persen.

5.3. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2027

Rencana pendanaan perangkat daerah merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Rencana pendanaan ini bertujuan untuk memberikan dukungan pendanaan kepada perangkat

daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat tercipta pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan transparan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo disajikan ke dalam Matrik Rencana Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5. 30 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. SUKOHARJO
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						**351.105.969.710,00**							**484.642.598.105,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**350.069.069.710,00**							**483.212.598.105,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**350.069.069.710,00**							**483.212.598.105,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**325.809.268.710,00**							**358.473.599.705,00**	
		-	-	-	-	-		325.809.268.710,00						-	358.473.599.705,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						79.165.000,00					-		84.000.000,00	
		-	-					79.165.000,00					-		84.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.100.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	61.165.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	3.350.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.450.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.100.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						61.165.000,00							65.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	61.165.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	65.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.100.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.450.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.450.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.100.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.350.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.350.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						320.385.443.000,00					-		353.125.959.000,00	
		-						320.385.443.000,00					-		353.125.959.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	8.500.000,00						-	8.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	3.100.459.000,00						-	3.100.459.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	317.259.484.000,00						-	350.000.000.000,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						317.259.484.000,00							350.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	4000 Orang/bulan	317.259.484.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	350.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3.100.459.000,00							3.100.459.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	3.100.459.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.100.459.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						8.500.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	8.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	8.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	2 Laporan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						97.400.000,00					-		138.000.000,00	
		-						97.400.000,00					-		138.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	13.000.000,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	79.400.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						13.000.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	13.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	13.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	130 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	30.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						79.400.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	1770 Orang	79.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	80.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						817.249.250,00					-		662.109.250,00	
		-						817.249.250,00					-		662.109.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	100.491.000,00						-	110.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	218.197.000,00						-	220.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	41.882.000,00						-	45.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.109.250,00						-	14.109.250,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	419.570.000,00						-	250.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					14.109.250,00							14.109.250,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	14.109.250,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	14.109.250,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						419.570.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	419.570.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						218.197.000,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	218.197.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	220.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						41.882.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	41.882.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	45.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	4 Laporan	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.491.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	100.491.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.135.125,00					-		25.000.000,00	
		-						24.135.125,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	24.135.125,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						24.135.125,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	3 Unit	24.135.125,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.128.921.835,00					-		3.146.344.955,00	
		-						3.128.921.835,00					-		3.146.344.955,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.031.344.955,00						-	1.031.344.955,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.084.936.880,00						-	2.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.640.000,00						-	15.000.000,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.640.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	12.640.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.031.344.955,00							1.031.344.955,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.031.344.955,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	1.031.344.955,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.084.936.880,00							2.100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.084.936.880,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.261.954.500,00					-		1.277.186.500,00	
		-						1.261.954.500,00					-		1.277.186.500,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	670.476.500,00						-	685.476.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	416.710.000,00						-	416.710.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	4.863.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	169.905.000,00						-	170.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						416.710.000,00							416.710.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	27 Unit	416.710.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	416.710.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.863.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	83 Unit	4.863.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						169.905.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	175 Unit	169.905.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	170.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						670.476.500,00							685.476.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	15 Unit	670.476.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	685.476.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**24.160.233.500,00**							**124.639.430.900,00**	
		-	-	-		-	-	24.160.233.500,00						-	124.639.430.900,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						12.356.111.500,00					-		63.145.007.500,00	
		-						12.356.111.500,00					-		63.145.007.500,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	260.500.000,00						-	260.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	-	643.775.000,00						-	643.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	216.800.000,00						-	216.800.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-		-	-	8.630.879.000,00						-	8.700.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	156.007.500,00						-	156.007.500,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	0,00						-	3.274.500.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	285.000.000,00						-	285.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	225.000.000,00						-	225.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	717.500.000,00						-	717.500.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	165.000.000,00						-	165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	478.000.000,00						-	498.000.000,00	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	266.000.000,00						-	266.000.000,00	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	0,00						-	47.000.000.000,00	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	100.100.000,00						-	515.375.000,00	
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	-	101.550.000,00						-	101.550.000,00	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					165.000.000,00							165.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	5 Unit	165.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	165.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						285.000.000,00							285.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	3 Ruang	285.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	285.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						0,00							0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	0 Ruang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						643.775.000,00							643.775.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	23 Paket	643.775.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	643.775.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						100.100.000,00							515.375.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	448 Peserta Didik	100.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	515.375.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						8.630.879.000,00							8.700.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-		-	896 Orang	8.630.879.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	8.700.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						216.800.000,00							216.800.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	2118 Orang	216.800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	216.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	447 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	20.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						0,00							47.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	0 Satuan Pendidikan	0,00	-	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	47.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						101.550.000,00							101.550.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	447 Orang	101.550.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	101.550.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	70 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	1 Konten Digital	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	70 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	20.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	20.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	1 Komunitas	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	20.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						156.007.500,00							156.007.500,00	
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	317 Paket	156.007.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	156.007.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						225.000.000,00							225.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	3 Ruang	225.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	225.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						478.000.000,00							498.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	3 Unit	478.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	498.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						266.000.000,00							266.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	448 Satuan Pendidikan	266.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	266.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						717.500.000,00							717.500.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	6 Ruang	717.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	717.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						0,00							3.274.500.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	0 Peserta Didik	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.274.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						260.500.000,00							260.500.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	6 Paket	260.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	260.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						3.275.399.400,00					-		39.266.700.400,00	
		-						3.275.399.400,00					-		39.266.700.400,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	85.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	37.463.000,00						-	37.463.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	12.500.000,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	12.500.000,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	37.462.600,00						-	37.462.600,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	37.612.200,00						-	37.612.200,00	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		-	-	2.464.699.000,00						-	2.500.000.000,00	
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	0,00						-	0,00	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	0,00						-	0,00	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	70.000.000,00						-	70.000.000,00	
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	37.462.600,00						-	37.462.600,00	
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	0,00						-	0,00	
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	0,00						-	0,00	
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	-	0,00						-	0,00	
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	-	0,00						-	0,00	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	62.000.000,00						-	18.000.000,00	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	0,00						-	36.000.000.000,00	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-		-	-	18.700.000,00						-	18.700.000,00	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium					0,00							0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	0 Ruang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah					0,00							0,00	
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					150.000.000,00							150.000.000,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	150.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					0,00							0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	0 Ruang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium					0,00							0,00	
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	0 Ruang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula					0,00							0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-		-	0 Ruang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir					0,00							0,00	
		Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					62.000.000,00							18.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	2 Unit	62.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	18.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah					0,00							0,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	0 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah					0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-		-	0 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						0,00							0,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	0 Peserta Didik	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	1360 Peserta Didik	100.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						2.464.699.000,00							2.500.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		-	260 Orang	2.464.699.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	246 Orang	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	20.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	82 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	30.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						0,00							36.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	0 Satuan Pendidikan	0,00	-	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	36.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						18.700.000,00							18.700.000,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-		-	82 Orang	18.700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	18.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						37.612.200,00							37.612.200,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	532 Orang	37.612.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	37.612.200,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						37.462.600,00							37.462.600,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	1 Konten Digital	37.462.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	37.462.600,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						37.462.600,00							37.462.600,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	350 Orang	37.462.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	37.462.600,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						12.500.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	12.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	12.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						12.500.000,00							12.500.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	1 Komunitas	12.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	12.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						37.463.000,00							37.463.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	37.463.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	37.463.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	82 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	70.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						0,00							0,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	0 Ruang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	0 Ruang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						85.000.000,00							85.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1 Paket	85.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	85.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						8.520.722.600,00					-		20.519.723.000,00	
		-						8.520.722.600,00					-		20.519.723.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-		-	-	170.000.000,00						-	170.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	12.500.000,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	131.105.000,00						-	131.105.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	0,00						-	12.000.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-		-	-	7.208.973.000,00						-	7.208.973.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	28.000.000,00						-	28.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	37.445.000,00						-	37.445.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	206.525.000,00						-	206.525.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	451.400.000,00						-	451.400.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-		-	-	138.774.600,00						-	137.775.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-		-	-	66.000.000,00						-	66.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						138.774.600,00							137.775.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	138.774.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	137.775.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD						0,00							0,00	
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-		-	0 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						0,00							0,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	0 Peserta Didik	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						7.208.973.000,00							7.208.973.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-		-	1508 Orang	7.208.973.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	7.208.973.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	244 Orang	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	20.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						131.105.000,00							131.105.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	385 Satuan Pendidikan	131.105.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	131.105.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						0,00							12.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	0 Satuan Pendidikan	0,00	-	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	12.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	1 Konten Digital	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	90 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						12.500.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	12.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	12.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	1 Komunitas	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						206.525.000,00							206.525.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	2 Ruang	206.525.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	206.525.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						28.000.000,00							28.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	4 Paket	28.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	28.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						66.000.000,00							66.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-		-	4 Unit	66.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	66.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						0,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						170.000.000,00							170.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-		-	6 Paket	170.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	170.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						37.445.000,00							37.445.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	651 Satuan Pendidikan	37.445.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	37.445.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						451.400.000,00							451.400.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	8 Ruang	451.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	451.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						8.000.000,00					-		1.708.000.000,00	
	-	-						8.000.000,00					-		1.708.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						0,00							0,00	
	1.01.02.2.04.0010	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	0 Peserta Didik	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						0,00							0,00	
	1.01.02.2.04.0015	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	0 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						8.000.000,00							8.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0016	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	3 Satuan Pendidikan	8.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	8.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						0,00							1.700.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0017	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	0 Satuan Pendidikan	0,00	-	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	1.700.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0,00							0,00	
	1.01.02.2.04.0025	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	0 Konten Digital	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
	1.01.02.2.04.0046	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	0 Peserta Didik	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0,00							0,00	
	1.01.02.2.04.0049	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**84.567.500,00**							**84.567.500,00**	
		-	-	-		-	-	84.567.500,00						-	84.567.500,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						24.617.500,00					-		24.617.500,00	
		-						24.617.500,00					-		24.617.500,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	-		-	-	24.617.500,00						-	24.617.500,00	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						24.617.500,00							24.617.500,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	-		-	182 Orang	24.617.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	24.617.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						59.950.000,00					-		59.950.000,00	
		-						59.950.000,00					-		59.950.000,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-		-	-	35.400.000,00						-	35.400.000,00	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-		-	-	24.550.000,00						-	24.550.000,00	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						24.550.000,00							24.550.000,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	24.550.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	24.550.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						35.400.000,00							35.400.000,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	35.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	35.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						15.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.036.900.000,00**							**1.430.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.036.900.000,00**							**1.430.000.000,00**	
5.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**986.900.000,00**							**1.355.000.000,00**	
		-	-	-	-	-		986.900.000,00						-	1.355.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						155.000.000,00					-		330.000.000,00	
		-						155.000.000,00					-		330.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	-	140.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-		-	-	15.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						140.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	2 Objek	140.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-		-	40 Orang	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	30.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						806.900.000,00					-		900.000.000,00	
		-						806.900.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	-	806.900.000,00						-	900.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						806.900.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	3 Objek	806.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	900.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		125.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		125.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-		-	-	20.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	-		-	-	5.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	-		-	30 Orang	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-		-	1 Unit	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**15.000.000,00**							**25.000.000,00**	
		-	-	-	-	-		15.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					-		25.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	-		-	-	15.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	-		-	2 Dokumen	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						35.000.000,00							50.000.000,00	
			-	-		-	-	35.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						17.000.000,00					-		25.000.000,00	
		-						17.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	-	17.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						17.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	1 Objek	17.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						18.000.000,00					-		25.000.000,00	
		-						18.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	-	18.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						18.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	2 Objek	18.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Kesehatan						**263.907.219.796,00**							**263.947.782.996,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**263.907.219.796,00**							**263.947.782.996,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**263.907.219.796,00**							**263.947.782.996,00**	
8.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**205.020.349.056,00**							**205.058.675.256,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	204.320.616.056,00						-	204.358.942.256,00	
			-	-		-	-	699.733.000,00						-	699.733.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.035.200,00					Peningktan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		63.932.000,00	
		-						55.035.200,00					Peningktan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		63.932.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	4.864.800,00						-	4.864.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	16.103.200,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	4.865.200,00						-	4.865.200,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	4.865.200,00						-	4.865.200,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	4.864.800,00						-	4.864.800,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	19.472.000,00						-	19.472.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.103.200,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	16.103.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.864.800,00							4.864.800,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	4.864.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.864.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.865.200,00							4.865.200,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	4.865.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.865.200,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.864.800,00							4.864.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	4.864.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.864.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.865.200,00							4.865.200,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	4.865.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.865.200,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.472.000,00							19.472.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	19.472.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	19.472.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						201.438.233.000,00					Peningkatan Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		201.438.233.000,00	
		-						201.438.233.000,00					Peningkatan Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		201.438.233.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	819.198.000,00						-	819.198.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	200.619.035.000,00						-	200.619.035.000,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						200.619.035.000,00							200.619.035.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1113 Orang/bulan	200.619.035.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	200.619.035.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						819.198.000,00							819.198.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	5000 Dokumen	819.198.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	819.198.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						126.384.000,00					Peningkatan Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		126.384.000,00	
		-						126.384.000,00					Peningkatan Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		126.384.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	116.400.000,00						-	116.400.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	9.984.000,00						-	9.984.000,00	
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.984.000,00							9.984.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	9.984.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	9.984.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						116.400.000,00							116.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	116.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	116.400.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						68.505.000,00					Peningkatan Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		68.505.000,00	
		-						68.505.000,00					Peningkatan Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		68.505.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	2.300.000,00						-	2.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	8.905.000,00						-	8.905.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	54.600.000,00						-	54.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	2.700.000,00						-	2.700.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						54.600.000,00							54.600.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	54.600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	54.600.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						2.300.000,00							2.300.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	2.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.300.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						8.905.000,00							8.905.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	8.905.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	8.905.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						2.700.000,00							2.700.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	100 Orang	2.700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.700.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						661.961.600,00					Peningkatan Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		658.397.600,00	
		-						661.961.600,00					Peningkatan Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		658.397.600,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	3.960.000,00						-	396.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	7.425.000,00						-	7.425.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	219.089.000,00						-	219.089.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	258.704.500,00						-	258.704.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	49.387.600,00						-	49.387.600,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	48.814.500,00						-	48.814.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	74.581.000,00						-	74.581.000,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						48.814.500,00							48.814.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	48.814.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	48.814.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						74.581.000,00							74.581.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	5 Paket	74.581.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	74.581.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						258.704.500,00							258.704.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	258.704.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	258.704.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						49.387.600,00							49.387.600,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	49.387.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	49.387.600,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.960.000,00							396.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	3.960.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	396.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.425.000,00							7.425.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	7.425.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	7.425.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						219.089.000,00							219.089.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	219.089.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	219.089.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						67.757.000,00					Peningkatan Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.750.000,00	
		-						67.757.000,00					Peningkatan Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.750.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	67.757.000,00						-	100.750.000,00	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						67.757.000,00							100.750.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	67.757.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	100.750.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.902.740.256,00					Peningkatan Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.902.740.656,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.902.740.256,00					Peningkatan Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.902.740.656,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	772.945.956,00						-	772.946.356,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.117.622.000,00						-	1.117.622.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	12.172.300,00						-	12.172.300,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.172.300,00							12.172.300,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	12.172.300,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	12.172.300,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						772.945.956,00							772.946.356,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	772.945.956,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	772.946.356,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.117.622.000,00							1.117.622.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.117.622.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	1.117.622.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						699.733.000,00					-		699.733.000,00	
		-						699.733.000,00					-		699.733.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	-	80.150.000,00						-	80.150.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	222.753.000,00						-	222.753.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	180.000.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	56.810.000,00						-	56.810.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	60.020.000,00						-	60.020.000,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	100.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						180.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	15 Unit	180.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	180.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						80.150.000,00							80.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	2 Unit	80.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	80.150.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						56.810.000,00							56.810.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	75 Unit	56.810.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	56.810.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						222.753.000,00							222.753.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	222.753.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	222.753.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						60.020.000,00							60.020.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	82 Unit	60.020.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	60.020.000,00	Dinas Kesehatan
9.	**1.02.02**					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**58.008.376.500,00**								**58.010.613.500,00**	
							Angka Keberhasilan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate)	-		-	89 %	52.369.919.021,00						-	52.372.149.021,00	
							Angka Keberhasilan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate)	-		-	100 %	15.954.800,00						-	15.954.800,00	
							Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	-		-	81.7 %	5.106.222.079,00						-	5.106.229.079,00	
							Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	-		-	40 %	52.385.873.821,00						-	52.388.103.821,00	
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	39.34 %	5.090.267.279,00						-	5.090.274.279,00	
							Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 %	532.235.400,00						-	532.235.400,00	
							Persentase ibu hamil risiko tinggi tertangani	-		-	100 %	57.460.186.300,00						-	57.462.423.300,00	
							Persentase kecamatan dengan proporsi non-hipertensi minimal 75%	-		-	66 %	5.090.267.279,00						-	5.090.274.279,00	
							Prevalensi wasting	-		-	5.15 %	57.460.186.300,00						-	57.462.423.300,00	
	1.02.02.2.01					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5.090.267.279,00					Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya		5.090.274.279,00	
						-						5.090.267.279,00					Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya		5.090.274.279,00	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	283.442.800,00						-	283.442.800,00	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	61.634.000,00						-	61.634.000,00	
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	-	35.993.000,00						-	36.000.000,00	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	125.264.840,00						-	125.264.840,00	
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	4.535.432.639,00						-	4.535.432.639,00	
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	0,00						-	0,00	
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	48.500.000,00						-	48.500.000,00	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.01.0006					Pengembangan Puskesmas						0,00							0,00	
						Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0007					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						125.264.840,00							125.264.840,00	
						Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	2 Unit	125.264.840,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	125.264.840,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0009					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						0,00							0,00	
						Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0010					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						48.500.000,00							48.500.000,00	
						Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	4 Unit	48.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	48.500.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						61.634.000,00							61.634.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	216 Unit	61.634.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	61.634.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						283.442.800,00							283.442.800,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	355 Unit	283.442.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	283.442.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						4.535.432.639,00							4.535.432.639,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	60 Paket	4.535.432.639,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.535.432.639,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						35.993.000,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	144 Paket	35.993.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	36.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						52.369.919.021,00					Penduduk Kabupaten Sukoharjo		52.372.149.021,00	
		-						52.369.919.021,00					Penduduk Kabupaten Sukoharjo		52.372.149.021,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	28.506.000,00						-	28.506.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	15.483.600,00						-	15.483.600,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	93.244.000,00						-	93.244.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-		-	-	5.758.000,00						-	5.758.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	-	47.583.062.388,00						-	47.583.062.388,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-		-	-	17.827.500,00						-	17.827.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	3.029.957.600,00						-	3.029.957.600,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	-	16.630.000,00						-	18.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	20.442.000,00						-	20.442.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	-	4.032.400,00						-	4.032.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	23.920.000,00						-	23.920.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	28.260.400,00						-	28.260.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	-	120.590.000,00						-	120.590.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	102.060.000,00						-	102.060.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	-	47.099.000,00						-	47.099.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	15.664.800,00						-	15.664.800,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	41.580.800,00						-	41.580.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	20.834.400,00						-	20.834.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	2.200.000,00						-	2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit dengue	-		-	-	98.180.000,00						-	98.180.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	9.500.000,00						-	9.500.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	9.000.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	162.268.400,00						-	162.268.400,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	27.570.000,00						-	27.570.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.994.000,00						-	4.994.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	-	24.502.000,00						-	24.502.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	3.002.400,00						-	3.002.400,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	1.707.200,00						-	1.707.200,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	5.772.800,00						-	5.772.800,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	9.167.200,00						-	9.167.200,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	228.123.600,00						-	228.123.600,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	13.648.000,00						-	13.648.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.458.400,00						-	4.458.400,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	-	530.313.133,00						-	530.313.133,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	15.559.000,00						-	15.559.000,00	
	1.02.02.2.02.2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						41.580.800,00							41.580.800,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	8908 Orang	41.580.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	41.580.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						15.664.800,00							15.664.800,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	8.477 Orang	15.664.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.664.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.2.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						93.244.000,00							93.244.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	8.008 Orang	93.244.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	93.244.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.2.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						15.483.600,00							15.483.600,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	38.223 Orang	15.483.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.483.600,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						28.506.000,00							28.506.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	114.317 Orang	28.506.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	28.506.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						13.648.000,00							13.648.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	561.820 Orang	13.648.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	13.648.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						228.123.600,00							228.123.600,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	133.921 Orang	228.123.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	228.123.600,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						9.167.200,00							9.167.200,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	222.950 Orang	9.167.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	9.167.200,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						5.772.800,00							5.772.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	16.305 Orang	5.772.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.772.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.002.400,00							3.002.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	1.824 Orang	3.002.400,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.002.400,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						27.570.000,00							27.570.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	10.225 Orang	27.570.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	27.570.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						162.268.400,00							162.268.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	11.057 Orang	162.268.400,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	162.268.400,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	1 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						17.827.500,00							17.827.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-		-	1 Dokumen	17.827.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	17.827.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						3.029.957.600,00							3.029.957.600,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	3.029.957.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.029.957.600,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						20.442.000,00							20.442.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	20.442.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	20.442.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						23.920.000,00							23.920.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	4 Dokumen	23.920.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	23.920.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						4.032.400,00							4.032.400,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-		-	1 Dokumen	4.032.400,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.032.400,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						28.260.400,00							28.260.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	28.260.400,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	28.260.400,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						4.458.400,00							4.458.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	5 Orang	4.458.400,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.458.400,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						47.583.062.388,00							47.583.062.388,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	47.583.062.388,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	47.583.062.388,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						120.590.000,00							120.590.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	9 Dokumen	120.590.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	120.590.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						102.060.000,00							102.060.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	1 Dokumen	102.060.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	102.060.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						47.099.000,00							47.099.000,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	93 Unit	47.099.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	47.099.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						5.758.000,00							5.758.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-		-	1 Dokumen	5.758.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.758.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						530.313.133,00							530.313.133,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-		-	1 Unit	530.313.133,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	530.313.133,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	1.650 Orang	9.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	9.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						9.500.000,00							9.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	1.055 Orang	9.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	9.500.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						24.502.000,00							24.502.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-		-	1000 Orang	24.502.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	24.502.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						16.630.000,00							18.860.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	-		-	1 Dokumen	16.630.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	18.860.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0051	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit dengue						98.180.000,00							98.180.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit dengue	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit dengue	-		-	1 Laporan	98.180.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	98.180.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						0,00							0,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	0 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						15.559.000,00							15.559.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	15.559.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.559.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.994.000,00							4.994.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	5.779 Orang	4.994.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.994.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						20.834.400,00							20.834.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	20.834.400,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	20.834.400,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						2.200.000,00							2.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	2.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.200.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						1.707.200,00							1.707.200,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	600 Orang	1.707.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	1.707.200,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						15.954.800,00					Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit		15.954.800,00	
		-						15.954.800,00					Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit		15.954.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	15.954.800,00						-	15.954.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						15.954.800,00							15.954.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	15.954.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.954.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						532.235.400,00					Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten		532.235.400,00	
		-						532.235.400,00					Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten		532.235.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-		-	-	442.556.400,00						-	442.556.400,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	-	35.630.000,00						-	35.630.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-		-	-	54.049.000,00						-	54.049.000,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						54.049.000,00							54.049.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-		-	44 Unit	54.049.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	54.049.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						35.630.000,00							35.630.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	123 Unit	35.630.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	35.630.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						442.556.400,00							442.556.400,00	
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-		-	1 Dokumen	442.556.400,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	442.556.400,00	Dinas Kesehatan
10.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**267.003.260,00**							**267.003.260,00**	
			Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	-		-	4.56 per 1000 penduduk	246.495.260,00						-	246.495.260,00	
			Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	-		-	4.56 per 1000 penduduk	20.508.000,00						-	20.508.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						20.508.000,00					Tenaga Kesehatan		20.508.000,00	
		-						20.508.000,00					Tenaga Kesehatan		20.508.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	-	20.508.000,00						-	20.508.000,00	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						20.508.000,00							20.508.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	2002 Dokumen	20.508.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	20.508.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						43.442.500,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten		43.442.500,00	
		-						43.442.500,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten		43.442.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	43.442.500,00						-	43.442.500,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan						43.442.500,00							43.442.500,00	
		Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	43.442.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	43.442.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						203.052.760,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten		203.052.760,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						203.052.760,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten		203.052.760,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	-	203.052.760,00						-	203.052.760,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						203.052.760,00							203.052.760,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	285 Orang	203.052.760,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	203.052.760,00	Dinas Kesehatan
11.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**73.237.880,00**							**73.237.880,00**	
			Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	-		-	93 %	73.237.880,00						-	73.237.880,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						10.494.240,00					Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		10.494.240,00	
		-						10.494.240,00					Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		10.494.240,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	-	10.494.240,00						-	10.494.240,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						10.494.240,00							10.494.240,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	148 Dokumen	10.494.240,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.494.240,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						11.480.000,00					Produsen Pangan Industri Rumah Tangga		11.480.000,00	
		-						11.480.000,00					Produsen Pangan Industri Rumah Tangga		11.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	-	11.480.000,00						-	11.480.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						11.480.000,00							11.480.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	90 Dokumen	11.480.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	11.480.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						31.875.800,00					Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		31.875.800,00	
		-						31.875.800,00					Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		31.875.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-		-	-	31.875.800,00						-	31.875.800,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						31.875.800,00							31.875.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-		-	1 Dokumen	31.875.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	31.875.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						19.387.840,00					Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		19.387.840,00	
		-						19.387.840,00					Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		19.387.840,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	-	19.387.840,00						-	19.387.840,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						19.387.840,00							19.387.840,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	257 Unit	19.387.840,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	19.387.840,00	Dinas Kesehatan
12.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**538.253.100,00**							**538.253.100,00**	
			Persentase Kecamatan dengan Peningkatan Aktivitas Fisik Cukup	-		-	58.33 %	165.592.900,00						-	165.592.900,00	
			-	-		-	-	372.660.200,00						-	372.660.200,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						45.920.400,00					Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten		45.920.400,00	
		-						45.920.400,00					Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten		45.920.400,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	45.920.400,00						-	45.920.400,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						45.920.400,00							45.920.400,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	6 Dokumen	45.920.400,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	45.920.400,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						119.672.500,00					Kader Kesehatan & Masyarakat		119.672.500,00	
		-						119.672.500,00					Kader Kesehatan & Masyarakat		119.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	119.672.500,00						-	119.672.500,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						119.672.500,00							119.672.500,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-		-	4 Dokumen	119.672.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	119.672.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						372.660.200,00					Petugas Puskesmas, Kader Kesehatan		372.660.200,00	
		-						372.660.200,00					Petugas Puskesmas, Kader Kesehatan		372.660.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	372.660.200,00						-	372.660.200,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						372.660.200,00							372.660.200,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	4 Dokumen	372.660.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	372.660.200,00	Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah						**101.800.000.000,00**							**113.603.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**101.800.000.000,00**							**113.603.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**101.800.000.000,00**							**113.603.000.000,00**	
13.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**100.000.000.000,00**							**110.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-	-	-		-	-	100.000.000.000,00						-	110.000.000.000,00	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						100.000.000.000,00					-		110.000.000.000,00	
		-						100.000.000.000,00					-		110.000.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	100.000.000.000,00						-	110.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						100.000.000.000,00							110.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	100.000.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	110.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
14.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.800.000.000,00**							**3.603.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	1.800.000.000,00						-	3.603.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.800.000.000,00					-		3.603.000.000,00	
		-						1.800.000.000,00					-		3.603.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	1.800.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	-	0,00						-	3.600.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.800.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	1.800.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						0,00							3.600.000.000,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.600.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
		Puskesmas Weru						**3.493.667.000,00**							**3.574.207.691,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.493.667.000,00**							**3.574.207.691,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.493.667.000,00**							**3.574.207.691,00**	
15.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.493.667.000,00**							**3.574.207.691,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	3.493.667.000,00						-	3.574.207.691,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.493.667.000,00					-		3.574.207.691,00	
		-						3.493.667.000,00					-		3.574.207.691,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	3.493.667.000,00						-	3.574.207.691,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.493.667.000,00							3.574.207.691,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	3.493.667.000,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.574.207.691,00	Puskesmas Weru
16.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
			Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	-		-	81,7 %	0,00						-	0,00	
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	-		-	40 %	0,00						-	0,00	
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	39,34 %	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Weru
		Puskesmas Bulu						**2.954.362.832,00**							**2.954.362.832,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.954.362.832,00**							**2.954.362.832,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.954.362.832,00**							**2.954.362.832,00**	
17.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.954.362.832,00**							**2.954.362.832,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	2.954.362.832,00						-	2.954.362.832,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.954.362.832,00					-		2.954.362.832,00	
		-						2.954.362.832,00					-		2.954.362.832,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	2.954.362.832,00						-	2.954.362.832,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.954.362.832,00							2.954.362.832,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	2.954.362.832,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.954.362.832,00	Puskesmas Bulu
18.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
			Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	-		-	81.7 %	0,00						-	0,00	
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	-		-	40 %	0,00						-	0,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	39,34 %	0,00						-	0,00	
			Prevalensi wasting	-		-	5.15 %	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Bulu
		Puskesmas Tawangsari						**4.135.000.000,00**							**4.062.475.716,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.135.000.000,00**							**4.062.475.716,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.135.000.000,00**							**4.062.475.716,00**	
19.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.135.000.000,00**							**4.062.475.716,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	4.135.000.000,00						-	4.062.475.716,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						4.135.000.000,00					-		4.062.475.716,00	
		-						4.135.000.000,00					-		4.062.475.716,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	4.135.000.000,00						-	4.062.475.716,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						4.135.000.000,00							4.062.475.716,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	4.135.000.000,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.062.475.716,00	Puskesmas Tawangsari
20.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
			Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	-		-	81.7 %	0,00						-	0,00	
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	39,34 %	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Tawangsari
		Puskesmas Sukoharjo						**4.525.030.000,00**							**4.097.716.404,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.525.030.000,00**							**4.097.716.404,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.525.030.000,00**							**4.097.716.404,00**	
21.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.525.030.000,00**							**4.097.716.404,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	4.525.030.000,00						-	4.097.716.404,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						4.525.030.000,00					-		4.097.716.404,00	
		-						4.525.030.000,00					-		4.097.716.404,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	4.525.030.000,00						-	4.097.716.404,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						4.525.030.000,00							4.097.716.404,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	4.525.030.000,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.097.716.404,00	Puskesmas Sukoharjo
22.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Sukoharjo
		Puskesmas Nguter						**3.448.411.000,00**							**3.367.670.987,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.448.411.000,00**							**3.367.670.987,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.448.411.000,00**							**3.367.670.987,00**	
23.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.448.411.000,00**							**3.367.670.987,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	3.448.411.000,00						-	3.367.670.987,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.448.411.000,00					-		3.367.670.987,00	
		-						3.448.411.000,00					-		3.367.670.987,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	3.448.411.000,00						-	3.367.670.987,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.448.411.000,00							3.367.670.987,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	3.448.411.000,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.367.670.987,00	Puskesmas Nguter
24.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
			Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	-		-	81,7 %	0,00						-	0,00	
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	39,34 %	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Nguter
		Puskesmas Bendosari						**2.978.842.711,00**							**2.978.842.711,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.978.842.711,00**							**2.978.842.711,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.978.842.711,00**							**2.978.842.711,00**	
25.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.978.842.711,00**							**2.978.842.711,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	2.978.842.711,00						-	2.978.842.711,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.978.842.711,00					-		2.978.842.711,00	
		-						2.978.842.711,00					-		2.978.842.711,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	2.978.842.711,00						-	2.978.842.711,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.978.842.711,00							2.978.842.711,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	2.978.842.711,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.978.842.711,00	Puskesmas Bendosari
26.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Bendosari
		Puskesmas Polokarto						**4.792.776.811,00**							**4.792.776.811,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.792.776.811,00**							**4.792.776.811,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.792.776.811,00**							**4.792.776.811,00**	
27.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.792.776.811,00**							**4.792.776.811,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	4.792.776.811,00						-	4.792.776.811,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						4.792.776.811,00					-		4.792.776.811,00	
		-						4.792.776.811,00					-		4.792.776.811,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	4.792.776.811,00						-	4.792.776.811,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						4.792.776.811,00							4.792.776.811,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	4.792.776.811,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.792.776.811,00	Puskesmas Polokarto
28.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Polokarto
		Puskesmas Mojolaban						**3.903.364.224,00**							**3.903.364.224,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.903.364.224,00**							**3.903.364.224,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.903.364.224,00**							**3.903.364.224,00**	
29.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.903.364.224,00**							**3.903.364.224,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	3.903.364.224,00						-	3.903.364.224,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.903.364.224,00					-		3.903.364.224,00	
		-						3.903.364.224,00					-		3.903.364.224,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	3.903.364.224,00						-	3.903.364.224,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.903.364.224,00							3.903.364.224,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	3.903.364.224,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.903.364.224,00	Puskesmas Mojolaban
30.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
		-	-	-	-	-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Mojolaban
		Puskesmas Grogol						**4.839.138.252,00**							**4.839.138.252,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.839.138.252,00**							**4.839.138.252,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.839.138.252,00**							**4.839.138.252,00**	
31.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.839.138.252,00**							**4.839.138.252,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	4.839.138.252,00						-	4.839.138.252,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						4.839.138.252,00					-		4.839.138.252,00	
		-						4.839.138.252,00					-		4.839.138.252,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	4.839.138.252,00						-	4.839.138.252,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						4.839.138.252,00							4.839.138.252,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	4.839.138.252,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	4.839.138.252,00	Puskesmas Grogol
32.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
		-	-	-	-	-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Grogol
		Puskesmas Baki						**3.652.882.026,00**							**3.652.882.026,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.652.882.026,00**							**3.652.882.026,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.652.882.026,00**							**3.652.882.026,00**	
33.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.652.882.026,00**							**3.652.882.026,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	3.652.882.026,00						-	3.652.882.026,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.652.882.026,00					-		3.652.882.026,00	
		-						3.652.882.026,00					-		3.652.882.026,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	3.652.882.026,00						-	3.652.882.026,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.652.882.026,00							3.652.882.026,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	3.652.882.026,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.652.882.026,00	Puskesmas Baki

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
34.	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
		-	-		-	-		0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Baki
		Puskesmas Gatak						**3.359.388.447,00**							**3.359.388.447,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.359.388.447,00**							**3.359.388.447,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.359.388.447,00**							**3.359.388.447,00**	
35.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.359.388.447,00**							**3.359.388.447,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	3.359.388.447,00						-	3.359.388.447,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.359.388.447,00					-		3.359.388.447,00	
		-						3.359.388.447,00					-		3.359.388.447,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	3.359.388.447,00						-	3.359.388.447,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.359.388.447,00							3.359.388.447,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	3.359.388.447,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.359.388.447,00	Puskesmas Gatak
36.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
		-	-		-	-		0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Gatak
		Puskesmas Kartasura						**3.630.100.000,00**							**3.400.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.630.100.000,00**							**3.400.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.630.100.000,00**							**3.400.000.000,00**	
37.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.630.100.000,00**							**3.400.000.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	3.630.100.000,00						-	3.400.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.630.100.000,00					-		3.400.000.000,00	
		-						3.630.100.000,00					-		3.400.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	3.630.100.000,00						-	3.400.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.630.100.000,00							3.400.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	0 Unit Kerja	3.630.100.000,00	-	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.400.000.000,00	Puskesmas Kartasura
38.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**0,00**							**0,00**	
		-	-		-	-		0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						0,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	0 Dokumen	0,00	-	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Puskesmas Kartasura
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						**66.106.915.119,69**							**65.741.477.227,69**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**65.926.915.119,69**							**65.561.477.227,69**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**65.926.915.119,69**							**65.561.477.227,69**	
39.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**25.543.127.185,00**							**25.389.189.293,00**	
		-	-	-	-	-	-	25.543.127.185,00						-	25.389.189.293,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						58.528.500,00					-		58.528.500,00	
		-						58.528.500,00					-		58.528.500,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.622.000,00						-	2.622.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	27.379.000,00						-	27.379.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.288.000,00						-	2.288.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.173.000,00						-	2.173.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.340.500,00						-	2.340.500,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	15.804.000,00						-	15.804.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	5.922.000,00						-	5.922.000,00	
	1.03.01.2.01001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						27.379.000,00							27.379.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	27.379.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	27.379.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.01002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.340.500,00							2.340.500,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.340.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.340.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.01003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.173.000,00							2.173.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	5 Dokumen	2.173.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.173.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.01004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.622.000,00							2.622.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.622.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.622.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.01005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.288.000,00							2.288.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	5 Dokumen	2.288.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.288.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.01006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.804.000,00							15.804.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	15.804.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	15.804.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.01007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.922.000,00							5.922.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	5.922.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	5.922.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.986.595.720,00					-		17.992.123.720,00	
		-						17.986.595.720,00					-		17.992.123.720,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	3.413.000,00						-	3.413.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	1.925.880,00						-	1.925.880,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.969.000,00						-	1.969.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	598.950.760,00						-	604.478.760,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.995.000,00						-	5.995.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	8.498.080,00					-	8.498.080,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	17.365.844.000,00					-	17.365.844.000,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.365.844.000,00							17.365.844.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	132 Orang/bulan	17.365.844.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	17.365.844.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						598.950.760,00							604.478.760,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	598.950.760,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	604.478.760,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.925.880,00							1.925.880,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	2 Dokumen	1.925.880,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.925.880,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.995.000,00							5.995.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	5 Laporan	5.995.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	5.995.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						3.413.000,00							3.413.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	1 Dokumen	3.413.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.413.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.498.080,00							8.498.080,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	8.498.080,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	8.498.080,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.969.000,00							1.969.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.969.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.969.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.729.000,00							3.729.000,00	
	-	-						3.729.000,00					-		3.729.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.382.000,00						-	1.382.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	2.347.000,00						-	2.347.000,00	
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.347.000,00							2.347.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	2.347.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.347.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.382.000,00							1.382.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	1.382.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.382.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						6.459.000,00					-		6.459.000,00	
	-	-						6.459.000,00					-		6.459.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	6.459.000,00						-	6.459.000,00	
	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						6.459.000,00							6.459.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	12 Dokumen	6.459.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	6.459.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						17.064.000,00					-		17.064.000,00	
	-	-						17.064.000,00					-		17.064.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	2.084.000,00						-	2.084.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	14.980.000,00						-	14.980.000,00	
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.084.000,00							2.084.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	12 Dokumen	2.084.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.084.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						14.980.000,00							14.980.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	240 Orang	14.980.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	14.980.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						722.981.100,00					-		721.181.100,00	
	-	-						722.981.100,00					-		721.181.100,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	200.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	4.900.000,00						-	4.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	52.722.000,00						-	52.722.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	233.889.000,00						-	233.889.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	12.362.000,00						-	12.362.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	19.349.600,00						-	19.349.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	60.350.000,00						-	60.350.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	332.908.500,00						-	332.908.500,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						19.349.600,00							19.349.600,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	19.349.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	19.349.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.350.000,00							60.350.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	60.350.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	60.350.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						332.908.500,00							332.908.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	332.908.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	332.908.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						233.889.000,00							233.889.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	233.889.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	233.889.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.362.000,00							12.362.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	12.362.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	12.362.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.500.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	4.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	4.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.900.000,00							4.900.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	3 Laporan	4.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	4.900.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						52.722.000,00							52.722.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	52.722.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	52.722.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							200.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	200.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.741.923.116,00					-		2.741.923.116,00	
		-						2.741.923.116,00					-		2.741.923.116,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.863.093.116,00						-	1.863.093.116,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	468.830.000,00						-	468.830.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	410.000.000,00						-	410.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						468.830.000,00							468.830.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	468.830.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	468.830.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						410.000.000,00							410.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	410.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	410.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.863.093.116,00							1.863.093.116,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	1.863.093.116,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.863.093.116,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.328.977.749,00					-		3.171.311.857,00	
		-						3.328.977.749,00					-		3.171.311.857,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	217.106.857,00						-	217.106.857,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.068.998.892,00						-	2.943.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	35.630.000,00						-	3.563.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	7.242.000,00						-	7.242.000,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.242.000,00							7.242.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	7.242.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	7.242.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						217.106.857,00							217.106.857,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	217.106.857,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	217.106.857,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.630.000,00							3.563.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	35.630.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.563.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.068.998.892,00							2.943.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	3.068.998.892,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.943.400.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						676.869.000,00					-		676.869.000,00	
		-						676.869.000,00					-		676.869.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	-	160.345.000,00						-	160.345.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	311.824.000,00						-	311.824.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.700.000,00						-	4.700.000,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						311.824.000,00							311.824.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	11 Unit	311.824.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	311.824.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						160.345.000,00							160.345.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-		-	34 Unit	160.345.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	160.345.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.700.000,00							4.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	9 Unit	4.700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	4.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	200.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**5.605.181.000,00**							**5.605.181.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	5.605.181.000,00						-	5.605.181.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						593.563.000,00					-		593.563.000,00	
		-						593.563.000,00					-		593.563.000,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	-		-	-	593.563.000,00						-	593.563.000,00	
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai						593.563.000,00							593.563.000,00	
		Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	-		-	0.7256 KM	593.563.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	593.563.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.011.618.000,00					-		5.011.618.000,00	
		-						5.011.618.000,00					-		5.011.618.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	2.421.618.000,00						-	2.421.618.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	-	2.590.000.000,00						-	2.590.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						2.590.000.000,00							2.590.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-		-	4,6556 KM	2.590.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.590.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						2.421.618.000,00							2.421.618.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	2,6147 KM	2.421.618.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.421.618.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
41.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**2.533.773.000,00**							**2.533.773.000,00**	
		-	-	-		-	-	2.533.773.000,00						-	2.533.773.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						2.533.773.000,00					-		2.533.773.000,00	
		-						2.533.773.000,00					-		2.533.773.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-		-	-	26.942.000,00						-	26.942.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-		-	-	2.506.831.000,00						-	2.506.831.000,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						26.942.000,00							26.942.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-		-	2 Dokumen	26.942.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	26.942.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						2.506.831.000,00							2.506.831.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-		-	7,5 Liter/Detik	2.506.831.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.506.831.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**738.828.000,00**							**738.828.000,00**	
		-	-	-		-	-	738.828.000,00						-	738.828.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						738.828.000,00					-		738.828.000,00	
		-						738.828.000,00					-		738.828.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	104.476.000,00						-	104.476.000,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	634.352.000,00						-	634.352.000,00	
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						104.476.000,00							104.476.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	3 Unit	104.476.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	104.476.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						634.352.000,00							634.352.000,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	40 M^3/Hari	634.352.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	634.352.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**19.777.908.737,00**							**19.777.908.737,00**	
		-	-	-		-	-	19.777.908.737,00						-	19.777.908.737,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						19.777.908.737,00					-		19.777.908.737,00	
		-						19.777.908.737,00					-		19.777.908.737,00	
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	-		-	-	19.777.908.737,00						-	19.777.908.737,00	
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan						19.777.908.737,00							19.777.908.737,00	
		Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	-		-	15 Sistem Drainase Lingkungan	19.777.908.737,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	19.777.908.737,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**10.492.835.197,69**							**10.492.835.197,69**	
		-	-	-		-	-	10.492.835.197,69						-	10.492.835.197,69	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						10.492.835.197,69					-		10.492.835.197,69	
		-						10.492.835.197,69					-		10.492.835.197,69	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	10.034.523.197,69						-	10.034.523.197,69	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	-	458.312.000,00						-	458.312.000,00	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						458.312.000,00							458.312.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	1200 Dokumen	458.312.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	458.312.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						10.034.523.197,69							10.034.523.197,69	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Bangunan Gedung	10.034.523.197,69	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	10.034.523.197,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
45.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**115.000.000,00**							**115.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	115.000.000,00						-	115.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						115.000.000,00							115.000.000,00	
		-						115.000.000,00						-	115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	115.000.000,00						-	115.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						115.000.000,00							115.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	115.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	115.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**153.158.000,00**							**153.158.000,00**	
		-	-	-		-	-	153.158.000,00						-	153.158.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						153.158.000,00							153.158.000,00	
		-						153.158.000,00						-	153.158.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	39.997.000,00						-	39.997.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-		-	-	113.161.000,00						-	113.161.000,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						113.161.000,00							113.161.000,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-		-	65 Orang	113.161.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	113.161.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						39.997.000,00							39.997.000,00	
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	40 Lembaga	39.997.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	39.997.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**967.104.000,00**							**755.604.000,00**	
		-	-	-		-	-	967.104.000,00						-	755.604.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						230.000.000,00							104.000.000,00	
		-						230.000.000,00						-	104.000.000,00	
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	140.000.000,00						-	14.000.000,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	40.000.000,00						-	40.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota						140.000.000,00							14.000.000,00	
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	140.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	14.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	40.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						305.000.000,00					-		305.000.000,00	
		-						305.000.000,00					-		305.000.000,00	
			Jumlah data SHP Peta Dasar	-		-	-	305.000.000,00						-	305.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar						305.000.000,00							305.000.000,00	
		Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	-		-	3 Peta	305.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	305.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						180.000.000,00					-		180.000.000,00	
		-						180.000.000,00					-		180.000.000,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	-		-	-	160.000.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-		-	5 Layanan	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						160.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	-		-	2 Dokumen	160.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	160.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						252.104.000,00					-		166.604.000,00	
		-						252.104.000,00					-		166.604.000,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-		-	-	95.000.000,00						-	9.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-		-	-	8.974.000,00						-	8.974.000,00	
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	-		-	-	48.130.000,00						-	48.130.000,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						8.974.000,00							8.974.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-		-	1 Dokumen	8.974.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	8.974.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	-		-	1 Kasus	100.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						95.000.000,00							9.500.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-		-	1 Dokumen	95.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	9.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang						48.130.000,00							48.130.000,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	-		-	3 Laporan	48.130.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	48.130.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**180.000.000,00**							**180.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**180.000.000,00**							**180.000.000,00**	
48.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**10.000.000,00**							**10.000.000,00**	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000,00								10.000.000,00	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Berita Acara	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**25.000.000,00**							**25.000.000,00**	
			-	-	-	-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		25.000.000,00	
		-	-					25.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
			-	-	-	-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-	-					15.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	-	-	-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
51.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						**130.000.000,00**							**130.000.000,00**	
			-	-	-	-	-	130.000.000,00						-	130.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						130.000.000,00					-		130.000.000,00	
		-	-					130.000.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	130.000.000,00						-	130.000.000,00	
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						130.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Laporan	130.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	130.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						**9.808.582.000,00**							**8.186.464.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.808.582.000,00**							**8.186.464.700,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**9.808.582.000,00**							**8.186.464.700,00**	
52.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.393.499.000,00**							**7.071.833.000,00**	
			-	-	-	-	-	6.393.499.000,00						-	7.071.833.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.000.000,00					Masyarakat Sukoharjo		28.700.000,00	
		-	-					28.000.000,00					Masyarakat Sukoharjo		28.700.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	2.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	20.000.000,00						-	22.700.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	2.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	2.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.000.000,00						-	1.500.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							22.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	22.700.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.476.146.000,00					-		6.369.889.000,00	
		-						5.476.146.000,00					-		6.369.889.000,00	
		-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	219.000.000,00						-	219.150.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.253.146.000,00						-	6.147.739.000,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.253.146.000,00							6.147.739.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	42 orang ASN Orang/bulan	5.253.146.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	6.147.739.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						219.000.000,00							219.150.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	219.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	219.150.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		4.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	2.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	2.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.04.01.2.05003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	5 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.05005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.05011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	61 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						128.990.000,00					-		104.186.000,00	
		-						128.990.000,00					-		104.186.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	3.990.000,00						-	3.990.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	2.225.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	2.500.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	50.000.000,00						-	41.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	42.488.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	10.983.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.500.000,00						-	2.000.000,00	
	1.04.01.2.06002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							42.488.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	50 Paket	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	42.488.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							10.983.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	10.983.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.990.000,00							3.990.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	3 Dokumen	3.990.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.990.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	6 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00							41.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	41.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000,00							2.225.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	100 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.225.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						559.963.000,00					-		545.518.000,00	
		-						559.963.000,00					-		545.518.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	115.000.000,00						-	94.850.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	430.463.000,00						-	437.668.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	4.500.000,00						-	3.000.000,00	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						115.000.000,00							94.850.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	115.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	94.850.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	10.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						430.463.000,00							437.668.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	430.463.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	437.668.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						195.400.000,00					-		19.540.000,00	
		-						195.400.000,00					-		19.540.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	195.400.000,00						-	19.540.000,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						195.400.000,00							19.540.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	16 Unit	195.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	19.540.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
53.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**167.500.000,00**							**113.417.000,00**	
		-	-	-		-	-	167.500.000,00						-	113.417.000,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						40.000.000,00					-		1.200.000,00	
		-						40.000.000,00					-		1.200.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-		-	-	40.000.000,00						-	1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						40.000.000,00							1.200.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-		-	2 Unit Rumah	40.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.200.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						85.000.000,00					-		77.262.000,00	
		-						85.000.000,00					-		77.262.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-		-	-	85.000.000,00						-	77.262.000,00	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						85.000.000,00							77.262.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-		-	12 Dokumen	85.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	77.262.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						42.500.000,00					-		34.955.000,00	
		-						42.500.000,00					-		34.955.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	-		-	-	42.500.000,00						-	34.955.000,00	
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum						42.500.000,00							34.955.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	-		-	12 Laporan	42.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	34.955.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
54.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**50.915.000,00**							**8.291.500,00**	
		-	-	-		-	-	50.915.000,00						-	8.291.500,00	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						17.500.000,00					-		1.250.000,00	
		-						17.500.000,00					-		1.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	-		-	-	17.500.000,00						-	1.250.000,00	
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman						17.500.000,00							1.250.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	-		-	12 Laporan	17.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.250.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						33.415.000,00					-		7.041.500,00	
		-						33.415.000,00					-		7.041.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-		-	-	20.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	-		-	-	13.415.000,00						-	5.541.500,00	
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						20.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-		-	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.13.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						13.415.000,00							5.541.500,00	
		Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	-		-	20 Ha	13.415.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	5.541.500,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
55.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**1.644.168.000,00**							**327.235.000,00**	
		-	-	-		-	-	1.644.168.000,00						-	327.235.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						1.644.168.000,00					-		327.235.000,00	
		-						1.644.168.000,00					-		327.235.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-		-	-	1.644.168.000,00						-	327.235.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1.644.168.000,00							327.235.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-		-	1261 Unit Rumah	1.644.168.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	327.235.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
56.	1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**1.552.500.000,00**							**665.688.200,00**	
			-	-	-	-		1.552.500.000,00						-	665.688.200,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						1.552.500.000,00					-		665.688.200,00	
			-					1.552.500.000,00					-		665.688.200,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	-		-	-	7.500.000,00						-	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-		-	-	10.000.000,00						-	800.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-		-	-	95.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-		-	-	40.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	-	400.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	-	1.000.000.000,00						-	251.888.200,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						10.000.000,00							800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	800.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						95.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-		-	12 Laporan	95.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan						7.500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	-		-	5 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						40.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-		-	20 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	11.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						1.000.000.000,00							251.888.200,00	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	14 Lokasi	1.000.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	251.888.200,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	4 Lokasi	400.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Satuan Polisi Pamong Praja						**15.980.493.900,00**							**15.624.250.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.980.493.900,00**							**15.624.250.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**15.980.493.900,00**							**15.624.250.000,00**	
57.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.548.993.900,00**							**12.652.250.000,00**	
			-	-	-	-		13.548.993.900,00						-	12.652.250.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.500.000,00					-		36.500.000,00	
			-					32.500.000,00					-		36.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	17.000.000,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.000.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	17.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	18.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	3.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.225.500.000,00					-		9.237.000.000,00	
		-						9.225.500.000,00					-		9.237.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	220.000.000,00						-	230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	9.000.000.000,00						-	9.000.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.000.000.000,00							9.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	85 Orang/bulan	9.000.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.000.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						220.000.000,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	20 Dokumen	220.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	230.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	2 Laporan	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						9.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	4.000.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	3.000.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	155 Paket	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3.000.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	6 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						4.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	12 Dokumen	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	25 Orang	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						171.993.900,00					-		194.250.000,00	
		-						171.993.900,00					-		194.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	3.300.000,00						-	3.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	100.693.900,00						-	110.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	7.500.000,00						-	8.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	3.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.500.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	25 Paket	7.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.693.900,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	100.693.900,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	110.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	5 Paket	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.300.000,00							3.250.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	3.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	12 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.017.000.000,00					-		32.000.000,00	
		-						1.017.000.000,00					-		32.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	20.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	2 Unit	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	21 Unit	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.000.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.747.000.000,00					-		2.782.500.000,00	
		-						2.747.000.000,00					-		2.782.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.720.000.000,00						-	2.750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.720.000.000,00							2.750.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.720.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.750.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						346.000.000,00					-		360.000.000,00	
		-						346.000.000,00					-		360.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	67.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	235.000.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	44.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						235.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	21 Unit	235.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	240.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						67.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	29 Unit	67.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						44.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	44.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
58.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.220.000.000,00**							**2.720.000.000,00**	
			-	-		-	-	2.220.000.000,00						-	2.720.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.750.000.000,00					-		2.575.000.000,00	
		-						1.750.000.000,00					-		2.575.000.000,00	
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	-	0,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	-	10.000.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	0,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	-	0,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	700.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	-	65.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-		-	-	850.000.000,00						-	850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	6 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						700.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	12 Dokumen	700.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						10.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	4 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-		-	240.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-		-	3 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-		-	500 Orang	100.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						850.000.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalanangan, dan Peneawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-		-	12 laporan	850.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	850.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	12 Laporan	65.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						0,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	12 Dokumen	0,00	-	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum						0,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	12 Dokumen	0,00	-	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	65.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						0,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	50 Orang	0,00	-	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	55.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						460.000.000,00					-		130.000.000,00	
		-						460.000.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	70.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	-	365.000.000,00						-	30.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	1 Laporan	70.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						365.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	5 Laporan	365.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						25.000.000,00							30.000.000,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
59.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**211.500.000,00**							**252.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	211.500.000,00						-	252.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						170.000.000,00					-		205.000.000,00	
		-						170.000.000,00					-		205.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	-	80.000.000,00						-	90.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	55.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						10.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	12 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-		-	4 Orang	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						80.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	8 Unit	80.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	90.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	15 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						6.000.000,00					-		8.000.000,00	
		-						6.000.000,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	6 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	6 Laporan	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						23.000.000,00					-		25.000.000,00	
		-						23.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	-	18.000.000,00						-	19.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						18.000.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	600 Orang	18.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	19.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-		-	2 Desa/Kelurahan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						12.500.000,00					-		14.000.000,00	
		-						12.500.000,00					-		14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	-		-	-	7.500.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						7.500.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	-		-	12 Laporan	7.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	-		-	5 Unit	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**3.195.936.000,00**							**3.843.795.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.195.936.000,00**							**3.843.795.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.195.936.000,00**							**3.843.795.000,00**	
60.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.525.613.000,00**							**2.631.865.000,00**	
			-	-	-	-	-	2.525.613.000,00						-	2.631.865.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.436.000,00					-		25.500.000,00	
		-						19.436.000,00					-		25.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	995.000,00						-	1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	12.706.000,00						-	15.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	795.000,00						-	1.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	795.000,00						-	1.500.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	995.000,00						-	1.500.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.100.000,00						-	3.000.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.050.000,00						-	1.500.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12.706.000,00							15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	12.706.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						995.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	995.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						795.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	795.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						995.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	995.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						795.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	795.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.100.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	2.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.050.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	1.050.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.083.865.000,00					-		2.089.515.000,00	
		-						2.083.865.000,00					-		2.089.515.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	84.380.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	970.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	1.998.515.000,00						-	1.998.515.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.998.515.000,00							1.998.515.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	16 Orang/bulan	1.998.515.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.998.515.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						84.380.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	84.380.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	90.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						970.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	970.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.020.000,00					-		13.000.000,00	
		-						11.020.000,00					-		13.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	3.870.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	7.150.000,00						-	8.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						7.150.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	21 Paket	7.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	8.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						3.870.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	21 Orang	3.870.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						60.122.000,00					-		94.450.000,00	
		-						60.122.000,00					-		94.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	170.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	22.150.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.982.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.013.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	967.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.500.000,00						-	1.750.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	3.340.000,00						-	3.500.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						967.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	30 Paket	967.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.500.000,00							1.750.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.750.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.340.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.340.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.982.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	50 Paket	30.982.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.013.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2500 Paket	1.013.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						170.000,00							1.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	170.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.200.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						22.150.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	50 Laporan	22.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	35.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						208.650.000,00					-		214.400.000,00	
		-						208.650.000,00					-		214.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	157.400.000,00						-	157.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	750.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1000 Laporan	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						750.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Laporan	750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						157.400.000,00							157.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	157.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	157.400.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						137.520.000,00					-		180.000.000,00	
		-						137.520.000,00					-		180.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.520.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	88.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	46.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						46.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	46.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						88.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	88.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.520.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.520.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
61.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**670.323.000,00**								
		-	-	-		-	-	670.323.000,00						-	1.211.930.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						21.760.000,00					-		310.000.000,00	
		-						21.760.000,00					-		310.000.000,00	
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	5.000.000,00						-	205.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	-	16.760.000,00						-	105.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						16.760.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	600 Orang	16.760.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	105.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						5.000.000,00							205.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	205.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						396.217.000,00					-		566.000.000,00	
		-						396.217.000,00					-		566.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	8.924.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	2.750.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	4.448.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	-	45.195.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	-	18.415.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-		-	-	18.400.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-		-	-	192.860.000,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	-	56.350.000,00					-	135.000.000,00	
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-		-	-	10.880.000,00					-	11.000.000,00	
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	18.750.000,00					-	50.000.000,00	
		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	-	19.245.000,00					-	20.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						18.415.000,00							60.000.000,00	
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	9 Kegiatan	18.415.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	60.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						56.350.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	25 Unit	56.350.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	135.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						19.245.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	19.245.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						18.400.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-		-	36 Keluarga	18.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						45.195.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	3 Kawasan	45.195.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						10.880.000,00							11.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-		-	21 Orang	10.880.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	11.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						8.924.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	8.924.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						4.448.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	4.448.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						192.860.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-		-	12 laporan	192.860.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						2.750.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	2.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						18.750.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	50 Orang	18.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						209.191.000,00					-		242.200.000,00	
		-						209.191.000,00					-		242.200.000,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-		-	-	1.850.000,00						-	3.700.000,00	
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	-		-	-	4.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	-	16.835.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	-	45.428.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	-	134.788.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-		-	-	400.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	-	4.890.000,00						-	5.500.000,00	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						400.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-		-	1 Laporan	400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						16.835.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	2 Dokumen	16.835.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						134.788.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	1985 Orang	134.788.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota						4.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						1.850.000,00							3.700.000,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	-		-	1 Orang	1.850.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.700.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						45.428.000,00							50.000.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	1985 Orang	45.428.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit						500.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-		-	1 Dokumen	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						4.890.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	1 Laporan	4.890.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	5.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						43.155.000,00					-		93.730.000,00	
		-						43.155.000,00					-		93.730.000,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	-	17.980.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	-		-	-	750.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	-		-	-	355.000,00						-	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-		-	-	14.835.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-		-	-	525.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	-		-	-	750.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-		-	-	750.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	4.300.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	1.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	300.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	-	370.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	-		-	-	740.000,00						-	1.480.000,00	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						525.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-		-	2 Dokumen	525.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						14.835.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-		-	1 Dokumen	14.835.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	35.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						750.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	-		-	1 Dokumen	750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						750.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-		-	1 Laporan	750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						740.000,00							1.480.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	-		-	1 Orang	740.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.480.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						17.980.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	50 Orang	17.980.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						370.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	1 Kegiatan	370.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						750.000,00							1.500.000,00	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	-		-	1 Lembaga	750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota						355.000,00							750.000,00	
		Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	-		-	1 Laporan	355.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	750.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						4.300.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	4.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	5.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						1.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota						300.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tanggeuh Bencana		-	1.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Sosial						**17.889.976.940,00**							**15.193.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.889.976.940,00**							**15.193.500.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**17.889.976.940,00**							**15.193.500.000,00**	
62.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.221.747.440,00**							**7.029.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	7.221.747.440,00						-	7.029.000.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.775.000,00					-		35.000.000,00	
		-						27.775.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	285.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	285.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	285.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	285.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.635.000,00						-	2.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						285.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	285.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						285.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	285.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						285.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	285.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						285.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	285.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.635.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	1.635.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.482.670.000,00					-		5.950.149.000,00	
		-						5.482.670.000,00					-		5.950.149.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	237.480.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.243.190.000,00						-	5.686.149.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.243.190.000,00							5.686.149.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	33 Orang/bulan	5.243.190.000,00	-	-	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.686.149.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						237.480.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	237.480.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	250.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	9.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.640.000,00					-		6.000.000,00	
		-						3.640.000,00					-		6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	1.320.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.320.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.320.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	12 Dokumen	1.320.000,00	-	-	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.320.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	12 Dokumen	1.320.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	10 Orang	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						76.728.500,00					-		284.600.000,00	
		-						76.728.500,00					-		284.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	53.917.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.959.500,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.852.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	3.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.852.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.852.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	4.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00							3.600.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	6 Paket	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.600.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.959.500,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	14.959.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	80.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	500 Paket	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	3 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	4.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						53.917.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	110 Laporan	53.917.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	80.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	3 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.146.770.740,00					-		288.000.000,00	
		-						1.146.770.740,00					-		288.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	151.700.000,00						-	103.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	994.070.740,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						151.700.000,00							103.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	151.700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	103.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						994.070.740,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	24 Laporan	994.070.740,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	180.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						484.163.200,00					-		465.251.000,00	
		-						484.163.200,00					-		465.251.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	61.018.200,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	421.245.000,00						-	390.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	900.000,00						-	19.251.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.000.000,00						-	6.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						421.245.000,00							390.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	62 Unit	421.245.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	390.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						900.000,00							19.251.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	2 Unit	900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	19.251.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	6.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						61.018.200,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	61.018.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	50.000.000,00	Dinas Sosial
63.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**417.500.000,00**							**218.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	417.500.000,00						-	218.000.000,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-		-	35 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						416.500.000,00					-		213.000.000,00	
		-						416.500.000,00					-		213.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	63.500.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	102.000.000,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	201.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	100 Keluarga	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						63.500.000,00							35.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3 Lembaga	63.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	35.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	-		-	13 Orang	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	-		-	114 Orang	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	15.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						201.000.000,00							120.000.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	135 Orang	201.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	120.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						102.000.000,00							13.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	100 Orang	102.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	13.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	50 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	-		-	20 orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Sosial
64.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**1.000.000,00**							**6.500.000,00**	
			-	-		-	-	1.000.000,00						-	6.500.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						1.000.000,00					-		6.500.000,00	
		-						1.000.000,00					-		6.500.000,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.000.000,00						-	6.500.000,00	
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						1.000.000,00							6.500.000,00	
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	5 Orang	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	6.500.000,00	Dinas Sosial
65.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**4.034.442.500,00**							**302.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-	-	-		-	-	4.034.442.500,00						-	302.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						3.887.600.000,00					-		291.000.000,00	
		-						3.887.600.000,00					-		291.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	24.020.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	3.384.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	29.640.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	15.720.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	19.000.000,00						-	56.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	15.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	172.570.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	157.650.000,00						-	56.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	12.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	12.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						29.640.000,00							60.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	29.640.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	60.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						19.000.000,00							56.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	19.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	56.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						172.570.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	500 Orang	172.570.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	80.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						157.650.000,00							56.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	450 Orang	157.650.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	56.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						3.384.000.000,00							1.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1000 Orang	3.384.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						10.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						30.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						15.720.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	15.720.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						24.020.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	24.020.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						15.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan						10.000.000,00							1.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	5 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						146.842.500,00						-		11.000.000,00	
		-						146.842.500,00						-		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-		-	-	26.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	11.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	11.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	15.450.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	11.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	11.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	11.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	17.392.500,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	11.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	11.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	11.000.000,00						-	1.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						11.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	11.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan						15.450.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	55 Orang	15.450.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan						17.392.500,00							1.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	55 Orang	17.392.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang						11.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	11.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti						11.000.000,00							1.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	11.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						11.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	11.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						11.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	11.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						11.000.000,00							1.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	7 Orang	11.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						11.000.000,00							1.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2 Orang	11.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan						11.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	8 Orang	11.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						26.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-		-	6 Dokumen	26.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Sosial
66.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**6.019.887.000,00**							**7.406.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	6.019.887.000,00						-	7.406.000.000,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						79.115.000,00							82.500.000,00	
		-						79.115.000,00						-	82.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	28.079.000,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	12.892.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	13.144.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	-		-	-	25.000.000,00						-	20.000.000,00	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar						28.079.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	28.079.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	12.500.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar						12.892.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	11 Orang	12.892.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar						13.144.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	11 Orang	13.144.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.01.0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi						25.000.000,00							20.000.000,00	
		Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	-		-	10 Orang	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						5.940.772.000,00					-		7.323.500.000,00	
		-						5.940.772.000,00					-		7.323.500.000,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-		-	-	359.600.000,00						-	467.100.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.462.300.000,00						-	6.576.400.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	-	118.872.000,00						-	280.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						359.600.000,00							467.100.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	-		-	38400 Orang	359.600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	467.100.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						5.462.300.000,00							6.576.400.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2200 Orang	5.462.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	6.576.400.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						118.872.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	5000 Usulan	118.872.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	280.000.000,00	Dinas Sosial
67.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**140.400.000,00**							**155.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	140.400.000,00						-	155.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						55.000.000,00					-		123.000.000,00	
		-						55.000.000,00					-		123.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	6.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	8.500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	7.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	29.500.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	4.000.000,00						-	8.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						29.500.000,00							65.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	29.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	65.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						8.500.000,00							10.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	12 Orang	8.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						7.000.000,00							30.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	12 Orang	7.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						6.000.000,00							10.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	6.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						4.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	8.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						85.400.000,00					-		32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						85.400.000,00					-		32.000.000,00	
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	14.500.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	66.900.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						14.500.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1 Kampung	14.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	8.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						66.900.000,00							20.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	14 Orang	66.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	20.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0004	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	5 Orang	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	-		-	30 Orang	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Sosial
68.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**55.000.000,00**							**77.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	55.000.000,00						-	77.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						55.000.000,00					-		77.000.000,00	
		-						55.000.000,00					-		77.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	-	15.000.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	22.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Polokarto || Desa Bakalan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	0,00	Dinas Sosial
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						10.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-		-	1 Makam	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Polokarto || Desa Bakalan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	22.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						15.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Polokarto || Desa Bakalan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	55.000.000,00	Dinas Sosial
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						**9.101.074.645,00**							**4.330.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.101.074.645,00**							**4.330.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**7.904.474.645,00**							**2.945.000.000,00**	
69.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.844.867.645,00**							**1.810.000.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 Persen	6.844.867.645,00						-	1.810.000.000,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.805.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		65.000.000,00	
		-						40.805.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.480.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	33.345.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.480.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.150.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.350.000,00						-	5.000.000,00	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						33.345.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	33.345.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	35.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.480.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.480.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.480.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.480.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.150.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	1.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.350.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	1.350.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.403.146.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		290.000.000,00	
		-						5.403.146.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		290.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	266.280.000,00						-	270.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.490.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.490.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.133.886.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.133.886.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	25 Orang/bulan	5.133.886.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						266.280.000,00							270.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	266.280.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	270.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.490.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	3 Laporan	1.490.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.490.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	3 Laporan	1.490.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		10.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.01.2.02.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						100.299.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		120.000.000,00	
		-						100.299.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.250.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	30.030.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	54.712.500,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.689.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.500,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	8.617.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.500,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.617.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.617.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						54.712.500,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	54.712.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	55.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.689.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.689.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.250.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	1.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.030.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	30.030.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	35.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						56.584.295,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		65.000.000,00	
		-						56.584.295,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		65.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	25.639.750,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	30.944.545,00						-	35.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						25.639.750,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	3 Unit	25.639.750,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.944.545,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	30.944.545,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	35.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						961.906.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		970.000.000,00	
		-						961.906.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		970.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	121.150.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	840.756.000,00						-	845.000.000,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						121.150.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	121.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	125.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						840.756.000,00							845.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	840.756.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	845.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						277.127.350,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		290.000.000,00	
		-						277.127.350,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		290.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	41.244.840,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknya	-		-	-	218.782.510,00						-	220.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	12.100.000,00						-	15.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						218.782.510,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	218.782.510,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	220.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.244.840,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	41.244.840,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	45.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.100.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	12.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
70.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**377.547.000,00**							**390.000.000,00**	
			Persentase Anggaran Responsif Gender	-		-	4,95 Persen	377.547.000,00						-	390.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						10.630.000,00					OPD Se Kabupaten Sukoharjo		15.000.000,00	
		-						10.630.000,00					OPD Se Kabupaten Sukoharjo		15.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	-	4.830.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-		-	-	5.800.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						4.830.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	1 Laporan	4.830.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.01.0018	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						5.800.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	5.800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						5.570.000,00					Organisasi Wanita dan Organisasi Kemasyarakatan		10.000.000,00	
		-						5.570.000,00					Organisasi Wanita dan Organisasi Kemasyarakatan		10.000.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	5.570.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						5.570.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	27 Lembaga	5.570.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						361.347.000,00					Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		365.000.000,00	
		-						361.347.000,00					Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		365.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	-	254.797.000,00						-	255.000.000,00	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	106.550.000,00						-	110.000.000,00	
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						106.550.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	27 Lembaga	106.550.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	110.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.03.0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota						254.797.000,00							255.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	1 Dokumen	254.797.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	255.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
71.	2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**15.560.000,00**							**25.000.000,00**	
			Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-		-	13,55 Rasio	15.560.000,00						-	25.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						6.450.000,00					Jejaring Layanan Perlindungan Perempuan		10.000.000,00	
		-						6.450.000,00					Jejaring Layanan Perlindungan Perempuan		10.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	6.450.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						6.450.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	1 Kegiatan	6.450.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						2.000.000,00					Korban Kekerasan Terhadap Perempuan		5.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Korban Kekerasan Terhadap Perempuan		5.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						7.110.000,00					Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak ; Organisasi Wanita		10.000.000,00	
		-						7.110.000,00					Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak ; Organisasi Wanita		10.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	4.300.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	2.810.000,00						-	5.000.000,00	
	2.08.03.2.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						4.300.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	1 Dokumen	4.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						2.810.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	24 Lembaga	2.810.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
72.	2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**514.250.000,00**							**515.000.000,00**	
			Proporsi keluarga yang mendapatkan layanan dari Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sesuai kebutuhan	-		-	55 Persen	514.250.000,00						-	515.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						309.400.000,00					Masyarakat Umum di Kecamatan ; Organisasi Wanita		310.000.000,00	
		-						309.400.000,00					Masyarakat Umum di Kecamatan ; Organisasi Wanita		310.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	104.450.000,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	204.950.000,00						-	205.000.000,00	
	2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						104.450.000,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-		-	24 Lembaga	104.450.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	105.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetaokan oleh pemerintah.						204.950.000,00							205.000.000,00		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	150 Orang	204.950.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	205.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						204.850.000,00					Lembaga Penyedia Layanan PP		205.000.000,00	
		-						204.850.000,00					Lembaga Penyedia Layanan PP		205.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	-	204.850.000,00						-	205.000.000,00	
	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota						204.850.000,00							205.000.000,00	
		Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	52 Orang	204.850.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	205.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
73.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**2.250.000,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase Ketersediaan Sistem Data Gender dan Anak yang terintegrasi di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	62 Persen	2.250.000,00						-	5.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.250.000,00					OPD Terkait dan Instansi terkait (BPS, Pengadilan Agama, Polres, Kejaksaan)		5.000.000,00	
		-						2.250.000,00					OPD Terkait dan Instansi terkait (BPS, Pengadilan Agama, Polres, Kejaksaan)		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	-	2.250.000,00						-	5.000.000,00	
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota						2.250.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	1 Dokumen	2.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
74.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**130.000.000,00**							**155.000.000,00**	
			Indeks Pemenuhan Hak Anak	-		-	63,65 Persen	125.000.000,00						-	145.000.000,00	
			Indeks Pemenuhan Hak Anak	-		-	63,65 Persen	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00					Lembaga Pemerintah, Dunia Usaha, OPD, Tim Gugus Tugas		10.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Lembaga Pemerintah, Dunia Usaha, OPD, Tim Gugus Tugas		10.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.06.2.01.0010	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						125.000.000,00					Forum Anak Sukoharjo, Dinas Kesehatan, Dinas P dan K, Forum Anak Eks Karisidenan Surakarta, Lembaga Masyarakat		145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						125.000.000,00					Forum Anak Sukoharjo, Dinas Kesehatan, Dinas P dan K, Forum Anak Eks Karisidenan Surakarta, Lembaga Masyarakat		145.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	105.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0010	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.02.0011	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						105.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Dokumen	105.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	110.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	65 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	5 Lembaga	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
75.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**20.000.000,00**							**45.000.000,00**	
			Rasio kekerasan terhadap anak, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk anak)	-		-	27,95 Rasio	14.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Rasio kekerasan terhadap anak, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk anak)	-		-	27,95 Persen	6.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						13.000.000,00					Korban Kekerasan Anak		25.000.000,00	
		-						13.000.000,00					Korban Kekerasan Anak		25.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	3.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	1 Kegiatan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.01.0015	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						3.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000,00					Korban Kekerasan Anak		5.000.000,00	
		-						1.000.000,00					Korban Kekerasan Anak		5.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	40 Orang	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.000.000,00					Satgas (Satuan Tugas Perlindungan Anak) ; Tim Pendampingan dan Penjangkauan Kekerasan Terhadap Anak		15.000.000,00	
		-						6.000.000,00					Satgas (Satuan Tugas Perlindungan Anak) ; Tim Pendampingan dan Penjangkauan Kekerasan Terhadap Anak		15.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	1 Lembaga	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.03.0018	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**1.196.600.000,00**							**1.385.000.000,00**	
76.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**145.000.000,00**							**205.000.000,00**	
			ngka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19 Tahun	-		-	4,48 Angka	145.000.000,00						-	205.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						128.000.000,00					OPD Se Kabupaten Sukoharjo, SMP dan SMA di Kabupaten Sukoharjo		165.000.000,00	
		-						128.000.000,00					OPD Se Kabupaten Sukoharjo, SMP dan SMA di Kabupaten Sukoharjo		165.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi tentang hasil analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-		-	-	105.000.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	-	4.000.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-		-	-	4.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						4.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-		-	1 Kegiatan	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana						4.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	1 Kegiatan	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.01.0040	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas						105.000.000,00							110.000.000,00	
		Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-		-	12 Kampung KB	105.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	110.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	2 Kelompok	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.01.0051	Advokasi dan Sosialisasi tentang Hasil Analisis Dampak Kependudukan sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya advokasi dan sosialisasi tentang hasil analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi tentang hasil analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	-		-	1 Laporan / Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.01.0052	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/KotaPengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.01.0053	Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pemanfaatan (PJPK) dan Rencana Aksi Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	-	-	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						17.000.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						17.000.000,00					Internal Dinas PPKB dan PPPA		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	-		-	48 Unit	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
77.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**776.400.000,00**							**815.000.000,00**	
			Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	-		-	67,65 Persen	776.400.000,00						-	815.000.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						20.400.000,00					PUS, Kader IMP, PKB Se Kabupaten Sukoharjo		30.000.000,00	
		-						20.400.000,00					PUS, Kader IMP, PKB Se Kabupaten Sukoharjo		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-		-	-	7.500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	-	10.400.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						10.400.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	1 Laporan	10.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						7.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		-	4 Organisasi	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						701.200.000,00					PKB, PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD, Faskes, Nakes		705.000.000,00	
		-						701.200.000,00					PKB, PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD, Faskes, Nakes		705.000.000,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-		-	-	701.200.000,00						-	705.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						701.200.000,00							705.000.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-		-	334 Orang	701.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	705.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						54.800.000,00					Faskes ; Pasangan Usia Subur (PUS) ; Nakes		80.000.000,00	
		-						54.800.000,00					Faskes ; Pasangan Usia Subur (PUS) ; Nakes		80.000.000,00	
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	8.890.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	1.850.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	-	1.110.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penuniang Pelavanan KB	-		-	-	12.950.000,00						-	15.000.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						1.110.000,00							5.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	370 Orang	1.110.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP						10.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	-		-	29 Orang	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	25.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB						12.950.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	-		-	49 Orang	12.950.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						1.850.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	1.850.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						8.890.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	8.890.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
78.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**275.200.000,00**							**365.000.000,00**	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	-		-	9,26 Persen	275.200.000,00						-	365.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						213.200.000,00					Kader Tribina, UPPKA, Pik R Kabupaten Sukoharjo		290.000.000,00	
		-						213.200.000,00					Kader Tribina, UPPKA, Pik R Kabupaten Sukoharjo		290.000.000,00	
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	-		-	-	200.400.000,00						-	205.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	-		-	-	0,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	-		-	-	12.800.000,00						-	15.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						12.800.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	-		-	1 Laporan	12.800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						200.400.000,00							205.000.000,00	
		Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	-		-	167 Orang	200.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	205.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						0,00							70.000.000,00	
		Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	-		-	12 Kelompok	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	70.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						62.000.000,00						Organisasi Pemerintahan, PKB, Kader IMP, PKK, Dharma Wanita		75.000.000,00	
		-						62.000.000,00						Organisasi Pemerintahan, PKB, Kader IMP, PKK, Dharma Wanita		75.000.000,00	
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	-		-	-	60.000.000,00						-	65.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-		-	1 laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga						60.000.000,00							65.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	-		-	1 Laporan	60.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	65.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	6100 Keluarga	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Dinas Pangan							**5.624.270.280,00**							**6.886.654.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.624.270.280,00**							**6.886.654.500,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**5.624.270.280,00**							**6.886.654.500,00**	
79.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.708.675.300,00**							**4.113.302.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %	23.181.000,00						-	38.500.000,00	
			-	-		-	-	4.685.494.300,00						-	4.074.802.000,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.181.000,00					-		38.500.000,00	
		-						23.181.000,00					-		38.500.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	14.181.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.150.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.900.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.150.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.150.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.150.000,00						-	3.500.000,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.900.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	2.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.150.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.500.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.150.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.150.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.500.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.150.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	1.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.500.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.181.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	14.181.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	15.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.256.504.000,00					-		3.531.992.000,00	
		-						4.256.504.000,00					-		3.531.992.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	145.776.000,00						-	157.798.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.150.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.150.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.108.428.000,00						-	3.370.194.000,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.108.428.000,00							3.370.194.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	35 Orang/bulan	4.108.428.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.370.194.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						145.776.000,00							157.798.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	145.776.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	157.798.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.150.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	5 Laporan	1.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.150.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	1.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150.000,00					-		49.500.000,00	
		-						150.000,00					-		49.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	150.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	35 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	11.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						150.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	4 Dokumen	150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.500.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	35 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	35.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						55.782.300,00					-		147.000.000,00	
		-						55.782.300,00					-		147.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	2.044.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	2.600.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	9.110.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	22.258.000,00						-	47.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.868.800,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	136.500,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	16.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	765.000,00						-	7.000.000,00	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						136.500,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	136.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	16.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	20.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						765.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	4 Paket	765.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	7.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						22.258.000,00							47.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	22.258.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	47.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.868.800,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.868.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	9.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.600.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	6 Laporan	2.600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	8.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.110.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	60 Laporan	9.110.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	50.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.044.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	2.044.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	4.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	20.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						152.908.000,00					-		117.160.000,00	
		-						152.908.000,00					-		117.160.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	4.400.000,00						-	2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	148.408.000,00						-	111.960.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	100.000,00						-	3.000.000,00	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.400.000,00							2.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	4 Laporan	4.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.200.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						148.408.000,00							111.960.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	148.408.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	111.960.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						205.150.000,00					-		209.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						205.150.000,00					-		209.150.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknya	-		-	-	189.650.000,00						-	193.150.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.500.000,00						-	6.000.000,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						189.650.000,00							193.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknya	-		-	18 Unit	189.650.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	193.150.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	5.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	6.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Pangan
80.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**8.025.000,00**							**51.070.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	8.025.000,00						-	51.070.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						8.025.000,00					Gapoktan/Kelompok Tani		51.070.000,00	
		-						8.025.000,00					Gapoktan/Kelompok Tani		51.070.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	-		-	-	3.500.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	-	3.500.000,00						-	12.125.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	-		-	-	1.025.000,00						-	23.945.000,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						3.500.000,00							12.125.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	2 Unit	3.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	12.125.000,00	Dinas Pangan
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						1.025.000,00							23.945.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	-		-	30 Laporan	1.025.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	23.945.000,00	Dinas Pangan
	2.09.02 2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						3.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	-		-	1 unit	3.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	15.000.000,00	Dinas Pangan
81.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**828.767.980,00**							**2.015.017.500,00**	
		-	-	-	-	-	-	828.767.980,00						-	2.015.017.500,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						239.986.480,00					-		588.750.000,00	
		-						239.986.480,00					-		588.750.000,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	-	500.000,00						-	37.500.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-		-	-	12.399.980,00						-	37.500.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	-	182.490.500,00						-	316.125.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	-		-	-	8.496.000,00						-	53.437.500,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-		-	-	1.100.000,00						-	29.062.500,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-		-	-	35.000.000,00						-	115.125.000,00	
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						35.000.000,00							115.125.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-		-	12 Laporan	35.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	115.125.000,00	Dinas Pangan
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						182.490.500,00							316.125.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	80 laporan	182.490.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	316.125.000,00	Dinas Pangan
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						8.496.000,00							53.437.500,00	
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	-		-	41 Unit	8.496.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	53.437.500,00	Dinas Pangan
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						1.100.000,00							29.062.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	-		-	12 Laporan	1.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	29.062.500,00	Dinas Pangan
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						12.399.980,00							37.500.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-		-	1 Dokumen	12.399.980,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	37.500.000,00	Dinas Pangan
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						500.000,00							37.500.000,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	37.500.000,00	Dinas Pangan
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						184.621.500,00					-		476.625.000,00	
		-						184.621.500,00					-		476.625.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	132.731.500,00						-	402.000.000,00	
			Jumlah LPM yang terfasilitasi	-		-	-	26.676.000,00						-	37.500.000,00	
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	-		-	-	25.214.000,00						-	37.125.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						132.731.500,00							402.000.000,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	35 Ton	132.731.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	402.000.000,00	Dinas Pangan
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						25.214.000,00							37.125.000,00	
		Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	-		-	30 Ton	25.214.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	37.125.000,00	Dinas Pangan
	2.09.03.2.02.0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)						26.676.000,00							37.500.000,00	
		Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	-		-	2 kelompok	26.676.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	37.500.000,00	Dinas Pangan
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						404.160.000,00					-		949.642.500,00	
		-						404.160.000,00					-		949.642.500,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-		-	-	2.700.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-	-	378.532.000,00						-	933.517.500,00	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-		-	-	22.928.000,00						-	8.625.000,00	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						22.928.000,00							8.625.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	-		-	1 Dokumen	22.928.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	8.625.000,00	Dinas Pangan
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						378.532.000,00							933.517.500,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-	24 Laporan	378.532.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	933.517.500,00	Dinas Pangan
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						2.700.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	-		-	1 Laporan	2.700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	7.500.000,00	Dinas Pangan
82.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**64.220.000,00**							**606.860.000,00**	
			-	-		-	-	64.220.000,00						-	606.860.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						1.805.000,00					-		37.500.000,00	
		-						1.805.000,00					-		37.500.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-		-	-	1.805.000,00						-	37.500.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						1.805.000,00							37.500.000,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-		-	1 Dokumen	1.805.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	37.500.000,00	Dinas Pangan
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						62.415.000,00					-		569.360.000,00	
		-						62.415.000,00					-		569.360.000,00	
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-		-	-	50.275.000,00						-	381.860.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-		-	-	11.400.000,00						-	112.500.000,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-		-	-	740.000,00						-	75.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						11.400.000,00							112.500.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-		-	2 Laporan	11.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	112.500.000,00	Dinas Pangan
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						50.275.000,00							381.860.000,00	
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-		-	0 Dokumen	50.275.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	381.860.000,00	Dinas Pangan
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						740.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-		-	13 Dokumen	740.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	75.000.000,00	Dinas Pangan
83.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**14.582.000,00**							**100.405.000,00**	
			-	-		-	-	14.582.000,00						-	100.405.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						14.582.000,00					-		100.405.000,00	
		-						14.582.000,00					-		100.405.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	8.084.000,00						-	45.760.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-		-	-	840.000,00						-	26.745.000,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	-	5.658.000,00						-	27.900.000,00	
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan						840.000,00							26.745.000,00	
		Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	-		-	18 Dokumen	840.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	26.745.000,00	Dinas Pangan
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						5.658.000,00							27.900.000,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	2 Dokumen	5.658.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	27.900.000,00	Dinas Pangan
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						8.084.000,00							45.760.000,00	
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	-		-	1 Dokumen	8.084.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	45.760.000,00	Dinas Pangan
		Dinas Lingkungan Hidup						**31.145.523.299,00**							**34.321.831.129,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31.145.523.299,00**							**34.321.831.129,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**31.145.523.299,00**							**34.321.831.129,00**	
84.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**22.961.661.212,00**							**25.319.577.333,00**	
		-	-	-		-	-	22.961.661.212,00						-	25.319.577.333,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.750.000,00					-		22.825.000,00	
		-						20.750.000,00					-		22.825.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	965.000,00						-	1.061.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	13.960.000,00						-	15.356.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	965.000,00						-	1.061.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	965.000,00						-	1.061.500,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	965.000,00						-	1.061.500,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.165.000,00						-	1.281.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.765.000,00						-	1.941.500,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						13.960.000,00							15.356.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	13.960.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	15.356.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						965.000,00							1.061.500,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	965.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.061.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						965.000,00							1.061.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	965.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.061.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						965.000,00							1.061.500,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	965.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.061.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						965.000,00							1.061.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	965.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.061.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.165.000,00							1.281.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	1.165.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.281.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.765.000,00							1.941.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	1.765.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.941.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.161.780.000,00					-		14.477.958.000,00	
		-						13.161.780.000,00					-		14.477.958.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	345.320.000,00						-	379.852.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.100.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.240.000,00						-	1.364.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	12.814.220.000,00						-	14.095.642.000,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.814.220.000,00							14.095.642.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	96 Orang/bulan	12.814.220.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	14.095.642.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						345.320.000,00							379.852.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	345.320.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	379.852.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.240.000,00							1.364.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	1.240.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.364.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.990.000,00					-		2.189.000,00	
		-						1.990.000,00					-		2.189.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	1.990.000,00						-	2.189.000,00	
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1.990.000,00							2.189.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	12 Dokumen	1.990.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.189.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.000.000,00					-		41.950.000,00	
		-						2.000.000,00					-		41.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	1.000.000,00						-	1.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.000.000,00						-	1.100.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	33.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	6.500.000,00	
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.000.000,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	30 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.000.000,00							1.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	85 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	6.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							33.250.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	33.250.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						137.620.000,00					-		151.382.000,00	
		-						137.620.000,00					-		151.382.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	2.160.000,00						-	2.376.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	34.750.000,00						-	38.225.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	85.638.000,00						-	94.201.800,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	11.098.000,00						-	12.207.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	474.000,00						-	521.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	550.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						474.000,00							521.400,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	13 Paket	474.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	521.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						500.000,00							550.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	7 Paket	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	550.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						85.638.000,00							94.201.800,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	85.638.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	94.201.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.098.000,00							12.207.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	11.098.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	12.207.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.160.000,00							2.376.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	3 Dokumen	2.160.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.376.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						34.750.000,00							38.225.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	50 Laporan	34.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	38.225.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000,00							3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	12 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.300.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		22.000.000,00	
		-						0,00					-		22.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	22.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	22.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.463.621.212,00					-		10.409.983.333,00	
		-						9.463.621.212,00					-		10.409.983.333,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	115.000.000,00						-	126.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.348.121.212,00						-	10.282.933.333,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	500.000,00						-	550.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							550.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	550.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						115.000.000,00							126.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	115.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	126.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.348.121.212,00							10.282.933.333,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	9.348.121.212,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	10.282.933.333,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						173.900.000,00					-		191.290.000,00	
		-						173.900.000,00					-		191.290.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	108.450.000,00						-	119.295.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	39.950.000,00						-	43.945.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	500.000,00						-	550.000,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39.950.000,00							43.945.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	39.950.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	43.945.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						108.450.000,00							119.295.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	13 Unit	108.450.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	119.295.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						500.000,00							550.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	550.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	27.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
85.	2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**7.000.000,00**							**7.700.000,00**	
		-	-	-		-	-	7.000.000,00						-	7.700.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						4.000.000,00					-		4.400.000,00	
		-						4.000.000,00					-		4.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-		-	-	4.000.000,00						-	4.400.000,00	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						4.000.000,00							4.400.000,00	
		Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	4.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						3.000.000,00					-		3.300.000,00	
		-						3.000.000,00					-		3.300.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	
	2.11.02.2.02005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						3.000.000,00							3.300.000,00	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.300.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
86.	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**298.877.000,00**							**328.764.700,00**	
		-	-	-		-	-	298.877.000,00						-	328.764.700,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						214.953.000,00					-		236.448.300,00	
		-						214.953.000,00					-		236.448.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	-	71.050.000,00						-	78.155.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	-	5.500.000,00						-	6.050.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	-	138.403.000,00						-	152.243.300,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						5.500.000,00							6.050.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-		-	2 Dokumen	5.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	6.050.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						71.050.000,00							78.155.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	2 Dokumen	71.050.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	78.155.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						138.403.000,00							152.243.300,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-		-	200 Dokumen	138.403.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	152.243.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						50.124.000,00					-		55.136.400,00	
		-						50.124.000,00					-		55.136.400,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-		-	-	9.374.000,00						-	10.311.400,00	
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	-		-	-	40.750.000,00						-	44.825.000,00	
	2.11.03.2.02001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						9.374.000,00							10.311.400,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-		-	1 Laporan	9.374.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	10.311.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.02003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						40.750.000,00							44.825.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	-		-	1 Titik	40.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	44.825.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						33.800.000,00					-		37.180.000,00	
		-						33.800.000,00					-		37.180.000,00	
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	-		-	-	33.800.000,00						-	37.180.000,00	
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi						33.800.000,00							37.180.000,00	
		kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	-		-	2 Kegiatan	33.800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	37.180.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
87.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**1.562.102.800,00**							**1.718.313.080,00**	
		-	-	-		-	-	1.562.102.800,00						-	1.718.313.080,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1.562.102.800,00					-		1.718.313.080,00	
		-						1.562.102.800,00					-		1.718.313.080,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	-		-	-	2.442.000,00						-	2.686.200,00	
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-		-	-	1.239.000,00						-	1.362.900,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-		-	-	850.000,00						-	935.000,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.553.702.800,00						-	1.709.073.080,00	
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	3.869.000,00						-	4.255.900,00	
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						2.442.000,00							2.686.200,00	
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	-		-	1 Dokumen	2.442.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.686.200,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						1.553.702.800,00							1.709.073.080,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	29,71 Ha	1.553.702.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.709.073.080,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						1.239.000,00							1.362.900,00	
		Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-		-	15 Orang	1.239.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.362.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						850.000,00							935.000,00	
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	-		-	10 Unit	850.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	935.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan						3.869.000,00							4.255.900,00	
		Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit	3.869.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	4.255.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
88.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**9.000.000,00**							**9.900.000,00**	
		-	-	-		-	-	9.000.000,00						-	9.900.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						6.000.000,00					-		6.600.000,00	
		-						6.000.000,00					-		6.600.000,00	
			Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)						3.000.000,00							3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	-		-	15 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.300.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3						3.000.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	-		-	15 Usaha	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.300.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000,00					-		3.300.000,00	
		-						3.000.000,00					-		3.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	-		-	-	3.000.000,00						-	3.300.000,00	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan						3.000.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	-		-	5 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.300.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
89.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**25.000.000,00**							**27.500.000,00**	
			-	-		-	-	25.000.000,00						-	27.500.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		27.500.000,00	
		-						25.000.000,00					-		27.500.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	-	2.000.000,00						-	2.200.000,00	
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	19.000.000,00						-	20.900.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-		-	-	4.000.000,00						-	4.400.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						4.000.000,00							4.400.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-		-	15 Dokumen	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	4.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						19.000.000,00							20.900.000,00	
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	4 Orang	19.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	20.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						2.000.000,00							2.200.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	25 Usaha/Kegiatan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
90.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**8.425.000,00**							**9.273.000,00**	
			-	-		-	-	8.425.000,00						-	9.273.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.425.000,00					-		9.273.000,00	
		-						8.425.000,00					-		9.273.000,00	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-		-	-	570.000,00						-	632.500,00	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-		-	-	570.000,00						-	627.000,00	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	-	7.285.000,00						-	8.013.500,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						7.285.000,00							8.013.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-		-	10 Dokumen	7.285.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	8.013.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						570.000,00							627.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-		-	40 Orang	570.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	627.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						570.000,00							632.500,00	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-		-	20 Lembaga	570.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	632.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
91.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**575.000,00**							**632.500,00**	
		-	-	-		-	-	575.000,00						-	632.500,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						575.000,00					-		632.500,00	
		-						575.000,00					-		632.500,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-		-	-	575.000,00						-	632.500,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						575.000,00							632.500,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-		-	1 Entitas	575.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	632.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
92.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**18.000.000,00**							**19.800.000,00**	
		-	-	-		-	-	18.000.000,00						-	19.800.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						18.000.000,00					-		19.800.000,00	
		-						18.000.000,00					-		19.800.000,00	
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	4.000.000,00						-	4.400.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-		-	-	14.000.000,00						-	15.400.000,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						14.000.000,00							15.400.000,00	
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-		-	9 Pengaduan	14.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	15.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						4.000.000,00							4.400.000,00	
		Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	-		-	3 Sanksi	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	4.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
93.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**6.254.882.287,00**							**6.880.370.516,00**	
		-	-	-		-	-	6.254.882.287,00						-	6.880.370.516,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						6.251.382.287,00					-		6.876.520.516,00	
		-						6.251.382.287,00					-		6.876.520.516,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-		-	-	85.334.500,00						-	93.867.950,00	
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	-		-	-	4.000.000,00						-	4.400.000,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-		-	-	89.795.750,00						-	98.775.325,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses penganglutan	-		-	-	3.673.333.240,00						-	4.040.666.564,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	-	1.021.500.000,00						-	1.123.650.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	-		-	-	818.304.000,00						-	900.134.400,00	
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	-		-	-	554.114.797,00						-	609.526.277,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						85.334.500,00							93.867.950,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-		-	16 Kelompok	85.334.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	93.867.950,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						1.021.500.000,00							1.123.650.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	15 Unit	1.021.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.123.650.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						3.673.333.240,00							4.040.666.564,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	67000 Ton	3.673.333.240,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	4.040.666.564,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah						818.304.000,00							900.134.400,00	
		Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	-		-	16 Unit	818.304.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	900.134.400,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						554.114.797,00							609.526.277,00	
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	-		-	61 Persentase	554.114.797,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	609.526.277,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	20000 Ton	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	5.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						89.795.750,00							98.775.325,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-		-	80500 Ton	89.795.750,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	98.775.325,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah						4.000.000,00							4.400.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	-		-	150 Ton	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	4.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta						3.500.000,00					-		3.850.000,00	
		-						3.500.000,00					-		3.850.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.500.000,00						-	3.850.000,00	
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah						3.500.000,00							3.850.000,00	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	-		-	2 Laporan	3.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.850.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						**12.017.151.000,00**							**12.251.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.017.151.000,00**							**12.251.500.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**12.017.151.000,00**							**12.251.500.000,00**	
94.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.705.051.200,00**							**11.831.200.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	-		-	100 %	11.705.051.200,00						-	11.831.200.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.700.000,00					Kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		43.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						36.700.000,00					Kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		43.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	23.950.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.250.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						23.950.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	23.950.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.250.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	1.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.500.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	3.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.651.557.000,00					Ketertiban administrasi keuangan kantor		8.690.000.000,00	
		-						8.651.557.000,00					Ketertiban administrasi keuangan kantor		8.690.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	179.400.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	8.464.657.000,00						-	8.500.000.000,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.464.657.000,00							8.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	53 Orang/bulan	8.464.657.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	8.500.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						179.400.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	179.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	180.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	16 Laporan	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.472.800,00					Barang Milik Daerah		6.500.000,00	
		-						5.472.800,00					Barang Milik Daerah		6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.277.800,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	1.195.000,00						-	1.500.000,00	
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.195.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	1.195.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.277.800,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	1.277.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.000.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	2 Laporan	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.500.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						32.340.000,00					Kelancaran Pelayanan Kepegawaian Kantor		33.500.000,00	
		-						32.340.000,00					Kelancaran Pelayanan Kepegawaian Kantor		33.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	1.600.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	22.440.000,00						-	22.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	7.300.000,00						-	7.500.000,00	
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	2 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.600.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	2 Dokumen	1.600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						7.300.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	100 Orang	7.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.500.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						22.440.000,00							22.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	100 Orang	22.440.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	22.500.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						891.656.400,00					Kelancaran Pelayanan Umum Kantor		893.300.000,00	
		-						891.656.400,00					Kelancaran Pelayanan Umum Kantor		893.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	2.160.000,00						-	2.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	1.529.000,00						-	1.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.273.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.350.000,00						-	1.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	120.008.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	111.758.200,00						-	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	23.504.200,00						-	23.600.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.996.800,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	625.077.200,00						-	626.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.996.800,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.996.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						625.077.200,00							626.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	625.077.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	626.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						111.758.200,00							112.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	111.758.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	112.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						23.504.200,00							23.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	23.504.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	23.600.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.160.000,00							2.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	2.160.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.200.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.350.000,00							1.400.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	4 Laporan	1.350.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.400.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						120.008.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	120.008.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	120.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.273.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	2 Dokumen	1.273.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.529.000,00							1.600.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	1.529.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.600.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.648.069.000,00					Kelancaran Pelayanan Umum Kantor		1.722.500.000,00	
		-						1.648.069.000,00					Kelancaran Pelayanan Umum Kantor		1.722.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	301.650.000,00						-	302.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.226.999.000,00						-	1.300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.300.000,00						-	18.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	101.120.000,00						-	102.000.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						101.120.000,00							102.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	101.120.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	102.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						301.650.000,00							302.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	301.650.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	302.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.300.000,00							18.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	18.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	18.500.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.226.999.000,00							1.300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.226.999.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.300.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						439.256.000,00					Barang Milik Daerah		442.400.000,00	
		-						439.256.000,00					Barang Milik Daerah		442.400.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	100.686.000,00						-	100.700.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	233.100.000,00						-	235.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	1.650.000,00						-	1.700.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	68.820.000,00						-	69.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	35.000.000,00						-	36.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						233.100.000,00							235.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	30 Unit	233.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	235.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.650.000,00							1.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	43 Unit	1.650.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.700.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						68.820.000,00							69.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	70 Unit	68.820.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	69.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.686.000,00							100.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	100.686.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.700.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						35.000.000,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	11 Unit	35.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	36.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
95.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**133.059.300,00**							**239.000.000,00**	
			Perekaman KTP elektronik	-		-	99,42 %	133.059.300,00						-	239.000.000,00	
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	-		-	20 %	133.059.300,00						-	239.000.000,00	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-		-	91 %	119.169.300,00						-	224.000.000,00	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-		-	91 %.	10.890.000,00						-	11.500.000,00	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak.	-		-	91 %,	3.000.000,00						-	3.500.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						119.169.300,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		224.000.000,00	
		-						119.169.300,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		224.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-		-	-	3.940.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-		-	-	2.494.900,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	-	105.900.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-		-	-	2.942.400,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-		-	-	3.892.000,00						-	4.000.000,00	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						2.494.900,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-		-	200 Dokumen	2.494.900,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						3.940.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-		-	48000 Dokumen	3.940.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk						3.892.000,00							4.000.000,00	
		Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-		-	480 Orang	3.892.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						105.900.000,00							210.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	12 Laporan	105.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	210.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan						2.942.400,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-		-	12 Laporan	2.942.400,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						10.890.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		11.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						10.890.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		11.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	-	7.390.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk						7.390.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	1400 Dokumen	7.390.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.500.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	-		-	1 Laporan	3.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						3.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		3.500.000,00	
		-						3.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		3.500.000,00	
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	-	3.000.000,00						-	3.500.000,00	
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk						3.000.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.500.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
96.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**38.630.000,00**							**40.100.000,00**	
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-		-	100 %,	6.744.000,00						-	7.100.000,00	
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-		-	100 %^	22.321.000,00						-	23.000.000,00	
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-		-	100 %	9.565.000,00						-	10.000.000,00	
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-		-	100 %`	22.321.000,00						-	23.000.000,00	
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-		-	100. .%	9.565.000,00						-	10.000.000,00	
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-		-	100 %	6.744.000,00						-	7.100.000,00	
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-		-	100 %	22.321.000,00						-	23.000.000,00	
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	-		-	100` `%	9.565.000,00						-	10.000.000,00	
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	-		-	100. %*	6.744.000,00						-	7.100.000,00	
			Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	-		-	98,88 %	38.630.000,00						-	40.100.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						6.744.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		7.100.000,00	
		-						6.744.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		7.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-		-	-	4.170.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-		-	-	2.574.000,00						-	2.600.000,00	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						4.170.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-		-	12 Dokumen	4.170.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.500.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						2.574.000,00							2.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-		-	12 Layanan	2.574.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.600.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						22.321.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		23.000.000,00	
		-						22.321.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		23.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-		-	-	8.621.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	-		-	-	8.700.000,00						-	9.000.000,00	
	2.12.03.2.02003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-		-	9 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						8.621.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-		-	12 Laporan	8.621.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	9.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil						8.700.000,00							9.000.000,00	
		Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	-		-	1 Laporan	8.700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	9.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						9.565.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		10.000.000,00	
		-						9.565.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	-		-	-	4.910.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	-		-	-	4.655.000,00						-	5.000.000,00	
	2.12.03.2.03001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil						4.910.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	-		-	12 Dokumen	4.910.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.03002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil						4.655.000,00							5.000.000,00	
		Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	-		-	12 Laporan	4.655.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
97.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**129.920.500,00**							**130.600.000,00**	
			Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	-		-	100 %	14.122.000,00						-	12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	-		-	100` %`	10.084.000,00						-	9.900.000,00	
		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	-		-	100 %	105.714.500,00						-	108.200.000,00	
		Persentase ketersediaan sistem informasi dan data kependudukan yang terintegrasi dan bisa diakses	-		-	100. %.	105.714.500,00						-	108.200.000,00	
		Persentase ketersediaan sistem informasi dan data kependudukan yang terintegrasi dan bisa diakses	-		-	100` %`	14.122.000,00						-	12.500.000,00	
		Persentase ketersediaan sistem informasi dan data kependudukan yang terintegrasi dan bisa diakses	-		-	100 %	10.084.000,00						-	9.900.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					14.122.000,00						Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		12.500.000,00	
		-					14.122.000,00						Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-		-	-	1.205.000,00						-	1.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	-	7.563.000,00						-	7.600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	-		-	-	5.354.000,00						-	3.600.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						1.205.000,00							1.300.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-		-	2 Dokumen	1.205.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.300.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						7.563.000,00							7.600.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	6 Dokumen	7.563.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.600.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah						5.354.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	-		-	12 Laporan	5.354.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.600.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						105.714.500,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		108.200.000,00	
		-						105.714.500,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		108.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	-		-	-	20.058.000,00						-	21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-		-	-	46.686.500,00						-	47.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	-	6.170.000,00						-	6.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	-	21.000.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	-	2.500.000,00						-	2.600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	-	9.300.000,00						-	9.400.000,00	
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						2.500.000,00							2.600.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.600.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						21.000.000,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	7 Laporan	21.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	22.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						6.170.000,00							6.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	1 Dokumen	6.170.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.200.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						9.300.000,00							9.400.000,00	
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	1 Laporan	9.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	9.400.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						46.686.500,00							47.000.000,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-		-	4 Laporan	46.686.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	47.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan						20.058.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	-		-	2 Dokumen	20.058.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	21.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						10.084.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		9.900.000,00	
	-	-						10.084.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		9.900.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-		-	-	4.250.000,00						-	4.300.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	-	5.834.000,00						-	5.600.000,00	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						5.834.000,00							5.600.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	4 Laporan	5.834.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.600.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan						4.250.000,00							4.300.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-		-	1 Laporan	4.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.300.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
98.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**10.490.000,00**							**10.600.000,00**	
			Cakupan Pengelolaan Profil Kependudkan	-		-	100 %	10.490.000,00						-	10.600.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						10.490.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		10.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						10.490.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		10.600.000,00	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.540.000,00						-	1.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	-	8.950.000,00						-	9.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						1.540.000,00							1.600.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-		-	12 Dokumen	1.540.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.600.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						8.950.000,00							9.000.000,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	1 Dokumen	8.950.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	9.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						**21.925.287.400,00**							**18.309.916.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.925.287.400,00**							**18.309.916.300,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**21.925.287.400,00**							**18.309.916.300,00**	
99.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.058.042.000,00**							**6.068.042.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	6.058.042.000,00						-	6.068.042.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						56.000.000,00					-		56.000.000,00	
		-						56.000.000,00					-		56.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	700.000,00						-	700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	700.000,00						-	700.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.300.000,00						-	1.300.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.300.000,00						-	3.300.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	8 Dokumen	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						700.000,00							700.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	700.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						700.000,00							700.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	700.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.300.000,00							1.300.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	1.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.300.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.300.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	3.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.300.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.365.792.000,00					-		5.365.792.000,00	
		-						5.365.792.000,00					-		5.365.792.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	215.000.000,00						-	215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.147.792.000,00						-	5.147.792.000,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.147.792.000,00							5.147.792.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	29 Orang/bulan	5.147.792.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.147.792.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						215.000.000,00							215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	215.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	215.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		-						1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	6 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.390.000,00						-	15.390.000,00	
		-						15.390.000,00						-	15.390.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	13.390.000,00						-	13.390.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	20 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						13.390.000,00							13.390.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	13.390.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	13.390.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	4 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						197.700.000,00						-	207.700.000,00	
		-						197.700.000,00						-	207.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	6.600.000,00						-	6.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	60.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	28.000.000,00						-	28.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	5.100.000,00						-	5.100.000,00	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						28.000.000,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	28.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	28.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.100.000,00							5.100.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	4 Paket	5.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.100.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	60.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.600.000,00							6.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	6.600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	6.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	65 Laporan	75.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	20 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						244.160.000,00						-	244.160.000,00	
		-						244.160.000,00						-	244.160.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	242.160.000,00						-	242.160.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						242.160.000,00							242.160.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	242.160.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	242.160.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						178.000.000,00					-		178.000.000,00	
		-						178.000.000,00					-		178.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	168.000.000,00						-	168.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						168.000.000,00							168.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	19 Unit	168.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	168.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**2.200.000.000,00**							**2.300.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	2.200.000.000,00						-	2.300.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						2.200.000.000,00					-		2.300.000.000,00	
		-						2.200.000.000,00					-		2.300.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	-		-	-	2.200.000.000,00						-	2.300.000.000,00	
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa						2.200.000.000,00							2.300.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	-		-	150 Desa	2.200.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
101.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**50.000.000,00**							**55.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						50.000.000,00					-		55.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
102.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**2.552.977.200,00**							**2.597.977.200,00**	
		-	-	-	-	-	-	2.552.977.200,00						-	2.597.977.200,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						2.552.977.200,00					-		2.597.977.200,00	
		-						2.552.977.200,00					-		2.597.977.200,00	
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	-	2.382.977.200,00						-	2.392.977.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-		-	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-		-	2 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	-		-	3 Dokumen	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						2.382.977.200,00							2.392.977.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	4 Dokumen	2.382.977.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.392.977.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	150 Orang	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-		-	4 Dokumen	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	2 Laporan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	150 Orang	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
103.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**11.064.268.200,00**							**7.288.897.100,00**	
		-	-	-	-	-	-	11.064.268.200,00						-	7.288.897.100,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						11.064.268.200,00						-	7.288.897.100,00	
		-						11.064.268.200,00						-	7.288.897.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	-	4.196.706.000,00						-	419.670.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	6.702.562.200,00						-	6.704.226.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						6.702.562.200,00							6.704.226.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	4 Dokumen	6.702.562.200,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	6.704.226.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	6 Lembaga	35.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-		-	4 Dokumen	100.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						4.196.706.000,00							419.670.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	4 Dokumen	4.196.706.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	419.670.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Dinas Perhubungan						**46.821.199.170,00**							**64.000.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**46.821.199.170,00**							**64.000.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**46.821.199.170,00**							**64.000.000.000,00**	
104.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.567.243.792,00**							**22.089.000.000,00**	
		-	-	-	-	-		11.567.243.792,00						-	22.089.000.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.468.000,00					-		115.000.000,00	
		-						40.468.000,00					-		115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	40.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	468.000,00						-	45.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	40.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						468.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	5 Laporan	468.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.013.084.000,00					-		7.813.500.000,00	
		-						8.013.084.000,00					-		7.813.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	276.200.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	675.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	7.736.209.000,00						-	7.493.500.000,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.736.209.000,00							7.493.500.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	50 Orang/bulan	7.736.209.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.493.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						276.200.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	14 Dokumen	276.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						675.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	675.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.229.500,00					-		550.000.000,00	
		-						100.229.500,00					-		550.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	100.229.500,00						-	300.000.000,00	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.229.500,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	153 Orang	100.229.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						228.359.124,00					-		745.500.000,00	
		-						228.359.124,00					-		745.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	220.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	217.500,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	91.000.000,00						-	90.000.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	134.228.624,00						-	250.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	200.000,00						-	80.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	273.000,00						-	25.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	250.000,00						-	250.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.970.000,00						-	40.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						273.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	273.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						250.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.970.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.970.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						134.228.624,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	36 Paket	134.228.624,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	80.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						220.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	220.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						91.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	24 Laporan	91.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	90.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						217.500,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	12 Dokumen	217.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						680.000,00					-		45.000.000,00	
		-						680.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	680.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						680.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	15 Unit	680.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.953.659.168,00					-		960.000.000,00	
		-						2.953.659.168,00					-		960.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	253.730.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.697.229.168,00						-	660.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.650.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	50.000,00						-	10.000.000,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						50.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	50.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						253.730.000,00							280.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	253.730.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	280.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.650.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	2.650.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.697.229.168,00							660.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.697.229.168,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	660.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.764.000,00					-		11.860.000.000,00	
		-						230.764.000,00					-		11.860.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.000.000,00						-	11.400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	220.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	8.764.000,00						-	60.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						220.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	35 Unit	220.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.000.000,00							11.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	16 Unit	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.400.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.764.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	6 Unit	8.764.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	Dinas Perhubungan
105.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**35.015.188.398,00**							**41.091.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	35.015.188.398,00						-	41.091.000.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						160.000.000,00					-		213.000.000,00	
		-						160.000.000,00					-		213.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-		-	-	160.000.000,00						-	213.000.000,00	
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						160.000.000,00							213.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-		-	3 Dokumen	160.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	213.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						33.812.087.898,00					-		34.327.000.000,00	
		-						33.812.087.898,00					-		34.327.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	-	33.572.906.398,00						-	33.249.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	-	205.181.500,00						-	333.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	-	34.000.000,00						-	595.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						0,00							150.000.000,00	
		Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						33.572.906.398,00							33.249.000.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	4509 Unit	33.572.906.398,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-		-	33.249.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						34.000.000,00							595.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	1783 Unit	34.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	595.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						205.181.500,00							333.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	103 Unit	205.181.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	333.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						73.350.000,00					-		400.000.000,00	
		-						73.350.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	-	40.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	-		-	-	33.350.000,00						-	0,00	
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang						33.350.000,00							0,00	
		Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	-		-	4 Unit	33.350.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						40.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	4 Unit	40.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						19.750.000,00					-		300.000.000,00	
		-						19.750.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	19.750.000,00						-	300.000.000,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						19.750.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2 Laporan	19.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						171.405.000,00					-		2.210.500.000,00	
		-						171.405.000,00					-		2.210.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	-	181.500,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	-	7.700.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	-	229.500,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	-	163.294.000,00						-	2.120.500.000,00	
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						229.500,00							30.000.000,00	
		Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	2 Laporan	229.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						163.294.000,00							2.120.500.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	10 Unit	163.294.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.120.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						181.500,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	2 Laporan	181.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						7.700.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	4 Laporan	7.700.000,00	-	Opsen PKB	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						192.000.000,00					-		1.822.000.000,00	
		-						192.000.000,00					-		1.822.000.000,00	
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	-	12.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	-		-	-	180.000.000,00						-	1.777.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						12.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	4 Laporan	12.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						180.000.000,00							1.777.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	-		-	2 Dokumen	180.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.777.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						229.500,00					-		145.000.000,00	
		-						229.500,00					-		145.000.000,00	
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	-	229.500,00						-	145.000.000,00	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						229.500,00							145.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	13 Laporan	229.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	145.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						331.000.000,00					-		1.190.000.000,00	
		-						331.000.000,00					-		1.190.000.000,00	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-		-	-	240.000.000,00						-	510.000.000,00	
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	-	91.000.000,00						-	680.000.000,00	
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						240.000.000,00							510.000.000,00	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	240.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	510.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						91.000.000,00							680.000.000,00	
		Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	12 Laporan	91.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	680.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						239.655.000,00					-		393.500.000,00	
		-						239.655.000,00					-		393.500.000,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	-	218.860.000,00						-	363.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	20.795.000,00						-	30.000.000,00	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						20.795.000,00							30.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	5 Laporan	20.795.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						218.860.000,00							363.500.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	33 Unit	218.860.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	363.500.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						181.500,00					-		30.000.000,00	
		-						181.500,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	181.500,00						-	30.000.000,00	
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota						181.500,00							30.000.000,00	
		Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	6 Dokumen	181.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						15.529.500,00					-		60.000.000,00	
		-						15.529.500,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	15.340.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	-	189.500,00						-	30.000.000,00	
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota						15.340.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	15.340.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						189.500,00							30.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	5 Unit	189.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
106.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**						**238.766.980,00**							**820.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	238.766.980,00						-	820.000.000,00	
	2.15.05.2.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						238.766.980,00					-		820.000.000,00	
		-						238.766.980,00					-		820.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	238.766.980,00						-	820.000.000,00	
	2.15.05.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota						238.766.980,00							820.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	238.766.980,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	820.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi dan Informatika						**10.819.057.202,00**							**11.159.721.096,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.819.057.202,00**							**11.159.721.096,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**10.601.320.202,00**							**10.684.857.000,00**	
107.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.649.447.000,00**							**7.038.857.000,00**	
		-	-	-		-	-	6.649.447.000,00						-	7.038.857.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.420.000,00					-		39.580.000,00	
		-						25.420.000,00					-		39.580.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.950.000,00						-	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	17.520.000,00						-	24.420.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.950.000,00						-	4.145.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.530.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00						-	4.585.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.520.000,00							24.420.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	8 Dokumen	17.520.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	24.420.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.950.000,00							4.145.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	3 Dokumen	1.950.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.145.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.950.000,00							3.900.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	3 Dokumen	1.950.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.900.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							2.530.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.530.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00							4.585.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.585.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.305.460.000,00					-		6.405.196.000,00	
		-						6.305.460.000,00					-		6.405.196.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	500.000,00						-	2.440.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	207.670.000,00						-	192.951.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	500.000,00						-	2.495.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.550.000,00						-	7.310.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.094.240.000,00						-	6.200.000.000,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.094.240.000,00							6.200.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	39 Orang/bulan	6.094.240.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						207.670.000,00							192.951.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	207.670.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	192.951.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						500.000,00							2.495.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.495.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.550.000,00							7.310.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	2.550.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.310.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						500.000,00							2.440.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	2 Dokumen	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.440.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.000.000,00					-		3.000.000,00	
		-						3.000.000,00					-		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						79.337.000,00					-		171.131.000,00	
		-						79.337.000,00					-		171.131.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	360.000,00						-	540.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	30.340.000,00						-	38.270.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	36.351.400,00						-	101.860.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.579.600,00						-	7.570.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.056.000,00						-	2.650.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	5.150.000,00						-	17.741.000,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.056.000,00							2.650.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.056.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.150.000,00							17.741.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	3 Paket	5.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	17.741.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						36.351.400,00							101.860.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	7 Paket	36.351.400,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	101.860.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.579.600,00							7.570.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	3.579.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.570.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						360.000,00							540.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	360.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	540.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.340.000,00							38.270.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	30.340.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	38.270.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14.900.000,00					-		194.900.000,00	
		-						14.900.000,00					-		194.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	14.400.000,00						-	14.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	500.000,00						-	500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.400.000,00							14.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	14.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	14.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	5 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	180.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						221.330.000,00					-		225.050.000,00	
		-						221.330.000,00					-		225.050.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	146.640.000,00						-	150.090.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	53.960.000,00						-	45.950.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	20.730.000,00						-	29.010.000,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						53.960.000,00							45.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	53.960.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	45.950.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						146.640.000,00							150.090.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	19 Unit	146.640.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	150.090.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.730.000,00							29.010.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	44 Unit	20.730.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	29.010.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
108.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**879.312.500,00**							**643.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	879.312.500,00						-	643.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						879.312.500,00					-		643.000.000,00	
		-						879.312.500,00					-		643.000.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	-	13.000.000,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	3.370.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	644.917.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	9.126.500,00						-	71.000.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	60.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	42.000.000,00						-	190.000.000,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	150.000,00						-	5.000.000,00	
			Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	106.749.000,00						-	225.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						13.000.000,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	2 Laporan	13.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	32.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						106.749.000,00							225.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	106.749.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	225.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						644.917.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	0 Orang	644.917.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						150.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	1 Dokumen	150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0028	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	0 %	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						42.000.000,00							190.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	1 Rekomendasi	42.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	190.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						3.370.000,00							15.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	4 Orang	3.370.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						9.126.500,00							71.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	3 Komunitas	9.126.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	71.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						60.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	4 Konten	60.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
109.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**3.072.560.702,00**							**3.003.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	3.072.560.702,00						-	3.003.000.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						8.400.000,00					-		9.000.000,00	
		-						8.400.000,00					-		9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	-		-	-	8.400.000,00						-	9.000.000,00	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa						8.400.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	-		-	150 Dokumen	8.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	9.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						3.064.160.702,00					-		2.994.000.000,00	
		-						3.064.160.702,00					-		2.994.000.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	868.605.702,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	3.500.000,00						-	311.000.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	-	3.830.000,00						-	126.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	-	1.750.000,00						-	69.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	209.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	1.902.475.000,00						-	2.050.000.000,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	75.000.000,00						-	430.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						3.830.000,00							126.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	-		-	2 Laporan	3.830.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	126.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						1.750.000,00							69.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	1 Dokumen	1.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	69.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						1.902.475.000,00							2.050.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	39 Titik	1.902.475.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.050.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						3.500.000,00							311.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	2 Dokumen	3.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	311.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						209.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	1 Layanan	209.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						75.000.000,00							430.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	39 Titik	75.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	430.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						868.605.702,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	1 Aplikasi	868.605.702,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**20.319.000,00**							**137.000.000,00**	
110.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**20.319.000,00**							**137.000.000,00**	
			-	-		-	-	20.319.000,00						-	137.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						20.319.000,00					-		137.000.000,00	
		-						20.319.000,00					-		137.000.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-		-	-	4.240.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-		-	-	4.150.000,00						-	8.400.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	-	2.529.000,00						-	19.700.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	-	4.150.000,00						-	57.650.000,00	
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-		-	-	2.250.000,00						-	39.250.000,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						4.150.000,00							57.650.000,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	100 %	4.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	57.650.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						2.529.000,00							19.700.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	100 %	2.529.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	19.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						4.150.000,00							8.400.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-		-	25 Orang	4.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	8.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar						2.250.000,00							39.250.000,00	
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-		-	96 %	2.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	39.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						4.240.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-		-	1 Laporan	4.240.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	90 %	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**197.418.000,00**							**337.864.096,00**	
111.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**197.418.000,00**							**337.864.096,00**	
			-	-		-	-	197.418.000,00						-	337.864.096,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						197.418.000,00					-		337.864.096,00	
		-						197.418.000,00					-		337.864.096,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	62.470.000,00						-	22.302.394,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	66.916.000,00						-	298.644.667,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	-	68.032.000,00						-	16.917.035,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						68.032.000,00							16.917.035,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	2 Laporan	68.032.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	16.917.035,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						62.470.000,00							22.302.394,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	62.470.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	22.302.394,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						66.916.000,00							298.644.667,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	2 Laporan	66.916.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	298.644.667,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan						**29.767.113.600,00**							**23.673.065.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.988.634.000,00**							**21.618.065.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**20.988.634.000,00**							**21.618.065.000,00**	
112.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**18.777.850.000,00**							**19.157.300.000,00**	
			-	-		-	-	18.777.850.000,00						-	19.157.300.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.650.000,00					-		61.500.000,00	
		-						55.650.000,00					-		61.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.800.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	43.200.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.250.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	5.400.000,00						-	6.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.200.000,00							45.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	43.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	45.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	5.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.800.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	1.800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	3.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.250.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	2.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	2.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.400.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	3 Laporan	5.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	6.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.359.000.000,00					-		12.503.800.000,00	
		-						12.359.000.000,00					-		12.503.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	13.500.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	2.200.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	480.800.000,00						-	480.800.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.300.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.200.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	11.858.000.000,00						-	12.000.000.000,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.858.000.000,00							12.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	90 Orang/bulan	11.858.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	12.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						480.800.000,00							480.800.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	480.800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	480.800.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						13.500.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	15 Dokumen	13.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	15.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.300.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	4 Laporan	2.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	3.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.200.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	2.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	2.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						2.200.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	2 Dokumen	2.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	2.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						107.800.000,00					-		117.000.000,00	
		-						107.800.000,00					-		117.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	6.400.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	4.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	19.500.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	77.400.000,00						-	80.000.000,00	
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						4.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	5.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						6.400.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	6.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	7.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						77.400.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	90 Orang	77.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	80.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						19.500.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	50 Orang	19.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	25.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						514.500.000,00					-		539.000.000,00	
		-						514.500.000,00					-		539.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	200.000.000,00						-	220.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	286.500.000,00						-	290.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	2.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						286.500.000,00							290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	7 Paket	286.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	290.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	15.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	36 Dokumen	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	4.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	100 Laporan	200.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	220.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	36 Dokumen	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	4.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	4.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						49.400.000,00					-		55.000.000,00	
		-						49.400.000,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	45.400.000,00						-	50.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	5.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.400.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	11 Unit	45.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.376.300.000,00					-		5.415.000.000,00	
		-						5.376.300.000,00					-		5.415.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	856.300.000,00						-	860.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.515.000.000,00						-	4.550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	2 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	5.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						856.300.000,00							860.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	856.300.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	860.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.515.000.000,00							4.550.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	4.515.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	4.550.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						315.200.000,00					-		466.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						315.200.000,00					-		466.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	20.000.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	270.200.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						270.200.000,00							280.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	65 Unit	270.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	280.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	26.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	160.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
113.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**						**52.500.000,00**							**70.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	52.500.000,00						-	70.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		35.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	35.000.000,00	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	40 Unit Usaha	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	35.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						27.500.000,00					-		35.000.000,00	
		-						27.500.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	27.500.000,00						-	35.000.000,00	
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						27.500.000,00							35.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Unit Usaha	27.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	35.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
114.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**72.500.000,00**							**90.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	72.500.000,00						-	90.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						72.500.000,00					-		90.000.000,00	
		-						72.500.000,00					-		90.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-		-	-	72.500.000,00						-	90.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						72.500.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-		-	50 Unit Usaha	72.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	90.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
115.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**90.000.000,00**							**110.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	90.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						90.000.000,00					-		110.000.000,00	
		-						90.000.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	-	90.000.000,00						-	110.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						90.000.000,00							110.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-		-	120 Orang	90.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	110.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
116.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**425.784.000,00**							**600.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	425.784.000,00						-	600.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						425.784.000,00					-		600.000.000,00	
		-						425.784.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-		-	-	38.000.000,00						-	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-		-	-	202.784.000,00						-	290.000.000,00	
		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	185.000.000,00						-	235.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					38.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-		-	100 Keluarga	38.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					202.784.000,00							290.000.000,00	
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-		-	1 Unit Usaha	202.784.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Gatak || Desa Trangsan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	290.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					185.000.000,00							235.000.000,00	
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	667 Unit Usaha	185.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	235.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
117.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**282.765.000,00**							**290.765.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	282.765.000,00						-	290.765.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						282.765.000,00					-		290.765.000,00	
		-						282.765.000,00					-		290.765.000,00	
			Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	-	32.955.000,00						-	34.955.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	135.400.000,00						-	137.400.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	32.955.000,00						-	34.955.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	81.455.000,00						-	83.455.000,00	
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						135.400.000,00							137.400.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	400 Orang	135.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	137.400.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0020	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM						32.955.000,00							34.955.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	100 Orang	32.955.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	34.955.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						81.455.000,00							83.455.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	100 Unit Usaha	81.455.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	83.455.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0025	Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM						32.955.000,00							34.955.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	100 Unit Usaha	32.955.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	34.955.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
118.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**1.287.235.000,00**							**1.300.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	1.287.235.000,00						-	1.300.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						1.287.235.000,00					-		1.300.000.000,00	
		-						1.287.235.000,00					-		1.300.000.000,00	
			Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	-		-	-	151.075.000,00						-	153.000.000,00	
			Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	-	127.000.000,00						-	129.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	-	654.365.000,00						-	657.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	-	65.910.000,00						-	68.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	146.760.000,00						-	149.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	-	142.125.000,00						-	144.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0008	Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM						127.000.000,00							129.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM	Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	1 Lembaga	127.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	129.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.08.2.01.0012	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha						142.125.000,00							144.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	110 Orang	142.125.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	144.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.08.2.01.0014	Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik						146.760.000,00							149.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik	Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	200 Orang	146.760.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	149.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						65.910.000,00							68.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	200 Unit Usaha	65.910.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	68.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.08.2.01.0021	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM						654.365.000,00							657.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	4 Unit Usaha	654.365.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	657.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	2.17.08.2.01.0025	Penyusunan Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan						151.075.000,00							153.000.000,00	
		Tersusunnya Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	-		-	1 Dokumen	151.075.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	153.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8.778.479.600,00**							**2.055.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**8.778.479.600,00**							**2.055.000.000,00**	
119.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**60.000.000,00**							**85.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	60.000.000,00						-	85.000.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						30.000.000,00					-		40.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	-	30.000.000,00						-	40.000.000,00	
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	40.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang						30.000.000,00					-		45.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-		-	-	30.000.000,00						-	45.000.000,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang						30.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	45.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
120.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**6.830.979.600,00**							**170.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	6.830.979.600,00						-	170.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						6.610.614.600,00					-		0,00	
		-						6.610.614.600,00					-		0,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	683.114.600,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	5.927.500.000,00						-	0,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						5.927.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	6 Unit	5.927.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						683.114.600,00							0,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	26 Unit	683.114.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						220.365.000,00					-		170.000.000,00	
		-						220.365.000,00					-		170.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	220.365.000,00						-	170.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						65.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	4 Dokumen	65.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						155.365.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	1 Dokumen	155.365.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	170.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
121.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**187.500.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	187.500.000,00						-	0,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						100.000.000,00					-		0,00	
		-						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-		-	-	85.000.000,00						-	0,00	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-		-	2 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						85.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-		-	0 Laporan	85.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						32.500.000,00					-		0,00	
		-						32.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	32.500.000,00						-	0,00	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						32.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	0 Laporan	32.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						55.000.000,00					-		0,00	
		-						55.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan						25.000.000,00							0,00	
		Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	-		-	0 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-		-	0 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
122.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**985.000.000,00**							**1.120.000.000,00**	
			-	-		-	-	985.000.000,00						-	1.120.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						985.000.000,00					-		1.120.000.000,00	
		-						985.000.000,00					-		1.120.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-		-	-	350.000.000,00						-	385.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-		-	-	470.000.000,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	-		-	-	150.000.000,00						-	185.000.000,00	
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	-		-	-	15.000.000,00						-	25.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional						470.000.000,00							525.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-		-	20 Pelaku Usaha	470.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	525.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal						150.000.000,00							185.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	-		-	2 Pelaku Usaha	150.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	185.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						350.000.000,00							385.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-		-	10 Pelaku Usaha	350.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	385.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor						15.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	-		-	6 Produk	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	25.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
123.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**95.000.000,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	95.000.000,00						-	0,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						95.000.000,00					-		0,00	
		-						95.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						75.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	9500 Unit	75.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						20.000.000,00							0,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-		-	50 Orang	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
124.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**620.000.000,00**							**680.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	620.000.000,00						-	680.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						620.000.000,00					-		680.000.000,00	
		-						620.000.000,00					-		680.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	620.000.000,00						-	680.000.000,00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						620.000.000,00							680.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	30 UMKM	620.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	680.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**7.714.083.000,00**							**7.714.083.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.714.083.000,00**							**7.714.083.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**7.714.083.000,00**							**7.714.083.000,00**	
125.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.523.683.000,00**							**7.523.683.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	-		-	100 %	7.523.683.000,00						-	7.523.683.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						43.500.000,00					DPMPTSP		43.500.000,00	
		-						43.500.000,00					DPMPTSP		43.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.750.000,00						-	1.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	33.500.000,00						-	33.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.750.000,00						-	1.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.750.000,00						-	1.750.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.750.000,00						-	1.750.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.750.000,00						-	1.750.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.250.000,00						-	1.250.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						33.500.000,00							33.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	33.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	33.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.750.000,00							1.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.750.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.750.000,00							1.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.750.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.750.000,00							1.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.750.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.750.000,00							1.750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.750.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.750.000,00							1.750.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	1.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.750.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.250.000,00							1.250.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	1.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.826.645.000,00					DPMPTSP		5.826.645.000,00	
	-	-						5.826.645.000,00					DPMPTSP		5.826.645.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	1.250.000,00						-	1.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	140.280.000,00						-	140.280.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.250.000,00						-	1.250.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.681.865.000,00						-	5.681.865.000,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.681.865.000,00							5.681.865.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	26 Orang/bulan	5.681.865.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	5.681.865.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.250.000,00							1.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	1.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						140.280.000,00							140.280.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	140.280.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	140.280.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.250.000,00							1.250.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	2.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						313.386.000,00					DPMPTSP dan MPP		313.386.000,00	
		-						313.386.000,00					DPMPTSP dan MPP		313.386.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	2.080.000,00						-	2.080.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	36.000.000,00						-	36.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	220.000.000,00						-	220.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	20.306.000,00						-	20.306.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	15.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						220.000.000,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	220.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	220.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.306.000,00							20.306.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	20.306.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	20.306.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.080.000,00							2.080.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	2.080.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	2.080.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						36.000.000,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	36.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	36.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.067.702.000,00					DPMPTSP		1.067.702.000,00	
		-						1.067.702.000,00					DPMPTSP		1.067.702.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	319.600.000,00						-	319.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	746.402.000,00						-	746.402.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.700.000,00						-	1.700.000,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.700.000,00							1.700.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.700.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						319.600.000,00							319.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	319.600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	319.600.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						746.402.000,00							746.402.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	746.402.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	746.402.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						272.450.000,00					DPMPTSP dan MPP		272.450.000,00	
		-						272.450.000,00					DPMPTSP dan MPP		272.450.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	160.250.000,00						-	160.250.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	12.200.000,00						-	12.200.000,00	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					160.250.000,00							160.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	24 Unit	160.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	160.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.200.000,00							12.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	12.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	12.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	100.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
126.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**68.000.000,00**							**68.000.000,00**	
			Realisasi Total terhadap Target Investasi	-		-	100 %	68.000.000,00						-	68.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						6.000.000,00					Pelaku Usaha		6.000.000,00	
		-						6.000.000,00					Pelaku Usaha		6.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-		-	-	6.000.000,00						-	6.000.000,00	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-		-	1 Dokumen	6.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	6.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						62.000.000,00					Investor		62.000.000,00	
		-						62.000.000,00					Investor		62.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	62.000.000,00						-	62.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						62.000.000,00							62.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	62.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	62.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
127.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**4.500.000,00**							**4.500.000,00**	
			Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	-		-	4,4 %	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						4.500.000,00					Calon Investor		4.500.000,00	
		-						4.500.000,00					Calon Investor		4.500.000,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
	2.18.03.2.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						4.500.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-		-	1 Dokumen	4.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	4.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
128.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**33.000.000,00**							**33.000.000,00**	
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	-		-	82 %	33.000.000,00						-	33.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						33.000.000,00					Pelaku Usaha		33.000.000,00	
		-						33.000.000,00					Pelaku Usaha		33.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang meniadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	8.500.000,00						-	8.500.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						8.500.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	8.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	8.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	165 Pelaku Usaha	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						4.500.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	50 Kegiatan Usaha	4.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	4.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
129.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**49.500.000,00**							**49.500.000,00**	
			Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usahanya	-		-	94 %	49.500.000,00						-	49.500.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						49.500.000,00					Pelaku Usaha		49.500.000,00	
		-						49.500.000,00					Pelaku Usaha		49.500.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	-	7.900.000,00						-	7.900.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	-	39.000.000,00						-	39.000.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	2.600.000,00						-	2.600.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						39.000.000,00							39.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	150 Pelaku Usaha	39.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	39.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						7.900.000,00							7.900.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	24 Kegiatan Usaha	7.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	7.900.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						2.600.000,00							2.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	4 Kegiatan Usaha	2.600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	2.600.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
130.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**35.400.000,00**							**35.400.000,00**	
			Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	-		-	91 %	35.400.000,00						-	35.400.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						35.400.000,00					Perangkat Daerah pengguna data perizinan dan penanaman modal		35.400.000,00	
		-						35.400.000,00					Perangkat Daerah pengguna data perizinan dan penanaman modal		35.400.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-		-	-	35.400.000,00						-	35.400.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						35.400.000,00							35.400.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-		-	1 Dokumen	35.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	35.400.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						**16.914.292.000,00**							**22.654.291.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.694.292.000,00**							**21.632.291.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**16.694.292.000,00**							**21.632.291.000,00**	
131.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.798.497.000,00**							**8.532.096.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemeritah daerah	-		-	100 %	3.003.623.000,00						-	3.710.182.000,00	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemeritah daerah	-		-	100 %	4.794.874.000,00						-	4.821.914.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		60.000.000,00	
		-						40.000.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.500.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.754.874.000,00					-		4.761.914.000,00	
		-						4.754.874.000,00					-		4.761.914.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	213.960.000,00						-	216.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.535.914.000,00						-	4.535.914.000,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.535.914.000,00							4.535.914.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	26 Orang/bulan	4.535.914.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.535.914.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						213.960.000,00							216.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	13 Dokumen	213.960.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	216.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						55.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						55.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	45.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	45 Paket	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						45.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	45 Orang	45.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						107.543.000,00					-		175.884.000,00	
		-						107.543.000,00					-		175.884.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	4.005.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	30.000.000,00						-	85.780.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	47.543.000,00						-	55.099.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	11.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						47.543.000,00							55.099.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	47.543.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	55.099.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00							4.005.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.005.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							85.780.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	100 Laporan	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	85.780.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.000.000,00					-		472.136.000,00	
		-						15.000.000,00					-		472.136.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	445.096.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	27.040.000,00	
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							445.096.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	445.096.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							27.040.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	27.040.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.637.954.000,00					-		2.774.036.000,00	
		-						2.637.954.000,00					-		2.774.036.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.132.086.000,00						-	1.270.268.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.500.868.000,00						-	1.500.868.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	2.900.000,00	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							2.900.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.900.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.132.086.000,00							1.270.268.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.132.086.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.270.268.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.500.868.000,00							1.500.868.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.500.868.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.868.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						188.126.000,00					-		188.126.000,00	
		-						188.126.000,00					-		188.126.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	178.126.000,00						-	178.126.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						178.126.000,00							178.126.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	178.126.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	178.126.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	16 Unit	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
132.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**2.818.000.000,00**							**4.485.000.000,00**	
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	-		-	21,28 %	2.818.000.000,00						-	4.485.000.000,00	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-		-	22,67 %	2.818.000.000,00						-	4.485.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						2.638.000.000,00					Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		4.205.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						2.638.000.000,00					Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		4.205.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	-	15.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	20.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	-	2.563.000.000,00						-	3.950.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0018	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						2.563.000.000,00							3.950.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	205 Orang	2.563.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	3.950.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	5 Orang	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	25.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						20.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	16 Orang	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	30 Orang	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	30.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota						15.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						180.000.000,00					Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		280.000.000,00	
		-						180.000.000,00					Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		280.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	180.000.000,00						-	280.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						180.000.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	180.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	280.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
133.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**5.717.795.000,00**							**8.210.195.000,00**	
			Jumlah Atlet Berprestasi	-		-	331 Orang	5.717.795.000,00						-	8.210.195.000,00	
			Jumlah Event Olahraga yang Dilaksanakan di Sarana Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	-		-	17 Orang	323.122.000,00						-	1.124.000.000,00	
			Jumlah Event Olahraga yang Dilaksanakan di Sarana Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	-		-	17 Event	5.394.673.000,00						-	7.086.195.000,00	
			Jumlah Pelatih Bersertifikasi	-		-	106 Orang	2.113.923.000,00						-	3.540.750.000,00	
			Jumlah Pelatih Bersertifikasi	-		-	106 Orang	3.603.872.000,00						-	4.669.445.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						3.603.872.000,00					Atlet, Pelaku Olahraga dan Organisasi Keolahragaan		4.669.445.000,00	
		-						3.603.872.000,00					Atlet, Pelaku Olahraga dan Organisasi Keolahragaan		4.669.445.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-		-	-	783.872.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	2.820.000.000,00						-	3.869.445.000,00	
	2.19.03.2.01.0007	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar						783.872.000,00							800.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-		-	3 Kegiatan	783.872.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	800.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						2.820.000.000,00							3.869.445.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	4 Unit	2.820.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.869.445.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						273.101.000,00					Atlet, Pelaku Olahraga dan Organisasi Keolahragaan		275.000.000,00	
		-						273.101.000,00					Atlet, Pelaku Olahraga dan Organisasi Keolahragaan		275.000.000,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	123.101.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	50 Orang	150.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						123.101.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	2 Kegiatan	123.101.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	125.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						323.122.000,00					Atlet, Pelaku Olahraga dan Organisasi Keolahragaan		1.124.000.000,00	
		-						323.122.000,00					Atlet, Pelaku Olahraga dan Organisasi Keolahragaan		1.124.000.000,00	
			Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	-		-	-	113.122.000,00						-	69.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	30.000.000,00						-	28.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	-	75.000.000,00						-	52.000.000,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	30.000.000,00						-	900.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						75.000.000,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	30 Orang	75.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	52.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						30.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	10 Orang	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	900.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota						30.000.000,00							28.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	30 Orang	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	28.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.03.0014	Pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota						113.122.000,00							69.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	113.122.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	69.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	100 Orang	75.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	75.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						1.427.700.000,00					Atlet, Pelaku Olahraga dan Organisasi Keolahragaan		1.991.750.000,00	
		-						1.427.700.000,00					Atlet, Pelaku Olahraga dan Organisasi Keolahragaan		1.991.750.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana. termasuk olahraza disabilitas	-		-	-	1.427.700.000,00						-	1.991.750.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						1.427.700.000,00							1.991.750.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	3 Kerja Sama	1.427.700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	1.991.750.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						90.000.000,00					Atlet, Pelaku Olahraga dan Organisasi Keolahragaan		150.000.000,00	
		-						90.000.000,00					Atlet, Pelaku Olahraga dan Organisasi Keolahragaan		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
		Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat					30.000.000,00							50.000.000,00	
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.05.0011	Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota					30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksana Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Lembaga	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.05.0012	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat					30.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	30 Orang	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
134.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**360.000.000,00**							**405.000.000,00**	
			Jumlah Prestasi Pramuka Tingkat Internasional, Nasional dan Provinsi yang Diraih	-		-	10 Medali	360.000.000,00						-	405.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						360.000.000,00					Anggota Pramuka dan Organisasi Kepramukaan		405.000.000,00	
		-						360.000.000,00					Anggota Pramuka dan Organisasi Kepramukaan		405.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-		-	-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	20.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	1 Organisasi	300.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.04.2.01.0010	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.04.2.01.0013	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-		-	1 Organisasi	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.04.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.04.2.01.0015	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	24 Orang	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**220.000.000,00**							**1.022.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**220.000.000,00**							**1.022.000.000,00**	
135.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**20.000.000,00**							**410.000.000,00**	
			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	-		-	7,70 %	20.000.000,00						-	410.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						7.000.000,00					Pelaku Pariwisata dan Obyek Wisata		40.000.000,00	
		-						7.000.000,00					Pelaku Pariwisata dan Obyek Wisata		40.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-		-	-	7.000.000,00						-	40.000.000,00	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						7.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-		-	2 Lokasi	7.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	40.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						8.000.000,00					Pelaku Pariwisata dan Obyek Wisata		310.000.000,00	
		-						8.000.000,00					Pelaku Pariwisata dan Obyek Wisata		310.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	-	3.000.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	300.000.000,00	
	3.26.02.2.02.2004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					5.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	3 Unit	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.02.2.02.2009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	10.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						5.000.000,00					Pelaku Pariwisata dan Obyek Wisata		60.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Pelaku Pariwisata dan Obyek Wisata		60.000.000,00	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-		-	-	5.000.000,00						-	60.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						5.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-		-	2 Lokasi	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	60.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
136.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**180.000.000,00**							**430.000.000,00**	
			Tingkat Hunian Akomodasi	-		-	30,44 %	180.000.000,00						-	430.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						180.000.000,00					-		430.000.000,00	
		-						180.000.000,00					-		430.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	5.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	5.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	40.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	130.000.000,00						-	300.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						5.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	40.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						40.000.000,00							60.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-		-	1 Dokumen	40.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	60.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						130.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	1 Kegiatan	130.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						5.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	4 Promosi	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	30.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
137.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**20.000.000,00**							**182.000.000,00**	
			Prosentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	-		-	25 %	20.000.000,00						-	182.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						20.000.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif		182.000.000,00	
		-						20.000.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif		182.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-		-	-	5.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-		-	-	5.000.000,00						-	23.000.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	-	5.000.000,00						-	89.000.000,00	
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	-		-	-	5.000.000,00						-	40.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						5.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	30.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						5.000.000,00							89.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	5 Orang	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	89.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI						5.000.000,00							40.000.000,00	
		Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	-		-	5 Orang	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	40.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						5.000.000,00							23.000.000,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	-		-	5 Orang	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	23.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						**7.489.134.502,00**							**7.721.925.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.489.134.502,00**							**7.721.925.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**7.478.269.502,00**							**7.708.825.000,00**	
138.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.945.724.502,00**							**7.299.825.000,00**	
		-	-	-		-	-	6.945.724.502,00						-	7.299.825.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.175.000,00					-		31.000.000,00	
		-						18.175.000,00					-		31.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	225.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	17.500.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	225.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	225.000,00						-	2.000.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	17.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						225.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	225.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						225.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	225.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						225.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	225.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.588.562.000,00					-		5.540.000.000,00	
		-						5.588.562.000,00					-		5.540.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	146.500.000,00						-	168.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	225.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.441.837.000,00						-	5.370.000.000,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.441.837.000,00							5.370.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	36 Orang/bulan	5.441.837.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.370.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						146.500.000,00							168.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	146.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	168.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						225.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	5 Laporan	225.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						450.000,00							59.000.000,00	
		-						450.000,00					-		59.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	225.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	225.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	55.000.000,00	
2.23.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						225.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	3 Dokumen	225.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						225.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	2 Dokumen	225.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	42 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	55.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.987.502,00					-		211.925.000,00	
		-						52.987.502,00					-		211.925.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	4.800.000,00						-	5.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	18.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.687.502,00						-	85.775.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	17.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	6.500.000,00						-	17.000.000,00	
2.23.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	17.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.500.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	17.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						18.687.502,00							85.775.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	18.687.502,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	85.775.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.800.000,00							5.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	4.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	5.400.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	30 Laporan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	3.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						5.000.000,00							18.750.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	12 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	18.750.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						14.000.000,00					-		105.000.000,00	
		-						14.000.000,00					-		105.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						9.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	55.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.086.550.000,00					-		1.027.900.000,00	
		-						1.086.550.000,00					-		1.027.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	444.100.000,00						-	469.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	642.450.000,00						-	558.800.000,00	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						444.100.000,00							469.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	444.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	469.100.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						642.450.000,00							558.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	642.450.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	558.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						185.000.000,00					-		325.000.000,00	
		-						185.000.000,00					-		325.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	9.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	170.000.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	6.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						170.000.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	23 Unit	170.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	175.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	120.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
139.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**512.545.000,00**							**389.000.000,00**	
			-	-		-	-	512.545.000,00						-	389.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						319.500.000,00					-		194.000.000,00	
		-						319.500.000,00					-		194.000.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	-	107.500.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-		-	-	5.000.000,00						-	7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	5.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	5.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	-	102.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	7.500.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	0 Perpustakaan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	7.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						102.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-		-	1 Perpustakaan	102.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	0 Perpustakaan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	7.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	0 Orang	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	7.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-		-	0 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	7.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						107.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	-		-	48 Eksemplar	107.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-		-	1 Eksemplar	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-		-	1 Perpustakaan	60.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						193.045.000,00					-		195.000.000,00	
		-						193.045.000,00					-		195.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	-	128.045.000,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-		-	1 Perpustakaan	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	-		-	6 Orang	35.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						128.045.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	15 Lokus	128.045.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	130.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
140.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						20.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.23.03.2.01003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	0 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.2.01004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	1 Eksemplar	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan untuk Masyarakat Produktif, Adaptif dan Tangguh		-	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**10.865.000,00**							**13.100.000,00**	
141.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**9.980.000,00**							**11.500.000,00**	
		-	-	-		-	-	9.980.000,00						-	11.500.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						3.240.000,00					-		4.000.000,00	
		-						3.240.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.540.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-		-	-	1.700.000,00						-	2.200.000,00	
	2.24.02.2.01002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						1.700.000,00							2.200.000,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-		-	6000 berkas Berkas	1.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.200.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						1.540.000,00							1.800.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	27 Laporan	1.540.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						3.650.000,00					-		4.000.000,00	
		-						3.650.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-		-	-	3.650.000,00						-	4.000.000,00	
	2.24.02.2.02004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						3.650.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	-		-	1700 Arsip	3.650.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						3.090.000,00					-		3.500.000,00	
		-						3.090.000,00					-		3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.590.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	-	1.500.000,00						-	1.700.000,00	
	2.24.02.2.03001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						1.500.000,00							1.700.000,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	34 Pengguna	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.700.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.03002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						1.590.000,00							1.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	3 Laporan	1.590.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.800.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
142.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**885.000,00**							**1.600.000,00**	
		-	-	-		-	-	885.000,00						-	1.600.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						225.000,00					-		600.000,00	
		-						225.000,00					-		600.000,00	
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	-		-	-	225.000,00						-	600.000,00	
	2.24.03.2.01003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						225.000,00							600.000,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	-		-	500 Berkas	225.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	600.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						660.000,00					-		1.000.000,00	
		-						660.000,00					-		1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	-		-	-	660.000,00						-	1.000.000,00	
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					660.000,00							1.000.000,00	
		Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	-		-	1200 Arsip	660.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Dinas Pertanian dan Perikanan							**19.037.543.235,00**							**19.269.750.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**19.037.543.235,00**							**19.269.750.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**335.000.000,00**							**490.000.000,00**	
143.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**15.000.000,00**							**50.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	15.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						15.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-		-	-	15.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						15.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-		-	1 Unit	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
144.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**305.000.000,00**							**400.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	305.000.000,00						-	400.000.000,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						305.000.000,00					-		400.000.000,00	
		-						305.000.000,00					-		400.000.000,00	
		-	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	-		-	-	35.000.000,00						-	75.000.000,00	
		-	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	
		-	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	250.000.000,00						-	275.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	4 Unit	250.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	275.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						35.000.000,00							75.000.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	-		-	5 Unit	35.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
145.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**15.000.000,00**							**40.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	15.000.000,00						-	40.000.000,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						5.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	50 Unit Usaha	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	10.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						10.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	30.000.000,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 Ton	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	30.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**18.702.543.235,00**							**18.779.750.000,00**	
146.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.427.278.385,00**							**13.169.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	13.427.278.385,00						-	13.169.000.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.000.000,00					-		24.000.000,00	
		-						27.000.000,00					-		24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	15.000.000,00						-	12.000.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
3.27.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	14 Laporan	12.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.806.060.750,00					-		11.276.250.000,00	
		-						11.806.060.750,00					-		11.276.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	2.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.750.000,00						-	2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	7.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	11.529.810.750,00						-	11.000.000.000,00	
3.27.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.529.810.750,00							11.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	100 Orang/bulan	11.529.810.750,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	11.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	250.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.750.000,00							2.750.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	2.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.750.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	7.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						32.450.000,00					-		32.450.000,00	
		-						32.450.000,00					-		32.450.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	32.450.000,00						-	32.450.000,00	
3.27.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						32.450.000,00							32.450.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	12 Laporan	32.450.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	32.450.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.500.000,00					-		4.000.000,00	
		-						3.500.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	3.500.000,00						-	4.000.000,00	
3.27.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	100 Orang	3.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						202.500.000,00					-		269.500.000,00	
		-						202.500.000,00					-		269.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	5.500.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	40.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	110.000.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	7.500.000,00						-	7.500.000,00	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.500.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.500.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.500.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						110.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	110.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	125.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	5 Paket	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.500.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	5.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.500.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	40.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.105.267.635,00					-		1.187.800.000,00	
		-						1.105.267.635,00					-		1.187.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	320.000.000,00						-	340.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	785.267.635,00						-	847.800.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						320.000.000,00							340.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	320.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	340.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						785.267.635,00							847.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	785.267.635,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	847.800.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						250.500.000,00					-		375.000.000,00	
		-						250.500.000,00					-		375.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	28.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	170.000.000,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	27.500.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	25.000.000,00						-	35.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						27.500.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	27.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	40.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						170.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	14 Unit	170.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	50 Unit	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	35.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						28.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	28.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
147.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1.300.639.850,00**							**1.685.750.000,00**	
			-	-		-	-	1.300.639.850,00						-	1.685.750.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						900.750.000,00					-		1.250.750.000,00	
		-						900.750.000,00					-		1.250.750.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	-	250.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	-	420.000.000,00						-	620.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	-	230.750.000,00						-	330.750.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						230.750.000,00							330.750.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	12 Laporan	230.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	330.750.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						420.000.000,00							620.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	12 Laporan	420.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	620.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	63 Ton	250.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Nguter || Desa Lawu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						142.389.850,00					-		175.000.000,00	
		-						142.389.850,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	-	142.389.850,00						-	175.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						142.389.850,00							175.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	12 Dokumen	142.389.850,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	175.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						257.500.000,00					-		10.000.000,00	
		-						257.500.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-		-	-	257.500.000,00						-	10.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						257.500.000,00							10.000.000,00	
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-		-	12 Laporan	257.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	10.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		250.000.000,00	
		-						0,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	-		-	-	0,00						-	250.000.000,00	
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						0,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	-		-	12 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
148.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**2.837.875.000,00**							**2.705.000.000,00**	
			-	-		-	-	2.837.875.000,00						-	2.705.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						20.000.000,00					-		30.000.000,00	
			-					20.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		-	12 Laporan	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	30.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						2.817.875.000,00					-		2.675.000.000,00	
			-					2.817.875.000,00					-		2.675.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	662.960.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-		-	-	1.800.800.000,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	354.115.000,00						-	400.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						0,00							25.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	25.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						662.960.000,00							250.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	0 Unit	662.960.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						354.115.000,00							400.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	15 Unit	354.115.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						1.800.800.000,00							2.000.000.000,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-		-	5 Unit	1.800.800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
149.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**160.000.000,00**							**200.000.000,00**	
			-	-		-	-	160.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		75.000.000,00	
			-					50.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	-		-	12 Wilayah	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					-		110.000.000,00	
			-					100.000.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						50.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						10.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	15.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
150.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**80.000.000,00**							**120.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	80.000.000,00						-	120.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						80.000.000,00					-		120.000.000,00	
		-						80.000.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	-		-	-	40.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	-	40.000.000,00						-	60.000.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						40.000.000,00							60.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-		-	2500 Ha	40.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						40.000.000,00							60.000.000,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	-		-	1500 Ha	40.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
151.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**896.750.000,00**							**900.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	896.750.000,00						-	900.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						896.750.000,00					-		900.000.000,00	
		-						896.750.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	696.750.000,00						-	700.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-		-	12 Dokumen	100.000.000,00	-	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	12 Unit	100.000.000,00	-	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						696.750.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	1064 Unit	696.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	700.000.000,00	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja						**7.899.424.141,00**							**8.886.300.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.657.724.141,00**							**8.613.800.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**7.657.724.141,00**							**8.613.800.000,00**	
152.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.917.275.141,00**							**7.711.600.000,00**	
		-	-	-		-	-	6.917.275.141,00						-	7.711.600.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.004.800,00					-		31.500.000,00	
		-						25.004.800,00					-		31.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	21.122.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.382.800,00						-	1.500.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					21.122.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	21.122.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	25.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.382.800,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	1.382.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.500.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.143.241.072,00					-		6.765.000.000,00	
		-						6.143.241.072,00					-		6.765.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	3.600.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	222.420.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	5.350.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.910.371.072,00						-	6.500.000.000,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.910.371.072,00							6.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	12 Orang/bulan	5.910.371.072,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	6.500.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						222.420.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	222.420.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	250.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						3.600.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	4.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Pajak Daerah	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	2.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.350.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	5.350.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	6.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.03.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					-		1.000.000,00	
		-						0,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.764.000,00					-		148.700.000,00	
		-						134.764.000,00					-		148.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.800.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	53.274.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	75.690.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						75.690.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	75.690.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	80.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	11 Paket	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	2.500.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.800.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	2.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						53.274.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	110 Laporan	53.274.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	60.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							2.200.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	2.200.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						293.385.269,00					-		354.400.000,00	
		-						293.385.269,00					-		354.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	289.385.269,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	4.000.000,00						-	4.400.000,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00							4.400.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	3000 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	4.400.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						289.385.269,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	289.385.269,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	350.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						320.880.000,00					-		411.000.000,00	
		-						320.880.000,00					-		411.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	310.880.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						310.880.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	38 Unit	310.880.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	400.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	11.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
153.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**0,00**							**10.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						0,00					-		10.000.000,00	
		-						0,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						0,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	5.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-		-	1 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	5.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
154.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**276.000.000,00**							**374.500.000,00**	
		-	-	-		-	-	276.000.000,00						-	374.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						180.000.000,00					-		267.500.000,00	
		-						180.000.000,00					-		267.500.000,00	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-		-	-	0,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	180.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						0,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-		-	0 Lembaga	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	-	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	7.500.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						0,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-		-	0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	60.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						180.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	64 Orang	180.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	200.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						76.120.000,00					-		85.000.000,00	
		-						76.120.000,00					-		85.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-		-	-	76.120.000,00						-	85.000.000,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						76.120.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-		-	40 Lembaga	76.120.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	85.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja						885.000,00					-		1.000.000,00	
		-						885.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-		-	-	885.000,00						-	1.000.000,00	
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi						885.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-		-	4 Perizinan	885.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						605.000,00					-		1.000.000,00	
		-						605.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	-		-	-	605.000,00						-	1.000.000,00	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						605.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	-		-	50 Perusahaan	605.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						18.390.000,00					-		20.000.000,00	
		-						18.390.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-		-	-	18.390.000,00						-	20.000.000,00	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						18.390.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-		-	2 Dokumen	18.390.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	20.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
155.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**50.000.000,00**							**69.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	50.000.000,00						-	69.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		4.000.000,00	
		-						0,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja						0,00							1.000.000,00	
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						0,00							1.000.000,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		2.000.000,00	
		-						0,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	2.07.04.2.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	-		-	0 Lembaga	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	-		-	0 Lembaga	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						50.000.000,00					-		61.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		61.000.000,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						0,00							1.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-		-	1000 Orang	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	60.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		2.000.000,00	
		-						0,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Layanan Terpadu	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.04.0004	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Layanan Terpadu	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
156.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**414.449.000,00**							**448.700.000,00**	
			-	-		-	-	414.449.000,00						-	448.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						129.200.000,00					-		132.200.000,00	
		-						129.200.000,00					-		132.200.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	-	129.200.000,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	-		-	-	0,00						-	700.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	0 Perusahaan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.500.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						0,00							700.000,00	
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	-		-	0 Perusahaan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	700.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						129.200.000,00							130.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	12 Laporan	129.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	130.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						285.249.000,00					-		316.500.000,00	
		-						285.249.000,00					-		316.500.000,00	
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-		-	-	125.765.800,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	-	144.483.200,00						-	150.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-		-	40 Perkara	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	5.500.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-		-	15 Perkara	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	5.500.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-		-	40 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	5.500.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						125.765.800,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-		-	6 Lembaga	125.765.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	150.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						144.483.200,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	5 Orang	144.483.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	150.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**191.700.000,00**							**217.500.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**191.700.000,00**							**215.500.000,00**	
157.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**127.500.000,00**							**142.500.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	127.500.000,00						-	142.500.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						127.500.000,00					-		142.500.000,00	
		-						127.500.000,00					-		142.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-		-	-	7.500.000,00						-	8.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	-	120.000.000,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						0,00							1.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						0,00							1.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						0,00							1.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						7.500.000,00							8.500.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	8.500.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						120.000.000,00							130.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	11 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	130.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						0,00							1.000.000,00	
		Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
158.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**0,00**							**2.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00					-		2.000.000,00	
		-						0,00					-		2.000.000,00	
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							1.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
159.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**64.200.000,00**							**71.000.000,00**	
		-	-	-		-		64.200.000,00						-	71.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						64.200.000,00					-		71.000.000,00	
		-						64.200.000,00					-		71.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-		-	-	30.800.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-		-	-	33.400.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						33.400.000,00							35.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-		-	1 Dokumen	33.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	35.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas						30.800.000,00							35.000.000,00	
		Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-		-	2 Dokumen	30.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	35.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas						0,00							1.000.000,00	
		Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**0,00**							**2.000.000,00**	
160.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**0,00**							**1.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		1.000.000,00	
		-						0,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	0 Kepala Keluarga	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
161.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**0,00**							**1.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						0,00					-		1.000.000,00	
		-						0,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						0,00							1.000.000,00	
		Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	-		-	0 Satuan Permukiman	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	1.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	X							**50.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**50.000.000,00**							**55.000.000,00**	
162.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**50.000.000,00**							**55.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.000.000,00					-		55.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	24 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	55.000.000,00	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Bagian Pemerintahan						**375.000.000,00**							**1.995.000.000,00**	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**375.000.000,00**							**1.995.000.000,00**	
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**375.000.000,00**							**1.995.000.000,00**	
163.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**375.000.000,00**							**1.995.000.000,00**	
			-	-		-	-	375.000.000,00						-	1.995.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						295.000.000,00					-		1.800.000.000,00	
		-						295.000.000,00					-		1.800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	-	145.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	-	85.000.000,00						-	425.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	-	65.000.000,00						-	575.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						85.000.000,00							425.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	0 Dokumen	85.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	425.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						65.000.000,00							575.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	0 Dokumen	65.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	575.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						145.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	0 Dokumen	145.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	800.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						80.000.000,00					-		195.000.000,00	
		-						80.000.000,00					-		195.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	-	70.000.000,00						-	135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-		-	-	10.000.000,00						-	60.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						70.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	0 Dokumen	70.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	135.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						10.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-		-	0 Laporan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	60.000.000,00	Bagian Pemerintahan
		Bagian Kesejahteraan Rakyat						**11.204.507.000,00**							**17.100.000.000,00**	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**11.204.507.000,00**							**17.100.000.000,00**	
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**11.204.507.000,00**							**17.100.000.000,00**	
164.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**11.204.507.000,00**							**17.100.000.000,00**	
			-	-		-	-	11.204.507.000,00						-	17.100.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						11.204.507.000,00					-		17.100.000.000,00	
		-						11.204.507.000,00					-		17.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	-	5.956.048.000,00						-	7.300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	-	919.200.000,00						-	1.350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	-	4.329.259.000,00						-	8.450.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						5.956.048.000,00							7.300.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	0 Dokumen	5.956.048.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.300.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						4.329.259.000,00							8.450.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	0 Dokumen	4.329.259.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	8.450.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						919.200.000,00							1.350.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	0 Dokumen	919.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.350.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Bagian Hukum						**319.400.000,00**							**2.565.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**319.400.000,00**							**2.565.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**319.400.000,00**							**2.565.000.000,00**	
165.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**319.400.000,00**							**2.565.000.000,00**	
		-	-	-	-	-		319.400.000,00						-	2.565.000.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						319.400.000,00					-		2.565.000.000,00	
		-						319.400.000,00					-		2.565.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	-	71.000.000,00						-	587.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	-	54.200.000,00						-	646.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	-	194.200.000,00						-	1.332.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						54.200.000,00							646.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	0 Dokumen	54.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	646.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						71.000.000,00							587.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	0 Kasus	71.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	587.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						194.200.000,00							1.332.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	0 Dokumen	194.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.332.000.000,00	Bagian Hukum
		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam						**395.000.000,00**							**670.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**395.000.000,00**							**670.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**395.000.000,00**							**670.000.000,00**	
166.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**395.000.000,00**							**670.000.000,00**	
		-	-	-	-	-		395.000.000,00						-	670.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						225.000.000,00					-		425.000.000,00	
		-						225.000.000,00					-		425.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	-		-	-	10.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	-	150.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	-	35.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	-	30.000.000,00						-	100.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	0 Dokumen	150.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	200.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	0 Laporan	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						35.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	0 Dokumen	35.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	-		-	0 Dokumen	10.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						170.000.000,00					-		245.000.000,00	
		-						170.000.000,00					-		245.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-		-	-	7.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-		-	-	3.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-		-	-	160.000.000,00						-	200.000.000,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						160.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-		-	0 Dokumen	160.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	200.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						3.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-		-	0 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	20.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						7.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-		-	0 Dokumen	7.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Bagian Administrasi Pembangunan						**115.000.000,00**							**492.835.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**115.000.000,00**							**492.835.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**115.000.000,00**							**492.835.000,00**	
167.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**115.000.000,00**							**492.835.000,00**	
			-	-		-	-	115.000.000,00						-	492.835.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						115.000.000,00					-		492.835.000,00	
			-					115.000.000,00					-		492.835.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	-	25.685.000,00						-	46.435.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	-	33.265.000,00						-	171.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	-	56.050.000,00						-	275.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						25.685.000,00							46.435.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	0 Dokumen	25.685.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	46.435.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						56.050.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	0 Laporan	56.050.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	275.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						33.265.000,00							171.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	0 Laporan	33.265.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	171.400.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						**577.618.000,00**							**860.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**577.618.000,00**							**860.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**577.618.000,00**							**860.000.000,00**	
168.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**577.618.000,00**							**860.000.000,00**	
			-	-		-	-	577.618.000,00						-	860.000.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						577.618.000,00					-		860.000.000,00	
			-					577.618.000,00					-		860.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	-	23.188.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	512.790.000,00						-	700.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	41.640.000,00						-	80.000.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						512.790.000,00							700.000.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	0 Dokumen	512.790.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	700.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						23.188.000,00							80.000.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	0 Dokumen	23.188.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	80.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						41.640.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	0 Orang	41.640.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	80.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Bagian Umum						**42.977.884.000,00**							**80.690.713.077,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**42.977.884.000,00**							**80.690.713.077,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**42.977.884.000,00**							**80.690.713.077,00**	
169.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**42.977.884.000,00**							**80.690.713.077,00**	
			-	-		-	-	42.977.884.000,00						-	80.690.713.077,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						109.050.000,00					-		133.000.000,00	
			-					109.050.000,00					-		133.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	31.340.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	500.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	73.710.000,00						-	25.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						31.340.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	0 Dokumen	31.340.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	80.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.500.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	0 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						500.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	0 Dokumen	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.500.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	0 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						500.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	0 Dokumen	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						73.710.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	0 Laporan	73.710.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.958.639.000,00					-		33.045.713.077,00	
		-						23.958.639.000,00					-		33.045.713.077,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	500.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	637.860.000,00						-	900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	500.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	7.100.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	23.312.679.000,00						-	32.096.713.077,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						23.312.679.000,00							32.096.713.077,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	0 Orang/bulan	23.312.679.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	32.096.713.077,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						637.860.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	637.860.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	900.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						500.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	0 Laporan	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.100.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	0 Laporan	7.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	35.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						500.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	0 Dokumen	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						156.500.000,00					-		772.000.000,00	
		-						156.500.000,00					-		772.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	1.500.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	5.700.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	144.350.000,00						-	225.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	4.950.000,00						-	500.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						144.350.000,00							225.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	144.350.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	225.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.700.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	0 Dokumen	5.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.500.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	0 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	40.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						4.950.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	0 Orang	4.950.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.308.600.000,00					-		5.565.000.000,00	
		-						3.308.600.000,00					-		5.565.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	39.000.000,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	200.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	900.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.302.455.000,00						-	2.200.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	40.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	150.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	383.650.000,00						-	535.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	293.495.000,00						-	435.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	200.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						383.650.000,00							535.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	383.650.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	535.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						293.495.000,00							435.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	293.495.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	435.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.302.455.000,00							2.200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.302.455.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.200.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.000.000,00							165.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	165.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						39.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	39.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	130.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						200.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	0 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	400.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						900.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	900.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.351.010.000,00					-		2.000.000.000,00	
		-						1.351.010.000,00					-		2.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	1.000.350.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	350.660.000,00						-	500.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.000.350.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	1.000.350.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						350.660.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	350.660.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.618.260.000,00					-		8.870.000.000,00	
		-						7.618.260.000,00					-		8.870.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	2.700.000.000,00						-	3.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.715.460.000,00						-	5.000.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	350.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.800.000,00						-	20.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.800.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	2.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	20.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.700.000.000,00							3.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	2.700.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.500.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	350.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.715.460.000,00							5.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	4.715.460.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.473.142.000,00					-		24.550.000.000,00	
		-						2.473.142.000,00					-		24.550.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	671.050.000,00						-	1.800.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.105.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	131.700.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	51.132.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	514.260.000,00						-	20.000.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						131.700.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	131.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	250.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.105.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	0 Unit	1.105.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						51.132.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	51.132.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						671.050.000,00							1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	671.050.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.800.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						514.260.000,00							20.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	514.260.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	20.000.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.547.258.000,00					-		1.775.000.000,00	
		-						1.547.258.000,00					-		1.775.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	1.097.258.000,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	250.000.000,00						-	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	300.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.097.258.000,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	0 Orang/Bulan	1.097.258.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.200.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	0 Paket	200.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	300.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						250.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	0 Orang	250.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	275.000.000,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						2.455.425.000,00					-		3.980.000.000,00	
		-						2.455.425.000,00					-		3.980.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	1.548.400.000,00						-	2.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	-	117.185.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	789.840.000,00						-	1.300.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1.548.400.000,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.548.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						789.840.000,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	0 Paket	789.840.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.300.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						117.185.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	0 Paket	117.185.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	180.000.000,00	Bagian Umum
		Bagian Organisasi						**230.000.000,00**							**1.436.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**230.000.000,00**							**1.436.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**230.000.000,00**							**1.436.000.000,00**	
170.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**230.000.000,00**							**1.436.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	230.000.000,00						-	1.436.000.000,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						230.000.000,00					-		1.436.000.000,00	
		-						230.000.000,00					-		1.436.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	85.000.000,00						-	297.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	25.000.000,00						-	188.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	-	35.000.000,00						-	518.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	-	35.000.000,00						-	212.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	50.000.000,00						-	221.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						35.000.000,00							518.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	0 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	518.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						50.000.000,00							221.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	0 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	221.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						35.000.000,00							212.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	0 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	212.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						25.000.000,00							188.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	0 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	188.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						85.000.000,00							297.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	0 Dokumen	85.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	297.000.000,00	Bagian Organisasi
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						**3.700.000.000,00**							**4.150.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.700.000.000,00**							**4.150.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.700.000.000,00**							**4.150.000.000,00**	
171.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.700.000.000,00**							**4.150.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	3.700.000.000,00						-	4.150.000.000,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						3.700.000.000,00					-		4.150.000.000,00	
		-						3.700.000.000,00					-		4.150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	-	300.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	2.200.000.000,00						-	2.400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	-	1.200.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	0 Laporan	300.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	350.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						2.200.000.000,00							2.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	0 Laporan	2.200.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.400.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						1.200.000.000,00							1.400.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	0 Laporan	1.200.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.400.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Sekretariat DPRD						**78.361.380.309,00**							**78.478.961.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**78.361.380.309,00**							**78.478.961.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**78.361.380.309,00**							**78.478.961.000,00**	
172.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**46.034.459.309,00**							**46.072.961.000,00**	
			-	-		-	-	46.034.459.309,00						-	46.072.961.000,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.000.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sekretariat DPRD		62.000.000,00	
		-						55.000.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sekretariat DPRD		62.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	26.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.402.568.809,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sekretariat DPRD		6.426.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						6.402.568.809,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sekretariat DPRD		6.426.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	298.245.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.094.323.809,00						-	6.420.000.000,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.094.323.809,00							6.420.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	46 Orang/bulan	6.094.323.809,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.420.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						298.245.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	60 Dokumen	298.245.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00					Sekretariat DPRD		6.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Sekretariat DPRD		6.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						310.000.000,00					Sekretariat DPRD		321.000.000,00	
		-						310.000.000,00					Sekretariat DPRD		321.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	10.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	11.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						300.000.000,00							310.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	46 Orang	300.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	310.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.858.395.000,00					Sekretariat DPRD		1.876.000.000,00	
		-						1.858.395.000,00					Sekretariat DPRD		1.876.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	200.000.000,00						-	205.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	300.000.000,00						-	305.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	419.750.000,00						-	420.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	177.560.000,00						-	178.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	105.000.000,00						-	105.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	546.085.000,00						-	548.000.000,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					105.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	7 Paket	105.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	105.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						546.085.000,00							548.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	7 Paket	546.085.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	548.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						419.750.000,00							420.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	419.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	420.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						177.560.000,00							178.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	6 Paket	177.560.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	178.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	100.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	105.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						200.000.000,00							205.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	250 Laporan	200.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	205.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00							305.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	30 Laporan	300.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	305.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.926.000.000,00					Sekretariat DPRD, DPRD Sukoharjo		1.980.000.000,00	
		-						1.926.000.000,00					Sekretariat DPRD, DPRD Sukoharjo		1.980.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	426.000.000,00						-	430.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.300.000.000,00						-	1.300.000.000,00	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						426.000.000,00							430.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	8 Unit	426.000.000,00	-	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	430.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	200.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	250.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.300.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	12 Unit	1.300.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.300.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.610.000.000,00					Sekretariat DPRD		2.612.000.000,00	
		-						2.610.000.000,00					Sekretariat DPRD		2.612.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	750.000.000,00						-	750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.830.000.000,00						-	1.830.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	30.000.000,00						-	32.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30.000.000,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	32.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	750.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	750.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.830.000.000,00							1.830.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	1.830.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.830.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.070.389.500,00					-		2.985.000.000,00	
		-						3.070.389.500,00					-		2.985.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.100.389.500,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	650.000.000,00						-	650.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	300.000.000,00						-	310.000.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						650.000.000,00							650.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	34 Unit	650.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	650.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	10 Unit	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						300.000.000,00							310.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	80 Unit	300.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	310.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.100.389.500,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	2.100.389.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						27.444.961.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sekretariat DPRD		27.444.961.000,00	
		-						27.444.961.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sekretariat DPRD		27.444.961.000,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	-	27.119.961.000,00						-	27.119.961.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	-	175.000.000,00						-	175.000.000,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						27.119.961.000,00							27.119.961.000,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	45 Orang/Bulan	27.119.961.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	27.119.961.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-		-	4 Paket	175.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	175.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-		-	45 Orang	150.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	150.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						2.352.145.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sekretariat DPRD		2.360.000.000,00	
		-						2.352.145.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sekretariat DPRD		2.360.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-		-	-	1.092.145.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-		-	-	1.260.000.000,00						-	1.260.000.000,00	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						1.092.145.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-		-	7 Laporan	1.092.145.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.100.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						1.260.000.000,00							1.260.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	-		-	4 Paket	1.260.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.260.000.000,00	Sekretariat DPRD
173.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**32.326.921.000,00**							**32.406.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	32.326.921.000,00						-	32.406.000.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						3.467.205.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo		3.483.000.000,00	
		-						3.467.205.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo		3.483.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	-	3.261.680.000,00						-	3.270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	-	155.525.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-		-	-	20.000.000,00						-	23.000.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						3.261.680.000,00							3.270.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	12 Dokumen	3.261.680.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.270.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						155.525.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	3 Dokumen	155.525.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	160.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD						20.000.000,00							23.000.000,00	
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	23.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						590.000.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo		605.000.000,00	
		-						590.000.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo		605.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	-	110.000.000,00						-	115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-		-	-	110.000.000,00						-	115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	-	130.000.000,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	-	110.000.000,00						-	115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	-	130.000.000,00						-	130.000.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						130.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	7 Dokumen	130.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	130.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						130.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	7 Dokumen	130.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	130.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						110.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	7 Dokumen	110.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	115.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						110.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-		-	7 Dokumen	110.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	115.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						110.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	7 Dokumen	110.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	115.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						676.064.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo		689.000.000,00	
	-	-						676.064.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo		689.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	-	10.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	-	20.000.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	-	48.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-		-	-	36.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-		-	-	24.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-		-	-	50.000.000,00						-	52.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	-	488.064.000,00						-	490.000.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						48.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	5 Laporan	48.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	4 Laporan	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	22.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						50.000.000,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	52.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						36.000.000,00							38.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-		-	12 Laporan	36.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	38.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						24.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-		-	3 Laporan	24.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						488.064.000,00							490.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	1 Dokumen	488.064.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	490.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						4.228.137.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo		4.246.000.000,00	
		-						4.228.137.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo		4.246.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	-	3.139.937.000,00						-	3.150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	-	1.063.200.000,00						-	1.070.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	-	25.000.000,00						-	26.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						3.139.937.000,00							3.150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	6 Dokumen	3.139.937.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.150.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	26.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						1.063.200.000,00							1.070.000.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	7 Dokumen	1.063.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.070.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						3.846.334.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo, Masyarakat		3.855.000.000,00	
		-						3.846.334.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo, Masyarakat		3.855.000.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	-	3.762.245.000,00						-	3.770.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	-	45.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	-	39.089.000,00						-	40.000.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						39.089.000,00							40.000.000,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	3 Laporan	39.089.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	40.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	2 Dokumen	45.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	45.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						3.762.245.000,00							3.770.000.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	3 Dokumen	3.762.245.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.770.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						19.519.181.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo		19.528.000.000,00	
		-						19.519.181.000,00					DPRD Kabupaten Sukoharjo		19.528.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	-	60.000.000,00						-	62.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	-	19.424.181.000,00						-	19.430.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	-	35.000.000,00						-	36.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						19.424.181.000,00							19.430.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	60 Dokumen	19.424.181.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	19.430.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						35.000.000,00							36.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	1 Laporan	35.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	36.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						60.000.000,00							62.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-		-	12 Dokumen	60.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	62.000.000,00	Sekretariat DPRD
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						**7.407.325.920,00**							**8.197.324.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.407.325.920,00**							**8.197.324.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**7.328.325.920,00**							**7.930.324.000,00**	
174.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.488.325.920,00**							**6.716.324.000,00**	
			-	-		-	-	6.488.325.920,00						-	6.716.324.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.909.000,00					-		47.000.000,00	
		-						32.909.000,00					-		47.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	15.000.000,00						-	27.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	7.909.000,00						-	10.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.000.000,00							27.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	27.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.909.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	7.909.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.108.704.000,00					-		6.112.824.000,00	
		-						6.108.704.000,00					-		6.112.824.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	182.880.000,00						-	185.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.921.824.000,00						-	5.921.824.000,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.921.824.000,00							5.921.824.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	34 Orang/bulan	5.921.824.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.921.824.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						182.880.000,00							185.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	15 Dokumen	182.880.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	185.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	4 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						21.000.000,00					-		95.000.000,00	
		-						21.000.000,00					-		95.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	21.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	70.000.000,00	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						21.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	21.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	35 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						93.612.920,00					-		134.500.000,00	
		-						93.612.920,00					-		134.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	6.600.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	6.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	25.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	56.012.920,00						-	60.000.000,00	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						56.012.920,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	56.012.920,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	60.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.600.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	60 Dokumen	6.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	60.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					-		52.000.000,00	
		-						0,00					-		52.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	29.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	13.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							29.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	29.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						232.100.000,00					-		275.000.000,00	
		-						232.100.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	232.100.000,00						-	275.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						232.100.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	25 Unit	232.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	275.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
175.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**450.000.000,00**							**680.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	450.000.000,00						-	680.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						350.000.000,00					-		405.000.000,00	
		-						350.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-		-	-	100.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	-	100.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	-		-	3 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	60.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-		-	1 Berita Acara	100.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	1 Berita Acara	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							75.000.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	3 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						30.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-						30.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						70.000.000,00					-		225.000.000,00	
		-						70.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	-	50.000.000,00						-	185.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						50.000.000,00							185.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	185.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						20.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
176.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**390.000.000,00**							**534.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	390.000.000,00						-	534.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						230.000.000,00					-		285.000.000,00	
		-						230.000.000,00					-		285.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	26.254.400,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	11.480.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	11.300.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-		-	-	10.810.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	6.387.600,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	30.655.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	-	127.428.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-		-	-	5.685.000,00					-		10.000.000,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					11.480.000,00							15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	11.480.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						10.810.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-		-	1 Laporan	10.810.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						5.685.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-		-	1 Laporan	5.685.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						127.428.000,00							150.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	3 Laporan	127.428.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						26.254.400,00							30.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	26.254.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						11.300.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-		-	1 Laporan	11.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	20.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						6.387.600,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-		-	1 Laporan	6.387.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						30.655.000,00							40.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	3 Laporan	30.655.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						110.000.000,00					-		149.000.000,00	
		-						110.000.000,00					-		149.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	1.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			-	-	1.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-		-	-	2.250.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-		-	-	2.250.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-		-	-	750.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-		-	-	750.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	-	20.500.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-		-	-	80.500.000,00						-	100.000.000,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1.500.000,00							5.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						2.250.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-		-	1 Laporan	2.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						750.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-		-	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						20.500.000,00							25.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	1 Laporan	20.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1.500.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						2.250.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-		-	1 Laporan	2.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						750.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-		-	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						80.500.000,00							100.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-		-	1 Laporan	80.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	1.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	1.840.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-		-	-	1.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-		-	-	1.840.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-		-	-	1.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-		-	-	1.840.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	-	20.500.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-		-	-	19.480.000,00						-	45.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)						1.500.000,00							5.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						1.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						1.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						20.500.000,00							25.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	1 Laporan	20.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)						1.840.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	1.840.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						1.840.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-		-	1 Laporan	1.840.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						1.840.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-		-	1 Laporan	1.840.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						19.480.000,00							45.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-		-	1 Laporan	19.480.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**79.000.000,00**							**267.000.000,00**	
177.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**19.000.000,00**							**27.000.000,00**	
			-	-		-	-	19.000.000,00						-	27.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						5.000.000,00					-		7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						5.000.000,00					-		7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-		-	-	5.000.000,00						-	7.000.000,00	
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						14.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						14.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-		-	-	14.000.000,00						-	20.000.000,00	
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						14.000.000,00							20.000.000,00	
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-		-	1 Laporan	14.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	20.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
178.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**60.000.000,00**							**240.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	60.000.000,00						-	240.000.000,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						35.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						35.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	-	30.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						30.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	3 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						25.000.000,00					-		220.000.000,00	
		-						25.000.000,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	-		-	-	15.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	-		-	-	5.000.000,00						-	60.000.000,00	
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						5.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	-		-	2 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	60.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						15.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	-		-	4 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Bendosari || Kelurahan Jombor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah						**335.721.902.985,00**							**378.733.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**335.721.902.985,00**							**378.733.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**335.721.902.985,00**							**378.733.000.000,00**	
179.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**36.573.168.420,00**							**31.125.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	36.573.168.420,00						-	31.125.000.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		65.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	35.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						31.070.914.000,00					-		24.388.000.000,00	
		-						31.070.914.000,00					-		24.388.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	644.880.000,00						-	670.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	25.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	30.398.034.000,00						-	23.708.000.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						30.398.034.000,00							23.708.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	85 Orang/bulan	30.398.034.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	23.708.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						644.880.000,00							670.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	644.880.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	670.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	3.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-		-	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						25.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		36.000.000,00	
		-						40.000.000,00					-		36.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-		-	-	40.000.000,00						-	36.000.000,00	
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah						40.000.000,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-		-	1 Laporan	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	36.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						241.715.000,00					-		285.000.000,00	
		-						241.715.000,00					-		285.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	7.200.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	234.515.000,00						-	275.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						7.200.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	7.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						234.515.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	114 Orang	234.515.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	275.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						488.189.420,00					-		641.000.000,00	
		-						488.189.420,00					-		641.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	21.750.000,00						-	36.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	120.050.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	93.958.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	168.797.420,00						-	235.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	34.634.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	110.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						35.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						168.797.420,00							235.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	168.797.420,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	235.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						34.634.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	34.634.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	90.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	4.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						120.050.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	120.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	25.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						93.958.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	24 Laporan	93.958.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	85.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						21.750.000,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	3600 Dokumen	21.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	36.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.000.000,00					-		250.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	250.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.676.514.000,00					-		3.570.000.000,00	
		-						3.676.514.000,00					-		3.570.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.878.100.000,00						-	1.955.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.753.414.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	10.000.000,00						-	30.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	30.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.878.100.000,00							1.955.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.878.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.955.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	85.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.753.414.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.753.414.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.500.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						985.836.000,00					-		1.885.000.000,00	
		-						985.836.000,00					-		1.885.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	97.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	553.694.000,00						-	555.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	120.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	215.142.000,00						-	580.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						553.694.000,00							555.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	82 Unit	553.694.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	555.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						120.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	350.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						97.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	97.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	400.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						215.142.000,00							580.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	215.142.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	580.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
180.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**292.981.485.565,00**							**340.117.000.000,00**	
			-	-	-	-		292.981.485.565,00						-	340.117.000.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.205.743.800,00					-		1.286.000.000,00	
		-	-					1.205.743.800,00					-		1.286.000.000,00	
		-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-		-	-	4.000.000,00						-	5.000.000,00	
		-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-		-	-	0,00						-	4.000.000,00	
		-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
		-	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	-	94.699.000,00						-	70.000.000,00	
		-	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	-	92.241.000,00						-	70.000.000,00	
		-	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
		-	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	17.300.000,00						-	10.000.000,00	
		-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	117.160.800,00						-	215.000.000,00	
		-	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	-	388.705.000,00						-	360.000.000,00	
		-	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	-	423.530.000,00						-	500.000.000,00	
		-	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	3.210.000,00						-	3.000.000,00	
		-	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	24.930.000,00						-	10.000.000,00	
		-	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	-	36.968.000,00						-	30.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						94.699.000,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	94.699.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	70.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						92.241.000,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	92.241.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	70.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						36.968.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	39 Dokumen	36.968.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						24.930.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	39 Dokumen	24.930.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						17.300.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-		-	39 Dokumen	17.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						3.210.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-		-	39 Dokumen	3.210.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						388.705.000,00							360.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	2 Dokumen	388.705.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	360.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						423.530.000,00							500.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	2 Dokumen	423.530.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						0,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-		-	2 Dokumen	4.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						0,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-		-	2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	4.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						117.160.800,00							215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	84 Orang	117.160.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	215.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						475.000.000,00						-	1.366.000.000,00	
		-						475.000.000,00						-	1.366.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	-	144.729.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	-	2.455.000,00						-	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-		-	-	2.221.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-		-	-	3.750.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-		-	-	920.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	-	35.974.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	-	15.252.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-		-	-	1.736.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	-	223.800.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	32.373.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-		-	-	11.790.000,00						-	150.000.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						144.729.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-		-	12 Dokumen	144.729.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						1.736.000,00							5.000.000,00	
		Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-		-	1 Laporan	1.736.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						35.974.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-	4 Dokumen	35.974.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	60.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah						920.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-		-	2 Dokumen	920.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						2.455.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	4 Dokumen	2.455.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	16.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						2.221.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-		-	12 Dokumen	2.221.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						223.800.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	12 Laporan	223.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	300.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						3.750.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-		-	12 Dokumen	3.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						15.252.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	12 Dokumen	15.252.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	250.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						11.790.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-		-	1 Dokumen	11.790.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	150.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						32.373.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	85 Orang	32.373.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	350.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						171.395.000,00					-		400.000.000,00	
		-						171.395.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	-	171.395.000,00						-	400.000.000,00	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						171.395.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	171.395.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	400.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						291.129.346.765,00					-		337.065.000.000,00	
		-						291.129.346.765,00					-		337.065.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	-	257.504.185.000,00						-	305.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	-	27.206.562.000,00						-	27.265.362.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	-	5.661.735.692,00						-	3.890.374.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-		-	-	756.864.073,00						-	909.264.000,00	
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi						756.864.073,00							909.264.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-		-	12 Laporan	756.864.073,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Inovasi UMKM, Digitalisasi Ekonomi Kreatif, dan Pengembangan Akses Ekonomi Lokal, dan Perintisan Pengembangan UMKM Syariah		-	909.264.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						257.504.185.000,00							305.000.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	12 Laporan	257.504.185.000,00	-	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	305.000.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						5.661.735.692,00							3.890.374.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	12 Laporan	5.661.735.692,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	3.890.374.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						27.206.562.000,00							27.265.362.000,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	3 Laporan	27.206.562.000,00	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	27.265.362.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
181.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**1.308.525.000,00**							**2.581.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.308.525.000,00						-	2.581.000.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.308.525.000,00					-		2.581.000.000,00	
		-						1.308.525.000,00					-		2.581.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	-	329.632.500,00						-	681.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	-	759.935.000,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-		-	-	148.290.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	-	70.667.500,00						-	350.000.000,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						70.667.500,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	1 Dokumen	70.667.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	350.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						148.290.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-		-	1 Laporan	148.290.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	350.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						759.935.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	2 Laporan	759.935.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.200.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						329.632.500,00							681.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	15 Dokumen	329.632.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	681.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
182.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						4.858.724.000,00							4.910.000.000,00	
		-	-	-		-		4.858.724.000,00						-	4.910.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.858.724.000,00					-		4.910.000.000,00	
		-	-					4.858.724.000,00					-		4.910.000.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-		-	-	67.150.000,00						-	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	613.367.100,00						-	2.100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	-	1.037.045.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	-	14.780.600,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	-	9.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		-	-	333.305.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	62.169.400,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	47.463.800,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	-	548.387.500,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Paiak Daerah	-		-	-	202.650.000,00						-	270.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	1.267.885.600,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	-	57.039.000,00						-	0,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-		-	-	194.756.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	402.825.000,00						-	640.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						62.169.400,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	2 Dokumen	62.169.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						613.367.100,00							2.100.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	2 Dokumen	613.367.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.100.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						1.267.885.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	12 Laporan	1.267.885.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						402.825.000,00							640.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	450 Unit	402.825.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	640.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						548.387.500,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	12 Laporan	548.387.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	800.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						202.650.000,00							270.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	2 Laporan	202.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	270.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						194.756.000,00							0,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-		-	3500 Obyek Pajak	194.756.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						333.305.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		-	5810 Dokumen	333.305.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						57.039.000,00							0,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-		-	1050 Layanan	57.039.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						67.150.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-		-	4445 Dokumen	67.150.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	550.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						1.037.045.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	600 Dokumen	1.037.045.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						9.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	115 Dokumen	9.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						14.780.600,00							250.000.000,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	20 Dokumen	14.780.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						47.463.800,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	4 Laporan	47.463.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	250.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						**9.628.431.730,00**							**48.527.300.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.628.431.730,00**							**48.527.300.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**9.483.289.830,00**							**46.881.300.000,00**	
183.	5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.620.094.380,00**							**43.237.800.000,00**	
		-	-	-		-	-	8.620.094.380,00						-	43.237.800.000,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.505.000,00					ASN		75.000.000,00	
		-						28.505.000,00					ASN		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	710.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	25.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	710.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	695.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	695.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	695.000,00						-	5.000.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	25.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						695.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	695.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						695.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	695.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						710.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	710.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						710.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	710.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						695.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	695.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.069.479.412,00					ASN		41.042.800.000,00	
		-						8.069.479.412,00					ASN		41.042.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	185.260.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	390.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	700.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	7.883.129.412,00						-	40.527.800.000,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.883.129.412,00							40.527.800.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	50 Orang/bulan	7.883.129.412,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	40.527.800.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						185.260.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	4 Dokumen	185.260.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						390.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	390.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						700.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						6.500.000,00					ASN		420.000.000,00	
		-						6.500.000,00					ASN		420.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	1.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	500.000,00						-	350.000.000,00	
	5.03.01.2.02.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						1.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	50 Paket	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	60.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						500.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	55 Orang	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						177.093.040,00					ASN		625.000.000,00	
		-						177.093.040,00					ASN		625.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	380.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	495.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	75.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	45.968.900,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	46.242.140,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	4.007.000,00						-	50.000.000,00	
	5.03.01.2.02.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.007.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	16 Paket	4.007.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						45.968.900,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	45.968.900,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	250.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						46.242.140,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	46.242.140,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						380.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	380.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						495.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	495.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	141 Laporan	75.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	120.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	35.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.638.500,00					ASN		700.000.000,00	
		-						12.638.500,00					ASN		700.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	6.638.500,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	150.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6.638.500,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	2 Unit	6.638.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	450.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						1.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	3 Unit	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.225.240,00					ASN		230.000.000,00	
		-						55.225.240,00					ASN		230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	8.400.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	29.892.000,00						-	195.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	16.933.240,00						-	20.000.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.933.240,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	2 Laporan	16.933.240,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	20.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.400.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	8.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						29.892.000,00							195.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	29.892.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	195.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						270.653.188,00					ASN		145.000.000,00	
		-						270.653.188,00					ASN		145.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	247.543.188,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	23.110.000,00						-	25.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						247.543.188,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	29 Unit	247.543.188,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	105.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	4 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.110.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	25 Unit	23.110.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
184.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**863.195.450,00**							**3.643.500.000,00**	
			-	-		-	-	863.195.450,00						-	3.643.500.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						224.249.750,00					ASN		2.028.500.000,00	
		-						224.249.750,00					ASN		2.028.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	-	5.476.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	-	27.370.000,00						-	135.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	56.640.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-		-	-	5.048.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	-	127.450.750,00						-	968.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	2.265.000,00						-	135.000.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						5.048.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-		-	1 Dokumen	5.048.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	240.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						127.450.750,00							968.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	3 Dokumen	127.450.750,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	968.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						5.476.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	1 Dokumen	5.476.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	250.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						56.640.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	2 Dokumen	56.640.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	300.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						27.370.000,00							135.000.000,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	3 Dokumen	27.370.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	135.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						2.265.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Laporan	2.265.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	135.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						530.220.700,00					ASN		600.000.000,00	
		-						530.220.700,00					ASN		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	-	450.758.700,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	-	14.960.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	-	64.502.000,00						-	200.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						450.758.700,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	3 Dokumen	450.758.700,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	250.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						64.502.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	1 Dokumen	64.502.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						14.960.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	1 Dokumen	14.960.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						108.725.000,00					ASN		1.015.000.000,00	
		-						108.725.000,00					ASN		1.015.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-		-	-	35.170.000,00						-	225.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-		-	-	15.184.000,00						-	225.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	-	27.025.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	-	19.901.000,00						-	255.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	-		-	-	3.950.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-		-	-	7.495.000,00						-	100.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						19.901.000,00							255.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	1 Dokumen	19.901.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	255.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						35.170.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	-		-	2500 Orang	35.170.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	225.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						15.184.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-		-	500 Orang	15.184.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	225.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						27.025.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-		-	131 Orang	27.025.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						7.495.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-		-	1 Laporan	7.495.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						3.950.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	-		-	7 Dokumen	3.950.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	110.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**145.141.900,00**							**1.646.000.000,00**	
185.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**145.141.900,00**							**1.646.000.000,00**	
			-	-		-	-	145.141.900,00						-	1.646.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						51.141.500,00					ASN		1.151.000.000,00	
		-						51.141.500,00					ASN		1.151.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-		-	-	46.140.500,00						-	1.127.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-		-	-	5.001.000,00						-	24.000.000,00	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						46.140.500,00							1.127.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-		-	1430 Orang	46.140.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.127.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						5.001.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-		-	4 Dokumen	5.001.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	24.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						94.000.400,00					ASN		495.000.000,00	
		-						94.000.400,00					ASN		495.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	-		-	-	74.000.400,00						-	475.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional						74.000.400,00							475.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	-		-	4 Dokumen	74.000.400,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	475.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Praiabatan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	5 Laporan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Keemimpinan, dan Prajabatan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	-		-	3 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Inspektorat Daerah						**9.967.772.000,00**							**16.301.268.330,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.800.644.000,00**							**16.001.268.330,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**9.800.644.000,00**							**16.001.268.330,00**	
186.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.505.339.000,00**							**10.703.000.000,00**	
			-	-		-	-	9.505.339.000,00						-	10.703.000.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.950.000,00					Perangkat Daerah		126.000.000,00	
		-						25.950.000,00					Perangkat Daerah		126.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.250.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	13.500.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.250.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.250.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	2.250.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.450.000,00						-	6.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						13.500.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	13.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.250.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.250.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.250.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.250.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.450.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	3.450.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.984.301.000,00					Perangkat Daerah		9.078.000.000,00	
		-						8.984.301.000,00					Perangkat Daerah		9.078.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	2.850.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	104.880.000,00						-	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	2.850.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	5.100.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	8.868.621.000,00						-	8.950.000.000,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.868.621.000,00							8.950.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	44 Orang/bulan	8.868.621.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	8.950.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						104.880.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	104.880.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	110.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.850.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	2.850.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.100.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	5.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	8.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						2.850.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	2.850.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						89.850.000,00					Perangkat Daerah		696.000.000,00	
		-						89.850.000,00					Perangkat Daerah		696.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	14.850.000,00						-	16.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	75.000.000,00						-	680.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						14.850.000,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	44 Paket	14.850.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	16.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75.000.000,00							680.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	44 Orang	75.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	680.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						212.658.000,00					-		353.000.000,00	
		-						212.658.000,00					-		353.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	2.160.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	161.894.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	36.060.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.937.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	5.607.000,00						-	25.000.000,00	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.937.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	7 Paket	6.937.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.607.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	8 Paket	5.607.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						161.894.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	161.894.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	250.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						36.060.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	36.060.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	42.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.160.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	320 Dokumen	2.160.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						45.000.000,00					-		200.000.000,00	
		-						45.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	45.000.000,00						-	200.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	45.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	200.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.580.000,00					-		0,00	
		-						40.580.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	36.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.600.000,00						-	0,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	3.600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						36.980.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	36.980.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						107.000.000,00					-		250.000.000,00	
		-						107.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	100.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	7.000.000,00						-	50.000.000,00	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	100.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	200.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	7.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Inspektorat Daerah
187.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**167.505.000,00**							**2.831.450.000,00**	
		-	-	-		-	-	167.505.000,00						-	2.831.450.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						115.825.000,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa, Sekolah		2.399.258.289,00	
		-						115.825.000,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa, Sekolah		2.399.258.289,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	-	37.780.000,00						-	545.696.604,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	-	16.070.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	-	11.250.000,00						-	209.547.496,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	-	30.200.000,00						-	372.457.741,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	6.995.000,00						-	520.300.834,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	-	6.750.000,00						-	371.073.691,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	-	6.780.000,00						-	205.181.923,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						6.995.000,00							520.300.834,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	12 Laporan	6.995.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	520.300.834,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						30.200.000,00							372.457.741,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	20 Laporan	30.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	372.457.741,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						6.780.000,00							205.181.923,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	10 Laporan	6.780.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	205.181.923,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						6.750.000,00							371.073.691,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	10 Laporan	6.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	371.073.691,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						11.250.000,00							209.547.496,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	15 Laporan	11.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	209.547.496,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						16.070.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	2 Kesepakatan	16.070.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	175.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						37.780.000,00							545.696.604,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	43 Dokumen	37.780.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	545.696.604,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						51.680.000,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa, Sekolah, BUMD		432.191.711,00	
		-						51.680.000,00					Perangkat Daerah, Unit Kerja, Desa, Sekolah, BUMD		432.191.711,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	-	48.980.000,00						-	323.052.390,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	-	2.700.000,00						-	109.139.321,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						2.700.000,00							109.139.321,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	1 Laporan	2.700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	109.139.321,00	Inspektorat Daerah
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						48.980.000,00							323.052.390,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	22 Laporan	48.980.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	323.052.390,00	Inspektorat Daerah
188.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**127.800.000,00**							**2.466.818.330,00**	
			-	-		-	-	127.800.000,00						-	2.466.818.330,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						31.600.000,00					Perangkat Daerah		599.102.487,00	
		-						31.600.000,00					Perangkat Daerah		599.102.487,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-		-	-	28.900.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	-	2.700.000,00						-	569.102.487,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						2.700.000,00							569.102.487,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	1 Rekomendasi	2.700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	569.102.487,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						28.900.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-		-	2 Rekomendasi	28.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						96.200.000,00					Perangkat Daerah		1.867.715.843,00	
		-						96.200.000,00					Perangkat Daerah		1.867.715.843,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	-	56.900.000,00						-	645.295.824,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	-	19.550.000,00						-	227.861.333,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	-	2.400.000,00						-	409.963.627,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	17.350.000,00						-	584.595.059,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						17.350.000,00							584.595.059,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	40 perangkat daerah	17.350.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	584.595.059,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						2.400.000,00							409.963.627,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	14 perangkat daerah	2.400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	409.963.627,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						56.900.000,00							645.295.824,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	5 Kegiatan	56.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	645.295.824,00	Inspektorat Daerah
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						19.550.000,00							227.861.333,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	40 perangkat daerah	19.550.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	227.861.333,00	Inspektorat Daerah
	X							**167.128.000,00**							**300.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**167.128.000,00**							**300.000.000,00**	
189.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**167.128.000,00**							**300.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	167.128.000,00						-	300.000.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						107.128.000,00					-		240.000.000,00	
		-	-					107.128.000,00					-		240.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	107.128.000,00						-	240.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						107.128.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	98 Laporan	107.128.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	240.000.000,00	Inspektorat Daerah
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.000.000,00					-		60.000.000,00	
		-	-					60.000.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	60.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	60.000.000,00	Inspektorat Daerah
		Kecamatan Weru						**3.011.279.000,00**							**3.028.870.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.011.279.000,00**							**3.028.870.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.011.279.000,00**							**3.028.870.000,00**	
190.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.947.579.000,00**							**2.960.870.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Daerah di Kecamatan	-		-	100 %	2.860.629.000,00						-	2.870.770.000,00	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Daerah di Kecamatan	-		-	100 %	86.950.000,00						-	90.100.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.500.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		11.250.000,00	
		-						8.500.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00						-	1.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							1.700.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.700.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.200.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							1.350.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.350.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.581.891.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		2.583.750.000,00	
		-						2.581.891.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		2.583.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	500.000,00						-	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	89.300.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	750.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.489.341.000,00						-	2.490.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.489.341.000,00							2.490.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	15 orang/bulan Orang/bulan	2.489.341.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.490.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						89.300.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	89.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	90.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						750.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						500.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	750.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.000.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		2.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	15 Orang	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						42.252.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		50.320.000,00	
		-						42.252.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		50.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.320.000,00						-	1.320.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	8.500.000,00						-	8.500.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	22.419.000,00						-	30.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.013.000,00						-	2.500.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.013.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.013.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						22.419.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	22.419.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.320.000,00							1.320.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	1.320.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.320.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						8.500.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	100 Laporan	8.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	8.500.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						236.486.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		236.700.000,00	
		-						236.486.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		236.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	52.950.000,00						-	52.950.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	181.536.000,00						-	181.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						52.950.000,00							52.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	52.950.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	52.950.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						181.536.000,00							181.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	181.536.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	181.750.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						76.450.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		76.850.000,00	
		-						76.450.000,00					Seluruh ASN Dilingkup Kecamatan, Perangkat Daerah Terkait		76.850.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	9.750.000,00						-	9.750.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	62.100.000,00						-	62.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.600.000,00						-	4.600.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						62.100.000,00							62.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	62.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	62.500.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.750.000,00							9.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	9.750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	9.750.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.600.000,00							4.600.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	4.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.600.000,00	Kecamatan Weru
191.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**6.200.000,00**							**8.000.000,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan umum	-		-	89,65 Angka	6.200.000,00						-	8.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.000.000,00					Masyarakat		2.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Masyarakat		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.02.2.02.0002	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						4.200.000,00					Masyarakat, Perangkat Desa		6.000.000,00	
		-						4.200.000,00					Masyarakat, Perangkat Desa		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.200.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						3.200.000,00							4.000.000,00	
		Terfaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	3.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
192.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**26.000.000,00**							**26.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	-		-	100 %	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
			-	-		-	-	22.000.000,00						-	22.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4.000.000,00					Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan ditingkat Kecamatan		4.000.000,00	
		-						4.000.000,00					Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan ditingkat Kecamatan		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						22.000.000,00					-		22.000.000,00	
		-						22.000.000,00					-		22.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	20.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
193.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.000.000,00**							**5.000.000,00**	
			Prosentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.000.000,00					Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat		3.000.000,00	
		-						3.000.000,00					Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						2.000.000,00					Masyarakat, Linmas, dan KST		2.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Masyarakat, Linmas, dan KST		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
194.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**8.500.000,00**							**10.000.000,00**	
			Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	-		-	100 %	8.500.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						8.500.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
		-						8.500.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	8.500.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						8.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	80 Orang	8.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Weru
195.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**18.000.000,00**							**19.000.000,00**	
			Persentase administrasi Desa tepat waktu	-		-	100 %	18.000.000,00						-	19.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						18.000.000,00					Pemerintahan Desa, Stake Holder Terkait, Masyarakat		19.000.000,00	
		-						18.000.000,00					Pemerintahan Desa, Stake Holder Terkait, Masyarakat		19.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	4 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Weru
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Weru || Desa Ngreco || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Weru
		Kecamatan Bulu						**2.985.390.755,00**							**3.000.043.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.982.890.755,00**							**2.997.543.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.982.890.755,00**							**2.997.543.600,00**	
196.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.922.390.755,00**							**2.936.043.600,00**	
		-	-	-	-	-	2.922.390.755,00						-	-	2.936.043.600,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.000.000,00					-		7.000.000,00	
		-						8.000.000,00					-		7.000.000,00	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	0 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	01 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.498.708.000,00					-		2.497.708.000,00	
		-						2.498.708.000,00					-		2.497.708.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	88.860.000,00						-	88.860.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.405.348.000,00						-	2.405.348.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.405.348.000,00							2.405.348.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	0 Orang/bulan	2.405.348.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.405.348.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						88.860.000,00							88.860.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	88.860.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	88.860.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	1.500.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.000.000,00					-		2.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.312.755,00					-		55.215.600,00	
		-						52.312.755,00					-		55.215.600,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	34.312.755,00						-	34.715.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	500.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						34.312.755,00							34.715.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	34.312.755,00	-	-	-	-		-	34.715.600,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	2.500.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	0,00	-	-	-	-		-	500.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	15.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.750.000,00					-		25.000.000,00	
		-						15.750.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	750.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	15.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	-	-	-	-		-	5.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						750.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						292.870.000,00					-		292.870.000,00	
		-						292.870.000,00					-		292.870.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	98.400.000,00						-	98.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	194.470.000,00						-	194.470.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						98.400.000,00							98.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	98.400.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	98.400.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						194.470.000,00							194.470.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	194.470.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	194.470.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.750.000,00					-		56.250.000,00	
		-						52.750.000,00					-		56.250.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.500.000,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	50.750.000,00						-	50.750.000,00	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	500.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					50.750.000,00							50.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	50.750.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.750.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	5 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	1.500.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Bulu
197.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**3.000.000,00**							**3.000.000,00**	
		-	-		-	-		3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						2.000.000,00					-		2.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.02.2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
198.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**30.500.000,00**							**30.500.000,00**	
		-	-		-	-		30.500.000,00						-	30.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.500.000,00					-		2.500.000,00	
		-						2.500.000,00					-		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						28.000.000,00					-		28.000.000,00	
		-						28.000.000,00					-		28.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Kecamatan Bulu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Bulu
199.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**3.000.000,00**							**3.000.000,00**	
			-	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.000.000,00					-		2.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	0 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	-		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.02001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
200.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**11.000.000,00**							**11.000.000,00**	
			-	-		-	-	11.000.000,00						-	11.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						11.000.000,00					-		11.000.000,00	
		-						11.000.000,00					-		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	90 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
201.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**13.000.000,00**							**14.000.000,00**	
			-	-		-	-	13.000.000,00						-	14.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						13.000.000,00					-		14.000.000,00	
		-						13.000.000,00					-		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	8.000.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						8.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	8.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	9.000.000,00	Kecamatan Bulu
	X							**2.500.000,00**							**2.500.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.500.000,00**							**2.500.000,00**	
202.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.500.000,00**							**2.500.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	2.500.000,00						-	2.500.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.500.000,00					-		1.500.000,00	
		-						1.500.000,00					-		1.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.500.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Bulu
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Tawangsari						**3.075.321.300,00**							**3.179.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.074.921.300,00**							**3.178.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.074.921.300,00**							**3.178.500.000,00**	
203.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.014.466.300,00**							**3.080.500.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	3.014.466.300,00						-	3.080.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.700.000,00					-		8.000.000,00	
		-						4.700.000,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	600.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	400.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	600.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	600.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						600.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						600.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						400.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						600.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.569.648.000,00					-		2.586.000.000,00	
	-	-						2.569.648.000,00					-		2.586.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	900.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	800.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	78.720.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	800.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	900.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.487.528.000,00						-	2.500.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.487.528.000,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	15 Orang/bulan	2.487.528.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						78.720.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	78.720.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	80.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						900.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						800.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						900.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						800.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	12 Dokumen	800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						41.000.000,00					-		61.500.000,00	
	-	-						41.000.000,00					-		61.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	40.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	2 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	25 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	20.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	30- Orang	40.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	40.000.000,00	Kecamatan Tawangsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						48.144.300,00					-		58.000.000,00	
		-						48.144.300,00					-		58.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	2.640.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	4.500.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	34.458.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.662.500,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.775.800,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.108.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.775.800,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.775.800,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.108.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.108.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						34.458.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	34.458.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	40.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.662.500,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.662.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.640.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	2.640.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4.500.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	4.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.500.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						254.016.000,00					-		260.000.000,00	
		-						254.016.000,00					-		260.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	88.750.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	165.266.000,00						-	170.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						88.750.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	88.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	90.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						165.266.000,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	165.266.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	170.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						96.958.000,00					-		107.000.000,00	
		-						96.958.000,00					-		107.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.500.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	10.988.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	79.350.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.120.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						79.350.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	79.350.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	80.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.988.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	10.988.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.120.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	5.120.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Kecamatan Tawangsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
204.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**8.500.000,00**							**10.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	8.500.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.500.000,00					-		7.000.000,00	
		-						6.500.000,00					-		7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	6.500.000,00						-	7.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.500.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	2 Laporan	6.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	7.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						2.000.000,00					-		3.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
205.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**19.955.000,00**							**31.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	19.955.000,00						-	31.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.000.000,00					-		4.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						17.955.000,00					-		27.000.000,00	
		-						17.955.000,00					-		27.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	16.955.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						16.955.000,00							25.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	16.955.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
206.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**3.000.000,00**							**6.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	3.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.000.000,00					-		4.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.000.000,00					-		2.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
207.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**10.000.000,00**							**20.000.000,00**	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						10.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	90 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	20.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
208.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**19.000.000,00**							**31.000.000,00**	
			-	-		-	-	19.000.000,00						-	31.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						19.000.000,00					-		31.000.000,00	
		-						19.000.000,00					-		31.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	14.000.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	3 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						14.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	14.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	22.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
	X							**400.000,00**							**1.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**400.000,00**							**1.000.000,00**	
209.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**400.000,00**							**1.000.000,00**	
			-	-		-	-	400.000,00						-	1.000.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						400.000,00					-		1.000.000,00	
		-						400.000,00					-		1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	400.000,00						-	1.000.000,00	
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					400.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	400.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Tawangsari
		Kecamatan Sukoharjo						**552.621.600,00**							**21.556.670.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**552.621.600,00**							**21.556.670.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**552.621.600,00**							**21.556.670.500,00**	
210.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**525.021.600,00**							**18.974.870.500,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	525.021.600,00						-	18.974.870.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.000.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		25.000.000,00	
		-						17.000.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						117.840.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		16.928.446.500,00	
		-						117.840.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		16.928.446.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	117.840.000,00						-	148.460.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	0,00						-	4.500.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	0,00						-	16.772.486.500,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					0,00							16.772.486.500,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	85 Orang/bulan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	16.772.486.500,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					117.840.000,00							148.460.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	117.840.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	148.460.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.500.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					0,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.500.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0,00							500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	12 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	500.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00						Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		165.000.000,00	
		-					0,00						Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	4 Dokumen	0,00	-	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	4 Dokumen	0,00	-	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	135 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	50 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						103.386.600,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		196.200.000,00	
		-						103.386.600,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		196.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	4.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	88.394.600,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.992.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.992.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	4.992.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						88.394.600,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	88.394.600,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	24 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.200.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		117.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		117.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	3 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.520.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		1.103.224.000,00	
		-						200.520.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		1.103.224.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	155.600.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	40.920.000,00						-	928.224.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	4.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						155.600.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	155.600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	160.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						40.920.000,00							928.224.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	40.920.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	928.224.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						86.275.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		440.000.000,00	
		-						86.275.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		440.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannnya	-		-	-	7.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknva	-		-	-	79.275.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						79.275.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	79.275.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannnya	-		-	12 Unit	7.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	12 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
211.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**17.600.000,00**							**70.000.000,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	-		-	92,75 angka	10.500.000,00						-	27.500.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	-		-	92,75 Angka	7.100.000,00						-	42.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.500.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		27.500.000,00	
		-						10.500.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	-	7.500.000,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	3.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						7.500.000,00							17.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		-	10 Dokumen	7.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	17.500.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						7.100.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		42.500.000,00	
		-						7.100.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		42.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	100.000,00						-	29.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	7.000.000,00						-	13.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						100.000,00							29.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	29.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.000.000,00							13.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	7.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	13.500.000,00	Kecamatan Sukoharjo
212.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**10.000.000,00**							**2.385.800.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	10.000.000,00						-	2.385.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						10.000.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		2.348.800.000,00	
		-						10.000.000,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		2.348.800.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-		-	-	0,00						-	7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	10.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	2.306.800.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10.000.000,00							35.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0,00							2.306.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.306.800.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-		-	4 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	7.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		37.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		37.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							2.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							15.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	12 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	-	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	1 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
213.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**60.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	0,00						-	60.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		20.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	3 Laporan	0,00	-	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	3 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						0,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	40.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	15 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
214.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**0,00**							**66.000.000,00**	
			Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang dideleqasikan kepada Camat	-		-	100 persen	0,00						-	66.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						0,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		66.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat dan ASN Kecamatan Sukoharjo		66.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	0,00						-	66.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						0,00							66.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	66.000.000,00	Kecamatan Sukoharjo
		Kelurahan Kenep						**341.806.000,00**							**1.193.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**341.806.000,00**							**1.193.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**341.806.000,00**							**1.193.600.000,00**	
215.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**119.006.000,00**							**295.600.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	119.006.000,00						-	295.600.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		73.040.000,00	
		-						12.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		73.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	53.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.000.000,00							53.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	53.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		29.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		29.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.426.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		55.000.000,00	
		-						45.426.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	45.426.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						45.426.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	45.426.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		70.000.000,00	
		-						9.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		70.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	8.000.000,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						8.000.000,00							13.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	8.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	13.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Kenep
216.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**212.800.000,00**							**883.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	212.800.000,00						-	883.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						207.800.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		835.000.000,00	
		-						207.800.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		835.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	205.800.000,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							300.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						205.800.000,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	205.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	525.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		48.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	5.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						5.000.000,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Kenep
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Kenep
217.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.000.000,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	5.000.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		5.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kenep || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Kenep
218.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.000.000,00**							**10.000.000,00**	
			-	-	-	-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		10.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kenep dan ASN Kelurahan Kenep		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Kenep
		Kelurahan Banmati						**55.739.000,00**							**1.171.300.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**55.739.000,00**							**1.155.300.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**55.739.000,00**							**1.155.300.000,00**	
219.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**53.739.000,00**							**257.300.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	53.739.000,00						-	257.300.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.659.000,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		55.040.000,00	
		-						1.659.000,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		55.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.014.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	645.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.014.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.014.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						645.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	645.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	Kelurahan Banmati

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		29.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		29.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		45.700.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		45.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	700.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		59.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		59.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Banmati
220.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.000.000,00**							**883.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	2.000.000,00						-	883.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		835.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		835.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							300.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	525.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		48.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Banmati
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Banmati
221.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		5.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Banmati
222.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**							**10.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		10.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Banmati
	X							**0,00**							**16.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**16.000.000,00**	
223.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**							**16.000.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	0,00						-	16.000.000,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		16.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Banmati dan ASN Kelurahan Banmati		16.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	16.000.000,00	
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Banmati || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-		-	16.000.000,00	Kelurahan Banmati
		Kelurahan Mandan						**289.782.000,00**							**1.058.990.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**289.782.000,00**							**1.058.990.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**289.782.000,00**							**1.058.990.000,00**	
224.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**89.882.000,00**							**260.990.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	89.882.000,00						-	260.990.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		58.680.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		58.680.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	58.680.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							58.680.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-		-	58.680.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.487.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		55.040.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.487.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		55.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	987.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						987.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	987.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		29.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		29.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.315.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		46.750.000,00	
		-						36.315.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		46.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	36.315.000,00						-	39.250.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.315.000,00							39.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	36.315.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	39.250.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	500.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		71.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		71.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	18.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Mandan
225.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**199.900.000,00**							**783.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	197.900.000,00						-	773.000.000,00	
			-	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		10.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					2.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						192.900.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		725.000.000,00	
		-						192.900.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		725.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	191.900.000,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	1.000.000,00						-	200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.000.000,00							200.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						191.900.000,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	191.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	525.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		48.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	5.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						5.000.000,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Mandan
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Mandan
226.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		5.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Mandan
227.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**							**10.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		10.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Mandan dan ASN Kelurahan Mandan		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Mandan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Mandan
		Kelurahan Begajah						**87.690.000,00**							**1.208.112.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**87.690.000,00**							**1.208.112.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**87.690.000,00**							**1.208.112.000,00**	
228.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**75.690.000,00**							**310.112.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	75.690.000,00						-	310.112.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						14.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		50.040.000,00	
		-						14.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		50.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	2.500.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.500.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.06004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.06005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.06006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.06009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		29.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		29.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
	7.01.01.2.07005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		96.512.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		96.512.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	37.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	54.512.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							37.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	37.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							54.512.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	54.512.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.610.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		66.000.000,00	
		-						9.610.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		66.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	8.610.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						8.610.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	8.610.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Begajah
229.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						7.000.000,00							883.000.000,00	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	7.000.000,00						-	883.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		835.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		835.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							300.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	525.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		48.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	5.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						5.000.000,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Begajah
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Begajah
230.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.000.000,00							5.000.000,00	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		5.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Begajah
231.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0,00							10.000.000,00	
			-	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		10.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Begajah dan ASN Kelurahan Begajah		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Begajah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Begajah
		Kelurahan Gayam						**2.000.000,00**							**1.323.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.000.000,00**							**1.323.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.000.000,00**							**1.323.600.000,00**	
232.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**							**350.600.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	0,00						-	350.600.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		68.040.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	0,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		55.040.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		55.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		29.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		29.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		75.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	48.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	48.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		123.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		123.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	16.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Gayam
233.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.000.000,00**							**958.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	2.000.000,00						-	958.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		910.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		910.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							300.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	600.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		48.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Gayam
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Gayam
234.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		5.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Gayam
235.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**							**10.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		10.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Gayam dan ASN Kelurahan Gayam		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Gayam || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Gayam
		Kelurahan Joho						**322.000.000,00**							**1.177.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**322.000.000,00**							**1.177.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**322.000.000,00**							**1.177.600.000,00**	
236.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**111.500.000,00**							**279.600.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	111.500.000,00						-	279.600.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						11.510.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		55.040.000,00	
		-						11.510.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		55.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	510.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						510.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	510.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		29.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		29.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						39.015.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		62.000.000,00	
		-						39.015.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		62.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	39.015.000,00						-	52.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						39.015.000,00							52.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	39.015.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	52.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8.895.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		65.000.000,00	
		-						8.895.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		65.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	7.895.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.895.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	7.895.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Joho
237.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**205.500.000,00**							**883.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	205.500.000,00						-	883.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						200.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		835.000.000,00	
		-						200.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		835.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	198.500.000,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							300.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						198.500.000,00							525.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	198.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	525.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		48.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	5.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						5.000.000,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Joho
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Joho
238.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		5.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Neeara Reoublik Indonesia						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Joho
239.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.000.000,00**							**10.000.000,00**	
			-	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		10.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Joho dan ASN Kelurahan Joho		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Joho || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Joho
		Kelurahan Jetis						**53.080.000,00**							**1.367.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**53.080.000,00**							**1.367.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**53.080.000,00**							**1.367.200.000,00**	
240.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**53.080.000,00**							**469.200.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	53.080.000,00						-	469.200.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		55.040.000,00	
		-						1.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		55.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		99.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		99.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		48.600.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		48.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	38.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							38.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.500.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		198.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		198.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	25.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	150.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.000.000,00	Kelurahan Jetis
241.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**							**883.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	0,00						-	883.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		835.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		835.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							300.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	525.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		48.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Jetis
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Jetis
242.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		5.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Jetis
243.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**							**10.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		10.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Jetis dan ASN Kelurahan Jetis		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Jetis || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Jetis
		Kelurahan Combongan						**69.830.000,00**							**1.164.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**69.830.000,00**							**1.129.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**69.830.000,00**							**1.129.600.000,00**	
244.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**68.430.000,00**							**231.600.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	68.430.000,00						-	231.600.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		20.040.000,00	
		-						2.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		20.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		29.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		29.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		44.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		44.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	39.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							39.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	39.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.850.000,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		70.000.000,00	
		-						13.850.000,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		70.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	12.850.000,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						12.850.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	12.850.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	13.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Combongan
245.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.400.000,00							883.000.000,00	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	1.400.000,00						-	883.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.400.000,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		835.000.000,00	
		-						1.400.000,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		835.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	1.400.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						1.400.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	1.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							300.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	525.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		48.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Combongan
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Combongan
246.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0,00							5.000.000,00	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		5.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Combongan
247.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0,00							10.000.000,00	
			-	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		10.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Combongan
	X							**0,00**							**35.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**35.000.000,00**	
248.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**							**35.000.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	0,00						-	35.000.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		35.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Combongan dan ASN Kelurahan Combongan		35.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Combongan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	Kelurahan Combongan
		Kelurahan Kriwen						**339.340.000,00**							**1.053.390.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**339.340.000,00**							**1.053.390.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**339.340.000,00**							**1.053.390.000,00**	
249.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**101.840.000,00**							**255.390.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	101.840.000,00						-	255.390.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						10.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		55.040.000,00	
		-						10.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		55.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Kriwen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		29.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		29.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.295.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		34.790.000,00	
		-						26.295.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		34.790.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	26.295.000,00						-	27.790.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.295.000,00							27.790.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	26.295.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	27.790.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Kriwen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.965.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		68.000.000,00	
		-						12.965.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		68.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	11.965.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						11.965.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	11.965.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Kriwen
250.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**227.500.000,00**							**783.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	227.500.000,00						-	783.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						222.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		735.000.000,00	
		-						222.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		735.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	220.500.000,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							200.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						220.500.000,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	220.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	525.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		48.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	5.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						5.000.000,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Kriwen
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Kriwen
251.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.000.000,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		5.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Kriwen
252.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.000.000,00**							**10.000.000,00**	
			-	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		10.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Kriwen dan ASN Kelurahan Kriwen		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Kriwen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Kriwen
		Kelurahan Bulakan						**62.046.000,00**							**1.434.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**62.046.000,00**							**1.434.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**62.046.000,00**							**1.434.200.000,00**	
253.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**62.046.000,00**							**536.200.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	62.046.000,00						-	536.200.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						9.966.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		120.040.000,00	
		-						9.966.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		120.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.966.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.966.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	8.966.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		179.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		179.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		54.600.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		54.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	1.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							1.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.600.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		114.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		114.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Bulakan
254.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**							**883.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	0,00						-	883.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		835.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		835.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							300.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	525.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		48.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Bulakan
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Bulakan
255.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		5.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Bulakan
256.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**							**10.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		10.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakan dan ASN Kelurahan Bulakan		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Bulakan
		Kelurahan Dukuh						**369.704.000,00**							**1.081.440.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**369.704.000,00**							**1.081.440.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**369.704.000,00**							**1.081.440.000,00**	
257.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**113.304.000,00**							**278.440.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	113.304.000,00						-	278.440.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						11.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		54.400.000,00	
		-						11.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		54.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.400.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		35.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		35.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38.349.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		51.000.000,00	
		-						38.349.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		51.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	38.349.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.349.000,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	38.349.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11.375.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		70.000.000,00	
		-						11.375.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		70.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	10.375.000,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					10.375.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	10.375.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	13.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Dukuh
258.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**246.400.000,00**							**783.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	246.400.000,00						-	783.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						236.400.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		735.000.000,00	
		-						236.400.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		735.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	234.400.000,00						-	525.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							200.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						234.400.000,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	234.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	525.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						10.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		48.000.000,00	
		-						10.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	10.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						10.000.000,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Dukuh
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Dukuh
259.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.000.000,00**							**10.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		10.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Dukuh
260.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.000.000,00**							**10.000.000,00**	
			-	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		10.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Dukuh dan ASN Kelurahan Dukuh		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Dukuh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Dukuh
		Kelurahan Sukoharjo						**350.272.100,00**							**1.324.096.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**350.272.100,00**							**1.324.096.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**350.272.100,00**							**1.324.096.000,00**	
261.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**53.372.100,00**							**331.096.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	53.372.100,00						-	331.096.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.292.100,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		55.040.000,00	
		-						1.292.100,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		55.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.292.100,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.292.100,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.292.100,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	35.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		29.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		29.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		46.496.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		46.496.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	39.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.496.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							39.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	39.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							2.496.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.496.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		132.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		132.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	115.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	115.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
262.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**286.900.000,00**							**978.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	286.900.000,00						-	978.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						281.900.000,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		930.000.000,00	
		-						281.900.000,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		930.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	279.900.000,00						-	620.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							300.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						279.900.000,00							620.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	279.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	620.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	5.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						5.000.000,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
263.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.000.000,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		5.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
264.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.000.000,00**							**10.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		10.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dan ASN Kelurahan Sukoharjo		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sukoharjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Sukoharjo
		Kelurahan Bulakrejo						**549.860.000,00**							**1.352.360.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**549.860.000,00**							**1.352.360.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**549.860.000,00**							**1.352.360.000,00**	
265.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**104.400.000,00**							**389.360.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	104.400.000,00						-	389.360.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						16.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		55.040.000,00	
		-						16.500.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		55.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	35.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.550.000,00						-	5.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	2.950.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.550.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.550.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.950.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	2.950.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		29.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		29.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.370.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		170.760.000,00	
		-						23.370.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		170.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	23.370.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	125.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.370.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	23.370.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							125.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	125.760.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.450.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		66.000.000,00	
		-						12.450.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		66.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	8.620.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	3.830.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						8.620.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	8.620.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.830.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	3.830.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
266.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**436.210.000,00**							**948.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	436.210.000,00						-	948.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						431.210.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		900.000.000,00	
		-						431.210.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		900.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	231.060.000,00						-	590.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	198.150.000,00						-	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						198.150.000,00							300.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	198.150.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						231.060.000,00							590.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	231.060.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	590.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	5.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						5.000.000,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
267.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.000.000,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		5.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
268.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**4.250.000,00**							**10.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	4.250.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4.250.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		10.000.000,00	
		-						4.250.000,00					Masyarakat Kelurahan Bulakrejo dan ASN Kelurahan Bulakrejo		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	4.250.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						4.250.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	4.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Bulakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Bulakrejo
		Kelurahan Sonorejo						**336.597.000,00**							**1.293.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**336.597.000,00**							**1.293.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**336.597.000,00**							**1.293.600.000,00**	
269.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**88.997.000,00**							**340.600.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 Persen	88.997.000,00						-	340.600.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonorejo		68.040.000,00	
		-						52.080.000,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonorejo		68.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	52.080.000,00						-	68.040.000,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						52.080.000,00							68.040.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	0 Dokumen	52.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.040.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						10.617.000,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonorejo		120.040.000,00	
		-						10.617.000,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonorejo		120.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.040.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	617.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						617.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	617.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.040.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.040.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonorejo		29.520.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonoreio		29.520.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	19.520.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							19.520.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.520.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.300.000,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonoreio		46.000.000,00	
		-						26.300.000,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonoreio		46.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	26.300.000,00						-	41.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.300.000,00							41.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	26.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	41.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonorejo		77.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonorejo		77.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
270.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**247.600.000,00**							**938.000.000,00**	
			Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 persen	247.600.000,00						-	938.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						242.600.000,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonorejo		890.000.000,00	
		-						242.600.000,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonorejo		890.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	240.600.000,00						-	580.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						240.600.000,00							580.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	240.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	580.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonoreio		48.000.000,00	
		-						5.000.000,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonoreio		48.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	5.000.000,00						-	38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						5.000.000,00							38.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	38.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
271.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan trantibum	-		-	100 persen	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonorejo		5.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonoreio		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
272.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**							**10.000.000,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonorejo		10.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kelurahan Sonorejo dan ASN Kelurahan Sonoreio		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Sukoharjo || Kelurahan Sonorejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Kelurahan Sonorejo
		Kecamatan Nguter						**3.068.998.000,00**							**3.076.998.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.068.998.000,00**							**3.076.998.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.068.998.000,00**							**3.076.998.000,00**	
273.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.998.798.000,00**							**3.004.798.000,00**	
			-	-		-	-	2.998.798.000,00						-	3.004.798.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.000.000,00					-		16.000.000,00	
		-						16.000.000,00					-		16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00					-	-	1.000.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00					-	-	1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	-		-	-	1.000.000,00					-	-	1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00					-	-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.573.201.000,00					-		2.579.201.000,00	
		-						2.573.201.000,00					-		2.579.201.000,00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.000.000,00					-	-	1.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	94.332.000,00					-	-	94.332.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00					-	-	1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	2.000.000,00					-	-	2.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.474.869.000,00					-	-	2.480.869.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.474.869.000,00							2.480.869.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	14 Orang/bulan	2.474.869.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.480.869.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						94.332.000,00							94.332.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	94.332.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	94.332.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	20 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	2 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						22.250.000,00					-		22.250.000,00	
		-						22.250.000,00					-		22.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.250.000,00						-	1.250.000,00	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	21 Orang	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	20.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						1.250.000,00							1.250.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	21 Orang	1.250.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.250.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						59.769.000,00					-		59.769.000,00	
		-						59.769.000,00					-		59.769.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	39.745.000,00						-	39.745.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.024.000,00						-	3.024.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.024.000,00							3.024.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.024.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.024.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	15 Paket	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						39.745.000,00							39.745.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	39.745.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	39.745.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	235 Laporan	12.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.808.000,00					-		255.808.000,00	
		-						255.808.000,00					-		255.808.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	79.000.000,00						-	79.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	175.808.000,00						-	175.808.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						79.000.000,00							79.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	79.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	79.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						175.808.000,00							175.808.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	175.808.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	175.808.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						71.770.000,00					-		71.770.000,00	
		-						71.770.000,00					-		71.770.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	7.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	60.550.000,00						-	60.550.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.220.000,00						-	4.220.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.550.000,00							60.550.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	11 Unit	60.550.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	60.550.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	7.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.220.000,00							4.220.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	13 Unit	4.220.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.220.000,00	Kecamatan Nguter
274.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**5.200.000,00**							**5.200.000,00**	
		-	-	-		-	-	5.200.000,00						-	5.200.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	2 Laporan Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						4.200.000,00					-		4.200.000,00	
		-						4.200.000,00					-		4.200.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.200.000,00						-	3.200.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						3.200.000,00							3.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	3.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.200.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
275.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**30.000.000,00**							**32.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	30.000.000,00						-	32.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.000.000,00					-		2.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						28.000.000,00					-		30.000.000,00	
		-						28.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	28.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						28.000.000,00							30.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Nguter
276.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**3.000.000,00**							**3.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.000.000,00					-		2.000.000,00	
		-						2.000.000,00					-		2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
277.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**9.000.000,00**							**9.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	9.000.000,00						-	9.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						9.000.000,00					-		9.000.000,00	
		-						9.000.000,00					-		9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	8.000.000,00						-	8.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	80 Orang	8.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	8.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Nguter
278.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**23.000.000,00**							**23.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	23.000.000,00						-	23.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						23.000.000,00					-		23.000.000,00	
		-						23.000.000,00					-		23.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	2 Dokumen	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	2 Dokumen	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Kecamatan Nguter
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Kecamatan Nguter
		Kecamatan Bendosari						**4.036.656.268,00**							**4.146.323.768,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.036.656.268,00**							**4.146.323.768,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.036.656.268,00**							**4.146.323.768,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
279.	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.973.061.268,00**							**3.986.161.268,00**	
			-	-	-	-		3.973.061.268,00						-	3.986.161.268,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		17.500.000,00	
		-						10.000.000,00					-		17.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.500.300.368,00					-		3.505.900.368,00	
		-						3.500.300.368,00					-		3.505.900.368,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.000.000,00						-	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	130.000.000,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.400.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.366.300.368,00						-	3.366.300.368,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.366.300.368,00							3.366.300.368,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	20 Orang/bulan	3.366.300.368,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.366.300.368,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						130.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	130.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	130.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.000.000,00							2.400.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.400.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							2.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.400.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	4 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.400.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.400.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						19.608.000,00					-		19.608.000,00	
		-						19.608.000,00					-		19.608.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	17.608.000,00						-	17.608.000,00	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						17.608.000,00							17.608.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	28 Orang	17.608.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	17.608.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	20 Orang	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						58.354.900,00					-		58.354.900,00	
		-						58.354.900,00					-		58.354.900,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.560.000,00						-	1.560.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	8.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	38.446.000,00						-	38.446.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.998.900,00						-	1.998.900,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	6.850.000,00						-	6.850.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.998.900,00							1.998.900,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.998.900,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.998.900,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.850.000,00							6.850.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	6.850.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.850.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						38.446.000,00							38.446.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	38.446.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	38.446.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.560.000,00							1.560.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	1.560.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.560.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	8.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	8.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						304.288.000,00					-		304.288.000,00	
		-						304.288.000,00					-		304.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	89.600.000,00						-	89.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	204.688.000,00						-	204.688.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						89.600.000,00							89.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	89.600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	89.600.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						204.688.000,00							204.688.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	5 Laporan	204.688.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	204.688.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80.510.000,00					-		80.510.000,00	
		-						80.510.000,00					-		80.510.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	12.750.000,00						-	12.750.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknva	-		-	-	61.150.000,00						-	61.150.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	6.610.000,00						-	6.610.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						61.150.000,00							61.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	61.150.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	61.150.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						12.750.000,00							12.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	12.750.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.750.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.610.000,00							6.610.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	6.610.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.610.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Bendosari
280.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**6.100.000,00**							**6.100.000,00**	
		-	-	-		-	-	6.100.000,00						-	6.100.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.100.000,00					-		3.100.000,00	
		-						3.100.000,00					-		3.100.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	3.100.000,00						-	3.100.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						3.100.000,00							3.100.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	1 Laporan	3.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.100.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						3.000.000,00					-		3.000.000,00	
		-						3.000.000,00					-		3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bendosari
281.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**25.495.000,00**							**32.062.500,00**	
		-	-	-		-	-	25.495.000,00						-	32.062.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.995.000,00					-		8.562.500,00	
		-						1.995.000,00					-		8.562.500,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	995.000,00						-	7.562.500,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						995.000,00							7.562.500,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	13 Lembaga Kemasyarakatan	995.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	7.562.500,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	13 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						23.500.000,00					-		23.500.000,00	
		-						23.500.000,00					-		23.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	22.500.000,00						-	22.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						22.500.000,00							22.500.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	14 Lembaga Kemasyarakatan	22.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	22.500.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bendosari
282.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**4.000.000,00**							**4.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.000.000,00					-		3.000.000,00	
		-						3.000.000,00					-		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bendosari
283.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**10.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						10.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	20 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Bendosari
284.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**18.000.000,00**							**18.000.000,00**	
			-	-		-	-	18.000.000,00						-	18.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						18.000.000,00					-		18.000.000,00	
		-						18.000.000,00					-		18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	11.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	13 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	4 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	2 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	4 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Bendosari
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						11.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	11.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	11.000.000,00	Kecamatan Bendosari
		Kelurahan Jombor						**629.179.540,00**							**619.179.540,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**629.179.540,00**							**619.179.540,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**629.179.540,00**							**619.179.540,00**	
285.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**66.859.450,00**							**56.859.450,00**	
			-	-		-	-	66.859.450,00						-	56.859.450,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						15.559.450,00					-		5.559.450,00	
		-						15.559.450,00					-		5.559.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.560.000,00						-	1.560.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	500.000,00						-	500.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	999.450,00						-	999.450,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					999.450,00							999.450,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	999.450,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	999.450,00	Kelurahan Jombor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kelurahan Jombor
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Jombor
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kelurahan Jombor
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.560.000,00							1.560.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	1.560.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.560.000,00	Kelurahan Jombor
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Kelurahan Jombor
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00						-	0,00		
		-					0,00						-	0,00		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Jombor
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.400.000,00						-	40.400.000,00		
		-					40.400.000,00						-	40.400.000,00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	37.900.000,00						-	37.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.500.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kelurahan Jombor
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					37.900.000,00							37.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	37.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	37.900.000,00	Kelurahan Jombor
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Jombor
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.900.000,00						-	10.900.000,00		
		-					10.900.000,00						-	10.900.000,00		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	9.900.000,00						-	9.900.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					9.900.000,00							9.900.000,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	9.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	9.900.000,00	Kelurahan Jombor

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kelurahan Jombor
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Jombor
286.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**560.320.090,00**							**560.320.090,00**	
			-	-		-	-	560.320.090,00						-	560.320.090,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						549.320.090,00					-		549.320.090,00	
		-						549.320.090,00					-		549.320.090,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	496.820.000,00						-	496.820.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	50.000.090,00						-	50.000.090,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kelurahan Jombor
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						50.000.090,00							50.000.090,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	50.000.090,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.090,00	Kelurahan Jombor
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						496.820.000,00							496.820.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	496.820.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	496.820.000,00	Kelurahan Jombor
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						11.000.000,00					-		11.000.000,00	
		-						11.000.000,00					-		11.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	-	-	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kelurahan Jombor
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kelurahan Jombor
287.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.000.000,00**							**1.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kelurahan Jombor
288.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.000.000,00**							**1.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	0 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kelurahan Jombor
		Kecamatan Polokarto						**3.243.906.000,00**							**3.284.117.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.243.906.000,00**							**3.284.117.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.243.906.000,00**							**3.284.117.000,00**	
289.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.161.406.000,00**							**3.179.117.000,00**	
			-	-		-	-	3.161.406.000,00						-	3.179.117.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	12 Dokumen	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	4.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.731.717.000,00					-		2.731.717.000,00	
		-						2.731.717.000,00					-		2.731.717.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	89.760.000,00						-	89.760.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.637.957.000,00						-	2.637.957.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.637.957.000,00							2.637.957.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	16 Orang/bulan	2.637.957.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.637.957.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						89.760.000,00							89.760.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	89.760.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	89.760.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	-	-						1.000.000,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	50 Orang	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	1.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						78.197.000,00					-		80.400.000,00	
	-	-						78.197.000,00					-		80.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	2.160.000,00						-	2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.720.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	61.832.500,00						-	63.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	2.200.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.484.500,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.484.500,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.484.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.500.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	5.500.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						61.832.500,00							63.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	61.832.500,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	63.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							2.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.200.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.160.000,00							2.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	2.160.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	2.200.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.720.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	3.720.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	4.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						263.312.000,00					-		276.000.000,00	
	-	-						263.312.000,00					-		276.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	90.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	168.312.000,00						-	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	90.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						168.312.000,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	168.312.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	170.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.180.000,00					-		80.000.000,00	
	-	-						77.180.000,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	58.180.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	9.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						58.180.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	58.180.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	60.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Polokarto

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	24 Unit	9.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Polokarto
290.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**7.500.000,00**							**9.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	7.500.000,00						-	9.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.500.000,00					-		3.000.000,00	
		-						2.500.000,00					-		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Akselerasi Inovasi dan Pengembangan Akses Kesejahteraan Masyarakat		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
291.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**25.000.000,00**							**27.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	25.000.000,00						-	27.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	17 Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						20.000.000,00					-		21.000.000,00	
		-						20.000.000,00					-		21.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	17.500.000,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						17.500.000,00							18.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	18.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	17 Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
292.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**7.500.000,00**							**9.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	7.500.000,00						-	9.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksanamya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						2.500.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						2.500.000,00					-		3.000.000,00	
		-						2.500.000,00					-		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
293.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**10.000.000,00**							**22.000.000,00**	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	22.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						10.000.000,00					-		22.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	10.000.000,00						-	12.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	75 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Polokarto
294.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**32.500.000,00**							**38.000.000,00**	
			-	-		-	-	32.500.000,00						-	38.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						32.500.000,00					-		38.000.000,00	
		-						32.500.000,00					-		38.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	20.000.000,00						-	23.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Polokarto

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						20.000.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	23.000.000,00	Kecamatan Polokarto
		Kecamatan Mojolaban						**3.243.433.232,00**							**3.288.519.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.243.433.232,00**							**3.288.519.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.243.433.232,00**							**3.288.519.500,00**	
295.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.178.433.232,00**							**3.207.519.500,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 %	334.559.232,00						-	337.480.000,00	
			-	-		-	-	2.843.874.000,00						-	2.870.039.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00					ASN di Lingkungan Kecamatan		14.500.000,00	
		-						7.500.000,00					ASN di Lingkungan Kecamatan		14.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.682.672.000,00					ASN di Lingkungan Kecamatan		2.691.000.000,00	
		-						2.682.672.000,00					ASN di Lingkungan Kecamatan		2.691.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	2.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	89.500.000,00						-	90.500.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.589.172.000,00						-	2.593.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.589.172.000,00							2.593.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	17 Orang/bulan	2.589.172.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduoan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.593.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						89.500.000,00							90.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	89.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduoan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	90.500.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduoan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduoan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduoan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	12 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduoan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.500.000,00					-		4.500.000,00	
		-						2.500.000,00					-		4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	1.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	5 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						1.500.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	25 Orang	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						55.229.500,00					-		60.039.500,00	
		-						55.229.500,00					-		60.039.500,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.190.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	11.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	34.000.000,00						-	34.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.039.500,00						-	4.039.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.039.500,00							4.039.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.039.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.039.500,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						34.000.000,00							34.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	34.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	34.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.190.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	1.190.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						11.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	220 Laporan	11.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						334.559.232,00					ASN di Lingkungan Kecamatan		337.480.000,00	
		-						334.559.232,00					ASN di Lingkungan Kecamatan		337.480.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	112.480.000,00						-	113.480.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	220.079.232,00						-	221.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						112.480.000,00							113.480.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	112.480.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	113.480.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						220.079.232,00							221.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	220.079.232,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	221.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.972.500,00					-		100.000.000,00	
		-						95.972.500,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	14.962.500,00						-	16.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	74.950.000,00						-	76.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.060.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						74.950.000,00							76.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	14 Unit	74.950.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	76.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						14.962.500,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	14.962.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	16.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	20 Unit	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.060.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	4.060.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Mojolaban
296.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**6.000.000,00**							**9.000.000,00**	
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		-	89 Angka	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Indek Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Umum	-		-	89 Angka	4.000.000,00						-	6.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		3.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						4.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						4.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
297.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**28.000.000,00**							**31.000.000,00**	
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	100 %	4.000.000,00						-	6.000.000,00	
			-	-		-	-	24.000.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		6.000.000,00	
		-						4.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						24.000.000,00					-		25.000.000,00	
		-						24.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	23.000.000,00						-	23.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						23.000.000,00							23.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	23.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	23.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
298.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.000.000,00**							**9.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	6.000.000,00						-	9.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						4.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		6.000.000,00	
		-						4.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						2.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		3.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
299.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**9.000.000,00**							**10.000.000,00**	
			-	-		-	-	9.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						9.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		10.000.000,00	
		-						9.000.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	9.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						9.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	85 Orang	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Mojolaban
300.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**16.000.000,00**							**22.000.000,00**	
			-	-		-	-	16.000.000,00						-	22.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						16.000.000,00					Pemerintah Desa dan Masyarakat		22.000.000,00	
		-						16.000.000,00					Pemerintah Desa dan Masyarakat		22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	9.000.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	3 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						2.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	8 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						9.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Mojolaban || Desa Bekonang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	11.000.000,00	Kecamatan Mojolaban
		Kecamatan Grogol						**0,00**							**3.177.000.000,00**	
		7 UNSUR KEWILAYAHAN						**0,00**							**3.177.000.000,00**	
		7.01 KECAMATAN						**0,00**							**3.177.000.000,00**	
301.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**							**3.075.500.000,00**	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	-		-	100 %	0,00						-	3.075.500.000,00	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		14.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		2.596.500.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		2.596.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	0,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	0,00						-	2.500.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	17 Orang/bulan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	90.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	16 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		3.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	23 Orang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00					-		42.000.000,00	
		-						0,00					-		42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	28.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	6 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	28.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	60 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Grogol

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		309.500.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		309.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	212.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	95.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							212.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	212.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		110.500.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		110.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	0,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	11 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	75.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	10 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	16 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Grogol
302.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**0,00**							**18.500.000,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan umum	-		-	100 %	0,00						-	18.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	0,00						-	15.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	15.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		3.500.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							1.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Grogol
303.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**							**44.000.000,00**	
			Persentase pemberdayaan kemasyarakatan desa dan kaluirahan	-		-	100 %	0,00						-	6.000.000,00	
			Persentase pemberdayaan kemasyarakatan desa dan kaluirahan	-		-	undefined undefined	0,00						-	38.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		6.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						0,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		38.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		38.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							35.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	35.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Grogol
304.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**10.500.000,00**	
			Persentase penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	-		-	100 %	0,00						-	10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		7.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	0,00						-	3.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						0,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							3.500.000,00	
		Terlaksanannya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		3.500.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	3.500.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							3.500.000,00	
		Terlaksanannya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.500.000,00	Kecamatan Grogol
305.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**0,00**							**2.000.000,00**	
			Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	-		-	100 %	0,00						-	2.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		2.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	4 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Grogol
306.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**							**26.500.000,00**	
			Persentase Administrasi tepat waktu	-		-	100 %	0,00						-	26.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		26.500.000,00	
		-						0,00					Pegawai di OPD Kecamatan Grogol		26.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	0,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	0,00						-	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						0,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	4 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	4 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Grogol
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Grogol
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	4 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						0,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.000.000,00	Kecamatan Grogol
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	4 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Grogol || Desa Madegondo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000,00	Kecamatan Grogol
		Kecamatan Baki						**3.348.790.000,00**							**3.261.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.348.790.000,00**							**3.261.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.348.790.000,00**							**3.261.500.000,00**	
307.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.293.290.000,00**							**3.036.500.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Di Kecamatan	-		-	100 %	3.293.290.000,00						-	3.036.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.000.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		10.500.000,00	
		-						13.000.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		10.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.000.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.500.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.884.132.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		2.600.000.000,00	
		-						2.884.132.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		2.600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	88.600.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.784.532.000,00						-	2.500.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.784.532.000,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	16 Orang/bulan	2.784.532.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.500.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						88.600.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	88.600.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	90.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	6.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		1.000.000,00	
		-						500.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	0 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	25 Orang	500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						47.978.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		40.000.000,00	
		-						47.978.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	9.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.978.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	2.500.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.978.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	30.978.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	4.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	9.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		0,00	
		-						0,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						272.130.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		305.000.000,00	
		-						272.130.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		305.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	70.850.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	201.280.000,00						-	230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						70.850.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	70.850.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	75.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						201.280.000,00							230.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	201.280.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	230.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75.550.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		80.000.000,00	
		-						75.550.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah		80.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknya	-		-	-	71.050.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						71.050.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	71.050.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	75.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	4 Unit	4.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Baki

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
308.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**2.000.000,00**							**5.000.000,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	-		-	90,50 Nilai	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		2.000.000,00	
		-						1.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		3.000.000,00	
		-						1.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Baki
309.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**23.500.000,00**							**35.000.000,00**	
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	100 %	23.500.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		4.000.000,00	
		-						2.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						21.500.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		31.000.000,00	
		-						21.500.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		31.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	1.500.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						20.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1.500.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	0 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
310.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**4.000.000,00**							**5.000.000,00**	
			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	-		-	100 %	4.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		3.000.000,00	
		-						3.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		2.000.000,00	
		-						1.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Baki
311.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**10.000.000,00**							**150.000.000,00**	
			Persentase pelaksanaan Kewenangan Bupati yang Didelegasikan kepada Camat	-		-	100 %	10.000.000,00						-	150.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						10.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		150.000.000,00	
		-						10.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	10.000.000,00						-	150.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						10.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	75 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	150.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	0 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
312.	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**16.000.000,00**							**30.000.000,00**	
			Persentase Adminitrasi Desa Tepat Waktu	-		-	100 %	16.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						16.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		30.000.000,00	
		-						16.000.000,00					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	14 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	4 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Baki
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						0,00							0,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Baki
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	20.000.000,00	Kecamatan Baki
		Kecamatan Gatak						**3.500.455.274,00**							**158.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.500.455.274,00**							**158.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.500.455.274,00**							**158.400.000,00**	
313.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.430.455.274,00**							**85.500.000,00**	
		-	-	-		-	-	3.430.455.274,00						-	85.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.700.000,00					-		17.500.000,00	
		-						8.700.000,00					-		17.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.200.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.500.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	2.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.200.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	16 Laporan	1.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.008.500.000,00					-		12.500.000,00	
		-						3.008.500.000,00					-		12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	1.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	1.800.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	89.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.913.900.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.913.900.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	28 Orang/bulan	2.913.900.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						89.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	1 Dokumen	89.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	1 Dokumen	1.800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	0,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	18 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.800.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	12 Dokumen	1.800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						1.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	28 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	0 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.673.274,00					-		15.000.000,00	
		-						54.673.274,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	2.040.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	4.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	39.700.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.100.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.691.274,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	5.142.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.691.274,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.691.274,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.142.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	12 Paket	5.142.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						39.700.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	39.700.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.100.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.040.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	2.040.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						270.152.000,00					-		7.500.000,00	
		-						270.152.000,00					-		7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	84.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	183.652.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						84.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	84.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						183.652.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	183.652.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						87.430.000,00					-		23.000.000,00	
		-						87.430.000,00					-		23.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	10.500.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	70.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.930.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					70.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	70.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	10.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.930.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	4.930.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	5.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	5.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
314.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**6.400.000,00**						**7.500.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	6.400.000,00						-	7.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.200.000,00					-		2.500.000,00	
		-						1.200.000,00					-		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	1.200.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1.200.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	1 Laporan	1.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						5.200.000,00					-		5.000.000,00	
		-						5.200.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	4.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.200.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						4.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	4.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.200.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.200.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
315.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**23.000.000,00**							**14.500.000,00**	
		-	-	-		-	-	23.000.000,00						-	14.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.000.000,00					-		5.500.000,00	
		-						2.000.000,00					-		5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	1.000.000,00						-	2.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						1.000.000,00							2.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						21.000.000,00					-		9.000.000,00	
		-						21.000.000,00					-		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	20.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						20.000.000,00							3.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		-	0 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
316.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**4.500.000,00**							**3.900.000,00**	
		-	-	-		-	-	4.500.000,00						-	3.900.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.000.000,00					-		2.200.000,00	
		-						3.000.000,00					-		2.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	1.500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	1.500.000,00						-	1.200.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.500.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.200.000,00	Kecamatan Gatak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.500.000,00					-		1.700.000,00	
		-						1.500.000,00					-		1.700.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	1.500.000,00						-	1.700.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1.500.000,00							1.700.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	1.700.000,00	Kecamatan Gatak
317.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**11.500.000,00**							**17.500.000,00**	
		-	-	-		-	-	11.500.000,00						-	17.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						11.500.000,00					-		17.500.000,00	
		-						11.500.000,00					-		17.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	1.500.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	0,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	10.000.000,00						-	12.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	75 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	12.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	0 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						1.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
318.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**24.600.000,00**							**29.500.000,00**	
		-	-	-		-	-	24.600.000,00						-	29.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						24.600.000,00					-		29.500.000,00	
		-						24.600.000,00					-		29.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	7.800.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	10.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	2.800.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	2.000.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						0,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	2.500.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.800.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	7.800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.800.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	1 Dokumen	2.800.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	0 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						10.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	0 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Efisiensi Infrastruktur, Konektivitas Wilayah, termasuk Konektivitas Antar Obyek Wisata, serta Implementasi Infrastruktur Hijau dan Tangguh Bencana		-	3.000.000,00	Kecamatan Gatak
		Kecamatan Kartasura						**0,00**							**6.499.936.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**0,00**							**6.499.936.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**0,00**							**6.499.936.000,00**	
319.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**							**6.231.436.000,00**	
			Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	-		-	100 %	0,00						-	6.231.436.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		6.500.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		6.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	0,00						-	750.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	0,00						-	750.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	750.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							750.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	750.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	12 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		5.537.936.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		5.537.936.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	0,00						-	171.490.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	0,00						-	5.364.446.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0,00							5.364.446.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	37 Orang/bulan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.364.446.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							171.490.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	171.490.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	5 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		45.500.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		45.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	45.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	40 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	40 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	40 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	45.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		105.500.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		105.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	2 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	70.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	254 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	18.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	4 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		0,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		371.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		371.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	118.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	50 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							118.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	118.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	250.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		165.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kecamatan Kartasura		165.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Kartasura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	100.000.000,00	Kecamatan Kartasura
320.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**0,00**							**4.500.000,00**	
			Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	-		-	100 %	0,00						-	4.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		2.000.000,00	
		-						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	4 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		2.500.000,00	
		-						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	500.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Kartasura
321.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**							**60.000.000,00**	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 %	0,00						-	60.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0,00					Pemerintah Desa, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		9.000.000,00	
		-						0,00					Pemerintah Desa, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						0,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	10 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						0,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-		-	4 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0,00					Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		51.000.000,00	
		-						0,00					Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		51.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	12 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Kartasura
322.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**8.000.000,00**	
			Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	-		-	100 %	0,00						-	8.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		6.000.000,00	
		-						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-		-	1 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		2.000.000,00	
		-						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Neeara Reoublik Indonesia						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	4 Laporan	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Kartasura
323.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**0,00**							**172.000.000,00**	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-		-	100 %	0,00						-	172.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		172.000.000,00	
		-						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		172.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	0,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	160.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						0,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-		-	75 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	160.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						0,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	75 Orang	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-		-	12 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kecamatan Kartasura
324.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**0,00**							**24.000.000,00**	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	-		-	100 %	0,00						-	24.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0,00					Pemerintah Desa, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		24.000.000,00	
		-						0,00					Pemerintah Desa, Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kartasura		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	-	0,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	10 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-		-	10 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-		-	10 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						0,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-		-	4 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	10 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kecamatan Kartasura
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						0,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-		-	1 Dokumen	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	12.000.000,00	Kecamatan Kartasura
		Kelurahan Kartasura						**0,00**							**2.748.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**0,00**							**2.748.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**0,00**							**2.748.000.000,00**	
325.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**							**2.134.000.000,00**	
			Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	-		-	100 %	0,00						-	2.134.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Kartasura		24.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Kartasura		24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	17.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	17.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Kartasura		2.000.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Kartasura		2.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Kartasura		40.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Kartasura		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	40.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Kartasura		70.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Kartasura		70.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknya	-		-	-	0,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	18.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Kartasura

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Kelurahan Kartasura
326.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**0,00**							**0,00**	
			Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kartasura		0,00	
		-						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kartasura		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Kartasura
327.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**							**613.000.000,00**	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 %	0,00						-	10.000.000,00	
		-	-	-		-	-	0,00						-	603.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kartasura		603.000.000,00	
		-						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kartasura		603.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						0,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	3.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							200.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	200.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	400.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0,00					Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kartasura		10.000.000,00	
		-						0,00					Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kartasura		10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kelurahan Kartasura
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Kartasura
328.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**1.000.000,00**	
			Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	-		-	100 %	0,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kartasura		1.000.000,00	
		-						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kartasura		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Kartasura || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kelurahan Kartasura
		Kelurahan Ngadirejo						**0,00**							**672.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**0,00**							**672.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**0,00**							**672.500.000,00**	
329.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**							**156.500.000,00**	
			Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	-		-	100 %	0,00						-	156.500.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Ngadirejo		30.500.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Ngadirejo		30.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	0,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.0.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	20.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	0 Paket	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.500.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Ngadirejo		0,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Ngadirejo		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Ngadirejo		56.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Ngadirejo		56.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	30.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	25.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Ngadirejo		70.000.000,00	
		-						0,00					Pegawai Di OPD Kelurahan Ngadirejo		70.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	18.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	18.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	2.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	50.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
330.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**0,00**							**0,00**	
			Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Ngadirejo		0,00	
		-						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Ngadirejo		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Ngadirejo
331.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**0,00**							**515.000.000,00**	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-		-	100 %	0,00						-	10.000.000,00	
			-	-		-	-	0,00						-	505.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Ngadirejo		505.000.000,00	
		-						0,00					Stake holder, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Ngadirejo		505.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						0,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	5.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						0,00							200.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	200.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	300.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0,00					Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Ngadirejo		10.000.000,00	
		-						0,00					Lembaga Masyarakat, Organisasi Perempuan, Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Ngadirejo		10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							10.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	10.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						0,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	0,00	Kelurahan Ngadirejo
332.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**0,00**							**1.000.000,00**	
			Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	-		-	100 %	0,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					-		1.000.000,00	
		-						0,00					-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	0 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Sukoharjo || Kecamatan Kartasura || Kelurahan Ngadirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan Layanan Publik Berbasis Digital dan Reformasi Birokrasi Berbasis Inovasi		-	1.000.000,00	Kelurahan Ngadirejo
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							**11.261.646.000,00**							**12.009.500.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**11.261.646.000,00**							**12.009.500.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**11.261.646.000,00**							**12.009.500.000,00**	
333.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.502.838.000,00**							**4.732.500.000,00**	
		-	-	-		-		4.502.838.000,00						-	4.732.500.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.000.000,00					Masyarakat Sukoharjo		67.000.000,00	
		-						55.000.000,00					Masyarakat Sukoharjo		67.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	35.000.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	2.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	3 Dokumen	35.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	5.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	3.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	4.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	2.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	3.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	6.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	6.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.874.728.000,00					-		4.014.000.000,00	
		-						3.874.728.000,00					-		4.014.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	186.668.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.678.060.000,00						-	3.800.000.000,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.678.060.000,00							3.800.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	18 Orang/bulan	3.678.060.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	3.800.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						186.668.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	186.668.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	7.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	3 Laporan	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	7.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						79.000.000,00					-		92.000.000,00	
		-						79.000.000,00					-		92.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	5.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	64.000.000,00						-	70.000.000,00	
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	19 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	7.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						64.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	26 Orang	64.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	70.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	26 Orang	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						111.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		137.000.000,00	
		-						111.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Sukoharjo		137.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	4.500.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	56.000.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	36.000.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						36.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	36.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	45.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	3 Dokumen	4.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	5.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						56.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	200 Laporan	56.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	65.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	12 Dokumen	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	7.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						22.500.000,00					-		25.000.000,00	
		-						22.500.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	22.500.000,00						-	25.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	22.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						113.500.000,00					-		127.500.000,00	
		-						113.500.000,00					-		127.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	112.000.000,00						-	125.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.500.000,00						-	2.500.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	40 Laporan	1.500.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	2.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						112.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	112.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	125.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						246.610.000,00					-		270.000.000,00	
		-						246.610.000,00					-		270.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	131.510.000,00						-	145.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	115.100.000,00						-	125.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						131.510.000,00							145.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	13 Unit	131.510.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	145.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						115.100.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	115.100.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	125.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
334.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**1.514.390.000,00**							**1.612.000.000,00**	
		-	-		-	-	-	1.514.390.000,00						-	1.612.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.514.390.000,00					-		1.612.000.000,00	
		-						1.514.390.000,00					-		1.612.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	238.000.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	-		-	-	1.261.390.000,00						-	1.350.000.000,00	
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	-	5.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						238.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	1200 Orang	238.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	240.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						1.261.390.000,00							1.350.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	-		-	120 Orang	1.261.390.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	1.350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	12 Dokumen	10.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	15.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-		-	50 Orang	5.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	7.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
335.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**1.552.694.000,00**							**1.800.000.000,00**	
		-	-		-	-	-	1.552.694.000,00						-	1.800.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.552.694.000,00					-		1.800.000.000,00	
		-						1.552.694.000,00					-		1.800.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	1.552.694.000,00						-	1.800.000.000,00	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						1.552.694.000,00							1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	1600 Orang	1.552.694.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	1.800.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
336.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**935.844.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		-	-		-	-	-	935.844.000,00						-	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						935.844.000,00					-		1.000.000.000,00	
		-						935.844.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	708.559.000,00						-	750.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	227.285.000,00						-	250.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						227.285.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	800 Orang	227.285.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						708.559.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	0 Laporan	708.559.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	750.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
337.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**558.880.000,00**							**600.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	558.880.000,00						-	600.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						558.880.000,00					-		600.000.000,00	
		-						558.880.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	200.000.000,00						-	225.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	182.950.000,00						-	195.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	175.930.000,00						-	180.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						175.930.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	1400 Orang	175.930.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	180.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						182.950.000,00							195.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	600 Orang	182.950.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	195.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						200.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	300 Laporan	200.000.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	225.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
338.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**2.197.000.000,00**							**2.265.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	2.197.000.000,00						-	2.265.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						2.197.000.000,00					-		2.265.000.000,00	
		-						2.197.000.000,00					-		2.265.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	52.164.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	477.327.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	1.667.509.000,00						-	1.700.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.667.509.000,00							1.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	900 Orang	1.667.509.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	1.700.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					477.327.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	1748 Orang	477.327.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						52.164.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	12 Dokumen	52.164.000,00	-	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat dalam Keamanan dan Harmoni Sosial		-	65.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		J U M L A H						**1.647.951.855.255,69**							**1.988.053.278.469,69**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 mendasarkan pada hasil capaian kinerja Tahun 2025 dan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

6.1. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 mendasarkan pada hasil capaian kinerja tahun 2025, dan memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi saat ini. Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) adalah alat yang digunakan pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan IKU, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja mereka dan membuat keputusan yang berbasis data. Penting untuk mengetahui IKUD karena hal ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Koordinator
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60-7,45	Sekretariat Daerah
2	Rasio Gini	Angka / Indeks	0,360	Sekretariat Daerah
3	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	4,17	Sekretariat Daerah
4	PDRB per kapita	Rp Juta	62.98	Sekretariat Daerah
5	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	1.215.147,43	Sekretariat Daerah
6	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	59,17	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,42	Sekretariat Daerah
8	Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin	%	6,40 - 6,21	Sekretariat Daerah
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81	Sekretariat Daerah
10	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,5	Sekretariat Daerah

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026

6.2. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU OPD. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	PD Yang Menangani Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	**Aspek Geografi Dan Demografi**			
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IUP)	Indek	75,22	Urusan Pangan
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (IUP)	%	7,9	Urusan Pangan
3.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	94,84	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (IUP)	%	2	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	%	70,07	Urusan Lingkungan Hidup
6.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	% RT	1,50	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP)	Angka	57,5	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP)	%	54	Urusan Perhubungan
9.	Rasio Kecelakaan Transportasi Jalan	Rasio	9,87	Urusan Perhubungan
10.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	%	24,70	Urusan Lingkungan Hidup
11.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	76	Urusan Lingkungan Hidup
12.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif)	TonCO2 eq	1.215.147,43	Urusan Lingkungan Hidup
13.	Indeks Risiko Bencana (IUP)	Indek	64,1	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
14.	Indeks Ketahanan Daerah	Indek	0,69	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
15.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,98	Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB
16.	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	43,38	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.	Kepadatan Penduduk	Orang/ km^2	1.870	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**			
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60-7,45	Fungsi Penunjang Perencanaan
2.	Tingkat Kemiskinan	%	6,40 - 6,21	Fungsi Penunjang Perencanaan
3.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (IUP)	%	17,88	Fungsi Penunjang Perencanaan
4.	PDRB Per Kapita	Rp Juta	62.98	Fungsi Penunjang Perencanaan
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	%	4,10 - 3,90	Urusan Tenaga Kerja
6.	Rasio Gini	Indeks	0,360	Fungsi Penunjang Perencanaan
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,42	Fungsi Penunjang Perencanaan
8.	Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikessos)	Indeks	58,63	Urusan Sosial
9.	Usia Harapan Hidup (IUP, RIBK)	Tahun	78,32	Urusan Kesehatan
10.	Prevalensi Stunting (IUP, RIBK)	%	15,2	Urusan Kesehatan
11.	Jumlah Kematian Ibu (IUP, RIBK)	orang	10	Urusan Kesehatan
12.	Jumlah Kematian Balita (RIBK)	orang	106	Urusan Kesehatan
13.	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (RIBK)	%	40	Urusan Kesehatan
14.	Cakupan imunisasi bayi lengkap (RIBK)	%	98	Urusan Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	PD Yang Menangani Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (RIBK)	%	81,7	Urusan Kesehatan
16.	Persentase Kecamatan dengan Peningkatan Aktivitas Fisik Cukup (RIBK)	%	58,33	Urusan Kesehatan
17.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (*treatment coverage*) (IUP)	%	91	Urusan Kesehatan
18.	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis *(treatment success rate)* (IUP, RIBK)	%	89	Urusan Kesehatan
19.	Cakupan Kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (IUP)	%	98,75	Urusan Kesehatan
20.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP)	Tahun	10,46	Urusan Pendidikan
21.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,35	Urusan Pendidikan
22.	Harapan Lama Sekolah (IUP)	Tahun	13,97	Urusan Pendidikan
23.	Skor Kemampuan Numerasi SD (IUP)	Nilai	54,68	Urusan Pendidikan
24.	Skor Kemampuan Numerasi SMP (IUP)	Nilai	70,22	Urusan Pendidikan
25.	Skor Kemampuan Literasi SD (IUP)	Nilai	66,07	Urusan Pendidikan
26.	Skor Kemampuan Literasi SMP (IUP)	Nilai	80,40	Urusan Pendidikan
27.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (IUP)	%	17,00	Urusan Pendidikan
28.	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (IUP)	%	89,97	Urusan Pendidikan
29.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–15	%	99,72	Urusan Pendidikan
30.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–18 Kesetaraan	%	41,31	Urusan Pendidikan
31.	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	85,49	Urusan Pendidikan
32.	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	82,90	Urusan Pendidikan
33.	Iklim Inklusivitas (SD)	Indeks	60,93	Urusan Pendidikan
34.	Iklim Inklusivitas (SMP)	Indeks	60,63	Urusan Pendidikan
35.	Iklim Keamanan (SD)	Indeks	76,56	Urusan Pendidikan
36.	Iklim Keamanan (SMP)	Indeks	73,62	Urusan Pendidikan
37.	Iklim Kebinekaan (SD)	Indeks	75,04	Urusan Pendidikan
38.	Iklim Kebinekaan (SMP)	Indeks	74,26	Urusan Pendidikan
39.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan Kebudayaan (IUP)	%	54,02	Urusan Pendidikan
40.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)	%	31,96	Urusan Kebudayaan
41.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (IUP)	orang	30.352	Urusan Kebudayaan
42.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (IUP)	%	36,50	Urusan Kebudayaan
43.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,5	Urusan Perpustakaan
44.	Tingkat pemanfaatan Perpustakaan (IUP)	%	0,60	Urusan Perpustakaan
45.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (IUP)	%	43,11	Urusan Tenaga Kerja
46.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	68	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	PD Yang Menangani Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	68	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
48.	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) (IUP)	Indeks	71,67	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
49.	Indeks Ketimpangan Gender (IUP)	Indeks	0,159	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
50.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	66	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
51.	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	0,533	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
52.	Indeks Zakat Nasional/IZN (Baznas)	Indeks	0,78	Fungsi Pendukung Sekretariat Daeerah
III	**Daya Saing**			
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,17	Fungsi Penunjang Penilitian dan Pengembangan
2.	Angka Ketergantungan	%	43,38	Urusan Tenaga Kerja
3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP)	%	0,36	Urusan Perindusrtian
4.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (IUP)	%	4,09	Urusan Pariwisata
5.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	Orang	130	Urusan Pariwisata
6.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,1397	Urusan Pariwisata
7.	Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP)	%	3,57	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
8.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (IUP)	%	1,52	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,80	Urusan Tenaga Kerja
10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	%	61,70	Urusan Tenaga Kerja
11.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	68	Fungsi Penunjang Penilitian dan Pengembangan
12.	Kapabilitas Inovasi (Bagian dari IDSD) (IUP)	Angka	4,11	Fungsi Penunjang Penilitian dan Pengembangan
13.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (IUP)	%	23,21	Urusan Penanaman Modal
14.	Ekspor Barang dan Jasa	%	16,05	Urusan Perdagangan
15.	Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	69,95	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
16.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (IUP)	%	94,63	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
17.	Indeks Desa	Indeks	0,824	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
18.	Persentase Desa Mandiri (IUP)	%	50,67	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
19.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (IUP)	%	0,71	Fungsi Penunjang Keuangan
20.	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabuapten/Kota Per PDRB (IUP)	%	1,76	Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
21.	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB (IUP)	%	2,97	Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
22.	*Return on Aset (ROA)* BUMD (IUP)	%	4,82	Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
23.	Disparitas Harga	%	± 10	Urusan Perdagangan
24.	Tingkat Inflasi	%	2,5 ± 1	Urusan Perdagangan
25.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	%	4,69	Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
26.	Nilai Produksi Sektor Pertanian (Rupiah)	Rupiah	43.437.500	Urusan Pertanian
27.	Prosentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan (%)	%	0,55	Urusan Kelautan dan Perikanan
28.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	produk	80	Urusan Perindustrian

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	PD Yang Menangani Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IV	**Pelayanan Umum**			
1.	Indeks Reformasi Hukum (IUP)	Indeks	86,4	Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (IUP) / Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	4,48 / 2,30	Urusan Komunikasi Dan Informatika
3.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (IUP)	%	81,50	Urusan Komunikasi Dan Informatika
4.	Indeks Pelayanan Publik (IUP)	Indeks	4,61	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
5.	Indeks Integritas Nasional (IUP)	Indeks	81,06	Fungsi Pengawasan
6.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	77,4	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
7.	Persentase Penegakan Perda	%	97,80	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
8.	Persentase Capaian Aksi HAM	%	98,00	Setda (Bagian Hukum)
9.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	77,40	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
10.	Jumlah Kejadian Konflik SARA (IUP)	Kasus	0	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
11.	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	92,46	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
12.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	63,5	Urusan Kearsipan
13.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	83	Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
14.	Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	72	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
15.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	80	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,80	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
17.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	81	Unsur Penunjang Perencanaan
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	78,9	Unsur Penunjang Keuangan
19.	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,765	Unsur Penunjang Kepegawaian
20.	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3	Unsur Penunjang Pengawasan
21.	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Indeks	3	Unsur Penunjang Pengawasan
V	**Indikator Kinerja Kunci**			
A	**Pendidikan**			
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	89,97	Urusan Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,70	Urusan Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,99	Urusan Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	%	41,31	Urusan Pendidikan

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	PD Yang Menangani Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
B	**Kesehatan**			
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,16	Urusan Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	Urusan Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	Urusan Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	Urusan Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	Urusan Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	Urusan Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Urusan Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Urusan Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skriningkesehatan sesuai standar	%	100	Urusan Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	%	100	Urusan Kesehatan
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan	%	100	Urusan Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	Urusan Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	Urusan Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	Urusan Kesehatan
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	84,25	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	68	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	94,57	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,90	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	28,13	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (IUP)	%	88,45	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	PD Yang Menangani Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
D	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**			
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	14,70	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	78,96	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	14,17	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
E	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**			
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	98,70	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	97,80	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan danevakuasi korban bencana	%	100	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	70	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
7	Waktu tanggap *(response time)* penanganan kebakaran	Menit	16	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
F	**Sosial**			
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Urusan Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	Urusan Sosial
G	**Tenaga Kerja**			
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	40	Urusan Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,45	Urusan Tenaga Kerja
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	73.535	Urusan Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	46,93	Urusan Tenaga Kerja

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	PD Yang Menangani Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	83	Urusan Tenaga Kerja
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Anak**			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4,95	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk perempuan	13,55	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
I	**Pangan**			
1	Persentase Cadangan Pangan	%	39	Urusan Pangan
J	**Pertanahan**			
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	94	Urusan Pertanahan
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	0	Urusan Pertanahan
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	81	Urusan Pertanahan
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	40	Urusan Pertanahan
5	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	Urusan Pertanahan
K	**Lingkungan Hidup**			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota (IUP)	Indeks	70,07	Urusan Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	76	Urusan Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	Urusan Lingkungan Hidup
L	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	84,2	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,2	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat Daerah	8	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
M	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	PD Yang Menangani Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	100	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
N	**Pengendalian Penduduk dan KB**			
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	angka	1,50	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67,65	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	9,26	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
O	**Perhubungan**			
1	Rasio konektivitas	Indeks	0,392	Urusan Perhubungan
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota		0,639	Urusan Perhubungan
P	**Komunikasi dan Informatika**			
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	65	Urusan Komunikasi Dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	65	Urusan Komunikasi Dan Informatika
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	69,66	Urusan Komunikasi Dan Informatika
Q	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	15,95	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	18	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
R	**Penanaman Modal**			
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	4	Urusan Penanaman Modal
S	**Kepemudaan dan Olahraga**			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	21,28	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	22,76	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	60	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
T	**Statistik**			
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	Urusan Statisik
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	Urusan Statisik
U	**Persandian**			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	40	Urusan Persandian
V	**Kebudayaan**			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	10,88	Urusan Kebudayaan
W	**Perpustakaan**			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (TGM)	Indeks	72	Urusan Perpustakaan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	76,5	Urusan Perpustakaan
X	**Kearsipan**			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)	%	79	Urusan Kearsipan

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	PD Yang Menangani Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	45	Urusan Kearsipan
Y	**Perikanan**			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	15.412	Urusan Perikanan
Z	**Pariwisata**			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	2,14	Urusan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	11,16	Urusan Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	%	2,89	Urusan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,83	Urusan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	7,70	Urusan Pariwisata
AA	**Pertanian**			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ku/Ha	66,80	Urusan Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	50	Urusan Pertanian
AB	**Perdagangan**			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	Urusan Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	97,599	Urusan Perdagangan
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	82,2	Urusan Perdagangan
AC	**Perindustrian**			
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	22,81	Urusan Perindustrian
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	62,27	Urusan Perindustrian
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	70	Urusan Perindustrian
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	76	Urusan Perindustrian
AD	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota**			
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	16,73	Fungsi Penunjang Keuangan
2	Rasio PAD	%	26,85	Fungsi Penunjang Keuangan
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	Fungsi Pengawasan

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	PD Yang Menangani Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,2	Fungsi Pengawasan
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	67,34	Fungsi Penunjang Keuangan
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	Fungsi Penunjang Keuangan
AE	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota**			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	2,86	Setda-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	77,5	Setda-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	49	Setda-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	35	Setda-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
AF	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota**			
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76,31	Fungsi Penunjang Kepegawaian
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	41,97	Fungsi Penunjang Kepegawaian
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	8,25	Fungsi Penunjang Kepegawaian
AG	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota**			
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	1,11	Fungsi Penunjang Keuangan
2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	42,25	Fungsi Penunjang Keuangan
3	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/TidakA 4. Apakah nilai asset tercantum	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	Fungsi Penunjang Keuangan

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	PD Yang Menangani Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,68	Fungsi Penunjang Keuangan
AH	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota**			
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	%	100	Urusan Komunikasi dan Informatika
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	Urusan Komunikasi dan Informatika

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026

6.3. Indikator Kinerja Tematik Tahun 2027

Indikator kinerja tematik, merupakan indikator tematik sebagai ukuran keselaran tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo.. Indikator kinerja tematik adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Penetapan Indikator Kinerja Tematik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

No	Indikator Makro Pembangunan		Target Daerah Tahun 2027	Keterangan
	Indikator	Satuan		
1	Jumlah DTW Alam yang Dikembangkan	Unit	5	
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	297,132	
3	Jumlah Desa/Kampung Wisata Baru yang Dicanangkan	Unit	30	
4	Jumlah Konten Kreator yang dilatih	Orang	5	
5	Jumlah Usaha Pariwisata Ramah Muslim yang ditetapkan	Unit	5	
6	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	21,619	
7	Jumlah Penyaluran Pembiayaan Syariah	Rupiah	544 M	
8	Jumlah RPH/RPU yang Tersertifikasi Halal	Unit	2	
9	Jumlah Tukang Jagal yang Tersertifikat Halal	Orang	2	
10	Jumlah Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang Dihimpun	Rupiah	13.000. 000.000	

6.4. Indikator Kinerja Program Tahun 2027

Indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 4 Penetapan Indikator Kinerja Program Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
Pendidikan						**557.822.548.375**	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya paritisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ Sederajat	%	100	143.945.168.364	Urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ Sederajat	%	100		Urusan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	94,4		Urusan Pendidikan
			Iklim Inklusivitas (SD)	Indeks	67,91		Urusan Pendidikan
			Iklim Inklusivitas (SMP)	Indeks	60,63		Urusan Pendidikan
			Iklim Keamanan (SD)	Indeks	76,56		Urusan Pendidikan
			Iklim Keamanan (SMP)	Indeks	73,62		Urusan Pendidikan
			Iklim Kebinekaan (SD)	Indeks	75,04		Urusan Pendidikan
			Iklim Kebinekaan (SMP)	Indeks	74,26		Urusan Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	498.347.500	Urusan Pendidikan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	76,4	23.150.000	Urusan Pendidikan
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	85,90		Urusan Pendidikan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	413.355.882.511	Urusan Pendidikan
Kesehatan						**236.533.157.544**	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil risiko tinggi tertangani	%	100	76.874.398.000	Urusan Kesehatan

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
			Persentase neonatal risiko tinggi tertangani	%	100		Urusan Kesehatan
			Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	%	5,15		Urusan Kesehatan
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (RIBK)	%	39,34		Urusan Kesehatan
			Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (RIBK)	%	81,7		Urusan Kesehatan
			Persentase kecamatan dengan proporsi non-hipertensi minimal 75%	%	66		Urusan Kesehatan
			Persentase kecamatan dengan proporsi non-Diabetes Mellitus minimal 85%	%	66		Urusan Kesehatan
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (RIBK)	%	40		Urusan Kesehatan
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun (RIBK)	%	23,4		Urusan Kesehatan
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (RIBK)	%	8,2		Urusan Kesehatan
			Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90		Urusan Kesehatan
			Persentase lanjut usia mandiri (RIBK)	%	83,5		Urusan Kesehatan
			Angka Keberhasilan dan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate) (RIBK,IUP)	%	89		Urusan Kesehatan
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) (RIBK, IUP)	%	91		Urusan Kesehatan
			Persentase ODHIV on ARV tersupresi viral load	%	30		Urusan Kesehatan
			Positive Rate Malaria	%	5		Urusan Kesehatan
			Persentase kecamatan memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	%	33,33		Urusan Kesehatan

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
			Persentase Puskemas melaksanakan kegiatan surveilans	%	100		Urusan Kesehatan
			Persentase Capaian SPM RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	%	84		Urusan Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi (RIBK)	%	4,56	219.754.000	Urusan Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	93	51.138.000	Urusan Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kecamatan dengan Peningkatan Aktivitas Fisik Cukup (RIBK)	%	58,33	559.223.000	Urusan Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dinas Kesehatan)	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	158.828.644.544	Urusan Kesehatan
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						**145.730.040.422**	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	%	57	8.851.169.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap system peenyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	15,86	3.386.831.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	%	1,55	940.032.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas system drainase	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	%	8,94	7.474.257.737	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya bangunan ber PBG dan SLF	Rasio bangunan ber PBG dan SLF	%	28,11	35.000.000.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan	%	100	500.000.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	88,45	64.923.833.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga kontruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	%	100	153.158.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Tingkat Perwujudan Rencana Tata Ruang	%	85,5	1.093.216.000	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	23.407.543.685	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman						**15.550.000.000**	
	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	910.000.000	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 ha Yang Ditangani	%	100	740.719.000	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya penanganan RTLH diluar Kawasan kumuh	Persentase RTLH Diluar Kawasan Kumuh Yang Sudah Tertangani	%	100	3.405.059.000	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah	%	100	3.345.538.000	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	7.148.684.000	Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum dalam masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	98,7	6.520.000.000	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
			Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	97,8		Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
			Persentase linmas yang terlatih dan dikukuhkan	%	64		Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100		Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	18.682.000.000	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana	Cakupan Capaian Penanggulanngan Bencana	Nilai	0,69	4.048.305.000	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	6.526.515.500	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	70	1.798.000.000	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
			Cakupan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	70		Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
Sosial						**16.163.000.000**	
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Penanganan Sosial	%	100	392.000.000	Urusan Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Tertangani	%	100	6.500.000	Urusan Sosial

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PPKS Lainnya diluar HIV/ AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	310.000.000	Urusan Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	7.454.000.000	Urusan Sosial
	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	160.000.000	Urusan Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	80.000.000	Urusan Sosial
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	7.760.500.000	Urusan Sosial
Tenaga Kerja						**9.036.000.000**	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan sesuai RTK	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%	40	45.000.000	Urusan Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,45	607.808.639	Urusan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	83	295.260.000	Urusan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	46,93	247.800.000	Urusan Tenaga Kerja

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	7.204.131.361	Urusan Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak						**8.381.000.000**	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	4,95	347.786.400	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	13,55	228.124.000	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas layanan pembelajaran keluarga	Proporsi Keluarga Yang Mendapatkan Layanan Dari Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Sesuai Kebutuhan.	%	55	338.474.000	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase ketersediaan Sistem Data Gender dan Anak yang terintegrasi di tingkat daerah kabupaten/kota	%	62	25.058.000	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	63,65	89.062.000	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Menurunnya kekerasan terhadap Anak	Rasio kekerasan terhadap anak, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk anak)	Rasio	27,95	117.044.400	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	7.235.451.200	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
Pangan						**14.052.880.000**	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi kelompok untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Kelembagaan Kemandirian Pangan yang aktif	%	51	43.305.000,00	Urusan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	%	128,2	1.800.720.000,00	Urusan Pangan

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
			Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Beras	%	1,32	1.800.720.000,00	Urusan Pangan
			Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis Telur	%	3,15	1.800.720.000,00	Urusan Pangan
			Persentase Cadangan Pangan	%	39	1.800.720.000,00	Urusan Pangan
			Tingkat Konsumsi Energi	%	87,4	1.800.720.000,00	Urusan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Desa/Kelurahan Rentan/Rawan Pangan	%	4,2	550.965.000,00	Urusan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	92	90.432.000,00	Urusan Pangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	4.364.578.000,00	Urusan Pangan
Pertanahan						**177.194.000**	
	Program Penyelasaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persentase	100	47.500.000	Urusan Pertanahan
	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	100	11.565.000	Urusan Pertanahan
	Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Cakupan perencanaan penatagunaan tanah	%	78	110.000.000	Urusan Pertanahan
	Program Penyelesaian Sengket Tanah Garapan	Meningkatnya penyelesaian konflik, sengkete, dan perkara pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	%	100	8.129.000	Urusan Pertanahan
Lingkungan Hidup						**43.000.000.000**	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen perencanaan Lingkungan Hidup sesuai kebutuhan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	50	67.500.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup	Nilai Potensi Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Mitigasi Perubahan Iklim	Tonco2eq	27.500	1.037.500.000	Urusan Lingkungan Hidup

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekkaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Luas Wilayah Perkotaan	%	38,012	3.301.850.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya pengendalian B3 dan LB3	Persentase Pengendalian B3 Dan LB3 Pada Penghasil Dan Pengumpul Skala Kabupaten	%	50	18.000.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH	%	60	56.300.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan	%	60	46.850.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten Yang Diberikan	%	50	19.800.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penanganan pengaduan liingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	22.350.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	%	73,5	23.458.970.000	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	14.970.880.000	Urusan Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil						**13.050.000.000**	
	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	20	1.120.000.000	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	91		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
			Persentae Perekaman KTP-el	%	99,42		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	98,88	289.000.000	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	%	100	259.000.000	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase Ketersediaan Sistem Informasi dan Data Kependudukan yang Terintegrasi dan bisa diakses	%	100		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudkan	%	100	22.000.000	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	11.360.000.000	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						**20.500.000.000**	
	Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan Desa	Persentase Desa yang meningkat status desanya	%	14,61	263.752.000	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	%	40	54.080.000	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas Aparatur Desa dan Anggota BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan digital	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	20	2.792.985.000	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ekonomi desa dalam mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi desa	Persentase Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25,65	10.794.421.000	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	6.594.762.000	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk Dan KB						**11.105.000.000**	
	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19 Tahun)	Angka	4,48	34.269.000	Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya kepesertaan KB	Angka Pravelensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	%	67,65	10.793.585.000	Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pelayanan kebutuhan KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terenuhi (unmet need)	%	9,26	277.146.000	Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB
Perhubungan						**53.000.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Darat	Cakupan Wilayah Yang Terkoneksi Angkutan Umum	%	100	41.091.000.000	Urusan Perhubungan
			Persentase Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	7,47		Urusan Perhubungan
			V/C Rasio Di Jalan Kabupaten/Kota	Angka	0,639		Urusan Perhubungan
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Angka	-		Urusan Perhubungan
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya pengelolaan perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api Yang Ditangani	%	100	820.000.000	Urusan Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	11.089.000.000	Urusan Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika						**12.500.000.000**	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	92	1.300.000.000	Urusan Komunikasi Dan Informatika

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya llayanan public secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	65	4.000.000.000	Urusan Komunikasi Dan Informatika
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	97	7.200.000.000	Urusan Komunikasi Dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah						**17.340.952.930**	
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	42,8	53.042.283	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	%	0		Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi Yang Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	%	27,87	377.540.958	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	8,84	487.389.004	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	%	21	1.119.022.430	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha	%	12	128.387.945	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	15.175.570.310	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Penanaman Modal						**8.500.000.000**	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	100	297.407.000	Urusan Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	%	4,4	85.000.000	Urusan Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		82	116.975.000	Urusan Penanaman Modal

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	%	94	109.100.000	Urusan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal	%	91	34.850.000	Urusan Penanaman Modal
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	7.856.668.000	Urusan Penanaman Modal
Kepemudaan Dan Olahraga						**19.000.000.000**	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	22,76	4.683.500.000	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		21,28		Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah Pelatih Bersertifikasi	Orang	106	4.865.000.000	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	331		Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Jumlah Event Olahraga Yang Dilaksanakan Di Sarana Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Event	17		Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Jumlah Prestasi Kepramukaan Tingkat Internasional, Nasional Dan Provinsi Yang Diraih	Medali	10	1.434.032.000	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	8.017.468.000	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Statistik						**132.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	95,15	132.000.000	Urusan Statistik
Persandian						**617.528.167**	

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	550	617.528.167	Urusan Persandian
Kebudayaan						**1.800.000.000**	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	TTingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	65	1.550.000.000	Urusan Kebudayaan
	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya pelestarian Sejarah Lokal	Persentase Sejarah Lokal Yang Dilestarikan	%	44	82.000.000	Urusan Kebudayaan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Dan Dilestarikan	%	10,88	168.000.000	Urusan Kebudayaan
Perpustakaan						**8.190.000.000**	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningktnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Peustakaan	%	2,23	623.000.000	Urusan Perpustakaan
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	%	62,5	28.000.000	Urusan Perpustakaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	77	7.539.000.000	Urusan Perpustakaan
Kearsipan						**117.300.000**	
	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata Kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 Dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	%	79	107.300.000	Urusan Kearsipan
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepetingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	%	45	10.000.000	Urusan Kearsipan
Kelautan dan Perikanan						**1.100.000.000**	

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	412	150.000.000	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14.650	730.000.000	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya pengawasan terhadap Sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah Pembudidaya Bersertifikat NIB	Kelompok	5	20.000.000	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	26	200.000.000	Urusan Kelautan dan Perikanan
Pariwisata						1.000.000.000	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya Tarik destinasi pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	7,7	511.432.010	Urusan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya pemasaran pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	%	30,44	257.521.059	Urusan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	%	25	231.046.931	Urusan Pariwisata
Pertanian						**37.950.000.000**	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Padi	Ton	2.500	1.990.000.000	Urusan Pertanian
			Peningkatan Produksi Jagung	Ton	300		Urusan Pertanian
			Peningkatan Produksi Cabe	Ku	60		Urusan Pertanian
			Peningkatan Produksi Bawang Merah	Ku	25		Urusan Pertanian
			Peningkatan Produksi Daging	Ton	200		Urusan Pertanian
			Peningkatan Produksi Telur	Ton	30		Urusan Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Jumlah Peningkatan Luas Tanam	Ha	410	11.700.000.000	Urusan Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	37,5	465.000.000	Urusan Pertanian
			Jumlah Populasi Ternak (Animal Unit)	Ekor	21.472		Urusan Pertanian
			Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	50		Urusan Pertanian

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Gagal Panen	%	3	1.105.000.000	Urusan Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Dokumen	15	30.000.000	Urusan Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Prosentase SDM Petani yang ditingkatkan	%	3,5	1.125.000.000	Urusan Pertanian
			Persentase Peningkatan Kelembagaan Petani Dan Kenaikan Kelas Kelompok	%	2		Urusan Pertanian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan, laporan kinerja perangkat daerah dan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tepat waktu.	%	100	21.535.000.000	Urusan Pertanian
Perdagangan						**10.500.000.000**	
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Permohonan Izin Usaha Perdagangan Yang Memperoleh Rekomendasi	%	100	9.400.000	Urusan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang ditingkatkan kualitasnya	%	88,46	8.855.000.000	Urusan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Pengendalian Harga	%	100	300.000.000	Urusan Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Peningkatan Ekspor	%	16,05	525.000.000	Urusan Perdagangan
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya UTTP ber-tera sah	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	82,2	110.600.000	Urusan Perdagangan
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	%	16,05	700.000.000	Urusan Perdagangan
Perindustrian						**600.000.000**	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	96	320.000.000	Urusan Perindustrian

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri Yang Diterbitkan	%	92	110.000.000	Urusan Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, Dan Terkini	%	76	170.000.000	Urusan Perindustrian
Transmigrasi						**36.000.000**	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terpenuhinya alokasi pemberangkatan transmigrasi	Persentase pemenuhan alokasi tujuan transmigran	%	100	36.000.000	Urusan Tenaga Kerja
Sekretariat Daerah						**105.147.665.752**	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	%	100	40.656.000.000	Sekretariat Daerah
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100		Sekretariat Daerah
			Nilai EPPD (bagian pemerintahan)	Nilai/Angka	3,3835		Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	92	1.962.835.682	Sekretariat Daerah
			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	95,8		Sekretariat Daerah
			Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	3		Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Indeks PPID Setda (Bagian Prokopim)	Nilai	89	62.528.830.070	Sekretariat Daerah
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81		Sekretariat Daerah
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	39		Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD						**73.400.000.000**	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundan undangan	Ketepatan Penetapan Perda Apbd Tahun N	%	100%	28.967.606.000	Sekretariat DPRD
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100%		Sekretariat DPRD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	44.432.394.000	Sekretariat DPRD

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
Perencanaan						9.700.000.000	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	%	100	1.165.000.000	Fungsi Penunjang Perencanaan
			Persentase Keselarasan RPJMD Dengan Renstra PD	%	100		Fungsi Penunjang Perencanaan
			Persentase Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100		Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	%		431.000.000	Fungsi Penunjang Perencanaan
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang ifrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur \Dan Kewilayahan	%	100	682000000	Fungsi Penunjang Perencanaan
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian Dan SDA	%	100	295000000	Fungsi Penunjang Perencanaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	7.127.000.000	Fungsi Penunjang Perencanaan
Keuangan						**385.000.000.000**	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata Kelola keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	340.500.000.000	Fungsi Penunjang Keuangan
			Persentase Dokumen Penganggaran Yang Tepat Waktu	%	100		Fungsi Penunjang Keuangan
			Persentase Perangkat Daerah dalam hal penyerapan anggarannya berdasarkan angaran kas yang telah ditetapkan	%	100%		Fungsi Penunjang Keuangan
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata Kelola Asset Daerah	Persentase penatausahaan aset daerah yang tertib	%	100	3.000.000.000	Fungsi Penunjang Keuangan

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya tata Kelola Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	26,85	10.500.000.000	Fungsi Penunjang Keuangan
			Persentase Peningkatan Target PAD	%	3,25		Fungsi Penunjang Keuangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	31.000.000.000	Fungsi Penunjang Keuangan
Kepegawaian						**44.526.300.000**	
	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepegawaian Daerah	Persentase Teenuhinya Formasi Kebutuhan ASN	%	91,7	3.347.400.000	Fungsi Penunjang Kepegawaian
			IP ASN Dimensi Kinerja	Nilai	24,04		Fungsi Penunjang Kepegawaian
			Persentase Jabatan Yang Terisi Sesuai Syarat Jabatan	%	65		Fungsi Penunjang Kepegawaian
			IP ASN Dimensi Disiplin	Nilai	4,995		Fungsi Penunjang Kepegawaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	81,80	41.178.900.000	Fungsi Penunjang Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan						**4.668.000.000**	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan SDM	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	27,52	4.668.000.000	Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
			IP ASN Dimensi Kualifikasi Pendidikan	Nilai	20,525		Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Penelitian Dan Pengembangan						**650.000.000**	
	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	%	100	269.500.000	Fungsi Penunjang Penilitian dan Pengembangan
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	50	380.500.000	Fungsi Penunjang Penilitian dan Pengembangan
Pengawasan						**16.000.000.000**	

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	99,7	2.456.450.000	Fungsi Pengawasan
			Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	%	99,3		Fungsi Pengawasan
			Persentase OPD Yang Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP	%	100		Fungsi Pengawasan
			Persentase PDTT Yang Selesai Ditangani	%	100		Fungsi Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	%	100	2.152.190.000	Fungsi Pengawasan
			Persentase Sakip Perangkat Daerah Kategori Minimal BB	%	31		Fungsi Pengawasan
			Persentase Wajib Lapor LHKPN Yang Melapor	%	100		Fungsi Pengawasan
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Indeks	3		Fungsi Pengawasan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	11.391.360.000	Fungsi Pengawasan
Kecamatan Weru						**3.430.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	89,65	30.000.000	Kecamatan Weru
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Weru)	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	73.000.000	Kecamatan Weru
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	16.000.000	Kecamatan Weru
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	218.000.000	Kecamatan Weru

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	30.000.000	Kecamatan Weru
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	3.063.000.000	Kecamatan Weru
Kecamatan Bulu						**3.560.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	88	20.000.000	Kecamatan Bulu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100	74.500.000	Kecamatan Bulu
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	7.150.000	Kecamatan Bulu
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	224.000.000	Kecamatan Bulu
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Adminitrasi Desa tepat waktu	%	100	37.500.000	Kecamatan Bulu
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	3.196.850.000	Kecamatan Bulu
Kecamatan Tawangsari						**3.695.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	92	30.000.000	Kecamatan Tawangsari
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kecamatan Tawangsari)	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	94	83.000.000	Kecamatan Tawangsari
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	94	18.000.000	Kecamatan Tawangsari

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	94	218.080.000	Kecamatan Tawangsari
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Adminitrasi Desa tepat waktu	%	92	52.000.000	Kecamatan Tawangsari
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	3.293.920.000	Kecamatan Tawangsari
Kecamatan Nguter						**3.706.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	90,5	30.500.000	Kecamatan Nguter
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	98.000.000	Kecamatan Nguter
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	19.000.000	Kecamatan Nguter
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	223.000.000	Kecamatan Nguter
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	50.000.000	Kecamatan Nguter
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	3.285.500.000	Kecamatan Nguter
Kecamatan Sukoharjo						**40.725.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	92,75	70.000.000	Kecamatan Sukoharjo
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	17.000.000.000	Kecamatan Sukoharjo

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	160.000.000	Kecamatan Sukoharjo
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	66.000.000	Kecamatan Sukoharjo
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	140.000.000	Kecamatan Sukoharjo
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	23.289.000.000	Kecamatan Sukoharjo
Kecamatan Bendosari						**5.730.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	90,94	36.140.000	Kecamatan Bendosari
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	861.483.000	Kecamatan Bendosari
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	34.716.200	Kecamatan Bendosari
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	217.760.000	Kecamatan Bendosari
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	51.370.000	Kecamatan Bendosari
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	4.528.530.800	Kecamatan Bendosari
Kecamatan Polokarto						**4.004.900.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	89	37.700.000	Kecamatan Polokarto

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	88.500.000	Kecamatan Polokarto
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	24.000.000	Kecamatan Polokarto
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	216.200.000	Kecamatan Polokarto
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	68.000.000	Kecamatan Polokarto
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	3.570.500.000	Kecamatan Polokarto
Kecamatan Mojolaban						**3.831.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	89,5	25.000.000	Kecamatan Mojolaban
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	80.000.000	Kecamatan Mojolaban
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	16.000.000	Kecamatan Mojolaban
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	216.200.000	Kecamatan Mojolaban
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	43.500.000	Kecamatan Mojolaban
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	3.450.300.000	Kecamatan Mojolaban
Kecamatan Grogol						**3.831.000.000**	

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	100	55.000.000	Kecamatan Grogol
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	95.000.000	Kecamatan Grogol
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	30.000.000	Kecamatan Grogol
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	225.000.000	Kecamatan Grogol
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	63.000.000	Kecamatan Grogol
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	3.363.000.000	Kecamatan Grogol
Kecamatan Baki						**3.753.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	90,5	20.000.000	Kecamatan Baki
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat desa	%	100	75.000.000	Kecamatan Baki
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	15.000.000	Kecamatan Baki
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	216.000.000	Kecamatan Baki
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase administrasi desa tepat waktu	%	100	55.000.000	Kecamatan Baki

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah di kecamatan	%	100	3.372.000.000	Kecamatan Baki
Kecamatan Gatak						**3.998.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	86,25	20.000.000	Kecamatan Gatak
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	100	70.000.000	Kecamatan Gatak
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100	15.000.000	Kecamatan Gatak
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	226.000.000	Kecamatan Gatak
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Adminitrasi Desa tepat waktu	%	100	35.000.000	Kecamatan Gatak
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	3.632.000.000	Kecamatan Gatak
Kecamatan Kartasura						**8.245.000.000**	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pemerintahan kecamatan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum	%	86	54.000.000	Kecamatan Kartasura
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	100	1.310.000.000	Kecamatan Kartasura
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Capaian Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100	25.000.000	Kecamatan Kartasura
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pelaksanaan kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Camat	%	100	221.000.000	Kecamatan Kartasura

Bidang Urusan	Program PD	Outcome	Indikator	Satuan	Target 2027		PD Yang Menangani Urusan
					K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kecamatan terhadap Pemerintah Desa	Persentase Adminitrasi Desa tepat waktu	%	100	47.000.000	Kecamatan Kartasura
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	6.588.000.000	Kecamatan Kartasura
Pemerintahan Umum						**13.795.000.000**	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	84		Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	86	1.800.000.000	Pemerintahan Umum
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	77	1.330.000.000	Pemerintahan Umum
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	88	750.000.000	Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	82	3.065.000.000	Pemerintahan Umum
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	4.970.000.000	Pemerintahan Umum

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo, 2026

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang menjadi penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029. RKPD Tahun 2027 memuat prioritas pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta target kinerja dan pendanaan yang disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

RKPD Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2027, dan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, RKPD menjadi instrumen untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta menjadi acuan bagi masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027, ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah wajib menjadikan RKPD Tahun 2027 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
2. RKPD Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2027 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, standar pelayanan minimal, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Perangkat Daerah wajib mengintegrasikan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang didanai melalui APBD, APBN, bantuan keuangan pemerintah provinsi, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta sinergi pembangunan antar tingkat pemerintahan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 bersama seluruh Perangkat Daerah guna menjamin ketercapaian sasaran pembangunan daerah.

5. Masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
6. Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan secara berkala, termasuk melakukan langkah-langkah perbaikan apabila terjadi deviasi terhadap target kinerja maupun realisasi anggaran, serta menyampaikan laporan pelaksanaan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
7. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 menjadi bahan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kinerja pembangunan daerah, penyusunan Perubahan RKPD apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2028.

Demikian RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama Tahun 2027. Dengan komitmen, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2027 dapat berjalan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan sasaran pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi Kabupaten Sukoharjo sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029.

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO